



RKPD 2023



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2023



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
(sesuaikan dengan UU 23 tahun 2014)
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud yakni:
 - a. sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
 - b. sebagai instrument untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - c. sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubenur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (6) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 35

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xxix

DAFTAR GRAFIK xxx

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10

1.4 Maksud dan Tujuan I-13

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD I-13

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-40

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-75

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-191

2.1.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah II-196

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-218

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 II-218

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD II-239

2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD II-406

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-410

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah II-410

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah II-413

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-25

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-8
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023	V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	V-2
5.3 Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barru Tahun 2023	V-13
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1 Indikator Makro Pembangunan	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-2
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-10
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)	VI-12
BAB VII. PENUTUP	VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2 Kesimpulan	VII-2
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah administrasi kecamatan dan jumlah kelurahan/ desa Kabupaten Barru	II-2
Tabel 2.2	Keadaan wilayah berdasarkan ketinggian di atas Permukaan laut	II-3
Table 2.3	Keadaan wilayah berdasarkan kemiringan	II-4
Tabel 2.4	Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan	II-8
Tabel 2.5	Jenis Tanah Kabupaten Barru	II-9
Tabel 2.6	Sungai mengalir menurut Lokasi Kabupaten Barru	II-9
Tabel 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan air Kabupaten Barru	II-10
Tabel 2.8	Status daya dukung air di Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.9	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.10	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.11	Luas Arahkan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru	II-13
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan Lindung Menurut Kecamatan	II-14
Tabel 2.13	Tingkat Bencana di Kabupaten Barru	II-29
Tabel 2.14	Total Kecenderungan kejadian bencana di Kab. Barru ..	II-29
Tabel 2.15	Lokasi potensi kawasan relokasi bencana Kab. Barru ..	II-30
Tabel 2.16	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir	II-31
Tabel 2.17	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor	II-33
Tabel 2.18	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran	II-36
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Menurut kecamatan	II-36
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru	II-37
Tabel 2.21	Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Barru	II-38
Tabel 2.22	Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru	II-38
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru	II-39
Tabel 2.24	Rasio ketergantungan Kabupaten Barru	II-40
Tabel 2.25	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten	

	Barru	II-41
Tabel 2.26	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru	II-42
Tabel 2.27	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru	II-43
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru Menurut Lapangan Usaha	II-44
Tabel 2.29	Perbandingan PDRB atas harga konstan (ADHK) Dan harga berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar	II-45
Tabel 2.30	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru	II-47
Tabel 2.31	Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barru Tahun 2021	II-48
Tabel 2.32	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.33	Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 -2021	II-50
Tabel 2.34	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017 – 2021	II-52
Tabel 2.35	Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-54
Tabel 2.36	Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram	II-55
Tabel 2.37	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.38	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2019-2021 ..	II-59
Tabel 2.39	Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2019-2021	II-60
Tabel 2.40	Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.41	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021	II-64

Tabel 2.42	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.43	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.44	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 (dalam Ribu/Orang/Tahun)	II-67
Tabel 2.45	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.46	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.47	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.48	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.49	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.50	Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2021	II-74
Tabel 2.51	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2019-2021	II-74
Tabel 2.52	Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.53	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-76
Tabel 2.55	Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	

	dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-77
Tabel 2.56	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.57	Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.58	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2017-2021	II-79
Tabel 2.59	Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 .	II-80
Tabel 2.60	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.61	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.62	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten BarruTahun 2017-2021	II-82
Tabel 2.63	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 2.64	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-83
Tabel 2.65	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab.Barru Tahun 2017-2021	II-83
Tabel 2.66	Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.67	Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.68	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.69	Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-85
Tabel 2.70	Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-86
Tabel 2.71	Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2017 – 2021	II-86
Tabel 2.72	Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru	

	Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.73	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.74	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-88
Tabel 2.75	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2017-2021	II-89
Tabel 2.76	Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2017 – 2021	II-90
Tabel 2.77	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-90
Tabel 2.78	Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2.79	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-92
Tabel 2.80	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-92
Tabel 2.81	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru	II-93
Tabel 2.82	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2017 – 2021	II-93
Tabel 2.83	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-94
Tabel 2.84	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Tahun 2017 – 2021	II-94
Tabel 2.85	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-94
Tabel 2.86	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021 ...	II-95
Tabel 2.87	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-96
Tabel 2.88	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2017 – 2021	II-96
Tabel 2.89	Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-96
Tabel 2.90	Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru	

	Tahun 2017 – 2021	II-97
Tabel 2.91	Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2017 – 2021 ...	II-97
Tabel 2.92	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021 ...	II-98
Tabel 2.93	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2017 – 2021	II-98
Tabel 2.94	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-99
Tabel 2.95	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.96	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-100
Tabel 2.97	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-100
Tabel 2.98	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.99	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.100	Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.101	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.102	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab.Barru Tahun 2017 – 2021	II-103
Tabel 2.103	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-103
Tabel 2.104	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2017 – 2021	II-104
Tabel 2.105	Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-104
Tabel 2.106	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-105
Tabel 2.107	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.108	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan	

	drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m)	
	di Kabupaten Barru Tahun 2017 - 2021	II-106
Tabel 2.109	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-106
Tabel 2.110	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan	
	Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.111	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	
	Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.112	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.113	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses	
	Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.114	Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-110
Tabel 2.115	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	
	Kab.Barru Tahun 2019-2021	II-111
Tabel 2.116	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk	
	Tahun 2017-2021	II-111
Tabel 2.117	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-112
Tabel 2.118	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
	Kab.Barru Tahun 2017-2021	II-113
Tabel 2.119	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,	
	Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-113
Tabel 2.120	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	
	Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-114
Tabel 2.121	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah	
	Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
	Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.122	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021.....	II-115
Tabel 2.123	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	
	Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-116
Tabel 2.124	Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-116
Tabel 2.125	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	

	Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-117
Tabel 2.126	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.127	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.128	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-119
Tabel 2.129	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.130	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-120
Tabel 2.131	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-121
Tabel 2.132	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2.133	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-123
Tabel 2.134	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-123
Tabel 2.135	Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-124
Tabel 2.136	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2021.....	II-124
Tabel 2.137	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2021.....	II-125
Tabel 2.138	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-125
Tabel 2.139	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan	

	sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-126
Tabel 2.140	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-126
Tabel 2.141	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-126
Tabel 2.142	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-127
Tabel 2.143	Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.144	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2021	II-128
Tabel 2.145	Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.146	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.147	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-130
Tabel 2.148	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.149	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat PengawasLingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.150	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan LidupKabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-133
Tabel 2.151	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2021.....	II-133

Tabel 2.152 Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten

Barru Tahun 2021 II-133

Tabel 2.153 Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

di Kabupaten Barru Tahun 2021 II-134

Tabel 2.154 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 II-134

Tabel 2.155 Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota

Kabupaten Barru Tahun 2021..... II-134

Tabel 2.156 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 II-135

Tabel 2.157 Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 II-135

Tabel 2.158 Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten

Barru Tahun 2020-2021 II-136

Tabel 2.159 Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten

Barru Tahun 2021 II-136

Tabel 2.160 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten

Barru Tahun 2017-2021..... II-137

Tabel 2.161 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021..... II-137

Tabel 2.162 Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten

Barru Tahun 2021..... II-137

Tabel 2.163 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran

Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten

Barru Tahun 2017-2021..... II-138

Tabel 2.164 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten

Barru Tahun 2017-2021..... II-139

Tabel 2.165 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021..... II-139

Tabel 2.166 Persentase LSM Aktif Kabupaten

Barru Tahun 2017-2021 II-139

Tabel 2.167 Persentase LPM Berprestasi Kabupaten

Barru Tahun 2017-2021 II-140

Tabel 2.168 Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru

Tahun 2017-2021..... II-140

Tabel 2.169	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-140
Tabel 2.170	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-141
Tabel 2.171	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-141
Tabel 2.172	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2021	II-141
Tabel 2.173	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-142
Tabel 2.174	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2021	II-142
Tabel 2.175	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru Tahun 2021.....	II-142
Tabel 2.176	Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2017 – 2021	II-143
Tabel 2.177	Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-143
Tabel 2.178	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-144
Tabel 2.179	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-144
Tabel 2.180	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.181	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.182	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.183	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.184	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.185	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-147
Tabel 2.186	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

	disetiap Kecamatan Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021.....	II-147
Tabel 2.187	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-147
Tabel 2.188	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan	
	Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-148
Tabel 2.189	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-148
Tabel 2.190	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021.....	II-149
Tabel 2.191	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-149
Tabel 2.192	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.193	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.194	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021	II-151
Tabel 2.195	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-151
Tabel 2.196	Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru	
	Tahun 2021	II-152
Tabel 2.197	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2017-2021...	II-152
Tabel 2.198	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-153
Tabel 2.199	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru	
	Tahun 2017-2021.....	II-153
Tabel 2.200	Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru	
	Tahun 2017 – 2021	II-154
Tabel 2.201	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	
	Tahun 2017 – 2021	II-154
Tabel 2.202	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal	
	Pertahun di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-155

Tabel 2.203	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-155
Tabel 2.204	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-156
Tabel 2.205	Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-156
Tabel 2.206	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-157
Tabel 2.207	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-157
Tabel 2.208	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-158
Tabel 2.209	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2021	II-158
Tabel 2.210	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-159
Tabel 2.211	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-160
Tabel 2.212	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-160
Tabel 2.213	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-161
Tabel 2.214	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-161
Tabel 2.215	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-161
Tabel 2.216	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-162
Tabel 2.217	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-162
Tabel 2.218	Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2017-2021	II-163
Tabel 2.219	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-163
Tabel 2.220	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-164
Tabel 2.221	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	

	Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-164
Tabel 2.222	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-165
Tabel 2.223	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-165
Tabel 2.224	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-166
Tabel 2.225	Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-166
Tabel 2.226	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-166
Tabel 2.227	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2021	II-167
Tabel 2.228	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-167
Tabel 2.229	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-167
Tabel 2.230	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-168
Tabel 2.231	Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.	II-168
Tabel 2.232	PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-169
Tabel 2.233	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-169
Tabel 2.234	Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-170
Tabel 2.235	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-171
Tabel 2.236	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2017-2021	II-171
Tabel 2.237	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-171
Tabel 2.238	Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-172
Tabel 2.239	Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-173
Tabel 2.240	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru	

	Tahun 2017-2021.....	II-173
Tabel 2.241	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-174
Tabel 2.242	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-174
Tabel 2.243	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2017 -2021	II-175
Tabel 2.244	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-176
Tabel 2.245	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2017 -2021	II-178
Tabel 2.246	Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2017-2021...	II-178
Tabel 2.247	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021.....	II-178
Tabel 2.248	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-179
Tabel 2.249	Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021 .	II-179
Tabel 2.250	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-180
Tabel 2.251	Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2017-2021...	II-180
Tabel 2.252	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-181
Tabel 2.253	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2017-2021...	II-181
Tabel 2.254	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-181
Tabel 2.255	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-182
Tabel 2.256	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-183
Tabel 2.257	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-183
Tabel 2.258	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-184

Tabel 2.259	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.260	Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 -2021	II-184
Tabel 2.261	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.262	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.263	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.264	Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-191
Tabel 2.265	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-191
Tabel 2.266	Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2017 – 2021	II-192
Tabel 2.267	Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2021	II-193
Tabel 2.268	Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-193
Tabel 2.269	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru	II-193
Tabel 2.270	Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2021...	II-193
Tabel 2.271	Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021	II-194
Tabel 2.272	Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Barru Tahun 2021	II-195
Tabel 2.273	Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa Kabupaten Barru 2021	II-195
Tabel 2.274	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2.275	Produktifitas Total Daerah Tahun 2017-2021.....	II-196
Tabel 2.276	Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru.....	II-196
Tabel 2.277	Capaian Indikator Kinerja Utama 2021 Pemerintah Kabupaten Barru	II-197
Tabel 2.278	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	

	Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021.....	II-198
Tabel 2.279	Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2017-2021.....	II-211
Tabel 2.280	Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2017 s/d 2021 Berdasarkan Tujuan	II-214
Tabel 2.281	Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD	II-219
Tabel 2.282	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD	II-227
Tabel 2.283	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD	II-234
Tabel 2.284	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Barru	II-240
Tabel 3.1	Perkembangan dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024	III-31
Tabel 3.2	Perkembangan dan Proyeksi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2019	III-40
Tabel 3.3	Total Belanja Wajib Mengikat Tahun 2023	III-42
Tabel 3.4	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal	III-43
Tabel 3.5	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah	III-44
Tabel 3.6	Prioritas 1 Belanja Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Barru Tahun 2023	III-45
Tabel 3.7	Prioritas 1 Belanja Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Barru Tahun 2023	III-50
Tabel 3.8	Pagu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru	III-63
Tabel 3.9	Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2023	III-66
Tabel 4.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026	IV-2
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2021 – 2026	IV-3
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2023	IV-6
Tabel 4.4	Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023)	IV-18
Tabel 4.5	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023	IV-23
Tabel 4.6	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah,	

	issue strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab.Barru Tahun 2023.....	IV-38
Tabel 4.7	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-39
Tabel 4.8	Dukungan Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Daerah terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.....	IV-41
Tabel 4.9	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-45
Tabel 4.10	Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	IV-64
Tabel 4.11	Perbandingan Capaian 2021, Perkiraan Tahun 2022 dan Target 2023 terkait Indikator Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten	IV-94
Tabel 5.1	Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023	V-4
Tabel 5.3	Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023	V-13
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Capaian Indikator Kinerja Utama 2021, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2023	VI-2
Tabel 6.3	Asumsi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023	VI-3
Tabel 6.4	Capaian Indikator SPM Tahun 2021 dan Target Indikator SPM Tahun 2023	VI-11
Tabel 6.5	Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG) Kab. Barru Tahun 2023	VI-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan RKPD Tahun 2023	I-3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023	I-11
Gambar 1.3	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	I-12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Barru	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Barru	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Barru	II-6
Gambar 2.5	Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru	II-7
Gambar 2.6	Peta status daya dukung penyediaan air Kab. Barru ..	II-11
Gambar 2.7	Peta pengembangan kawasan strategis Kab. Barru	II-20
Gambar 2.8	Dokumentasi kejadian bencana alam di Kab. Barru ...	II-30
Gambar 2.9	Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir Kabupaten Barru	II-32
Gambar 2.10	Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kabupaten Barru	II-34
Gambar 2.11	Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran Kab. Barru	II-35
Gambar 2.12	Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2021	II-55
Gambar 4.1	Sasaran dan Indikator Pembangunan	IV-10
Gambar 4.2	Strategi pembangunan Tahun 2023	IV-11
Gambar 4.3	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	IV-12

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-45
Grafik	2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017 – 2021	II-46
Grafik	2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2021 (dlm Juta Rupiah)	II-49
Grafik	2.4	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2017 – 2021	II-51
Grafik	2.5	Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2017 – 2021	II-52
Grafik	2.6	Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 – 2021	II-53
Grafik	2.7	Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-58
Grafik	2.8	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021	II-59
Grafik	2.9	Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 – 2021	II-60
Grafik	2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021	II-61
Grafik	2.11	Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021	II-61
Grafik	2.12	Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021	II-62
Grafik	2.13	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021	II-64

Grafik	2.14	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021	II-65
Grafik	2.15	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021	II-66
Grafik	2.16	Perbandingan Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas Kab.Barru Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021	II-66
Grafik	2.17	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021 (dlm Ribu/Orang/Tahun)	II-67
Grafik	2.18	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021	II-69
Grafik	2.19	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kab. Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017 – 2021	II-70
Grafik	2.20	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 - 2021	II-71
Grafik	3.1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023	III-12
Grafik	3.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023	III-13
Grafik	3.3	Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023	III-14
Grafik	3.4	Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023	III-15
Grafik	3.5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Perkiraan Capaian	

	2022 dan target 2023	III-17
Grafik 3.6	Ratio Gini Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023	III-18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan isu-isu strategis lainnya. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan

pembangunan Kabupaten Barru tahun 2023 akan fokus pada upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barru Tahun 2021 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,77, Tingkat Kemiskinan 8.68 % , Tingkat Pengangguran Terbuka 6,7, Gini Rasio 0,36, Indeks Pembangunan Manusia 71,13 dan PDRB Perkapita (ADHB) 43,43 Juta/Rp.

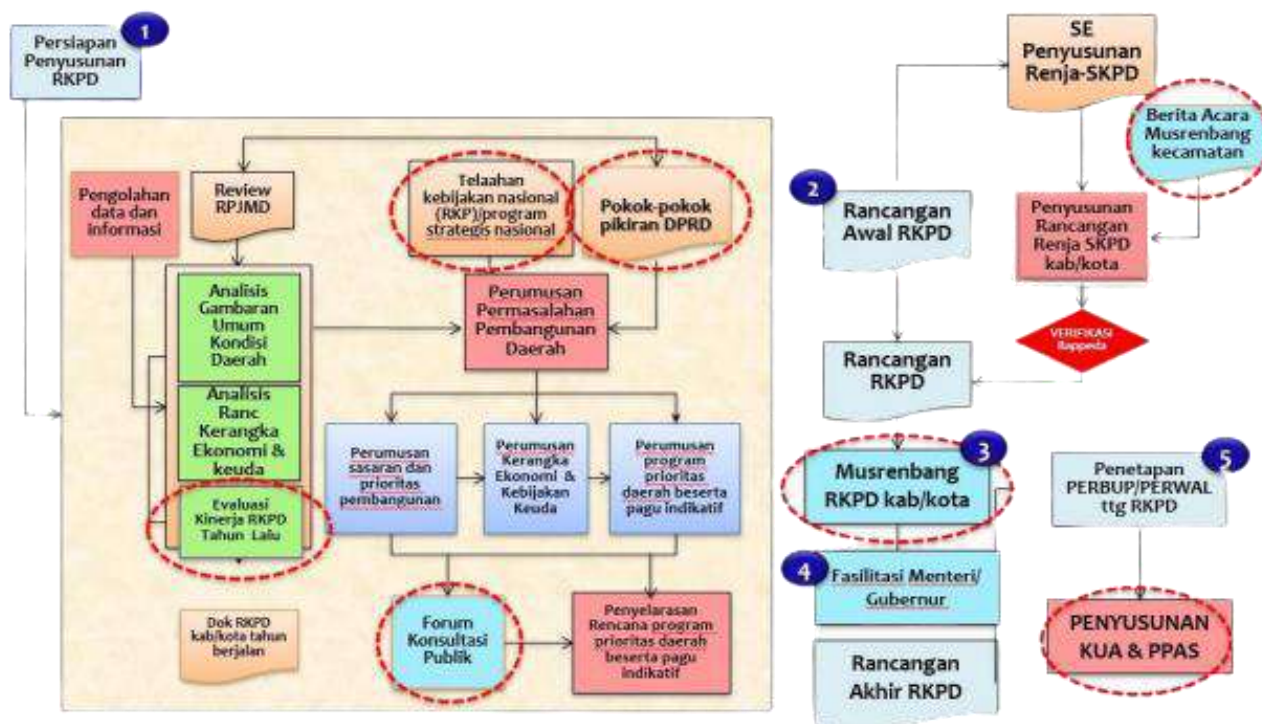
Selain memperhatikan capaian diatas, Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RKPD Kabupaten Barru, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke II (Ke-Dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Tahapan Penyusunan RKPD terdiri dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan, sebagaimana pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 30. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
 31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
47. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2009);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru 248), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 283);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
 53. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6).
57. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1).
58. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3).

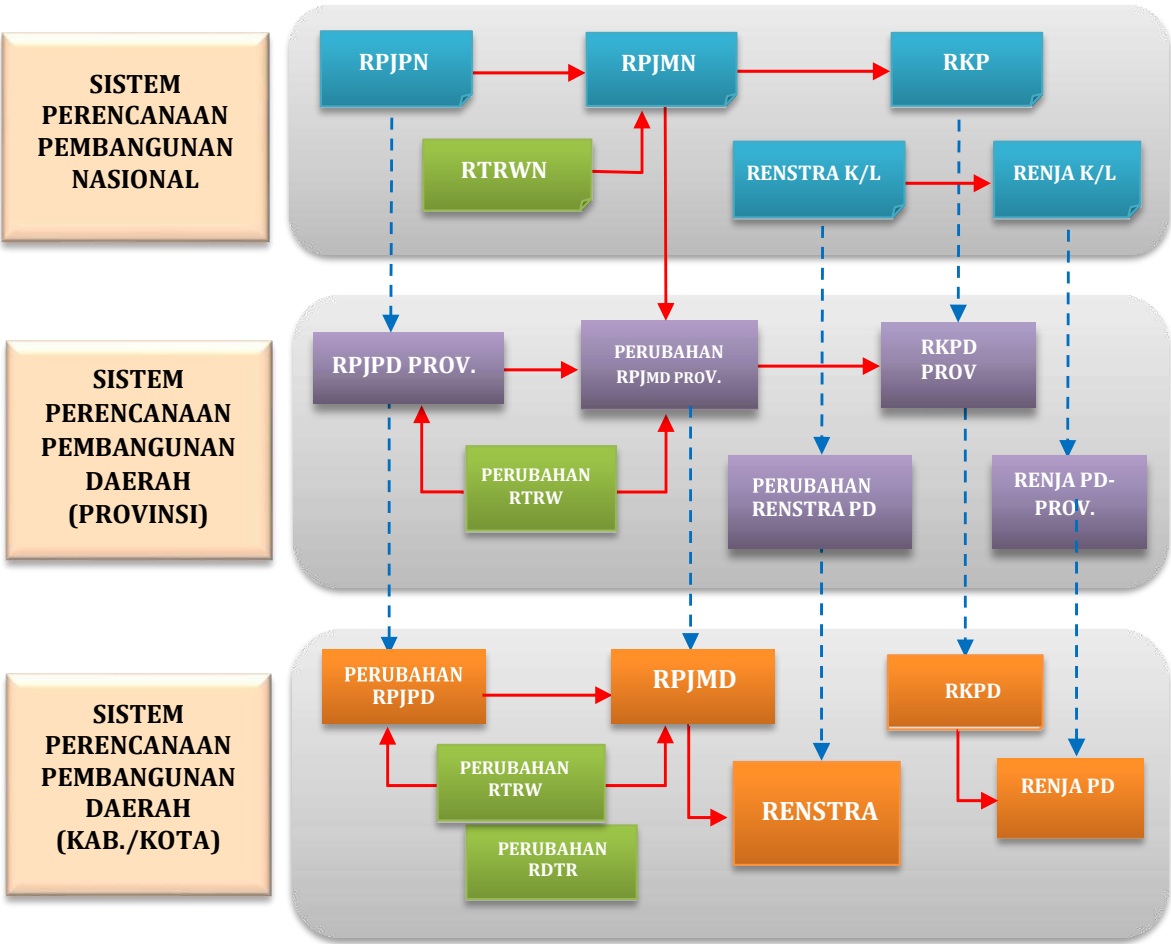
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RKPD Kabupaten Barru tahun 2023 merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru (RPJMD) Tahun 2021-2026, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 berpedoman pada RKP Tahun 2023, RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, serta RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Agar

RKPD selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023. Hubungan antar dokumen sebagaimana pada bagan berikut :

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Barru berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah

Pusat.

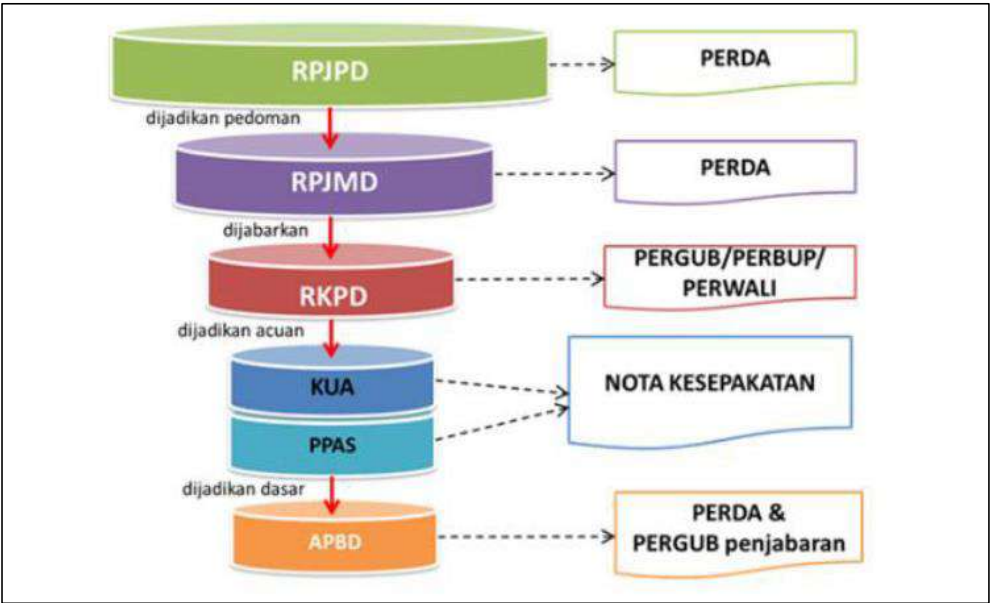
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya.

Sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten/Kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati/Walikota dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.3

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tujuan dari RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barru.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian

ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan Bdalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023.

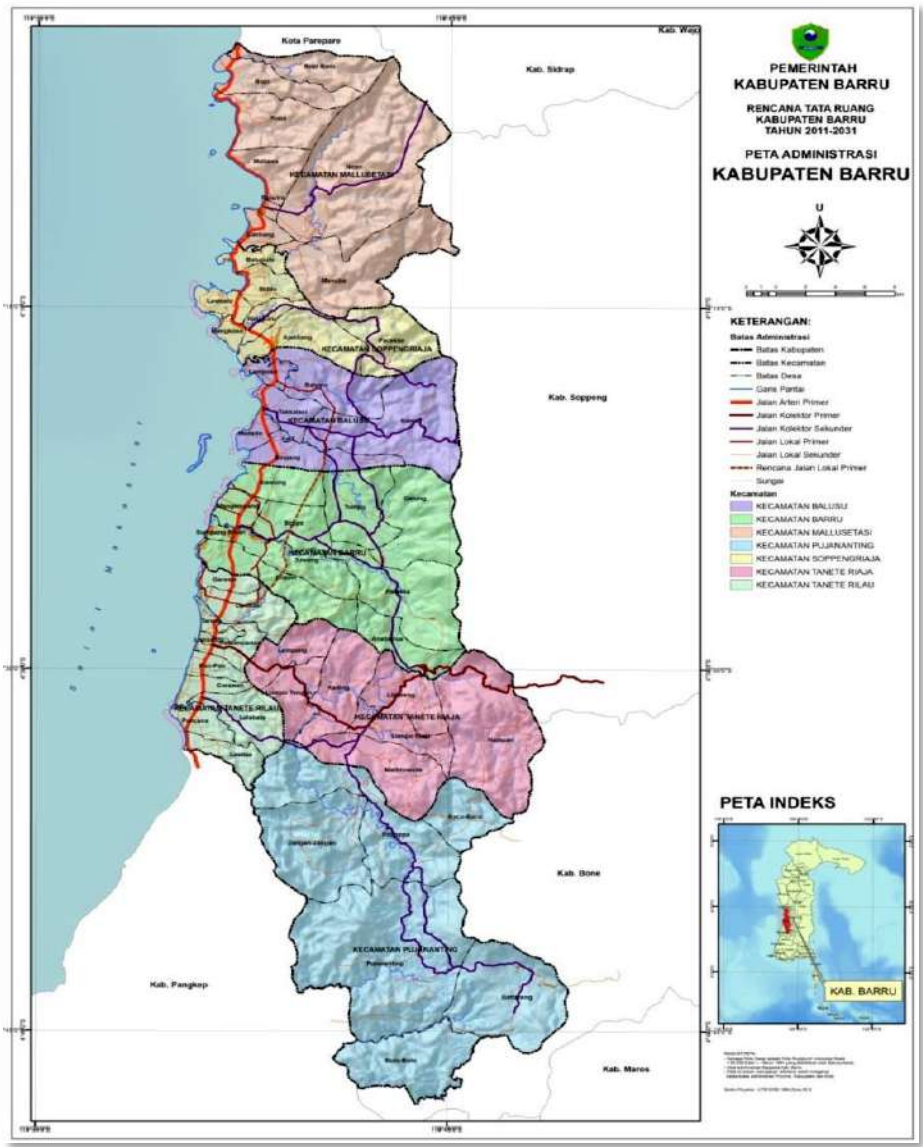
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 Kabupaten Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 Km arah utara Kota Makassar dengan luas 1174,72 Km2.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Barru Tahun 2021

Kode	Kecamatan	Desa	Kel	Luas (Km ²)	%	Jumlah Penduduk
731101	TaneteRiaja	6	1	174,29	14,83	25.968
731102	Tanete Rilau	8	2	79,17	6,74	38.111
731103	B a r r u	5	5	199,32	16,97	45.246
731104	Soppeng Riaja	5	2	78,90	6,72	18.671
731105	Mallusetasi	5	3	216,58	18,44	28.017
731106	Pujananting	6	1	314,26	26,75	13.516
731107	Balusu	5	1	112,20	9,55	19679
Total		40	15	1174,72	100	189.877

Sumber: Disdukcapil Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 Km² atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 Km² atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan.

Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°05'49" LS – 4°47'35" LS (Lintang Selatan) dan 119°35'00" – 119°49'16"

BT (Bujur Timur). Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%.

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2021

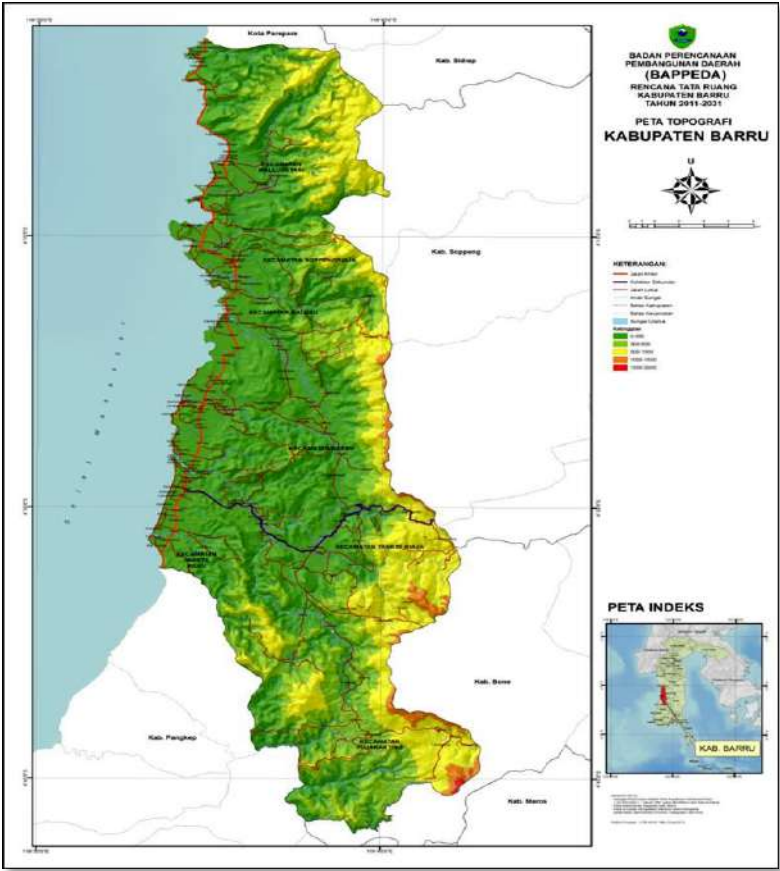
No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)					Total
		0-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	≥1000 m	
1	Tanete Riaja	1.132	4.547	6.082	5.153	515	17.429
2	Tanete Rilau	3.830	2.113	1.974	-	-	7.917
3	Barru	3.454	5.113	9.363	1.806	196	19.932
4	Soppeng Riaja	3.137	1.171	2.771	811	-	7.890
5	Malusetasi	2.583	2.4	11.100	5.575	-	21.658
6	Pujananting	-	275	21.723	8.368	1.060	31.426
7	Balusu	3.411	1.428	5.003	1.307	71	11.220
Total		17.547	17.047	58.016	23.020	1.842	117.472

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m

yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan
Kabupaten Barru Tahun 2021

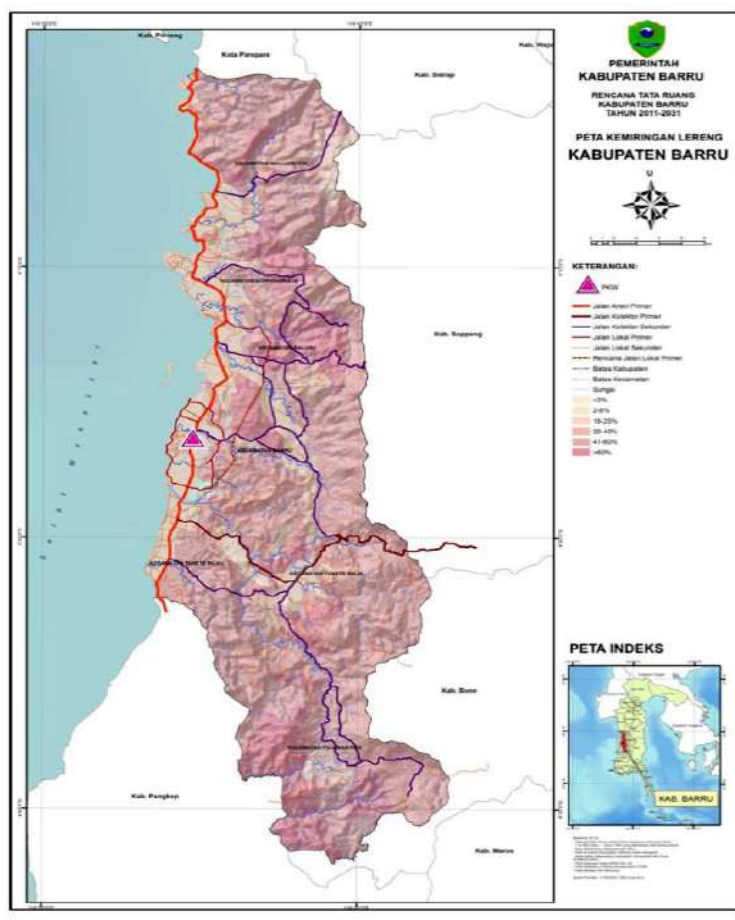
No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng				Total
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Tanete Riaja	5,93	55,52	79,85	32,99	174,29
2	Pujananting	3,38	57,30	157,18	96,40	314,26
3	Tanete Rilau	11,59	33,69	28,57	5,32	79,17
4	Barru	14,58	75,83	78,27	30,64	199,32
5	Soppeng Riaja	7,88	34,19	26,87	9,96	78,90
6	Balusu	10,84	40,00	47,64	13,72	112,20
7	Mallusetasi	6,11	43,60	93,71	73,16	216,58
TOTAL		60,31	340,13	512,09	262,19	1174,72

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah

dengan kemiringan antara 15%-40% yaitu sebesar 43,60%, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.05%. Secara spasial kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

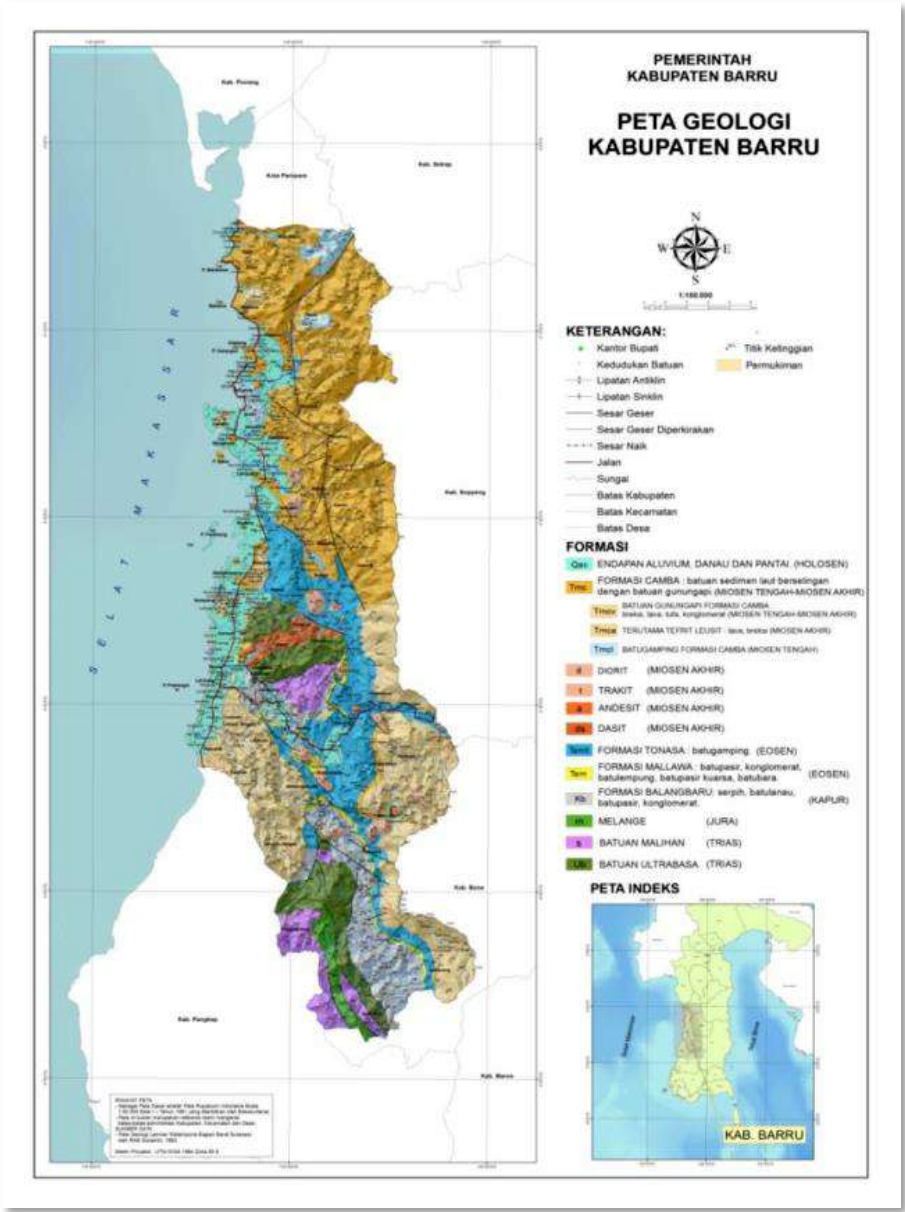
Pegunungan yang ada di Kabupaten Barru sebagian besar merupakan batuan gunung api yang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara menyempit dan merendah. Secara bersama batuan itu menyusun Formasi Camba yang tebalnya sekitar 5.000m. Sebagian besar pegunungan terbentuk dari Formasi Camba yang menindih tak selaras Formasi Tonasa.

Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan retas, bersusunan beraneka dari basal, andesit, trakit, diorit, dasit dan granodiorit yang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir.

Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danaudan pantai terdiri atas lempung, lanau, lumpur pasir dan kerikil di sepanjang sungai besar dan disepanjang pantai. Endapan pantai

setempat mengandung sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2021



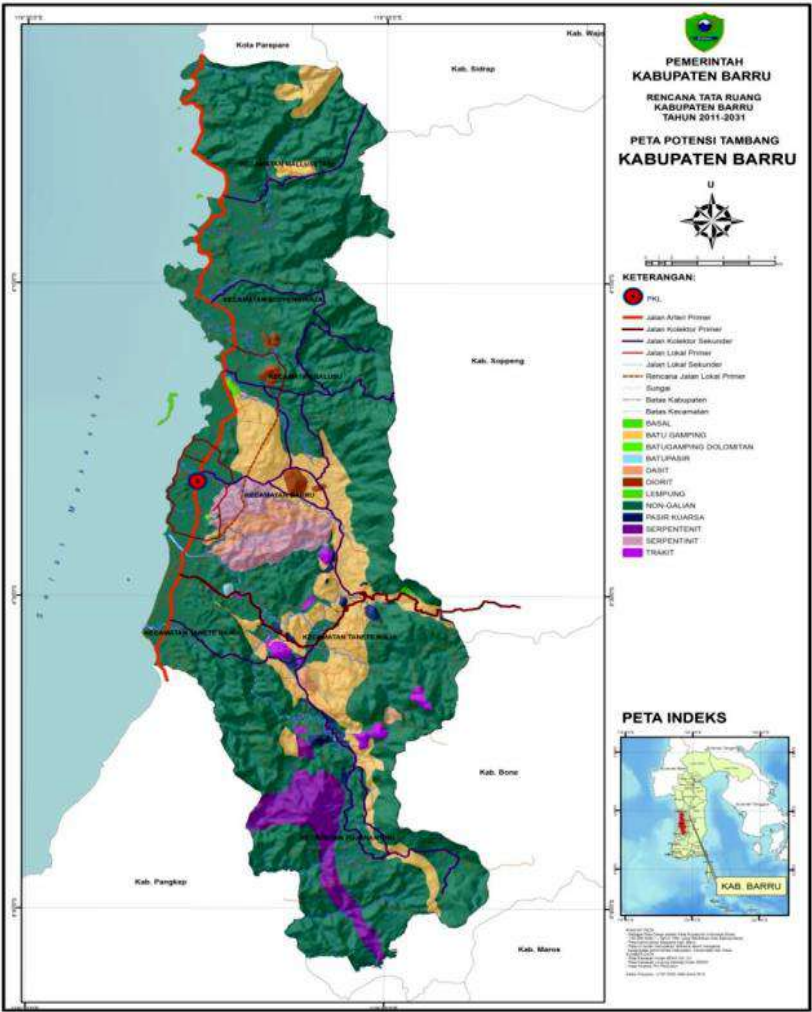
Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan metamorf yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dan arahnya

Barru dapat dilihat melalui gambar diatas.

Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilah yang menyebabkan potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari segi bahan galian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilai ekonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barru. Kromit ditemukan dalam batuan ultrabasa di timur Barru, terutama pada bagian yang berlapis berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus disebelah Selatan daerah Barru di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara.

Gambar 2.5



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

Tabel 2.4
Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan
Kabupaten Barru Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batugamping, pasir kuarsa, marmer,serpentinit, tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai
2	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit
3	Barru	Batugamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai
4	Soppeng Riaja	Pasir dan batu sungai
5	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu sungai
6	Pujananting	Batubara, kromit, batugamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu sungai
7	Balusu	Batugamping dan tanah liat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Barru 2011-2031

Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.4. JenisTanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

- a. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium,tekstur beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini didaerah daratanAluvialSungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.
- b. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, Solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofograf berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.
- c. Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal daribahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk–gumuk pasir.
- d. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuankapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur

umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari keempat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Jenis Tanah	Luas Dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Aluvial	14.659	12,48
2.	Litosol	29.043	24,72
3.	Regosol	41.254	35,12
4.	mediteran	32.516	27,68
total		117.472	100

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang memiliki persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah Aluvial sebesar 12,48%.

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi:

Tabel 2.6
Sungai Mengalir Menurut Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Daerah Aliran Sungai	Lokasi	Panjang
1	Kupa	Mallusetasi	11,25 Km
2	Lakepo	Balusu, Barru	85,97 Km
3	Lampoko	Balusu, Soppeng Riaja	113,51 Km
4	Binangae	Balusu, Barru Tanete Riaja	44,85 Km
5	Bojo	Mallusetasi	26,35 Km
6	Jampue	Mallusetasi, Soppeng Riaja	88,70 Km
7	Matajang	Tanete Rilau, Tanete Riaja, Pujananting	53,25 Km
8	Pangkajene	Pujananting	64,38 Km
9	Pelapekkae	Mallusetasi	3,93 Km
10	Segeri	Pujananting, Kab. Pangkep	35,17 Km

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Sementara itu, berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) terhadap ketersediaan air Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih kebutuhan (m3)
1	Tanete Riaja	195.661.363,46	81.654.160,28	114.007.203,18
2	Tanete Rilau	87.766.378,69	50.709.850,85	37.056.527,84
3	Barru	231.806.923,49	78.743.615,96	153.063.307,53
4	Soppeng Riaja	119.005.762,91	35.461.502,11	83.544.260,80
5	Mallusetasi	264.204.914,68	45.266.824,14	218.938.090,54
6	Pujananting	368.810.276,56	58.699.474,88	310.110.801,69
7	Balusu	159.746.620,21	41.699.448,62	118.047.171,59
Total		1.427.002.240,01	392.234.876,83	1.034.767.363,18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting dan terendah di kecamatan Tanete Rilau. Kebutuhan air dalam perikehidupan manusia dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru yaitu pada Kecamatan Tanete Riaja sebesar 81.654.160,28 m³ disebabkan tingginya kebutuhan air untuk lahan pada Kecamatan tersebut yaitu 79.542.630,68 m³ sedangkan kebutuhan air terendah yaitu pada Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 35.461.502,11 m³ dengan kebutuhan air untuk lahan sebesar 33.971.534,11 m³.

Pada tabel diatas juga diketahui bahwa masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga

Gambar 2.6
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru
Tahun 2021



Tabel 2.8						
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2021						
Kecamatan	Ambang Batas	Status Ambang Batas	Luas wilayah masih mendukung		Luas Wilayah tidak mendukung	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Tanete Riaja	1.343.976	1.296.795	17.295,18	85,8	2.852,88	14,2
Tanete Rilau	464.133	395.121	4.521,40	64,3	2.510,53	37,
Barru	1.812.225	1.730.508	16.187,82	80,1	4.025,20	19,9
Soppeng Riaja	984.197	949.057	6.579,90	81,5	1.490,69	18,5
Mallusetasi	2.560.383	2.508.465	20.840,56	91,9	1.836,05	8,1
Pujananting	3.601.887	3.576.145	30.813,80	97,8	681,26	2,2
Balusu	1.384.580	1.347.657	8.751,68	79,5	2.255,07	20,5
Total	12.151.381	11.803.748	104.990,34	87,0	15.651,68	13,0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut sudah tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air.

Sementara itu untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barru pada tahun 2017 s/d 2021 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9						
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2017–2021						
NO.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Curah Hujan (mm)	3.392	3.529	1.804	3.136	4.234
2	Hari Hujan	165	168	105	152	208

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan sepanjang tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10			
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2021			
No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ³)
1	Januari	30	839,9
2	Februari	20	397,0
3	Maret	23	626,3
4	April	11	294,0
5	Mei	11	78,1
6	Juni	14	87,0
7	Juli	9	77,3



8	Agustus	8	104,2
9	September	11	82,5
10	Oktober	17	245,4
11	November	26	542,0
12	Desember	28	860,3

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan.

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi	17.290,03	14,52
2	Hutan rakyat	5.923,35	4,97
3	Kawasan Budidaya Perikanan	2.682,69	2,25
	Tambak	2.682,69	2,25
4	Kawasan Budidaya Perkebunan	14.046,91	11,79
	Perkebunan	14.046,91	11,79
	Kawasan Budidaya Pertanian	19.880,78	16,69
5	Pertanian lahan basah	14.322,14	12,02
	Pertanian lahan kering	1.785,70	1,50
	Holtikultura	3.772,94	3,17
6	Kawasan Budidaya Peternakan	2.290,54	1,92
	Peternakan Besar	2.290,54	1,92

7	Kawasan Permukiman	3.771,64	3,17
	Permukiman	3.771,64	3,17
8	Kawasan Pertambangan	1.490,56	1,25
	Pertambangan	1.490,56	1,25
Total Kawasan Budidaya		67.376,50	56,57

SumberData: Dokumen RTRW Kabupaten Barru Tahun 2011-2031

Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan sebagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung yang memiliki skor >175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.
- Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa.
- Kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 51.969,00 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Luas Kawasan Hutan
Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Fungsi Kawasan	Luas Hutan (Ha)
1	Hutan Lindung	50.255
2	Hutan Produksi Terbatas	17.490
3	Lainnya	49.727
Total		67.745

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

- Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu.
- Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barru, SungaiBojo, SungaiKupa, SungaiNepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru.
- Kawasan sekitar mata air ditetapkan diKecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
- Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologi, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 persendan Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

Kawasan lindung yang selanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari :

- Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih 343,783Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha.
- Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng diKecamatan Balusu,

Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barru yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan.

Secara hirarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Wilayah Kota merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031, telah mengatur beberapa Potensi pengembangan wilayah yang berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru maka diperoleh potensi pengembangan wilayah sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan pertanian, di bagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut.

- a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar 12.781,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.
- b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. *Pertama*, kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan disebagian

wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kedua*, Kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Ketiga*, kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Keempat*, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru ,sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kelima*, kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

- c) Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luas sekitar 2.290,54 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

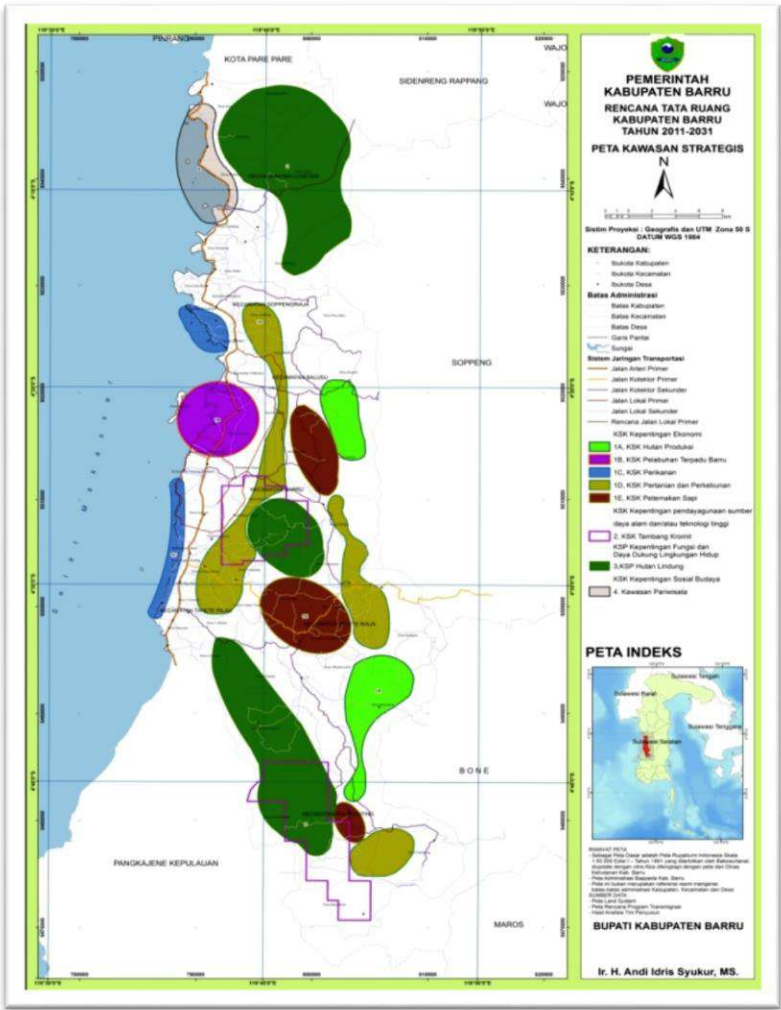
Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk komoditas sapi potong.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 14 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 972 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha.

Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 5.923,35 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain.

Gambar 2.7
Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di dalam Dokumen RTRW terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi.
- b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan pada; *Pertama*, kawasan budidaya perikanan air payau dengan

komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Kedua*, Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan disebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi.

- c) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa di Kecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jenepono, dan kota Makassar.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
- b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK.

Sementara untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Wilayah pertambangan di Kabupaten Barru terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan TaneteRiaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Ketiga*, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan

Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Keempat*, wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.

- b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam terdiri dari wilayah usaha pertambangan panas bumi yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
 - ✓ Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase- LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
 - ✓ Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H.M.Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
 - ✓ Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi;

- ✓ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting;
 - ✓ Kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:
- ✓ Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru.
 - ✓ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi.
 - ✓ Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja.
 - ✓ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting.
 - ✓ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu.
 - ✓ Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai, kawasan Celebes Canyon dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja.
- Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.

5. Sistem Perkotaan

Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

- a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian Resort Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.

- b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
- ✓ Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.
 - ✓ Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.
- c) Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari:
- ✓ Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL.
 - ✓ Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru.
- d) Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari:
- ✓ Kawasan pendidikan di bagi atas kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan perkotaan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan perkotaan Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau.
 - ✓ Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL

di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.

- ✓ Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga skala kabupaten diarahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
- e) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan permukiman seperti diuraikan berikut ini.
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, dan Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan ini ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

- 1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (*Thrust Fault*).
- 2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar.

1). Banjir

Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan dihilu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/besarnya debit air pada musim hujan.

2). Tanah Longsor

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanah dan batu batuan, longsor atau tanah longsor, runtuh atau tanah

runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

3). Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrem adalah fenomena meteorologi yang ekstrem dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

4). Gelombang Pasang

Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak.

5). Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan.

6). Kekeringan

Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Adapun wilayah di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel 2.13. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru. Adapun tahapan proses dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Barru dimulai dari fase pra bencana. Tanggap darurat, pasca bencana dan juga dipengaruhi beberapa hal yaitu tingkat sinergitas antara organisasi perangkat daerah terkait, instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Tabel 2.13
Tingkat Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2021

No	Kecamatan	Luas wilayah Terdampak Bencana dengan KLASifikasi Tinggi (Ha)											
		Banjir		Banjir Bandang		Longsor		Gelombang Pasang		Kebakaran		Kekeringan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	TaneteRiaja	1.713 Ha	190 Ha	-	NA	-	NA	-	NA	0,5 Ha	NA	150 Ha	NA
2	Tanete Rilau	2.607 Ha	147 Ha	-	NA	-	NA	12,44 km	NA	-	NA	-	NA
3	B a r r u	2.458 Ha	140 Ha	-	NA	-	NA	3,33 km	NA	0,13 Ha	NA	65 Ha	NA
4	Soppeng Riaja	2.289 Ha	101 Ha	-	NA	-	NA	-	NA	0,5 Ha	NA	250 Ha	NA
5	Mallusetasi	1.197 Ha	109 Ha	-	NA	-	NA	4,56 km	NA	0,6 Ha	NA	60 Ha	NA
6	Pujananting	-	32 Ha	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA	-	NA
7	Balusu	3.220 Ha	205 Ha	-	NA	-	NA	2,67 km	NA	-	NA	-	NA

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Data kejadian bencana di Kabupaten Barru menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecendrungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Total Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banjir	3	4	2	2	NA
2.	Longsor	4	12	-	5	NA
3.	Gelombang Pasang	-	-	-	-	NA
4.	Kebakaran Hutan	-	-	6	-	NA
5.	Kekeringan	-	1	1	1	NA
Total		7	17	8	8	

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian bencana di Kabupaten Barru dalam rentang waktu tahun 2017 – 2021, dimana pada tahun 2018 menjadi tahun yang total bencananya cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, utamanya bencana longsor, hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk melakukan antisipasi melalui kegiatan penguatan tebing didaerah rawan longsor dan pencegahan penebangan hutan di wilayah hulu.



Gambar 2.8
Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru
Tahun 2021



Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yang telah ditentukan oleh BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru
Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1.	Tanete Riaja	Longsor	Lapangan Sepak Bola Ralla
		Cuaca Ekstrim	Pasar Ralla
		Kebakaran	PKG Maruala
2.	Tanete Rilau	Longsor	Lapangan Sepak Bola Pekkae
		Cuaca Ekstrim	SMA Aroppoe
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Pancana
3.	Barru	Longsor	Lapangan Sepak Bola Sumpang Binangae
		Cuaca Ekstrim	SMA Lajulo
		Kebakaran	MAN Mangempang
4.	Soppeng Riaja	Longsor	Lahan Persawahan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Cuaca Ekstrim	Lahan Perkebunan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Siddo
5.	Balusu	Longsor	Dusun Bulu Dua, Paddumpu, Baera, Rumpiah, dan Kamiri
		Cuaca Ekstrim	Dusun Madello, Pannikiang dan Ujunge
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Madello
6.	Pujananting	Longsor	Lapangan Sepak Bola Doi-Doi
		Cuaca Ekstrim	PKG Ralla
		Kebakaran	SMP Doi-Doi
7.	Mallusetasi	Longsor	Lapangan Sepak Bola Palanro
		Cuaca Ekstrim	SMK Bojo
		Kebakaran	MAN Lakkalitta

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah area peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir dihilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial. Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi – sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221,88 Ha atau 45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barru. Kategori sedang seluas 2.211,43 Ha (1,83%) dan kategori rendah seluas 63.208,71 Ha (52,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kabupaten Barru Tahun 2021

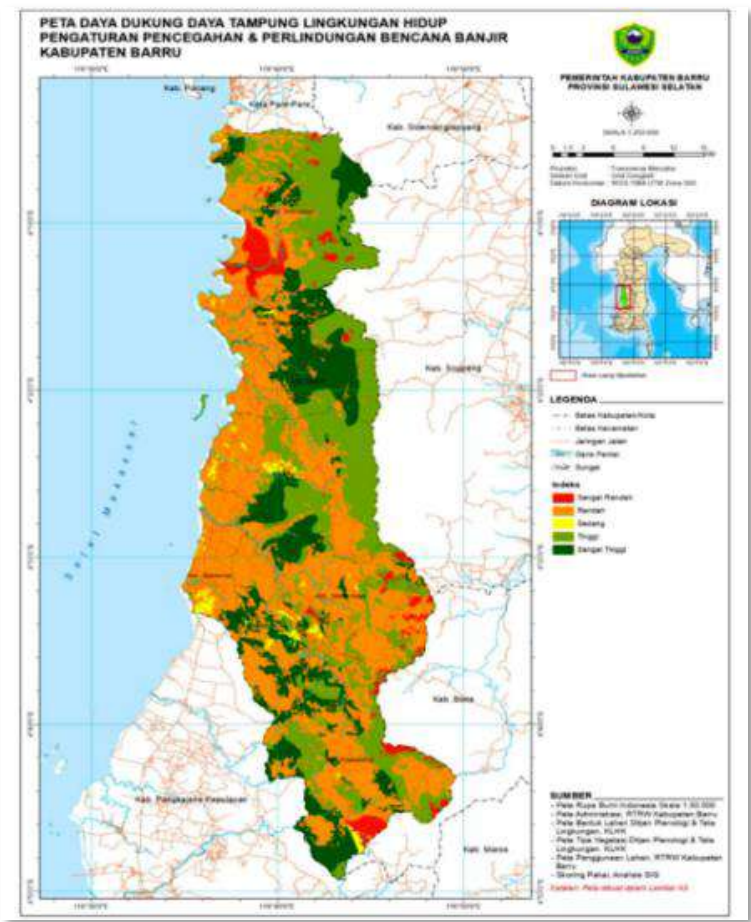
No	KECAMATAN	SANGAT RENDAH – RENDAH		SEDANG		TINGGI - SANGAT TINGGI	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Tanete Riaja	14.275,43	11,83%	201,65	0,17%	5.670,98	4,70%
2	Tanete Rilau	5.775,93	4,79%	474,80	0,39%	781,20	0,65%
3	Barru	9.235,13	7,66%	626,31	0,52%	10.351,58	8,58%
4	Soppeng Riaja	4.362,31	3,62%	205,53	0,17%	3.502,75	2,90%
5	Mallusetasi	8.878,42	7,36%	94,38	0,08%	13.703,82	11,36%
6	Pujananting	16.472,52	13,66%	559,71	0,46%	14.462,83	11,98%
7	Balusu	4.208,96	3,49%	49,05	0,04%	6.748,74	5,60%
TOTAL		63.208,70	52,41%	2.211,43	1,83%	55.221,90	45,76%

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi–sangat

tinggi) yaitu Kec. Pujananting dengan luas 14.462,83 Ha (11,98%), sedangkan kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) juga Kec. Pujananting dengan luas 16.472,52 Ha (13,66%).

Gambar 2.9
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2022

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha(19,24%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor disajikan pada tabel berikut.

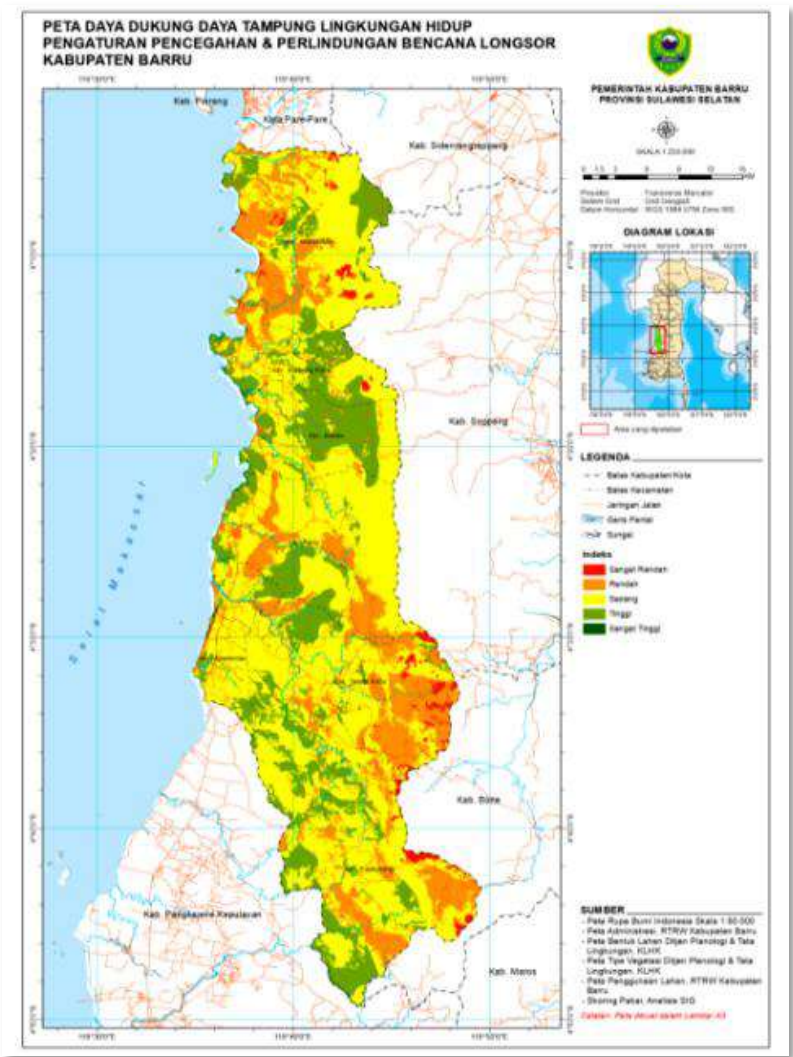
Tabel 2.17
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	12.205,75	10,12	5.623,57	4,66	2.318,74	1,92
2	Tanete Rilau	3.933,75	3,26	1.775,40	1,47	1.322,78	1,10
3	Barru	7.423,08	6,15	9.995,90	8,29 %	2.794,05	2,32
4	Soppeng Riaja	2.639,26	2,19	2.793,47	2,32 %	2.637,86	0,40
5	Mallusetasi	8.400,95	6,96	10.151,39	8,41 %	4.124,27	3,42
6	Pujananting	16.354,80	13,56	7.373,36	6,11 %	7.766,90	6,44
7	Balusu	2.286,06	1,89	3.806,72	3,16 %	4.913,96	4,07
Total		53.243,66	44,13	41.519,81	34,42	25.878,55	19,67

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

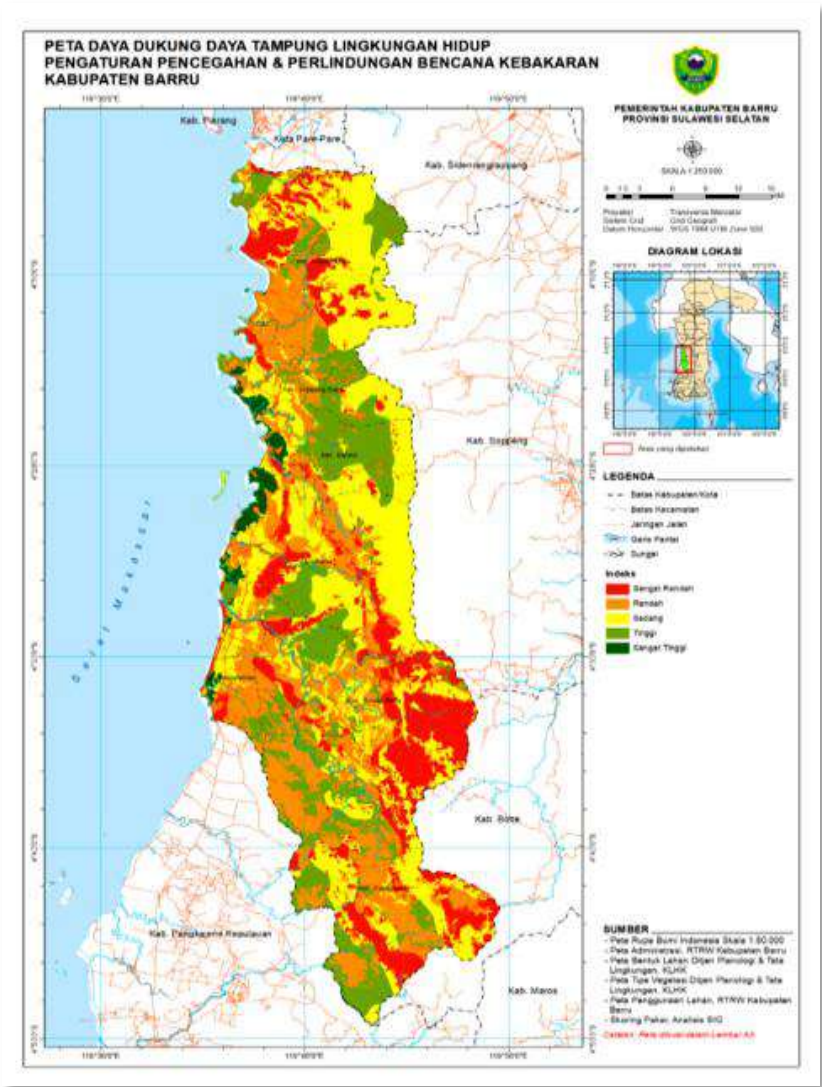
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi) yaitu kecamatan Pujananting dengan luas 7.766,90Ha (6,44%) sedangkan Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 7.408,46 Ha (6,14%).

Gambar 2.10
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2021



Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran.

Gambar 2.11
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2021



Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2022

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%).

Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	917.43	0.76%	13,358.00	11.07%	201.65	0.17%
2	Tanete Rilau	NA	0.00%	5,775.93	4.79%	474.80	0.39%
3	Barru	7.73	0.01%	9,227.40	7.65%	626.31	0.52%
4	Soppeng Riaja	433.52	0.36%	3,928.79	3.26%	205.53	0.17%
5	Mallusetasi	2,121.09	1.76%	6,757.33	5.60%	94.38	0.08%
6	Pujananting	1,289.52	1.07%	15,183.00	12.59%	559.71	0.46%
7	Balusu	NA	0.00%	4,208.96	3.49%	49.05	0.04%
Total		4,769.29	3.95%	58,439.42	48.44%	2,211.43	1.83%

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2022

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2017-2021 sebesar 0,78 persen, dimana Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2017 sebesar 174.871 jiwa meningkat menjadi sebesar 189.877 jiwa pada Tahun 2021. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk										Laju Pert. Pendudu k (%)
		2017		2018		2019		2020		2021		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Tanete Riaja	11.976	12.467	12.162	12.715	12.229	12.761	12.615	13.087	12.776	13.240	13,70
2	Tanete Rilau	17.279	17.959	17.869	18.570	18.031	18.642	18.639	19.149	18.947	19.482	20,24
3	Barru	19.933	20.704	20.910	21.657	21.216	22.061	22.018	22.728	22.287	23.053	23,88
4	Soppeng Riaja	8.317	8.926	8.675	9.337	8.769	9.409	8.944	9.604	8.981	9.664	9,82
5	Mallusetasi	12.920	13.448	13.223	13.745	13.349	13.751	13.700	14.046	13.906	14.153	14,78
6	Pujananting	6.231	6.419	6.332	6.569	6.402	6.615	6.606	6.749	6.742	6.852	7,16
7	Balusu	8.812	9.480	9.042	9.703	9.252	9.886	9.441	10.066	9.592	10.202	10,42
Total		85.468		89.403	88.213	92.296	89.248	93.125	91.963	93.231	96.646	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Data kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun

2021 dengan jumlah penduduk sebesar 189.877 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 157.93 Km².

Distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2021 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 45.340 jiwa atau 23,88% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 38.429 jiwa atau 20,24%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 28.059 jiwa atau 14,78%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 18.645 jiwa atau 13,70%, Kecamatan Balusu sebesar 19.794 jiwa atau 10,42%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.645 jiwa atau 9,82% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.594 jiwa atau 7,16%.

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
- b. Usia produktif (kelompok umurantara 15 - 64 tahun),
- c. Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2021

No	Usia Non Produktif Dan Produktif	Jenis Kelamin		Penduduk n(jiwa)	Persen (%)
		laki2	perempuan		
		n(jiwa)	n(jiwa)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	23.658	22.170	45.828	24,14
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	62.269	64.915	127.184	66.98
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	7.304	9.561	189.877	8,88
Total		93.231	96.646	189.877	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif yaitu sebesar 127.184 Orang.

Jumlah penduduk menurut jeni kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) diwilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.21
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2017 s.d 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio
		L	P	Total	
1	2017	85.468	89.403	174,871	96
2	2018	88.213	92.296	180.509	96
3	2019	89.248	93.125	182.373	96
4	2020	91.963	95.429	187.392	96
5	2021	93.231	96.646	189.877	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2021 yang sebesar 96 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 96 orang laki-laki.

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga
Kab.Barru Tahun 2017 - 2021

Kode	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
731101	Tanete Riaja	7.060	7.420	7.692	8.189	8.446
731102	Tanete Rilau	10.288	10.958	11.308	11.870	12.245
731103	Barru	12.044	12.803	13.321	14.028	14.149
731104	Soppeng Riaja	5.195	5.571	5.754	5.991	6.180
731105	Mallusetasi	7.775	8.205	8.438	8.888	9.086
731106	Pujananting	3.621	3.867	4.014	4.237	4.354
731107	Balusu	5.527	5.883	6.130	6.432	6.653
TOTAL		50.503	51.510	54.707	56.657	61.383

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2017 sebesar 50.503 RT meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 61.383 RT.

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru
Tahun 2017 s.d 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belum/Tidak Punya ijazah	55.401	59.606	60.425	62.996	63.970
2	Tamat SD	54.012	54.136	54.058	54.021	53.309
3	Tamat SMP	23.841	23.939	24.110	25.353	26.516
4	Tamat SMA	29.700	30.082	30.573	31.448	32.180
5	Diploma	2.676	2.734	2.740	2.780	2.795
6	Sarjana S1	8.715	9.432	9.849	10.143	10.425
7	Sarjana S2	509	558	590	630	657
8	Sarjana S3	17	22	24	21	25
Total		174.871	180.509	182.373	187.392	189.877

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru untuk kategori SMP hingga Sarjana S3 mengalami peningkatan, namun ironisnya penduduk yang belum/tidak punya ijazah juga meningkat.

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.24
Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	47.712	44.974	44.776	45.478	45.828
2	Jumlah Penduduk usia>64 tahun	13.562	15.285	16.340	16.275	16.865
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	61.274	60.259	61.116	61.753	62.693
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	111.493	120.250	121.257	125.639	127.184
5	Rasio ketergantungan (%)	54,96	50,11	50,40	49,15	49,29

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatannya itu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan

Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya.

Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.25
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2017 – 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.501,20	1.581,31	1.652,72	1.662,67	1.751,02
2	Pertambangan dan Penggalian	125,04	130,68	138,15	139,11	144,10
3	Industri Pengolahan	222,58	232,09	253,70	247,14	259,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	6,10	6,39	6,80	7,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,28	4,62	5,10	5,80	6,08
6	Konstruksi	648,67	714,30	785	792,83	825,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	422,90	460,26	505,36	497,56	524,82
8	Transportasi dan Pergudangan	98,83	111,50	126,16	112,19	121,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,17	43,32	48,28	48,24	50,57
10	Informasi dan Komunikasi	232,78	255,89	281,43	313,08	332,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	117,76	120,72	124,64	127,94	136,88
12	Real Estate	145,36	153,34	155,82	160,00	163,82
13	Jasa Perusahaan	1,04	1,14	1,25	1,18	1,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	309,79	338,93	375,96	371,71	376,89
15	Jasa Pendidikan	165,05	173,78	186,48	195,61	200,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102,55	108,28	117,30	125,65	134,24
17	Jasa Lainnya	27,29	30,29	33,68	31,60	34,41
Jumlah PDRB		4.169,98	4.420,93	4.797,43	4.839,12	5.069,99

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun (Miliar)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.162,34	2.333,00	2.458,99	2.528,15	2.808,89
2	Pertambangan dan Penggalan	192,71	206,58	219,09	225,39	236,21
3	Industri Pengolahan	298,48	319,94	355,33	348,63	373,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,66	6,20	6,44	6,84	7,40
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,66	6.16	6,96	7,93	8,41
6	Konstruksi	1.042,34	1.221,39	1.411,25	1.428,09	1.556,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	532,23	605,96	686,75	688,31	740,99
8	Transportasi dan Pergudangan	152.01	173,04	197,96	181,39	206,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.88	63.73	73,22	75,78	80,59
10	Informasi dan Komunikasi	257.98	289,39	322,33	359,36	383,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	184.43	197,73	211,34	217,16	239,25
12	Real Estate	207,96	226,44	233,45	241,06	247,76
13	Jasa Perusahaan	1,36	1,51	1,74	1,67	1,79
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467,86	533,93	612	616,47	630,94
15	Jasa Pendidikan	219,08	235,93	257,93	273,55	279,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133,32	145,43	162,04	180,57	198,01
17	Jasa Lainnya	41,64	47,76	54,37	51,94	57,56
Jumlah PDRB		5.961,95	6.614,10	7.271,22	7.432,30	8.057,26

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.27
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,10	35,78	35.58	35.40	33,82	34,45	34,36	34,36	34,36	34,36
2	Pertambangan dan Penggalian	3,24	3,00	3.39	3.02	3,01	2,88	2,87	2,87	2,93	2,93
3	Industri Pengolahan	5,01	5,35	5.06	5.29	4,89	5,29	5,11	5,11	4,63	4,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,14	0.10	0.14	0,09	0,13	0,14	0,14	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0.09	0.10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,10	0,10
6	Konstruksi	17,44	15,54	16.59	15.58	19,41	16,36	16,38	16,38	19,32	19,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,15	10,30	9.64	10.67	9,44	10,53	10,28	10,28	9,20	9,20
8	Transportasi dan Pergudangan	2,55	2,38	2.74	2.42	2,72	2,63	2,32	2,32	2,56	2,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00	0,94	0.99	0.95	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Informasi dan Komunikasi	4,33	5,59	4.38	5.70	4,43	5,87	6,47	6,47	4,76	4,76
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,10	2,83	3,23	2.89	2,91	2,60	2,64	2,64	2,97	2,97
12	Real Estate	3,55	3,49	3,61	3.52	3,21	3,25	3,31	3,31	3,07	3,07
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0.02	0.02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,85	7,44	7,92	7.24	8,42	7,84	7,68	7,68	7,83	7,83
15	Jasa Pendidikan	3,70	3,97	3.69	3.96	3,55	3,89	4,04	4,04	3,47	3,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,46	2.24	2.42	2,23	2,45	2,60	2,60	2,46	2,46
17	Jasa Lainnya	0,70	0,66	0.74	0.67	0,75	0,70	0,65	0,65	0,71	0,71
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sedangkan distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,48	5,34	4,52	0,6	5,31
2	Pertambangan dan Penggalian	4,44	4,51	5,72	0,69	3,59
3	Industri Pengolahan	4,66	4,27	9,31	-2,59	4,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,71	7,01	4,66	6,49	6,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,68	7,79	10,47	13,63	4,89
6	Konstruksi	11,81	10,12	9,90	1	4,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,48	8,84	9,80	-1,54	5,48
8	Transportasi dan Pergudangan	7,79	12,83	13,14	-11,07	7,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,99	10,59	11,45	-0,08	4,83
10	Informasi dan Komunikasi	9,83	9,93	9,98	11,25	6,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,51	3,25	2,65	6,99
12	Real Estate	7,10	5,49	1,62	2,68	2,39
13	Jasa Perusahaan	7,63	9,67	10,27	-5,8	4,85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	9,41	10,93	-1,13	1,40
15	Jasa Pendidikan	4,04	5,29	7,31	4,9	2,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,48	5,58	8,33	7,12	6,83
17	Jasa Lainnya	8,42	11,01	11,19	-6,18	8,89
Produk Domestik Regional Bruto		6,48	7,11	7,41	0,87	4,77

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif namun cenderung meningkat. Sementara itu perbandingan PDRB atas Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 – 2021 (MilyarRupiah)

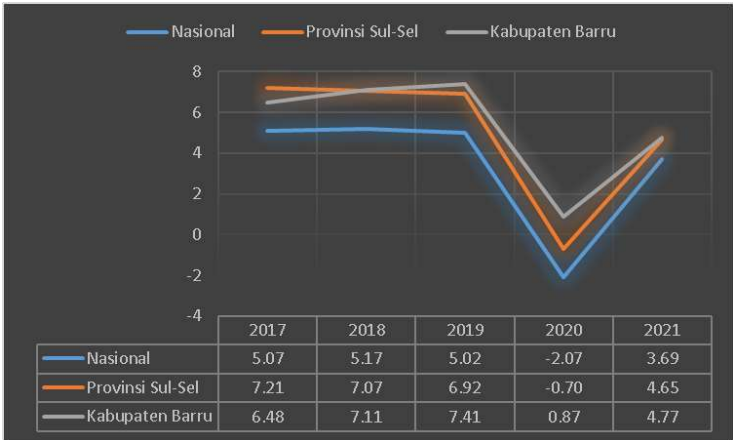
No	Kabupaten/ Kota	ADHB			ADHK		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	7.271,22	7.432,30	8.057,26	4.797,43	4.839,12	5.069,99
2	Kota Pare-pare	7.230,40	7.323,65	7.825,98	4.947,79	4.944,03	5.161,92
3	Kab. Soppeng	10.938,27	11.382,12	12.426,78	6.993,51	7.146,65	7.585,98
4	Kab.Sidrap	13.893,72	14.073,43	15.250,13	8.450,69	8.401,06	8.866,07
5	Kab. Pangkep	25.990,18	25.662,55	27.574,74	17.205,16	16.915,23	17.500,61
6	Kab. Bone	36.034,84	36.560,64	39.369,68	22.108,04	22.053,74	23.273,87

Sumber : BPS Tahun 2022

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah sekitar, Kabupaten Barru memiliki PDRB baik ADHK maupun ADHB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021

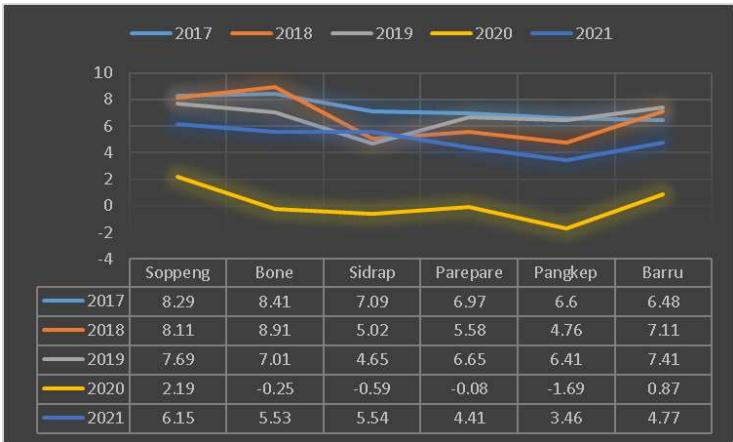


Sumber : BPS Tahun 2022

Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 4.77 setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastic hingga angka 0,87, hal ini masih lebih baik dari capaian pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun tahun 2020 terkontraksi negarif pada -2,07 dan -0,7. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid19 di tahun 2020 pelan-pelan memperlihatkan trend yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional dingga ke daerah..

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng. Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2017 lebih rendah, pada tahun 2020 berada pada posisi dua setelah Kabupaten Soppeng dan tahun 2021 pada posisi ke empat setelah Soppeng, Sidrap, dan Bone. Dan jika dicermati, diantara enam Kabupaten Kota ini, Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2017 - 2021 secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2017 - Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,27	35,27	33,82	34,02	34,86
2	Pertambangan dan Penggalian	3,23	3,12	3,01	3,03	2,93
3	Industri Pengolahan	5,01	4,84	4,89	4,69	4,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,11	0,10
6	Konstruksi	17,48	18,47	19,41	19,21	19,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,93	9,16	9,44	9,26	9,20
8	Transportasi dan Pergudangan	2,55	2,62	2,72	2,44	2,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,96	1,01	1,02	1,00
10	Informasi dan Komunikasi	4,33	4,38	4,43	4,84	4,76
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	3,09	2,99	2,91	2,92	2,97
12	Real Estate	3,55	3,42	3,21	3,24	3,07
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,85	8,07	8,42	8,29	7,83
15	Jasa Pendidikan	3,67	3,57	3,55	3,68	3,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,20	2,23	2,43	2,46
17	Jasa Lainnya	0,70	0,72	0,75	0,7	0,71
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Barru
Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		%	%	%	%	%
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,57	NA	NA	NA	NA
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	7,82	NA	NA	NA	NA
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	7,82	NA	NA	NA	NA
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB sektor Pertanian	100	NA	NA	NA	NA
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,05	NA	NA	NA	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 2.31 diatas kontribusi sektor usaha terhadap PDRB dilakukan oleh BPS terakhir pada tahun 2017, namun di tahun 2018 hingga 2021 berpatokan pada data Distribusi PDRB terhadap Lapangan Usaha atas Dasar harga berlaku dan harga konstan.

2. PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

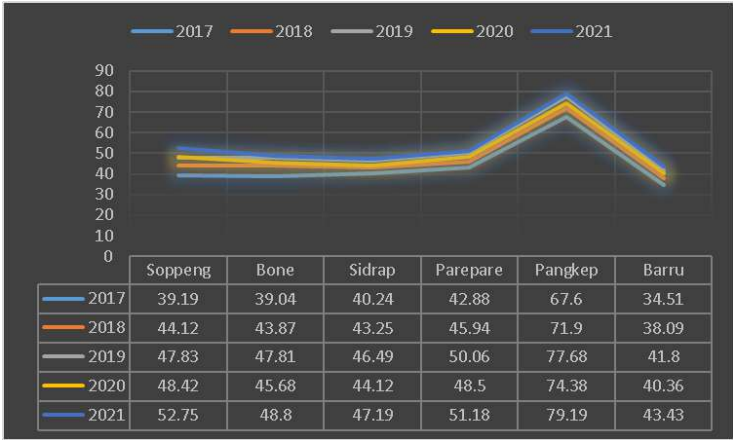
Tabel 2.32
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

Tahun	ADHB (Rp.)	ADHK (Rp.)
2017	34.508.616	24.236.438
2018	38.094.607	25.725.509
2019	41.711.191	27.520.350
2020	42.472.955	27.653.853
2021	43.429.469	27.327.826

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan (HK) terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. kondisi pandemi covid19 memang memepengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, namun beberapa sektor di Kabupaten Barru menunjukkan peningkatan, salah satunya adalah sektor pertanian. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2021 (dlm Juta Rupiah)



Sumber : BPS Tahun 2022

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

3. Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 -2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bulukumba	4,66	3,85	2,25	2,30	2,16
2	Kab. Bone	5,54	4,69	1,64	1,89	2,26
3	Kota Makassar	2,11	3,48	2,43	2,13	2,26
4	Kota Pare-pare	3,43	1,96	2,45	1,61	4,09
5	Kota Palopo	3,95	4,19	1,91	1,21	2,96

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan. Tertinggi terjadi di Kabupaten Bone dan Bulukumba. Namun pada tahun 2021 hampir semua kabupaten berimbang, hanya saja Kota Pare-Pare yang laju inflasinya meningkat dari 1,21 di tahun 2020 menjadi 4,09 pada tahun 2021, hal ini tentu menjadi perhatian Kabupaten Barru, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sangat dipengaruhi dari Kota Pare-Pare.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Barru dengan memperlihatkan inflasi yang tidak stabil atau fluktuatif, namun hal ini

masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 6.48 – 7.41 hingga tahun 2019 meskipun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun ke angka 0.87, tingginya inflasi di tahun 2021 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru hal ini dikarenakan sektor rill masih mampu terdorong untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 2.4
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Tahun 2022

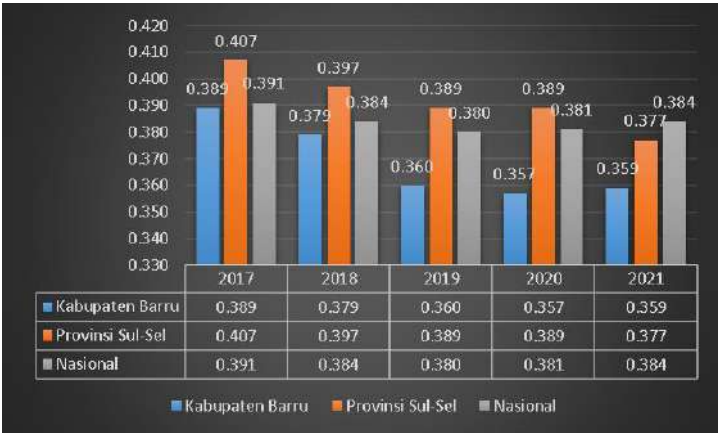
4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- 1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagaiketimpangan rendah
- 2. $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagaiketimpangan sedang(Moderat)
- 3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2017 meningkat sebesar 0.389, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0.357. Penurunan Indeks Gini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Tabel 2.34
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2017 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	0,389	0,379	0,360	0,357	0,359
2	Kota Pare-pare	0,384	0,382	0,350	0,373	0,381
3	Kab. Soppeng	0,359	0,359	0,392	0,357	0,406
4	Kab.Sidrap	0,325	0,340	0,284	0,349	0,358
5	Kab. Pangkep	0,368	0,321	0,328	0,345	0,363
6	Kab. Bone	0,386	0,412	0,366	0,404	0,383

Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan Data yang disajikan diatas, Kabupaten Barru memiliki pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar dengan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang setiap tahunnya menunjukkan trend yang semakin menurun. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2017 – tahun 2021 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi

perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar.

Pada gambar berikut menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh semakin menurunnya Indeks Gini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Gini secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.6
Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Tahun 2022

6. Indeks Williamson

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi *et al.* 2011). Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.

Menurut Rustiadi *et al.* (2011), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan

menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru
Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Ketimpangan Williamson	0.24	0.27	0.29	0,29	NA

Sumber : Data Olahan tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yang terjadi di Kabupaten Barru berdasarkan PDRB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2017 sebesar 0,24 meningkat pada tahun 2020 yang nilainya 0,29. Tahun 2021 belum dilakukan perhitungan karena sangat tergantung pada data PDRB per kecamatan, namun data tahun 2021 diasumsikan sama dengan tahun 2020. Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah dapat menekan terjadinya disparitas wilayah, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah.

Sementara untuk melihat tingkat hirarki perkembangan wilayah berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas, luas wilayah, jumlah penduduk serta jarak tempuh wilayah ke pusat pelayanan digunakan metode skalogram. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan hierarkhi wilayah oleh Struktural Analisis adalah *Guttman scales*. Metode ini mengidentifikasi hierarkhi pusat dari fasilitas umum yang dimiliki suatu wilayah. Skalogram yang merupakan penggabungan atau penyederhanaan Skala Guttman. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu Tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya.

Indeks Perkembangan Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kelas hirarki, yaitu; hirarki I (tinggi), hirarki II (sedang), hirarki III (rendah). Penentuannya didasarkan pada nilai hasil standar deviasi IPW dan nilai

rataannya. Nilai yang didapat untuk selang hirarki dan digunakan untuk menentukan kelas hirarki dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

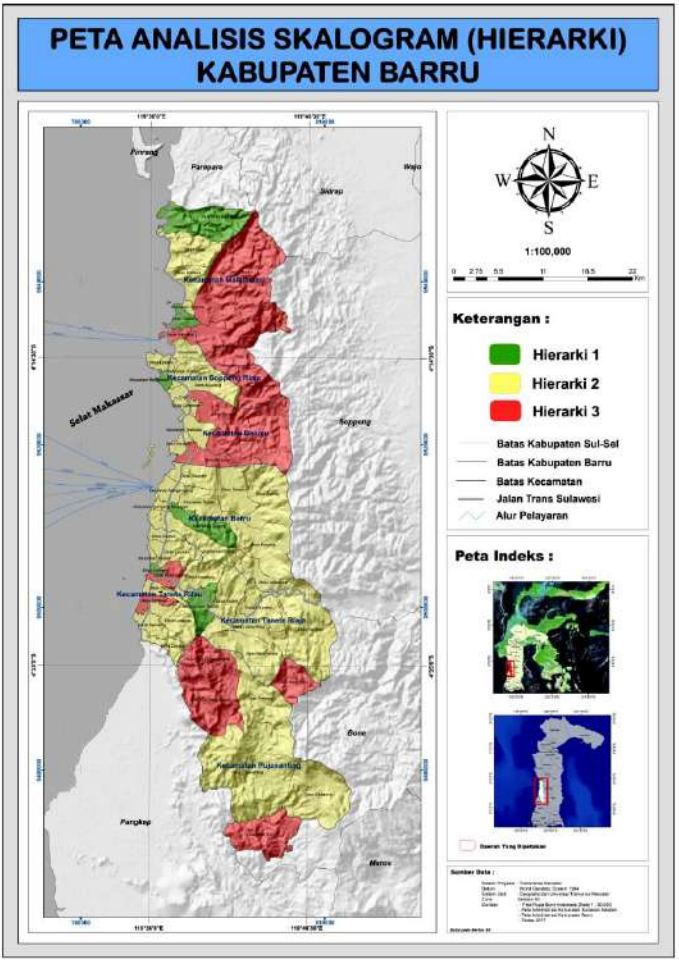
Tabel 2.36
Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram

No	Kelas	Nilai Selang (x)	Tingkat Hirarki
1	Hirarki I	$X > [\text{rataaan} + (\text{St Dev.IPW})]$	Tinggi
2	Hirarki II	$\text{rataaan} < X < (\text{St Dev.IPW})$	Sedang
3	Hirarki III	$X < \text{rataaan}$	Rendah

Tingkat perkembangan desa/kelurahan di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru ditentukan dengan metode skalogram dimodifikasi dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Wilayah (IPW). Umumnya, semakin tinggi nilai IPW, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPW berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya.

Dari hasil analisis skalogram dapat terlihat tingkat perkembangan wilayah desa dari pendekatan ketersediaan infrastruktur. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.12
Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2021



Sumber : Data Olahan tahun 2022

Berdasarkan Gambar diatas terlihat penyebaran tingkat hirarki wilayah dari hasil analisis skalogram dimana tiga tingkatan hirarki di jelaskan sebagai berikut :

- Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat tujuh (7) desa/kelurahan yang termasuk dalam hirarki I, atau hanya sekitar 12,73% desa/kelurahan dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Barru. Hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada desa/kelurahan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III).
- Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 35 desa atau sekitar 63,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Adapun wilayah desa/kelurahan dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I; (2) umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I.
- Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 13 desa/kelurahan atau sekitar 23,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Desa/kelurahan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan desa/kelurahan yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi.

7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.

Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan	garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan))
1	2017	16.760	174.871	9,71	289,371
2	2018	15.680	173.451	9,04	307.904
3	2019	14.920	182.373	8,57	322,248
4	2020	14.440	187.392	8,26	337,047
5	2021	15.180	189.377	8,68	351,924

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk miskin, meskipun relatif tidak stabil. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru.

Disisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang menurun. Adapun indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

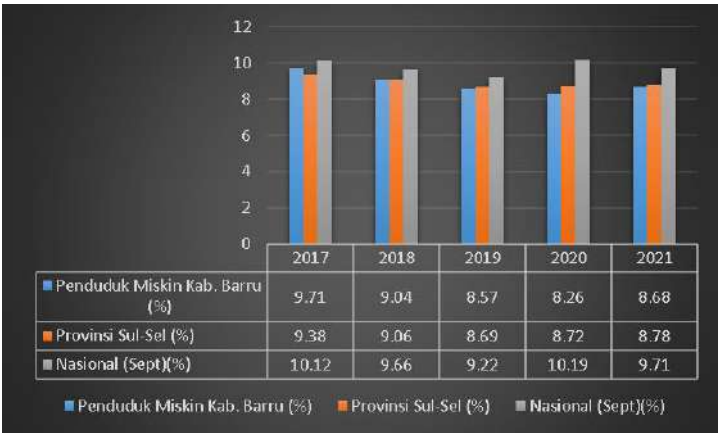


Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka tahun 2022

Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuatif, sementara pada Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 berhasil berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

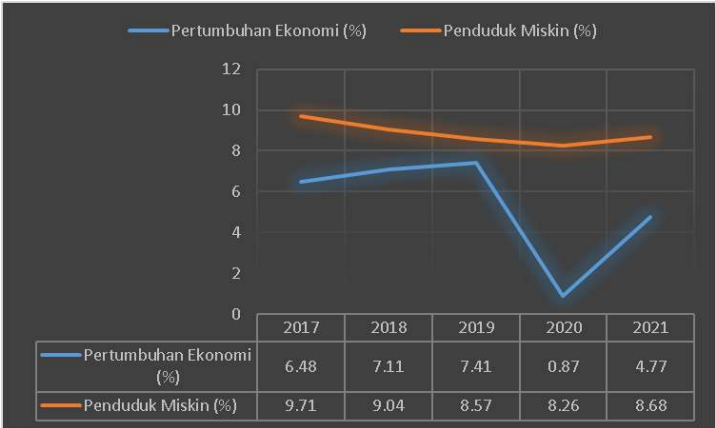
Tabel 2.38
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2
1	Kab. Barru	9,71	1,58	0,37	9,04	1,43	0,32	8,57	1,07	0,21	8,26	1,31	0,36	8,68	1,52	0,39
2	Kota Parepare	5,70	0,85	0,24	5,59	0,75	0,17	5,26	0,71	0,15	5,44	0,94	0,24	5,40	0,72	0,13
3	Kab. Soppeng	8,29	1,25	0,28	7,50	1,39	0,37	7,25	0,69	0,12	7,59	0,83	0,16	7,53	1,24	0,28
4	Kab.Sidrap	5,32	0,85	0,21	5,16	0,94	0,23	4,79	0,60	0,13	5,05	0,82	0,19	5,04	0,64	0,13
5	Kab. Pangkep	16,22	3,04	0,88	15,10	3,12	0,92	14,06	1,81	0,31	13,96	2,52	0,71	14,28	2,78	0,78
6	Kab. Bone	10,28	1,56	0,39	10,44	1,44	0,30	10,06	1,35	0,29	10,68	1,59	0,36	10,52	1,67	0,42

Sumber : BPS Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.9
Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin. Jika Pertumbunan ekonomi meningkatkan persentase penduduk miskin juga menurun terutama tercermin dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2017–2019. Berbeda dengan tahun 2020 dan 2021 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemic Covid 19. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

8. Persentase PAD terhadap pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang salah satu komponennya adalah pajak daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.39
Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru
Tahun 2019-2021

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Persentase
1	2019	103,870,138,497.26	919,299,816,845.33	11.30
2	2020	101,324,046,920.50	914,860,358,822.21	11.08
3	2021	84.842.519.771	940.680.195.326	9,02

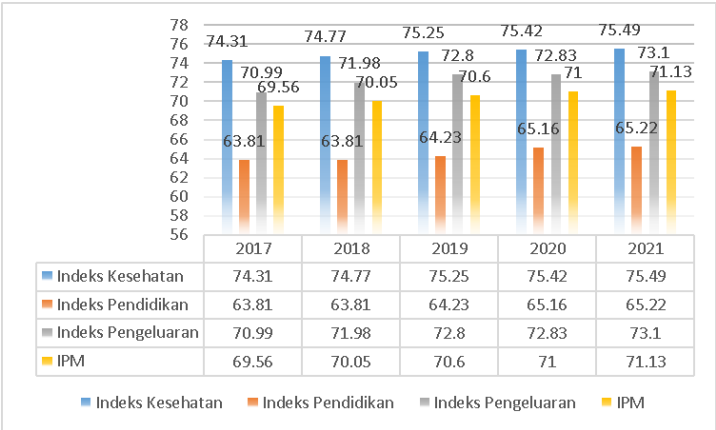
Sumber : BKAD Kab Barru Tahun 2022/SIPD Keuangan Tahun 2021

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

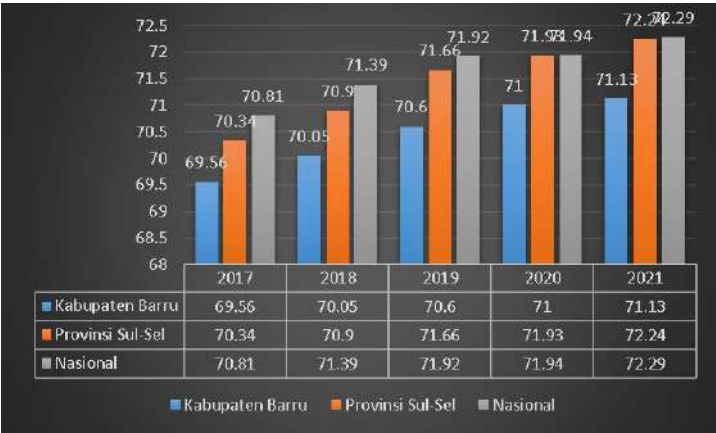
Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021



Sumber :Kabupaten Barru dalam Angka 2022

IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan trend positif, dimana angkanya meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.11
Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12
Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar
Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM tahun 2021 berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru berada pada naik ke posisi 9 diantara 24 Kabupaten/Kota setelah tahun 2020 pada posisi ke 15.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan *United Nation Development Programme* (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

a. Indeks Kesehatan

Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan

tingkat capain penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interpretasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.

c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	68.30	68.60	68,91	69,02	69,07
2	Harapan Lama Sekolah	13.55	13.56	13,57	13,58	13,59
3	Rata-rata Lama Sekolah	7.85	7.86	7,96	8,23	8,24
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10.28	10.62	10,91	10,92	11,02
IPM		69.07	69.56	69.56	71.00	71,13

Sumber : Kabu[paten Barru dalam Angka 2022

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru.

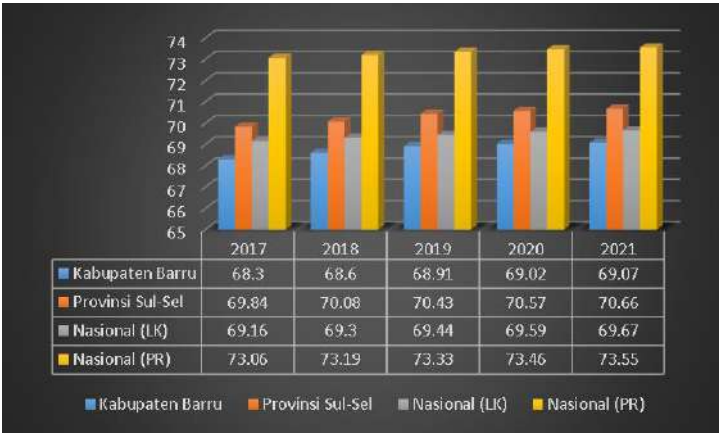
2. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digambarkan melalui Angka Harapan Hidup yang mempersentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barru jika dibandingkan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar tersaji secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.13

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.41

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	68.3	68.60	68.91	69.02	69.07
2	Kota Pare-pare	70.69	70.88	71.18	71.27	71.31
3	Kab. Soppeng	68.72	69.02	69.43	69.65	69.81
4	Kab.Sidrap	68.82	69.15	69.59	69.83	70.01
5	Kab. Pangkep	65.86	66.12	66.49	66.66	66.78
6	Kab. Bone	66.22	66.50	66.88	67.07	67.21

Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa meskipun dengan pergerakan lambat, AHH Kabupaten Barru selalu meningkat sejak tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi sulsel dan wilayah sekitar, AHH Kabupaten Barru berada di posisi dua terbawah, dengan menyisakan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Pangkep yang lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Barru. Pemerintah Kabupaten Barru perlu memperhatikan pembangunan dibidang kesehatan sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku hidup bersih dan sehat, berpeluang lebih produktif dan menghemat pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan peluang hidup sejahtera lebih besar.

3. Indeks Pendidikan

Indikator pembangun IPM berikutnya adalah Indeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2021 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi

Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.14
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.42
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	13.55	13.56	13.57	13,58	13,59
2	Kota Pare-pare	14.46	14.47	14.49	14.50	14.51
3	Kab. Soppeng	12.33	12.57	12.73	12.90	13.05
4	Kab.Sidrap	12.90	12.91	12.93	12.94	12.95
5	Kab. Pangkep	12.40	12.41	12.51	12.76	12.77
6	Kab. Bone	12.43	12.67	12.80	12.88	12.98

Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah Sekitar. Capaian Kabupaten Barru hanya menempatkan Kota Parepare berada diatas dibanding kabupaten/kota pada wilayah sekitar lainnya.

Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Perbandingan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.15
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

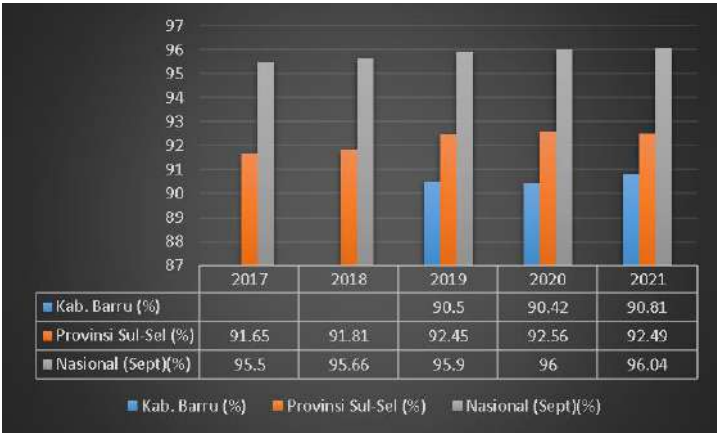
Tabel 2.43
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	7.85	7.86	7.96	8.23	8.24
2	Kota Pare-pare	10.09	10.29	10.30	10.45	10.65
3	Kab. Soppeng	7.42	7.63	7.74	7.81	7.82
4	Kab.Sidrap	7.52	7.79	7.83	7.84	7.94
5	Kab. Pangkep	7.48	7.49	7.60	7.66	7.92
6	Kab. Bone	6.77	6.97	6.98	7.15	7.23

Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barru berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendukung IPM, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.

Grafik 2.16
Perbandingan Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas Kab.Barru Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2017-2021

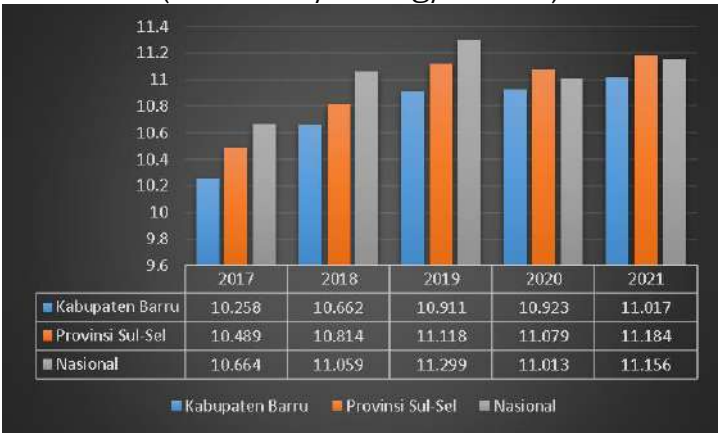


Sumber : BPS Tahun 2022

4. Paritas Daya Beli/Pengeluaran Per Kapita

Indikator standart hidup layak pada komponen IPM diproyeksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.17
Perbandingan Pengeluran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021 (dlm Ribu/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.44
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 (dalam Ribu/Orang/Tahun)

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	10.285	10.662	10.911	10.923	11.017
2	Kota Pare-pare	13.078	13.303	13.648	13.663	13.786
3	Kab. Soppeng	9.035	9.291	9.444	9.483	9.558
4	Kab.Sidrap	11.523	11.834	12.039	12.073	12.201
5	Kab. Pangkep	10.837	11.197	11.392	11.405	11.519
6	Kab. Bone	8.470	8.686	8.954	8.963	9.030

Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli yang diproyeksi dengan pengeluaran per kapita Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi masih rendah, juga dengan wilayah sekitar.

5. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

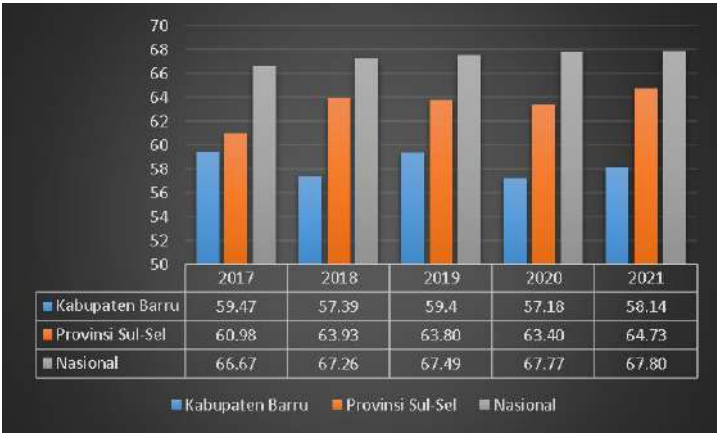
No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,47	56,73	58,55	57,18	58,14
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,60	5,38	5,79	6,39	6,74

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Sepanjang tahun 2017 – 2021, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuatif, namun diakhir periode tetap meningkat dari 59,47% pada tahun 2017 meningkat di tahun 2021 58,14% meski mengalami penurunan di tahun 2020 57,18%, hal ini disebabkan pada tahun 2020 masa pandemic covid 19 sangat berpengaruh terhadap angkatan kerja. Sementara kondisi ketenagakerjaan akan lebih tergambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT di Kabupaten Barru terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,60% dan mencapai pengangguran terendah pada tahun 2018 yaitu hanya 5,38%, namun mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan tingkat pengangguran, hal ini dipicu karena banyaknya pekerja dari luar Kabupaten Barru yang dirumahkan kembali ke kampung halaman (Kabupaten Barru) sehingga mempengaruhi angka 3 tahun terakhir.

Grafik 2.18

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.46

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	59,47	57,39	59,40	57.18	58,14
2	Kota Pare-pare	66,65	64,09	63,27	65.53	66,94
3	Kab. Soppeng	60,84	63,64	57,47	57.5	58,94
4	Kab.Sidrap	49,17	56,22	55,30	56.92	58,70
5	Kab. Pangkep	59,36	63,50	61,22	63.85	64,43
6	Kab. Bone	57,98	58,28	60,54	60.57	65,67

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2022

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari tabel diatas sejak tahun 2017-2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 59,47% pada Tahun 2017.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti

kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 2.19

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.47

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Barru	5.60	4,96	5,39	6.39	6,74
2	Kota Pare-pare	6.47	6,36	6,17	7.14	6,72
3	Kab. Soppeng	2.71	2.36	3,24	4.42	3,92
4	Kab.Sidrap	3.17	4.29	4.35	5.91	4,93
5	Kab. Pangkep	7.05	6.13	4,99	5.18	5,86
6	Kab. Bone	4,55	2.56	3,01	3.20	4,15

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang rendah.

Arthur Okun menemukan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negative. Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Untuk Kabupaten Barru hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017-2021



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas hubungan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2021 menunjukkan hubungan negative. Hal tersebut ditunjukkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 0,63 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,64 persen. Lain halnya pada tahun 2019 kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,30 % namun penyerapan tenaga kerja bekurang sebesar 0,43. Walaupun pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan namun semakin kecil bila dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang awalnya meningkatkan produksinya melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunaan teknologi. Lain halnya pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi merosot tajam akibat pandemic sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran akibat dari beberapa perusahaan merumahkan karyawannya.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Menyadari

pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2016 - 2020 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.51	95.44	95.42	95.52	95.51
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63.54	69.24	63.31	63.96	63.98

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwa angka untuk IPG dalam periode tahun 2017 – 2019 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan siring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting memberikan perhatian dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020 - 2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 adalah 46,34 dengan kategori C. Uraian komponen penilaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20,00	5,87	6,09
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,43	5,18
III.	Reform	30,00	8,25	8,33
	Total Komponen Pengungkit	60,00	19,55	19,60
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,78	7,34
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,70	7,67
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,15	8,12
4	Kinerja Organisasi	10,00	2,16	5,28
	Total Komponen Hasil	40,00	19,55	28,41
	Indeks reformasi Birokrasi(Pengungkit+Hasil)	100,00	46,34	48,01

Sumber : Kemepan RB RI, Tahun 2022

8. Nilai sakin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinrah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru memperoleh nilai 55,52 atau predikat CC. hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barru belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.50
Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Perencanaan Kinerja	30	21,04	21,33
B	Pengukuran Kinerja	25	11,04	11,32
C	Pelaporan Kinerja	15	9,28	9,55
D	Evaluasi Internal	10	4,18	4,73
E	Capaian Kinerja	20	9,98	10,11
Nilai Hasil Evaluasi		100	55,52	57,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC

Sumber : Kemapan RB RI, Tahun 2022

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang di selenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	78,28%	79,21%	80,25%	80,05%	91,38%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	112,87%	99,32%	100,49%	100,67%	101,57%
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	113,81%	103,23%	107,82%	112,09%	88,87%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2020/BPS Kab. Barru 2022

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat, dan jenjang SMP Sederajat tahun 2016 - 2020, yang berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 112,87% pada tahun 2017, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 113,81% pada tahun 2017. Penyebab APKSD Sederajat maupun SMP Sederajat mencapai lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD/SMP Sederajat.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/
Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,67%	92,14	94,71%	98,25%	98,20
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86,58%	85,61	90,42%	81,38%	82,28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2020/BPS Kab. Barru Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu 5 (lima) tahun APM SD Sederajat dan APM SMP Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun berfluktuatif. Baik APM SD Sederajat maupun APM SMP Sederajat belum mencapai angka ideal

karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

d. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	93,67%	92,13%	100,40 %	97,69%	98,19%
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	86,58%	85,61%	107,38 %	93,41%	95,32%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 anak usia 07-12 tahun yang sekolah pada SD/MI/Paket A menunjukkan angka yang berfluktuatif, di tahun 2019 mencapai angka 100,40% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 97,69% kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 di angka 98,19% , Sementara pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 mencapai 107,38% dan juga mengalami penurunan di tahun 2020 93,41 % dan juga meningkat kembali pada tahun 2021 pada angka 95,32 %. Kinerja yang diperlihatkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Hal ini diindikasikan seiring dengan pandemi covid19, kesadaran untuk bersekolah juga menurun.

e. **Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs**

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,38%	0,18%	0,38%	0,44%	0,45%
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,59%	0,35%	1,08%	1,19%	1,36%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

f. **Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs**

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57

Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	98,81%	100%	100%
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	97,11%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs tahun 2017 – 2018 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan hanya diangka 97 – 98%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik

dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu nampaknya aspek mutu lulusan kurang mendapatkan perhatian, hingga pada tahun 2020 dan 2021 kembali menunjukkan pencapaian 100%

g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Namun di Kabupaten Barru pada tahun 2017 hingga tahun 2020, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs
di Kab.Barru 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	101,73 %	105,81%	114,23%	122,23%	93,61%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas, selama tahun 2017 - 2020 AM SD/MI ke SMP/MTs selalu menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2021 angka melanjutkan mengalami penurunan, hal ini disebabkan Karena masih pandemic covid 19 dengan beberapa factor yang berpengaruh.

h. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang

mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A SD/MI						
1	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	215	199	202	210	212
2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI	225	225	226	226	226
3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	95.56	88.44	89	94,23	98,81
B						
1	Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	51	26	29	29	29
2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs	52	52	53	53	54
3	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	98,07	50	55	55	53,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Selama kurun waktu 2017-2021 Persentase Sekolah pendidikan dengan kondisi baik berfluktuatif, baik bangunan SD/MI maupun SMP/MTs.

i. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Sekolah/Penduduk Sekolah (SD)	Ketersediaan Pendidikan Dasar	Usia	122,39	114.07	102,63	100,06	100,51
2	Rasio Sekolah/Penduduk Sekolah (SMP)	Ketersediaan Pendidikan Dasar	Usia	55,90	53.07	40,59	52,10	34,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

j. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No.	Uraian		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Sekolah/Penduduk Dasar SD	Guru/Murid Pendidikan	1.011,57	1.074,24	1.228,34	1100,34	1.130,48
2	Rasio Sekolah/Penduduk Dasar SMP	Guru/Murid Pendidikan	707,60	819.67	1.109,48	1216,47	1.038,69

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

k. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf
(tidakbuta aksara) Kabupaten BarruTahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	NA	NA	90,5	90,42	90,81

Sumber : BPS Tahun 2022

1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kualifikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat(D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,89%	95,15%	90.27%	88,24%	94,89%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik berfluktuatif.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun

(dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	6	7	31	10	9
2	Jumlah kelahiran hidup	3.044	3.035	3.140	3.068	3.047
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	1,97	2.31	9,87	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

AKB pada tahun 2017 hingga tahun 2019 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita, hingga pada tahun 2020 hingga 2021 telah mengalami penurunan.

b. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana $AKHB=1-\text{Angka Kematian Bayi}$. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.65
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kab.Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,80	99.77	99,13	99,70	99,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

AKHB pada tahun 2017 – 2019 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita, namun pada tahun 2020 -2021 menunjukkan peningkatan dan stagnan.

c. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Angka Kematian Balita (AKBa)/ 1000 kelahiran hidup
Kab.Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Balita	1	3	5	2	2
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3.044	3035	3140	3069	3069
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,33	0.99	1,59	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

d. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	18	10	20	6	8
2	Jumlah kelahiran hidup	3.044	3.035	3.140	3069	3.047
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5,91	3.29	6,37	2	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

e. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Indikator ini menunjukkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	4	7	3	3	7
2	Jumlah kelahiran hidup	3.035	3.140	3069	3069	3.047
3	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	131.80	222,9 3	98	98	230

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

f. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Rasio Posyandu Persatuan Balita
Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah posyandu	262	264	265	267	NA
2	Jumlah balita	13.597	13.344	13.084	13.343	NA
3	Rasio posyandu per satuan balita	19,27	19.78	20,25	20.01	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

g. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.70

Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Thn	Jumlah Penduduk	puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2017	174.871	12	0.069	0	0	33	0.19
2	2018	180.509	12	0.066	0	0	33	0.18
3	2019	182.373	12	0.066	0	0	33	0.18
4	2020	187.392	12	0.064	0	0	33	0.18
5	2021	189.877	12	0.064	0	0	33	0.18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan. Begitupun dengan rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk juga terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan jumlah pustu tetap. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,069 dan terendah pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 0,064.

h. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Rasio rumah sakit/ 1.000 jumlah penduduk Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah sakit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	174.871	180.509	182.373	187.392	189.877
3	Rasio rumah sakit per		0.0055	0.0054	0.0053	0.0052

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami penambahan sementara tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah rasio tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,0058 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 0,0052

i. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokter	30	24	37	25	25
2	Jumlah penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0,17	0.13	0,20	0.13	0.14

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk dokter/satuan penduduk adalah 1 : 2500, sementara di Kabupaten Barru masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa puskesmas yang jumlah tenaga dokternya belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter daerah dan pendayagunaan dokter internship di 3 tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

j. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah

tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.73
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga medis	40	57	74	57	57
2	Jumlah penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,23	0.32	0,41	0,30	0,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah perekrutan tenaga kontrak daerah , kontrak BOK dan tenaga sukarela serta pendayagunaan dokter internship di 3 tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

k. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	526	480	515	775	753
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	679	688	684	775	753
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	77,44	69.77	75,29	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari 775 kasus ditahun 2020 menjadi 753 kasus pada tahun 2021. Hal tersebut disebabkan masa pandemic covid 19, sehingga jangkauan pelayanan kesehatan pada semua ibu hamil terutama penanganan difokuskan pada ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan memiliki resiko tinggi serta berdampak pada pemantauan secara berkala dalam mengoptimalkan sistem rujukan terpadu.

1. **Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3036	3033	3133	3181	3085
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3173	3279	3264	3246	3199
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95,68	92,50	95,99	98	96

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dipengaruhi oleh jumlah ibu bersalin yang ditolong yang ikut menurun jumlahnya di tahun 2021.

m. **Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.76
Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	55	44	52	19	44
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	55	55	55	55	55
3	CakupanDesa/kelurahanUniversal Child Immunization (UCI)	100	80	94,55	35	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

n. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk	12	3	4	5	4
2	Jumlah seluruh balita	13.597	13.344	13.084	13.343	13.024
3	Persentase balita gizi buruk (%)	0,09	0.02	0,03	0.04	0,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi *Stunting* pada balita dan baduta di Kabupaten Barru dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.78
Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	9,13	25,20	17,43	11,04	8,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Barru pada tahun 2018 (25,20%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 2019 – 2021 terus mengalami penurunan. *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

o. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam

waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu	12	3	4	3	4
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	12	3	4	3	4
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan(%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

p. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar sebagai perlindungan terhadap penyakit campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang	2.984	2.830	3.036	2.706	2856
2	Jumlah anak usia 1 tahun	3.044	3.030	3.036	2.967	3048
3	Persentase anak usia 1 tahun	98.03	93.40	100	91	93,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

q. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flacid Paralys (AFP) adalah gejala kelumpuhan pada anak yang berumur di bawah 15 tahun yang terjadi secara mendadak (akut). Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus AFP non Polio	2	2	1	0	0
2	Jumlah penduduk < 15 tahun	42.406	42.406	45.583	45.583	0
3	Non Polio rate per 100.000	4.72	4.72	2,19	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

r. **Cakupan balita pneumonia yang ditangani**

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli) yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang sering menyebabkan meningkatnya angka kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita pneumonia balita	19	60	77	24	23
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia	1.360	1,360	496	74	744
3	Cakupan balita pneumonia yang	1.40	4.41	12,33	3.31	3,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Penderita pneumonia yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita pneumonia yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan mengalami penurunan dikarenakan mereka enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

s. **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
BTA Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	156	222	282	202	256
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	356	222	357	388	388
3	Cakupan penemuan dan penanganan	43,82	100	78,99	52.06	65,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

t. **Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk)
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	231	222	282	202	256
2	Jumlah penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per100.000 pdk)	132,09	122.990	155,45	108	135

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjarangan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak serumah penderita TB.

u. **Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tabel 2.85

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien TB yang meninggal	0	0	6	13	24
2	Jumlah penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Tingkat kematian karena Tuberculosis (per100.000 peddk)	0	0	3,31	7	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

v. **Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**

Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang	146	118	233	202	256
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang	362	371	357	388	388
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang	40.33	31.81	65,27	52.06	65,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjarangan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pengiriman dan pengambilan sedimen TBC di PRM.

w. **Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**

Proporsi kasus kasus tubercolosis yang di obati dan sembuh dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien TB/BTA yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang	146	152	83	77	203
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang	146	152	233	202	256
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang	100	100	35.62	38.12	79,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

x. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani.

Tabel 2.88

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai	340	44	36	32	36
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu	340	44	36	32	36
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

y. Penderita diare yang ditangani

Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan Kader	2.249	2.011	2.953	2.024	1168
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x	3.717	4.874	4.898	6.721	5127
3	Penderita diare yang ditangani (%)	78.72	60.51	41.26	60.29	22,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19,

masyarakat enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

z. **Angka kejadian Malaria**

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90

Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang menderita malaria	24	9	23	1	3
2	Jumlah penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Angka kejadian malaria (per 100.000 penduduk)	13.72	4.99	12,68	0.53	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

aa. **Tingkat kematian akibat malaria**

Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91

Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian malaria	0	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Angka Kematian malaria (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah 0 per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan penderita malaria di Kabupaten Barru termasuk berhasil karena semua penderita malaria tidak ada yang meninggal.

bb. **Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida**

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah persentase banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barru belum ditemukan

indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survey tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Jumlah Balita	13.718	13.344	13.084	13.343	13.024
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

cc. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS		6	3	5	6
2	Jumlah Penduduk	174.871	180,509	182.373	187.392	189.877
3	Prevelensi HIV/AIDS dari Total Populasi (%)	-	0.003	0,002	0.003	0,003

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

dd. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi,diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap dengan sarana kesehatan strata 1 dan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (jumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal).

Tabel 2.94
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien miskin di sarana kesehatan starta 1	20.372	18.911	83.025	7.808	113.948
2	Jumlah Penerima KIS di Kabupaten	125.460	124.550	128.122	135.423	142.732
3	Cakupan pelayanan rujukan kesehatan pasien masyarakat miskin	16,24	15,18	64,58	5.8	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

ee. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3.104	3.045	3.050	2955	3026
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	3.046	3136	3.140	3094	3059
3	Cakupan Kunjungan Bayi	101,90	97.10	97,13	95,51	98,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

ff. Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas adalah rasio antara jumlah puskesmas dibandingkan jumlah kecamatan. Untuk cakupan puskesmas dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 171,43. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jumlah puskesmas dan jumlah kecamatan. Jumlah puskesmas sebanyak 12 puskesmas sementara jumlah kecamatan sebanyak 7 kecamatan.

gg. Cakupan pembantu puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas adalah rasio antara jumlah puskesmas pembantu dibandingkan jumlah seluruh desa/kelurahan. Cakupan puskesmas pembantu dari tahun 2017 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar

60,00. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jumlah puskesmas pembantu dan jumlah desa/kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu sebanyak 33 puskesmas pembantu sementara jumlah desa/kelurahan sebanyak 55 desa/kelurahan.

hh. **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	3.104	3114	3145	3173	3070
2	Jumlah sasaran ibu hamil	3.396	3440	3420	3404	3391
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	91,40	90.52	91,96	93,21	90.53

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

ii. **Cakupan Pelayanan Nifas**

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	2.938	2975	3054	3112	2962
2	Jumlah seluruh ibu nifas	3.047	3279	3264	3246	3199
3	Cakupan pelayanan nifas (%)	96,42	90.73	93,57	95,87	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

jj. **Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani**

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	234	244	268	313	609
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	457	455	466	313	609
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	51,20	53.63	54,47	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

kk. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	9.233	11229	9774	7750	8682
2	Jumlah seluruh anak balita	9.927	14085	12242	12788	12788
3	Cakupan pelayanan anak balita (%)	93,01	79.72	79,84	60,60	67,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

ll. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	384	0	232	0	0
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	5.975	0	4605	0	0
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	6,42	0	5,04	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

mm.Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.101
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	5.337	3.948	3315	10764	5211
2	Jumlah murid SD dan setingkat	17.220	17574	3571	16737	6762
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	30,99	22,47	92,83	64	77,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

nn. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik tanpa rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kab.Barru Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kunjungan pasien miskin sarkes strata 1	20.372	18.911	83.025	7.808	113.948
2	Jumlah Seluruh Masyarakat Msikin	125.460	124.550	128.122	135.423	142.732
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	16,24	15,18	64,58	5.8	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

oo. **Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**

Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Gawat Darurat Level 1	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS	1	1	1	1	1
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%.

pp. **Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KLBdi Desa/Kelurahan yang ditangani <24	4	8	2	233	1268
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	4	8	2	233	1268
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kreteria teknis. Panjang jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondidi rusak berat. Kondisi pajang jaringan jalan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105

Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik	414,406	415,461	438,13	445,05	404,2
2	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan	53,186	59,331	58,13	57,559	38,935
3	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang	73,338	77,483	52,76	54,47	66,530
4	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat	142,429	131,080	134,3	126,28	173,689
5	Jalan secara keseluruhan(kabupaten)	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,606	0,608	0,641	0,651	0,650

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan dari panjang jalan keseluruhan. Namun panjang jalan kondisi rusak sedang mengalami peningkatan di tahun 2020, hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrol terhadap kendaraan dengan bobot

tertentu yang melebihi tonase yang dipersyaratkan sehingga pada tahun 2021 masih berdampak pada kondisi jalan. Hal ini juga harus didukung oleh perencanaan konstruksi jalan yang baik.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Panjang Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
2.	Jumlah Penduduk	174.871	180.509	182.373	187.392	189.877
3.	Rasio	0,0039	0,0037	0,0037	0,0036	0,0036

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	414,406	415,461	438,13	445,05	444,24
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	60,6	60,8	64,1	65,1	65

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2017 sampai 2021 cenderung meningkat meskipun di tahun 2018

mengalami penurunan yaitu pada angka 60,80, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat umur ekonomis sesuai jenis jalan.

d. Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Panjang seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
3.	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	41.342	46.293	34.286	46.663	46.663
2.	Jumlah rumah tinggal	43.723	48.328	46.252	46.663	46.663
3.	Persentase	94,55	95.79	95,79	100	100

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Angka pada tahun 2021 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri, dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF.

e. **Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.110
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	15,24	0	2,5	0	NA
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	643.954	643.954	643.954	643.954	643.954
3	Persen	2,39	-	3,88	-	-

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kabupaten Barru cenderung stagnan, hanya pada tahun 2019 teridentifikasi drainase yang mengalami penyumbatan sehingga terjadi penurunan persentase, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan namun tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran.

f. **Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.

Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	4556	4890	3325	3488	3514
2	Luas Irigasi kabupaten	9792	9792	6919	6919	6919
3	Persentase	46,53	49,94	48,06	50,41	50,79

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang disebabkan besarnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga komitmen peningkatan irigasi ditahun 2021 sangat besar. Hal ini juga disebabkan adanya komitmen tentang Lahan Pangan Berkelanjutan sehingga luasan dapat dipertahankan dan yang dalam kondisi baik cenderung akan meningkat.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Irigasi Jaringan primer	22356	22356	22356	22356	22.356
2	Irigasi Jaringan Sekunder	80120	83490	90264	90264	90.823
3	Irigasi Jaringan Tersier	79217	79217	79217	79217	79.217
4	Panjang saluran irigasi	181.693	185.063	191.837	191.837	191.837
5	Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha)	9792	9792	6919	6919	6919
6	Rasio	18,56	18,90	27,73	27,73	27,81

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2021 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya.

h. **Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum/air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air	104.875	158.884	173.471	176.223	183.744
2.	Jumlah penduduk	174.871	180.509	182.373	187.392	189,877
3.	Persentase penduduk berakses air minum	59,97%	88,02%	95.30%	96,63%	96,77%

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Akses air minum yang dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air dijual eceran dan penampungan air hujan. Selanjutnya masih terdapat 3,23% penduduk yang mengakses air minum tidak layak dari mata air tak terlindungi dan sumur tak terlindungi.

i. **Persentase Areal Kawasan Kumuh**

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Bidang/Urusan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Kawasan kumuh (Ha)	310,62	310,62	31.04	21,07	18,55
2	Luas Wilayah Kabupaten (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
3	Persentase areal kawasan Kumuh	0,26	0,26	0,02	0,017	0,016

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2022/Kotaku Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barru Nomor 354/Bappeda/VIII/2014 hingga tahun 2019 tidak mengalami perubahan, ditahun 2020 dan 2021 terjadi pengurangan setelah diintervensi melalui program KOTAKU, disamping itu Pemerintah Kabupaten Barru juga telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut.

j. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kab.Barru Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung	Jumlah	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	37	34.001	15112	37	34.001	22.667	39	40.001	26.667
2.	Tempat Pemakaman Bukan Umum(TPBU)	29	15.910	7071	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606
3.	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	11	218.000	-	11	218.000	-	11	218.000	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	66	49.911	22.183	66	49.911	33.273	68	55911	37.273
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	182.373	-	-	187.392	-	-	189.877	-	-
7.	Rasio TPU Persatuan Penduduk(1/6)	83,71			124,28			213,46		

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tabel diatas mengalami peningkatan karena adanya penambahan daya tampung yang signifikan meskipun dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang meningkat pada tahun 2021. penambahan daya tampung pemakaman tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan untuk setiap makam di areal pemakaman.

5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	44745	44745	45.089	44719	59.920
2.	Jumlah Penduduk	174.871	180.509	182.373	187.392	189.877
3.	Rasio	0,26	0,25	0,25	0.24	0.31

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni. Tahun 2021 meningkat,

karena adanya beberapa program pemerintah pusat untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni.

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	3740,6	3740,6	3740,6	3.750,57	3.769,12
2	Luas Wilayah Pemukiman (Ha)	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64
3	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni cenderung stagnan dari tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni, khusus untuk tahun 2020 dan 2021 luas permukiman layak huni bertambah seiring dengan berkurangnya luas permukiman kumuh Kabupaten Barru.

6. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.118
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru	846	1082	1082	898	898
2	1 Wilayah kerja kabupaten	174.871	180.509	182.373	187.392	189.877
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,49	0,48	0,60	0,60	0,60

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) stagnan dari tahun 2020 ke 2021, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja linmas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kab. Barru tahun 2021.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelanggaran K3 Yang terselesaikan	3	19	14	254	70
2	Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi	3	19	14	14	7
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022

Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran K3 cenderung menurun dan dapat diselsaikan dalam kurun tahun yang sama.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.120
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	622.32	860.46	1174.7	1174,7	1174,7
2	Luas Wilayah	1174.7	1174.7	1174.7	1174,7	1174,7
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	52.98	73.25	100	100	100

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 target cakupan wilayah manajemen kebakaran dipertahankan dari tahun 2019, penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting menjadi unsur keterpenuhan jangkauan wilayah sehingga sampai Tahun 2021 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.

d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diantaranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit	36	47	112	70	35
2	Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK	36	47	112	70	35
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan kebakaran di Kabupaten Barru dari tahun 2020, hal ini dikarenakan musim kemarau relative lebih singkat, disamping itu optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran terus ditingkatkan. Adapun tingkat waktu tanggap daerah WMK telah mencapai 100%, hal ini diasumsikan dengan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan maka waktu respon terhadap setiap kejadian kebakaran relative dapat terpenuhi.

e. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	2	2	2	18	31
2	Jumlah Pelanggaran Perda	2	2	2	18	31
3	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian penegakan perda pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dipicu dari peningkatan kinerja petugas penegak perda dalam mengawal perda yang ada.

6. Bidang Urusan Sosial

a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kaupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	3434	7109	15.522	17.967	18.027
2	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan	779	3.675	769	21.821	3.794
3	Jumlah PMKS yang ada	11,301	7,626	16.291	39.785	18.027
4	Prosentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial	31.07%	93.2	95,68	45,15	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

b. Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PMKS yang tertangani	3434	7109	15.522	17.967	18.027
2	Jumlah PMKS yang ada	11,301	7,626	16.291	17.967	18.027
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	31.07%	93.2%	95,68%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	Kasus	0	1	1	0	0
2	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	145	323	49	51	51
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun		0	3,09	0,02	0,00	0,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

Jumlah perselisihan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 2021 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Parepare dan Barru. Sengketa tersebut terselesaikan 100%.

b. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama adalah perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama dibandingkan dengan jumlah kasus yang dicatatkan di kali 100 persen. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2021
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan kerjasama (PB)	Kasus	0	0	0	0	0
2	Jumlah kasus yang dicatatkan	Kasus	0	0	0	0	0
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama (PB)		0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

c. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	27	83	619	132	638
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar	483	514	672	250	1.694
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	5,59%	16,15%	92,11%	52,80%	38%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 638 tenaga kerja dari total pencari kerja 1.694 tenaga kerja atau sebesar 38%.

d. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK	291	515	37.131	38.111	40,008
2	Pekerja/ Buruh	59790	70328	48.075	48.075	48,007
3	Persentase	0,49	0,73	77,23%	79,27	83,22

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru meningkat drastis dari 0,73 % pada tahun 2018 menjadi 77,23% di tahun 2019 hingga 83,22% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kerjasama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan BPJS ketenagakerjaan dalam penerbitan izin berbasis Jaminan Ketenagakerjaan;
2. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan;
3. Coverage Pekerja Rentan yang dikerjasamakan oleh Pemda Kab. Barru, Baznas dan Pihak perbankan di wilayah Kab. Barru;
4. Coverage Non ASN Pemda Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan berlanjut dalam APBD 2021.

e. **Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada perselisihan. Data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
2	Jumlah Kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	100%	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

f. **Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga kerja yang dilatih	15	80	330	20	152
2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	15	80	330	20	152
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 152 Tenaga Kerja.

g. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga kerja yang dilatih	113	80	80	20	0
2	Pendaftar pelatihan	113	80	80	20	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2022

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2017-2021 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks

Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,51	95,44	95,42	95,52	95,51
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,54	69,24	63,31	63,96	63,98

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2017-2021 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun berfluktuasi.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV.

untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.133
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	2	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	24	28	29	32	34
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	176	207	215	220	102
4	Pekerja perempuan di pemerintah	3,307	4,705	4.710	4088	2435
5	Jumlah pekerja perempuan	23,609	25,413	25.415	21687	25649
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	14.01 %	18.51 %	18,55%	18,55 %	9,49

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022/ BPS Kab. Barru tahun 2022

b. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	6 orang	6 orang	5 orang	5 orang	5 Orang
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	24%	24%	20%	20%	20%

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Barru Tahun 2022

c. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135

Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	7	7	9	8	8
2	Jumlah Rumah Tangga	42	41,070	41.575	41950	41950
3	Rasio KDRT (%)	0,17	0.02	0,02	0,02	0,02

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

d. **Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	-
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

e. **Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	-
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

f. **Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.**

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	-
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dalam kurun waktu tertentu	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

g. **Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	-
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

h. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	-
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

i. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	-
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

j. **Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	-
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	-
3	Persentase	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

3. Pangan

a. **Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143

Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama	4178	4366	4379	261,588	229,133
2	Ketersediaan energi	106,75	115,00	118,61	2782	2.352
3	Protein perkapita	15,60	18,5	21,72	69,77	96,91
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,249	0,275	0,423	53	45,2

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2022

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah persentase angka kecukupan gizi (AKG) di kalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	91,2

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2022

4. Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145

Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersusunnya RPPLH kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

b. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P

Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan rencana program Kabupaten Barru tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

c. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang

dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan indeks tutupan lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru

Tabel 2.147
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air	52,4	62,22	62,22	50	60,67
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	94,02	94,2	93,40	90,59	92,52
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	51,104	51,1	63,77	69,77	70,25
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,84	69,17	72,19	69,85	75,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru pada Tahun 2021 dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten Barru pada sebesar 50 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada berbagai sumber air.
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
- penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang

digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 di Kabupaten Barru pada Tabel 8 menunjukkan angka 90,59 yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 kemudian turun kembali di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 turun cukup signifikan diangka 90,59,. Hal ini disebabkan karena konsentrasi SO₂ Tahun 2019 mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan data tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2020 berada dalam status cukup, hal ini menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup dibanding pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru berada dalam status kurang. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena berubahnya status mutu air sungai pada beberapa titik pantau dari tercemar berat menjadi tercemar ringan dan yang tercemar sedang menjadi memenuhi baku mutu. Disamping itu juga disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan indeks tutupan lahan, yang sebelumnya beberapa tutupan lahan tidak dihitung sebagai tutupan hutan, pada tahun ini dihitung sebagai tutupan hutan seperti semak belukar, taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.

d. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148

Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	4.8%	9	8	5%	NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

e. **Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)**

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat PengawasLingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	0	1	0	1	1
1.1	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;	0	1	0	0	0
1.2	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

f. **Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**

Penghargaan merupakan reward yang diberikan karena telah memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan.

Tabel 2.150
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Lidup
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada (adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi)	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten)	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

g. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	-
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	-
3.	Persentase	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

h. Timbulan Sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang ditangani adalah perbandingan antara volume timbulan yang ditangani dengan total timbulan sampah dikali dengan 100 persen. Timbulan sampah yang ditangani tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani	5.130,47
2.	Total timbulan sampah	9.929,31
3.	Persentase	52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

i. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
di Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	1.340,35 m3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

j. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	97,92	98.01	80,41	80,52	65,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

Persentase jumlah sampah yang ditangani di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa volume sampah yang ada di perkotaan Barru mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan komitmen mengurangi jumlah sampah, baik rumah tangga, industry maupun perkantoran.

k. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155
Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota
Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2022

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah

penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.156
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	119320	128967	131981	135033	137.147
2	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	128.209	129177	131981	135045	137.159
3	Rasio	0,94	0,998	1	0,999	0,999

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2021 menunjukkan angka 0,999 yang mendekati angka 1, dimana tersisa 12 orang yg belum ber-KTP

b. Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	325	1.299	1.356	1.328	1.403
2	Jumlah bayi	346	1.479	1.474	1.369	1.422
3	Rasio	0,94	0,88	0,92	0,97	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2020 - 2021 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158
Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru
Tahun 2020-2021

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Akte Kelahiran		Jumlah Penduduk		Rasio	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
731101	Tanete Riaja	6080	7.013	7459	7.369	0.82	0,92
731102	Tanete Rilau	9133	11.157	11567	11.643	0.79	0,96
731103	Barru	10538	12.866	13312	13.330	0.79	0,97
731104	Soppeng Riaja	3826	5.018	5209	5.182	0.73	0,97
731105	Mallusetasi	6063	7.741	7998	8.022	0.76	0,96
731106	Pujananting	3104	3.796	3859	3.944	0.80	0,96
731107	Balusu	4047	5.146	5446	5.391	0.74	0,95
7311	Kab. Barru	42791	52.737	54850	54.881	0,78	0,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	NA
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	NA
3	Rasio	NA

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala

Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2022

e. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang)	128.967	131.981	131.981	135045	137.147
2	Jumlah penduduk wajib KTP (Orang)	129.177	131.981	131.981	135033	137.159
3	Persen ((1/2)x100%)	99.84	100	100	99,99	99,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

f. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Cakupan penerbitan akte kelahiran	NA

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolaan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan
Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik	39	40	40	40	40
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	40	40	40	40	40
3	Persen	98	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	55	55	55	55	55
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Rata-rata	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

c. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1636	1711	1712	2485	NA
2	Jumlah PKK	63	63	63	63	63
3	Rata-rata	25,979	27,16	27,18	39,44	NA

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

d. Persentase LSM Aktif

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Persentase LSM yang aktif adalah jumlah LSM yang terdaftar di pemerintah dari jumlah yang ada di Kabupaten Barru. Persentase LSM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.166
Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LSM terdaftar	19	20	20	20	20
2	Jumlah LSM tidak aktif	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	19	20	20	20	20
4	Jumlah LSM	19	20	20	20	20
5	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Barru Tahun 2022

e. Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167

Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah LPM Berprestasi	-	7	7	14	14
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Persen	-	12,72	12,72	25,45	25,45

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

f. Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168

Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKK Aktif	63	63	63	63	63
2	Jumlah PKK	63	63	63	63	63
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

g. Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169

Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu Aktif	249	262	262	262	262
2	Total Posyandu	249	262	262	262	262
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

h. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	180	180	180	180	180
2	Total program pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

i. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah angka kelahiran total. Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,55

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

b. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Di Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	80%

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Di Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	24,13

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

d. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
Di Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

e. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176

Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak	60,380	60,250	60.350	61280	54.881
2	Jumlah keluarga	52,869	52,969	53.125	54320	61.838
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,142	1,137	1,136	1,128	0,887

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

f. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177

Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah akseptor KB	21,344	21,065	20.141	61280	NA
2	Jumlah pasangan usia subur	30,803	30,117	29.671	54320	27087
3	Rasio akseptor KB (%)	69.29	70	67,88	66,67	69,63

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

g. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka

pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta KB aktif	21,344	21,065	20.141	19562	13753
2	Jumlah pasangan usia subur	30,803	30,117	29.671	29361	27089
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	69.29	69.94	67,88	66,63	75,01

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

h. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 thn	532	512	508	443	474
2	Jumlah pasangan usia subur	30,803	30,117	29.761	29361	27087
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.73	1.70	1,71	1,51	1,75

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

i. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan usia subur yang

dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.180
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*unmet need*)
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5.043	8.971	5.744	4906	13.753
2	Jumlah pasangan usia subur	30.803	30.117	29.671	29361	27.087
3	Persentase ((1/2)x100%)	16,37	29,78	19,35	16,71	15,89

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

j. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.137	2.889	2.745	2760	NA
2	Jumlah akseptor KB	21.344	21.065	20.141	19859	NA
3	Persentase ((1/2)x100%)	14,70	13,71	13,62	13,90	18,02

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

k. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Peresentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.182
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	8,590	9,540	9.930	9799	NA
2	Jumlah akseptor KB	21,344	21,065	20.141	19562	NA
3	Persentase ((1/2)x100%)	40.25	45.29	46,38	50,09	42,3

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.183
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	3,756	3,794	3.805	3642	3.488
2	Jumlah anggota kelompok BKB	6,716	6,716	6.716	7672	5.693
3	Persentase ((1/2)x100%)	55.93	56.49	56,65	45,13	61,05

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

m. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.184
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	3,972	3,984	3.997	3008	2.940
2	Jumlah anggota kelompok BKR	9,262	9,262	9.266	9992	7.730
3	Persentase ((1/2)x100%)	42.88	43.01	43,13	30,10	30,90

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

n. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan

anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	2,668	2,705	2.752	2325	301
2	Jumlah anggota kelompok BKL	7,346	7,367	7.374	7012	5.331
3	Persentase ((1/2)x100%)	36.32	36.72	37,32	33,16	34,05

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

o. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap
Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PPKS	7	7	7	7	7
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

p. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah perbandingan jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/
Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PIK R/M	68	70	73	63	72
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	971.43	1000	1042	900	1024

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

q. **Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk**

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	44	47	47	50	50
2	Jumlah PKB/PLKB	44	47	47	50	50
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

r. **Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri**

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	352	381	412	469	358
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	917	917	917	917	917
3	Persentase ((1/2)x100%)	38,39	42	44,92	51,15	39,02

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

s. **Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap

desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	55	55	55	55	55
2	Jumlah desa/kelurahan	55	55	55	55	55
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

t. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontarsepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	55,315	48,362	20.588	34279	NA
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	55,315	48,362	20.588	34279	NA
3	Cakupan (1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

u. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.192
Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah)
Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	12	14	14	14	14
2	Jumlah Faskes dan jejaring	12	14	14	14	14
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

v. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap
Desa Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

w. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	249	249	255	255	255
2	Jumlah kelompok kegiatan	249	249	255	255	255
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

8. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penumpang Bis	1.773.098	1,693,893	1,682,943	826,600	592.908
2	Jumlah penumpang Kapal laut	36.993	23,103	45,287	28,164	48.387
3	Total Jumlah Penumpang	1.810.091	1,693,893	1,682,943	853,764	641.295

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penumpang bis maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Untuk jumlah penumpang kapal laut mengalami Penurunan di tahun 2020, hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya layanan yang masih standar.

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196
Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2021

NO.	Uraian	2021
1	Jumlah Uji Kir angkutan umum	NA
2	Persentase Kepemilikan Kir angkutan umum	NA

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Kegiatan Uji Kir tahun 2021 tidak didapatkan datanya karena di Kabupaten Barru proses pengujian kendaraan belum dilakukan.

c. Rasio Ijin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2	Izin Trayek perdesaan	41	41	41	41	41
3	Jumlah Izin Trayek	41	41	41	41	41
4	Jumlah penduduk	174.871	180.509	182.373	187,392	189,877
5	Rasio Izin Trayek	2,34	2,27	2,24	2,18	2,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2016 sampai 2021 menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/terminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198
Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelabuhan laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah terminal bis	5	5	4	3	3
	Jumlah	10	10	9	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bis pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.199
Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Angkutan darat	1535	1,475	1,288	525	31026
2	Jumlah penumpang angkutan darat	1.773.098	1,693,893	1,682,943	825,600	592.908
3	Persentase	0,087	0.087	0.076	0,063	0,052

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.

f. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Tabel 2.200
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	100	75	156	156	NA
2	Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia	3951	3951	3951	3951	NA
3	Persentase	2.53	1.90	3.95	3.95	NA

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas, khusus tahun 2021 data tidak tersedia karena, kegiatan peasangan rambu-rambu tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran

g. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.201
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	939,875	936,225	907,025	825,600	592.908
2	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	11,278	11,235	10,884	8,784	32.610

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.

h. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga dan terminal. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun
Di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
1	2017	Orang	39,074	4,769,581	4,808,655
		Barang	11,382.72	12,382	23,765
2	2018	Orang	23,103	4,769,581	4,792,684
		Barang	12,335.87	12,382	24,717.87
3	2019	Orang	45,287	1,682,943	1,728,230
		Barang	9,683,355	10,884	9,694,239
4	2020	Orang	28,164	825,600	853,764
		Barang	12,657	8,784	21441
5	2021	Orang	48,487	592,908	641,395
		Barang	14,204,900	32610	14.237.510

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2022

Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang, disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah koperasi aktif	58	58	63	65	66
2	Jumlah koperasi	103	103	102	104	105
3	Persentase koperasi aktif	56,31%	56.31%	61,76	62,50	62,86

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2022

Meningkatnya jumlah koperasi aktif diukur dari indikator kinerja perbandingan antara jumlah koperasi dengan jumlah koperasi seluruhnya. Merupakan indikator utama dalam penilaian suatu koperasi dikatakan aktif apabila melakukan RAT dua tahun terakhir. Jumlah koperasi di Kabupaten Barru tahun 2021 adalah 105 unit, sebanyak 66 koperasi yang melakukan RAT dan 39 yang

tidak melakukan RAT artinya sebanyak 62,86% koperasi aktif. Adapun penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator adalah :

- Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembinaan koperasi dan dilakukan pelatihan terhadap kemampuan untuk menyusun/membuat laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi
- Dilakukannya pengusulan penghapusan terhadap koperasi yang sudah tidak melakukan operasional usaha.

b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	1571	1494	430	762	
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	1571	1494	458	790	
3	Persentase	100	100	93,88	96,46	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2022

c. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205
Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah BPR/LKM aktif	20	20	20	20	20
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	48	28	28	28	28
3	Persentase	71.43%	71.43%	71.43%	71,43%	71,43%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2022

Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.

d. **Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.206
Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha mikro	17.979	17.820	18.999	9122	9122
2	Jumlah Usaha Kecil	1.933	1.434	322	718	
3	Usaha Menengah	50	88	136	9840	
4	Jumlah UKM	19.962	19.342	19457	9912	
5	Persentase	99,75%	99.55%	99,74%	99,27%	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2022

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan adalah 99,27% artinya dari 20.656 unit usaha yang ada di Barru ada 20.505 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

10. **Penanaman Modal**

a. **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.207
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	PMDN	323	325	260	118	46
2	PMA	-	-	-	-	2
3	Total	323	325	260	118	48

Sumber : DPMPSTSP Kab. Barru Tahun 2022

Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2021 sebanyak 48 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 200 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2021.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208			
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)			
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021			
No	Tahun	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
1	2017	323	541.582.143.139
2	2018	325	729.568.409.663
3	2019	260	730.659.151.736
4	2020	118	855.316.873.042
5	2021	48	401.993.726.034

Sumber : DPMPTSPT Kab. Barru Tahun 2022

Terjadi penurunan nilai investasi sebesar Rp. 453.323.147.008 dari nilai investasi tahun sebelumnya. Hal yang perlu menjadi perhatian utamanya dalam hal kepastian lahan kemudian dalam sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan/kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kabupaten Barru.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209		
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2021		
NO.	Uraian	2021
1	Rasio daya serap tenaga kerja	32

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2022

d. **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)**

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2017	541.582.143.139	537.393.500.000	0,78
2	2018	729.568.409	591.931.425.987	35
3	2019	730.659.151.736	729.568.409.663	0,15
4	2020	855.316.873.042	730.659.151.736	17,06
5	2021	400.889.608.880	360.728.443.384	11,13

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2022

Terdapat Peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 454.427.264.162 dari nilai investasi tahun sebelumnya atau sebesar 11,13 % pada tahun 2021. Capaian ini menunjukkan perlunya perbaikan terhadap daya dukung investasi di Kabupaten Barru berupa :

- Peningkatan Promosi investasi ditahun 2021 melalui pameran investasi baik di dalam maupun di luar Provinsi;
- Peningkatan koordinasi investasi antar lembaga pemerintah, swasta dan pihak lainnya;
- Pencermatan terhadap pelaporan realisasi penanaman modal daerah baik yang dilakukan secara manual maupun online;
- Perbaikan percepatan berusaha melalui pembentukan satuan tugas percepatan berusaha dan perbaikan regulasi perizinan dan penanaman modal daerah.

11. **Kepemudaan dan Olah Raga**

a. **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif**

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase

organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru	15	42	42	64	79
2	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau	15	26	26	44	53
3	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja	15	21	21	38	45
4	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting	15	16	16	35	47
5	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu	15	21	21	40	59
6	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja	15	21	21	39	48
7	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi	15	20	20	38	53
8	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	105	167	167	298	384
9	Jumlah seluruh organisasi pemuda	105	167	167	298	384
10	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

b. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah wirausaha muda	18	5	20	139	173
2	Jumlah seluruh wirausaha	23	90	150	150	197
3	Persen ((1/2)x100%)	78,26	5.56	13.33	92,66	87,82

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213

Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	6	13	27	27	26
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabang	26	26	29	29	28
3	Persen ((1/2)x100%)	Persen	23,08	50	93,1	93,1	92,86

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelatih bersertifikat	11	43	57	57	18
2	Jumlah seluruh pelatih	15	58	75	75	18
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	73,33	74,13	76	76	100

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215

Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	25	401	430	430	NA
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	135	401	606	606	NA
3	Persen ((1/2)x100%)	18,52	100	70,9	70,9	

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

Tahun 2021 kegiatan pembinaan atlet tidak dilakukan karena adanya refocusing anggaran.

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216						
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2017-2021						
No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	7	---	---	---	---

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217						
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2017-2021						
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	4	---	---	---	---

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2022

12. Statistik

a. Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru"

Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan
Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2022

13. Persandian

a. **Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah**

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah	OPD	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	39	37	37	37	37
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2022

14. Kebudayaan

a. **Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival budaya	1 Kali	3 Kali	5 kali	5 kali	5 Kali

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

Dari data diatas terlihat bahwa penyelenggaraan festival budaya tiap tahunnya mengalami peningkatan.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11	11	15	15	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	27	29	28	15	15
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan	30,6	40,9	53,57	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

c. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.222
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen)	1	2	3	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

d. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	11 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	15 Jenis	15 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022

15. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	187.25	193,601	202.142	121.286	123.347
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	187.25	193,601	202.142	121.286	123.347

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

b. Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersediadi perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225
Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	55.344	56,435	58.685	58.685	59.137
2	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah	10.851	11.119	11.676	11.676	11.922

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56
2	Jumlah Penduduk	174.871	180,509	181.500	187,392	189,877
3	Rasio (1/2*1000)	0,32	0.31	0,31	0,30	0,29

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.227

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	631

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

e. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.228

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	1	3	3	3	5
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	5
3	Persentase	33,33%	33,33%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

16. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.229

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	26	27	30	29	29
2	Jumlah Perangkat Daerah	37	37	37	36	36
3	Persen	70.27	72.97	81,08	80,5	80,5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.230
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	5	3	3	0	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2022

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Kujungan wisata di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231
Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten	49.35	54,835	117,967	61,519	87,133
2	Lama kunjungan wisata	-	-	1 hari	1 hari	1 hari
3	Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten	49.35	54,835	117,967	61,519	57,133
4	Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten	28	29,500	31,000	33,000	35.000
5	Persen	176,25	185.88	378,30	186.4	248,95

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah persentase kunjungan wisata ke Kabupaten Barru pada tahun 2021, hal ini dipengaruhi terdapat beberapa objek/daya tarik wisata sebagai tempat pelaksanaan event besar seperti Lappalaona yang menarik kunjungan sampai 18.907 wisatawan, terdapat juga beberapa objek/daya Tarik wisata baru yang berkembang seperti Diana Waterpark dengan jumlah kunjungan 47.086 wisatawan dan Embung Paccekke dengan jumlah kunjungan 2.552 wisatawan.

b. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Tahun	PAD sektor pariwisata	Total PAD	Persen
1	2017	25.570.000	130.717.794.632,7	0,05
2	2018	29,550,000	104.627.706.924,57	0,03
3	2019	34,350,000	110.310.167.038	0,03
4	2020	64,119,000	107,388,426,060.00	0.06
5	2021	50.258.000	91.080.726.896	0,06

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 202

Dari tabel diatas terlihat penurunan jumlah Pemasukan Asli Daerah dari sektor pariwisata sebesar 9,861.000 dari tahun 2020, hal ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Barru yang dikarenakan masih adanya pengaruh dari masa pandemic covid 19.

3. Pertanian

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.233
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	116,874.30	121,470.07	124,399.04	132.097,08	135.698,00
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	22,975	23,488	23,986	23.358	23.995

3	Produktivitas Padi/Bahan Pangan					
	Utama Lokal	54.13	56.71	51,86	53.42	55,02
	Lainnya (Ku/Ha)					

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2022

Total Pertanaman Padi Tahun 2021 seluas 23.995 Ha, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya produksi tanaman padi, hanya saja dari sisi produktifitas padi menurun dari tahun sebelumnya.

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.234
Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	117	140	157	87	105
2	Jumlah kelompok tani	705	709	712	729	756
3	Persen	16,60	19,75	6.17	23.88	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2022

Jumlah Kelompok Tani meningkat sebanyak 27 kelompok merupakan kelompok yang mendapatkan Bantuan Pemda dari beberapa Bidang : Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan.

4. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Tahun	Nilai ekspor	Nilai Impor	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan
1	2017	127.438.834	0	127.438.834
2	2018	128,712,891	0	128.712.891
3	2019	97.264.928	0	97.264.928
4	2020			
5	2021			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2022

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahunn dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	6	9	12	12	
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	39	39	39	39	
3	Cakupan (%)	15.38%	23.08%	30,77%	30,77%	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2022

5. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20.67	20.67	14	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2022

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 sebsar 14 % hal ini menurun dari tahun 2019 karena adanya refocusing anggaran.

6. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.238
Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah produksi ikan (ton)	24.148,03	24.373,41	25.648,66	25,773.9	26.167,72
2	Target Daerah (ton)	24.968,64	25.874,52	26.587,30	27,324.19	27.906,01
3	Persen	96,71	94,20	96,46	94.32	93,77

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2022

Jumlah produksi ikan terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Jumlah produksi ikan mengalami peningkatan dari 25.773,9 ton pada tahun 2020 menjadi 26.167,72 ton pada tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dukungan dari peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan, pembinaan terhadap nelayan yang semakin intensif serta peningkatan teknologi usaha perikanan.

Walaupun jumlah produksi ikan mengalami peningkatan namun belum mampu mencapai target daerah yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 93,77 persen yang cenderung menurun dari tahun seblumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertama, masih adanya lokasi perikanan budidaya yang rawan terhadap penyakit disebabkan seringnya tambak tergenang banjir dan saluran pemasok air untuk tambak sama dengan saluran pembuangan air sawah sehingga terjadi kontaminasi air tambak dengan zat kimia limbah pertanian. Kedua, adanya batasan kewenangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan sehingga penangkap ikan secara illegal masih sering terjadi dan yang terakhir jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional masih lebih besar dibandingkan yang menggunakan alat tangkap modern.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.239
Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan	Target Daerah	Persentase
		Kg	Kg	
1	2017	7.847.077	7.860.899	99,78
2	2018	7.913.736	7.917.209	99,96
3	2019	7.929.362	7.966.561	99,53
4	2020	8.014.464	8.014.496	99,99
5	2021	8.020.407	8.080.130	99,26

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2022

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.240
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2021
1	Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan	39	27	63	69	51
2	Target Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	16	16	18	18	18
3	Persen	175	168,75	350	383	283

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2022

Besarnya capaian cakupan bina kelompok nelayan disebabkan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap melalui pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat tangkap, mesin kapal, GPS dan Kapal motor tidak hanya DAU namun juga DAK melalui 2 Kegiatan yaitu kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.241
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah Produksi ikan di daerah	Prosentase
1	2017	5.358,57	24.148,03	22,19
2	2018	8174,37	24.372,41	35,53
3	2019	8.583,09	25.874,52	33,17
4	2020	12.554,69	25.773,90	48,71
5	2021	12.703,36	26.167,72	48,54

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2022

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.242
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	RPJPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	RPJMD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	RKPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	RTRW	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

Rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada tingkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk

periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuanganDaerah,strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun tahun 2021 adalah:

- Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022
 - Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022
- Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.243
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Barru Tahun 2017 -2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	191	166	157	276	104
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	191	166	157	276	104
3	Persen	98,83%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

b. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.244
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	161	166	157	276	104
2	Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	191	166	157	276	104
3	Persen	100%	84,29%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Barru Tahun 2022

Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Sementara itu, Persentase penjabaran program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100% dicapai pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sedangkan dibawah 100% pada tahun 2017. Demikian pula Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sedangkan dibawah 100% dicapai pada tahun 2017. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD dan RKPD telah konsisten dengan RPJMD. Program yang ada pada PJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD, dan program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. selain itu, adanya komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan aplikasi E-Planning dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut komitmen, pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan berbagai tahapan dalam Launching aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) pada tahun 2017. Adapun kondisi eksisting penerapan perencanaan berbasis aplikasi e-Planning sampai dengan tahun 2021 adalah:

1. Penyelesaian penginputan RKPD Kabupaten Barru tahun 2022 pada tahun 2021
2. Penyelesaian penginputan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 pada tahun 2021
3. Penyelesaian penyusunan ASB dan SSH pada tahun 2021
4. Penyelesaian penginputan SSH pada tahun 2021

Adapun angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Jumlah program yang direncanakan pada RPJM tidak seutuhnya termuat pada RKPD dan jumlah program yang direncanakan di RKPD tidak seutuhnya mendapat penganggaran pada APBD. Hal ini disebabkan karena belum diterapkannya aplikasi E-Planning dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta kurangnya pengawasan aparatur perencana terhadap konsistensi program pada RPJMD ke dalam RKPD dan program yang ada pada RKPD ke dalam APBD. Selanjutnya perlu peningkatan kualitas aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan sampai pada penganggaran baik di tingkat kabupaten maupun SKPD.

2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.245
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru
Tahun 2017 -2021

No	Tahun	Opini BPK
1	2017	WTP
2	2018	WTP
3	2019	WTP
4	2020	WTP
5	2021	WTP

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022

b. Persentase SILPA

Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.246
Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase
1	2017	171.858.014.411,98	1.357.790.897.071,09	12,66%
2	2018	141.476.534.480,84	992.656.086.174,65	14.25%
3	2019	83.717.109.878,35	1.119.164.212.811,57	13,37%
4	2020	83.734.357.547,35	920.669.003.812,00	9,09 %
5	2021	118.879.623.079,89	940.680.195.326,00	12,63%

Sumber :BBKADKab. Barru Tahun 2022

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.247
Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
1	2017	276.889.978.580,7	1.357.790.897.071,09	20,39%
2	2018	273.979.301.209,00	992.656.086.174,65	27,60%
3	2019	285.957.897.587,00	1.119.164.212.811,57	25,55%
4	2020	232.729.629.587,00	920.669.003.812,00	22,92%
5	2021	297.079.401.936	940.680.195.326,00	31,58 %

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.248
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
1	2017	148.650.285.899,00	1.357.790.897.071,09	10,94%
2	2018	148.763.525.015,15	992.656.086.174,65	14,99%
3	2019	190.954.022.675	1.119.164.212.811,57	17,06%
4	2020	189.542.241.675	920.669.003.812,00	18,66%
5	2021	200.340.333.581	940.680.195.326,00	21,29%

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022

e. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadap total APBD yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.249
Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Barru Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase Belanja Langsung	Persentase Belanja tidak Langsung
1	2017	553.615.796.779,10	804.175.100.291,99	1.357.790.897.071,09	40,77%	59,22
2	2018	488.253.434.390,15	504.402.651.784,65	992.656.086.174,80	49,19%	50,81%
3	2019	580.796.860.218,59	538.367.352.592,98	1.119.164.212.811,57	51,89%	48,10%
4	2020	413.690.046.654,10	586.660.283.440,98	920.669.003.812,00	44,93%	63,72%
		Jumlah Belanja Operasi	Jumlah Belanja Modal		Persentase Belanja Operasi	Persentase Belanja Modal
5	2021	716.429.332.596,00	60.840.341.589,00	940.680.195.326,00	76,16%	6,47%

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022

f. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.250
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Persentase
1	2017	90.275.979.009,00	1.357.790.897.071,09	6,65%
2	2018	96.250.293.737,00	992.656.086.174,80	9,70%
3	2019	43.901.994.559,07	1.119.164.212.811,57	3,92%
4	2020	108.940.698.605	920.669.003.812,00	11,83 %
5	2021	107.273.106.000	940.680.195.326,00	11,4 %

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022

g. Penetapan APBD

APBD ditetapkan dengan perkara yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251
Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Penetapan APBD
1	2017	29 Desember 2016
2	2018	20 Desember 2017
3	2019	17 Desember 2018
4	2020	17 Desember 2019
5	2021	30 Desember 2020

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2022

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendaptkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.252
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru	50125	39430	22104	64916	99926
2	Jumlah PNS	4217	4122	4098	3919	3909
3	Rata - Rata lama Diklat	11,89 JPL	9,57 JPL	5,39 JPL	16,56 JPL	25,56 JPL

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2022

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.253
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Diklat Teknis	109	217	1542	284	458
2	Jumlah PNS	4217	4170	4098	3919	3909
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2.58%	5.26%	37.63%	7,25%	11,72%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2022

c. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.254
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural	414	456	462	383	453
2	Jumlah Total Jabatan	664	664	664	668	673
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	62.35%	68.67%	69.58%	57,34%	67,31%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2022

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.255
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

NO	U R A I A N	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	33 Orang	26 Orang	33 Orang	30 Orang	28 Orang
2	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah	493 Orang	530 Orang	579 Orang	544 Orang	343 Orang
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah	2.695 Orang	2.695 Orang	2.695 Orang	3345 Orang	2857 Orang

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2022

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul disuatu wilayah.

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.256
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	10	10	5	8	14
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	10	10	10	8	14
3	Persen	100%	100%	50%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangkat daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.257
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti	85	15	3	7	14
2.	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat	91	17	4	8	14
3	Persen	93,41%	88,24%	75%	87,5%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

c. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.258
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam
Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	15	17	19	40	44
2	Jumlah total perangkat daerah	36	36	36	44	44
3	Persen	41,66%	47,22%	52,77%	90,90%	100

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2022

d. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.259
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam
Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	15	17	19	50	70
2	Jumlah inovasi yang Diusulkan	36	36	36	77	96
3	Persen	41,67%	47,22%	52,77%	64,93 %	72,92

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

Tabel 2.260
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 -2021

NO	NAMA OPD	Judul Inovasi Tahun 2018 - 2019	Judul Inovasi Tahun 2020 - 2021
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem pelayanan kepegawaian lancar efektif berkualitas, berintegrasi dan inovatif (SIPAKALEBBI)	-
		Tambahan Penghasilan pegawai Berbasis E-Kinerja	-
2	Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah	Kopi Pintar	Peningkatan Minat Baca Pada Keluarga anak Pos PAUD dan Kelmpok Bermain di Pendidikan anak Usia Dini
3	Dinas Sosial	Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui Pendampingan TKSK di setiap Kecamatan	Percepatan Penerbitan Rekomendasi KIS, Melalui Ruang Pelayanan Publik

NO	NAMA OPD	Judul Inovasi Tahun 2018 - 2019	Judul Inovasi Tahun 2020 - 2021
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Percepatan penerbitan akta kelahiran melalui short message service (SMS)	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 LaO KeDesa (Layanan Nyaman Cepat Akurat dan Ramah dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Layanan Online Kelurahan/Desa)
		-	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu
			LaNCAR D'DukCapil MPC-19 pada Sektor PTSP
		-	Percepatan penerbitan AKTA Kematian Melalui Whats'up
		-	LAFOR pada DUKCAPIL (Pelayanan Informasi, Pengaduan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
5	Dinas Penanaman Modal, PTSP & TK	Agen Perizinan	Aman, Imun, Imun
			Sayang Difabel dan Kelompok Rentan Covid-19
			Inventarisasi asset dengan Barcode
		-	Peizinan di Ujung Jari
6	Dinas Pariwisata	Event festival Budaya To Berru	Pokdarwis + (Kelompok Sadar Wisata Plus)
			Dokter Pariwisata (Pendorong kemajuan Terpadu Pariwisata)
		Pengembangan Destinasi Baru	Aplikasi Jelajah Wisata Barru
7	RSUD	-	Pelayanan Geriatri
		-	Pelayanan Pendaftaran Online
8	Dinas Kesehatan	-	Cetar Membahana (Cepat, Tepat, Tatarur, Memberi Harapan) Co-19 Dinkes Kab. Barru
			PSC 119
		-	Posyandu Terintegrasi
9	Inspektorat Daerah	-	Klinik konsultasi
		-	E- Audit
		-	Asistensi APBDes
		-	Asistensi RKAS
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Peningkatan Mitigasi Bencana
		-	Peningkatan Penanganan Darurat Bencana
		-	Analisis Kajian Bencana (JITU PASNA)

NO	NAMA OPD	Judul Inovasi Tahun 2018 - 2019	Judul Inovasi Tahun 2020 - 2021
11	BPKAD	-	PAKSA (Pelaporan Akuntansi Secara Akurat)
			SIBALI RESO (Sistem Informasi Bebas Administrasi, Resfonsif Online)
			BUKA MATA (Membangun Komitmen Menata Aset/Klinik Aset)
		-	Sigadis Peka (Sistem Informasi dan Integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah)
12	Bakesbangpol & Linmas	-	Program Inovasi Pengolahan Data Kesbangpol Berbasis Internet
13	BAPPEDA	SiramS (Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi Survey)	Klinik Lakip
			M-Water
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	Bolata Yassiberrui
			Dokter SanTIK
			e-Paper
		-	Register tamu secara digital
		-	Agenda Rapat Digital
15	Dinas PMD,PPKB&P3A	-	Klinik Desa
		-	Membangun Sinergitas dalam Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	Pemanfaatan sampah menjadi Biogas dan Pembangkit Tenaga Listrik
		-	Peningkatan Laboratorium menjadi Laboratorium Terakreditasi
		-	Pengurangan Sampah Kelola Bank Sampah
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung olahraga
		-	Kolaborasi dan Sinergitas percepatan pengembangan wirausaha muda
18	Dinas Pertanian	-	Pengembangan Kawasan Agribisnis Berkelanjutan
		-	Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Masyarakat
		-	Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian oleh BPP

NO	NAMA OPD	Judul Inovasi Tahun 2018 - 2019	Judul Inovasi Tahun 2020 - 2021
19	Dinas Perikanan	-	RECODEOIL PERIKANAN
		-	APLIKASI SMAR-HAT
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	Terus Terang, Terang Terus
		-	Pendataan RTLH Berbasis System Informasi (E-RTLH)
21	Dinas Pendidikan	-	SIM-KGB Online
		-	SIM-MUTASIPD
			Literasi Sekolah
		-	Memperkenalkan Sastra Tuter (Massure') Kepada Siswa
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	GERBANG POSIL (Gerakan membangun pemeliharaan operasional saluran irigasi dan jalan)	Total Jaring Kondom (Tindakan Operasional Tambal Lubang jalan Irigasi Kondisi Objek Aman)
			Gerbang Putri Ayu (Gerakan Membangun Penetaan dan Pemanfaatan Ruang Aman dan Nyaman)
23	Dinas Perhubungan		Menuju Normal Baru, Menuju Kebiasaan Baru di Sektor Transpostasi Laut
		-	Sinergitas stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Barru
24	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Pencegahan Pelanggaran PERDA melalui Bintaro (Pembinaan, Penguatan Kelembagaan dan Integritas Patroli)
		-	Penanganan Kebakaran Berbasis Masyarakat Melalui Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
25	Sekretariat Dewan	-	SIAP RAPI (Sistem Informasi Aspirasi Publik - Reses dan Administrasi Perkantoran Inovatif)
		-	KHARISMA DPRD BARRU
26	Kecamatan Pujananting	-	P.5 Pujananting
		-	Gebyar PBB
27	Kecamatan Soppeng Riaja	-	Laboratorium Desa Membangun
		-	Strategi advokasi Penanganan Sampah (Unit Layanan)

NO	NAMA OPD	Judul Inovasi Tahun 2018 - 2019	Judul Inovasi Tahun 2020 - 2021
28	Kecamatan Mallusetasi	-	SIMPLE (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) Dengan Percepatan pelayanan pencatatan sipil dan Kependudukan dan Pendistribusian Surat Online
29	Kecamatan Balusu	-	Pelayanan Adinistrasi Terpadu
		-	Pelayanan Perizinan (Aplikasi penerbitan IUMK dan Persuratan melalui WA)
30	Kecamatan Tanete Rilau	-	APESPEDE (Aplikasi SPPD)
		-	Anda Puas Kami Senang (Sistem Pelayanan)
31	Kecamatan Tanete Riaja	-	BERJUMPA BERLIAN (Bersama Masyarakat, jum'at pagi bersihkan lingkungan)
32	Kecamatan Barru	-	Inovasi Pelayanan Terpadu
33	Bagian Hukum	-	Media Online Produk Hukum Daerah
		-	Mempercepat Penyelesaian TL dengan Aplikasi SIPTL
34	Bagian Humas	-	Teamsus Media Desa/ Kelurahan
		-	Sosial Care
35	Bagian Pemerintahan dan Otda	-	Excelent Service dengan Stop Reduplikasi Adminstrasi Pemerintahan
		-	Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui e- mail pada semua Kecamatan di Kabupaten Barru
36	Bagian Umum	-	Aplikasi 3 Sipa
		-	Memberi Kenyamanan pada Pengguna Kamar Kecil Kantor Bupati Barru
37	Bagian Administrasi perekonomian	-	Klinik UMKM
		-	Dewan CSR
38	Bagian Organisasi	-	E- TUSI (Tugas Pokok dan Fungsi secara Elektronik)
39	Bagian Administrasi Pembangunan	-	Penerapan AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal)
		-	Pabbicara Administrasi Penyedia Barjas

NO	NAMA OPD	Judul Inovasi Tahun 2018 - 2019	Judul Inovasi Tahun 2020 - 2021
40	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	Reward Pemerintah Daerah kepada Imam Masjid, Pengawai Syara' dan Guru Mengaji menuju Baitullah atas Prestasinya
41	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	Pengadaan Sewa/Rental Mobil Operasional Pemerintah (E- Katalog)
42	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		KUPAS (UKURAN PAS, AMAN, dan SEHAT) lawan Covid-19
			Berbelanja ala MAMA CANTIK (membiasakan memakai masker, cuci tangan dan tidak berdekatan)
43	Bapenda	-	Normal Baru di Hotel Check
			Yuk Makan Aman Sehat, dengan Pola Hidup Normal Baru

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

Ada 3 fase dalam proses inovasi yaitu : Inisiatif, Ujicoba dan Penerapan. Di Kabupaten Barru terdapat 10 (sepuluh) inovasi merupakan fase penerapan, yang dilakukan pada tahun 2019-2020, 2 (dua) inovasi dalam fase ujicoba, dilakukan pada tahun 2021 dan 75 (tujuh puluh lima) judul inovasi masuk dalam fase inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2021.

Untuk jenis kebaruannya, inovasi dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya. Hampir semua inovasi merupakan kebaruan. Inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Barru merupakan kebaruan untuk menunjang kinerja dari perangkat daerah yang bermanfaat bagi Aparatur sipil Negara, masyarakat maupun bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menghemat energi dan biaya.

5. Pengawasan

a. Persentase Tindaklanjut Temuan

Persentase tindaklanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjut temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.261
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	87	71	33	42	19
2	Jumlah temuan total	101	73	37	50	21
3	Persen ((1/2)x100%)	86,13	97,26	89,19	84	90,47

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2022

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.262
Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	7	17	27	7	22
2	Jumlah total ASN	4217	4.122	4.098	3919	3919
3	Persen ((1/2)x100%)	0,16	0,41	0,66	0,18	0,56

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2022

c. Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 2.263
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah temuan BPK	20	17	10	14	8

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2022

6. Sekretariat Dewan

- a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Tabel 2.264
Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Sekretarat DPRD Kab. Barru Tahun 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang perjumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Barru tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.265
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	683,36	683,36	683,36	683,36
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	5.316	48.616	52.237	54.634
3	Rasio(1/2)	0.128	0.014	0.013	0,012

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan/BPS Kabupaten Barru Tahun 2020

Pada tabel diatas rasio panjang jalan perjumlah kendaraan cenderung menurun disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya dan panjang jalan secara keseluruhan tidak bertambah.

b. Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh

karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini seagai motor pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, irigasi, layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.266
Indeks Layanan Infrastruktur Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kemantapan Jalan	0,606	0,608	0,641	0,651	0,688
2	Kemantapan Irigasi	46,53	49,94	48,06	50,41	50,79
3	Akses Air Minum layak	59,97	88,02	95,30	95,61	96,7
4	Akses Sanitasi Layak	90,04	94,89	100	100	100
5	Ketersediaan Pelabuhan	5	5	5	5	5
Indeks Layanan Infrastruktur		77,61%	85,17%	88,24%	89,26%	

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan / Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2022

c. Jenis dan Jumlah Bank

Jenis dan jumlah Bank di Kabupaten Barru pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.267
Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Uraian	Kantor Cabang	Kantor Capem	Kantor Kas
1	Bank Pemerintah Indonesia	1	2	-
2	Bank Pembangunan Daerah	1	5	6
3	Bank Swasta	1	1	-
4	Jumlah	3	8	6

Sumber : BPS (Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2021)

d. Jumlah Hotel dan Restoran/ Rumah Makan

Jumlah hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Barru tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.268
Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel Non Bintang	17*	17*	17*	23	24
2	Restoran/Rumah Makan	117	117	127	66	57

Sumber : BPS Tahun 2022/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

e. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga yang dinyatakan dalam persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru tahun 2019 -2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.269
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	47.546	49.738	52.524
2	Seluruh Rumah Tangga	56.657	59.635	59.635
3	Persentase	83,91%	83,4%	88,07%

Sumber : BPS Tahun 2022

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

1.Lama Proses Perizinan

Lama proses perizinan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi iklim investasi pada suatu daerah. Adapun lama proses perizinan di Kabupaten Barru pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.270
Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2021

No.	Uraian	Lama Penyelesaian
1.	Surat izin tempat usaha (SITU)	2 hari
2.	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	1 hari
3.	Tanda daftar perusahaan (TDP)	1 hari
4.	Izin gangguan (HO)	0 hari (dihapus)

5.	Izin mendirikan bangunan (IMB)	5 hari
6.	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)	1 hari
7.	Izin penyelenggaraan reklame	1 hari
8.	Izin trayek	1 hari
9	Tanda daftar gudang (TDG)	2 hari
10	Tanda daftar industri (TDI)	0 hari (tidak ada pemohon)
11	Izin usaha industri (IUI)	0 hari (tidak ada pemohon)
12	Izin pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan swasta (IPLP2S)	0 hari (tidak ada pemohon)
13	Izin lingkungan (IL)	5 hari
14	Izin Penelitian (IP)	1 hari
15	Kartu pencari kerja (kartu kuning)	1 hari
16	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	3 hari

Sumber : DPMPSTSP Kab. Barru Tahun 2022

2. Jenis dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barru tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.271

Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan
A	PAJAK	
1.	Pajak Hotel	18.670.000.000
2.	Pajak Restoran	730.000.000
3.	Pajak Hiburan	42.000.000
4.	Pajak Reklame	200.000.000
5.	Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000
6.	Pajak Parkir	3.000.000
7.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.500.000.000
8.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.600.000.000
B	RETRIBUSI	
B.1	Retribusi jasa umum	
1	Retribusi pelayanan kesehatan	2.277.035.635
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	90.000.000
3	Retribusi pelayanan pasar	1.696.397.250
4	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB)	62.840.000
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000
6	Retribusi pelayanan tera /tera ulang	13.370.000
B.2	Retribusi jasa usaha	
1	Retribusi pemekaaian kekayaan daerah (PKD)	1.540.792.000
2	Retribusi tempat pelelangan ikan-Bapenda	50.000.000
3	Retribusi terminal	150.000.000
4	Retribusi tempat khusus parkir	857.025.475
5	Retribusi pelayanan kepelabuhanan	160.358.000
6	Retribusi pelayanan tempat olahraga	69.000.000
7	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	277.200.000
B.3	Retribusi perizinan tertentu	
1	Retribusi izin mendirikan bangunan	800.000.000
2	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	1.500.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2022

3. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Regulasi merupakan salah satu factor yang sangat penting untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah. Adapun jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.272
Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Barru Tahun 2021

No	Nama Perda	Nomor
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2 Tahun 2010
2	Bangunan Gedung	1 Tahun 2009
3	Izin Lingkungan	3 Tahun 2014
4	Izin Lokasi	16 Tahun 2017

Sumber : DPMPSTSP Kab. Barru Tahun 2022

4. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Desa Mandiri yang disebut adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Data Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.273
Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa
Kabupaten Barru 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah Desa Mandiri	7
2	Jumlah Desa Maju	33
3	Jumlah Desa/Kelurahan	40

Sumber : Dinas PMDKBPPPA Kab. Barru Tahun 2022

5. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.274
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kabupaten Barru Tahun 2017-2021

No	JENIS KRIMINALITAS	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Kriminalitas	210	153	139	139	227
	Jumlah penduduk	171.217	171.906	180.509	182,373	189.877
	Angka kriminalitas	12,27	8,90	7,7	7,6	11,9

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2022

2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah

Perkembangan produktifitas total daerah Kabupaten Barru dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Angka partisipasi angkatan kerja yang merupakan perbandingan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Barru berfluktuasi rentang tahun 2017 sampai dengan 2021. Adapun capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.275
Produktifitas Total Daerah Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja	103996	102403	106779	107151	78.272
2	Produktifitas Total Daerah (Miliar Rupiah)	4.169,98	4.420,93	4.797,43	4.839,12	NA

Sumber : BPS Tahun 2022

2.1.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.1.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan

Tabel 2.276
Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2021	Target RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,13	72,16
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,68	6,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,74	5,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,91
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	43,43	47,08
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,34

Sumber : BPS Tahun 2022

2.1.5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barru

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.277

Capaian Indikator Kinerja Utama 2021 Pemerintah Kabupaten Barru

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Target Tahun 2023
			Target	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,3	71,13	72,27
2	Indeks Pendidikan	Poin	-	65,22	70,28
3	Indeks Kesehatan	Poin	-	75,49	76,93
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah		11,02	11,35
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0	0	0,009
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	-	0	7,25
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	-		0,72
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	-		11,11
9	Indeks Williamson	Poin	-	0,29	0,28
10	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	-		3,874
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,98	4,77	5,91
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	-		52,52
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66	75,67	74
14	Indeks Gini	Poin	0,34	0,36	0,34
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	6,74	5,31
16	Angka Kemiskinan	%	8,11	8,68	6,67
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	-		70
18	Nilai SAKIP	Poin	CC		65
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	-		3,7
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	6,5	5,42	6,1

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Target Tahun 2023
			Target	Capaian	
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	-		0,001

Sumber : BPS Tahun 2022, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

2.1.5.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021 diukur melalui indikator kinerja yang menunjukkan bahwa dari 199 yang diukur, terdapat 59 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020, 57 indikator yang sesuai target 2020 dan 83 indikator yang belum mencapai target 2020. Kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020 dengan berbagai indikator dan capaiannya disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.278

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
1					ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	1				KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	1	1			Tingkat kemiskinan	%	9,71	9,04	8,57	8,26	9,71
1	1	2			Pertumbuhan Ekonomi	%	6,48	6,81	7,41	0,87	4,77
1	1	3			PDRB per kapita	Juta Rp	34,48	37,15	42	40,3	43,4
1	1	4			Indeks Gini	Poin	0,389	0,38	0,36	0,36	0,359
1	1	5			Laju inflasi	%	3,43	1,96	2,45	1,61	4,09
1	1	6			Indeks Williamson	Poin	0,24	0,27	0,29	0,29	0,29
1	2				KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	2	1			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,56	69,63	70,6	71	71,13
1	2	2			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,6	5,38	5,79	6,39	6,74
1	2	3			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.55	13.56	13,57	13,58	13,59
1	2	4			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.85	7.86	7,96	8,23	8,24
1	2	5			Angka usia harapan hidup	Tahun	68.30	68.60	68,91	69,02	69,07
1	2	6			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,51	95,44	95,42	95,52	95,51
1	2	7			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	63,54	69,24	63,31	63,96	63,98



No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
1	2	8			Indeks Kepuasan Masyarakat		NA	Baik	Baik	Baik	Baik
2					ASPEK PELAYANAN UMUM						
2	2				Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
2	2	1			Pendidikan						
2	2	1	1		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	78,28	79,21	80,25	85,05	91,38
2	2	1	2		Angka Partisipasi Kasar						
2	2	1	2	1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	112,87	99,32	100,49	100,67	101,57
2	2	1	2	2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	113,81	103,23	107,82	112,09	88,87
2	2	1	3		Angka Partisipasi Murni						
2	2	1	3	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	93,67	92,14	94,71	93.99	98,20
2	2	1	3	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,58	85,61	90,42	90.50	82,28
2	2	1	4		Angka partisipasi sekolah						
2	2	1	4	1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	93,67	92,13	100,4	97,69	98,19
2	2	1	4	2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	86,58	85,61	107,38	93,41	95,32
2	2	1	5		Angka Putus Sekolah:						
2	2	1	5	1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,38%	0,18%	0,38%	0,44%	0,45%
2	2	1	5	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,59%	0,35%	1,08%	1,19%	1,36%
2	2	1	6		AngkaKelulusan:						
2	2	1	6	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	98,81	100	100
2	2	1	6	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	97,11	100	100
2	2	1	7		Angka Melanjutkan						
2	2	1	7	1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	101,73	105,81	114,23	122,23	93,61
2	2	1	7	2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	-	NA	NA	NA
2	2	1	8		Fasilitas Pendidikan:						
2	2	1	8	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95,56	88,44	89	94,23	98,81
2	2	1	8	2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	98,07	50	55	55	53,70

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	2	1	9		Rasio ketersediaan sekolah						
2	2	1	9	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	122,39	114,07	102,63	100,06	100,51
2	2	1	9	2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	55,9	53,07	40,59	52,1	NA
2	2	1	10		Rasio guru/murid						
2	2	1	10	1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)		1011,57	1074,24	1228,34	1.100,34	
2	2	1	10	2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)		707,6	819,67	1109,48	1,216,47	
2	2	1	11		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	NA	NA	90,5	90,42	90,81
2	2	1	12		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,89%	95,15%	90,27%	88,24%	94,89%
2	2	2			Kesehatan						
2	2	2	1		Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	1,97	2,31	9,87	3	3
2	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	99,8	99,77	99,13	99,7	99,7
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	0,33	0,99	1,59	1	1
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	5,91	3,29	6,37	2	3
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	65,7	131,8	222,93	98	230
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	0,17	0,13	0,2	0.13	0,14
2	2	2	7		Rasio tenaga medis persatuan penduduk	angka per 1000	0,23	0,32	0,41	0.30	0,31
2	2	2	8		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	77,44	69,77	75,29	100	100
2	2	2	9		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95,68	92,5	95,99	98	96
2	2	2	10		Persentase Balita Gizi buruk	%	0,09	0,02	0,03	0,04	0,03
2	2	2	11		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
2	2	2	12		Cakupan kunjungan bayi	%	101,9	97,1	97,13	95.51	98,92

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	2	2	13		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	91,4	90,52	91,96	93.21	90,53
2	2	2	14		Cakupan pelayanan nifas	%	96,42	90,73	93,57	98.87	91,46
2	2	2	15		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	51,2	53,63	54,47	100	100
2	2	2	16		Cakupan pelayanan anak balita	%	93,01	79,72	79,84	60.60	67,89
2	2	2	17		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	6,42	0	5,04	0	0
2	2	2	18		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	30,99	22,47	92,83	64	77,06
2	2	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2	2	3	1		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Angka	61	0,608	0,641	0,651	0,650
2	2	3	2		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	68,41	60,8	64,1	65,1	65
2	2	3	4		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,04	95,79	95,79	100	100
2	2	3	5		Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	2,39	-	3,88	3,88	NA
2	2	3	6		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	46,61	49,94	48,06	50,41	50,79
2	2	3	7		Rasio Jaringan Irigasi		18,56	18,9	27,73	27,73	27,81
2	2	3	8		Presentase penduduk berakses air minum	%	60,7	88,02	95,3	95,61	96,77
2	2	3	9		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,26	0,26	0,02	0,02	0,016
2	2	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman						
2	2	4	1		Rasio rumah layak huni	Angka	0,26	0,25	0,25	0,24	0,31
2	2	4	2		Rasio permukiman layak huni	Angka	0,08	0,99	0,99	0,99	0,99
2	2	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
2	2	5	1		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Per 10.000 pddk	0,48	0,6	0,6	0,47	0,60
2	2	5	2		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100
2	2	5	3		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	52,98	73,25	100	100	100

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	2	5	4		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100
2	2	5	5		Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100
2	2	6			Sosial						
2	2	6	1		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	31,07	93,2	95,68	45,15	100
2	2	6	2		Presentase PMKS yang tertangani	%	31,07	93,2	95,68	45,15	100
2	3				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2	3	1			Tenaga Kerja						
2	3	1			Angka sengketa pengusaha- pekerja pertahun		0	3,09	0,02	0	0
2	3	1			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		0	0	0		0
2	3	1			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5,59	16,15	92,11	52,8	38
2	3	1			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	4,87	0,73	77,23	79,27	83,22
2	3	1			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0
2	3	1			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100	100	100
2	3	1			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	100	100	0	0
2	3	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2	3	2	1		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	14	18,51	18,55	18,55	9,49
2	3	2	2		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	24	24	20	20	20
2	3	2	3		Rasio KDRT		0, 017	0,02	0,02	0,02	0,02
2	3	2	4		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100



No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	3	2	5		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100
2	3	2	6		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100
2	3	2	7		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
2	3	2	8		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100
2	3	2	9		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
2	3	2	10		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
2	3	3			Pangan						
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama		4178	4366	4379	261,588	229,133
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		0,249	0,275	0,423	0,423	45,2
2	3	5			Lingkungan Hidup						
2	3	5	1		Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
2	3	5	2		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/ Tidak ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
2	3	5	3		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/ Tidak ada	ADA	ADA	ADA	Ada	Ada
2	3	5	4		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		52,4	100	100	50	60,67
2	3	5	5		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		94,02	94,2	93,4	90,59	92,52
2	3	5	6		Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan		51,1	51,2	51,3	69,77	70,25

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	3	5	7		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	4,80%	9,00%	8,00%	0,05	NA
2	3	5	8		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah		52,4	1	0	1	1
2	3	5	9		Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	3	5	10		Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	97,82	97,92	98,01	80,41	65,5
2	3	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2	3	6	1		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,94	0,998	0,997	0,999	
2	3	6	2		Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,92	0,87	0,92	0,92	0,99
2	3	6	3		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100		
2	3	6	4		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	3	6	5		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2	3	6	6		Cakupan Penerbitan KTP	%	92,48	99,84	99,74	99,99	
2	3	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2	3	7	1		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	98	100	100	100	100
2	3	7	2		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1 Kelompok Binaan LPM (kel/desa)	1	1
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		31,59	27,16	27,18	39,44	25,45
2	3	7	4		Presentase LPM Berprestasi	%	0	100	100	100	100
2	3	7	5		Presentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
2	3	7	6		Presentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
2	3	7	7		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30	30	30	30

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	3	7	8		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50%	50%	50	50
2	3	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2	3	8	1		Rasio akseptor KB		69	70	67,88	66,63	69,63
2	3	8	2		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	69,29	69,94	67,88	66,63	75,01
2	3	8	3		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,72	1,7	1,71	1,51	1,75
2	3	8	4		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,37	29,78	19,35	16,71	15,89
2	3	8	5		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14,69	13,71	13,62	13,9	18,02
2	3	8	6		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	40,24	45,29	46,38	50,09	42,3
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	%	56,09	56,49	56,65	45,13	61,05
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	42,88	43,01	43,13	30,1	30,90
2	3	8	9		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	%	36,31	36,72	37,32	33,16	34,05
2	3	8	10		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2	3	8	11		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	971,4 2	1000	1042	900	1024
2	3	8	12		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	38,38	42	44,92	51,15	39,02
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	3	8	1 5		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	1 6		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	1 7		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	8	1 8		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	3	9			Perhubungan						
2	3	9	1		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.810.091	1.693.893	1.682.943	1,682,943	592.908
2	3	9	2		Rasio Ijin Trayek		2,34	2,27	2,24	2,18	2,15
2	3	9	3		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		10	10	9	8	8
2	3	9	4		Presentase layanan Angkutan darat	%	0,056	0,087	0,076	0.076	0,052
2	3	9	5		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Oran g/Ton	939,875 Orang , 11,278 Ton	936.225 Orang , 11,235 Ton	907.025 Oran g, 10.884 Ton	917909	625.518
2	3	9	6		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Oran g/Ton	4.808.655 Orang , 23.765 Ton	4.792.684 Orang , 24.717,87 Ton	1.728.230 Oran g, 9.694.239 Ton	9,694,239	641.295
2	3	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2	3	11	1		Persentase koperasi aktif	%	56,31	56,31	61,76	62,5	62,86
2	3	11	2		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	9,79	100	93,88	96,46	
2	3	11	3		Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	3	11	4		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,75	99,55	99,74	99,27	
2	3	12			Penanaman Modal						
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		350	325	260	118	48
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rp	600.000.000.000,00	729.568.409.663	730.659.152	855.316.873.042	401.993.726.034
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	0,78	35	0,15	17,06	11,13
2	3	13			Kepemudaan dan Olahraga						
2	3	13	1		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100
2	3	13	2		Presentase wirausaha muda	%	78,26	5,56	13,33	13,33	87,81
2	3	13	3		Cakupan pembinaan olahraga	%	23,08	50	93,1	93,1	
2	3	13	4		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	5,75%	74,13	76	76	100
2	3	13	5		Jumlah atlet berprestasi	%	4	0	0	0	0
2	3	13	6		Cakupan pembinaan atlet muda	%	18,52%	100	70,9	70,9	0
2	3	13	7		Jumlah Prestasi olahraga	Org	4	0	0	0	0
2	3	14			Statistik384						
2	3	14	1		Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	3	14	2		Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	3	15			Persandian						
2	3	15	1		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
2	3	16			Kebudayaan						
2	3	16	1		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Poin	1	3	5	5	5
2	3	16	2		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30,6	40,9	53,57	100	100
2	3	16	3		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Poin	1	2	3	3	3
2	3	16	4		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Poin	11	28	28	15	15
2	3	17			Perpustakaan						
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa/tahun	187	194	202,142	121.286	121.286

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	55.344	56,435	58.685	58.685	58.685
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,32	0,31	0,31	0,3	0,3
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	1	3	3	3	3
2	3	18			Kearsipan						
2	3	18	1		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	70.27	72.97	81,08	80,5	80,5
2	3	18	2		Peningkatan SDM pengelolakearsipan		5	3	3	0	4
2	4				Pelayanan Urusan Pilihan						
2	4	1			Pariwisata						
2	4	1	1		Kunjungan wisata	%	176,25	185.88	378,30	186.4	248,95
2	4	1	2		PAD Sektor Pariwisata		0,02	0,03	0,03	0,06	0,06
2	4	2			Pertanian						
2	4	2	1		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	54.13	56.71	51,86	53.42	55,02
2	4	2	2		Cakupan bina kelompok petani	%	16,60	19,75	6.17	23.88	
2	4	3			Perdagangan						
2	4	3	1		Ekspor Bersih Perdagangan		127.438.834	9577188350	95776576939	95776576939	
2	4	3	2		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	16,22	19,77	23,04	30,77	
2	4	4			Perindustrian						
2	4	4	1		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20	20	20,67%	14	
2	4	5			Kelautan dan Perikanan						
2	4	5	1		Produksi perikanan	Ton	24.148,03	24.373,41	25648,66	25733,9	26.167,72
2	4	5	2		Konsumsi ikan	%	99	99	99	99	99
2	4	5	3		Cakupan bina kelompok nelayan	%	175	168	350	388	283
2	4	5	4		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	5.358,57	8.174,37	8.583,00	12555	12.703,36
2	5				Penunjang Urusan						
2	5	1			Perencanaan Pembangunan						
2	5	1	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2016	2017	2018	2019	2020
2	5	1	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	5	1	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	5	1	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak ada	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	5	1	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	98,83	100	100	100	100
2	5	1	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	84,29	100	100	100
2	5	2			Keuangan						
2	5	2	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	5	2	2		Persentase SILPA	%	12,66	14,25	13,37	9,09	12,63
2	5	2	3		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,39 %	27,60 %	25,55 %	22,92	31,58
2	5	2	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,94 %	14,99 %	19,24 %	18,66	21,29
2	5	2	5		Penetapan APBD		29 Desember 2016	20 Desember 2017	17 Desember 2018	29 Desember 2019	30 Desember 2020
2	5	3			Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
2	5	3	1		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	11,89 JPL	9,57 JPL	5,39 JPL	16,56	25,56
2	5	3	2		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,58	5,26	37,63	7,25	11,72
2	5	3	3		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	62,35	68,67	69,58	57,34	67,31
2	5	3	4		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	33 Orang	26 Orang	33 Orang	30	28
2	5	3	5		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	493 Orang	530 Orang	579 Orang	544	343
2	5	3	6		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.695 Orang	2.695 Orang	2.654 Orang	3.345	2857



No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satu an	Realisasi				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	5	4			Penelitian dan Pengembangan						
2	5	4	1		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	50	100	100
2	5	4	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	93,41	88,24	75	87,5	100
2	5	4	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	41,66	47,22	52,77	90,90	100
2	5	4	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	41,66	47,22	52,77	64,93	72,92
2	5	5			Pengawasan						
2	5	5	1		Persentase tindak lanjut temuan	%	88,77	91,67	70,37	76,74	90,47
2	5	5	2		Persentase pelanggaran pegawai	%	0,16	0,41	0,66	0,18	0,56
2	5	5	3		Jumlah temuan BPK		20	17	10	14	8
2	5	6									
2	5	6			Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	5	6			Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	5	6			Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2022

2.1.5.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimala (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Capain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.279
Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2017 -2021

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2017	2018	2019	2020	2021
SPM PENDIDIKAN							
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	78,28%	79,21%	80,25%	85,05%	91,38%
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	86,58%	85,61%	90,42%	90,50%	96,32%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	37,16%	37,16%	36,10%	36,10%	84,19
SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	100%	100%	90.52%	91,96%	100%	91%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100%	100%	92.5%	98,98%	100%	93%
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100%	100%	94.36%	97,64%	100%	99%

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100%	100%	79.72%	95,94%	61%	68%
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	100%	100%	95.38%	97,17%	64%	77%
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100%	100%	42.44%	91,16%	57%	2%
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100%	100%	61.44%	91,17%	79%	3%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	71.04%	100%	100%	4%
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	100%	100%	100%	100%	100%	33%
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	100%	100%	100%	100%	51%
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	100%	100%	100%	100%	100%	39%
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	100%	100%	19%	98%	72%	82%
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	59,97%	88,02%	95.30%	95,61 %	96,7 %
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	90,04%	94,89%	95,79%	100%	100%
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0	0	14%	0	0
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	0	0	0	0	0
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	80%	80%	80%	80%
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	40%	40%	40%	40%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	32%	100%	100%	100%
SPM SOSIAL							
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	63,24%	100%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	41%	0	63,24%	100%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	8,00%	74,37%	75%	100%	100%
4	rehabilitasi sosial das ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	7,49%	100%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM kabupaten Barru masih perlu perhatian karena pencapaian yang belum maksimal. Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya sangat diperlukan. Adapun permasalahan terkait pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM sehingga program-program terkait SPM yang diupayakan belum dapat mendorong akselerasi dan efektifitas pencapaian target SPM menuju 100%.
2. Pada jenjang Pendidikan dan Kesehatan diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan dan juga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri.
3. Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan penanggulangan bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya fasilitas bencana.
4. Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk *home/day care services* bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada warga miskin tidak potensial.

Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

2.1.5.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen

dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dari 220 indikator tersebut yang kemudian dilaksanakan hanya sebanyak 55 indikator. Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.280
Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2017 s/d 2021 Berdasarkan Tujuan

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2018	2019	2020	2021		
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	9,04	8,57	8,26	8,68	8,11	Meningkat
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Orang	6332	6332	6430	NA	6565	Undefenition
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	88,02	95.3	95,61	96,7	100	Meningkat
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	95,1	95,79	100	100	100	Dipertahankan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	92,14	94,71	93.99	98,20	95	Meningkat
6	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jiwa/ 100.0000 org	NA	0,30	0,002	NA	0	Undefenition
7	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Desa	2	2	3	NA	2	Undefenition
8	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rp	NA	259.048.000	147.230.000	NA	0	Undefenition
9	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program	%	3.51	5,01	5,72	NA	1.55	Undefenition

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2018	2019	2020	2021		
	pemberantasan kemiskinan							
10	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	73.51	73.51	7	NA	76.8	Undefenition
11	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	42.6	42,01	41,87	NA	48.94	Undefenition
12	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Kurus)	Poin	0.03	0,02	0,01	NA	0	Undefenition
13	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	89.1	NA	91,2	NA	95	Undefenition
14	Angka Kematian Ibu (AKI)	Poin	4	222,93	98	230	0	Meningkat
15	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	/ 1000 jiwa	3,29	6,37	2	3	0,74	Meningkat
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	/ 1000 jiwa	2,31	9,87	3	3	4	Tetap
17	Kejadian Malaria per 1000 orang.		4,99	2	0,53	2	0.9	Meningkat
18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	%	2.6	2,6	2,1	NA	15.4	Undefenition
19	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	10.27	13,62	13,90	18,02	10.3	Meningkat
20	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	98	99	99	NA	82,55	Undefenition
21	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	75.55	81,24	81,24	NA	100	Undefenition
22	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	62.26	74,36	74,36	NA	100	Undefenition
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	99,32	100,49	100.67	88,87	103	Menurun
24	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	85.04	NA	86.13	NA	88,75	Undefenition

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2018	2019	2020	2021		
25	Rasio Partisipasi (APM) perempuan/laki-laki SD/MI/ sederajat Angka Murni di		92.14	94,71	93.99	98,20	94	Meningkat
26	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	keg	3	5	6	6	6	Tetap
27	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	%	69.29	69.29	72,87	75,01	87,29	Meningkat
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	88,02	95.3	95,61	96,7	100	Meningkat
29	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	88,02	95.3	95,61	96,7	100	Meningkat
30	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	95,1	95,79	100	100	100	Tetap
31	Jumlah desa/kelu yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan.	Desa/Kel	16	38	55	55	41	Tetap
32	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal.	Kec	6	7	7	7	7	Tetap
33	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	kk	450	1810	1810	1.221	550	Menurun
34	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	66.22	61,67	50	60,67	100	Meningkat
35	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Persentase	6,51	6,13	6,02	NA	7,39	Undefenition
36	PDRB per kapita.	Juta Rupiah	37,15	41,71	42,43	43,42	47,15	Meningkat
37	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,32	5,79	6,39	6,74	5.34	Meningkat
38	Jumlah wisatawan mancanegara.	org	245	NA	NA	NA	3500	Undefenition
39	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Org	54590	NA	NA	NA	31500	Undefenition

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Target akhir periode (2021)	Interpretasi
			2018	2019	2020	2021		
40	Panjang jalur kereta api. (km)	km	50.25	50.25	50,25	50,25	30	Tetap
41	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap per kapita.	(000)Rupiah	181 436.94	181 436.94	181 436.94	NA	2 812 249	Undefenition
42	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	%	5,12	5,12	5,12	NA	6,46	Undefenition
43	Koefisien Gini.		0,39	0,38	0,36	0,359	0.34	Menurun
44	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	%	9.04	8,57	8,26	NA	8,11	Undefenition
45	Jumlah desa tertinggal.	Desa	0	0	0	0	12	Tetap
46	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	NA	0,30	0,002	NA	0	Undefenition
47	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	rp	NA	259.048.000	147.230.000	NA	0	Undefenition
48	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	%	18	18	21	NA	33,28	Undefenition
49	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	JIWA	NA	0,30	0,002	NA	0	Undefenition
50	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%	51.26	51.26	69,77	NA	55,1	Undefenition
51	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	0	0	0	NA	4	Undefenition
52	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jiwa	0	0	0	NA	0	Undefenition
53	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	NA	0,10	0,002	NA	0	Undefenition
54	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	11.11	11.11	11,11	11,11	15,50	Tetap
55	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	89.09	92,05	92	NA	98	Undefenition

Sumber : Bappeda Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan

perhatian dalam perencanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 untuk dipenuhi target pencapaiannya itu sebanyak 55 Indikator. 46 indikator sampai dengan Tahun 2019 belum tercapai, 3 indikator yang sesuai dan 6 indikator TPB yang telah mencapai target. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian TPB/SDGs dikarenakan penerapan SGD's dari keseluruhan stakeholders terdapat kurang pemahaman akan pentingnya implementasi SDGs, yaitu dari segi masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya paham akan pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan SDGs. Sehingga harapannya para stakeholders dapat saling memaksimalkan dan mendukung akan implementasi dari Sustainable Development Goals.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Barru melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program Kegiatan, dan Sub. Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel 2.281
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	9	2	2	2	2	2	2	7	0	7	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	18	5	5	5	5	5	5	13	0	13	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	2	2	2	2	2	2	1	0	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	5	5	5	5	5	5	9	0	9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8	5	5	5	5	5	5	3	0	3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7	3	3	3	3	3	3	4	0	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8	3	3	3	3	3	3	5	0	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11	5	5	5	5	5	5	6	0	6	DINAS SOSIAL
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	5	5	5	5	5	5	-1	0	-1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	6	6	6	6	6	6	-2	0	-2	DINAS KETAHANAN PANGAN
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	4	4	4	4	4	4	6	0	6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7	2	2	2	2	2	2	5	0	5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10	3	3	3	3	3	3	7	0	7	DINAS PERHUBUNGAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	3	3	3	3	3	3	4	0	4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	6	6	6	6	6	6	2	0	2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7	6	6	6	6	6	6	1	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10	3	3	3	3	3	3	7	0	7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	1	1	1	1	1	1	-1	0	-1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	3	3	3	3	3	3	-1	0	-1	DINAS PENDIDIKAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5	2	2	2	2	2	2	3	0	3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4	1	1	1	1	1	1	3	0	3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	4	4	4	4	4	4	4	0	4	DINAS PERIKANAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8	5	5	5	5	5	5	3	0	3	DINAS PARIWISATA
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12	7	7	7	7	7	7	5	0	5	DINAS PERTANIAN
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	2	2	2	2	2	2	2	0	2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
35	SEKRETARIAT DAERAH	17	3	3	3	3	3	3	14	0	14	SEKRETARIAT DAERAH
36	SEKRETARIAT DPRD	1	2	2	2	2	2	2	-1	0	-1	SEKRETARIAT DPRD
37	PERENCANAAN	13	3	3	3	3	3	3	10	0	10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
38	KEUANGAN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
39	KEUANGAN	7	2	2	2	2	2	2	5	0	5	BADAN PENDAPATAN DAERAH
40	KEUANGAN	6	3	3	3	3	3	3	3	0	3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
41	KEPEGAWAIAN	8	3	3	3	3	3	3	5	0	5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
42	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
43	INSPEKTORAT DAERAH	8	3	3	3	3	3	3	5	0	5	INSPEKTORAT
44	KECAMATAN	12	4	4	4	4	4	4	8	0	8	KECAMATAN TANETE RIAJA

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
45	KECAMATAN	10	4	4	4	4	4	4	6	0	6	KECAMATAN MALLUSETASI
46	KECAMATAN	11	4	4	4	4	4	4	7	0	7	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
47	KECAMATAN	11	4	4	4	4	4	4	7	0	7	KECAMATAN BALUSU
48	KECAMATAN	11	4	4	4	4	4	4	7	0	7	KECAMATAN BARRU
49	KECAMATAN	11	4	4	4	4	4	4	7	0	7	KECAMATAN PUJANANTING
50	KECAMATAN	12	4	4	4	4	4	4	8	0	8	KECAMATAN TANETE RILAU
51	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
52	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	6	6	6	6	6	6	3	0	3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		367	178	178	178	178	178	178	189	0	189	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 367 program, dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2021 juga berjumlah 178 program
 - b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 189 program diantara kedua dokumen tersebut.
2. Kesesuaian program RKPD dan APBD
 - a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 178 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 178 program. Untuk kesesuaian program yang sama antara RKPD dan APBD sejumlah 178 program.
 - b. Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah program yang ada di RPJMD namun tidak terdapat dalam APBD

Dari kedua hal diatas, adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah program RPJMD dan RKPD Tahun 2021 disebabkan adanya penyesuaian nomenkelatur dari permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah ke Permendari 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dilakukan pemetaan Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan untuk mendapatkan kesesuaian indikator yang akan dicapai.

Tabel 2.282
Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	10	10	10	10	10	0	0	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	16	16	16	16	16	0	0	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	3	3	2	2	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13	13	13	13	13	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	2	2	2	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	1	1	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	10	10	10	10	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10	10	10	10	10	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	11	11	11	11	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11	11	11	11	11	0	0	DINAS SOSIAL
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	3	3	3	3	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	8	7	7	0	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	15	15	15	15	15	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	1	1	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	1	1	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18	18	18	18	18	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10	10	11	10	10	0	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	9	9	9	9	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	5	5	5	5	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12	12	12	12	12	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	8	8	8	8	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11	11	11	11	11	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11	11	11	11	11	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12	12	12	12	12	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2	2	2	2	2	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	4	4	0	0	DINAS PENDIDIKAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8	8	8	8	8	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	3	3	3	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15	15	15	15	15	0	0	DINAS PERIKANAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12	12	12	12	12	0	0	DINAS PARIWISATA
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	21	21	21	21	21	0	0	DINAS PERTANIAN
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	4	4	4	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	2	2	2	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
35	SEKRETARIAT DAERAH	16	16	16	16	16	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
36	SEKRETARIAT DPRD	12	12	12	12	12	0	0	SEKRETARIAT DPRD
37	PERENCANAAN	12	12	12	12	12	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
38	KEUANGAN	1	1	1	1	1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
39	KEUANGAN	7	7	7	7	7	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
40	KEUANGAN	12	13	13	12	12	1	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
41	KEPEGAWAIAN	11	11	11	11	11	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2021	RKPD 2021 & RKPD Perubahan	
42	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	2	2	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
43	INSPEKTORAT DAERAH	10	10	10	10	10	0	0	INSPEKTORAT
44	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN TANETE RIAJA
45	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN MALLUSETASI
46	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
47	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN BALUSU
48	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN BARRU
49	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN PUJANANTING
50	KECAMATAN	11	11	11	11	11	0	0	KECAMATAN TANETE RILAU
51	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1	1	1	1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
52	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	11	11	11	11	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		453	455	457	453	453	2	4	

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD 2021 dan APBD 2021 .

- a. Kegiatan dalam RKPD 2021 adalah sejumlah 453 sementara dalam APBD adalah sejumlah 455. Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen ini tidak konsisten, ada selisih 2 kegiatan.
- b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD 2021 dan RKPD perubahan ada perbedaan 4 Kegiatan.
- c. Dari 2 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD 2021 dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2021 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2019 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD tahun 2021

Tabel 2.283

Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	50	53	53	50	53	3	3	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	52	52	52	52	52	0	0	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	4	4	3	4	1	1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46	46	46	46	46	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	7	7	7	7	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	1	1	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20	20	20	20	20	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	31	31	31	31	31	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28	28	28	28	28	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23	23	23	23	23	0	0	DINAS SOSIAL

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	4	4	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	8	9	8	8	0	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	35	35	35	35	35	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	1	1	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3	3	3	3	3	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	31	31	31	31	31	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18	18	22	18	18	0	4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	27	28	28	27	28	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	6	6	6	6	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24	24	26	24	24	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	26	26	26	26	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21	21	21	21	21	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22	22	23	22	22	0	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	28	28	28	28	28	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	2	2	1	1	1	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	3	3	3	3	3	0	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	5	5	5	5	0	0	DINAS PENDIDIKAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18	18	18	18	18	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5	5	5	5	5	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	29	29	29	29	29	0	0	DINAS PERIKANAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	22	23	23	22	23	1	1	DINAS PARIWISATA
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	40	40	40	40	40	0	0	DINAS PERTANIAN
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	6	6	6	6	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	4	4	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
35	SEKRETARIAT DAERAH	54	54	54	54	54	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
36	SEKRETARIAT DPRD	29	29	30	29	29	0	1	SEKRETARIAT DPRD
37	PERENCANAAN	23	23	24	23	23	0	1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
38	KEUANGAN	1	1	1	1	1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
39	KEUANGAN	21	21	22	21	21	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
40	KEUANGAN	24	29	29	24	29	5	5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
41	KEPEGAWAIAN	23	23	23	23	23	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
42	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	2	2	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
									PENGEMBANGAN DAERAH
43	INSPEKTORAT DAERAH	29	29	29	29	29	0	0	INSPEKTORAT
44	KECAMATAN	22	22	22	22	22	0	0	KECAMATAN TANETE RIAJA
45	KECAMATAN	22	22	22	22	22	0	0	KECAMATAN MALLUSETASI
46	KECAMATAN	23	23	23	23	23	0	0	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
47	KECAMATAN	23	23	23	23	23	0	0	KECAMATAN BALUSU
48	KECAMATAN	22	22	22	22	22	0	0	KECAMATAN BARRU
49	KECAMATAN	24	24	24	24	24	0	0	KECAMATAN PUJANANTING
50	KECAMATAN	23	23	23	23	23	0	0	KECAMATAN TANETE RILAU
51	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1	1	1	1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
52	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	18	18	18	18	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		1032	1044	1055	1032	1043	12	20	

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD 2021 dan APBD 2021 .

- a. Sub. Kegiatan dalam RKPD 2021 adalah sejumlah 1032 sementara dalam APBD adalah sejumlah 1044. Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen ini tidak konsisten, ada selisih 12 Sub. kegiatan.
- b. Untuk jumlah Sub. kegiatan Antara RKPD 2021 dan RKPD perubahan ada perbedaan 20 Sub. Kegiatan.
- c. Dari 12 Sub. kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD 2021 dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Tabel 2.284
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Barru

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
	Kepegawaian															
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	1.774.803.019	93,61	1.239.025.715	100	185.636.300	92,97%	97,97%	93,18%	1.420.899.989	93,18%	80,06%	
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah	jenis	2	1.267.779.319	2	861.034.165	2	122.306.800	100,00%	97,12%	2,00	979.812.939	100,00%	77,29%	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tanggayang disediakan	jenis	108	12.766.200	82	14.351.000	2	3.800.800	100%	97,93%	84	18.073.300	77,78%	141,57%	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	OK	962	1.255.013.119	767	846.683.165	101	118.506.000	111%	97,09%	879	961.739.639	91,37%	76,63%	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OH													
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis	1	507.023.700	1	377.991.550	1	63.329.500	100,00%	99,63%	1	441.087.050	100,00%	87,00%	
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama setahun	eks	20.941	507.023.700	16060	377.991.550	3780	63.329.500	92,49%	99,63%	19.556	441.087.050	93,39%	87,00%	
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	499.886.280	74,35	377.117.178	100	31.094.644	105,41%	89,32%	73,70%	404.892.027	73,70%	81,00%	
	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	94	313.368.850	68	280.253.643	0	-	0,00%	0,00%	68	280.253.643	72,34%	89,43%	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	52	239.387.800	36	222.281.893	0	-	0,00%	0,00%	36	222.281.893	69,23%	92,85%	
	Pengadaan meubel	Jumlah pengadaan meubeleut	unit	42	73.981.050	32	57.971.750	0	-	0,00%	0,00%	32	57.971.750	76,19%	78,36%	
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	243	186.517.430	138	96.863.535	37	31.094.644	105,41%	89,32%	177	124.638.384	72,84%	66,82%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang masa berlakunya	unit	109	136.910.430	84	83.086.935	19	24.194.644	94,74%	86,55%	102	104.026.784	93,58%	75,98%	
		Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	unit													

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	134	49.607.000	54	13.776.600	18	6.900.000	116,67%	99,06%	75	20.611.600	55,97%	41,55%	
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	%	100	550.801.500	69,57	201.574.200	100	65.629.000	213,33%	96,61%	81,36%	264.978.850	81,36%	48,108%	
	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi aparatur BKPSDM	diklat	118	550.801.500	64	201.574.200	15	65.629.000	213,33%	96,61%	96	264.978.850	81,36%	48,11%	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur /PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	118	550.801.500	64	201.574.200	15	65.629.000	213,33%	96,61%	96	264.978.850	81,36%	48,11%	
	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan penyebaran informasi dan peraturan perundang-undangan	%	100	141.981.800	78,77	61.058.300	0	-	0,00%	0,00%	64,97%	61.058.300	64,97%	43,004%	
	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah peraturan perundang- undangan yang disosialisasikan	peraturan	11	141.981.800	7	61.058.300	0	-	0	0	7	61.058.300	63,64%	43,00%	
	Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	orang	571	141.981.800	371	61.058.300	0	-	0,00%	0,00%	371	61.058.300	64,97%	43,00%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										102,93%	70,98%			78,30%	63,04%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	sedang			tinggi	rendah	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin PNS	%	99,54	53.674.400	99,82	38.843.000	99,54	7.389.600	99,90%	97,74%	99,44%	46.065.400	99,44%	85,82%	
	Kegiatan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Teridentifikasinya aparatur yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin	orang	20	53.674.400	7	38.843.000	20	7.389.600	110,00%	97,74%	22	46.065.400	110,00%	85,82%	
	Pembinaan disiplin	Persentase keterpenuhan jam kerja aparatur	%	97,2	53.674.400	93,08	38.843.000	97,20	7.389.600	101,78%	97,74%	98,93	46.065.400	101,78%	85,82%	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	%	100	1.923.157.118	119,42	916.387.048	100	317.447.100	158,32%	97,94%	109,27%	1.227.283.688	109,27%	63,82%	
	Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	orang	6228	1.923.157.118	6206	916.387.048	543	317.447.100	158,75%	97,94%	7.068	1.227.283.688	113,49%	63,82%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kepegawaian ASN	Jumlah dokumen data kepegawaian dan kebutuhan PNS	dokumen	21		17		4		100,00%		21		100,00%		
	Pengelolaa data kepegawaian	Jumlah dokumentasi data/statistik kepegawaian daerah	dokumen	10	30.739.300	8	21.586.000	2	5.347.700	100,00%	96,71%	10	26.757.700	100,00%	87,05%	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian bidang pengembangan (cuti, Karpeg, Taspen, Karis Karsu, Karip, Persemayaman, Izin cerai, Pertimbangan/Telaahan Staf)	orang	4884	47.082.000	4985	25.015.000	250	6.825.500	215,20%	87,15%	5.523	30.963.500	113,08%	65,77%	
	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS dan PPPK	orang	495	1.138.430.900	550	456.381.930	168	257.578.550	100,00%	98,80%	718	710.861.530	145,05%	62,44%	
		Jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan	orang													
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan PNS	dokumen	11	203.899.400	9	134.377.600	2	3.724.500	100,00%	99,36%	11	138.078.100	100,00%	67,72%	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah aparatur yang menerima SK Pensiun	orang	849	503.005.518	671	279.026.518	125	43.970.850	124,80%	94,60%	827	320.622.858	97,41%	63,74%	
	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang diisi	jabatan	2004	2.675.786.665	1567	1.201.679.600	395	200.145.100	105,82%	63,78%	1.985	1.329.337.310	99,05%	49,68%	
	Kegiatan Mutasi dan promosi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam mutasi jabatan	orang	2004	2.675.786.665	1567	1.201.679.600	395	200.145.100	105,82%	63,78%	1.985	1.329.337.310	99,05%	49,680%	
	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan	orang	2004	2.675.786.665	1567	1.201.679.600	395	200.145.100	105,82%	63,78%	1.985	1.329.337.310	99,05%	49,68%	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi	%	100	1.186.215.467	95,58	523.538.740	100	127.045.300	107,97%	83,08%	93,63%	629.091.140	93,63%	53,03%	
	Kegiatan Mutasi dan promosi ASN	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengelolaankenaikan pangkat	orang	5948	1.186.215.467	4677	523.538.740	750	127.045.300	108,00%	83,08%	5.487	629.091.140	92,25%	53,03%	
		Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karir PNS yang disusun	dokumen	6		0		3		100,00%		3		50,00%		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah PNS yang memasukkan berkas usul kenaikan pangkat	berkas	5948	1.112.715.467	4677	517.520.140	750	108.576.000	108,00%	83,21%	5.487	607.862.990	92,25%	54,63%	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen karir PNS	dokumen	6	73.500.000	0	6.018.600	3	18.469.300	100,00%	82,35%	3	21.228.150	50,00%	28,88%	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Diklat, Penilaian kinerja dan penghargaan	%	100	752.184.350	117,46	406.642.372	100	166.450.900	99,84%	94,58%	125,50%	564.069.672	125,50%	74,99%	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengelolaan pendidikan lanjutan	orang	327	525.864.350	340	251.141.850	35	128.175.000	102,86%	96,24%	376	374.491.350	114,98%	71,21%	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	327	525.864.350	340	251.141.850	35	128.175.000	102,86%	96,24%	376	374.491.350	114,98%	71,21%	
		Jumlah aparatur yang menerima SK ijin belajar/tugas belajar, dan surat keterangan tidak sedang Tubel	orang													
	Kegiatan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah aparatur yang dilayani dalam pelaksanaan penilaian kinerja aparatur dan pemberian penghargaan	orang	7614	226.320.000	5169	155.500.522	4433	38.275.900	99,82%	89,03%	9.594	189.578.322	126,00%	83,77%	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah PNS yang telah diinput data Penilaian Kinerja nya dalam aplikasi E-Lapkin	orang	6000	50.000.000	3172	22.100.600	3674	8.457.400	99,97%	97,84%	6.845	30.375.000	114,08%	60,75%	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah aparatur yang menerima penghargaan satya lancana karya satya	orang	1614	176.320.000	1997	133.399.922	759	29.818.500	99,08%	86,53%	2.749	159.203.322	170,32%	90,29%	
Rata-rata capaian kinerja (%)										114,37%	87,42%			105,38%	65,47%	
Predikat Kinerja										sangat tinggi	tinggi			sangat tinggi	sedang	
	Pendidikan dan pelatihan															
	Program Pengembangan Sumber Daya manusia	Jumlah aparatur yang lulus pendidikan dan pelatihan	orang	960	7.282.478.599	593	4.952.104.750	218	1.909.151.100	100,00%	99,39%	811	6.849.636.850	84,48%	94,06%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I, II, III dan IV TA. 2021 (%)		Unit PD	
																Penanggung jawab	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kegiatan Sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	960	7.282.478.599	593	4.952.104.750	218	1.909.151.100	100,00%	99,39%	811	6.849.636.850	84,48%	94,06%		
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	orang	960	7.282.478.599	593	4.952.104.750	218	1.909.151.100	100,00%	99,39%	811	6.849.636.850	84,48%	94,06%		
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural		orang															
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional		orang															
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00%	99,39%			84,48%	94,06%	
Predikat Kinerja											sangat tinggi	sangat tinggi			tinggi	sangat tinggi	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									3.009.989.044								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)											105,77%	85,93%			89,39%	74,19%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)											sangat tinggi	tinggi			tinggi	sedang	
Faktor	1. Komitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan																
	2. Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga aparatur memahami tugas pokok dan fungsinya																
Faktor	Penghambat Keberhasilan Kinerja : Adanya kondisi global (pandemi virus corona) yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	Persen	100	219.344.750	100	137.509.750	100	76.414.500	100	71,20	100	191.914.100	100,00	87,49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kegiatan	3	219.344.750	3	137.509.750	3	76.414.500	100	71,20	3	191.914.100	100,00	87,49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan bagi pegawai dan TRC BPBD.	Pasang	108	60.500.000	72	28.100.000	36	19.200.000	66,66667	100,00	96	47.300.000	88,89	78,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan Aparat mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Orang	22	12.180.000	18	8.700.000	4	2.611.000	100	77,94	22	10.735.000	100,00	88,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur mengikuti Bimbingan Teknis.	Orang	36	146.664.750	32	100.709.750	4	54.603.500	100	60,75	36	133.879.100	100,00	91,28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Persen	100	1.912.911.736	100	1.525.280.383	100	297.172.028	50	79,11	75	1.760.361.218	75,00	92,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kegiatan	3	642.921.018	3	500.134.109	3	132.090.068	100	71,78	3	594.953.584	100,00	92,54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang terkirim,Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya,Jumlah paket/pengiriman surat,Jumlah pembayaran tenaga honorer/Relawan PB per bulan,Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor berdasarkan jenisnya,Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan berdasarkan jenisnya,Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas,Jumlah persediaan makan dan minum berdasarkan orang dan jumlah hari.	jenis	8	413.725.850	8	347.219.109,00	8	57.725.600	100	100,00	8	404.943.554	100,00	97,88	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar.	Rekening	14	170.679.468	10	104.915.000,00	2	64.764.468	100	42,45	12	132.410.030	85,71	77,58	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang melakukan jasa pelayanan kantor.	orang/bulan	2	58.515.700	2	48.000.000	2	9.600.000	100	100,00	2	57.600.000	100,00	98,44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kegiatan	2.784	1.269.990.718	2.477	1.025.146.274	307	165.081.960	99,35	84,96	2782	1.165.407.634	99,93	91,77	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor berdasarkan jenisnya.	Jenis	18	105.599.750	14	58.181.400	4	5.984.360	50	8,02	16	58.661.400	88,89	55,55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor.	Unit	25	186.851.960	18	118.962.300	7	32.463.600	100,00	110,97	25	154.986.660	100,00	82,95	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah	Orang/kali	483	809.874.008	443	715.242.574	40	100.634.000	100	77,27	483	792.999.574	100,00	97,92	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Perjalanan dinas dalam daerah	Orang/kali	2258	167.665.000	2002	132.760.000	256	26.000.000	100	100,00	2258	158.760.000	100,00	94,69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	336.905.150	100	209.133.496	100	72.265.000	100	77,76	100	265.329.996	100,00	78,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	jenis	5	137.091.850	5	89.301.396	5	35.900.000	100	57,93	5	110.097.896	100,00	80,31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	Unit	12	44.709.694	6	35.812.000	6	8.405.500	100	255,78	12	57.312.000	100,00	128,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dians/Operasional	Unit	24	112.811.850	20	74.541.396	4	35.000.000	100	57,99	24	94.837.896	100,00	84,07	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor BPBD dalam kondisi layak.	buah	69	24.280.000	20	14.760.000	9	900.000	55,56	55,56	25	15.260.000	36,23	62,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor dalam kondisi layak.	Unit	37	36.320.000	20	28.560.400	5	2.958.182	60	66,20	23	30.518.582	62,16	84,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kegiatan	37	199.813.300	18	119.832.100	12	36.365.000	100	97,35	30	155.232.100	81,08	77,69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional.	Unit	6	130.864.000	4	71.832.800	2	34.365.000	100	97,19	6	105.232.800	100,00	80,41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor.	Unit	31	68.949.300	14	47.999.300	10	2.000.000	100	100,00	24	49.999.300	77,42	72,52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										83,33	76,02			91,67	86,09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PREDIKAT KINERJA										Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	cakupan warganegara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	Persen	100	2.915.423.038	100	1.995.972.254	100	506.802.850	97,38	94,94	7,00	195.698.648	92,77	87,08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Kecamatan yang memperoleh layanan informasi bencana	Kecamatan	7	157.551.400	7	132.551.400	7	24.187.200	100	100,00	7	156.738.600	100,00	99,48	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jenis media informasi pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Barru.	jenis	2	157.551.400	2	132.551.400	2	24.187.200	100	100,00	2	156.738.600	100,00	99,48	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	Kecamatan	7	1.739.502.322	7	1.088.673.954	7	306.837.700	97,14	94,43	7	197666207,71	89,69	70,62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	Orang	500	559.773.162	400	432.137.000	100	92.200.500	100,00	99,64	500	524.007.500	100,00	93,61	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Alat Pelindung Diri Rescuer,Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana.	jenis	60	148.941.000	46	108.941.000	10	37.100.000	100,00	99,87	56	145.991.000	93,33	98,02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.	Dokumen	4	79.565.000	3	19.792.200	1	6.959.000	100,00	79,51	4	25.325.200	100,00	31,83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana alam.	Unit	176	479.700.960	146	304.704.354	30	61.484.800	100,00	98,52	176	365.277.554	100,00	76,15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah unit perbaikan sarana dan prasarana perumahan akibat bencana non alam.	Unit	115	288.499.600	54	134.114.400	30	55.256.000	80,00	83,48	78	180.239.800	67,83	62,47	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah jiwa yang memperoleh Pemulihan Kesehatan dan Psikologis Pasca Bencana.	jiwa	150	59.280.000	50	8.580.000	50	10.580.000	100	100,00	100	19.160.000	66,67	32,32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana tingkat Desa.Daerah	Orang	110	123.742.600	70	80.405.000	40	43.257.400	100	100,00	110	123.662.400	100,00	99,94	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah Kecamatan yang memperoleh layanan informasi bencana	kecamatan	7	1.018.369.316	7	774.746.900	7	175.777.950	95,00	90,40	7	232.691.138	88,63	91,13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dan dapat digunakan dalam penanganan darurat bencana.	Unit Crisis Centre	1	472.076.050	1	388.719.800	1	83.356.250	100	100,00	1	472.075.250	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak per-100.00 Jiwa	Jiwa	4	76.306.066	3	49.096.000	1	20.479.850	100	100,00	4	69.575.850	100,00	91,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah penampungan sementara disertai rambu dan Peta Jalur Evakuasi di daerah rawan bencana.	Unit	49	304.258.750	25	203.258.750	5	20.479.850	100	100,00	30	223.738.600	61,22	73,54	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan Kebutuhan Dasar dan Logistik bagi korban bencana.	Paket	688	165.728.450	522	133.672.350	150	51.462.000	80,00	61,60	642	165.374.850	93,31	99,79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										97,38	94,94			92,77	87,08	
PREDIKAT KINERJA																
TOTAL				5.384.584.674		3.867.895.883		952.654.378				2.413.303.962				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										86,85	80,75			91,94	86,34	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										tinggi	tinggi			Sangat tinggi	tinggi	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Kerjasama dengan pemerintah setempat yang lebih mengetahui daerahnya, sarana pengangkutan bantuan sosial diadakan terutama mobil pick up dan Penambahan Pegawai /personil yang menangani bantuan ke korban bencana																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Belum maksimal pengambilan data pada saat terjadi bencana, dan sarana pengangkutan bantuan belum mencukupi, Keterbatasan SDM yang disebabkan kurangnya personil																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																
*) DIISI OLEH KEPALA BAPPEDA																

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	501.650.000	100	-	100	443.022.450	100	95	100	419.115.905	100	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jenis		169.000.000		60.507.940		56.705.000	-	116	-	126.463.525	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pembayaran jasa surat menyurat	Tahun	100	129.000.000	1	52.257.800	1	56.705.000	100	99	1	108.462.800	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	rekening	3	31.000.000	2	2.350.140	3	56.705.000	100	7	3	6.550.725	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Jenis	4	9.000.000	16	5.900.000	3	56.705.000	100	10	3	11.450.000	-	0,00	DIKPORA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sub kegiatan yang mendukung kegiatan adm umum	Jenis		169.650.000		141.573.450		246.913.750	-	99	-	385.104.300	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Jenis	5	900.000	4	782.200	4	765.000	100	100	4	1.547.200	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	2	18.000.000	2	32.487.500	3	52.601.300	100	94	3	81.728.400	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	6	750.000	10	11.040.000	12	2.368.750	100	100	12	13.408.750	-	0,00	DIKPORA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	95	150.000.000	65	97.263.750	30	191.178.700	100	100	30	288.419.950	-	0,00	DIKPORA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jenis		17.000.000		-		51.927.500	-	98	-	51.109.000	-	0,00	DIKPORA
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan meubeleur	Jenis	1	17.000.000	-	-	8	51.927.500	100	98	8	51.109.000	-	0,00	DIKPORA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah	Jenis		76.000.000		-		30.703.200	-	98	-	30.068.720	-	0,00	DIKPORA
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Unit	1	60.000.000		12.500.000	2	17.450.000	100	96	2	29.315.520	-	0,00	DIKPORA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	2	2.500.000	2	1.559.500	1	188.000	100	100	1	1.747.500	-	0,00	DIKPORA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	4	6.000.000	1	500.000	1	12.315.200	100	100	1	12.815.200	-	0,00	DIKPORA
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mobilieur yang telah diperbaiki	Unit	1	7.500.000	-	-	3	750.000	100	100	3	750.000	-	0,00	DIKPORA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang		70.000.000		-		56.773.000	-	50	-	28.451.750	-	0,00	DIKPORA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	3	30.000.000	3	38.416.750	3	25.902.000	67	63	2	54.644.750	-	0,00	DIKPORA
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Orang	2	20.000.000	-	-	2	17.396.000	50	9	1	1.486.250	-	0,00	DIKPORA
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BinteK implementasi perundang- undangan	Orang	2	20.000.000	-	-	2	13.475.000	50	80	1	10.737.500	-	0,00	DIKPORA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan terciptanya lapangan kerja	Persen	100	940.000.000	-	-	100	1.938.435.847	100	97	100	1.876.338.497	-	0,00	DIKPORA
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kualitas SDM	Orang		908.000.000	-	-		634.645.647	-	93	-	590.371.997	-	0,00	DIKPORA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	5	25.000.000	70	18.956.800	50	45.637.000	100	94	50	61.793.800	-	0,00	DIKPORA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	orang	100	12.000.000	-	-	100	12.030.000	100	100	100	12.030.000	-	0,00	DIKPORA
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang terpelihara	Unit	1	130.000.000	1	184.351.300	1	136.600.000	100	95	1	313.999.050	-	0,00	DIKPORA
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka)	Orang	70	741.000.000	10	33.215.000	70	440.378.647	100	92	70	439.072.247	-	0,00	DIKPORA
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis		32.000.000		-		1.303.790.200	-	99	-	1.285.966.500	-	0,00	DIKPORA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Data Potensi Kepemudaan	dokumen	1	20.000.000	-	-	1	24.989.000	100	87	1	21.680.500	-	0,00	DIKPORA
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pengkaderan	OKP	3	12.000.000	-	-	6	1.278.801.200	100	99	6	1.264.286.000	-	0,00	DIKPORA
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan	Persen	100	35.205.000.000	-	-	100	381.980.127	100	64	100	246.362.900	-	0,00	DIKPORA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang dilaksanakan	Jenis	4	35.055.000.000	-	-	-	250.910.200	-	76	-	190.687.400	-	0,00	DIKPORA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah prasana yang terbangun	Unit	4	35.055.000.000	1	77.050.553	3	250.910.200	100	76	3	267.737.953	-	0,00	DIKPORA
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jenis	60	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DIKPORA
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang mengikuti POPDA dan KEJURDA Pelajar	Atlet	60	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	DIKPORA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasu Tingkat Daerah Provinsi	Jenis	1	25.000.000	-	-	95.954.427	-	21	-	20.560.000	-	0,00	DIKPORA	
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berpotensi	Kegiatan	-	-	1	16.507.500	1	75.344.427	-	-	16.507.500	-	0,00	DIKPORA	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang berfungsi baik	Kegiatan	1	25.000.000	-	-	1	20.610.000	100	100	20.560.000	-	0,00	DIKPORA	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jenis		10.000.000	-	-	35.115.500	-	100	-	35.115.500	-	0,00	DIKPORA	
	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Wasit / Pelatih yang mengikuti sertifikasi dan standarisasi profesi	orang	5	5.000.000	5	13.200.000	5	19.000.000	100	100	32.200.000	-	0,00	DIKPORA	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi cabang olahraga yang dibina	organisasi	5	5.000.000	5	7.438.900	5	16.115.500	100	100	23.554.400	-	0,00	DIKPORA	
TOTAL			0		0		2.763.438.424				2.541.817.302					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										100,00	85,30			-	-	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										Sangat Tinggi	Tinggi					
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
	3	4		5		6		7		13 = 12/7 x 100%		14= 6+12		15= 14/5 x 100%	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi	%	100	1.834.481.501		217.549.051	100	6.644.742.214	32	2.191	32	17.035.871.855	32	929
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									0	1.095	-	11.355.981.110	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	2.052.419.242	6	1.564.105.587	6	2.052.419.242	366,67	252,58	28	6.748.131.382	233,33	328,79
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		2	27.999.000	2	32.279.500	1	2.052.419.242	-	1,38	2	60.639.750	100,00	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	2	27.999.000	2	32.279.500	1	2.052.419.242	-	1,38	2	60.639.750	100,00	216,58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi							93.688.000	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	15	17.252.500	3	2.161.000	-	2.155.000	-	100,00	3	4.316.000	20,00	25,02
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Unit	5	40.130.450	1	6.785.000	-	2.559.000	-	100,00	1	9.344.000	20,00	23,28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kali	60	783.133.120	12	93.370.226	12	88.972.000	-	92,03	12	175.247.561	20,00	22,38
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi							1.900.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	55.190.000	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	3	201.220.000	1	5.830.000	-	-	-	-	2	5.830.000	66,67	2,90

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
3		4		5		6		7		13 = 12/7 x 100%		14= 6+12		15= 14/5 x 100%	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi							122.107.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	Jenis	60	523.547.210	12	77.915.540	12	40.529.800	-	97,22	12	117.318.040	20,00	22,41
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Listrik	Rekening	60	138.677.901	24	18.981.185	12	20.077.200	125,00	71,11	39	33.257.543	65,00	23,98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pegawai Tidak Tetap	OK	80	295.011.885	16	61.500.000	16	61.500.000	100,00	93,09	32	118.750.000	40,00	40,25
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang Terpenuhi							26.048.244	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 2). Penggantian Suku Cadang Roda Empat dan Roda Dua	Unit	25	28.179.820	5	4.700.000	5	14.719.644	20,00	86,60	6	17.446.606	24,00	61,91
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor	Jenis	5	41.093.200	1	5.830.000	1	6.578.600	100,00	100,00	2	12.408.600	40,00	30,20
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	Jenis	5	41.093.200	1	4.700.000	-	4.750.000	-	100,00	6	9.450.000	120,00	23,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										35,58	109,54				
PREDIKAT KINERJA															
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%						40.677.500						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
	3	4		5		6		7		13 = 12/7 x 100%		14= 6+12		15= 14/5 x 100%	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								40.677.500						
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	Desa	30	574.206.500	6	41.309.657	6	40.677.500	100,00	71,26	12	70.296.157	40,00	12,24
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan Cadangan Pangan	%		-		202.747.200	-	88.317.900	-	1.039,28	-	1.120.618.400	-	-
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								88.317.900	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen NBM dan SKPG	Dokumen	25	421.578.000	5	34.039.999	5	13.618.800	100,00	38,18	10	39.239.999	40,00	9,31
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Laporan	85	527.678.000	17	19.753.800	-	-	-	-	17	19.753.800	20,00	3,74
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan	Laporan	25	40.000.000	5	34.039.999	-	24.520.300	-	99,41	8	58.415.799	32,00	146,04
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok yang Dibina	Gapoktan	25	402.311.000	5	34.612.470	-	24.601.800	-	87,34	8	56.100.170	32,00	13,94
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelompok yang Difasilitasi	Kelompok	25	633.849.500	5	50.603.478	-	25.577.000	-	85,26	8	72.410.478	32,00	11,42
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				-				71.126.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	ton	20	441.081.500	5	59.654.000	4	71.126.000	100,00	89,96	9	123.640.000	45,00	28,03

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
3		4		5		6		7		13 = 12/7 x 100%		14= 6+12		15= 14/5 x 100%	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.	Skoring Pola Pangan Harapan Masyarakat							844.241.000	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal/Lomba Cipta Menu (LCM)	Kelompok	15	451.641.500	3	19.753.800	3	825.616.000	100,00	93,83	6	794.423.000	300,00	175,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pola Konsumsi Pangan dan Suplai Pangan	Dokumen	2	450.101.000	2	45.579.850	-	18.625.000	-	34,07	5	51.925.350	50,00	11,54
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										30,77	126,05				
PREDIKAT KINERJA															
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan yang Tertangani	%	10	725.950.400	2	17.577.545	2	825.616.000	100,00	4,16	4	51.920.045	40,00	7,15
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			10	725.950.400	2	17.577.545	2	18.625.000	100,00	184,39	4	51.920.045	40,00	7,15
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya Mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	10	725.950.400	2	17.577.545	2	825.616.000	100,00	4,16	4	51.920.045	40,00	7,15
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										100,00	64,24				
PREDIKAT KINERJA															
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Bahan Pangan yang diawasi Keamanan Kesegarannya	%	-	121.295.410	-	-	1	37.018.000	500,00	92,77	5	34.342.500	-	0,28
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			500	121.295.410	100	-	100	37.018.000	100,00	92,77	200	34.342.500	0,40	0,28

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
3		4		5		6		7		13 = 12/7 x 100%		14= 6+12		15= 14/5 x 100%	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan yang Diperiksa	Sampel	500	121.295.410	100	-	100	37.018.000	100,00	92,77	200	34.342.500	0,40	0,28
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										233,33	92,77			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.636.371.614	233,54				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)										#REF!	#REF!			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :															

DINAS KOMINFO & STATISTIK

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAEARH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP dinas kominfo													
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			2.726.890.418	26		31	2.528.902.842	84	98	-	2.474.054.410	-	91
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN	orang	31	2.726.890.418	26		31	2.528.902.842	84	97,83		2.474.054.410	0	90,73
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										83,87	97,83				90,73
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	Rendah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.106.500	8	57.091.300	6	92.106.500	#DIV/0!	#DIV/0!	14	109.943.550	500	310
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Staf yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	3	50.759.500	3	-	3	50.759.500	84	45,36	9,00	23.025.500	300	45,36
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah staf yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	2	4.000.000	2	2.400.000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	2.400.000	100	60,00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	3	41.347.000	3	54.691.300	3	41.347.000	0	72,14	3,00	84.518.050	100	204,41
	Administrasi umum perangkat Daerah				189.122.000	93	233.865.580	156	190.971.200	277	230	214	379.571.130	535	955
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/ terpasang	jenis	2	2.334.500	2	9.735.600	2	4.334.500	100	53,86	4,00	12.070.100	200	517,03
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	jenis	4	1.964.000	4	2.773.000	4,0	1.964.200	100,0	100,00	8,00	4.737.200	200	241,20
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	OH	150	184.823.500	87	221.356.980	150,0	184.672.500	77	76,57	202,00	362.763.830	135	196,28
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uriusan Pemerintah Daerah				110.517.500		49.349.131		110.092.500	100	89	9	147.599.131	180	134
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor	jenis	5	110.517.500	4	49.349.131	5	110.092.500	100	89,24	9,00	147.599.131	180	133,55

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				133.859.800		139.053.850		135.859.800			-			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	kegiatan	3	133.859.800	3	139.053.850	3	135.859.800	100	100,00	6,00	274.913.150	200	205,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				22.045.000		58.038.935		22.925.500		96,58	4,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran STNK dan penggantian Suku cadang	unit kendaraan	8	18.545.000	8	32.738.935	8	19.425.500	100	95,96	16,00	51.380.057	200	277,06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedug kantor yang dipelihara	unit	7	3.500.000	0	13.700.000	7	3.500.000	100	100,00	7,00	17.200.000	100	491,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan ruangan layanan informasi Publik (PPID)	jenis	0	-	1	11.600.000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	11.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												-	-		
PREDIKAT KINERJA												-	-		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi publik yang dipublikasikan.			1.729.641.500	-	1.535.224.200	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	3.347.038.701	#DIV/0!	194
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota				1.729.641.500		1.535.224.200			#DIV/0!	#DIV/0!	-	3.347.038.701	#DIV/0!	193,51
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan	keg		1.131.631.500	1	1.039.519.850	3	1.404.206.500	0	94,37	1,00	2.364.682.850	#DIV/0!	208,96
	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama antar lembaga pemerintah dalam Penyebarluasan informasi	media	30	485.042.000	23	437.935.350	30	485.042.000	93	93,73	51,00	892.570.651	170	184,02
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		jenis	2	11.976.000		-	2	-	0	#DIV/0!	-	#VALUE!	0	#VALUE!
	Penguatan tata kelola Komisi Informasi di Daerah		jenis	2	21.338.000		44.718.000	2	3.942.000	0	98,14	-	16.919.800	0	79,29
	Penyuellenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan kelompok informasi Masyarakat (KIM)	jenis	3	79.654.000		13.051.000	3	32.895.000	86	85,57	#REF!	72.865.400	#REF!	91,48
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															
PREDIKAT KINERJA															

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENTA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENTA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENTA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung daya akses internet yang berkualitas yang di sediakan Kominfo			1.541.723.000	6	1.901.248.300	9	1.171.173.000	100	115	15	3.252.505.020	#DIV/0!	211
	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kota				1.541.723.000	6	1.901.248.300	9	1.171.173.000	99,7	115,38	14,97	3.252.505.020	#DIV/0!	210,97
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						31.530.000								
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					3	477.776.000								
	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan jaringan Intenet dan intranet	jenis	2	1.299.050.000	1	1.025.175.000	2	1.117.500.000	100	99,23	3,00	2.134.113.420	150	164,28
	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumberdaya Pengelola TIK Lingkup Dinas Kominfo	org	5	210.000.000	5	210.000.000	5	21.000.000	100	1000,00	10,00	420.000.000	200	200,00
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah aparat yang mengikuti Pelatihan di bidang E-Government	jenis	2	32.673.000		156.767.300	2	32.673.000	98,5	98,91	1,97	189.085.600	99	578,72
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										99,54	99,07				
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral			172.059.800	2	62.829.000	6	172.059.800	67	92	6	220.903.450	100	128
	Penyelenggaraan statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota		subkeg	6	172.059.800	2	62.829.000	6	172.059.800	67	92	6	220.903.450	100	128,39
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen DDDA dan KCA	jenis	6	172.059.800	2	62.829.000	6	172.059.800	67	91,87	6,00	220.903.450	100	128,39
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											#REF!			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat rendah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi			75.000.000	-	10.912.500	1.000	103.938.000	0	46	2	48.204.022	0	64
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten Kota		subkeg		75.000.000	-	10.912.500	1.000	103.938.000	0	46	2	48.204.022	0	64
	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Baerbasis Elektronik dan Non elektronik		dokumen	1.000	75.000.000		-	1.000	103.938.000	0,2	46,38	2,00	48.204.022	0	64,27
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah kab/ Kota					2	10.912.500								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											#REF!			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	Sedang

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tiigkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penanggu Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Belanja Tidak Langsung																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah															
	Penyediaan Gaji dan Tunjaangan ASN							28	2.373.783.372				2.373.783.372			
	Tambahan Penghasilan															
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Semesteran	Dok	6	2.500.000	5	998.000	1	-	-		5	998.000	83,33	39,92	
		Dokumen laporan akhir tahun	Dok	6	2.500.000	5	995.000	1	-	-		5	995.000	83,33	39,80	
	Adminsitrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	Orang	16	526.900.000	18	722.481.289	2	203.772.500	350	176	18	754.040.614	112,50	143,11	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Orang	18	526.900.000	18	49.643.600	2	32.948.500	350	96	18	81.202.925	100,00	15,41	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						672.837.689	7,00	170.824.000	-	-	-	672.837.689	-	-	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jenis	25	23.284.900	14	6.044.200	7	11.967.000	86	85	14	16.209.200	56,00	69,61	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	1064	1.002.286.300	152	666.793.489	110	158.857.000	0,00	85	152	802.093.289	14,29	80,03	
		Perjalanan Dinas dalam daerah														
	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						296.908.746		97.712.000							
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur	Unit	10	87.000.000	22	46.000.000	20	57.000.000	100	93	22	98.800.000	220,00	113,56	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	25	107.000.000	4	191.672.746	2	32.675.000	100	88	4	220.542.746	16,00	206,11	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jenis	25	198.550.000	1	59.236.000	2	8.037.000	100	-	1	67.266.000	4,00	33,88	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	439.155.894.060	100	1.199.021.065	100	322.475.285	100	79	100	1.453.441.674	100	0,33	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat		%	100	303.648.000	100	370.410.378	100	106.462.500	100	90	100	466.509.678	100	1,54	
		Pembayaran Honor PPTK	Org						-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	37	65.000.000	37	7.033.000	37	13.528.000	-	-	37	7.033.000	100	0,11	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lbr	160.000	40.000.000	59.155	17.746.500	34.815	10.444.500	-	-	59.155	17.746.500	36,97	44,37	

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tiigkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penangng Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembayaran honorarium tenaga honorer	OK	38	160.800.000	16	80.400.000	7	66.600.000	-	-	16	80.400.000	42,11	50,00	
		Minum harian pegawai	OH	70385	37.848.000	11400	6.465.684	12.255	15.890.000	-	-	11.400	6.465.684	16,20	17,08	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran penggunaan Listrik, Air dan Telepon	Rek	3	146.400.000	3	40.700.216	2	17.800.000	150	72	3	53.556.725	100,00	36,58	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83.564.285							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	Unit	48	27.900.000	15	11.721.335	11	31.475.500	100	63	15	31.700.966	22,92	113,62	
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	12	111.500.000	22	79.502.690	11		0,00	-	22	79.502.690	183,33	71,30	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Unit	22	35.450.000	3	10.250.000	6	4.900.000	83	35	3	11.941.127	13,64	33,68	
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	5	30.000.000	-	540.000			#DIV/0!	-	-	1.080.000	-	4	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	43.200.000	5	42.795.000	1	45.188.785	-	76	5	76.927.500	500,00	178,07	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	43.200.000	4	5.359.300	4	2.000.000	-	91	4	7.188.300	400,00	16,64	
		Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	35	16.000.000	1	2.150.000	-	-			1	2.150.000	2,86	13,44	
Rata-rata capaian kinerja (%)										41,96	51,02			96,29	45,73	
Predikat Kinerja										BS						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai standar dan tepat waktu	%	100	23.250.000	100	7.598.500	100	-	60	100	160	7.598.500	160,00	32,68	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip	Dok	6	2.500.000	5	998.000	1	-	100	-	6	998.000	100,00	39,92	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	Lap	24	11.250.000	20	3.050.000	4	-	25	-	21	3.050.000	87,50	27,11	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA dan DPA	Dok	12	4.500.000	6	3.050.000	2	-	100	-	7	3.050.000	29,17	67,78	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.500.000	6	1.557.500	2	-	100	-	7	1.557.500	58,33	34,61	
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Rata-rata capaian kinerja (%)										175						
Predikat Kinerja																

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tiigkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penangg ung Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Terbentuknya Kampung UMKM	Kampung UMKM	1	180.000.000	-	11.230.000	-	-	-	-	-	11.230.000	0,00	6,24	
		Persentase wirausaha baru	%	7,70	4.661.143.510	-	969.568.200	0,8	392.641.400	29	30	-	1.087.179.600	0,00	23,32	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							-	-			-	-			
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang dibina untuk pembentukan Kampung UMKM	Orang	700	180.000.000	140	11.230.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	140	11.230.000	20,00	6,24	
		laporan data keragaan koperasi	Lap	5	100.000.000	1	187.611.700	1	-	-	-	1	187.611.700	20,00	187,61	
	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah Koperasi syariah yang terbentuk	Kop	7	321.800.200	1	212.214.600	1	27.980.000	-	96	1	239.029.600	14,29	74,28	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang dipromosikan produknya	UMK	72	402.769.000	54	637.753.715	0	0	-	-	54	637.753.715	75,00	158,34	
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-					
Predikat Kinerja										-	-					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMK yang difasilitasi kemitraan usaha dalam peningkatan permodalan	Orang	200	140.296.470	50	66.032.200	30	11.255.000	67	9	50	72.197.200	25,00	51,46	
	Program Pengembangan UMKM															
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha yang dilatih manajemen kewirausahaan	Orang	200	260.847.040	120	281.416.100	60	113.086.400	117	99	120	392.862.500	60,00	150,61	
		Jumlah UMK yang difasilitasi penerbitan sertifikat produk	UKM	5				5								
		Jumlah usaha mikro (keluarga miskin) yang mendapat bantuan	KK	250	4.000.000.000	168	740.470.000	36		100	-	204	740.470.000	81,60	18,51	
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat Kinerja																

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tiigkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penangg ung Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian															
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang dilatih tentang akuntansi, manajemen dan kewirausahaan bagi pengurus/pengawas/pengelola koperasi	Kop	50	260.000.000	30	622.119.900	10	268.300.000	100	100	30	890.419.900	60,00	342,47	
		Tenaga kerja koperasi yang profesional	Orang	28	264.000.000	14	43.733.150	-	-	-	-	14	43.733.150	50,00	16,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)										94						
Predikat Kinerja																
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi/KUD yang direvitalisasi	%	12,711864	1.431.196.200	-	441.026.057	2,54		-	-	-	441.026.057	0,00	35,36	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		Rapat-rapat koordinasi dengan gerakan koperasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi				-	-	4 Kali	17.350	#VALUE!	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang sehat	Kop	58	591.379.300	46	271.808.207	53	55.602.900	109	39	46	293.244.457	79,31	49,59	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi															
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota															
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi dalam kewenangan kabupaten/kota	Temu usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN	Kali	40	154.016.700	6	16.883.400		-	-	-	6	16.883.400	15,00	10,96	
Rata-rata capaian kinerja (%)										109						
Predikaat Kinerja																

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tiigkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penangg ung Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Daerah Tertib Ukur Mandiri	%	85	8.843.161.820	65	3.479.303.345	65	80.928.900	100	-	65	3.479.303.345	76,47	39,34	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan															
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Menurunnya jenis barang beredar yang tidak sesuai dengan BDKT	Jenis	7	226.963.320	14	95.380.600	5	14.587.600	40	24	14	98.813.600	200,00	43,54	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Operasionalisasi UPTD Kemetrolagian Daerah	%	75	8.616.198.500	60	3.248.908.645	10	66.341.300	-	78	60	3.300.681.470	80,00	38,31	
		Jumlah alat UTTP yang ditera	UTTP	4000	216.198.500	112	61.298.650	2.225		-	#DIV/0!	112	61.298.650	2,80	28,35	
		Tersedianya panduan mutu UPTD Kemetrolagian	Dok	1	100.000.000	-	-	1		-	-	-	-	-	-	
		Pembangunan UPTD Kemetrolagian Daerah, pengadaan kendaraan operasional, dan Laboratorium	UPTD	1	8.400.000.000	2	2.982.876.995	1	38.192.375	100	100	2	3.021.069.370	200,00	35,97	
Rata-rata capaian kinerja (%)										50						
Predikaat Kinerja																
1	3	4		5		6		7		13		14		15		16
	Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Sehat dan Ber-SNI	Pasar	18	36.809.821.200	1	8.649.570.109	1	1.177.047.645	100	-	1	8.649.570.109	5,56	23,50	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang direvitalisasi dalam kondisi baik	Pasar	18	36.637.122.000	10	10.804.521.110	3	170.541.245	167	49	10	10.887.308.464	55,56	29,72	
		Jumlah Pasar yang dikelola	Pasar	8		8		8	965.863.400							
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan(Lanjutan)					-	-	2		50	-	-	-	-	-	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting															
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota															
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Data Informasi Pasar	Lapora n	12	172.699.200	15	87.965.900	12	40.643.000	100	79	15	120.234.650	125,00	69,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)										133						
Predikat Kinerja																

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pedagang Kakilima yang dibina	%	23,04		-	88.752.800	12,35		100	-	-	88.752.800	0,00		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri															
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang Kakilima dan asongan yang dibina	Orang	120	200.000.000	-	20.703.759	30	5.000.000	100	64	-	23.923.759	0,00	11,96	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang tertata lokasi Pedagang kakilima							85.532.800							
Rata-rata capaian kinerja (%)										50,00						
Predikat Kinerja																
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produk IKM Unggulan daerah	Produk	15	4.134.424.371	20	429.469.000	3	242.624.500	-	-	20	429.469.000	133	10,39	
	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industry kabupaten/kota															
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah IKM yang berkembang dan terlayani teknologi industri	IKM	56	190.000.000	13	-	4	75.639.000	25	24	13	18.468.200	23,21	9,72	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah anggota IKM yang dilatih	Orang	550	1.036.089.200	65	429.469.000	70	89.293.000	100	87	65	506.723.100	11,82	48,91	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang dibina	IKM	1	2.908.335.171	-	-	20	77.692.500	50	33	-	25.502.400	100	0,88	
1	3	4		5		6		7		11		12		13		14
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional															
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota															
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Base IKM	Dok	Dok	60.000.000	1	8.090.000	1	32.746.500	100	-	1	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikaat Kinerja																

No	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada tahun 2016 - 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2021		Tiigkat Capaian Kinerja dan Reaisasi Anggaran Renstra Pd s/d Th. 2021		Unit PD Penanggu ng Jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL	Terlaksanaya penyuluhan Transmigrasi Lokal bagi Masyarakat	Orang	300	62.294.000	50	10.372.000	-	-			50	10.372.000	16,67	16,65	
	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	- Tercapainya pemahaman masyarakat tentang transmigrasi lokal	Orang	300	62.294.000	50	10.372.000	-	-			50	10.372.000	16,67	16,65	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							17.867.027.692					-		61,27		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : *)																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : *)																

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
						(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
		Tingkat Pencemaran Air		1	300.842.076	2,94	3.118.492.685	1	96.614.000	82,00	82,26	3,76	3.197.963.035	376,00	1.063,00
		Tingkat Pencemaran Udara		0,18		0,22		0,19		100,00		0,41		2,28	1.063,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DATA/INFORMASI TERKAIT PENCEMARAN DAN KERUSAKAN AKIBAT BIO MASSA	dok	5	3.059.411.505	4	2.954.641.725	1	58.578.500	100	82,94	5	3.003.225.275	100,00	98,16
								1	51.685.500						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan	dok	7	2.996.224.975	6	2.911.489.975	1	51.685.500	100	81,63	7	2.953.682.525	100,00	98,58
								1	6.893.000						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim	dok	6	63.186.530	5	43.151.750	1	6.893.000	100	92,72	6	49.542.750	100,00	78,41
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	87,18			100,00	88,49
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	Rendah
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lahan dan/atau tanah akibat biomassa		4	194.000.000	3	274.718.950	1	38.035.500	100	81,20518989	4	305.605.750	100,00	157,53
								1	3.752.000	0	92,61727079	0	3.475.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah objek yang dipantau kualitas limbah cair	objek	6	290.000.000	5	170.218.950,00	1	3.752.000	100	92,62	6	173.693.950	100,00	59,89
				30	160.850.000	18	34236600	6	9.146.000	0	0	18	34.236.600	60,00	21,28
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas udara						6	-					100,00	
								3	34.283.500	0	79,95624717	0	27.411.800	#DIV/0!	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah titik Pencemaran status mutu air		15	203.950.000	12	104500000	3	34.283.500	100	79,96	15	131.911.800	100,00	64,68
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	86,29			100,00	62,29
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	Rendah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		1	1.596.492.015	0,004	911.033.056	0,004	439.487.000	100	87,50	0,003	1.295.592.071	0,30	81,15
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,004	1.596.492.015	0,004	911.033.056	0,004	439.487.000	100	87,50	-	1.295.592.071	-	81,15
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luasan RTH yang dipelihara	ha	3	1.596.492.015	2,5	911.033.056	0,5	439.487.000	100	87,50	2,50	1.295.592.071	83,33	81,15
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	87,50			83,33	81,15
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat rendah
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase ketaatan penghasil LB3	persen	100	113.000.000	75	10.728.100	100	16.144.000	100	78,63943261	175	23.423.650	175	20,73
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	ketaatan penghasil LB3	pelaku usaha	10	42.000.000	5	4.209.600	5	2.623.000	20	80,44224171	6	6.319.600	60	15,05
				2	76.000.000	0	0	1	2.623.000	-	80	-	2.110.000	-	2,78
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan TeknisPenyimpanan Sementara Limbah B3	tertibnya pelaku usaha dalam pengelolaan b3 dan lb3	izin	2	42.000.000	1	4.209.600	1	2.623.000	100	80	2	6.319.600	100,00	15,05
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase B3 dan Limbah B3 yang dikendalikan	persen	100	71.000.000	100	6.518.500	100	13.521.000	100	78	50	17.104.050	100	24
						0	0	1	13.521.000	-	78	-	10.585.550	#DIV/0!	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalamRangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	tercapainya pembinaan dan pengawasan lb3	lokasi	50	71.000.000	40	6.518.500	10	13.521.000	100	78	50	17.104.050	100,00	24,09
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	79,37			100,00	19,57
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat rendah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase dokumen yang dikaji dan dikeluarkan izin lingkungannya	%	100	398.865.837	100	349731903	100	18.098.000	100	92,30301691	200	366436903	200	91,86971383

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
						(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KETAATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH,	Pelaku usaha	6	398.865.837	6	349.731.903	6	18.098.000	100	92,30301691	3	366436903	50	91,86971383
				50	37.085.759	40	32.648.500	10	6.172.500						
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi lingkungan	rek	50	37.085.759	40	32.648.500	10	6.172.500	70	86,92	47	38013500	94,00	102,5016098
										#DIV/0!	#DIV/0!	0	11.340.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek yang diawasi		58	361.780.078	52	317.083.403	6	11.925.500	100,00	95,09	58	328.423.403	100,00	90,78
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										85,00	91,00			97,00	96,64
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PRESENTASE MHA YANG DIAKUI	%	100	27.500.000	100	2130000	100	3750000	1	100	101	5880000	101	21,38181818
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	PENETAPAN PENGAKUAN MHA	perbup	1	27.500.000	1	2130000	1	3750000	100	100	2	5880000	200	21,38181818
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Pendampingan pengakuan masyarakat hukum adat	MHA	1	27.500.000	0	2130000	1	3750000	100,00	100,00	1	5.880.000	100,00	21,38
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00			100,00	21,38
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat rendah
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	500	1834343232	400	1523808172	100	46.125.500	100	90,22026861	500	1565422722	100	85,33968424

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase dokumen yang dikaji dan dikeluarkan izin lingkungannya	%	100	1834343232	100	1523808172	100	46.125.500	110	90,22026861	210	1565422722	210	85,33968424
				18	126.925.980	14	46.763.800	4	5.350.000	0,00	99,07	14	52.063.800	77,78	41,02
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lokasi pelaksanaan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	LOKASI	18	126.925.980	14	46.763.800	4	5.350.000	100,00	99,07	18	52.063.800	100,00	41,02
	Pembinaan ADIWIYATA	Jumlah sekolah pelaksanaan pembinaan ADIWIYATA		12	87.196.870	8	47.739.500	2	9.404.000	100,00	70,09	10	54.330.500	83,33	62,31
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah pelaksanaan pembinaan ADIWIYATA		12	87.196.870	10	54.330.500	2	75.567.500	100,00	8,72	12	60.921.500	100,00	69,87
		Tercapainya indikator penilaian penghargaan kota sehat/adipura		18	1.620.220.382	15	1.422.713.872	3		100	#REF!	18	#REF!	100,00	#REF!
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah pelaksanaan pembinaan ADIWIYATA	sklh	12	1.707.417.252	10	1.477.044.372	2	40.775.500	100	89	12	1.513.358.922	100,00	88,63
		Tercapainya indikator penilaian penghargaan kota sehat/adipura		18		15		3							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	94,06			100,00	64,83
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	Sedang
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan	%	100	119.520.700	100	101.471.700	100	10.574.500	100	97,87696818	200	111821700	200	93,55843799
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan	%	500	119.520.700	400	101.471.700	100	10.574.500	100	97,87696818	500	111821700	100	93,55843799
				12	119.520.700	8				#DIV/0!	#DIV/0!	8	10.350.000	66,67	8,66
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	lomba	12	119.520.700	10	101.471.700	2	10.574.500	100,00	97,88	12	111.821.700	100,00	93,56
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	97,88			100,00	93,56
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	tinggi

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase pengaduan yang tertangani		100	56027270	100	30469500	100	9076000	3	98,19303658	103	39381500	103	70,28987848
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase pengaduan yang tertangani		100	56.027.270	100	30469500	100	9076000	3	98,19303658	103	39381500	103	70,28987848
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	kasus	5	56.027.270	2	30.469.500	3	9.076.000	100,00	98,19	5	39.381.500	100,00	70,29
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,19			100,00	70,29
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	rendah
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	74%	12.437.458.226	80%	8.390.310.726	75%	3.907.014.499	100	78,14896901	1,55	11.443.602.276	209,45946	92,01
	Pengelolaan Sampah	Bertambahnya sampah yang tertangani	ton	20.000	12.360.197.708	17.000	8.351.116.658	20.000	3.897.571.999	25	78,09603134	22000	11.394.965.708	110	92,19
				4	665.310.000	0	0	1	1.375.000	-	664	-	9.125.000	-	1,37
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan persampahan	dok	4	665.310.000	1	1.186.500	1	10.337.000	100	88	2	10.311.500	50,00	1,55
				23	282.700.980	8	108.469.200	8	4.852.000	-	189	8	117.640.700	34,78	41,61
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah MoU kerjasama pengelolaan persampahan	mou	23	282.700.980	15	112.354.200	8	16.665.000	100	55	23	121.525.700	100,00	42,99
				783	11.412.186.728	522	8.237.575.958	124	3.870.569.999	-	78	522	11.263.128.508	66,67	98,69
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah unit prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	unit	783	11.412.186.728	659	8.237.575.958	124	3.870.569.999	100	78	783	11.263.128.508	100,00	98,69
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	73,83			83,33	47,74
PREDIKAT KINERJA										sangat tinggi	sedang			Tinggi	sangat rendah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	DATA/INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	dok	2	77.260.518	1	39194068	1	9.442.500	100	100	2	48636568	100	62,95138741
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencanatindak lanjut program penataan lingkungan hidup	dok	15	77.260.518	9	39.194.068	6	9.442.500	100,00	100,00	15	48.636.568	100,00	62,95

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
		jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencanatindak lanjut program penataan lingkungan hidup	dok												
		jumlah dok monitoring dan evaluasi dan rencanatindak lanjut program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	dok												
		jumlah Dokumen monitoring program PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	dok												
		jumlah Dokumen monitoring program PeningkatanKualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup	dok												
		Jumlah dokumen SLHD yang disusun	dok												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00			100,00	62,95
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAEARAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	500	1.153.627.780	400	765.348.814	100	319.857.723	100	75,61092999	500	1.007.196.213	100	87,31
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100		100		100							
	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	persen	500	151.663.711	400	110262226	100	39.085.750	60	90,74	460	145.726.726	92	96,09
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM	orang	0	151.663.711	-	110262226	2	39.085.750	50	48,30	1	129.141.976	#DIV/0!	85,15
				64	151.663.711	53	110262226	13	39.085.750	0	48,30	53	129.141.976	82,81	85,15
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Formal	kali	7	151.663.711	6	137.100.226	1	20.011.000	100	94,34685923	7	155.979.976	100,00	102,85
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	94,35			100,00	85,15
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	Tinggi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis kegiatan administrasi umum yang terlaksana	jenis	5	513.727.365	5	359.976.095	5	56.385.850	40	48,00619304	2	387.044.795	40	75,34
		Jumlah Jenis pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis	7		7		7							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	jenis	24	25.337.906	20	4.704.000	4	4.383.750	100	100,00	24	9.087.750	100,00	35,87
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	OH/OK	1372	488.389.459	1.083	355.272.095	289	52.002.100	100,00	99,91	1372	407.229.195	100,00	83,38
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	99,96			100,00	59,62
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			sangat Tinggi	rendah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500	551.859.323	300	348.747.763	100	113.011.850	100	85,94026821	400	445.870.450	80	80,79
										#DIV/0!	#DIV/0!	0	29.383.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat		3385	180.110.446	2.115	116.152.000	660	29.412.300	100	99,90	2775	145.535.000	81,98	80,80
										#DIV/0!	#DIV/0!	0	14.545.133	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		34	99.741.880	20	59.536.963	7	17.160.000	100	84,76	27	74.082.096	79,41	74,27
										#DIV/0!	#DIV/0!	0	43.994.554	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor		12	57.600.000	8	38.400.000	2	9.600.000	100	458,28	10	82.394.554	83,33	143,05
										#DIV/0!	#DIV/0!	0	9.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor		22	214.406.997	18	134.658.800	4	56.839.550	100	16,19	22	143.858.800	100,00	67,10
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	164,78			86,18	91,30
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100%	500	88.041.092	400	56.624.956	100	111.374.273	100	88,68858071	500	155.401.218	100	176,51
										#DIV/0!	#DIV/0!	2	27.973.642	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,	unit	60	25.699.615	38	15.201.256	12	33.565.000	100	83,34	50	43.174.898	83,33	168,00
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit					12							
										#DIV/0!	#DIV/0!	3	2.510.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan kantor yang diperbaiki	jenis	50	26.445.750	37	16.212.000	13	4.462.273	100	56,25	50	18.722.000	100,00	70,79

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN(TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	
		URAIAN	SATUAN	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp
										#DIV/0!	#DIV/0!	0	68.292.620	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung	5	35.895.727	4	25.211.700	1	73.347.000	100	93,11	5	93.504.320	100	260,49
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		67	142.745.383	43	86.433.178	10	27.120.000	100	41,06	53	97.568.178	79,104478	68,35
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	77,57			94,44	166,43
PREDIKAT KINERJA										sangat Tinggi	Tinggi			tinggi	Sangat Tinggi

BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,II,IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,II,IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi, sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana dan cakupan peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persen	100	4.526.805.589	100	10.654.232.572	100	4.680.874.079	79	73,74	69,00	14.105.725.994	69,00	311,60	Badan PendapatanD aerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Pegawai Badan Pendapatan daerah	Tahun	1	-	1	7.848.711.709	1	4.030.289.079	100	72,12	1,00	10.755.199.848	100,00	#DIV/0!	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Pegawai Bapenda	orang	28	-	28	7.848.711.709	28	4.030.289.079	100	72,12	28,00	10.755.199.848	100,00	#DIV/0!	Badan PendapatanD aerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengembangan SDM	Jenis	1	263.443.000	1	162.400.385	1	59.148.000	100	91,20	1,00	216.341.735	100,00	82,12	Badan PendapatanD aerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	55	263.443.000	32	162.400.385	6	59.148.000	100	91,20	38,00	216.341.735	69,09	82,12	Badan PendapatanD aerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	jenis	3	1.962.099.880	3	1.151.879.409	3	233.456.500	100	79,66	3,00	1.337.842.539	100,00	68,18	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	16	12.697.000	12	9.249.000	3	950.000	100	100,00	15,00	10.199.000	93,75	80,33	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	74	74.582.795	59	70.560.673	9	866.500	78	99,48	66,00	71.422.673	89,19	95,76	Badan PendapatanD aerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	kali	2.420	1.874.820.085	1804	1.072.069.736	240	231.640.000	95,833333	79,50	2034,00	1.256.220.866	84,05	67,00	Badan PendapatanD aerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	jenis	1	682.441.480	1	406.620.000	1	19.870.500,00	0	0,00	1,00	406.620.000	100,00	59,58	Badan PendapatanD aerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	jenis	40	682.441.480,00	21	406.620.000	2	19.870.500	0	0,00	21,00	406.620.000	52,50	59,58	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan	jenis	3	1.257.771.800	3	900.666.731	3	283.647.000	100,00	91,12	3,00	1.159.133.941	100,00	92,16	Badan PendapatanD aerah

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	surat	2.000	1.081.171.800	1254	728.814.500	400	203.847.000	67,25	95,03	1523,00	922.535.500	76,15	85,33	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terbayarkan	rekening	9	153.000.000	6	153.452.231	2	75.000.000	100,00	79,93	8,00	213.398.441	88,89	139,48	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	orang	5	23.600.000	3	18.400.000	1	4.800.000	100,00	100,00	4,00	23.200.000	80,00	98,31	Badan PendapatanD aerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	jenis	3	361.049.429	3	183.954.338	3	54.463.000	100,00	85,62	3,00	230.587.931	100,00	63,87	Badan PendapatanD aerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	176	259.699.429	81	143.003.938	19	39.010.000	78,95	80,27	96,00	174.318.781	54,55	67,12	Badan PendapatanD aerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jenis	15	71.350.000	12	34.825.000,00	3	9.375.000	100,00	99,20	15,00	44.125.000	100,00	61,84	Badan PendapatanD aerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung	3	30.000.000	1	6.125.400,00	1	6.078.000	100	99,03	2,00	12.144.150	66,67	40,48	Badan PendapatanD aerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										82,72	75,80			88,91	82,60	
PREDIKAT KINERJA										T	S			ST	T	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi penerimaan PAD, persentase pengelolaan pajak, persentase pelaporan evaluasi penerimaan PAD	Persen	100	17.872.911.112	100	12.337.451.202	100	1.516.703.000	87	67,93	87,00	13.367.736.878	87,00	74,79	Badan PendapatanD aerah
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah pengelolaan pendapatan daerah	jenis	18	17.872.911.112	9	12.337.451.202	9	1.516.703.000	100	67,93	18,00	13.367.736.878	100,00	74,79	Badan PendapatanD aerah
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jenis pendapatan asli daerah	jenis	20	15.488.839.112	16	11.726.458.202	4	678.408.000	100	42,65	20,00	12.015.800.878	100,00	77,58	Badan PendapatanD aerah
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi pajak perundang-undangan yang terlaksana	kali	14	209.946.000	7	9.730.000	7	10.180.000	100	96,06	14,00	19.509.000	100,00	9,29	Badan PendapatanD aerah

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I,II,III,IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis pemungutan pajak dan retribusi	jenis	18	447.000.000	6	165.971.000	6	220.250.000	100	120,54	12,00	431.452.000	66,67	96,52	Badan PendapatanD aerah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan Obyek Pajak	dokumen	2	88.746.000	1	6.390.000	1	5.030.000	100	392,64	2,00	26.140.000	100,00	29,45	Badan PendapatanD aerah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem jaringan yang terpelihara, Jumlah Jenis data pajak	sistem/Jeni s	12	176.512.000	5	28.579.000	6	88.185.000	83,333333	36,50	10,00	60.764.000	83,33	34,42	Badan PendapatanD aerah
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Obyek Pajak	dokumen	2	220.856.000	1	32.860.000	1	44.520.000	100	76,15	2,00	66.760.000	100,00	30,23	Badan PendapatanD aerah
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaporan monitoring PAD	laporan	8	98.834.000	4	26.838.000	4	38.210.000	100	82,13	8,00	58.219.500	100,00	58,91	Badan PendapatanD aerah
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penagihan dan penindakan	kali	38	992.874.000	19	308.330.000	19	397.130.000	100	77,86	38,00	617.518.500	100,00	62,20	Badan PendapatanD aerah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Evaluasi dan Pengendalian yang dilaksanakan	kali	22	149.304.000	11	32.295.000	11	34.790.000	100	112,90	22,00	71.573.000	100,00	47,94	Badan PendapatanD aerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	67,93			100,00	74,79	
PREDIKAT KINERJA										ST	S			ST	S	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)										91,36	71,86			94,45	78,70	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 2)										T	S			ST	S	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	PERENCANAAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan sub urusan yang terpenuhi sumberdaya aparaturnya	100	280.196.340	100	250.762.092	100	76.127.000	75,00	56,57	100	293.829.592	100,00	104,87	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1	280.196.340	1	250.762.092	1	76.127.000	100	26,59	1	271.005.092	100,00	96,72	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti diklat formal	24	280.196.340	37	250.762.092	9	76.127.000	100	56,57	46	293.829.592	191,67	104,87	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	100	3.380.870.602	100	2.698.829.605	100	372.114.700	100,00	84,46	100	3.013.101.679	100,00	89,12	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	1	981.052.415	0	566.232.987	1	173.837.500	100	30,48	1	619.212.419	100,00	63,12	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang dikelola selama satu tahun	27000	617.717.110	22500	423.236.360	4500	109.637.500	100,00	81,97	27000	513.103.460	100,00	83,06	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening pembayaran, telepon, air dan listrik	3	363.335.305	0	142.996.627	2	64.200.000	100	54,26	2	177.831.179	66,67	48,94	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	3	2.399.818.187	3	2.132.596.618	3	198.277.200	100	53,33	3	2.238.343.775	100,00	93,27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	14.645.880	4	10.835.080	2	1.530.000	100	100,00	4	12.365.080	100,00	84,43	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	20	21.511.055	20	28.151.455	2	10.068.200	100,00	100,00	20	38.219.655	100,00	177,67	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah	1557	2.363.661.252	1459	2.093.610.083	307	186.679.000	0,98	95,34	1462	2.271.582.305	93,90	96,10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
		Perjalanan dinas dalam daerah													

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	100	423.566.000	100	219.826.697	100	292.645.000	100,00	94,41	100	496.105.909	100,00	117,13	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	3	241.955.000	3	219.826.697	3	41.345.000	100	25,73	3	230.463.709	100,00	95,25	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya	4	119.687.000	0	91.911.243	4	21.350.000	400	68,65	16	106.568.255	400,00	89,04	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perlengkapan kantor yang dipelihara ; Peralatan kantor yang dipelihara	192	66.300.000	139	45.103.000	48	19.250.000	56,25	59,14	166	56.488.000	86,46	85,20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	1	55.968.000	1	82.812.454	1	745.000	100	100,00	2	83.557.454	200,00	149,30	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1	181.611.000	0	0	1	251.300.000	100	12,61	1	31.685.200	100,00	17,45	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor	29	181.611.000	10	-	5	241.000.000	220	99,29	21	239.292.200	72,41	131,76	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengadaan Mebel	Mebel yang diadakan						10.300.000							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									91,67	78,48			100,00	103,70	
PREDIKAT KINERJA									Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat tinggi	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan	16	2.289.880.300	13	1.251.333.816	3	572.992.000	100,00	77,42	16	1.694.953.952	100	74,02	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan dan pendanaan daerah	16	2.289.880.300	13	1.251.333.816	3	572.992.000	0,00	44,45	13	1.506.033.122	81,25	65,77	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta dan dokumen berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan RKPD	2000 8	384.213.900	1500 6	246.313.900	500 2	47.787.000	50 50	100 7	1750 7	294.100.900	87,5 87,5	76,55	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN													
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen rancangan awal RPJMD	16	1.905.666.400	13	1.005.019.916	3	525.205.000	100,00	75,37	16	1.400.853.052	100	73,51	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Dokumen Rancangan Akhir RPJMD													
		Dokumen rancangan awal RKPD													
		Dokumen Rancangan Akhir RKPD													
		Dokumen RKPD Perubahan													
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan	100	852.845.515	100	257.915.310	100	23.534.500	100	97,42	200	280.841.710	100,00	32,93	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	11	852.845.515	9	257.915.310	2	23.534.500	0	23,98	9	263.559.810	81,82	30,90	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	11	852.845.515	9	257.915.310	2	23.534.500	100	97,42	11	280.841.710	100,00	32,93	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah	65	506.171.800	51	349.073.300	14	34.434.000	100,00	81,80	65	377.239.800	100,00	74,53	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	65	506.171.800	51	349.073.300	14	34.434.000	28,57142857	9,18	55	352.234.800	84,62	69,59	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen LKIP dan PK Kabupaten	10	123.676.200	8	63.853.200	2	5.416.000,00	100	17,74	10	64.814.200	100,00	52,41	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	55	382.495.600	43	285.220.100	12	29.018.000,00	116,67	93,75	57	312.425.600	103,64	81,68	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,00	85,55			100,00	60,49	
PREDIKAT KINERJA									Sangat tinggi	Tinggi			Tinggi	Sedang	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang sosial budaya yang dikoordinasikan dan difasilitasi	100	463.675.560	0	40.915.100	100	46.261.000	100	69,34	100	72.991.000	100,00	15,74	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	13	463.675.560	0	40.915.100	11	46.261.000	118,1818182	18,11	13	49.294.200	100,00	10,63	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kependudukan yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	6	120.000.000	0	17.871.600	6	29.378.000,00	400	53,61	24	33.619.700	400,00	28,02	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		OPD Sub Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	2		0		2		400		8		400,00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	5	60.000.000	0	23.043.500	5	16.883.000,00	100	96,71	5	39.371.300	100,00	65,62	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan OPD yang terkoordinasi dalam penanggulangan kemiskinan	100	283.675.560	0	178.083.560	100	53.230.500	100	77,16	100	219.157.060	100,00	77,26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah OPD pengampu kemiskinan yang dikoordinasikan	10	283.675.560	0	178.083.560	10	53.230.500	200	0,90	20	178.561.560	200,00	62,95	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	OPD terkait penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi	10	283.675.560	0	178.083.560	10	53.230.500	400	77,16	40	219.157.060	400,00	77,26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang ekonomi yang dikoordinasikan dan difasilitasi	100	180.000.000	0	6.211.000	100	33.115.500	100	87,16	100	35.075.500	100,00	19,49	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	9	180.000.000	0	6.211.000	9	33.115.500	100	5,40	9	8.000.000	100,00	4,44	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD Sub Bidang Perdagangan Perindustrian dan Koperasi yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	1	120.000.000	0	3.281.000	1	15.224.500,00	400	82,39	4	15.824.000	400,00	13,19	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		OPD Sub Bidang Keuangan Penanaman Modal dan Pariwisata yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	4		0		4		400		16		400,00		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN													
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	4	60.000.000	0	2.930.000	4	17.891.000,00	400	91,23	16	19.251.500	400,00	32,09	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan OPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi	100	180.000.000	0	41.136.500	100	51.981.600	100	89,53	100	87.677.700	100,00	48,71	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	14	180.000.000	0	41.136.500	14	51.981.600	100	21,19	14	52.153.000	100,00	28,97	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD Sub Bidang Infrastruktur Wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	3	120.000.000	0	34.365.000	3	37.605.600,00	100	86,82	3	67.013.700	100,00	55,84	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		OPD Sub Bidang Perhubungan dan Perumahan yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	3		0		3		100		3		100,00		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	OPD Sub Bidang Pengembangan Wilayah yang dikoordinasikan dan difasilitasi perencanaannya	8	60.000.000	0	6.771.500	8	14.376.000,00	400	96,64	32	20.664.000	400,00	34,44	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,00	80,80			100,00	40,30	
PREDIKAT KINERJA									Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
	PENELITIAN														
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan program kelitbangan	100	400.953.000	0	119.149.300	100	114.340.000	100	98,96	100	232.300.500	100,00	57,94	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	36	400.953.000	0	119.149.300	36	114.340.000	100	98,96	36	232.300.500	100,00	57,94	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Dokumen rekomendasi kajian	4	400.953.000	3	119.149.300	2	114.340.000,00	100	98,96	5	232.300.500	125,00	57,94	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Cakupan inovasi yang diterapkan	100	122.519.300	0	82.830.675	100	15.473.000	100	89,25	100	96.639.775	100,00	78,88	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi	36	122.519.300	0	82.830.675	36	15.473.000	100	9,01	36	84.224.175	100,00	68,74	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen koordinasi inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pada Roadmap	4	122.519.300	3	82.830.675	1	15.473.000,00	100	99,91	4	98.289.775	100,00	80,22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,00	94,10			100,00	68,41	
PREDIKAT KINERJA									Sangat Tinggi	Sangat tinggi			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
TOTAL			9.364.353.977		5.496.066.955		1.686.248.800				6.899.914.177				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)									97,92	85,55			100,00	60,49	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)									Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :															

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Belanja Langsung																	
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang dilayani administrasi kependudukan (KTP KK)	Laporan	21	4.512.233.299	18	97,39	9.804.526.655	3	55.979.700	100	90	21	9.854.759.355	100	218	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Pendudukan	Org	256.128	4.512.233.299	356.700		3.541.602.190	17.602	55.979.700	197	90	391.310	3.591.834.890	153	80	
	Penigkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan KTP, SKPWNl, KK	orang	256.128	4.512.233.299	356.700	97,93	3.541.602.190	17.602	55.979.700	197	90	391.310	3.591.834.890	153	80	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penduduk yang dilayani Pencatatan Sipil	Laporan	21	1.491.849.700	18	97,39	3.075.150.665	3	43.958.000	100	100	21	3.119.108.665	100	209	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	orang	86.813	1.491.849.700	86.819		1.216.560.400	9.307	43.958.000	89	100	95.060	1.260.518.400	109	84	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	orang	86.813	1.491.849.700	91.953	99,92	1.216.560.400	9.307	43.958.000	89	100	100.194	1.260.518.400	115	84	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola	Sistem	1	398.241.000	1		251.551.000	1	25.747.200	100	99	2	277.098.200	200	70	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan yang Diselenggarakan	kecamatan	42	398.241.000	35		251.551.000	7	25.747.200	100	99	42	277.098.200	100	70	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi kebijakan kependudukan	kecamatan	42	328.241.000	35	100	251.551.000	7	25.747.200	100	99	42	277.098.200	100	84	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	orang	7	70.000.000	-	100	-	2	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalankan	SISTEM	1	468.713.500	1		371.447.000	1	16.989.000	100	100	2	388.436.000	200	83	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun	Buku	6	468.713.500	5		371.447.000	1	16.989.000	100	100	6	388.436.000	100	83	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	Buku	6	468.713.500	5	91,7	371.447.000	1	16.989.000	100	100	6	388.436.000	100	83	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan Admintrasi yang terpenuhi	%	100	1.611.364.500	80	97,60	1.056.590.415	20	808.378.600	101	91	100	1.790.347.946	100	111	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	lbr	1200	711.574.420	1.000	99,63	626.293.580	200	186.652.100	100	97	1.200	806.945.680	100	113	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /Oprasional untuk jasa pemeliharaan	unit	120	34.987.200	101	40,09	26.374.670	21	4.800.000	14	50	104	28.793.776	87	82	
	Penyedia jasa kebersihan	Jumlah Jasa kebersihan kantor	org	72	33.600.000	51	100	25.200.000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	51	25.200.000	71	75	
	Penyedia komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	jenis	18	5.452.000	15	99,59	4.719.000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	15	4.719.000	83	87	
	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	jenis						2	480.820.000	100	93	2	447.443.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah tangga	jenis	102	10.105.400	85	100	19.462.500	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	85	19.462.500	83	193	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas ke luar dareah	kali	432	350.231.000	299	100	289.121.300	74	131.056.500	70	76	351	388.314.125	81	111	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas ke dalam dareah	kali	624	82.141.500	444	95,52	65.419.365	29	5.050.000	45	80	457	69.469.365	73	85	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan Saranan dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	%	100	705.550.238	61	100	637.959.738	20	438.460.000	100	90	81	1.034.101.237	81	147	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	unit	12	128.833.880	14		340.515.500	16	391.500.000	100	91	30	698.278.200	250	542	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubiler	jenis	25	170.581.500	5	98,96	93.881.500	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	93.881.500	20	55	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	unit	12	197.327.120	12	98,96	84.270.000	1	12.540.000	100	95	13	96.164.000	108	49	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	unit	94	130.172.738	70	100	101.357.738	9	29.500.000	89	87	78	126.942.537	83	98	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	jenis	16	78.635.000	10		17.935.000	11	4.920.000	64	18	17	18.835.000	106	24	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan kompetensi Sfesifik terpenuhi sumber daya aparatur	%	100	163.135.850	39	99,26	85.155.350	20	197.209.000	100	88	59	258.953.600	59	159	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	6	30.000.000	-	99,26	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	orang	6	28.520.000	-	99,26	-	55	46.838.000	58	54	32	25.238.000	533	88	
	Kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek inplementasi perundang undangan	orang	41	104.615.850	32	99,26	85.155.350	36	150.371.000	100	99	68	233.715.600	166	223	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan kebutuhan Lap.Kinerja dan keuangan yang terselesaikan sesuai stansar dan tepat waktu	%	100	19.890.500	50	100	8.211.000	100%	230.539.500	9.026	90	140	216.330.250	140	1.088	
	Kegiatan Penyusunan Lap.Capaian keinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Lap.Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	5	2.628.500	2	100	1.064.500	1	13.490.000	100	93	3	13.564.500	60	516	
	Kegiatan Penyusunan Lap.keuangan Sementara	Jumlah Laporan keuangan semesteran	laporan	10	2.428.500	4	100	796.000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	796.000	40	33	
	Kegiatan Penyusunan Lap.keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	laporan	5	2.142.500	2	100	918.000	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	918.000	40	43	
	Kegiatan Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	laporan	20	9.510.000	8	100	2.862.000	1	212.783.000	100	90	9	195.285.000	45	2.053	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I + Triwulan II Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	dokumen	10	3.181.000	5	100	2.570.500	2	4.266.500	100	75	7	5.766.750	70	181	
a capaian kinerja																	
diklat Kinerja																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.817.261.000		91		16.939.135.253		208.395	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM...)																	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																	

DINAS PARIWISATA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGG. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	URAIAN	SATUAN													
	Urusan Pemeritahan Bidang Pariwisata									#DIV/0!	#DIV/0!	-	1.599.864.809	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pariwisata	Nilai		2.694.852.437		7.966.137.290		2.861.150.505	#DIV/0!	49,11	-	9.371.216.356	#DIV/0!	347,75	
		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	jam							#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji pegawai dinas pariwisata	orang	24			6.285.937.374	24	2.406.119.732	100	96,89	24,00	8.617.294.954	100,00	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji pegawai dinas pariwisata	bulan	12	-	48	6.285.937.374	12	2.363.729.492	100,00	98,63	60,00	8.617.294.954	500,00	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	13	76.000.000	14	128.562.202	2	27.872.000	200,00	93,42	18,00	154.598.902	138,46	203,42	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	13	76.000.000	14	128.562.202	2	27.872.000	200,00	93,42	18,00	154.598.902	138,46	203,42	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	persen	100	1.145.076.000	100	582.845.475	100	148.828.500	100,00	99,98	200,00	731.641.925	200,00	63,89	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik / penerangan bangunan kantor yang disiapkan	Jenis	30	3.760.000	5	4.130.000	5	1.484.000	100,00	100,00	10,00	5.614.000	33,33	149,31	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	63	3.105.000	6	3.020.000	15	1.086.000	66,67	100,00	16,00	4.106.000	25,40	132,24	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	kali	1245	1.138.211.000	1067	575.695.475	310	146.258.500	237,74	99,98	1.804,00	721.921.925	144,90	63,43	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah yang diadakan	persen	100	367.800.000	100	115.801.000	100	124.699.200	100,00	91,41	200,00	229.784.000	200,00	62,48	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	119	103.000.000	57	72.343.000	26	33.042.000	80,77	67,65	78,00	94.696.000	65,55	91,94	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGG. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	24	264.800.000	31	43.458.000	2	91.657.200	100,00	99,97	33,00	135.088.000	137,50	51,02	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	806.139.437	100	739.138.579	100	103.193.300	100,00	97,96	200,00	840.230.176	200,00	104,23	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yg dikelola selama satu tahun	Surat	2500	673.739.437	488	613.981.657	500	53.220.800	119,60	100,00	1.086,00	667.202.457	43,44	99,03	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air	Rekening	28	132.400.000	10	125.156.922	6	49.972.500	116,67	95,79	17,00	173.027.719	60,71	130,69	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	299.837.000	100	113.852.660	100	50.437.773	100,00	88,70	200,00	158.590.487	200,00	52,89	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Unit	9	51.500.000	7	50.160.000	1	20.610.000	200,00	93,32	9,00	69.392.500	100,00	134,74	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	30	9.900.000	24	8.116.860	5	4.340.000	120,00	58,16	30,00	10.640.816	100,00	107,48	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	13	8.000.000	21	7.700.000	9	3.905.000	77,78	99,80	28,00	11.597.000	215,38	144,96	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	225.237.000	3	47.875.800	1	17.480.871	100,00	100,00	4,00	65.356.671	400,00	29,02	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	21	5.200.000	0	-	11	4.101.902	63,64	39,09	7,00	1.603.500	33,33	30,84	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										113,47	86,39			144,59	88,33	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	Persen	8,39	2.117.391.850	8,34	9.224.821.194	8,34	2.478.391.681	109,11	81,36	17,44	11.241.275.450	207,87	530,90	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGG. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	Lokasi	1	429.243.250		4.960.102.794	1	2.143.780.500	100,00	81,62	1,00	6.709.864.800	100,00	1.563,18	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Obyek Wisata yang dikembangkan	Unit	124	329.243.250	112	4.960.102.794	60	2.003.135.900	21,67	86,97	125,00	6.702.164.800	100,81	2.035,63	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri pariwisata	Orang	80	100.000.000	0	-	40	50.203.000	-	15,34	-	7.700.000	-	7,70	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola dan berkembang	Lokasi	6	1.688.148.600	4	4.264.718.400	1	334.611.181	100,00	79,70	5,00	4.531.410.650	83,33	268,42	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daerah tujuan wisata yg berkembang	Objek	6	1.688.148.600	113	4.264.718.400	1	334.611.181	100,00	79,70	114,00	4.531.410.650	1.900,00	268,42	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										71,80	70,78			398,67	779,04	
PREDIKAT KINERJA										Sangat rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	Persen	7,5	3.303.073.567	7,1	1.992.911.640	-49	448.735.800	- 12,06	86,60	13,01	2.381.530.432	173,46	72,10	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata	Kali	4	3.303.073.567		1.992.911.640	4	448.735.800	100,00	86,60	4,00	2.381.530.432	100,00	72,10	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi informasi	Media	2	131.706.647	1	99.998.000	1	27.138.000	100,00	99,82	2,00	127.086.000	100,00	96,49	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi wisata melalui pameran yang diikuti	Kali	22	3.171.366.920	17	1.892.913.640	4	421.597.800	100,00	85,75	21,00	2.254.444.432	95,45	71,09	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										84,10	89,69			117,23	77,95	
PREDIKAT KINERJA											Tinggi			Tinggi	Tinggi	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGG. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Lembaga yang bermitra dengan pengembangan destinasi	embaga	1	652.342.000	1	1.237.188.600	1	862.578.000	400,00	99,57	5,00	2.096.086.000	500,00	321,32	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	orang	671	383.843.800	628	1.012.629.600	290	739.875.000	82,76	99,65	868,00	1.749.935.000	129,36	455,90	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pariwisata	Orang	381	134.000.000	448	1.012.629.600	250	618.862.000	80,00	99,55	648,00	1.628.706.400	170,08	1.215,45	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah lokasi wisata kuliner yang berkembang	okasi	10	249.843.800	0	-	5	121.013.000	100,00	100,18	5,00	121.228.600	50,00	48,52	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Lembaga yang bermitra dengan pengembangan destinasi	embaga	1	268.498.200		224.559.000	1	122.703.000	100,00	99,09	1,00	346.151.000	100,00	128,92	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dilatih	Orang	290	268.498.200	180	224.559.000	40	122.703.000	100,00	99,09	220,00	346.151.000	75,86	128,92	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										143,79	99,52			170,88	383,17	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Ting	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										103,29	86,60			207,84	332,12	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										Sangat Ting	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

DINAS PERHUBUNGAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
	PERHUBUNGAN														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	Point	4					2	3.602.289.900					DINAS PERHUBUNGAN
		Rata-rata Lama Pegawai Pendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	100					20	Rp 79.374.000					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kegiatan		16.893.639.590					3.356.972.570					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Orang	195	16.893.639.590	41	3.247.541.435	41	3.356.972.570	100%	97%	82	6.495.082.870	42%	38%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya dan Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jenis	15					3	79.374.000					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan beserta kelengkapannya	Pasang	535	169.215.000,0	151	118.800.800	107	48.700.000	100%	99%	258	166.950.800	48%	99%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah staf yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	13	200.000.000,0	33	114.545.149			-					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah staf yang mengikuti bimbingan teknis, Implementasi peraturan perundangundangan	Orang	76	415.000.000,0	7	23.015.000	3	30.674.000	100%	83%	10	48.444.500	13%	12%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kegiatan	100%	2.549.300.000					116.001.200					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik tersedia/terpasang	Jenis	60	3.300.000,0	28	34.526.000	2	1.484.000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Daerah	OH	1.155	1.685.000.000,0	890	759.400.350	231	114.517.200	100%	100%	1121	873.883.800	97%	52%

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Kegiatan		895.000.008					-						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	Kendaraan	6	672.000.000	2	19.546.300			-						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor	Unit	14	100.000.000	52	205.278.000			-						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor	Unit	7	50.000.000	68	96.121.000			-						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Kegiatan		387.000.000				129.316.130							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan	10	546.966.150	4	346.440.625	2	78.915.200	100%	100%	6	425.253.740	60%	78%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	12	290.000.000	9	126.999.276	2	50.400.930	100%	93%	11	174.071.707	92%	60%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Kegiatan		2.277.500.000											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja STNK Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Kendaraan	94	143.000.000	16	15.443.010	33	137.129.830	100%	85%	49	132.172.970	52%	92%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	7	50.000.000	85	7.513.600	30	10.620.000	93%	77%	113	15.683.600	1614%	31%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	99,17%	91,73%				
										Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara dan direhabitasi	%												DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan		13.054.544.709										
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan	Unit	607	18.519.712.025	543	1.985.726.146	192	16.075.150						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan yang dipelihara	Rambu	2.095	4.073.563.931	4.305	75.325.900		-						
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	Terminal		1.350.000.000				-						
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dibangun	Paket			-	-		-						
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Kegiatan			-	-		-						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal /pelabuhan /prasarana perhubungan lainnya yang terpelihara	Unit			-	-		-						
		Pemeliharaan Terminal Mattirowalie	Unit			-	-		-						
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dipertahankannya sarana dan prasaran pengujian kendaraan bermotor	Unit		770.000.000				54.925.000						
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan dengan sistem BLU E	Paket						-						
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								-						
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Berfungsinya sarana timbangan	Unit	5	179.150.000	3	35.830.000	1	54.925.000	100%	99%	4	90.252.000	80%	50%

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		REALISASI KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		UNIT PERANGKAT		
			DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021(%)				
		URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan		5.115.000.000				565.440.000								
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan	20	3.905.000.000	-	-	4	436.800.000	100%	97%	4	421.800.000	20%	11%		
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Kegiatan			-	-										
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Kegiatan	20	515.200.000	9	115.320.500	4	103.040.000	100%	100%	13	218.346.750	65%	42%		
		Jumlah kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan	Kegiatan	15	128.000.000	1		3	25.600.000	100%	100%	4	25.600.000	27%	20%		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Keselamatan LLAJ di Jalan	Kecamatan		508.000.000				-								
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemilihan dan pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan	Kegiatan			-	-										
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100%	99%					
	Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan operasional pengelolaan pelabuhan penyeberangan dan Terminal	%						3.075.215.345							DINAS PERHUBUNGAN	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan			2.100.000.000				3.075.215.345					
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kegiatan	26		2.150.000.000	15	66.454.250	3	3.075.215.345	100%	84%	18	2.648.498.168	69% 123%
	Rata-rata capaian kinerja (%)										100%	84%			
	Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			
					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						99,72%	91,53%			
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :															

DINAS PERIKANAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
		Persentase capaian Kinerja													
	Program Penunjang Urusan Peemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	level	-	3.397.355.833	-	996.143.278	3	2.620.042.328	66,67	97,33	2	3.546.318.744	#DIV/0!	104,38
	Administrasi Keuangan	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	60	21.756.629.560	-	180.339.340	100	2.291.960.928	100,00	97,32	100	2.410.947.548	166,67	11,08
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	bulan	12	137.364.750	6	-	12	2.291.960.928	25,00	97,32	9	2.230.608.208	75,00	1.623,86
	Administrasi Kepegawaiaan	Persentase ASN Yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terjadap keseluruhan ASN Dinas Perikanan	Persen	60	10.920.962.240	-	180.339.340	16	36.307.500	125,00	98,65	20	216.158.499	33,33	1,98
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional	orang	12	137.364.750	6	-	4	36.307.500	200,00	98,65	14	35.819.159	116,67	26,08
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Persen	60	5.391.798.745	-	180.339.340	100	152.777.200	100,00	97,79	100	329.741.868	166,67	6,12
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang diadakan	unit	12	4.883.000	6	-	12	4.883.000	-	99,03	6	4.835.700	50,00	99,03
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor berdasarkan jenisnya	unit	30	15.234.361	-	-	-	4.278.200	#DIV/0!	95,11	-	4.069.100	-	26,71
	Penyeleenggaraan Rapat Kooordinasi dan konsultasi SPKD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	kali	3.170	1.851.437.731	-	-	287	143.616.000	-	97,83	-	140.497.728	-	7,59
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	60	1.847.577.384	-	180.339.340	100	14.058.000	100,00	99,53	100	194.331.340	166,67	10,52
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	unit	30	15.234.361	-	-	-	14.058.000	#DIV/0!	99,53	-	13.992.000	-	91,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor	persen	60	828.715.954	-	180.339.340	100	70.530.100	100,00	97,55	100	249.144.738	166,67	30,06
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Kali	60	606.056.284	-	-	-	29.061.100	#DIV/0!	98,58	-	28.649.848	-	4,73
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	periodesasi jasa komunikasi air dan listrik	Bulan	60	144.690.870	24	66.037.560	12	14.469.000	-	90,92	24	79.193.110	40,00	54,73
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya	Bulan	1	77.968.800	-	-	-	27.000.000	#DIV/0!	100,00	-	27.000.000	-	34,63

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	persen	8	174.911.115	22	25.141.500	100	54.408.600	100,00	94,74	122	76.689.673	1.525,00	43,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil/kendaraan operasi atau lapangan yang dipelihara	unit	62	122.102.000	-	-	16	39.900.000	100,00	93,84	16	37.441.073	25,81	30,66
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	8	40.598.915	11	2.300.100	3	7.010.000	-	94,47	11	8.922.400	137,50	21,98
	Pemeliharaan / Rehalitasi Gedung Kantor dan Gedung lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	12.210.200	-	-	1	7.498.600		99,82	-	7.484.800	-	61,30
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										106,25	97,34				
PREDIKAT KINERJA										Baik	Baik				
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.547	5.806.901.000	19.570	1.401.719.000	20.547	2.012.855.379	96,69	96,63	19.867	3.346.733.525	96,69	57,63
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan	Klp	23	1.471.371.000	15	938.307.000	8	1.169.186.100	200,00	99,63	31	2.103.167.100	134,78	142,94
	Penyediaan Data dan Informasi sumberdaya ikan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan yang akurat dan tepat waktu	Dok	10	267.158.300	8		1	37.263.600	100,00	99,59	9	#VALUE!	90,00	#VALUE!
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana Pendukung penangkapan ikan	klp	78	-	71	-	17	1.131.922.500	100,00	99,63	88	1.127.748.500	112,82	#DIV/0!
	Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	klp	10	2.784.600.000	2	357.663.000	9	730.280.550	188,89	92,08	19	1.030.139.625	190,00	36,99
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mengikuti bimbingan dan Pelatihan	Klp	-	-	-	-	11	633.450.000	100,00	99,82	11	632.279.250	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Perikanan tangkap yang terbentuk	Klp	10	-	-	-	6	96.830.550	100,00	41,51	6	40.197.375	60,00	#DIV/0!
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah TPI Yang terkelola	Unit	3	-	2	-	1	98.475.729	100,00	95,04	3	93.592.800	100,00	#DIV/0!
	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	1	98.475.729	100,00	95,04	1	93.592.800	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi disungai, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten	Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar	Unit	-	-	-	-	50	14.913.000	204,00	94,45	102	14.085.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pelayanan penerbitan pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai denga 10 GT	Jumlah Dukumen TPUPi dan TPKPIH	Dokumen	-	635	-	-	50	14.913.000	204,00	94,45	102	14.085.000	#DIV/0!	2.218.110,24
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										173,22	95,30				
PREDIKAT KINERJA										sangat ba	Baik				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	produksi Perikanan Budidaya	Ton	7.539	1.392.300.000	6.204	818.973.000	7.539	1.028.282.822	83,58	98,87	12.505	1.835.683.950	165,86	131,85
	Penerbitan izin Usaha Perikanan diBidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan	Dokumen	-	-	1	1.329.318.500	50	9.504.700	28,00	94,15	15	1.338.267.200	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya, Lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam satu Daerah Kabupaten Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Smei Intensif, dan Intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Budidaya yang terbitkan	Dokumen	-	-	-	58.399.000	50	9.504.700	28,00	94,15	14	67.347.700	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	KLP	-	-	-	-	10	497.044.500	-	99,00	-	492.080.250	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan Kecil	Jumlah kelompok POKDAKAN) yang ditingkatkan kavasitas kelembagaannya	KLp	-	-	-	-	6	487.050.000	-	99,42	-	484.205.750	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidaya ikan yang mendapatkan peningkatan Kavasitas Sumberdaya manusia melalui pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	20	9.994.500	-	78,79	-	7.874.500	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha	KLp	-	-	-	-	10	521.733.622	180,00	98,84	18	515.682.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah saluran tambak yang direhabilitasi	Km	-	-	-	-	2	145.359.622	100,00	99,86	2	145.150.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana Pembudidaya ikan	Klp	-	-	-	-	5	111.607.000	320,00	98,18	16	109.581.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah Kabupaten	Persentase Jumlah RTP yang melaksanakan CBIB dan CPIB	%	-	-	-	-	5	94.958.000	-	99,63	-	94.604.000	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Triwulan IV tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2021(%)	
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan	Kawasan	-	-	-	-	1	73.391.000	100,00	98,52	1	72.302.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembeudidayaan Ikan di Darat	Jumlah bibit ikan unggul yang dikembangkan	Paket	-	-	-	-	3	96.418.000	100,00	97,54	3	94.045.000	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										69,33	97,33				
PREDIKAT KINERJA										Kurang	baik				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMESARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Kelompok pengolah dan pemasar yang mandiri	klp	24	1.189.991.000	14	888.558.000	4	37.249.000	125,00	97,52	19	924.885.000	79,17	77,72
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan	%	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar Pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan hasil Produksi Perikanan	klp	-	-	18.965	4.673.489.386	3	-	-	-	18.965	4.673.489.386	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)	Ton	-	-	26	4.956.720.086	3.064	37.249.000	99,89	97,52	3.086	4.993.047.086	#DIV/0!	#DIV/0!
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan Usaha Pengolahan dalam satu Daerah	Jumlah Komsumsi ikan Perkapita /Tahun	Kg/Kapita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pemberian fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten	Jumlah Kelompok yang mendapatkan sarana, prasarana pengolahan dan Pemasaran ikan	klp	-	-	-	-	4	37.249.000	125,00	97,52				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA										112,44	97,52			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA										sgt Baik	Baik				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.698.429.529	97,36				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 8)										92,98	97,59			#REF!	#REF!
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumber daya Manusia															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Belum terpenuhinya dokumen SPIP sehingga nilai Maturitas SPIP belum tercapai															

KECAMATAN TANETE RIAJA

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD S/D SEMESTER II TA. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D SEMESTER II TA. 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D (SEMESTER II) TA. 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATE/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Terpenuhi		100	18.575.949.903	100	1.724.822.287	100	3.296.900.865	100,00	96,67	200	4.912.015.101	200,00	26,44	Kec. Tanete Riaja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	16.451.526.926	100	56.477.000	100	2.844.236.818	100,00	96,87	200	2.811.829.399	200,00	17,09	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Pegawai		100	16.451.526.926	100	56.477.000	100	2.844.236.818	100,00	96,87	200	2.811.829.399	200,00	17,09	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi		25	34.727.000	5	56.477.000	3	16.515.500	100,00	90,28	8	71.387.500	32,00	205,57	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta BinteK implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	34.727.000	5	56.477.000	3	16.515.500	100,00	90,28	8	71.387.500	32,00	205,57	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah		283	674.771.740	122	540.351.250	56	143.771.700	100,00	92,49	178	673.325.825	62,90	99,79	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	30	7.820.140	9	4.958.100	5	1.401.000	100,00	100,00	14	6.359.100	46,67	81,32	
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	10	20.545.100	9	38.523.500	2	24.725.000	100,00	100,00	11	63.248.500	110,00	307,85	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran rekening surat kabar	Jenis	29	32.330.000	22	24.890.000	3	5.040.000	100,00	95,24	25	29.690.000	86,21	91,83	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum rapat,makan minum tamu dan jumlah Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	OK	214	614.076.500	82	471.979.650	46	112.605.700	100,00	90,62	128	574.028.225	59,81	93,48	
	Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang terpenuhi	Jenis	62	278.746.000	19	183.233.000	7	77.600.000	100,00	100,00	26	260.833.000	41,94	93,57	
	Pengadaa Mebel		Jenis	27	70.864.000	7	36.564.000	2	45.750.000	100,00	100,00	9	82.314.000	33,33	116,16	
	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya		Jenis	35	207.882.000	12	146.669.000	5	31.850.000	100,00	100,00	17	178.519.000	48,57	85,88	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54	908.356.837	42	754.340.782	11	172.148.640	100,00	96,86	53	921.081.732	98,15	101,40	
	Penyediaan Jassa Surat Menyurat	Jumlah Honor ATK,Materai,Cetak Penggunaan dan makan minum harian pegawai.	Jenis	30	781.397.900	24	668.410.100	5	145.455.450	100,00	99,76	29	813.521.000	96,67	104,11	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon,air dan listrik	Rekenin g	24	126.958.937	18	85.930.682	6	26.693.190	100,00	81,03	24	107.560.732	100,00	84,72	
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara		84	227.821.400	76	133.943.255	2	42.628.207	200,00	92,93	80	173.557.645	95,24	76,18	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD S/D SEMESTER II TA. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D SEMESTER II TA. 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D (SEMESTER II) TA. 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan 2, service,BBM,dan penggantian suku cadang	Unit	42	121.600.000	45	91.624.855	6	26.560.000	50,00	90,09	48	115.553.245	114,29	95,03	
	Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jenis	42	106.221.400	31	42.318.400	2	16.068.207	50,00	97,62	32	58.004.400	76,19	54,61	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00	95,14	200	4.912.015.101	91	103	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi	%	23	21.000.000	11	4.778.700	11	4.454.000	100	100,00	22	9.232.700	95,65	43,97	Kec. Tanete Riaja
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Desa/Ke lurahan	7	20.000.000	7	4.608.700	7	3.954.000	100	100,00	14	8.562.700	200,00	42,81	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/Kel urahan	7	20.000.000	7	4.608.700	7	3.954.000	100	100,00	14	8.562.700	200,00	42,81	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen SOP pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	SOP	16	1.000.000	4	170.000	4	500.000	100	100,00	8	670.000	50,00	67,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah SOP yang tersusun	SOP	16	1.000.000	4	170.000	4	500.000	100	100,00	8	670.000	50,00	67,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	100,00	22	9.232.700	119,13	52,72	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kewilayahan yang dikembangkan	%	169	2.746.646.275	73	2.595.298.000	48	381.950.495	95,83	99,81	119	2.976.524.800	70,41	108,37	Kec. Tanete Riaja
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan yang diberdayakan	Keg,pake tJenis	157	2.571.581.775	62	2.512.507.400	45	370.880.495	100,00	99,81	107	2.882.670.800	68,15	112,10	
	Peningkatan Fartisipasi Masyarakat dalam Forum Mustawarah Perncaanan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemenuhan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan pemerintahan yang dilaksanakan	Kegiatan	60	1.114.104.800	39	975.713.900	9	68.023.600	100,00	98,95	48	1.043.020.500	80,00	93,62	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah Infrastruktur yang dibangun	Paket	14	841.734.975	8	1.055.875.500	6	208.836.895	100,00	100,00	14	1.264.712.300	100,00	150,25	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD S/D SEMESTER II TA. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D SEMESTER II TA. 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D (SEMESTER II) TA. 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan	Jenis	83	615.742.000	15	480.918.000	30	94.020.000	100,00	100,00	45	574.938.000	54,22	93,37	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jenis	12	175.064.500	11	82.790.600	3	11.070.000	33,33	99,94	12	93.854.000	100,00	53,61	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jenis	12	175.064.500	11	82.790.600	3	11.070.000	33,33	99,94	12	93.854.000	100,00	53,61	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										80,36	99,78	119	2.976.524.800	81,83	94,99	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Unit	6	112.144.000	5	76.015.500	1	12.738.050	100,00	100,00	6	88.753.500	100,00	79,14	Kec. Tanete Riaja
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	6	112.144.000	5	76.015.500	1	12.738.050	100,00	100,00	6	88.753.500	100,00	79,14	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	jumlah unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat	Unit	6	112.144.000	5	76.015.500	1	12.738.050	100,00	100,00	6	88.753.500	100,00	79,14	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00	100,00	6	88.753.500	100,00	79,14	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										98,96	99,12			116,52	64,48	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah	

KECAMATAN BARRU

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN		UNIT PERANGKAT	
			DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Persen	100	26.222.685.671	75	23.391.280.814	100	5.529.163.377	100,00	91,99	88	Rp 28.477.611.952	88,00	108,60	Kantor Kecamatan Barru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan	Orang	368	20.676.899.761	258	18.555.734.199	56	4.437.273.135	100,00	91,30	314	Rp 22.607.015.491	85,33	109,33	Kantor Kecamatan Barru
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Barru	Orang	368	20.676.899.761	258	18.555.734.199	56	4.437.273.135	100,00	91,30	314	Rp 22.607.015.491	85,33	109,33	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	16	40.000.000	17	28.788.000	11	39.353.500	90,91	72,45	27	Rp 57.299.000	168,75	143,25	Kantor Kecamatan Barru
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	orang	16	40.000.000	17	28.788.000	11	39.353.500	90,91	72,45	27	Rp 57.299.000	168,75	143,25	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	jenis	78	1.554.120.000	65	671.241.759	25	117.909.800	148,00	91,03	102	Rp 778.575.588	130,77	50,10	Kantor Kecamatan Barru
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik /penerangan yang disediakan	jenis	30	6.000.000	25	2.078.000	5	2.579.000	100,00	95,42	30	Rp 4.539.000	100,00	75,65	
	Penyediaan Bahan Bacaam dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	24	86.195.000	20	25.700.000	4	15.720.000	100,00	84,36	24	Rp 38.962.000	100,00	45,20	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas daerah yang dilaksanakan, Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan, Jumlah makan dan minum tamu, jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	jenis	24	1.461.925.000	20	643.463.759	16	99.610.800	100,00	91,97	36	Rp 735.074.588	150,00	50,28	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penunjang barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	jenis	121	200.000.000	77	105.297.000	56	116.315.000	100,00	98,56	133	Rp 221.612.000	109,92	110,81	Kantor Kecamatan Barru
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	unit	121	853.539.900	77	105.297.000	56	116.315.000	100,00	100,00	133	Rp 221.612.000	109,92	25,96	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket, jenis, orang	78	3.460.530.910	65	3.890.091.351	13	711.472.037	100,00	95,84	78	Rp 4.571.994.913	100,00	132,12	Kantor Kecamatan Barru
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah pengadaan yang disediakan dan jumlah makan minum harian pegawai	Paket	24	3.079.608.010	20	3.706.000.110	4	646.140.200	100,00	95,95	24	Rp 4.325.981.010	100,00	140,47	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi sarana telekomunikasi, jaringan listrik dan air	Jenis	18	224.322.900	15	56.291.241	3	36.531.837	100,00	90,67	18	Rp 89.413.903	100,00	39,86	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan jasanya	Orang	36	156.600.000	30	127.800.000	6	28.800.000	100,00	100,00	36	Rp 156.600.000	100,00	100,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit, jenis	171	291.135.000	132	140.128.505	39	106.839.905	100,00	94,52	171	Rp 241.114.960	100,00	82,82	Kantor Kecamatan Barru
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya dan jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki.	Unit	100	266.440.000	82	135.830.005	18	80.485.000	100,00	97,00	100	Rp 213.902.420	100,00	80,28	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis meubelair yang diperbaiki	Jenis	24	5.500.000	20	2.543.500	4	473.040	100,00	100,00	24	Rp 3.016.540	100,00	54,85	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Jenis	5	7.195.000	0	0	5	7.195.000	100,00	72,69	5	Rp 5.230.000	100,00	72,69	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	unit	36	9.000.000	30	1.755.000	6	15.686.865	100,00	96,97	36	Rp 16.966.000	100,00	188,51	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlatan gedung kantor yang diperbaiki	Jenis	6	3.000.000	0	0	6	3.000.000	100,00	66,67	6	Rp 2.000.000	100,00	66,67	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										101,42	90,05	82,19	4.068.230.278,86	109,37	91,91	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemerintahan Desa/ Kelurahan yang dibina dan diawasi	persen	100	19.250.000	85	3.790.000	100	10.440.000	50,00	51,05	70	Rp 9.120.000	50,00	47,38	Kantor Kecamatan Barru
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Desa/ Kelurahan	10	18.500.000	10	3.290.000	10	9.990.000	100,00	49,05	10	Rp 8.190.000	100,00	44,27	Kantor Kecamatan Barru
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Desa/ Kelurahan	10	18.500.000	10	3.290.000	10	9.990.000	100,00	49,05	10	Rp 8.190.000	100,00	44,27	
	Penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	SOP	13	750.000	9	500.000	4	450.000	100,00	100,00	13	Rp 950.000	100,00	126,67	Kantor Kecamatan Barru
	Peningkatatn Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang tersusun	SOP	13	1.000.000	9	500.000	4	450.000	100,00	100,00	13	Rp 950.000	100,00	95,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										90,00	69,83	23,20	5.480.000,00	90,00	71,52	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Tinggi	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan	persen	100	9.048.751.990	80	4.159.278.500	100	1.922.826.248	94,00	94,33	87,00	Rp 5.973.080.863	87,00	66,01	Kantor Kecamatan Barru
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan, Klp, unit, desa/kel	215	7.182.519.990	120	3.706.882.500	49	1.721.136.248	185,71	99,53	211	Rp 5.419.884.863	98,14	75,46	Kantor Kecamatan Barru
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengkoordinasian bidang perencanaan dan pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan	kegiatan	24	95.615.000	20	143.543.000	4	78.736.500	100,00	99,12	24	Rp 221.586.500	100,00	231,75	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur dasar yang dibangun atau dipelihara di Kelurahan	Unit	117	5.691.745.990	46	2.974.427.300	15	1.352.695.513	100,00	100,00	61	Rp 4.327.122.813	52,14	76,02	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	kelompok	64	1.380.159.000	44	587.592.200	20	286.146.235	100,00	97,48	64	Rp 866.525.550	100,00	62,78	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring	Desa/kelura han	10	15.000.000	10	1.320.000	10	3.558.000	100,00	93,59	10	Rp 4.650.000	100,00	31,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Lembaga	145	1.866.232.000	120	452.396.000	25	201.690.000	100,00	49,98	145	Rp 553.196.000	100,00	29,64	Kantor Kecamatan Barru
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan/adat yang dibina	Lembaga	145	1.866.232.000	120	452.396.000	25	201.690.000	100,00	100,00	25	Rp 654.086.000	17,24	35,05	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										109,96	91,75	78	Rp 2.252.516.574	81,81	75,96	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	aduan	88	25.099.000	78	43.540.000	10	21.740.000	100,00	100,00	88	Rp 65.280.000	100,00	260,09	Kantor Kecamatan Barru

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021					
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	aduan	88	25.099.000	78	43.540.000	10	21.740.000	100,00	100,00	88	Rp 65.280.000	100,00	260,09	Kantor Kecamatan Barru
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Unit Khusus Pengaduan Masyarakat	aduan	88	25.099.000	78	43.540.000	10	21.740.000	100,00	100,00	88	Rp 65.280.000	100,00	260,09	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00	88,00	65.280.000,00	100,00	260,09	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
FAKTOR PENGDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG BAIK DARI SELURUH STAKE HOLDER DAN APARATUR DIKECAMATAN																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG MASIH KURANG, SERTA SARANA DAN PRASARAN																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) : JUMLAH PEGAWAI DAN ANGGARAN DITAMBAH																

KECAMATAN BALUSU

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATE/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	%	100	11.978.551.400	100	3.273.410.530	100	2.419.202.003	1	94	194	5.551.321.214	193,67	46,34	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	%	25	10.278.053.080	25	1.770.991.338	25	2.094.120.986	352	85	113	3.552.705.234,00	4,52	34,57	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Balusu	Orang	25	10.278.053.080	25	1.770.991.338	25	2.094.120.986	352	85	113	3.552.705.234,00	4,52	34,57	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatr Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	33	32.210.000	79	56.869.000	1	30.343.500	400	99	83	86.975.250,00	2,52	270,03%	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas an Fungsi	Jumlah Peserta Diklat Formal	Orang	33	32.210.000	79	56.869.000	1	30.343.500	400	99	83	86.975.250,00	2,52	270,03	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Keg	4	563.214.720	4	513.175.180	4	78.362.200	200	143	12	625.439.880	300,00	111,05	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik	Jenis	67	14.685.200		11.105.440	12	912.000	67	100	8	12.017.440,00	11,94	81,83%	
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	jenis	42	6.051.540	21	5.654.040	7	598.000	57	702	25	9.852.040	59,52	162,80%	
	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Rekening Surat kabar	jenis	6	15.825.000	6	11.865.000	1	1.440.000	100	100	7	13.305.000	116,67	84,08%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Maka Minum Rapat,Makan Minum Tamu Dan Perjalan Dinas Luar dan Dalam Daerah	OK	285	526.652.980	139	484.550.700	336	75.412.200	39	140	269	590.265.400	94,39	112,08%	
	Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Keg	2	100.808.650	2	95.601.812	2	27.905.000	-	-	2	225.611.812	100,00	223,80	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobeleur kantor	Jenis	27	36.520.000	140	36.093.000	40	6.500.000	100	1.143	180	110.376.000	666,67	302,23	
	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	jenis	5	64.288.650	6	59.508.812	3	21.405.000	200	260	12	115.235.812	240,00	179,25	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	%	100	832.548.800	100	670.962.620	100	166.158.317	30	97	130	832.811.658	130,00	100,03	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Honor,ATK,Cetak,Penggandaan dan Makan Minum Harian Pegawai	jenis	66	701.285.600	33	559.875.700	5	135.146.200	240	98	45	692.269.650	68,18	98,71	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik	rekening	24	83.263.200	12	72.286.920	2	21.412.117	300	93	18	92.142.008	75,00	110,66	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)	TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Tugas	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	OB	10	48.000.000	4	38.800.000	2	9.600.000	300	100	10	48.400.000	100,00	100,83	
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg	3	171.716.150	3	165.810.580	3	22.312.000	200	278	9	227.777.380	300,00	132,65	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Penggantian Suku Cadang	Unit	142	71.272.500	24	74.887.350	6	15.075.000	67	118	28	92.675.250	19,72	130,03	
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara	Unit	102	5.800.000	140	4.629.000	21	527.000	100	100	161	5.156.000	157,84	88,90	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Unit	12	9.310.000	18	11.510.000	5	1.300.000	40	100	20	12.810.000	166,67	137,59	
	Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung,pagar dan penataan halaman	Paket	15	85.333.650	2	74.784.230	1	5.410.000	100	783	3	117.136.130	20,00	137,27	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										165,64	219,00	69,30	756.998.347,36	128,83	102,07	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	%	100	22.200.000	100	-	100	2.380.000	100	4.442	100	105.710.000	100,00	476,17	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa/Kel	6	22.200.000	-	-	6	2.380.000	100	4.442	6	105.710.000	100,00	476,17	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/Kel	6	22.200.000	-	-	6	2.380.000	100	4.442	6	105.710.000	100,00	476,17	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	4.442	106,00	233.209.990,83	476,17	952,34	
Predikat Kinerja																
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Wilayah Yang Dikembangkan	%	100	2.761.414.865	100	2.649.617.760	100	493.859.267	20	35	120	2.820.030.010	120,00	102,12	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	%	100	2.515.323.580	100	2.449.379.850	100	457.259.267	40	29	140	2.583.192.100	140,00	102,70	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan,Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan	Keg	45	926.922.780	9	795.841.400	4	104.880.250	100	67	13	866.193.650	28,89	93,45	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Tugas	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Yang Dibangun	Paket	11	1.238.568.500	10	1.374.068.150	1	198.304.317	-	-	10	1.374.068.150	90,91	110,94	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	Jenis	25	342.032.300	4	279.470.300	33	151.694.700	-	40	4	340.550.300	16,00	99,57	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Desa/Kel	6	7.800.000	-	-	6	2.380.000	67	100	4	2.380.000	66,67	30,51	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lbg	4	246.091.285	4	200.237.910	3	36.600.000	100	100	7	236.837.910	175,00	96,24	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	Lbg	30	246.091.285	15	200.237.910	3	36.600.000	100	100	18	236.837.910	60,00	96,24	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89	100	9,67	1.057.511.254	87	91	
Predikat Kinerja																
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	%	100	95.283.000	100	84.115.000	100	14.752.000	100	100	200	98.867.000	200,00	103,76	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	1	95.283.000	14	84.115.000	1	14.752.000	100	100	15	98.867.000	15	103,76	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit khusus Yang Dibentuk	Unit	1	95.283.000	23	84.115.000	1	14.752.000	100	100	24	98.867.000	24	103,76	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	100,00	79,67	98.867.000	79,67	103,76	
Predikat Kinerja																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										55,23	1.167,57	153,42	2.143.982.056	153,42	182,10	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																

KECAMATAN TANETE RILAU

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan adminstrasi yang terpenuhi	Persen	100	3.681.535.699	100	2.886.305.625	100	3.455.302.816	100,00	95,43	100	6.183.727.742	100,00	167,97	Kecamatan Tanete Rilau
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan	1	3.161.810.434	1	2.886.305.625	1	2.956.811.818	100	48,48	1	4.319.776.300	100,00	136,62	Kecamatan Tanete Rilau
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selamat 1 tahun	Orang	39	3.161.810.434		2.886.305.625	37	2.956.811.818	100	95,48	37	5.709.502.807	94,87	180,58	Kecamatan Tanete Rilau
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya dan aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	4.950.000	100	34.310.931	6	47.239.500	33,33333	71,95	100	68.300.431	100,00	1379,81	Kecamatan Tanete Rilau
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	6	4.950.000		29.358.000	6	47.239.500	100	71,95	6	63.347.500	100,00	1279,75	Kecamatan Tanete Rilau
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	3	-		15.020.000	-	-	0	0,00	0	-	0,00	0,00	Kecamatan Tanete Rilau
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Kegiatan	4	115.265.265	22500	423.236.360	4	74.407.950	100	98,64	22504	496.635.310	562600,00	430,86	Kecamatan Tanete Rilau
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	jenis	2	2.900.000	0	-	7	3.033.500	100	100,00	7	3.033.500	350,00	104,60	Kecamatan Tanete Rilau
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	2	5.000.000		4.952.931	5	4.935.350	40	98,04	3	9.791.681	150,00	195,83	Kecamatan Tanete Rilau
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi	Jenis	7	6.060.000		5.640.000	3	6.960.000	400	87,07	4	11.700.000	57,14	193,07	Kecamatan Tanete Rilau

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	<i>Pevelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah yang terlaksana,Jumlah makan minum rapat yang terpenuhi ,Jumlah makan minum tamu yang tersedia,Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah yang terlaksana	OK	340	101.305.265		103.859.750	340	59.479.100	130,00	99,98	20	163.326.450	5,88	161,22	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kegiatan	3	55.500.000		2.093.610.083	2	18.835.800	150	99,92	3	2.112.430.083	100,00	3806,18	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis	4	30.000.000		0	5	15.778.800	100,00	99,94	5	15.770.000	125,00	52,57	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Jenis	5	12.500.000	0	5.450.000	1	3.057.000	0	99,77	3	8.500.000	60,00	68,00	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Pengadaan mebel</i>	jumlah meubelair yang diadakan	Jenis	6	13.000.000	0	0	0	0					0,00	0,00	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan	2	262.960.000	0	91.911.243	2	277.720.668	100	96,49	2	359.885.538	100,00	136,86	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat Yang terkirim, cetak, penggandan Makan Minum Harian Pegawai, jumlah tenaga honor yang dibayarkan	jenis	7	234.600.000		231.751.250	7	242.401.350	100,00	98,55	7	470.630.890	100,00	200,61	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah rekening air & listrik yang dibayarkan	Rekening	6 Rekening	28.360.000		18.764.772	3	35.319.318	100	82,38	3	47.859.427	50,00	168,76	Kecamatan Tanete Rilau
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</i>	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	4	81.050.000	0	24.057.500	4	80.287.080	0	26,77	0	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Tanete Rilau

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas / operasional yang terpelihara secara rutin dan STNK yang terbayarkan	unit	6	32.050.000		3.185.900	6	29.740.000	0	99,18	0	32.681.010	0,00	101,97	Kecamatan Tanete Rilau
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang terpelihara	jenis	2	5.000.000		0	7	1.258.580	0	100,00	0	1.258.580	0,00	25,17	Kecamatan Tanete Rilau
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung dan Pagar dan penataan halaman	Jenis	8	25.000.000	2	5.450.000	8	43.223.500	0	100,00	2	48.673.500	33,33	194,69	Kecamatan Tanete Rilau
		Pengecatan rumah dan perbaikan plafon dan pintu	paket	2	10.000.000	2	15.000.000	-	0	-	0,00	2	15.000.000	33,33	150,00	Kecamatan Tanete Rilau
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperlihara dan jumlah peralatan gedung kantor yang diperlihara	Jenis	8	9.000.000		421.600	12	6.065.000	0	100,00	0	6.486.600	0,00	72,07	Kecamatan Tanete Rilau
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	90,17			183,33	528,32	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat tinggi	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diflementasikan	Persen	100	8.000.000			100	6.695.400	100,00	100,00					Kecamatan Tanete Rilau
		Persentase pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi														Kecamatan Tanete Rilau
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	7.500.000		7.982.000	1	6.264.000	100	100,00					Kecamatan Tanete Rilau
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina	Desa/Kel	10	7.500.000	10	7.982.000	10	6.264.000	100	100,00	20	14.246.000	333,33	189,95	Kecamatan Tanete Rilau

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan	1	500.000		500.000	1	431.400	100	100,00					Kecamatan Tanete Rilau
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah SOP Kecamatan yang disusun	SOP	4	500.000	4	500.000	4	431.400	100	100,00	8	931.400	133,33	186,28	Kecamatan Tanete Rilau
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	95,53			136,11	239,25	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat tinggi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kewilayahan yang dikembangkan	Persen	100	948.879.800			100	866.881.650	100,00	99,70					Kecamatan Tanete Rilau
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	897.879.800			4	814.081.650	100	99,68					Kecamatan Tanete Rilau
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan di kecamatan	Kegiatan	4	83.497.800	4	59.855.600	4	97.924.000	100	97,55	8	155.379.500	133,33	186,09	Kecamatan Tanete Rilau
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur kelurahan yang dibangun	paket	6	756.882.000	3	631.077.652	6	642.293.650	100	100,00	9	1.273.371.302	150,00	168,24	Kecamatan Tanete Rilau
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	orang	48	50.000.000	48	68.927.000	48	67.600.000	100	99,70	96	136.327.000	1600,00	272,65	Kecamatan Tanete Rilau
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan desa/kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	Desa/Kel	10	7.500.000	10	6.442.400	10	6.264.000	100	99,56	20	12.678.800	333,33	169,05	Kecamatan Tanete Rilau
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	51.000.000			1	52.800.000	100	100,00					Kecamatan Tanete Rilau

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I - TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	22	51.000.000	3	66.946.000	22	52.800.000	100	100,00	25	119.746.000	416,67	234,80	Kecamatan Tanete Rilau
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	96,42			200,69	281,44	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pengaduan masyarakat yang tertangani	Persen	100	22.267.800			100	24.420.800	100,00	98,38					Kecamatan Tanete Rilau
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya upaya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Instansi	3	22.267.800			3	24.420.800	100	98,38					Kecamatan Tanete Rilau
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat	unit	1	22.267.800	1	19.287.200	1	24.420.800	100	98,38	2	43.311.600	33,33	194,50	Kecamatan Tanete Rilau
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	99,03			228,01	213,21	
PREDIKAT KINERJA										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										75,00	65,13			64,96	1.328,92	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

KECAMATAN PUJANANTING

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD S/D SEMESTER II TA. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D SEMESTER II TA. 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D (SEMESTER II) TA. 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Uraian	Satuan													
	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATE/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Terpenuhi		100	3.960.490.017	100	3.960.490.017	100	2.193.267.035	100,00	229,66	200	8.997.452.637	200,00	227,18	Kec. Pujananting
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.898.969.780	100	1.898.969.780	100	1.898.969.780	100,00	234,06	200	6.343.691.403	200,00	334,06	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Pegawai		100	1.898.969.780	100	1.898.969.780	100	1.898.969.780	100,00	234,06	200	6.343.691.403	200,00	334,06	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan kompetensi spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi		25	26.426.000	5	26.426.000	3	12.802.000	100,00	381,87	8	75.313.000	32,00	285,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta BinteK inplementasi peraturan perundang-undangan	Orang	25	26.426.000	5	26.426.000	3	12.802.000	100,00	381,87	8	75.313.000	32,00	285,00	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah		283	620.170.000	122	620.170.000	56	69.206.880	171,43	189,72	218	751.466.723	77,03	121,17	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	30	1.973.500	9	1.973.500	5	1.973.380	100,00	200,00	14	5.920.260	46,67	299,99	
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	10	1.060.000	9	1.060.000	2	-	100,00	#DIV/0!	11	1.060.000	110,00	100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaren rekening surat kabar	Jenis	29	3.060.000	22	3.060.000	3	3.060.000	100,00	208,33	25	9.435.000	86,21	308,33	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan minum rapat,makan minum tamu dan jumlah Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	OK	214	614.076.500	82	614.076.500	46	64.173.500	186,96	188,51	168	735.051.463	78,50	119,70	
	Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang terpenuhi	Jenis	62	278.746.000	19	278.746.000	3	22.000.000	233,33	100,00	26	300.746.000	41,94	107,89	
	Pengadaan Alat Kantor lainnya		Jenis	27	70.864.000	7	70.864.000	1	8.500.000	100,00	100,00	8	79.364.000	29,63	111,99	
	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya		Jenis	35	207.882.000	12	207.882.000	2	13.500.000	100,00	100,00	14	221.382.000	40,00	106,49	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		65	908.356.837	42	908.356.837	11	170.318.375	100,00	195,97	53	1.242.121.821	81,54	136,74	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD S/D SEMESTER II TA. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D SEMESTER II TA. 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D (SEMESTER II) TA. 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jassa Surat Menyurat	Jumlah Honor ATK,Materai,Cetak Penggandaan dan makan minum harian pegawai.	Jenis	30	781.397.900	24	781.397.900	5	150.159.800	100,00	207,28	29	1.092.642.300	96,67	139,83	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon,air dan listrik	Rekening	24	126.958.937	18	126.958.937	6	15.358.575	100,00	146,63	24	149.479.521	100,00	117,74	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	Orang	11					4.800.000							
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		43	227.821.400	76	227.821.400	2	19.970.000	200,00	281,88	80	284.113.690	186,05	124,71	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan 2, service,BBM,dan penggantian suku cadang	Unit	42	121.600.000	45	121.600.000	6	18.470.000	50,00	296,66	48	176.392.290	114,29	145,06	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang dibayarkan	Jenis	1	106.221.400	31	106.221.400	2	1.500.000	50,00	100,00	32	107.721.400	3.200,00	101,41	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										115,35	#DIV/0!	200	8.997.452.637	261	185	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi	%	23	21.000.000	11	21.000.000	11	7.636.800	100	168,65	22	33.879.600	95,65	161,33	Kec. Pujananting
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Desa/Kelurahan	7	20.000.000	7	20.000.000	7	7.533.800	100	169,59	14	32.776.600	200,00	172,13	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/Kelurahan	7	20.000.000	7	20.000.000	7	7.533.800	100	191,49	14	34.426.600	200,00	172,13	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen SOP pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	SOP	16	1.000.000	4	1.000.000	4	103.000	100	300,00	8	1.309.000	50,00	130,90	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang tersusun	SOP	16	1.000.000	4	1.000.000	4	103.000	100	300,00	8	1.309.000	50,00	130,90	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	225,95	22	33.879.600	119,13	153,48	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Wilayah yang dikembangkan	%	116	1.632.541.475	41	1.632.541.475	46	413.698.290	80,43	146,28	78	2.237.709.725	67,24	137,07	Kec.

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PD S/D SEMESTER II TA. 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D SEMESTER II TA. 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D (SEMESTER II) TA. 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kelurahan yang diberdayakan	Keg,pak etJenis	104	1.457.476.975	30	1.457.476.975	43	369.926.290	83,72	136,92	66	1.963.991.225	63,46	134,75	Kec. Pujananting
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	Paket	14	841.734.975	8	841.734.975	6	330.326.290	100,00	135,36	14	1.288.849.225	100,00	153,12	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat Desa/kelurahan yang diberdayakan	Jenis	83	615.742.000	15	615.742.000	30	39.600.000	100,00	150,00	45	675.142.000	54,22	109,65	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pemerintahan desa/kel. yang dimonitoring dan dievaluas	Desa/Ke lurahan	7		7		7	-							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jenis	12	175.064.500	11	175.064.500	3	43.772.000	33,33	225,38	12	273.718.500	100,00	156,35	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jenis	12	175.064.500	11	175.064.500	3	43.772.000	33,33	225,38	12	273.718.500	100,00	156,35	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										71,80	169,89	78	2.237.709.725	80,82	141,22	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang tertangani	Unit	6	112.144.000	5	112.144.000	1	16.200.000	100,00	225,00	6	148.594.000	100,00	132,50	Kec. Pujananting
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	6	112.144.000	5	112.144.000	1	16.200.000	100,00	225,00	6	148.594.000	100,00	132,50	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah unit khusus yang menangani pengaduan masyarakat	Unit	6	112.144.000	5	112.144.000	1	16.200.000	100,00	225,00	6	148.594.000	100,00	132,50	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00	225,00	6	148.594.000	100,00	132,50	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										95,11	192,40			115,72	164,52	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah	

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Tugas	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	%	100	3.692.850.516	100	2.920.127.086	100	2.867.729.204	1	76	194	5.104.293.717	193,67	138,22	Kec. Soppeng Riaja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	%	32	2.708.000.000	32	2.473.465.267	32	2.487.517.508	275	92	120	4.771.611.147,00	3,75	176,20	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kec.Soppeng Riaja	Orang	32	2.708.000.000	32	2.473.465.267	32	2.487.517.508	275	92	120	4.771.611.147,00	3,75	176,20	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatr Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100	26.426.000	79	19.997.000	1	26.426.000	200	90	81	43.899.500,00	0,81	166,12%	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas an Fungsi	Jumlah Peserta Diklat Formal	Orang	3	26.426.000	79	19.997.000	1	26.426.000	200	90	81	43.899.500,00	27,00	166,12	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Keg	4	754.776.720	4	123.292.827	4	118.126.400	200	66	12	201.504.527	300,00	26,70	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang disediakan	oh	7444	213.672.200		11.105.440	12	22.774.600	-	23	-	16.420.840,00	-	7,69%	
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	jenis	42	6.051.540	21	5.654.040	7	598.000	57	702	25	9.852.040	59,52	162,80%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Rekening Surat kabar	jenis	5	8.400.000	6	9.120.000	1	8.400.000	100	100	7	17.520.000	140,00	208,57%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Maka Minum Rapat,Makan Minum Tamu Dan Perjalan Dinas Luar dan Dalam Daerah	OK	285	526.652.980	139	97.413.347	336	86.353.800	33	70	249	157.711.647	87,37	29,95%	
	Pengadaaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Keg	2	42.746.100	2	95.601.812	2	42.746.100	-	-	2	95.601.812	100,00	223,65	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobeleur kantor	Jenis	5	14.779.300	140	36.093.000	40	14.779.300	-	-	140	36.093.000	2.800,00	244,21	
	Pengadaan Peralatan Dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	jenis	5	27.966.800	6	59.508.812	3	27.966.800	-	-	6	59.508.812	120,00	212,78	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	%	100	152.494.896	100	196.122.930	100	153.102.396	30	94	130	339.877.531	130,00	222,88	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)	TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGU NG JAWAB	
		Uraian	Tugas	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Honor,ATK,Cetak,Penggandaan dan Makan Minum Harian Pegawai	jenis	3	109.895.700	33	156.000.000	5	110.503.200	120	98	39	263.997.150	1.300,00	240,23	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik	rekening	3	28.199.196	3	14.880.730	3	28.199.196	100	76	6	36.238.181	200,00	128,51	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	OB	4	14.400.000	4	25.242.200	2	14.400.000	-	100	4	39.642.200	100,00	275,29	
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg	3	8.406.800	3	11.647.250	3	39.810.800	200	74	9	41.129.300	300,00	489,24	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeiharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pembayaran STNK,Kendaraan Roda 2 dan 4,Service,BBM dan Penggantian Suku Cadang	Unit	11	2.650.000	24	4.682.250	6	33.350.000	17	76	25	30.053.500	227,27	1.134,09	
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mobeleur Yang Dipelihara	Unit	4	2.350.000	4	4.629.000	4	2.350.000	-	-	4	4.629.000	100,00	196,98	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Unit	11	2.210.000	18	150.000	2	2.210.000	-	100	18	2.360.000	163,64	106,79	
	Pemeilharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan Gedung,pagar dan penataan halaman	Unit	1	1.196.800	2	2.186.000	2	1.900.800	-	100	2	4.086.800	200,00	341,48	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										82,16	96,40	57,89	731.433.697,77	298,04	204,79	
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	%	100	4.541.200	100	43.732.000	100	33.655.800	100	341	100	158.350.400	100,00	3.486,97	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desa/K el	6	4.056.400	-	43.732.000	6	33.171.000	100	346	6	158.350.400	100,00	3.903,72	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal		3	Keg	-		16.840.000	3	21.550.000							

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)	TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGU NG JAWAB	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/K el	7	4.056.400	5,00	26.892.000	5	11.621.000	100	45	10	32.148.400	142,86	792,54	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	Desa/K el	5	484.800	5,00	-	5	484.800	100	775	10	3.756.400	200,00	774,83	
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kecamatan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dibina	SOP	4	484.800	5,00	-	2	484.800	250	100	10	484.800	250,00	100,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										130	321	106,00	106.119.584,25	1.392,77	5.571,09	
Predikat Kinerja																
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kewilayahan Yang Dikembangkan	%	100	400.071.600	100	735.998.400	100	868.433.458	20	97	120	1.575.620.658	120,00	393,83	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	%	100	304.071.600	100	699.998.400	100	772.433.458	40	98	140	1.453.820.658	140,00	478,12	
	Peningkatan Fartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perncaanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan,Pemerintahan,Pemba ngunan dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	178.158.700	9	299.257.500	7	62.756.400	57	87	13	354.041.100	144,44	198,72	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Yang Dibangun	unit	1	15.000.000	10	304.531.000	1	598.764.158	-	98	10	893.445.158	1.000,00	5.956,30	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelomp ok	2	107.166.500	4	50.742.500	8	107.166.500	-	100	4	157.509.000	200,00	146,98	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Dimonitoring dan Dievaluasi	Kelomp ok	2	3.746.400	-	45.467.400	6	3.746.400	67	90	4	48.825.400	200,00	1.303,26	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lbg	4	96.000.000	4	36.000.000	3	96.000.000	100	89	7	121.800.000	175,00	126,88	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	Lembag a	3	96.000.000	15	36.000.000	1	96.000.000	100	100	16	132.000.000	533,33	137,50	

NO	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTFUT)		TARGET RENSTRA PD TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2021) YANG DIEVALUASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD S/D Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Semester II Tahun Anggaran 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Semester II Tahun Anggaran 2021 (%)		PENANGGU NG JAWAB
		Uraian	Tugas	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89	93	9,00	592.132.747	314	1.093	
Predikat Kinerja																
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	%	100	25.000.000	100	16.840.000	100	17.080.000	100	97	200	33.392.000	200,00	133,57	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	1	25.000.000	14	16.840.000	1	17.080.000	100	97	15	33.392.000	15	133,57	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unit khusus Yang Dibentuk	Unit	1	25.000.000	23	16.840.000	1	17.080.000	100	97	24	33.392.000	24	133,57	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100	96,91	79,67	33.392.000	79,67	133,57	
Predikat Kinerja																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										55,23	152,58	153,42	1.717.914.194	153,42	1.038,15	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																

KECAMATAN MALLUSETASI

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021 %)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase kebutuhanPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	persen	100	6.813.153.196	92,69	4.695.250.395	100	4.325.507.804	0,93	92,94	93,61944	8.715.546.562	93,61943912	127,922363	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administasi Keuangan yang dilaksanakan	keg.	1	23.361.660.486	1	3.893.610.081	1	3.501.091.322	100,00	94,03	2	7.185.729.463	200	30,75864178	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang dibayarkan gajinya selama setahun	orang	50	23.361.660.486	43	3.893.610.081	48	3.501.091.322	100,00	94,03	91	7.185.729.463	182	30,75864178	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	persen	100	170.700.000	100	20.900.000	14,58	28.450.000	5,54	80,84	100,8084	43.900.000	100,8084359	25,71763327	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Kec/Kel. Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	7	170.700.000	2	20.900.000	4	28.450.000	100,00	80,84	6	43.900.000	85,71428571	25,71763327	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	359.390.500	96	196.344.000	100	255.308.000	0,91	91,13	96,91134	429.016.900	96,91134199	119,373467	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum aktifitas lapangan	orang	350	160.550.000	40	10.071.000	53	24.062.000	100,00	100,00	93	34.133.000	26,57142857	21,2600436	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	lembar	3500	11.510.500	3250	15.940.000	33247	16.429.500	100,00	100,00	36498	32.369.500	1042,8	281,2171496	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak yang tersedia selama 1 tahun	jenis	5	76.440.000	5	9.700.000	5	10.920.000	100,00	95,60	10	20.140.000	200	26,34746206	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi penyediaan kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi tamu	bulan	12	55.450.000	12	19.690.000	12	7.920.000	100,00	100,00	24	27.610.000	200	49,79260595	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi yang dilaksanakan	keg.	1150	55.440.000	320	140.943.000	888	195.976.500	95,72	88,70	1170	314.764.400	101,7391304	567,7568543	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	754.000.000	0	-	100	106.549.200	0,58	58,05	0,580483	61.850.000	0,580483007	8,202917772	
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang tersedia	jenis	7	25.000.000	0	-	6	-	0,00	#DIV/0!	0	-	0	0	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021 %)		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021(%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang tersedia	jenis	7	729.000.000	0	-	5	106.549.200	60,00	58,05	3	61.850.000	42,85714286	8,484224966	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	persen	100	3.937.033.169	100	533.828.814	100	362.419.282	0,98	97,90	100,979	888.630.097	100,9789801	22,57105945	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jenis	36	2.104.620.400	24	36.077.900	36	36.091.900	100,00	100,00	60	72.169.800	166,6666667	3,429112442	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	12	224.412.769	14	100.245.914	12	42.727.382	100,00	85,68	26	136.855.297	216,6666667	60,98373885	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya selama 1 tahun	orang	43	1.608.000.000	35	397.505.000	38	283.600.000	97,37	99,47	72	679.605.000	167,4418605	42,26399254	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	persen	100	134.100.000	100	50.567.500	100	71.690.000	0,78	77,91	100,7791	106.420.102	100,779085	79,35876361	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	unit	34	51.830.000	34	39.642.500	34	46.330.000	76,47	87,17	60	80.030.102	176,4705882	154,4088404	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	18	65.395.000	18	8.200.000	18	8.485.000	555,56	100,00	118	16.685.000	655,5555556	25,51418304	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit	4	16.875.000	4	2.725.000	3	16.875.000	100,00	41,36	7	9.705.000	175	57,51111111	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berbasis kepuasan masyarakat	persen	100	7.813.302	0	-	20	52.217.000	4,68	93,68	0,936802	48.917.000	0,936802191	626,0733298	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di desa dan Kecamatan	keg	1	313.302	0	-	1	52.217.000	93,68	93,68	0,936802	48.917.000	93,68021909	15613,36985	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	10	313.302	0		2	52.217.000	100,00	93,68	2	48.917.000	20	15613,36985	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021 %)		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021(%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			7.500.000	0	-		-	0,00	0,00	0	-	0	0	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah SOP yang Tersusun dan diimplementasikan	dokumen	4	7.500.000	0	-	4	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	persen	100	1.324.843.430	100	913.180.100	100	1.225.341.230	0,98	98,35	100,9835	2.118.363.730	100,9835494	159,8954021	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelompok masyarakat yang diberdayakan	persen	100	1.134.723.630	100	792.279.000	50	1.084.785.630	1,97	98,32	100,9832	1.858.827.030	100,9831878	163,8131948	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang tersusun	dokumen	9	110.305.500	9	45.211.000	9	66.337.500	100,00	92,22	18	106.386.100	200	96,44677736	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	unit	15	816.293.730	6	525.022.900	6	816.293.730	100,00	98,46	12	1.328.716.630	80	162,7743276	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan yang Diberdayakan	klp.	30	208.124.400	30	222.045.100	30	201.679.200	100,00	100,00	60	423.724.300	200	203,5918422	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pemerintahan Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi	kel.	0	-	0	-	3	475.200	0,00	0,00	0	-	0	0	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase lembaga Kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	persen	100	190.119.800	100	120.901.100	100	140.555.600	0,99	98,63	100,9863	259.536.700	100,9863399	136,5121886	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	lembaga	5	190.119.800	5	120.901.100	5	140.555.600	100,00	98,63	10	259.536.700	200	136,5121886	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021 %)		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021(%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	persen	100	48.700.000	15	25.450.000	100	18.679.800	100,00	100,00	115	44.129.000	115	90,61396304	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	keg.	1	62.735.000	48,14	30.200.000	2	18.679.800	50,00	100,00	49,14	48.879.000	4914	77,91344545	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terbentuknya Satuan Tugas penanganan kasus	satgas	1	113.860.000	55,11	407.030.650	1	18.679.800	100,00	100,00	56,11	425.709.650	5611	373,8886791	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	keg.	2	713.688.000	2	366.028.500	2	-	0,00	0,00	2	366.028.500	100	51,28690688	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahana Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahana Umum dilaksanakan di kecamatan	persen	100	281.250.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerliintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	281.250.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
	Pembinaan Wawasan kebangsaaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KEsatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaaan dan Ketahanan nasional	keg.	1	281.250.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	persen	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0	0	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021 %)		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021		PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021(%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan UMKM yang diberdayakan	persen		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	#VALUE!	0	0	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Surat Izin Usaha yang diterbitkan	lembar		-			0	-	0,00	0,00	0	-	0	0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										60,09	59,70			468,31	1.209,47	
PREDIKAT KINERJA										Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										0,08	7,75			7,80	10,66	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

SEKRETARIAT DPRD

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi					(100%) 7 Kegiatan	18.617.821.321,00							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	11.963.201.724,00					-	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Anggota DPRD yg terbayarkan gaji dan tunjangannya -Jumlah ASN yg terbayarkan gaji dan tunjangannya					- 25 orang -24 orang	11.963.201.724,00	100%	94%	- 25 orang -24 orang	11.191.565.637,00	100%	95%	
									100%	94%			100%	95%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		444.924.510,00		438.864.380,00		96.473.500,00		77%	-				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 OK	428.124.510,00	27 OK	401.029.938,00	7 Orang	80.153.000,00	86%	81%	39 Orang	466.211.237,00	110%	109%	
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	30 OK	56.800.000,00	25 OK	35.825.000,00	5 Orang	16.320.500,00	40%	55%	27 Orang	44.865.000,00	83%	79%	
									63%	68%			97%	94%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi		4.366.081.553,00		3.613.081.616,00	5 Jenis	983.058.500,00		96%					

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	191.000.004,00	5 jenis	44.121.000,00	5 Jenis	4.776.000,00	100%	100%	5 Jenis	48.882.000,00	100%	111%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	64.166.250,00	2 jenis	34.624.900,00	4 Jenis	8.000.000,00	100%	77%	2 jenis	40.803.900,00	100%	64%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	851.454.000,00	2 jenis	656.794.000,00	2 jenis	270.000.000,00	100%	98%	2 jenis	921.439.000,00	100%	108%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah	651 OK	2.884.169.773,00	522 OK	2.340.142.416,00	129 OK	633.062.500,00	95%	100%	645 OK	2.972.925.135,00	99%	103%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah	2147 OH	487.580.005,42	1793 OK	537.198.600,00	340 OK	67.220.000,00	99%	51%	2129 OK	571.648.600,00	99%	105%	
				582.173.353,004					99%	96%			100%	98%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terlaksana					100%	1.015.635.126,00	100%	85%		4.233.477.690,00			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-		Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan	2 Unit	000.000,00 0900.	2 unit	888.054.500,00	-	-	-	-	2 Unit	888.054.500,00	100%	99%	
-		Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4 unit	69.300.000,00	2 unit	500.000.000,00	-	-	-	-	2 Unit	32.500.000,00	50%	47%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	15 Paket	357.560.00884	12 Paket	990.710.00986	3 Paket	189.256.786,00	100%	93%	15 Paket	1.237.362.040,00	100%	140%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas						80.726.840,00	100%	93%					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	27 Unit	728.515.793,002.	23 Unit	458.838.190,001	4 Paket	368.489.500,00	100%	76%	27 Paket	2.075.561.150,00	100%	76%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor						377.162.000,00	100%	89%					
									100%	88%			83%	88%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi					3 Jenis	843.577.259,00							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	2408 eks	229244000,001.	2297 eks	940.120.350,00	398 eks	277.870.000,00	99%	90%	2692 Eks	1.188.966.550,00	112%	97%	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			K	K	K	K	K	K	K					
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.					
		(4)	1.151.839,17 9,00	571.327,08 9,00										
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	4 rekening	4 Rekening	4 rekening	273.156.259,00	100%	88%		810.935.359,00	100%	70%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	7 org/bln	1 Paket	1 Paket	292.551.000,00	100%	99%	2 Paket	501.828.250,00	100%	254%		
							100%	92%			104%	141%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terlaksana			5 Jenis	2.219.815.212,00								
		Cakupan Kebutuhan Administrasi yang terpenuhi				2.219.815.212,00				3.845.614.676,00				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Di Pelihara	3 unit	3 unit	3 Unit	120.660.000,00	100%	59%		284.829.885,00	100%	89%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang dipelihara	13 unit	13 unit	13 unit	99.000.000,00	85%	99%		220.325.051,00	100%	100%		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	18 unit (9 Unit roda 4 & 9 Unit roda 2)	42.930.000,00	18 unit (9 Unit roda 4 & 9 Unit roda 2)	34.805.000,00	18 unit (9 Unit roda 4 & 9 Unit roda 2)	15.390.000,00	50%	48%		42.518.024,00	48%	48%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	5 jenis	42.930.000,00	5 jenis	34.805.000,00	5 Jenis	28.275.000,00	100%	39%		45.355.000,00	100%	106%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	3 unit	642.535.704,00	3 unit	493.095.808,00	3 Unit	731.391.250,00	100%	85%		1.117.065.908,00	100%	174%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	129.179.914,00	4 unit	913.835.351,00	9 Unit	1.225.098.962,00	100%	100%		2.135.520.808,00	100%	100%	
									89%	72%			91%	103%	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		423.218.000,00		772.675.000,00	2 jenis	307.450.000,00				1.027.501.900,00			
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya yang disediakan	425 org/psg	423.218.000,00	285 pasang	772.675.000,00	125 org/psg	194.400.000,00	94%	90%	400 org/psg	947.437.500,00	94%	67%	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan general check up					25 org	113.050.000,00	84%	71%	-	80.064.400,00	75%	75%	
									89%	80%			85%	71%	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Administrasi DPRD					2 Jenis	1.188.610.000,00				3.535.066.320,00			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	399 Kali	486.787.500,00	448 Kali	327.952.600,00	72 Kali	60.000.000,00	100%	98%	530	386.949.800,00	90%	79%	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	188 kali	723.512.500,00	166 Kali	441.116.500,00	20 Kali	108.610.000,00	100%	66%	186	513.116.520,00	99%	71%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang disediakan	156 OB	2.444.000.000,00	120 OB	1.615.000.000,00	36 OB	1.020.000.000,00	100%	100%	138 OB	2.635.000.000,00	88%	108%	
									100%	88%			93%	86%	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat kelengkapan DPRD					76 Kali	11.024.758.000,00				37.986.437.774,00			
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Perda dan Peraturan DPRD yang diajukan					4 Ranperda	2.181.125.000,00				4.729.736.000,00			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	75 kali	770.075.000,00	60 Kali	737.075.000,00	15 Kali	33.000.000,00	100%	55%	75 Kali	755.251.000,00	84%	98%	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 Ok	124.895.000,00	75 OK	25.845.000,00	125 OH	1.398.125.000,00	64%	68%	75 OH	974.485.000,00	34%	780%	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD	20 Ranperda	3.000.000.000,00	16 Ranperda	2.400.000.000,00	45Ranperda	750.000.000,00	80%	80%	20 Ranperda	3.000.000.000,00	100%	100%	
									81%	68%			73%	326%	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya					25 Orang	1.955.073.000,00				10.682.121.459,00			
	Bimbingan Tekhnis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti whorkshop dalam Peningkatan kapasitas	150 Orang	10.562.319.400,00	125 Orang	8.853.578.659,00	25 org	1.451.073.000,00	100%	91%	25 org	10.682.121.459,00	100%	100%	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD yang di sediakan					36 org/bln	126.000.000,00	100%	100%	36 Org/bln				
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Pendamping Fraksi dan Komisi yang di sediakan					108 org/bln	378.000.000,00	100%	100%	36 Org/bln				
									100%	97%			100%	100%	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Jenis Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat					2 Jenis	2.105.200.000,00							

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	4540 OH	714.725.000,00	3320 OK	383.158.600,00	675 OH	66.250.000,00	100%	95%	3545 OH	446.209.600,00	100%	62%	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang difasilitasi	18 kali	924.485.000,00	14 kali	5.347.722.000,00	3 Kali	2.038.950.000,00	100%	100%	16 Kali	7.377.672.000,00	94%	83%	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD						4.783.360.000,00	100%	97%		22.574.580.315,00	97%	73%	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	450 kali	1.069.937.500,00	300 Kali	971.883.500,00	70 Kali	100.725.000,00							
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah	2809 OK	939.169.240.002,00	2475 OK	18.444.880.502,00	415 OK	4.682.635.000,00	90%	88%		22.574.580.315,00	90%	90%	
									90%	88%			90%	90%	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	Rp.	k	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										-			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun										-			
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang disusun													
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun													Subag Perencanaan dan Anggaran
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi yang di susun													
	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA yang disusun													
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										93%	86%			93%	114%
PREDIKAT KINERJA															
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :															
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :															
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :															

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)							
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	Persen	100	1.761.567.253	100	604.983.215	100	1.761.567.253	0	49,9083291	100	1.484.151.997,00	100	84,25	
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen													
		Presentasi aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Persen													
		Jumlah alat berat dalam kondisi baik	Unit													
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		69.442.672		32.511.250		69.442.672							
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Orang	4	49.442.672	4	32.511.250	3	49.442.672	300	91,4772062	13	77.740.025,00	7500	0,00	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	2	10.000.000	0	0	2	10.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta BinteK implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	7	10.000.000	0	0	7	10.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pendukung administrasi umum perangkat daerah	Persen	0	288.545.511	0	203.437.150	0	288.545.511	0	0	0	203.437.150,00	0	70,50	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000	100	39,22	1	1.961.000,00	10000	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	Jenis	3	2.369.275	3	7.373.900	3	2.369.275	100	153,881462	6	11.019.775,00	3333,333	0,01	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran rekening surat kabar	Jenis	5	12.096.000	0	0	5	12.096.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan Dinas Luar Provinsi	OK	57	226.142.542		196.063.250	57	226.142.542	0	54,1552792	0	318.531.375,00	0	0,00	
		Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	270	42.937.694	0	0	270	42.937.694	0	0	0	-	0	-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			781.064.031		-		781.064.031	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Kendaraan Roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6	Unit	1	91.064.031	0	0	7	91.064.031	42,85714	86,7521448	3	79.000.000,00	4285,714	0,00	
		Jumlah alat-alat berat yang diadakan	Unit	1	550.000.000	0	0	1	550.000.000	0	0	0	-	0	-	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan bengkel alat- alat berat	Unit	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	-	0	-	
		Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium Kebinamargaan yang terpenuhi		0	0	0	0			0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeler kantor	Unit	4	20.000.000	0	0	4	20.000.000	75	97,3125	3	19.462.500,00	1875	0,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	2	20.000.000	0	0	2	20.000.000	150	125,175	3	25.035.000,00	7500	0,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan		260.644.000		214.030.985		260.644.000	0	0	0	214.030.985,00	0	-	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jenis ATK yang disediakan, jumlah makan minum harian pegawai	Jenis	4	187.854.000		179.932.100	4	187.854.000	100	147,761959	4	457.508.850,00	2500	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rekening	3	53.400.000	3	30.898.885	3	53.400.000	200	72,4446573	9	69.584.332,00	6666,667	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis	3	9.790.000	2	3.200.000	3	9.790.000	100	83,40143	5	11.365.000,00	3333,333	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Orang	2	9.600.000	0	0	2	9.600.000	400	100	8	9.600.000,00	20000	0,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	kegiatan		361.871.039		155.003.830		361.871.039	0	68,6267436	0	403.344.140,00	0	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Unit	17	29.783.570	10	9.001.580	15	29.783.570	100	198,631242	25	68.161.055,00	588,2353	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	16	71.600.000	23	95.609.250	20	71.600.000	100	248,45412	43	273.502.400,00	625	0,00	
		Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Unit	6	150.000.000	15	48.393.000	6	150.000.000	0	0	15	48.393.000,00	0	-	
		Jumlah Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Unit	4	100.000.000	0	0	4	100.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Unit	10	5.000.000	0	0	10	5.000.000	0	0	0	-	0	-	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Unit	1	987.469	0	0	1	987.469	100	1143,09259	1	11.287.685,00	10000	0,12	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	7	4.500.000	1	2.000.000	7	4.500.000	0	0	1	2.000.000,00	0	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Outcome : Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	100	42.289.228.409,85	100	50.379.384.785,65	100	45.999.978.410	100	27,5151639	100	63.036.354.256,65	100	149,06	
		Outcome : Terbangunnya saluran pengendali banjir dan saluran pembuang	Persen							0	0	0	-	0	-	
		Persentase Wilayah, Usaha, dan Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah yang berorientasi Kepada Aspek Konservasi	Dokumen							0	0	0	-	0	-	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								39.929.978.410	0	13,530014	0	5.402.531.676,00	0	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Penyusunan dokumen pemetaan/database sumber- sumber air tanah	Dokumen					1	30.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya bangunan perkuatan tebing	meter					535	10.106.720.000	100	33,0232499	535	3.337.567.400,00	0	-	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Air (1 Daerah Irigasi)	Unit						1	50.000.000	0	0	0	-	
	Pembangunan Kanal Banjir	Pembangunan Saluran pembuang Jl. Melati Kel. S.Binangae	m						400	500.000.000	0	0	0	-	
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Output : Terbangunnya prasarana pengaman pantai	Km						100	18.867.808.410	0	0	0	-	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Output : Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Km						6000	645.600.000	0	0	0	-	
	Peningkatan Kanal Banjir	Output: Terbangunnya sal. Pengendali banjir dan saluran pembuang	m						2342	6.234.850.000	100	31,1745395	2342	1.943.685.776,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	m						8574	2.775.000.000	100	0,4270991	8574	11.852.000,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Terlaksananya pemeliharaan kanal banjir	m						2100	690.000.000	100	14,8371739	2100	102.376.500,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan OP Partisipatif GP3A/P3A	Paket						1	30.000.000	100	23,5	1	7.050.000,00	
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									6.070.000.000	0	119,512979	0	7.254.437.795,00	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT PERANGKAT
				DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)							
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Terbangunnya Jaringan Irigasi	Bendung + Saluran					6,8	890.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi	Pembangunan Bendung/Irigasi Dusun Tokkene	Unit Bendung					1	150.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	m					1653	2.040.000.000	100,0605	92,6921885	1654	1.890.920.645,00	0	-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Irigasi	m					8768	2.840.000.000	0	167,309657	0	4.751.594.250,00	0	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	Paket					1	150.000.000	400	407,9486	4	611.922.900,00	0	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Gedung Negara yang terbangun dan terpelihara	Unit	27	2.599.495.092,00	25	6.166.313.315,00	25	15.700.000.000	100	116,978096	25	24.531.874.332,00	92,59259	943,72	
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Unit						15.700.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik	Unit					6	15.700.000.000	0	116,978096	0	18.365.561.017,00	0	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		67,96	52.948.548.135,00	67,96	98.659.814.412,51	67,96	83.221.568.135	100	24,1237406	67,96	118.735.969.599,84	100	224,25	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT PERANGKAT	
			DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021	RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentasee Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat								0	0	0	-	0	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								83.221.568.135	0	24,1237406	0	20.076.155.187,33	0	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rencana panjang jalan yang dibangun							450.000.000	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang survey kontur jalan dan jembatan	Km					17	50.000.000	100	605,7068	17	302.853.400,00	0	-	
	Pembangunan Jalan	Panjang akses jalan yang terbangun	Km					17	79.652.361.528	0	22,3179854	0	17.776.802.437,33	0	-	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang pemeliharaan jalan	Km					30	1.069.206.607	0	67,3318604	0	719.916.700,00	0	-	
	Pembangunan Jembatan	Jumlah akses jembatan yang terbangun	Unit					4	1.500.000.000	100	75,98801	4	1.139.820.150,00	0	-	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	panjang pemeliharaan jembatan	Km					30	500.000.000	0	27,3525	0	136.762.500,00	0	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang		1	410.903.280,00	1	675.503.600,00	1	410.903.280	1	393,021016	1	2.290.439.844,00	100	557,42	
		Penyusunan kebijakan dan pengendalian pemanfaatan ruang								0	0	0	-	0	-	
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota								338.465.061	0	464,89418	0	1.573.504.369,00	0	-	
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penyusunan KLHS, Materi Teknis dan PERDA RDTR Kec.Barru	Dokumen					1	338.465.061,00	100	464,89418	1	1.573.504.369,00	0	-	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN ANGGARAN 2021(%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								36.219.110	0	114,392306	0	41.431.875,00	0	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kec					7	36.219.110,00	100	114,392306	7	41.431.875,00	0	-	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								36.219.109,00	0	0	0	-	0	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah PERDA yang ditetapkan	Dokumen					1	36.219.109,00	0	0	0	-	0	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										60,20	122,31			98,52	391,74	
PREDIKAT KINERJA																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										60,20	122,31			98,52	391,74	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)		Target Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran renja SKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran SKPD tahun 2021 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra SKPD s/d 2021		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra SKPD s/d 2021 (%)		Unit Penggu ng jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.165.184.334		13.313.335.556		3.764.762.600				17.011.760.261			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.014.386.104		13.215.321.256		3.757.138.600				16.906.121.961			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			100	12.034.276.343	87,4	10.518.780.986	100	3.177.358.100	97,91	97,91	113,2582	13.629.801.191	113,26	113,25817	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	9.849.801.650	88	8.721.266.257	100	2.898.217.406	98,38	98,38	117,491	11.572.626.106	117,490956	117	
1	Gaji dan Tambahan Penghasilan			100	9.849.801.650	88	8.721.266.257	100	2.898.217.406	98,38	98,38	117	11.572.626.106	117	117	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	124.653.405	100	126.686.305	100	37.900.000	100	84,19	100,00	158.595.055	100	100	
1	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Org	100	96.253.405	65,31	62.859.555	4,65	4.480.000	96	96	70	67.139.555	69,75	69,75	
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 Org	100	28.400.000	215	63.826.750	100	33.420.000	131,06	83	322	91.455.500	322,03	322,03	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	606.413.485	100	498.651.526	16,61	40.237.500	100	100	89	538.857.724	89	89	
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	6 jenis	100	3.939.570	90	3.553.070	10	386.500	100	100	100	3.939.570	100	100	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	9 kali	100	602.473.915	76,50	495.098.456	6,61	39.851.000	100	99,92	89	534.918.154	89	89	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	157.057.970	97	151.738.800	0,00	-	0,00	0	97	151.738.800	97	97	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	25 unit	100	157.057.970	97	151.738.800	0	-	0	0	97	151.738.800	97	97	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	1.017.076.158	79	802.509.713	100	167.592.394	92	92	94	956.843.793	94	94	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	500 surat	100	758.985.640	81	617.153.440	17	125.652.400	100	100	98	742.805.840	98	98	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air	3 rek	100	181.290.518	70	127.756.273	18	32.339.994	59	59	81	146.837.953	81	81	
3	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor	24 OB	100	76.800.000	75	57.600.000	13	9.600.000	100	100	88	67.200.000	88	88	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	279.273.675	78	217.928.385	100	33.410.800	99,40	99,40	89,93	251.139.713	89,93	89,93	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	100	135.818.775	71	116.792.485	13	17.789.300	99	99	84	134.382.313	84	99	
2	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	432 buah	100	12.725.000	80	10.215.000	0	-	-	0	80	10.215.000	80	80	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	67 unit	100	66.405.000	75	43.555.000	16	10.400.000	100	100	91	53.955.000	91	81	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program (Output)		Target Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran renja SKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran SKPD tahun 2021 (%)		Realisasi kinerja dan anggaran renstra SKPD s/d 2021		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra SKPD s/d 2021 (%)		Unit Penggu ng jawab
		Uraian	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	2 unit	100	64.324.900	74	47.365.900	8	5.221.500	100	100	82	52.587.400	82	82	
Total Rata-Rata capaian kinerja										82	79	98		98	98	
Predikat kinerja										tinggi	tinggi	sgt tinggi		sgt tinggi	sgt tinggi	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			100	3.980.109.761	67,7504	2.696.540.270	100	579.780.500	100	100	82,32	3.276.320.770	82,32	82,32	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	1.084.909.190	40	438.983.010	100	7.613.500	100	100	41	446.596.510	41	41	
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya Bahan Pustaka Siap Layan		100	1.084.909.190	40	438.983.010	100	7.613.500	100	100	41	446.596.510	41	41	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			100	2.895.200.571	77,98	2.257.557.260	100	572.167.000	100	100	98	2.829.724.260	98	98	
6	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kegiatan Yang Mendukung Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	3 Jenis	100	2.895.200.571	77,98	2.257.557.260	100	572.167.000	100	100	98	2.829.724.260	98	98	
Total Rata-Rata capaian kinerja										100	100	69		70	69	
Predikat kinerja										sgt tinggi	sgt tinggi	sedang		sedang	sedang	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				150.798.230		98.014.300		7.624.000				105.638.300			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			100	150.798.230	64,997	98.014.300	100	7.624.000	100	100	70,05	105.638.300	70,05	70,05	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			100	35.582.700	88,72	31.570.000	11,57	4.118.000	100	100	100,29	35.688.000	100,29	100,30	
3	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Dokumen Data yang di kumpulkan	2 Jenis	100	35.582.700	88,72	31.570.000	11,57	4.118.000	100	100	100,29	35.688.000	100,29	100,30	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota			100	115.215.530	58	66.444.300	100,00	3.506.000	100	100	61	69.950.300	61	61	
1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Peserta Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan	70 Org	100	115.215.530	58	66.444.300	100,00	3.506.000	100	100	61	69.950.300	61	61	
Total Rata-Rata capaian kinerja										100	100	81		81	81	
Predikat kinerja										sgt tinggi	sgt tinggi	tinggi		tinggi	tinggi	
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program										94	93	83		83	83	
predikat kinerja dari seluruh program										sgt tinggi	sgt tinggi	tinggi		tinggi	tinggi	
Faktor pendukung keberhasilan kinerja : Ketersediaan dana tepat waktu, PNS dan Non PNS menjalankan Tupoksi dengan baik																
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : anggaran dirasakan masih minim,proses administrasi pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Masih perlunya tambahan anggaran dibeberapa program dan kegiatan dan pengisian jumlah jabatan staf yang masih banyak kosong																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : Masih perlunya tambahan anggaran dibeberapa program dan kegiatan dan pengisian jumlah jabatan staf yang masih banyak kosong																

DINAS PERTANIAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	433.253.731	100	405.693.721	100	384.371.643	100	45,97772058	200	582.419.041	200	134,4290884	
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100												
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100												
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang terselesaikan Tepat Waktu	%	100												
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data yang tersedia Perencanaan, Evaluasi Kinerja , Data Komoditi Pertanian yang tersedia	Jenis/Bulan	12	41.567.500	12	39.894.500	12	80.478.000	100	99,63033376	24	120.075.000	200	288,8675047	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur														
1.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	2	10.934.190	2	22.405.000	5	16.500.000	100	100	7	38.905.000	350	355,8105356	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
1.3	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	Jenis	50	3.500.000	0	0	1	4.250.000	100	35,29411765	1	1.500.000	2	42,85714286	
1.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	0	0	0	0	11	1.358.325	100	100	11	1.358.325	0	0	
1.5	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah yang dihadiri	OK	12	150.000.000	196	208.820.632	231	134.306.000	100	98,48903995	426,75	341.097.322	3556,25	227,3982147	
			OH	110												

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi														
1.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit/Jenis	4	20.000.000	4	9.062.800	0	0	0	0	4	9.062.800	100	45,314	
1.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dan Meubeleu	Unit	4	40.000.000	0	0	5	35.285.000	100	100	5	35.285.000	125	88,2125	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi														
1.8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis ATK Jumlah Pegawai yang terpenuhi Makan dan Minum Harian Jumlah surat keluar Jumlah Tenaga Honor yang dibayarkan	Surat	1.000	67.388.530	1.000	63.760.100	1.000	63.095.900	100	99,98193227	2000	126.844.600	200	188,2287683	
1.9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Bulan	12	30.000.000	12	15.677.689	12	18.978.918	100	85,08430249	24	31.825.769	200	106,0858967	
1.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan	Orang	3	14.400.000	3	14.400.000	3	14.400.000	100	100	6	28.800.000	200	200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi														
1.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Unit	12	33.600.000	0	0	17	8.325.000	100	85,22522523	17	7.095.000	141,6667	21,11607143	
1.12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	Unit	17	10.500.000	27	19.360.000	9	3.250.000	100	94,78196923	36	22.440.414	211,7647	213,7182286	
1.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengecatan gesung dan pagar, penataan taman, perbaikan instalasi air, telepon dan listrik	Unit	1	7.363.511	8	10.613.000	2	1.579.500	100	79,61380184	10	11.870.500	1000	161,2070655	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		REALISASI KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT
				PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	4	4.000.000	10	1.700.000	6	2.565.000	100	35,28265107	16	2.605.000	400	65,125	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										92,85	79,53	184,84	55.626.052,14	477,62	143,14	
PREDIKAT KINERJA																
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	100	442.600.000	100	872.784.800	100	1.782.208.600	100	96,86813874	200	2.599.177.099	200	587,2519429	Dinas Pertanian
		Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ekor	3.516.677	Ternak	4.144.373		3.516.677								
			Ton	646,39	Daging	580,90		646,39								
			Kg	2.939,07	Telur	3.355.935		2.939,07								
			Ton	15.515	Horti	19.929		15.515								
			Ton	3.815	Kebun	3.122		3.815								
			Ton	332	Benih	37.033		22,05								
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kab/ kota															
2.1	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Ternak yang mendapatkan Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	750	200.000.000	750	103.036.000	750	141.500.500	100	100	1500	244.536.500	200	122,26825	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak/ Serta Pakan dalam Daerah														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		REALISASI KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT	
			PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)	RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI	DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)	ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021	DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2.2	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah benih padi bersertifikat Jumlah bibit/ benih unggul hortikultura yang tersedia Jumlah bibit unggul Hortikultura dan Perkebunan Jumlah KK miskin difasilitasi bibit hortikultura dan perkebunan	Pohon	15.855	45.000.000	2.300	95.647.800	966	409.835.600	98,3436853	92,85583048	3250	476.204.050	20,49827	1058,231222	
			Ton					332								
			Sasset					19								
			Kg					1.000								
			KK					200								
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota														
2.3	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peredaran HPT, bahan pakan/pakan	Klp	1	10.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota														
2.4	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kab/Kota lain	Jumlah Kelompok Penerima Non Rumanisia Jumlah Kelompok Penerima Rumanisia	Kelompok	3	152.000.000	4	655.912.000	7	1.209.604.500	100	97,25855848	11	1.832.355.900	366,6667	1205,497303	
2.5	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Luas Penanaman Hijauan Makanan Ternak	Ha	3	35.100.000	2	18.189.000	2	21.268.000	100	100	4	39.457.000	133,3333	112,4131054	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										138,24	120,36	1.033,17	1.049.992.320,30	359,62	658,79	
PREDIKAT KINERJA																
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRSARANA PERTANIAN	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	100	3.423.480.500	100	1.510.263.942	100	5.331.668.174	100	83,13586904	200	5.942.792.613	200	173,5892059	Dinas Pertanian
		Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan														

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas tanam padi dan palawija Pelaksanaan Musyawarah Mappalili Tingkat Kabupaten	Ha	31.639 Ha	337.456.000	30.717	283.233.500	31.639	112.386.000	100	98,34672468	62356	393.761.450	#VALUE!	116,6852716	
		Luas Tambah Tanam	Ha	1.000				1.000								
3.2	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah kawasan Agro Tekno Park yang terbentuk	Kawasan	1	1.080.024.500	1	342.190.442	1	264.971.172	90	78,33399325	1,9	549.752.942	190	50,90189547	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persen													
3.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yang dibangun	Unit	11	1.990.000.000		884.840.000	7	2.040.260.000	100	85,19012283	7	2.622.940.000	63,63636	131,8060302	
3.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang dibangun	Unit	5	0			4	517.980.000	100	76,16896405	4	394.540.000	80	#DIV/0!	
3.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani	Meter	1.000	0			700	836.533.355	100	72,03748319	700	602.617.575	70	#DIV/0!	
3.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	11	0			3	394.980.000	100	68,41865411	3	270.240.000	27,27273	#DIV/0!	
3.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah ternak yang dipotong dalam RPH	Ekor	240	16.000.000	0	0	240	12.411.500	100	98,52556097	240	12.228.500	100	76,428125	
3.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pemenuhan Sarana dan Prasarana BPP	BPP	7	0	0	0	7	1.152.146.147	100	95,18863113	7	1.096.712.146	100	#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										98,75	84,03	7.914,86	742.849.076,63	#VALUE!	#DIV/0!	
PREDIKAT KINERJA																
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100	491.300.000	100	182.550.775	100	493.605.800	100	97,37715805	200	663210075	200	134,9908559	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN	SATUAN													
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota														
4.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Layanan Respon Pencegahan Penyakit Menular pada Ternak	Dosis	30.000	240.000.000	30.000	100.970.000	30.000	243.054.250	100	100	60000	344.024.250	200	143,3434375	
		Pemeriksaan Ternak Secara Rutin	Daerah	1		1		1								
		Jumlah penyakit zoonosis yang ditangani	Penyakit	4		4		4								
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan														
4.2	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pertemuan KIE (Komunikasi. Informasi dan Edukasi) Hewan Menular	Kali	4	15.000.000	4	522.800	4	12.897.000	0	0	4	522.800	100	3,485333333	
4.3	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Informasi Produksi Peternakan	Dokumen	1	12.000.000	1	5.400.000	1	38.200.000	100	100	2	43.600.500	200	363,3375	
		Jumlah Lokasi Pengawasan Ternak Antar Daerah	Kec	7		7		7								
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner														
4.4	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pusat Kesehatan Hewan yang diberdayakan	Unit	1	100.000.000	1	55.617.475	1	87.308.750	100	100	2	142.926.225	200	142,926225	
4.5	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah petugas paramedik veteriner yang diberdayakan Jumlah ternak yang ditangani mengalami gangguan reproduksi	Orang	20	28.300.000	20	13.537.500	20	28.250.000	100	100	40	41.787.500	200	147,6590106	
			Ekor	350		350		350								

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN	SATUAN													
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner														
4.6	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengambilan dan pemeriksaan sampel BAH/HBAH	Sampel	100	21.000.000	0	0	50	13.292.000	100	100	50	13.292.000	50	63,2952381	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Cakupan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan														
4.7	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah dokumen pendataan masalah peternakan Jumlah Peserta Bimtek Petugas PELSA	Dokumen	1	75.000.000	1	6.503.000	1	70.603.800	100	99,92918228	2	77.056.800	200	102,7424	
			Orang	30		30		30								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										85,71	85,70	8.585,71	94.744.296,43	164,29	138,11	
PREDIKAT KINERJA																
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	156.799.800	100	294.839.000	100	84.780.100	7	25,63691244	107	316574000	107	201,8969412	Dinas Pertanian
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota														
5.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT hortikultura Jumlah Gerakan Pengendalian OPT Perkebunan Jumlah gerakan pengendalian OPT tanaman pangan	Kali	21	156.799.800	21	220.079.880	7	84.780.100	100	97,73059952	28	302.935.980	133,3333	193,1992133	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	97,73	28,00	302.935.980,00	133,33	193,20	
PREDIKAT KINERJA																
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	%	100	10.000.000	0	4.965.500	100	9.409.000	100	55,79764056	100	10215500	100	102,155	Dinas Pertanian
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Cakupan Izin Usaha Pengecer	Kali													
6.1	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Pengawasan Depo Obat Hewan dan Penggunaan Antibiotik/ Hormon oleh Petugas	Kali	28	10.000.000	28	4.965.500	28	9.409.000	100	100	56	14.374.500	200	143,745	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	100,00	56,00	14.374.500,00	200,00	143,75	
PREDIKAT KINERJA																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		REALISASI KINERJA DAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA		UNIT
				PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Jumlah Pelaksanaan Program Penyuluhan	40 KT, 60 Orang	100	316.337.775	100	133.122.790	100	381.673.000	100	33,33413681	200	260.350.190	200	82,30132807	Dinas Pertanian
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 Jenis/Kegi atan													
7.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah dokumen programa penyuluhan Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan ketenagaan	Dokumen	63	210.358.275	63	97.044.500	63	239.792.000	100	98,35499099	126	332.891.900	200	158,2499666	
			Orang	60		60		60								
7.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta pelatihan usaha agribisnis Pembinaan Kelompok Pemuda (Pelatihan Usaha Tani) Jumlah Kelompok Tani Berprestasi Jumlah Dokumen Rembug KTNA	Orang	90	105.979.500	90	36.078.290	90	70.131.000	100	98,17969229	180	104.932.690	200	99,01225237	
			Kelompok	1		1		1								
			Kelompok	11		11		11								
			Dokumen	8		8		8								
7.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang terpenuhi Operasionalnya	BPP	7	0	0	0	7	71.750.000	100	100	7	71.750.000	100	#DIV/0!	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100,00	98,84	104,33	169.858.196,67	166,67	#DIV/0!	
PREDIKAT KINERJA																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :									#REF!							
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase Rumah Tangga Yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	%	100	14.020.000.000	-	-	100	847.117.500	100%	91%	100	767.387.000	100%	5%	DPKP
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya sistem penyediaan air minum	%	100	14.020.000.000	-	-	100	847.117.500	100%	91%	100	767.387.000	100%	5%	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Dokumen RISPAM	Dok	1	1.400.000.000	-	-	1	652.600.000	100%	89%	1	579.887.000	100%	41%	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh sarana dan prasarana air minum	RT	3332	12.620.000.000	-	-	1092	194.517.500	100%	96%	1.092	187.500.000	33%	1%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase Rumah Tangga Yang memperoleh sarana dan prasarana air Limbah	%	100	14.869.400.000	100	-	100	1.698.273.500	100%	95%	100	1.619.891.600	100%	11%	DPKP
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	100	14.869.400.000	100	-	100	1.698.273.500	100%	95%	100	1.619.891.600	100%	11%	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	RT	2116	14.719.400.000	-	-	1050	1.595.115.000	96%	98%	1.013	1.556.163.100	48%	11%	
	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana air Limbah	Unit	1	150.000.000	-	-	1	103.158.500	100%	62%	1	63.728.500	100%	42%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kebutuhan administrasi yang terpenuhi	%	100	2.932.359.085	100	2.519.518.857	100	2.654.892.005	100%	98%	100	5.109.680.090	100%	174%	DPKP

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	-	100	2.095.249.076	100	2.104.619.649	100%	111%	100	4.441.606.271	100%	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang				2.095.249.076	23	2.104.619.649	100%	111%	23	4.441.606.271	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sumber daya dan kapasitas SDM Aparatur	Oarang		140.363.910		32.438.750	8	31.476.000	75%	98%	6	63.284.150	0	45%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta diklat formal	Orang	30	140.363.910	8	32.438.750	8	31.476.000	100%	98%	16	63.284.150	53%	45%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan admimistrasi umum perangkat daerah	Kegiatan		1.759.990.220		184.880.981	4	147.155.700	75%	76%	3	296.544.369	0	17%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	13	124.330.000	4	2.317.131	4	11.030.000	0%	0%	4	2.317.131	31%	2%	
		Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	206	273.432.224	67	-	67	22.899.600	0%	0%	67	-	33%	0%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Buah	138	26.937.973	25	2.034.850	25	5.079.900	0%	100%	25	7.114.750	18%	26%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis					2	7.175.000	50%	100%	1	7.175.000	0	0	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum tamu	OH					1000	4.831.200	32%	80%	324	3.859.200	0	0	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kali	814	96.035.000	171	16.155.000	171	20.400.000	27%	100%	217	36.555.000	27%	38%	
		Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Kali	1431	1.239.255.023	291	164.374.000	291	75.740.000	75%	99%	510	239.523.288	36%	19%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan		664.634.685		124.665.050	3	125.024.306	100%	61%	3	200.840.300	0	30%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Makanan dan Minum	OH		353.469.785		64.498.550	350	6.076.000	31%	75%	108	69.054.550	0	20%	
		Honorarium Pegawai Tidak tetap	OB					120	30.000.000	96%	92%	115	27.500.000	0	0	
		Tersedianya ATK	Jenis					43	16.347.250	81%	92%	35	14.985.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rek.	23	277.964.900	6	50.566.500	6	63.001.056	100%	32%	12	70.900.750	52%	26%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran jasa kebersihan kantor	OB	84	33.200.000	24	9.600.000	24	9.600.000	67%	92%	40	18.400.000	48%	55%	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kegiatan		367.370.270		82.285.000	4	246.616.350	25%	10%	1	107.405.000	0	29%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	24	72.000.000	6	12.210.000	8	15.130.000	100%	100%	14	27.340.000	58%	38%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Unit	119	270.735.270	30	67.750.000	2	5.000.000	0%	0%	30	67.750.000	25%	25%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	Unit	28	-	-	-	28	222.136.350	4%	3%	1	5.640.000	4%	0	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Unit	38	13.960.000	25	1.375.000	30	2.250.000	100%	100%	55	3.625.000	145%	26%	
		Jumlah Perbaikan peralatan kerja	Unit	40	10.675.000	10	950.000	10	2.100.000	100%	100%	20	3.050.000	50%	29%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah bantuan perumahan layak huni Untuk korban bencana dan relokasi karna pembangunan	Unit	25	1.020.000.000	15	74.315.000	0	-	0	0	15	74.315.000	60%	7%	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	Unit	25	1.020.000.000	15	74.315.000	0	-	0	0	15	74.315.000	60%	7%	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana	Unit	25	1.020.000.000	15	74.315.000	0	-	0	0	15	74.315.000	60%	7%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dipedesaan dan jumlah bantuan RTLH	%	100	-		-	100	-	0%	0	-	-	0%	0	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Kegiatan		-		-	2	-	0	0	-	-	0	0	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Cakupan akses air bersih dan sanitasi yang telah dibangun	RT		-		-	243	-	0	0	-	-	0	0	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah sarana infrastruktur permukiman yang terbangun	Jenis	49		10		10		100%		20		41%		
		Panjang sarana drainase Perkotaan dan Perdesaan yang terbangun	%	100	25.212.065.450	100	2.182.205.638	50	10.047.044.565	100%	75%	150	9.673.311.678	150%	38%	
		Persentase Pembangunan Penerangan Jalan	%	100		100		14		100%		114		114%		

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Areal Pemakaman Umum yang tertata	Lokasi	188		38		40		100%		78		41%		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jenis		25.212.065.450		2.182.205.638	6	10.047.044.565	100%	75%	6	9.673.311.678	#DIV/0!	38%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lampu penerangan jalan yang terpasang	Titik	8082	15.464.659.250	300	459.030.000	2500	711.858.500	0%	0%	300	459.030.000	4%	3%	
		Jumlah Penerangan Jalan yang terpelihara	Titik	1150	370.677.410	200	457.465.000	450	261.772.000	0%	79%	200	663.962.050	17%	179%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman	Unit	12	1.815.099.400	-	-	2	278.953.500	0%	3%	-	7.093.000	0%	0%	
		Jumlah Taman Yang terbangun	Taman	-	-	-	-	1	-	0%	0	-	-	0	0	
		Jumlah Taman yang terpelihara	Taman	2	400.000.000	1	40.719.152	4	34.835.500	100%	100%	5	75.469.152	250%	19%	
		Panjang Drainase dan Gorong-gorong terbangun	Meter	12,26	5.161.629.390	6,7	112.400.000	2567	939.260.531	0%	0%	7	112.400.000	55%	2%	
		Panjang jalan lingkungan yang terbangun	Km	2400	2.000.000.000	1200	1.112.591.486	2,5	980.839.508	0%	0%	1.200	1.112.591.486	50%	56%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase tanah yang dibebaskan untuk kepentingan pemerintah	%	100	9.863.132.100		3.351.995.814	100	5.928.900	0%	79%	0	3.356.687.214	0%	34%	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota	%	100	9.863.132.100		3.351.995.814	100	5.928.900	0%	79%	-	3.356.687.214	0%	34%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi tanah yang dibebaskan	Lokasi	10	9.863.132.100	4	3.351.995.814	2	5.928.900	0%	79%	4	3.356.687.214	40%	34%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I (TRIWULAN I + TRIWULAN II) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Uraian	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah ke TPA	%	100	23.302.526.520	100	7.014.415.900	100	4.309.761.000	0%	39%	100	8.709.682.100	100%	37%	
	Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya pengelolaan sampah	%	100	23.302.526.520	100	7.014.415.900	100	4.309.761.000	50%	90%	150	10.908.344.550	150%	47%	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah petugas kebersihan	Orang	438	5.983.400.000	219	2.991.700.000	219	2.991.700.000	100%	100%	438	5.983.400.000	100%	100%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jenis	53	16.785.466.950	11	3.989.056.900	11	1.307.061.000	45%	69%	16	4.884.785.550	30%	29%	
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	Unit	1420	533.659.570	845	33.659.000	6	11.000.000	67%	59%	849	40.159.000	60%	8%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya *) :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya *) :																

DINAS PMD PPKB PPPA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
		URAIAN	SATUAN	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1.	Belanja Gaji dan tunjangan	Belanja Gaji dan Tunjangan	Bulan	60	10.160.216.040	24	2.046.795.234	12	2.032.043.208	100,00	85,75	36	3.789.253.861	60,00	37,30	SEKRETARIAT	
										100	85,75						
										Sangat Tinggi	Tinggi						
									2.032.043.208								
	BELANJA LANGSUNG																
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
	SOSIAL																
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KELUARGA	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis keluarga	persen	100	99.249.300	100	99.249.300										TDK TERMUAT DI DPA
1.1	Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah jenis Alat Kontra Sepsu	Jenis	148	99.249.300	12	99.249.300										TDK TERMUAT DI DPA
										-	-						
2.	Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Cakupan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	persen	100	836.689.715	100	34.382.200	100	243.366.000	50,00	14,17		68.859.700	-	8,23		
2.1	Percepatan implementasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK-PAKET)	jumlah binaan kelompok Masyarakat penerima bantuan PIK-Paket	Kelompok	59	836.689.715	59	34.382.200	59	243.366.000	67,80	14,17	59	68.859.700	100,00	8,23	BIDANG PMD	
		jumlah kelompok yang difasilitasi dalam penaggulangan kemiskinan	Kelompok	28	-	7	-	7	-	-	-					BIDANG PMD	
										67,80	14,17						
										Sedang	Sangat Rendah						
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
3.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	46	558.526.662	11	-	8	109.456.000	60,00	60,58		111.738.912				
3.1	Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Keg Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	Klp	12	111.208.212	0	-	2	12.651.600	-	-	-	-			BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
3.2	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	Kegiatan	2	63.535.000	2	-	2	11.111.000	100	89,47	4	9.941.500	200,00	15,65	BIDANG PP DAN PA	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
3.3	Penyusunan Propil perlindungan perempuan dan Anak	Jumlah Buku Profil gender yang dibuat	Buku				-		-		-		-		-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
3.4	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	orang	10	383.783.450	10	45.431.000	10	85.693.400	100	65,78	10	101.797.412	100	26,52	BIDANG PP DAN PA	
										66,67	51,75						
										Sedang	Rendah						
4.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemb.	Jumlah Perempuan yang telah memahami Kesetaraan Gender yang mendapatkan keterampilan	Orang	3720	527.316.875	620	47.508.000	620	59.891.000	50	50,17	930	77.555.000	25	14,71		
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Pelatihan Kesetaraan Gender	Kegiatan	12	185.558.150	2	43.548.000	2	26.049.000	100	99,77	4	69.537.000	33,33	37,47	BIDANG PP DAN PA	
4.2	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah masyarakat yang berperan pada P2WKSS	Kegiatan	5	341.758.725	1	3.960.000	1	33.842.000	12	11,99	1	8.018.000	22,40	2,35	BIDANG PP DAN PA	
4.3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
4.4	Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Perempuan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pendidikan politik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
4.5	Pelatihan Kepribadian dan Publik Speaking	Jumlah Pelatihan Kepribadian dan Publik Speaking				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
										56,00	55,88						
										Rendah	Rendah						
5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah Anak yang terlibat dalam forum anak dan berprestasi	Orang	4	324.470.097	4	43.047.157	4	94.883.600	100	95,02	8	133.209.957	200,00	41,05		
5.1	Pengembangan kelembagaan Anak	Jumlah Kegiatan Hari Anak Nasional dan kreatifitas forum anak	Kegiatan	6	324.470.097	6	43.047.157	6	94.883.600	100	95,02	12	133.209.957	200,00	41,05	BIDANG PP DAN PA	
										100,00	95,02						
										Sangat tinggi	Sangat tinggi						
6.	Program Peningkatan Kesejahteraan Kebijakan dan Perlindungan Anak	Jumlah P2TP2A Aktif yang dibina	Lembaga	1	224.460.209	1	-	1	38.563.000	100	99,06	2	38.201.000	200,00	17,02	BIDANG PP DAN PA	
6.1	Fasilitasi pengembangan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A)	- Jumlah Kelengkapan dan Prasarana P2TP2A memenuhi Standar pelayanan	Jenis	24	224.460.209	4	-	4	38.563.000	100	99,06	8	38.201.000	33,33	17,02	BIDANG PP DAN PA	
6.2	Penyebarluasan Informasi tentang Peranan dan Perlindungan terhadap Gender dan Anak	Jumlah Informasi P2TP2A yang dilakukan														BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
6.3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan anak	Jumlah Lembaga yang terlibat														BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
										100,00	99,06						
										Sangat tinggi	Sangat tinggi						
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
7.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Kebutuhan Adimistrasi yang terpenuhi	Persen	100	1.376.316.913	100	196.864.758	100	233.964.800	100	89,35	100	405.923.462	100,00	29,49		
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK	Surat	3.750	335.874.770	750	48.576.650	750	63.608.800	100	100,00	1.500	112.185.450	40,00	33,40	SEKRETARIAT	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Telpn	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rekening	3	141.700.000	3	9.599.548	3	22.200.000	100	38,36	6	18.116.240	200,00	12,78	SEKRETARIAT	
7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional	Unit	11	51.750.000	11	5.950.000	11	12.650.000	100	48,56	22	12.092.812	200,00	23,37	SEKRETARIAT	
7.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor	OK	1	42.100.000	1	9.600.000	1	9.600.000	100	100,00	2	19.200.000	200,00	45,61	SEKRETARIAT	
7.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Unit	14	41.700.000	14	1.450.000	14	1.450.000	100	100,00	28	2.900.000	200,00	6,95	SEKRETARIAT	
7.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Buah	50	13.990.000	10	700.000	10	3.000.000	100	69,23	20	2.776.900	40,00	19,85	SEKRETARIAT	
7.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Buah	60	8.626.750	12	942.250	12	485.000	100	100,00	24	1.427.250	40,00	16,54	SEKRETARIAT	
7.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jenis	4	3.000.000	-	-	-	-		-		-			SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
7.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dan Provinsi	Kali	375	641.911.393	75	104.991.310	75	105.154.000	100	98,53	150	208.597.810	40,00	32,50	SEKRETARIAT	
7.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Kali	1.250	95.664.000	250	15.055.000	250	15.817.000	100	85,81	500	28.627.000	40,00	29,92	SEKRETARIAT	
										100	82,28						
										Sangat tinggi	Tinggi						
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi	Persen	100	465.663.600	100	40.364.000	100	80.210.000	100	85,40	100	108.864.422		23,38		
8.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1	91.735.000	1	10.000.000	1	7.020.000	100	100,00	2	17.020.000	200,00	18,55	SEKRETARIAT	
8.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	24	149.303.600	4	8.299.000	4	21.000.000	100	97,42	8	28.758.000	33,33	19,26	SEKRETARIAT	
8.3	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Mebeuler Kantor	Buah	156	35.550.000	93	5.950.000	93	12.500.000	100	100	186	18.450.000	119,23	51,90	SEKRETARIAT	
8.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	12	68.250.000	2	6.250.000	2	7.800.000	100	100	4	14.050.000	33,33	20,59	SEKRETARIAT	
8.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	6	97.100.000	1	9.065.000	1	30.000.000	100	63	2	27.896.422	33,33	28,73	SEKRETARIAT	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
8.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kali	24	14.000.000	4	200.000	4	600.000	100	100	8	800.000	33,33	5,71	SEKRETARIAT	
8.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubleir	Jumlah Meubeler yang dipelihara	Buah	258	9.725.000	43	600.000	43	1.290.000	100	100	86	1.890.000	33,33	19,43	SEKRETARIAT	
										100,00	94,31						
										Sangat tinggi	Sangat tinggi						
9.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Cakupan kebutuhan kompetensi Spesifik urusan dan non urusan yang terpenuhi sumber daya aparaturnya	Persen	100	179.028.270	100	47.794.756	100	34.587.000	100	69,35		71.779.756		40,09		
9.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat Fungsional dan struktural	Orang	18	97.020.300	3	40.717.806	3	18.529.000	100	98	6	58.869.806	33,33	60,68	SEKRETARIAT	
9.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	4.750.000		-				-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
9.4	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman aparat mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan	Orang	17	77.257.970	3	7.076.950	3	16.058.000	33	36	4	12.909.950	23,53	16,71	SEKRETARIAT	
										66,67	67,14						
										Sedang	Sedang						
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Kebutuhan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Terselenggarakan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	100	39.894.000	100	3.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
10.1	Penyusunan laporan, Capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP dan PK SKPD	Dokumen	2	4.465.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
10.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	10	4.465.000	2	465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
10.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2	4.465.000	1	465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
10.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Program	13	22.034.000	13	2.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
10.5	Penyusun RKA dan DPA	jumlah dokumen Penyusun RKA dan DPA	Dokumen	10	446.500	2	465.000	0	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	TDK TERMUAT DI DPA
										-	-						
										-	-						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
11.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	cakupan desa/ kel yang mengalami peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	3.302.765.595	100	338.275.200	100	504.208.200	100	75,51		718.994.820		21,77		
11.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan	jumlah desa/ kel yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaannya	desa/ kel	55	1.298.117.604	55	35.229.900	55	54.824.000	100	54,84	55	65.295.900	100,00	5,03	BIDANG PMD	
11.2	Pembinaan, Pelatihan dan Pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK	jumlah desa/kel dan kec yang mendapatkan Pembinaan; jumlah pelaksanaan HKG	desa/ kel, Kec, Kali	55	1.243.062.091	55	202.630.900	55	258.614.700	100	83,48	55	418.516.320	100,00	33,67	BIDANG PP DAN PA	
11.3	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Dasawisma	jumlah desa/kel yang mendapatkan pembinaan pemberdayaan perempuan dan kelompok dasawisma	desa/ kel	55	761.585.900	55	100.414.400	55	190.769.500	100	70,64	55	235.182.600	100,00	30,88	BIDANG PP DAN PA	
										100,00	69,65						
										Sangat tinggi	Sedang						
12.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	cakupan desa/ kel yang mendapatkan pembinaan kelembagaan ekonomi	Persen	100	572.461.181	100	99.813.000	100	77.773.000	100,00	93,00		172.144.086		30,07		
12.3	Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES	jumlah desa yang mendapatkan pembinaan pengembangan BUMDES	Orang	40	312.906.681	40	55.688.500	40	42.055.500	100	93,72	40	95.102.086	100,00	30,39	BIDANG PMD	
12.1	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	jumlah desa/ kel yang masyarakatnya mendapatkan keterampilan usaha	desa/ kel	12	184.186.000	2	29.083.000	2	27.092.000	100	89,85	4	53.425.000	33,33	29,01	BIDANG PMD	
12.2	fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan pasar desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan pasar desa	Desa	14	75.368.500	14	15.041.500	2	8.625.500	100	99,42	16	23.617.000	114,29	31,34	BIDANG PMD	
										100,00	94,33						
										Sangat tinggi	Sangat tinggi						
13.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	cakupan desa/kel yang memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan	desa/ kel	55	551.004.795	55	66.758.300	55	68.814.500	100	74,81		118.240.300		21,46		
13.1	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan	jumlah desa/ kel di 7 kec yang mendapatkan fasilitasi musrembang	desa/ kel	55	350.433.095	55	52.492.600	55	61.185.000	100	79,06	55	100.865.100	100,00	28,78	BIDANG PMD	
13.2	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah desa dan kelurahan yang mendapat Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel	desa/ kel	55	200.571.700	55	14.265.700	55	7.629.500	73	40,76	55	17.375.200	100,00	8,66	BIDANG PMD	
										86,36	59,91						
										Tinggi	Rendah						
14.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	cakupan desa/ kel yang meningkat dalam pengelolaan pemerintahan desa/ kel	Persen	100	2.317.948.489	100	841.162.860	100	133.400.441	100	81,68		180.950.258		7,81		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
14.4	Pemilihan Kades		Desa	40	1.223.858.500	12	754.186.600	-									TDK TERMUAT DI DPA
14.5	Penyusunan kerangka Regulasi Pemerintah Desa dan LKD/LKK		Regulasi	17	97.279.000	3	-	5	18.422.000	100	81,38	8	14.992.000	47,06	15,41	BIDANG PEMDES	
14.6	Pembentukan BPD		Desa	40	70.928.800	28											TDK TERMUAT DI DPA
14.7	Penyusunan, pendayagunaan dan pembinaan Profil Desa dan Kelurahan	jumlah desa / kelurahan yang mendapatkan pembinaan profil desa/ kel	Desa/ Kel	55	306.765.000	55	24.726.000	55	23.023.500	100	96,17	55	46.867.000	100,00	15,28	BIDANG PEMDES	
14.1	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	jumlah desa /kelurahan yang mendapatkan penilaian evaluasi perkembangan	Desa/ Kel	55	619.117.189	55	62.250.260	55	91.954.941	100	78,12	55	134.083.258	100,00	21,66	BIDANG PEMDES	
										100,00	85,22						
										Sangat tinggi	Tinggi						
15.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan adimistrasi desa	Persetase seluruh desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan adimistrasi desa	Persen	100	1.393.156.839	100	440.307.840	100	180.604.600	100	87,83		598.926.440		42,99		
15.1	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan Alokasi dana desa	Desa	40	474.297.329	40	222.169.900	40	51.324.500	100	85,09	40	265.843.900	100,00	56,05	BIDANG PEMDES	
15.5	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Dana Desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	Desa	40	494.381.910	40	169.629.000	40	78.687.000	100	87,64	40	238.591.000	100,00	48,26	BIDANG PEMDES	
15.2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa	Desa	40	138.088.200	40	16.114.400	40	10.953.000	100	100,00	40	27.067.400	100,00	19,60	BIDANG PEMDES	
15.3	Fasilitasi kerjasama desa	jumlah desa yang difasilitasi dalam kerjasama desa	Desa	40	104.321.200	40	5.298.600	40	21.733.300	100	82,93	40	23.321.400	100,00	22,36	BIDANG PEMDES	
15.4	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	jumlah desa yang mendapatkan pelatihan dan fasilitasi aparatur dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Desa	40	182.068.200	40	27.095.940	40	17.906.800	100	94,97	40	44.102.740	100,00	24,22	BIDANG PEMDES	
										100,00	90,13						
										Sangat tinggi	Tinggi						
16.	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru	cakupan desa/ kel yang menerapkan TTG	Persen	100	478.402.059	100	85.145.100	100	83.292.000	100	93,45		162.980.900		34,07		
16.1	Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Pedesaan	jumlah desa/ kel yang menerapkan teknologi tepat guna	Unit	55	254.913.180	45	43.752.000	45	28.768.000	100	81,67	45	67.247.000	81,82	26,38	BIDANG PMD	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
16.2	Pelaksanaan Gelar TTG Nasional, Pekan Inovasi Desa, dan Pameran Potensi Desa	jumlah partisipasi kab pada ivent nasional	Kegiatan	3	223.488.879	3	41.393.100	3	54.524.000	100	99,66	6	95.733.900	200,00	42,84	BIDANG PMD	
										100,00	90,67						
										Sangat tinggi	Tinggi						
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
17.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah PUS yang terdaftar menjadi Peserta KB Aktif	Orang	3000	18.845.867.257	3000	1.776.346.600	3000	3.204.699.300	0	88,54		4.613.880.968		24,48		
17.1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah jenis Alat Kontra Seps		-	127.148.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
17.2	Promosi Pelayanan Khiba	Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam pelayanan Khiba	Kecamatan	7	115.223.000	7	-	7	28.821.500	100	99,68	7	28.730.000	100,00	24,93	BIDANG KB DAN KS	
17.3	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan hari keluarga (provinsi dan Pusat)	Orang	100	816.803.200	100	78.499.600	100	148.396.000	100	99,43	100	226.050.168	100,00	27,67	BIDANG KB DAN KS	
17.4	Pengadaan Insentif Operasional PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB Gaya Baru	Jumlah Wkt terbayarkan insentif PPKBD dan Sub PPKBD dan PKB Gaya Baru	Triwulan	4	3.271.048.000	4	455.640.000	4	655.920.000	100	100,00	8	1.111.560.000	200,00	33,98	BIDANG KB DAN KS	
17.5	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi (DAK)	Jumlah kebutuhan Sara na dan Prasarana dan Operasional	Jenis	72	13.588.943.657	12	1.163.127.000	12	2.269.451.000	100	84,14	24	3.072.699.000	33,33	22,61	BIDANG KB DAN KS	
17.6	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi (lanjutan)	Jumlah kebutuhan Sara na dan Prasarana dan Operasional	Jenis	0	-	0	-	0	5.300.000	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	
17.7	Pelayanan KB Medis Operasi Pria	Jumlah Kec yang dipasilitasi dalam Pelayanan KB Gratis dan Pertemuan KIE	Kecamatan	7	423.119.000											BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
17.8	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	Kampung KB	18	34.317.000											BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
17.9	Jambore Institusi Masyarakat	Jumlah kegiatan Jambore Kader	Kegiatan	6	-											BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
17.10	Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan KB Nasional Tk. Kabupaten Barru	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	6	-											BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
17.11	Fasilitasi Bhaksos	Jumlah Mitra Bhaksos Pelayanan	Mitra	24	469.264.600	4	79.080.000	4	96.810.800	100	98,92	8	174.841.800	33,33	37,26	BIDANG KB DAN KS	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
												83,33 Tinggi	80,36 Tinggi						
18.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Jumlah PIK KR yang terbentuk	Kelompok	84	82.000.000						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
18.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi Remaja (KRR) dan Luar Sekolah	Jumlah Kegiatan Advokasi KRR	Kegiatan	6	45.000.000						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
18.2	Sosialisasi Pembentukan PIK KR Luar Sekolah	Jumlah Sosialisasi Pembentukan PIK KR Luar Sekolah	Kegiatan	12	37.000.000						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
											-	-	-	-	-	-	-		
											-	-	-	-	-	-	-		
19.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR	Jumlah masyarakat yang aktif dan peduli terhadap program KB & KS	Orang	900	9.535.400						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
19.1	Fasilitasi Kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah fasilitasi	Kegiatan	42	9.535.400						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
											-	-	-	-	-	-	-		
											-	-	-	-	-	-	-		
20.	PROGRAM PEMBINAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA	Jumlah remaja yang ikut pembinaan dan konseling yang dilaksanakan	Orang	1800	10.000.000						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
20.1	Pembinaan Pusat informasi danKonseling Remaja dalam / Luar sekolah	Jumlah jenis kegiatan pembinaan pusat informasi dan konseling remaja	Kegiatan	12	10.000.000						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
											-	-	-	-	-	-	-		
											-	-	-	-	-	-	-		
21.	PROGRAM PENYULUHAN NARKOBA PMS DAN HIV/AIDS	Jumlah Sekolah mendapatkan Penyuluhan Narkoba PMS dan HIV/AIDS	SLTA	12	158.000.000						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
21.1	Penyuluhan Narkoba PMS dan HIV/AIDS	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	SLTA	62	158.000.000						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
											-	-	-	-	-	-	-		
											-	-	-	-	-	-	-		
22.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBE RDAYAAN KELUARGA	Jumlah BKB.BKR.BKL dan UPPKS yang dibina	Kelompok	810	171.112.235	810	6.814.500	810	25.009.500	0	99,21		31.627.000	-	18,48				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
22.1	Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Kelua rga BKB BKR dan BKL	Jumlah kegiatan Perlombaan Kelompok	Kegiatan						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
22.2	Pelatihan tenaga Pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan	Jumlah Kec yang difasilitasi Pelatihan kader kelompok BKB BKR BKL	Kecamatan	7	171.112.235	7	6.814.500	7	25.009.500	100	99,21	7	31.627.000	100,00	18,48	BIDANG KB DAN KS	
22.3	Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BKB HI	Jumlah BKB Holistik yang terbentuk	Kecamatan						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
22.4	Lomba penulisan pidato dll tentang kependudukan	Jumlah Lomba Pidato yang dilaksanakan	Kecamatan						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
22.5	Pembinaan Kader BKB BKR BKL	Jumlah kader kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang di bina	Kelompok						-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
										100,00	99,21						
									Sangat tinggi	Sangat tinggi							
23.	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB	Jumlah Jenis Data dan Informasi Program KKB terpenuhi	Dokumen	4	455.965.300	4		-									TDK TERMUAT DI DPA
23.1	Sosialisasi Penda taan Keluarga	Jumlah Kegiatan	Kali	3	53.886.300	1		-									TDK TERMUAT DI DPA
23.2	Pelaksanaan Pen dataan Keluarga (cetak formulir; insentif pendata; monitoring)	Jumlah alat Kelengkapan pendataan	Jenis	40	402.079.000	10		-									TDK TERMUAT DI DPA
23.3	Penyajian Data dan Informasi Pendataan Keluarga	Jumlah Data yang di Informasikan	Dokumen						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
23.4	Rakerda Koalisi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Rakerda Koalisi Kepndudukan	Kegiatan						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
23.5	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen						-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA
										-	-	C					
24.	PROGRAM PEM BINAAN PPKS	Jumlah PPKS yang dibina	Kegiatan	42	374.299.800				-	-	-	-	-	-	-		TDK TERMUAT DI DPA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
24.1	Sosialisasi PPKS	Jumlah Sosialisasi	Kegiatan	10	63.352.800				-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
24.2	Pembinaan PPKS	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	Bulan	72	77.968.800				-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
24.3	Pengadaan Insentif Operasional Pengelola PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	Jumlah PPKS yang mendapatkan insentif	PPKS	42	232.978.200				-	-	-	-	-	-	-	BIDANG KB DAN KS	TDK TERMUAT DI DPA
									-	-	-	-	-	-	-		
25.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah SKPD yg telah memahami Pere ncanaan dan Pen anggaran Re sfonsif Gender	SKPD	276	329.420.125												TDK TERMUAT DI DPA
25.1	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Penentu Kebijakan	Jumlah Advokasi yang dilaksanakan	Kegiatan	6	124.154.680				-							BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
25.2	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelatihan focal point dan pokja PUG	Kegiatan	12	119.501.445				-							BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
25.4	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah Buku Profil gender yang dibuat	Buku	600	18.564.000				-							BIDANG PP DAN PA	TDK TERMUAT DI DPA
									-	-	-	-	-	-	-		
3.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	36	250.708.120	36	10.251.900	36	20.099.900	100	79	36	26.100.500	100	10		
3.5	Workshop Analisis Data Gender	Jumlah perangkat daerah yang memiliki data terpilah	Perangkat Daerah	36	250.708.120	36	10.251.900	36	20.099.900	100	78,85	36	26.100.500	100,00	10,41	BIDANG PP DAN PA	
										100,00	78,85						
										Sangat tinggi	Tinggi						
										5.192.822.841	82,59						
										7.224.866.049	83,48						

DINAS SOSIAL

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Sosial															
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0	418.499.732	0	1.872.692.758	0	384.021.282	#DIV/0!	91,00	0	2.222.162.404	#DIV/0!	530,98	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	10.692.000	0	90.689.700	0	35.552.000	#DIV/0!	95,93	0	124.795.690	#DIV/0!	1.167,19	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	4	10.692.000	20	90.689.700	3	35.552.000		95,93		124.795.690		1.167,19	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	225.160.532	0	901.843.000	0	161.211.600	#DIV/0!	89,16	0	1.045.577.750	#DIV/0!	464,37	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Jenis	6	3.598.200	6	10.806.900	6	3.570.400		100,00		14.377.300		399,57	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.906.832		208.059.000		38.756.000		84,30		240.729.000		502,49	
		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	78	30.000.000	33	165.223.800	2	9.372.000		-					
		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	8	17.906.832	6	42.835.200	0	29.384.000		-					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	6	2.920.000	6	7.872.300		9.696.700		100,00		17.569.000		601,68	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.735.500		675.104.800		109.188.500		89,57		772.902.450		452,69	
		Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah	OH	1056		525	458.995.000									
		Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah	OK	1536		768	216.109.800									
							-						-			
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			0	135.947.200	0	644.768.638	0	137.741.900	#DIV/0!	89,49	0	768.040.000	#DIV/0!	564,95	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun	Eks	1.500	113.141.200,00	7500	576.369.500	446	115.056.500		98,70		689.926.000		609,79	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Rekening	4	22.806.000,00	4	68.399.138	3	22.685.400		42,82		78.114.000		342,52	
	<i>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>			0	46.700.000	0	235.391.420	0	49.515.782	#DIV/0!	97,66	0	283.748.964	#DIV/0!	607,60	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	Unit	7	31.500.000	10	100.890.000	4	31.036.000		99,99		131.922.900		418,80	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	Unit	8	7.500.000	8	18.169.620	8	7.345.000		57,07		22.361.482		298,15	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	5	4.100.000	15	100.181.800	4	7.676.600		99,97		107.856.400		2.630,64	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	8	3.600.000	15	16.150.000	8	3.458.182		157,83		21.608.182		600,23	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			0	21.875.455	0	172.102.500	0	20.870.800	#DIV/0!	91,85	0	191.273.300	#DIV/0!	874,37	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			0	21.875.455	0	172.102.500	0	20.870.800	#DIV/0!	91,85	0	191.273.300	#DIV/0!	874,37	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			10	21.875.455	50	172.102.500	10	20.870.800		91,85		191.273.300		874,37	
		Jumlah Karang Taruna (KT) yg mendapatkan bantuan dan bimbingan melalui paket usaha ekonomi produktif	KT	1		5	-	1								
		Jumlah PSM yg mendapatkan bantuan/bimbingan melalui bantuan paket Usaha ekonomi produktif	PSM	1		5	-	1								
		Jumlah tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) 7 Orang/Kec.	TKSK	7		35	-	7								
		Jumlah Orsos yg mendapatkan pembinaan melalui usaha ekonomi produktif	Kelompok	1		5	-	1								
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			0	282.462.276	0	1.451.006.748	0	164.742.800	#DIV/0!	98,32	0	1.612.986.248	#DIV/0!	571,04	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			0	122.381.156	0	430.394.200	0	135.517.800	#DIV/0!	98,03	0	563.245.500	#DIV/0!	460,24	
	Penyediaan Permakanan				101.121.656		215.197.100		115.437.300		97,69		327.967.900		324,33	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Pendataan dan pendampingan anak dan Lansia Terlantar	Kasus	4		16	44.400.300									
		Jumlah Pendataan dan pendampingan Disabilitas Terlantar	Kasus	4		16	118.486.000									
		Jumlah Pendataan dan pendampingan Tuna Sosial (Gelandangan,Pengemis, dan Penyakit SosialLainnya)Terlantar	Kasus	4		16	52.310.800									
		Jumlah Penderita Kusta di lauleng yg mendapatkan bahan natura	Orang	16			-									
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Lansia Yang Mendapatkan Bimbingan	Orang	50	21.259.500		-	50	20.080.500		100,00		20.080.500		94,45	
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</i>			0	160.081.120	0	1.020.612.548	0	29.225.000	#DIV/0!	99,67	0	1.049.740.748	#DIV/0!	655,76	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Pencegahan Narkoba, HIV/AIDS	Orang	400	129.087.850	3200	856.632.048	400	-		#DIV/0!		856.632.048		663,60	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Ratzia PSK di Kecamatan	Kali	3	30.993.270	21	163.980.500	3	29.225.000		99,67		193.108.700		623,07	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			0	859.745.573	0	2.537.106.547	0	408.143.100	#DIV/0!	81,62	0	2.870.252.397	#DIV/0!	333,85	
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>			0	859.745.573	0	2.537.106.547	0	408.143.100	#DIV/0!	81,62	0	2.870.252.397	#DIV/0!	333,85	

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				444.665.725		288.181.600		373.056.600		79,92		586.318.950		131,86	
		Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Beras	KPM	12000		12000	136.499.600									
		Jumlah Pendampingan PKH	KPM	7000		16556	151.682.000									
		Jumlah Tim Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Unit	1		1	-									
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				353.198.561		-		35.086.500		99,78		35.008.500		9,91	
		jumlah PACA yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha	Orang				-									
		Jumlah PACA yang mendapatkan pelatihan	Orang	0		100	387.528.900									
		Jumlah Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Orang			100	936.392.300									
		Jumlah pelatihan pendataan dan pemutakhiran data PMKS	KK				636.822.147									
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				61.881.287		-		-		-		-		-	
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan fasilitasi manajemen usaha (KUBE)	Orang			20	62.040.000									

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN I + TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelatihan	Orang			20	263.731.700									
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			0	175.266.200	0	510.581.958	0	175.191.500	#DIV/0!	99,84	0	685.498.208	#DIV/0!	391,12	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			0	115.266.200	0	510.581.958	0	115.191.500	#DIV/0!	99,76	0	625.498.208	#DIV/0!	542,66	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Dapur Umum yang beroperasi	Unit	1	40.000.000	1	67.617.500	1	39.956.500		100,00		107.574.000		268,94	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yg menerima bantuan logistik	KK	100	75.266.200	500	442.964.458	100	75.235.000		99,63		517.924.208		688,12	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota			0	60.000.000	0	-	10	60.000.000	0	100,00	0	60.000.000	#DIV/0!	100,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana Terlatih	Orang	10	60.000.000		-	10	60.000.000		100,00		60.000.000		100,00	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										#DIV/0!	#DIV/0!		542.051.253,10	#DIV/0!	516,85	
PREDIKAT KINERJA																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)										#DIV/0!	7,58		185.180.200,33	#DIV/0!	44,25	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja	Indeks	2	5.671.138.302		2.613.939.760		3.335.064.692							DPMPTSPTK
		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL	40	273.401.000		57.154.000	40	83.169.500							DPMPTSPTK
	Penyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Penyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	16.461.700	100	12.599.200	100	-	100	-	100	12.599.200	100	76,54	DPMPTSPTK
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran - SKPD	Dokumen	6	1.816.600	4	1.816.600	2	-	100	-	6	1.816.600	100	100	DPMPTSPTK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	24	4.812.000	18	4.812.000	6	-	100	-	24	4.812.000	100	100	DPMPTSPTK
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Monev	Dokumen	12	9.833.100	10	5.970.600	2	-	100	-	12	5.970.600	100	60,72	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	0			100	86,91	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	2.428.452.712		-	100	2.428.452.712	100	100	100,00	2.310.778.961	100	95,15	DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	Orang	32	2.428.452.712			28	2.428.452.712	100	100	28	2.310.778.961	87,5	95,15	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100	100			87,50	95,15	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	%	95	273.401.000	27,94	57.154.000	61,47	83.169.500	77,27	43,05	75,44	92.954.600	79,41	34,00	DPMPTSPTK
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional, diklat Struktural dan diklat teknis	Orang	20	196.000.000	0	-	5	28.303.000	40	-	2	-	10	0,00	DPMPTSPTK
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis pelaksanaan peraturan perundang- undangan	Orang	14	77.401.000	10	57.154.000	17	54.866.500	100	65,25	27	92.954.600	192,86	120,09	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										70,00	65,25			101,43	120,09	
Predikat Kinerja										Sedang	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	%	100	1.228.626.342	100	1.334.726.510	100	357.767.100	99,48	73,38	100,00	1.597.256.716	100,00	130,00	DPMPTSPTK
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang diadakan	Jenis	81	57.222.000	51	43.552.000	6	2.382.000	100	100,00	57	45.934.000	70,37	80,27	DPMPTSPTK
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga berdasarkan jenisnya	Jenis	253	52.027.755	133	40.705.335	9	31.910.600	100	99,99	142	72.612.335	56,13	139,56	DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik Alat Tulis Kantor berdasarkan jenisnya	Paket	2	1.860.000	2	1.860.000	0	-			2	1.860.000	100,00	100,00	DPMPTSPTK
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	OK	729	795.628.587	479	734.169.175	177	237.074.500	100	96,27	656	962.410.381	89,99	120,96	DPMPTSPTK
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi SPBE yang mendukung kinerja pelayanan MPP dan Pelayanan Perizinan	Aplikasi	4	321.888.000	4	514.440.000	1	86.400.000			4	514.440.000	100,00	159,82	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	98,75			83,30	120,12	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	%	95	822.607.000	9,39	558.301.000	10,13	465.600.300	100,00	94,14	100	996.618.150	100,00	121,15	DPMPTSPTK
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit meubel yang tersedia	Unit	25	66.625.000	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	DPMPTSPTK
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	57	186.354.000	34	111.715.700	0	-			34	111.715.700	59,65	59,95	DPMPTSPTK
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sapras Gedung Kantor yang tersedia	Unit	434	569.628.000	17	446.585.300	55	465.600.300	100	94,14	72	884.902.450	16,59	155,35	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	94,14			38,12	107,65	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	%	100	369.973.015	100	246.344.465	100	48.474.400	99,67	91,91	100	290.896.865	100,00	78,63	DPMPTSPTK
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar/masuk	Eksamplar	2.795	288.175.100	2.195	220.523.000	600	43.354.400	100	99,54	2795	263.676.900	100,00	91,50	DPMPTSPTK
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik	Tahun	5	81.797.915	5	25.821.465	3	5.120.000	33,33	27,31	6	27.219.965	120,00	33,28	DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	Penanggung jawab
				Rata-rata capaian kinerja (%)						66,67	63,43			110,00	62,39	
				Predikat Kinerja						Sedang	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	%	100	805.017.533	100	461.968.585	100	34.770.180	100,00	91,51	100	493.788.167	100,00	61,34	DPMPTSPTK
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil/Kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	59	326.103.435	31	193.165.585	12	26.420.180	100,00	88,83	43	216.635.167	72,88	66,43	DPMPTSPTK
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Unit	33	8.700.000	23	2.300.000	-	-			23	2.300.000	69,70	26,44	DPMPTSPTK
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	179	80.250.000	125	52.480.000	-	-			125	52.480.000	69,83	65,40	DPMPTSPTK
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	8	389.964.098	2	214.023.000	24	8.350.000	100,00	100,00	26	222.373.000	325,00	57,02	DPMPTSPTK
				Rata-rata capaian kinerja (%)						100,00	94,42			134,35	53,82	
				Predikat Kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	55,00		20										DPMPTSPTK
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan yang lulus dan bersertifikat	%	53,80	1.940.917.003	29,584	796.639.750	2,62	409.198.500	100,00	85,25	32,21	1.145.477.750	59,87	59,02	DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan pelatihan keterampilan	Orang	451	1.618.424.503	248	733.855.750	40	409.198.500	100,00	85,25	288	1.082.693.750	63,86	66,90	DPMPTSPTK
		Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi (ASN)	Instruktur	6	202.492.500	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	DPMPTSPTK
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah BLK Komunitas yang terbangun	Unit	0				0	-			0	-	0,00	0,00	DPMPTSPTK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja yang tersedia	Unit	12	120.000.000	10	62.784.000	0	-			10	62.784.000	83,33	52,32	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	85,25			73,60	59,61	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	55,00												DPMPTSPTK
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar	%	44,00	74.659.205	71	3.600.000	0	-	-	-	71,00	3.600.000	161,36	4,82	DPMPTSPTK
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	Lowongan Kerja	100	74.659.205	71	3.600.000	0	-			71	3.600.000	71,00	4,82	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0			71,00	4,82	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	27,03												DPMPTSPTK
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan	%	100	106.808.350	40	35.430.000	20	15.319.000	100,00	100,00	60,00	50.749.000	60,00	47,51	DPMPTSPTK
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan sesuai peraturan perUUan	Orang	160	30.675.000	80	14.375.000	40	7.887.000	100,00	100,00	120	22.262.000	75,00	72,57	DPMPTSPTK
		Jumlah peserta Sosialisasi peraturan Daerah terkait ketenagakerjaan	Orang	240	76.133.350	80	21.055.000	40	7.432.000	100,00	100,00	120	28.487.000	50,00	37,42	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	100,00			62,50	55,00	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA	Milyar	120												DPMPTSPTK
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/ insentif	%	100,00	599.510.216	0	-					0,00	-	0,00	-	DPMPTSPTK
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal dan Regulasi Pro Investasi Lainnya yang tersusun	Regulasi	20	599.510.216	1	-	0	-			1	-	5,00	0,00	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00			5,00	0,00	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup keseluruhan potensi investasi	%	20	311.638.780	14,99	131.245.000	5,00	56.283.500	100,00	82,67	19,99	177.773.100	99,94	57,04	DPMPTSPTK
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	2	154.831.280	1	82.325.000	0	-	0	-	1	82.325.000	50,00	53,17	DPMPTSPTK
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang tersusun dan ditetapkan	Buku	800	156.807.500	600	48.920.000	5	56.283.500	100,00	82,67	605	95.448.100	75,63	60,87	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	82,67			62,81	57,02	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD	
		Penanggung jawab	Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
										Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	%	79,94													DPMPTSPTK
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal	%	50,00	1.412.268.161	13	843.014.646	7	63.511.000	100,00	45,33	20,00	871.802.046	40,00	61,73		DPMPTSPTK
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran investasi penanaman modal yang diikuti	Pameran	37	1.412.268.161	9	843.014.646	1	63.511.000	100,00	45,33	10	871.802.046	27,03	61,73		DPMPTSPTK
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100	45,32663633		27,03	61,73	
										Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,31	2.237.960.550	79,17	1.645.067.500	80									DPMPTSPTK
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai SOP	%	95,00	2.237.960.550	90,00	1.645.067.500	95,00	456.808.800	100,00	92,85	95,00	2.069.218.000	100,00	92,46		DPMPTSPTK
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rata-rata Jumlah Hari Pelayanan memulai Usaha (Starting a Business)	Hari	2,5	1.490.767.750	3	1.239.736.500	2,5	347.625.800	100,00	90,61	5,5	1.554.718.000	220,00	104,29		DPMPTSPTK
		Jumlah Peserta Service excellence / Peningkatan kapasitas Petugas layanan	Orang	205	209.465.500	65	57.680.500	0	-			65	57.680.500	31,71	27,54		DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan berusaha	%	100	535.317.300	100	347.650.500	100	109.183.000	100,00	99,99	200	456.819.500	200,00	85,34	DPMPTSPTK
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Laporan	2	2.410.000	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	DPMPTSPTK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	95,30			150,57	72,39	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100												DPMPTSPTK
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	%	100	447.028.489	80	42.912.500	100	322.573.000	100,00	72,06	95,00	275.357.888	95,00	61,60	DPMPTSPTK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan / Pengendalian (LKPM) yang terselesaikan	LKPM	186	84.215.000	167	42.912.500	81	111.580.000	100,00	55,74	248	105.102.888	133,33	124,80	DPMPTSPTK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah MOU Kemitraan UKM dengan perusahaan PMDN/PMA	Kemitraan	8	70.000.000	0	-	4	141.983.000	100,00	84,34	4	119.745.000	50,00	171,06	DPMPTSPTK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Target Renstra PD Pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2021) yang di Evaluasi		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Uraian	Satuan	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Berita Acara (BAP) Pengawasan PMDN/PMA	BAP	28	292.813.489	0	-	80	69.010.000	100,00	73,19	80	50.510.000	285,71	17,25	DPMPTSPK
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	71,09			156,35	104,37	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	30,56												DPMPTSPK
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan data dan informasi sesuai standart peraturan per UU an	%	100	116.562.600	33,33	60.845.000	0	-			95,00	60.845.000	95,00	52,20	DPMPTSPK
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi yang tersedia dan terintegrasi secara elektronik	Data	6	116.562.600	2	60.845.000	0	-			2	60.845.000	33,33	52,20	DPMPTSPK
Rata-rata capaian kinerja (%)										0	0			33,33	52,20	
Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
4.741.927.992											88,99					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 S.D KEGIATAN 15)										82,44	66,37			86,46	74,22	
Predikat Kinerja										Tinggi	Sedang			Tinggi	Sedang	

INSPEKTORAT

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kebutuhan Administrasi Yang Terpenuhi	100%	100%	5.357.873.248		3.225.426.061	100%	4.274.518.043	89%	89%		7.019.203.036		131%	Inspektorat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji Inspektorat	100%	100%	3.119.663.248		2.982.823.082	100%	3.119.663.248	96%	96%		5.965.646.164		191%	Inspektorat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		504	3.119.663.248	504	2.982.823.082	504	3.119.663.248	96%	96%		5.965.646.164		191%	Inspektorat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	1.854.649.000		78.197.401	100%	686.613.000	75%	75%		590.900.872		32%	Inspektorat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		38	681.589.000	25	75.426.100	38	442.199.000	71%	71%		390.173.100		57%	Inspektorat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50	1.173.060.000	22	2.771.301	50	244.414.000	81%	81%		200.727.772		17%	Inspektorat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	190.936.000		103.963.190	100%	148.320.200	35%	35%		155.872.934		82%	Inspektorat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		12	11.100.000	8	4.877.171	12	16.755.200	52%	52%		13.626.665		123%	Inspektorat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		34	179.836.000	24	99.086.019	34	131.565.000	33%	33%		142.246.269		79%	Inspektorat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	78.620.000	100%	-	100%	209.455.000	78%	78%		164.079.000		209%	Inspektorat
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		13	34.740.000	1		13	19.440.000	99%	99%		19.233.000		55%	Inspektorat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		9	43.880.000	8		9	190.015.000	76%	76%		144.846.000		330%	Inspektorat

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT	
																DAERAH PENANGGUN G JAWAB
		URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	50.850.000		34.972.188	100%	60.255.400	74%	74%		79.611.059		157%	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat		1.500	50.350.000	1500	29.866.188	1500	50.655.400	69%	69%		64.905.059		129%	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		2	500.000	1	5.106.000	2	9.600.000	100%	100%		14.706.000		2941%	Inspektorat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	63.155.000		25.470.200	100%	50.211.195	75%	75%		63.093.007		100%	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7	17.500.000	5	10.500.200	7	13.290.000	176%	176%		33.856.007		193%	Inspektorat
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Dipelihara		15	5.250.000	15	-	15	2.750.000	0%	0%		-		0%	Inspektorat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		27	20.405.000	1	400.000	27	20.405.000	10%	10%		2.420.000		12%	Inspektorat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20.000.000	1	14.570.000	1	13.766.195	89%	89%		26.817.000		134%	Inspektorat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang Sistematis	100%	100%	2.179.529.000		1.286.561.650	100%	1.831.048.000	61%	61%		2.397.967.300		110%	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal	100%	100%	1.317.743.000		576.949.650	100%	1.195.515.000	57%	57%		1.259.047.300		96%	Inspektorat
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah		38	556.223.000	38	211.394.000	38	554.973.000	43%	43%		447.792.000		81%	Inspektorat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah		7	158.190.000	7	108.820.000	7	157.815.000	75%	75%		227.695.000		144%	Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		38	185.935.000	38	111.450.000	38	181.985.000	70%	70%		239.100.000		129%	Inspektorat
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1	28.800.000	1	7.500.000	1	8.425.000	89%	89%		15.000.000		52%	Inspektorat

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		12	170.225.000	12	130.950.000	12	169.850.000	77%	77%		261.900.000		154%	Inspektorat
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		3	25.535.000		-	3	19.884.000	64%	64%		12.750.000		50%	Inspektorat
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		1	192.835.000	1	6.835.650	1	102.583.000	47%	47%		54.810.300		28%	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	861.786.000		709.612.000	100%	635.533.000	68%	68%		1.138.920.000		132%	Inspektorat
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		5	35.975.000	5	414.372.000	5	71.350.000	28%	28%		434.072.000		1207%	Inspektorat
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		40	825.811.000	40	295.240.000	40	564.183.000	73%	73%		704.848.000		85%	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Kebijakan dan Sisdur yang Tertata Baik dan Cakupan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang Sistematis	100%	100%	775.254.000		235.711.000	100%	568.186.350	85%	85%		717.365.800		93%	Inspektorat
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	40.045.000		-	100%	38.545.000	86%	86%		33.282.000		83%	Inspektorat
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1	1.500.000		-	1	-	0%	0%		-		0%	Inspektorat

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021(%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (TRIWULAN I, II, III, IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1	38.545.000		-	1	38.545.000	86%	86%		33.282.000		86%	Inspektorat
	Pendampingan Dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	735.209.000		235.711.000	100%	529.641.350	85%	85%		684.083.800		93%	Inspektorat
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		36	107.765.000		-	36	107.515.000	94%	94%		101.475.000		94%	Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		36	107.682.500		-	36	93.904.000	88%	88%		82.925.000		77%	Inspektorat
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4	382.167.000	4	235.711.000	4	292.917.850	86%	86%		487.683.800		128%	Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		36	137.594.500		-	36	35.304.500	34%	34%		12.000.000		9%	Inspektorat
					8.312.656.248		4.747.698.711		6.673.752.393		2		10.134.536.136			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										0,69	0,70		-		1,99	
PREDIKAT KINERJA													-			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 12)													-			
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		URAIAN	SATUAN													
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								7.906.227.276	100	99,14	100	34.993.577.491	100	#DIV/0!	Satpol PP & Damkar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	persen	100		100		100	5.247.987.776	100	99,59	200	26.299.310.126	200	#DIV/0!	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	persen	100	16.289.360.990	100	13.742.166.325	100	4.380.540.758	100	102,78	200	18.244.530.210	200	112,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	orang	55	16.289.360.990	55	13.742.166.325	55	4.380.540.758	55	102,78	110	18.244.530.210	200	112,00	Satpol PP & Damkar
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	persen	100	728.723.822	100	510.227.492	100	247.909.000	100	53,36	200	642.523.392	200	88,17	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas PDH/PDL	jenis	5	150.000.000	5	-	5	96.756.500	5	101,00	10	97.725.400	200	65,15	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	orang	18	537.250.030	18	476.753.700	18	65.088.000	0	0,00	18	476.753.700	100	88,74	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	4	41.473.792	4	33.473.792	4	86.064.500	4	40,17	8	68.044.292	200	164,07	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	persen	100	852.509.000	100	768.739.000	100	144.110.500	100	83,80	200	889.505.000	200	104,34	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang tersedia	jenis	6	13.000.000	6	10.600.000	6	5.909.500	6	97,46	12	16.359.500	200	125,84	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	3	143.700.000	3	95.800.000	3	21.920.000		0,00	3	95.800.000	100	66,67	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	5	28.055.000	5	24.585.000	5	4.177.000	5	95,21	10	28.562.000	200	101,81	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diadakan diluar daerah	kali	172	667.754.000	172	637.754.000	172	112.104.000	172	99,04	344	748.783.500	200	112,13	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	547.345.156	100	494.161.156	100	82.978.000	100	66,86	200	549.638.056	200	100,42	
	Pengadaan Meubel	Jumlah unit mebel yang tersedia	jenis	4	175.615.216	4	175.615.216	4	46.238.000	4	99,87	8	221.792.116	200	126,29	

NO	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	jenis	9	371.729.940	9	318.545.940	9	36.740.000	9	25,31	18	327.845.940	200	88,19	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	persen	100	6.753.011.738	100	5.427.302.318	100	190.768.018	100	78,30	200	5.576.670.080	200	82,58	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat Masuk/Jumlah Surat Keluar	surat	650	6.149.621.738	650	4.948.907.318	650	67.830.200	650	90,61	1300	5.010.366.918	200	81,47	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi jasa komunikasi, air dan listrik	rekening	3	445.290.000	3	349.045.000	3	90.082.818	3	62,23	6	405.103.162	200	90,98	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	jenis	6	143.700.000	6	119.750.000	6	23.255.000	6	95,68	12	142.000.000	200	98,82	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya selama 1 tahun	orang	2	14.400.000	2	9.600.000	2	9.600.000	2	100,00	4	19.200.000	200	133,33	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	persen	100	236.976.000	100	130.256.000	100	201.681.500	100	131,98	200	396.443.388	200	167,29	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajaknya tiap tahun	unit	22	140.000.000	22	110.000.000	22	181.425.500	22	137,44	44	359.356.388	200	256,68	
	Pemeliharaan Meubel	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala Meubeler,	jenis	3	58.116.000	3	10.656.000	3	10.656.000	3	100,00	6	21.312.000	200	36,67	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis	6	38.860.000	6	9.600.000	6	9.600.000	6	64,32	12	15.775.000	200	40,59	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	144,58			266,67	167,08	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	persen	100	1.740.586.100	100	1.569.934.600	100	1.021.898.700	100	99,16	200	2.583.254.600	200	148,41	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	457.819.000	100	443.951.000	100	894.427.000	100	98,89	200	1.328.451.000	200	290,17	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Pengamanan Dan Patroli Yang Dilaksanakan dalam 3 x 24 Jam	kali	365	150.000.000	365	100.000.000	365	43.350.000	365	100,12	730	143.400.000	200	95,60	

NO	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penegakan Hukum Larangan Merokok di tempat Tertentu	kawasan	6	163.819.000	6	148.819.000	0	-	0	#DIV/0!	6	148.819.000	100	90,84	
	Pemberdayaa Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	ok	585	144.000.000	585	72.000.000	585	39.950.000	585	94,12	1170	109.600.000	200	76,11	
	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenntaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Razia/Penertiban dan Pencegahan Kejahatan	kali	30	108.272.000	30	84.272.000	30	19.112.000	30	85,55	60	100.622.000	200	92,93	
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	ok	100	38.860.000	100	38.860.000	100	792.015.000	100	99,39	200	826.010.000	200	2125,60	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	persen	100	1.282.767.100	100	1.125.983.600	100	127.471.700	100	101,06	200	1.254.803.600	200	97,82	
	Sosialisasi Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai Rokok	sekolah	15	599.983.600	15	523.983.600	15	49.819.100	15	0,00	15	523.983.600	100	87,33	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaanPeraturan Daerah Bupati/ Walikota	Jumlah Pengawasan Peredaran Cukai Rokok Illegal	kecamatan	7	586.783.500	7	521.000.000	7	34.217.600	7	72,68	14	545.870.000	200	93,03	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Bupati/ Walikota	Jumlah Penegakan Perda dan Penyuluhan dimasyarakat	kali	6	96.000.000	6	81.000.000	6	43.435.000	6	239,32	12	184.950.000	200	192,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	137,69			233,33	156,95	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	persen	100	4.783.522.700	100	4.512.522.700	100	1.636.340.800	100	97,69	200	6.111.012.765	200	127,75	
	Pencegahan, Pengendalia, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	persen	100	4.687.522.700	100	4.512.522.700	100	1.607.379.350	100	99,45	200	6.111.012.700	200	130,37	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah petugas damkar bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas	ok	150	300.000.000	150	200.000.000	150	1.462.200.000	150	101,87	300	1.689.500.000	200	563,17	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jenis/unit	1	4.312.522.700	1	4.312.522.700	1	105.595.200	1	97,11	2	4.415.062.700	200	102,38	

NO	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER II (TTRIWULAN I + II + III + IV) TAHUN ANGGARAN 2021 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran		70	40.000.000	70	0	70	32.083.350		0,00	70	-	100	0,00	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah naskah kerjasama dengan daerah tetangga dalam penangana bahaya kebakaran	dokumen	1	35.000.000	1	25000000	1	7.500.800	1	85,99	2	31.450.000	200	89,86	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	persen	100	96.000.000	100	0	100	28.961.450		0,00	100	-	100	0,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah lokasi penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	kecamatan	7	96.000.000	7	0	7	28.961.450		0,00		-	0	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	28,66			133,33	29,95	
Predikat Kinerja										Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
JUMLAH								Rp	7.906.227.276							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerjasama seluruh aparat Satpol. PP dan Pemadam Kebakaran serta Pejabat -Pejabat Strukturan dan Instansi lainnya																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Biaya Operasional yang belum memadai, Ada Kegiatan yang berdasarkan permintaan dari Pusat/Provinsi																
Tindak Lanjut yang diperlukan berikutnya :																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bagaimana capaian kinerja Outcome Kabupaten Barru untuk pelaksanaan tahun 2021 per Perangkat Daerah yang rata-rata berkisar 20%.

2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan per urusan menunjukkan besaran penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 2 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2022 dan APBD 2022. Gambaran tentang capaian realisasi keuangan per urusan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.285
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru
Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	
		Pagu	Realisasi	Rp.	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	296,769,878,711	42,494,053,951	254,275,824,760	14,81
2	DINAS KESEHATAN	146,800,494,908	17,354,122,894	129,446,372,014	14,53
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	76,469,942,674	5,893,771,713	70,576,170,961	10,68
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	36,332,857,219	1,611,421,649	34,721,435,570	28,96
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	14,204,540,806	1,907,262,477	12,297,278,329	14,14
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	6,967,959,520	1,642,372,487	5,325,587,033	23,62
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,365,470,184	619,648,628	1,745,821,556	26,29
8	DINAS SOSIAL	3,822,797,200	1,011,395,657	2,811,401,543	27,14
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,845,933,860	758,375,636	4,087,558,224	16,21
10	DINAS TENAGA KERJA	1,297,835,618			
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,180,041,744	1,696,883,077	7,483,158,667	18,88
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	4,584,624,582	765,717,837	3,818,906,745	16,7

No	Perangkat Daerah	Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	
		Pagu	Realisasi	Rp.	%
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,952,517,739	663,660,963	2,288,856,776	22,48
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,589,516,436	830,254,772	2,759,261,664	23,13
15	DINAS PERHUBUNGAN	4,644,353,909	1,478,676,000	3,165,677,909	32,47
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5,664,600,898	1,236,961,443	4,427,639,455	21,84
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	5,250,075,744	787,214,876	4,462,860,868	15,05
18	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,434,313,296	837,376,603	3,596,936,693	19,71
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3,939,465,806	1,340,336,602	2,599,129,204	
20	DINAS PERIKANAN	3,536,929,802	685,072,321	2,851,857,481	19,27
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5,092,977,843	982,745,529	4,110,232,314	19,71
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	16,779,297,931	3,966,986,095	12,812,311,836	27,3
23	SEKRETARIAT DAERAH	40,793,349,264			
24	SEKRETARIAT DPRD	22,138,779,782	2,417,172,337	19,721,607,445	10,95
25	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,077,140,432	1,185,285,596	2,891,854,836	29,36
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,554,847,661	946,576,622	3,608,271,039	20,78
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	132,685,481,880	24,990,386,397	107,695,095,483	23,52
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,661,165,033	1,421,101,977	3,240,063,056	29,36
29	INSPEKTORAT	6,198,340,534	1,427,140,984	4,771,199,550	20,78
30	KECAMATAN TANETE RIAJA	3,527,067,854	649,732,727	2,877,335,127	23,52
31	KECAMATAN MALLUSETASI	4,862,964,285	1,597,974,283	3,264,990,002	30,14
32	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	3,340,067,757	1,079,875,520	2,260,192,237	23,3
33	KECAMATAN BALUSU	2,575,641,603	701,734,703	1,873,906,900	18,55
34	KECAMATAN BARRU	5,954,650,750	1,309,470,126	4,645,180,624	33,41
35	KECAMATAN PUJANANTING	2,491,469,267	430,866,130	2,060,603,137	32,62
36	KECAMATAN TANETE RILAU	3,757,667,990	766,787,453	2,990,880,537	27,42

No	Perangkat Daerah	Anggaran		Bertambah/(Berkurang)	
		Pagu	Realisasi	Rp.	%
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,656,750,963	628,328,975	2,028,421,988	21,99
JUMLAH		903,801,811,485	128,116,745,040	775,685,066,445	14.18

Penyesuaian program, kegiatan dan sub. kegiatan yang tercantum dalam RKPD Pokok Tahun 2022 dengan permendagri 90 tahun 2019, pemuktahiran permendagri 050.5889 Tahun 2021 dan perubahan SOTK menyebabkan terjadinya beberapa perubahan perangkat daerah, sehingga menyebabkan penyesuaian jumlah program / kegiatan / subkegiatan yang dipetakan berdasarkan indicator kinerja dan diinput dalam aplikasi SIPD. Adapun penyesuaian dalam RKPD pokok Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.286

Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan
RKPD Pokok Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2022

No	URUSAN PEMERINTAHAN	RKPD Pokok Tahun 2022			Perubahan RKPD 2022		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan
1	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN	6	12	65	2	9	51
2	URUSAN BIDANG KESEHATAN	7	20	112	5	23	101
3	URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	15	60	8	14	69
4	URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	17	43	4	8	16
5	URUSAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS	5	22	88	5	20	73
6	URUSAN BIDANG SOSIAL	7	15	53	7	14	44
7	URUSAN BIDANG TENAGAKERJA	4	13	27	5	19	51
8	URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	9	10	5	8	9
9	URUSAN BIDANG PANGAN	5	13	24	4	8	20
10	URUSAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	4	4
11	URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	15	33	9	18	47

No	URUSAN PEMERINTAHAN	RKPD Pokok Tahun 2022			Perubahan RKPD 2022		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan
12	URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	15	35	5	16	38
13	URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4	8	31	4	9	33
14	URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	3	6	7	2	5	6
15	URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	14	43	3	14	50
16	URUSAN BIDANG KOMINFO	3	9	32	3	10	40
17	URUSAN BIDANG KOPERASI DAN UMKM	7	14	41	7	13	31
18	URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	15	62	6	14	36
19	URUSAN BIDANG PEMUDAN DAN OR	4	13	57	3	8	28
20	URUSAN BIDANG STATISTIK	1	1	6	1	1	6
21	URUSAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	5	1	1	4
22	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	4	5	3	5	6
23	URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	7	28	2	8	31
24	URUSAN BIDANG KEARSIPAN	2	6	9	2	6	9
25	URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	18	52	4	19	43
26	URUSAN BIDANG PARIWISATA	5	13	38	5	13	37
27	URUSAN BIDANG PERTANIAN	6	23	60	7	24	60
28	URUSAN BIDANG PERDAGANGAN	5	9	18	5	10	19
29	URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	10	3	3	10
30	SEKRETARIAT DAERAH	9	18	73	16	56	120
31	SEKRETARIAT DPRD	2	12	34	2	12	34
32	URUSAN PERENCANAAN	3	12	42	3	13	50
33	URUSAN KEUANGAN	5	21	46	4	21	154
34	URUSAN KEPEGAWAIAN	2	8	24	2	10	24
35	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	2	5
36	URUSAN PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	9	1	2	5
37	URUSAN PENGAWASAN	3	11	27	3	10	29

No	URUSAN PEMERINTAHAN	RKPD Pokok Tahun 2022			Perubahan RKPD 2022		
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan
38	KECAMATAN	35	88	26	42	110	302
39	KESBANGPOL	5	10	22	5	10	22

Sumber : RKPD Pokok 2022, Kepmendagri 050-5889 tahun 2021

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kondisi riil yang terkait dengan adanya ketimpangan antara pencapaian pembangunan daerah dengan target yang diperoleh. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi dan permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yaitu:

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar untuk mewujudkan SDM berkualitas, berdayasaing, dan berkarakter;
- 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan keberlanjutan Lingkungan;
- 3. Peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat;
- 4. Perwujudan Keamanan dan Ketertiban;
- 5. Akselerasi tata kelola dan reformasi Birokrasi.

Berdasarkan prioritas tersebut, dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Barru secara makro sebagai berikut.

1) Belum optimalnya kualitas manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan terutama pada aspek pelayanan

dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Barru dibuktikan dari capaian IPM Kabupaten Barru pada tahun 2018 yang masih berada pada peringkat ke-8 Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara capaian komponen IPM yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) sebesar 68,60 tahun, dimensi pendidikan yang diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,56 dan 7,86 tahun, serta dimensi pendapatan (standar hidup layak) yang diwakili oleh paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) sebesar Rp. 10.622.000. Hal ini berhubungan dengan permasalahan pokok pada dimensi kesehatan antara lain angka kematian bayi (AKB) dan angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pelayanan dasar kesehatan, sementara permasalahan pokok pada dimensi pendidikan adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan berdampak pada belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu menyebabkan akses dan mutu pendidikan juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan permasalahan pokok pada dimensi pendapatan dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja dan masih tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan belum optimalnya pendapatan perkapita masyarakat.

2) Masih tingginya ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi disebabkan karena adanya ketidakstabilan capaian indikator perekonomian yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, dan pendapatan perkapita serta nilai investasi. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan yang proporsional terlihat dari indeks Gini pada tahun 2018 masih berada pada kisaran angka 0,38. Sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih dinikmati sebagian kecil penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan bergerakinya sektor riil terutama sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan UMKM.

3) Masih rendahnya daya saing daerah

Komponen daya saing daerah meliputi ketersediaan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan pengembangan inovasi daerah. Permasalahan pokok pada peningkatan daya saing yaitu ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai yang terwakili oleh proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,608 pada tahun 2018, hal ini berarti masih ada sekitar 0,392 dalam kondisi rusak. Sementara permasalahan pokok kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kegiatan usaha manusia dan dampak pemanasan global dan pada tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru masih sebesar 69,17. Sedangkan permasalahan pokok pada pengembangan inovasi daerah dalam berbagai sector terutama pada sektor pengembangan industri menjadi salah satu permasalahan dalam peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, adil, proporsional, dan berkualitas tetap harus dimaksimalkan agar ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Barru bergerak sehingga investasi dan daya saing pun kian meningkat.

4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem keamanan dan ketertiban.

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu variabel dalam mewujudkan kondusifitas suatu wilayah. Permasalahan pokok pada aspek ini adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penerapan sistem keamanan dan ketertiban yang ditunjukkan oleh angka kriminalitas Kabupaten Barru masih pada kisaran 7,7, angka ini lebih rendah dari pada angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 16,6 dan Nasional sebesar 14. Situasi tersebut perlu didukung dengan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Disamping itu pembangunan wilayah merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada.

5) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan

Kapasitas kelembagaan pemerintahan Kabupaten Barru perlu dimaksimalkan. Kinerja Perangkat Daerah belum optimal karena masih terkendala pada penataan ketatalaksanaan, penggunaan teknologi informasi, penerapan sistem informasi dan manajemen serta e-government. Selain itu, upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik masih perlu menjadi perhatian. Perangkat daerah dalam melayani masyarakat seharusnya menerapkan pemerintahan yang efisien, efektif, produktif, bersih, transparan dan akuntabel. Sedangkan ASN perlu didorong untuk lebih taat asas, tertib administrasi, disiplin, beretika organisasi dan profesi, serta lebih inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil negara. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggung jawaban). Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- ✓ Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terbatas terutama pada daerah-daerah pegunungan dan terpencil dengan akses jalan dan transportasi publik yang belum memadai.
- ✓ Penerapan manajemen berbasis sekolah belum sesuai dengan target sebagai akibat dari rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- ✓ Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan menengah masih banyak terfokus di ibu kota Kecamatan.

- ✓ Rasio guru dan murid menunjukkan trend negatif dan tidak berimbang, termasuk rasio antara jumlah lulusan pendidikan dasar dengan ketersediaan dan daya tampung gedung sekolah pada jenjang pendidikan menengah.
- ✓ Perkembangan lembaga pendidikan non formal, tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga pendidik yang sesuai dengan standard kompetensi.
- ✓ Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minima l bidang pendidikan belum optimal.
- ✓ Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran tenaga pendidikan yang bersertifikasi.
- ✓ Penerapan metode pendidikan berkarakter belum melembaga dan tidak merata pada semua satuan pendidikan.
- ✓ Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal.
- ✓ Peran komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan belum optimal.
- ✓ Penerapan kurikulum 2013 yang belum tuntas pada semua satuan pendidikan menimbulkan kesulitan dalam penilaian dan pelaksanaan proses belajar mengajar.
- ✓ Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket yang tidak sesuai usia sekolah (13-15) tahun.
- ✓ Banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya tidak pada usia ideal sekolah
- ✓ Masih kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan.
- ✓ Masih adanya siswa yang putus sekolah dengan berbagai penyebab salah satunya adalah mengikuti orang tua merantau.

b. Urusan Kesehatan

- ✓ Cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional masih belum optimal, sebagai akibat dari tidak sinkronnya data penduduk miskin.
- ✓ Belum sinkronnya standard operasional prosedur pelayanan kesehatan (Home Care) dari level desa, kecamatan dan kabupaten, termasuk dengan rumah sakit umum daerah.

- ✓ Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, dan pegunungan yang belum memadai dan tidak merata.
 - ✓ Jumlah dan kualitas pelayanan tingkat rujukan (Rumah Sakit) belum memadai,
 - ✓ Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
 - ✓ Koordinasi dengan OPD lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
 - ✓ Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal,
 - ✓ Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering dikeluhkan pasien di RSUD,
 - ✓ Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
 - ✓ Masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degenerative (Kanker, Jantung, etc),
 - ✓ Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang, Pembinaan perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- ✓ Tingkat kerusakan jalan sangat tinggi, berbanding terbalik dengan kemampuan peningkatan dan pemeliharaan jalan sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan jalan.

- ✓ Pembangunan rel kereta api berdampak pada tingginya kerusakan jalan terutama pada daerah pengambilan material “quarry”.
 - ✓ Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pegunungan belum memadai dan belum merata.
 - ✓ Koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
 - ✓ Rendahnya kemampuan dan kedisiplinan aparat teknis dalam melakukan pengawas pembangunan jalan dan jembatan.
 - ✓ Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
 - ✓ Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta tanggul pantai belum memadai,
 - ✓ Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai,
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pengsertifikatan tanah,
 - ✓ Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah layak huni,
 - ✓ Masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah layak huni
 - ✓ Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal,
 - ✓ Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai,
 - ✓ Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran belum memadai,
 - ✓ Pengelolaan areal pemakaman belum optimal,
 - ✓ Road map (peta jalan) pembangunan kawasan kumuh belum tersedia,
 - ✓ Ketersediaan aparat di bidang perumahan dan permukiman terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- ✓ Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- ✓ Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi dengan stakeholder lain,
- ✓ Pengembangan wawasan kebangsaan melalui peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat masih lemah,
- ✓ Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatangannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan belum memadai,
- ✓ Upaya pendidikan politik masyarakat masih kurang,
- ✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan,
- ✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun kualitas politik dan berdemokrasi,
- ✓ Cenderung menurunnya jiwa nasionalisme dan patriotisme segenap lapisan masyarakat.

f. Urusan Sosial

- ✓ Masih cukup tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS).
- ✓ Tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadian bencana alam,
- ✓ Penyediaan tunjangan kematian dan ta'ziah
- ✓ Masih kurang diberdayakannya panti-panti social
- ✓ Penyediaan beras miskin bagi penduduk miskin yang tersebar di desa/kelurahan,
- ✓ Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS, upaya rehabilitasi dan pembinaan anak terlantar belum optimal,
- ✓ Pembinaan para penyandang cacat, panti asuhan, panti jompo dan eks penyandang masalah social masih sektoral, belum berkelanjutan dan kurang terstruktur,
- ✓ Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal,
- ✓ Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan penyandang masalah sosial masih terbatas.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga kerja

- ✓ Masih terbatasnya lapangan kerja produktif,
- ✓ Kualitas, kompetensi dan produktifitas tenaga kerja belum memadai,
- ✓ Peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja,
- ✓ Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum memadai,
- ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai,
- ✓ Sarana dan prasarana pembinaan keterampilan ketenagakerjaan belum memenuhi standard nasional, baik dari segi manajerial maupun dengan sarana pendukung.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ✓ Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan trend yang terus meningkat,
- ✓ Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak belum optimal,
- ✓ Perlindungan perempuan dan peningkatankualitas hidupnya belum memadai,
- ✓ Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender belum menguat,
- ✓ Penguatan kelembagaanpengarusutmaan genderdananakmasih lemah.

c. Urusan Pangan

- ✓ Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holderlain yang terkait belum sinergi,
- ✓ Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangandan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai,
- ✓ Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal,
- ✓ Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal.

d. Urusan Pertanahan

- ✓ Pembangunan system pendaftaran tanah belum memadai,

- ✓ Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum tertata termasuk masih adanya lahan pemerintah yang belum bersertifikat,
- ✓ Penyelesaian konflik pertanahan belum optimal termasuk beberapa lahan pemerintah yang disengketakan,
- ✓ Pengembangan sistem informasi pertanahan belum memadai,
- ✓ Pengembangan komunikasi dan informasi dengan bersinergi dengan SKPD lain belum optimal.

e. Urusan Lingkungan Hidup

- ✓ Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan,
- ✓ Volume produksi sampah semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan luas permukiman masyarakat,
- ✓ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan belum maksimal,
- ✓ Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan belum berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk,
- ✓ Jenis dan ragam sampah yang dihasilkan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang berbeda,
- ✓ Kapasitas penampungan akhir sampah dari waktu ke waktu terus terbatas,
- ✓ Tuntutan pengelolaan sampah yang berbasis standar pengelolaan tertentu,
- ✓ Luas permukiman semakin bertambah sehingga ekspektasi masyarakat akan pelayanan penerangan jalan umum juga terus meningkat,
- ✓ Biaya pemeliharaan penerangan jalan umum diperhadapkan pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerangan jalan umum,
- ✓ Pembakaran lahan pertanian pada wilayah hutan seringkali menimbulkan kebakaran hutan,
- ✓ Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan,

- ✓ Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang,
 - ✓ Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup masih belum memadai,
 - ✓ Koordinasi dan sinergi penyusunan regulasi lingkungan hidup masih lemah,
 - ✓ Kualitas dan ketersediaan penyusunan dokumen sektoral lingkungan belum diterapkan dengan ketat.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- ✓ Penataan administrasi kependudukan belum memadai,
 - ✓ Masih cukup banyak masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya dokumen kependudukan.
- g. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
- ✓ Penerapan keluarga berencana belum massal dan menyeluruh,
 - ✓ Pelayanan kontrasepsi belum terjangkau secara massal dan menyeluruh.
 - ✓ Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri belum memadai,
 - ✓ Upaya promosi kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat masih minim,
 - ✓ Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR belum optimal,
 - ✓ Upaya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS kurang terkoordinasi dengan stake holder terkait lainnya yakni Dinas Kesehatan,
 - ✓ Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga masih belum memadai,
 - ✓ Pengkajian dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU belum terkoordinasi.
- h. Urusan Perhubungan
- ✓ Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal,
 - ✓ Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai,
 - ✓ Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai,

- ✓ Pendapatan Asli daerah dari sektor perhubungan belum tergal dengan baik.

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

- ✓ Belum tersedianya gedung kantor yang refresentatif serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas,
- ✓ Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi informasi yang masih belum tersebar secara menyeluruh pada lapisan masyarakat,
- ✓ Masih kurangnya sumber daya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, lingkup OPD dan lingkup Masyarakat,
- ✓ Belum tersedianya regulasi (Perdadan peraturan teknis dibidang tata kelola TIK (e-government),
- ✓ Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi yang berbasis e-government.

j. Urusan Penanaman Modal

- ✓ Upaya promosi dan kerjasama investasi yang masih minim,
- ✓ Peningkatan nilai investasi yang masuk belum banyak membantu membuka lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran,
- ✓ Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah masih terbatas,
- ✓ Pengembangan data dan informasi statistic daerah terkait investasi perlu disinergikan dengan OPD lain.

k. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- ✓ Peran serta kepemudaan masih minim,
- ✓ Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai,
- ✓ Pencegahan penyalahgunaan narkoba belum menjadi prioritas pertama dibandingkan upaya represif dalam penanganan kasus narkoba,
- ✓ Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga belum memadai,
- ✓ Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga masih seremonial dan belum menjadi event tetap,
- ✓ Sarana dan prasarana olahraga sangat terbatas

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- ✓ Skala dan diversifikasi usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah masih terbatas,
- ✓ Lembaga koperasi yang berjalan dengan status sehat dan kredibel masih terbatas,
- ✓ Keanggotaan koperasi lebih didominasi kepada pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan sesaat (konsumtif) dibanding sebagai penembangan usaha,
- ✓ Peningkatan kompetensi manajemen pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah belum optimal,
- ✓ Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah belum terintegrasi dengan lembaga keuangan formal dan industri menengah dan besar.

m. Urusan Persandian dan Statistik

- ✓ Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran belum cukup tersedia,
- ✓ Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dinas,
- ✓ Pola hubungan kerja dan komunikasi dalam menyelenggarakan urusan statistik sektoral dan urusan persandian belum melembaga,
- ✓ Kapasitas anggaran sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana,
- ✓ Belum menggunakan system informasi berbasis aplikasi dalam pengelolaan statistik dan penyelenggaraan persandian,
- ✓ Tingginya kebutuhanakan layanan data terupdate baik untuk kepentingan analisis data pemerintahan dan pembangunan maupun untuk swasta.

n. Urusan Kebudayaan

- ✓ Belum tersedianya data dan sistem informasi kebudayaan dan seni,
- ✓ Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi,
- ✓ Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Barru,

- ✓ Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya,
 - ✓ Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah,
 - ✓ Belum optimalnya perhatian Pemerintah pada pembangunan Budaya.
- o. Urusan Perpustakaan
- ✓ Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai, dan belum merata,
 - ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
- p. Urusan Kearsipan
- ✓ Perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasarana kearsipan belum memadai,
 - ✓ Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.
- q. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ✓ Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tatakelola pemerintahan desa.
 - ✓ Ketidak berdayaan masyarakat disebabkan Faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya Akses informasi, sarana, modal, pasaran pelayanan Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, Pemkab/pemkot dan desa.
 - ✓ Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM
 - ✓ Belum fokus dan belum bersinerginya program-program pemberdayaan masyarakat dari pusat/provinsi dengan program pemerintah kabupaten

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Perikanan

- ✓ Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan,
- ✓ Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya

- ✓ Keterbatasan infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan
- ✓ Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
- ✓ Masih maraknya pelaku illegal fishing
- ✓ Masih kurangnya kajian terhadap pengelolaan sumberdaya kemaritiman,
- ✓ Pengelolaan perikanan tangkap belum optimal,
- ✓ Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai,
- ✓ Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan Sarana & Prasarana Perikanan masih minim,
- ✓ Belum adanya pola kerjasama atau kemitraan antara pemodal “pongawa bonto” dengan nelayan “sawi” yang saling menguntungkan dan saling menumbuhkan.

b. Urusan Pariwisata

- ✓ Keterpaduandan sinergiantar pelakuwisata dalam pengembangan pariwisatamasih rendah.
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pariwisata baik destinasi, atraksi budaya dan managemen kelembagaannya
- ✓ Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata
- ✓ Masih kurangnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- ✓ Belum optimalnya promosi wisata,
- ✓ Pengembangan pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan masih belum memadai,
- ✓ Pengembangan Komunikasi, Informasi dalam pembangunan dan promosi kepariwisataan masih sangat minim,
- ✓ Penerimaan dan Kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB masih minim,
- ✓ Pengintegrasian dan sinergitas ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataanbelum berjalan,
- ✓ Pendayagunaan lingkungan hidup dan obyek wisata alam sebagai salah satu potensi wisata juga belum optimal.

c. Urusan Pertanian

- ✓ Belum optimalnya diversifikasi produk pangan local

- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan lokal
- ✓ Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi focus daerah,
- ✓ Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.
- ✓ Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan, perikanan serta teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas;
- ✓ Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
- ✓ Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis.
- ✓ Pengembangan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil perkebunan.
- ✓ Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
- ✓ Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
- ✓ Pengelolaan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal.
- ✓ Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai.
- ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim.

d. Urusan Perindustrian

- ✓ Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat/publik lainnya masih jauh dari kondisi nyaman,
- ✓ Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal,
- ✓ Pengawasan mutu dan peredaran barang dan jasa yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan OPD lainnya,
- ✓ Perlindungan atas konsumen belum optimal
- ✓ Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.

e. Urusan Perindustrian

- ✓ Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM,
- ✓ Industri berbasis sumber daya lokal belum berkembang secara merata
- ✓ Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha,
- ✓ Pengembangan industri kecil dan menengah belum memadai,
- ✓ Penataan sektor dan kluster industri belum optimal,
- ✓ Sinergi antara beberapa unit kerja dalam pengembangan perindustrian masih kurang,
- ✓ Pemanfaatan teknologi informasi belum memadai.

f. Urusan Perdagangan

- ✓ Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis,
- ✓ Belum optimalnya kesiapan menghadapi perdagangan bebas, MEA, dan lainnya
- ✓ Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar
- ✓ Penyediaan biaya untuk menyanggah harga komoditas andalan

g. Urusan Transmigrasi

- ✓ Masih kurangnya perhatian dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
- ✓ Sulitnya menyediakan lokasi transmigrasi

4. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

a. Urusan Penelitian dan Pengembangan

- ✓ Fungsi kelitbangan belum optimal,
- ✓ Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan,
- ✓ Belum adanya sinergitas kebijakan yang mendukung kelitbangan.
- ✓ Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur.

- ✓ Penganggaran yang cukup juga merupakan factor yang dapat mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang baik dan berkualitas.
- ✓ Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah sangat dibutuhkan pemahaman yang baik dalam tata cara penyusunan program dan anggaran.
- ✓ Pemetaan urgensi, peran dan potensi stakeholder kelitbangan penting untuk segera dilaksanakan untuk mendukung berjalannya sistem inovasi di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan semakin baik.

b. Urusan Perencanaan

- ✓ Masih kurangnya data pendukung perencanaan pembangunan
- ✓ Belum optimalnya dan belum meratanya kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan dari bawah,
- ✓ Sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal,
- ✓ Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergis, massive dan sistematis,
- ✓ Koordinasi dalam upaya Penataan Peraturan terkadang masih kurang sinergis dengan OPD utama.

c. Urusan Keuangan

- ✓ Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
- ✓ Masih adanya permasalahan terkait aset pemerintah pada tiap Perangkat Daerah,
- ✓ Upaya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah belum massive di semua Perangkat Daerah dan aparatur,
- ✓ Upaya menggali dan memetakan potensi PAD dari sektor sektor potensial lain belum optimal.

d. Urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- ✓ Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan,
- ✓ Jumlah dan rasio pejabat fungsional dengan kompetensi teknis masih sangat kurang terhadap kebutuhan pada sejumlah perangkat daerah,

- ✓ Masih perlunya penataan struktur dan budaya organisasi/ kelembagaan instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang responsive
- ✓ Masih kurangnya reward and punishment dalam rangka peningkatan motivasi aparatur
- ✓ Belum sesuainya kompetensi pegawai dengan kebutuhan riil

e. Urusan Pengawasan

- ✓ Upaya meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH belum massive oleh semua OPD dan aparatur,
- ✓ Upaya meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan belum berkelanjutan dan sistematis,
- ✓ Upaya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan masih belum optimal,
- ✓ Masih lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum dan perundang- undangan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan structural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga fiscal sustainability jangka menengah.

Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Perkembangan berbagai kebijakan terkait kebijakan fiskal dan keuangan yang ditetapkan pemerintah diantaranya:

1. Kebijakan Pemindahan ibukota negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata Kelola wilayah ibukota negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibukota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Sebagai landasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan Nama Nusantara.

2. Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan pemuktahiran kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja, pengembangan system pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Mengatur penguatan system pajak daerah dan retribusi daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Mengatur perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga. Undang-undang HKPD mendorong penggunaan creative financing untuk akselerasi pembangunan di daerah.

Kedua kebijakan diatas akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan memberi peluang bagi Kabupaten Barru sebagai penyangga Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 akan memberi peluang bagi Kabupaten Barru meningkatkan PAD nya melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu factor risiko terbesar bagi perekonomian global ke depan. Serangan militer Rusia terhadap ukraina sejak 24 Februari 2022 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Berbagai negara merespons dengan pemberian sanksi ekonomi berat terhadap rusia, seperti pembatasan/pelarangan ekspor-impor, pemblokiran dari system pembayaran internasional, hingga pembekuan asset. Dampak perang pada pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sangat besar. Tehe Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengestimasi pertumbuhan ekonomi global

akan turun sebesar 1 poin persentase dari proyeksi baseline, ditahun pertama perang. Dalam April 2022 World Economic Outlook/WEO IMF juga melakukan revisi ke bawah atas pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 sebanyak 0,8 poin persen (PP) dari proyeksi sebelumnya di bulan januari. IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan berada di tingkat 3,6 persen, atau melambat tajam dari pertumbuhan tahun 2021 yang mencapai 6,1 persen. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara luas khususnya negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi tinggi dengan Rusia – Ukraina seperti Kawasan Eropa.

Selain pertumbuhan ekonomi, perang rusia – ukraina juga berpengaruh terhadap kenaikan inflasi global yang diperkirakan berlangsung lama dengan level lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dalam estimasi OECD, inflasi global dapat meningkat 2,5 poin persentase diatas estimasi baseline ditahun pertama perang. Sementara dalam proyeksi IMF, inflasi kelompok negara maju (advance economies/AEs) naik 1,8 PP dari proyeksi sebelumnya, sementara inflasi negara berkembang (emerging markets and developing economies/EMDEs) naik 2,8 pp. Selain mendorong kenaikan harga – harga komoditas, juga berisiko membuat disrupsi supply semakin berkepanjangan dan menciptakan hambatan perdagangan global, sehingga berpotensi terus mendorong kenaikan inflasi.

Kenaikan inflasi ini diperkirakan akan mendorong percepatan pengetatan kebijakan moneter global. Hal ini memberi resiko pada terjadinya pengetatan likuiditas dan peningkatan volatilitas pasar keuangan global. Situasi ini dapt menciptakan efek rambatan dan gangguan bagi pemulihan ekonomi khususnya untuk negara-negara berkembang. Eskalasi resiko yang terjadi saat ini akan meningkatkan ketidakpastian dan tekanan terhadap prospek pertumbuhan.

Selain perang rusia ukraina resiko global lainnya yang harus diwaspadai yaitu scarring effect, perubahan iklim serta perubahan arah kebijakan tiongkok menuju pertumbuhan lebih berkualitas, yah harus terus diantisipasi dan dimitigasi sedini mungkin.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Tantangan akselerasi perekonomian nasional akan dicapai salah satunya melalui penguatan kinerja ekspor barang tahun 2020-2024 yang didukung oleh revitalisasi industri pengolahan. Upaya revitalisasi industri pengolahan tersebut diarahkan untuk mendorong diversifikasi produk ekspor non komoditas dan mengurangi ketergantungan impor sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Salah satu Langkah tepat yang diambil pemerintah untuk diversifikasi ekspor dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi makro adalah dengan kebijakan hilirisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk mendorong penguatan keamanan transaksi, perlindungan data dan konsumen serta pengawasan terhadap market conduct oleh otoritas pengawas.

Tantangan yang akan dihadapi pemerintah terkait penguatan kinerja ekspor antara lain transformasi struktur ekspor yang di indikasi oleh berkurangnya ekspor bahan mentah terhadap total ekspor nasional yaitu dari 22 persen menjadi 16 persen di tahun 2022. Selain itu nilai kontribusi ekspor terhadap nilai ekspor dunia tergolong stagnan yaitu sekitar 0,9 persen.

Tantangan lainnya terkait akses informasi ekspor yang dimiliki Indonesia masih belum memadai. Kurangnya informasi menjadi kendala utama bagi pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor. Adapun jenis informasi peluang pasar, persyaratan dan standar serta sertifikast mutu. Ke depan, informasi terkait ekspor dari pemerintah harus lebih ditingkatkan pemanfaatannya, lebih mudah diakses, dipahami, akurat dan actual. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk mendorong penguatan keamanan transaksi, perlindungan data dan konsumen serta pengawasan terhadap market conduct oleh otoritas pengawas.

Dari sisi demografi, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan modal sumber daya manusia sangat diperlukan. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif cukup mendominasi saat ini yaitu sebesar 70,72 persen. Dengan adanya potensi besar sumber daya manusia ini, pemerintah perlu berupaya untuk

memperpanjang bonus demografi dan meningkatkan produktivitas. Periode bonus demografi perlu diperpanjang dengan menjaga Total Fertility Rate (TFR) pada level 2,1 dan menurunkan Infant Mortality Rate (IMR). Peningkatan produktivitas dilakukan dengan upaya peningkatan skill dan kompetensi serta penciptaan lapangan kerja. Penduduk yang masuk dalam kelompok kelas menengah merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok menengah ini merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan komponen konsumsi masyarakat dalam PDB. Hampir setengah konsumsi nasional bersumber dari kelompok menengah. Selain itu pelaku bisnis nasional juga dari kelompok menengah sekitar 43 persen yang mampu menyerap tenaga kerja nasional.

Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kelompok menengah melalui aspiring middle class. Kelompok aspiring middle class ini merupakan kelompok penduduk yang telah keluar dari kelompok miskin namun belum cukup kuat untuk menuju status kelompok menengah. Kebijakan pemerintah untuk memfokuskan peningkatan kelompok ini akan memberikan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga membantu penanganan isu kemiskinan.

Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar merupakan tantangan dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi

Kinerja ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2021 menunjukkan adanya pemulihan dengan tumbuh di angka 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya di angka 3,25% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan IV juga membawa ekonomi Sulawesi Selatan kembali tumbuh diatas nasional setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh dibawah nasional. Pemulihan ekonomi juga tercermin pada keseluruhan tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,65% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh seluruh komponen, didukung berlanjutnya pemulihan konsumsi

masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sejalan dengan sisi permintaan, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) tercatat tumbuh terakselerasi pada triwulan laporan. Perbaikan utamanya didorong oleh kinerja LU utama Sulawesi Selatan, yaitu LU Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertambangan. Perbaikan LU Perdagangan dan Industri Pengolahan terjadi seiring dengan pembatalan rencana pelaksanaan PPKM level 3 pada periode HBKN Nataru merespon terkendalinya penyebaran pandemi dan membaiknya tingkat vaksinasi. Peningkatan pada LU Pertambangan didorong oleh perbaikan produksi korporasi dan berlanjutnya tren kenaikan harga nikel. Di sisi lain, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur di akhir tahun karena target realisasi menyebabkan peningkatan pada LU Konstruksi.

Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang meskipun akan sedikit tertahan seiring peningkatan risiko varian Omicron COVID-19 pada triwulan I 2022.

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman khususnya komoditas cabai rawit, minyak goreng, dan cabai merah serta Kelompok Transportasi seperti tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, penahan laju inflasi disumbang oleh penurunan harga beras, bawang merah, dan telur ayam ras.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan tahun 2021 tercatat sebesar 2,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,04 % (yoy). Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, potensi tekanan inflasi meningkat menjelang periode Nataru akibat adanya peningkatan konsumsi dan pelanggaran aktivitas masyarakat. Inflasi Sulawesi Selatan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2021. Pencapaian ini

tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilisasi harga dan mendukung pemulihan ekonomi.

Perbaikan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga pada triwulan laporan. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek mengalami peningkatan dibandingkan triwulan dan tahun lalu. Akselerasi ekonomi yang terjadi tercermin dari peningkatan kredit baik kepada sektor rumah tangga maupun korporasi. Peningkatan pembiayaan yang terjadi disertai dengan penurunan DPK sektor rumah tangga dan korporasi. Hal ini disebabkan karena kinerja korporasi dan permintaan rumah tangga yang lebih baik pada triwulan laporan. Di tengah perkembangan tersebut, Non Performing Loan (NPL) masih terjaga di bawah ambang batas.

Kinerja perbankan secara keseluruhan tetap kuat yang salah satunya terlihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mengalami penurunan di tengah perbaikan penghimpunan DPK. Sementara itu untuk kinerja intermediasi perbankan, baik pembiayaan maupun penghimpunan DPK mengalami kenaikan, bahkan mencatat penyaluran pembiayaan tertinggi sejak 6 (enam) tahun terakhir. Dengan demikian, LDR pada triwulan IV 2021 tercatat meningkat setelah menurun selama 3 (tiga) triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit UMKM mencatat peningkatan penyaluran kredit dengan NPL yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dapat memberikan harapan bahwa sektor UMKM dapat menjadi pendorong kinerja perbankan yang baik. Kuatnya sektor UMKM juga tak lepas dari upaya percepatan perluasan akses keuangan kepada UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi signifikan pada triwulan IV 2021 serta konsumsi rumah tangga yang meningkat (4,04%; yoy dan 1,73%; qtq) di tengah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), indikator sistem pembayaran juga menunjukkan adanya peningkatan. Transaksi nilai besar melalui Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) meningkat 9,6% (yoy) menjadi Rp28,7 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, adopsi pembayaran ritel juga mengalami peningkatan yang signifikan. Transaksi menggunakan kartu kredit tercatat mencapai Rp. 858,5 miliar atau meningkat sebesar 21,8% (yoy). Sementara transaksi e-commerce dan uang elektronik pada triwulan IV 2021 mencatatkan transaksi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan nominal transaksi sebesar 31,6% (yoy) dan 115,9% (yoy) secara berturut-turut. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan tahun baru didukung dengan pelonggaran PPKM. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Quick Reponse Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulsel mencapai 510.792 merchant atau tumbuh sebesar 174,1% (yoy). Dari jumlah tersebut, 73,5% diantaranya merupakan pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Perkembangan implementasi elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) masih berjalan dalam koridor prinsip 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi). Realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 100%, sedangkan realisasi penyerapan Program Sembako mencapai 99,3%. Dari sisi peredaran uang kartal, terjadi net outflow sebesar Rp1,68 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan uang yang tinggi di tengah masyarakat terutama pada akhir tahun.

Pada periode Agustus 2021, kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan mengalami perbaikan dibanding dengan periode Agustus 2020. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan nilai indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diikuti dengan penurunan nilai indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan juga semakin membaik meski masih berada di masa pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III tahun 2021. Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui stimulus kebijakan diharapkan dapat terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan rentang 4,9-5,7% (yoy). Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, seiring dengan upaya percepatan vaksinasi, pencegahan, dan penanganan dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah serta penerapan disiplin dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang lebih baik oleh masyarakat serta dunia usaha.

Berlanjutnya stimulus pemerintah berupa bantuan sosial dasar, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan subsidi listrik, serta relaksasi PPnBM 0% untuk mobil low cost green car dan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Investasi diperkirakan tumbuh kuat didukung keyakinan investor dan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah serta swasta. Secara sektoral, peningkatan perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan didorong oleh perbaikan lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum, serta Pertambangan. Di tengah peningkatan kinerja ekonomi, tekanan inflasi diperkirakan turut meningkat namun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan.

D. Tantangan Perekonomian Kabupaten

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan structural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga fiscal sustainability jangka menengah.

Perencanaan diarahkan lebih focus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal

dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Peningkatan peran Kabupaten Barru terhadap pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, merupakan tantangan sendiri. Berikut ini akan ditampilkan tabel capaian 2021, perkiraan capaian 2022 dan target 2023 Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2021 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,07 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 4,84 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,77 persen, atau menguat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,87 persen.

Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mencapai 4,77 persen. Perekonomian semua kategori lapangan usaha di Kabupaten Barru juga berhasil tumbuh positif. Terdapat tiga kategori yang dapat tumbuh di atas 5 persen

setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020. Ketiga kategori itu adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) yang tumbuh 5,48 persen; Transportasi dan Pergudangan (H) yang tumbuh 7,87 persen; dan Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,89 persen. Kategori-kategori tersebut adalah beberapa kategori yang paling merasakan pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya terdampak berbagai kebijakan pembatasan sosial sebagai dampak COVID-19 yang memicu pengurangan aktivitas operasional.

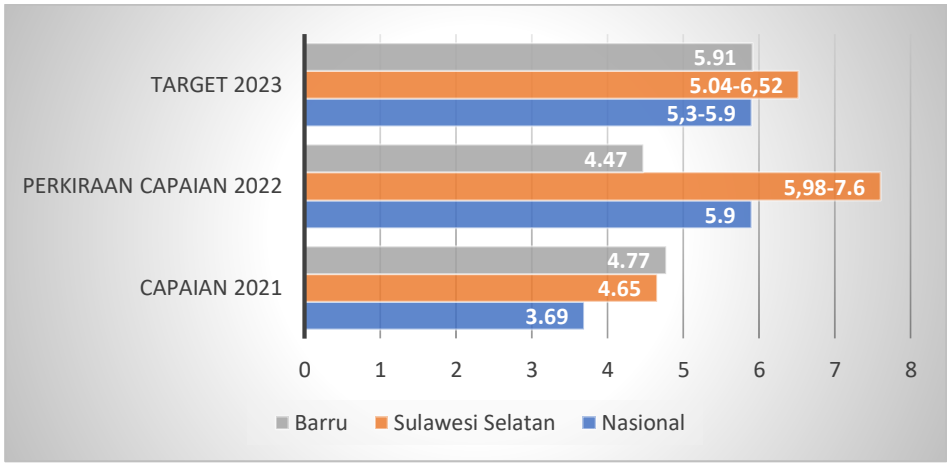
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori lapangan usaha Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,89 persen. Pertumbuhan ini ditandai dengan dibukanya kembali beberapa usaha yang bergerak di sektor jasa pada tahun 2021, di saat pada tahun 2020 banyak usaha di sektor jasa harus tutup sementara akibat kebijakan pembatasan dan melemahnya perekonomian karena dampak pandemi COVID-19.

Posisi kedua kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah kategori Transportasi dan Pergudangan, yang tumbuh 7,87 persen. Mobilitas penduduk yang kembali meningkat pasca puncak pandemi, menyebabkan sektor transportasi baik laut maupun darat kembali sibuk. Aktivitas pergudangan dan pengiriman barang sebagai pendukung lapangan usaha lainnya juga kembali meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di semua lapangan usaha secara umum. Kebiasaan masyarakat untuk berbelanja *online* semasa pandemi di 2020 juga masih bertahan dan bahkan meningkat di 2021.

Kondisi perekonomian Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



B. Pendapatan Per Kapita

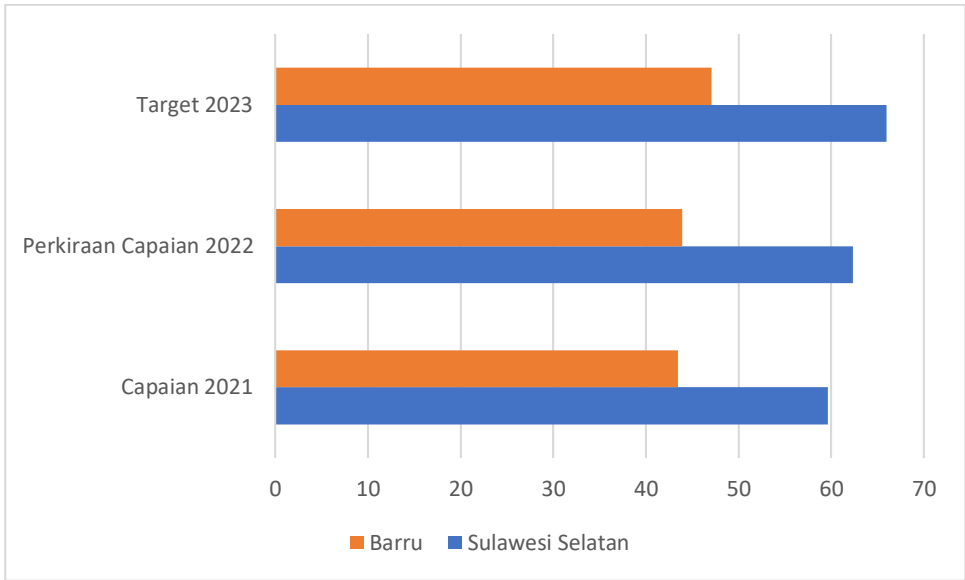
Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,80 juta rupiah kemudian tercatat menurun menjadi 40,36 juta di tahun 2020 lalu kembali meningkat pada 2021. Pada tahun 2021 PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB adalah sebesar 43,43 juta rupiah.

Kondisi pendapatan per kapita Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



C. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

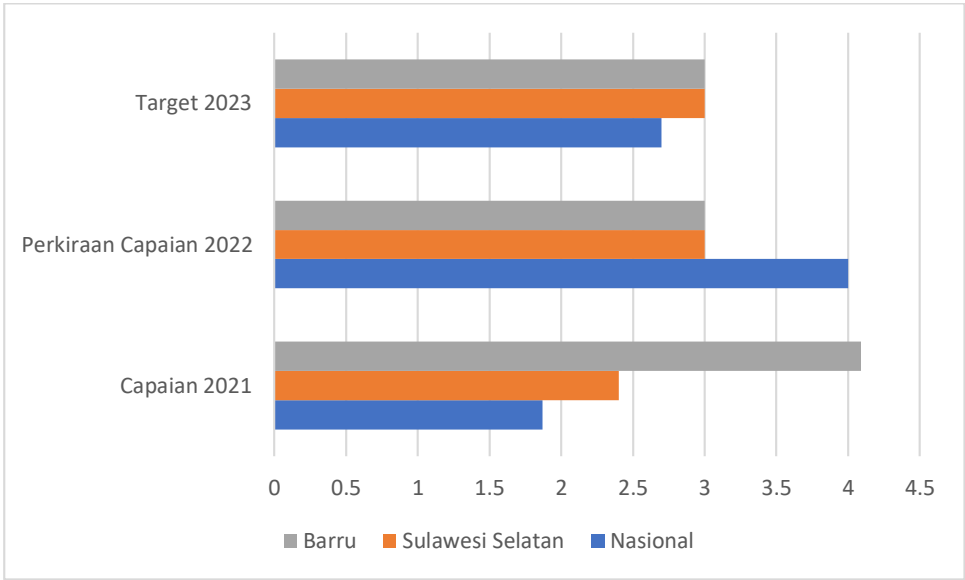
Pada tahun 2021, inflasi Sulsel dan Kabupaten Barru berada pada poin yang sama (2,04 persen) lebih tinggi dibandingkan Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan

ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2022 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2023 sebesar 3,0-1,0 persen.

Kondisi Inflasi Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3

Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan kondisi awal pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 37,43 persen poin pada Tahun 2021 atau setara dengan 1,56 juta orang. Peran pemerintah Kabupaten Barru terhadap kondisi perbaikan ini tidak terlihat, karena lebih tingginya tingkat pengangguran terbukanya yang berada pada angka 6,49 persen

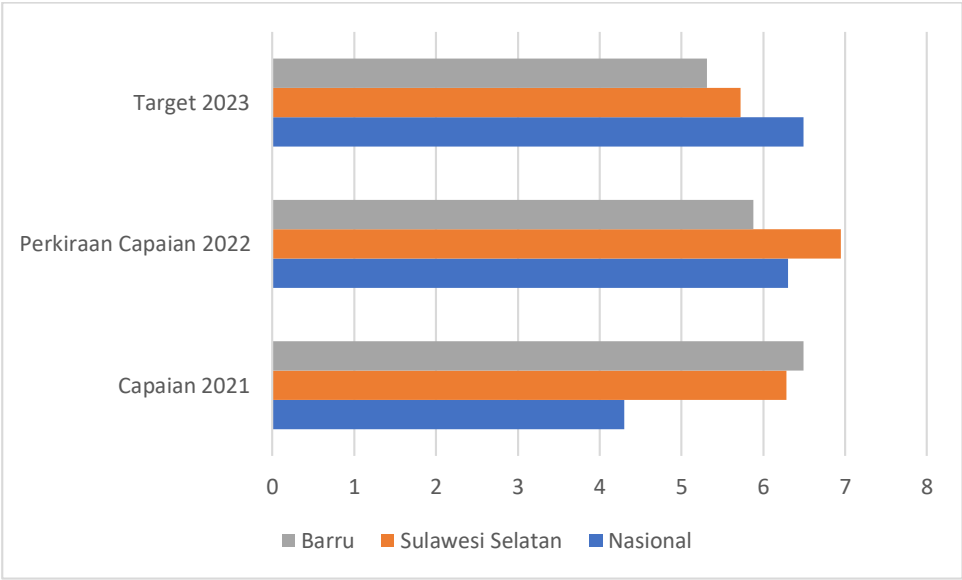
Melihat dari kondisi saat ini, , Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2022 masih memprediksikan capaian tingkat

pengangguran terbuka sebesar 6,16-6,95 persen atau masih lebih tinggi jika dibandingkan dari capaian tahun 2021 yang mencapai 5,72 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 6,49 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 6,28 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 6,0-5,30 persen.

Pemerintah ingin menguatkan perannya dengan menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada angka 5,88 pada tahun 2022 dan 5,31 pada tahun 2023. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.4

Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



E. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

- 1. Tingkat Kemiskinan;
- 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*),

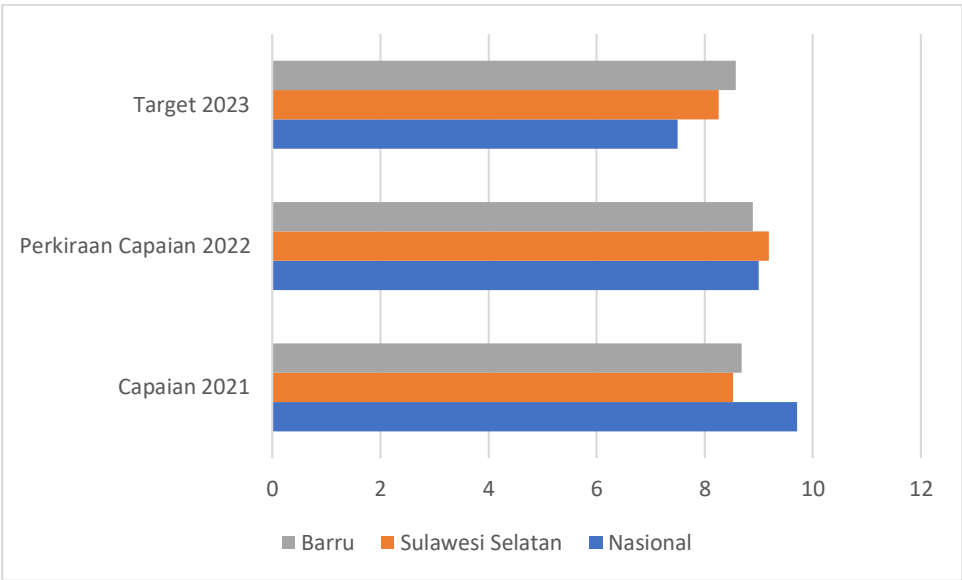
merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun gambaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru dan perannya terhadap penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



F. Gini Ratio

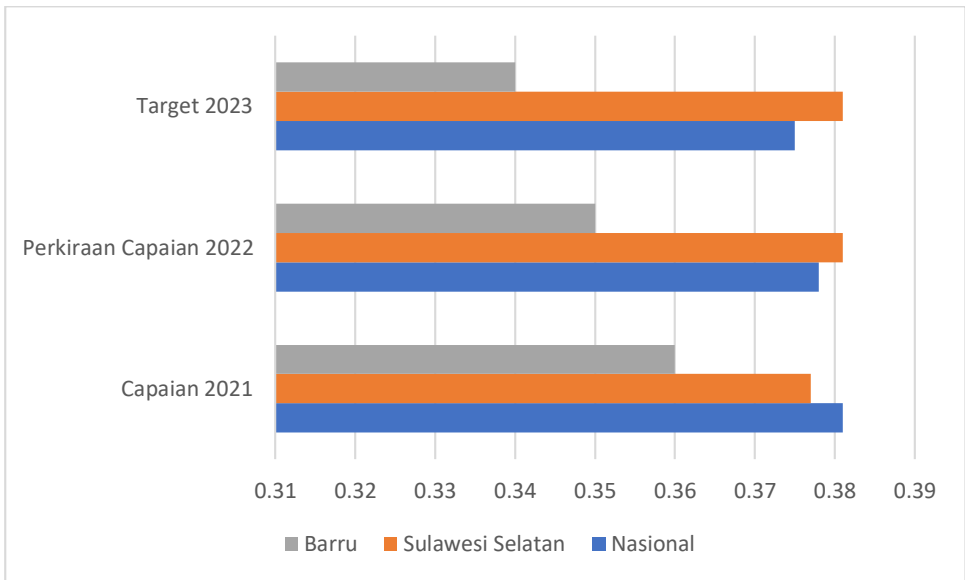
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Kabupaten Barru sebesar 0,36 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2021 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Kabupaten Barru di prediksi mencapai nilai 0,35. Dan di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376–0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360–0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat

namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik 3.6

Ratio Gini Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2023

Perkembangan kebijakan terkini terkait kebijakn fiscal, kebijakan moneter dan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain :

1. Kebijakan Pemindahan ibukota negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata Kelola wilayah ibukota negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibukota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Sebagai landasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan Nama Nusantara.
2. Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan pemuktahiran kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja, pengembangan system pajak daerah yang

efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Mengatur penguatan system pajak daerah dan retribusi daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Mengatur perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga. Undang-undang HKPD mendorong penggunaan creative financing untuk akselerasi pembangunan di daerah.

3. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah yang dituangkan Permenkeu RI Nomor 6/PMK.010/2022 yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2022. Kebijakan ini dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di sector industry perumahan guna mempercepat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. PPN ditanggung Pemerintah yang memenuhi ketentuan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun.
4. Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang ditanggung Pemerintah yang dituangkan dalam Permenkeu RI Nomor 5/PMK.010/2022 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Kebijakan ini untuk mendukung kelangsungan sector industry komponen otomotif dalam rangka percepatan pertumbuhan pemulihan ekonomi nasional dan dukungan pemerintah berupa kebijakan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang dutanggung pemerintah tahun anggaran 2022.
5. Kebijakan Insentif Pajak untuk wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid 19 yang dituangkan dalam Permenkeu RI Nomor 3/PMK.03/2022 yang ditetapkan tanggal 21 Januari 2022. Kebijakan ini mengingat bahwa belum berakhirnya pandemic coronavirus Disease 2019 dan pemberian insentif perpajakan yang diberikan secara selektif dengan

prioritas kepada sector tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan.

6. Kebijakan Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar yang dituangkan dalam permenkeu RI Nomor 1/PMK.010/2021 yang ditetapkan tanggal 5 januari 2022. Kebijakan ini terkait penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dan untuk mendorong potensi ekonomi dan peluang pasar ekspor komoditi industri berbahan dasar kelapa sawit guna menambah devisa negara serta melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar cangkang kernel sawit.

Adapun arah kebijakan pengelolaan sumberdaya ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 mencakup :

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
5. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi disektor rill dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan dengan memperhatikan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional yang diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Prioritas ini disusun berdasarkan tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Rumusan arah kebijakan ekonomi disusun dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Sulawesi Selatan antara lain :

1. Pengembangan komoditas sector unggulan pada kawasa pusat- pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka pengembangan komoditas sector unggulan dilakukan melalui sarana-prasarana pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengoptimalkan peran sumber-sumber pertumbuhan pada kawasan tersebut disertai penanggulangan kemiskinan. Pengembangan komoditas unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah yang diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut :

- a. Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b. Penguatan konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, maupun antar kawasan perdesaan khususnya pada daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu dan terintegrasi antar moda transportasi guna menghubungkan lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat pertumbuhan;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui penyediaan bahan baku yang mendukung peningkatan produksi ekonomi unggulan serta memacu pembangunan kawasan berbasis sumber daya alam dan jasa kemaritiman.
- d. Pengembangan komoditas sector unggulan pada kawasa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

2. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk:

- a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara
- b. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi yang menitikberatkan pada pengembangan produk pariwisata yang mempunyai nilai tambah tinggi serta unik, sehingga menarik minat wisatawan dan pengembangan produk wisata tersebut harus mendukung pelestarian lingkungan.
- c. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan focus pasar potensial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi wisatawan dibanding dengan volume atau jumlah wisatawan yang datang.
- d. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk menekankan pada perluasan segmen pasar untuk produk-produk ekonomi kreatif. Perluasan pasar yang dilakukan tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, namun juga pangsa pasar luar negeri. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan jangkauan maupun transaksi produk ekonomi kreatif Indonesia sehingga mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan pondasi ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan citra pariwisata daerah yang berdaya saing yang menitikberatkan pada pembangunan citra (branding) pariwisata nasional meliputi citra bangsa (national branding), citra

daerah/wilayah di Indonesia (regional branding) maupun citra destinasi pariwisata Indonesia (destination branding). Pengembangan citra dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan, peningkatan awareness hingga citra pariwisata daerah menjadi top of mind tujuan pariwisata.

- f. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Kehadiran teknologi berperan penting dalam mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, salah satunya sektor pariwisata. Oleh karenanya, digital marketing akan digunakan dalam pemasaran pariwisata dengan berkolaborasi dengan konten creator dan influencer.
 - g. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini fokus pada upaya mendapatkan investasi, baik dalam maupun luar negeri. Serta upaya mendapatkan pendanaan dan akses pembiayaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara merata sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya pemerataan ekonomi
 - h. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif yang fokus kepada penguatan komunitas maupun kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Berjalannya komunitas dan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu mendorong pertumbuhan bidang ini secara signifikan, merata dan menyeluruh.
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian daerah; Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program BUMDES, UMKM, KUBE serta perhutanan sosial.
 4. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam, pengembangan ekonomi maritim, dan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui :

a. Hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam

Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam dengan dukungan sarana-prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pendapatan masyarakat. Berdasarkan analisis pertumbuhan, terlihat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan lima tahun terakhir tidak cukup inklusif. Artinya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak cukup efektif mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan menyediakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan, maka perlu untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di atas pertumbuhan ekonomi. Dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tampaknya berasosiasi dengan dinamika kemiskinan di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di wilayah perdesaan yang bercorak pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan hilirisasi industri komoditas unggulan, terutama komoditas rumput laut, kakao, dan jagung. Hilirisasi ini diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan memperluas lapangan kerja baru sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pengembangan industri sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai nilai tambah tinggi menciptakan kesempatan kerja.

b. Pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan kedepan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk

menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Barru terkait peningkatan perekonomian daerah melalui :

1. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
2. Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas
3. Peningkatan Kualitas daya saing tenaga kerja
4. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada tahun 2022, pemerintah masih mengalami periode penanganan pandemic COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu fleksibilitas deficit APBD masih dioptimalkan untuk mendukung

penanganan COVID-19, dukungan untuk program vaksinasi dan pemulihan ekonomi Namun deficit APBD diupayakan secara gradual menurun sehingga risiko pembiayaan bisa terkendali.

Di tahun 2023, untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan dengan melakukan pengelolaan fiskal secara pruden melalui konsolidasi APBD secara bertahap. Defisit APBD dijaga terus mengecil semakin mendekati batas deficit 3% sementara itu primary balance diupayakan terus menuju positif melalui peningkatan pendapatan dan penguatan spending better serta inovasi pembiayaan. Upaya – upaya mendukung kesinambungan fiskal sebagai berikut :

- a. Mengakselerasi pemulihan ekonomi sehingga kapasitas perekonomian
- b. Melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* untuk memelihara momentum pemulihan ekonomi dengan upaya pengendalian risiko, sehingga konsolidasi tetap dilakukan secara konsisten dengan mendorong deficit anggaran kembali paling tinggi 3 persen di tahun 2023.
- c. Melakukan reformasi fiskal secara holistic baik untuk optimalisasi pendapatan penguatan spending better dan inovasi pembiayaan.
- d. Menjaga kerentanan fiskal dalam batas toleransi dengan mendorong optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better serta pengendalian utang lebih solid.

Untuk melanjutkan upaya-upaya tersebut dalam kaitannya antara Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja /pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan public. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Berbagai arah kebijakan terkait pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja ini tidak lepas dari arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijelaskan pada sub bab berikut ini.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut peraturan perundang – undangan pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah mengacu pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Selanjutnya ketentuan terkait Pendapatan Transfer mengacu pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Dana Perimbangan terdiri atas
 - 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- b. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- c. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

Struktur pendapatan diatas diharapkan dapat merespon kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru pada tahun 2023 yang akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Penyusunan postur pendapatan didasarkan pada realisasi pendapatan dari tahun 2017-2021 dan kondisi pendapatan pada tahun 2022 dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat sebesar 4 % melalui perkiraan potensi peningkatan masing masing jenis pendapatan daerah sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer diperkirakan menurun sebesar 2 persen. Penurunan ini diperkirakan karena tidak adanya lagi pendapatan melalui transfer antar daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 14 persen.

Untuk memenuhi asumsi pendapatan tersebut maka kebijakan keuangan diarahkan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penguatan system dan perluasan basis perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.
- b. Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah agar lebih produktif salah satunya dengan penerapan Highest dan Best Use (HBU).
- c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLUD.
- d. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari dana transfer umum dan dana transfer khusus.

Postur Pendapatan Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2022 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024

URAIAN (Sesuai PP 58/2005)	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi Tahun	Proyeksi Tahun
	2019	2020					2023	2024
PENDAPATAN	940.724.982.885	983.189.885.495	PENDAPATAN	983.189.885.495	942.012.409.292	895.019.636.566	1.058.778.310.996	1.058.141.002.086
Pendapatan Asli Daerah	103.887.386.166	113.328.226.000	Pendapatan Asli Daerah	113.328.226.000	91.063.263.147	79.368.076.620	81.127.696.557	84.830.806.385
Pajak Daerah	20.392.597.333	17.137.000.000	Pajak Daerah	17.137.000.000	20.401.700.919	22.870.000.000	21.809.150.000	22.546.332.500
Retribusi daerah	8.811.848.327	11.818.814.325	Retribusi daerah	11.818.814.325	6.573.775.240	7.666.681.177	8.045.581.342	8.447.860.410
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.434.009.603	9.447.705.156	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.447.705.156	9.198.474.101	8.942.135.943	9.389.242.740	9.858.704.877
Lain - Lain PAD Yang sah	65.248.930.903	74.924.706.519	Lain - Lain PAD Yang sah	74.924.706.519	54.889.312.887	39.889.259.500	41.883.722.475	43.977.908.598
Dana Perimbangan	727.828.548.389	760.679.004.000	Pendapatan Transfer		824.919.254.145	773.275.006.975	929.258.394.357	915.177.673.524
a.1. Dana bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak	14.017.026.525	13.519.350.000	Transfer Pemerintah Pusat		795.455.376.194	722.158.670.000	886.324.925.357	915.177.673.524
a.2. Dana alokasi umum	531.962.179.000	547.116.673.000	Dana Perimbangan		650.326.376.624,00	669.315.937.000	843.391.456.357	864.942.639.775
b. Transfer khusus (DAK)	157.311.242.864	164.067.917.000	a. Transfer Umum		505.197.377.054,00	498.110.204.000	521.776.459.357	539.612.234.451

Dana Insentif Daerah	24.538.100.000	35.975.064.000	a.1. Dana bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak	13.519.350.000	22.553.028.054,00	15.434.965.000	22.829.930.949	14.440.749.040
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	134.000.000.000	145,157,719,495.00	a.2. Dana alokasi umum	547.116.673.000	482.644.349.000,00	482.675.239.000	520.661.084.583	525.171.485.411
Hibah	22,407,918,371.00	23,191,559,650.00	b. Transfer khusus (DAK)	164.067.917.000	145.128.999.570,00	171.205.733.000,00	311.705.733.000	269.205.733.000
Dana darurat	-	-	Dana Insentif Daerah	35.975.064.000	52.320.458.000,00	9.909.264.000	9.909.264.000	56.124.672.324
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	111.139.229.959	121.966.159.845	Dana Desa		53.277.341.000,00	42.933.469.000	42.933.469.000	50.235.033.749
Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kab./Kota	43.901.994.559	37.213.818.245	Transfer Antar Daerah		-	51.116.336.975		
Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	61.600.653.000	74.459.452.000	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	121.966.159.845	95.024.970.521	42.376.552.971	48.392.220.082	58.132.522.177
Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	5.636.582.400	10.292.889.600	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	121.966.159.845	95.024.970.521	42.376.552.971	48.392.220.082	58.132.522.177

Tabel diatas memperlihatkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 58 tahun 2005 serta realisasi tahun 2021 unaudit dan APBD Tahun 2022 berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019.

940.724.982.885,- mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp.983.189.885.495,-. Peningkatan ini kemudian mengalami penurunan realisasi pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp. 942.012.209.291,-. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh Pandemi Covid 19. Refocusing anggaran dan penurunan transfer pusat juga merupakan penyebab turunnya realisasi pendapatan di Kabupaten Barru. Kemudian, pendapatan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barru yang dituangkan dalam APBD Tahun 2022 mengalami peningkatan. Penentuan besaran yg dilakukan berdasarkan permendagri yang mengatur tentang besaran pendapatan daerah melalui transfer pusat.

Pada tahun 2023 diproyeksikan total pendapatan daerah mengalami penurunan. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Realisasi APBD Tahun 2017 – 2021 dan Kondisi PBD 2022
2. Pendapatan transfer umum mengalami peningkatan dengan asumsi peningkatan hanya pada dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak sebesar dengan nilai sebesar Rp.22.829.930.949,-. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper* . Untuk Dana alokasi umum diasumsikan sama dengan tahun lalu.
3. Pendapatan Transfer untuk dana desa juga diasumsikan sama dengan tahun lalu.
4. Dana Intensif Daerah dengan asumsi tetap sama dibanding tahun sebelum dengan pertimbangan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Kabupaten Barru sebagai Lokus Stunting pada tahun 2023.
5. Penurunan total pendapatan mengalami penurunan dengan asumsi ditahun 2023 Pemerintah Kabupaten Barru sudah tidak menerima transfer antar daerah lagi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pendemi COVID-19 dan mendukung prioritas

pembangunan Kabupaten Barru. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBD sebagai instrument fiskal dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas serta optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian.

Untuk menjaga kualitas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barru, kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi structural pada reformasi SDM unggul (Kesehatan, perlindungan social, Pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi)
2. Penguatan Spending better, melalui :
 - a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (result based)
 - b. Efisiensi belanja non prioritas daerah dan nasional yaitu penajaman belanja melalui efisiensi belanja operasional, perjalanan dinas, penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga. Serta penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, Konektivitas, Pangan serta pembatasan pada pengadaan kendaraan dinas.
3. Penguatan quality control terhadap belanja daerah.

Struktur Belanja dalam APBD berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dibagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai, Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang- undangan.
- 2) Belanja Barang dan jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah
- 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh

kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan:

- 1) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten Barru kepada pemerintah Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD).

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi diasumsikan menurut sebesar 4,47% dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 2) Belanja Modal diperkirakan menurun sebesar 11,81% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022
- 3) Belanja tak terduga diasumsikan mengalami penurunan sebesar 46,9 %
- 4) Belanja transfer diasumsikan tidak mengalami perubahan.

Postur Belanja Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2022 serta rancangan tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perkembangan dan Proyeksi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2019

URAIAN (Sesuai PP 58/2005)	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019)	Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi Tahun	Proyeksi Tahun
	2019	2020				2023	2024
BELANJA	1.119.164.212.811	1.000.250.330.096	BELANJA	889.445.555.265	902.343.973.005	1.106.727.644.967	1.037.367.078.115
BELANJA TIDAK LANGSUNG	537.986.529.745	586.543.998.273	Belanja Operasi	659.980.715.569	689.193.204.551	745.551.447.338	776.792.008.313
Belanja Pegawai	409.278.623.405	404.844.798.065	Belanja Pegawai	403.999.557.353	432.767.864.027	463.544.059.073	456.659.295.496
Belanja Bunga	5.191.298.036	3.191.298.036	Belanja Barang dan jasa	230.369.385.317	248.628.456.884	265.922.560.036	301.711.235.758
Belanja subsidi			Belanja Bunga	1.558.257.404	3.191.298.036	3.191.298.036	3.058.303.789
Belanja Hibah	11.765.000.000	44.825.321.200	Belanja Subsidi	-	-		
Belanja Bantuan Sosial		-	Belanja Hibah	24.053.515.495	4.605.585.604	12.893.530.193	15.363.173.270
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	106.050.924.737	104.012.611.555	Belanja Bantuan Sosial				
Belanja Tidak Terduga	5.700.683.567	29.669.969.417	Belanja Modal	112.254.470.242	92.905.296.167	255.328.591.436	133.012.270.979
BELANJA LANGSUNG	581.177.683.066	413.706.331.823	Belanja tidak Terduga	11.507.218.331	24.291.396.287	9.893.530.193	12.449.951.692
Belanja Pegawai	44.844.889.464	38.323.871.604	Belanja Transfer	105.703.151.123	95.954.076.000	95.954.076.000	115.112.847.131
Belanja Barang dan Jasa	242.698.351.796	231.310.038.200	Belanja Bagi Hasil	-	-		
Belanja Modal	293.634.441.806	144.072.422.019	Belanja Bantuan Keuangan	105.703.151.123	95.954.076.000	95.954.076.000	115.112.847.131

Sumber : LRA 2018 – 2021, APBD 2022, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan

Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi belanja tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 58 tahun 2005 serta realisasi tahun 2021 unaudit dan APBD Tahun 2022 berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019.

Realisasi belanja pada tahun 2019 sebesar Rp. 992.414.128.555,- mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.015.385.318.265,-. Peningkatan ini kemudian mengalami penurunan realisasi pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp. 889.445.555.265,-. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh Pandemi Covid 19. Refocusing anggaran dan penurunan transfer pusat juga merupakan penyebab turunnya realisasi belanja di Kabupaten Barru. Pada tahun 2022 APBD Tahun 2022 di sisi belanja mengalami peningkatan menjadi Rp. **1.106.727.644.967-**.

Sedangkan untuk tahun 2023 total belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 22,65%. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Realisasi APBD Tahun 2017 – 2021 dan Kondisi APBD 2022
2. Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar 7,1% dengan nilai sebesar Rp 463.544.059.073,-. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper* dan asumsi gaji PPPK
3. Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar 6,95% dengan nilai sebesar Rp. 265.922.560.036,-. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper* dan pertimbangan inflasi.
4. Belanja Bunga diasumsikan tidak mengalami perubahan
5. Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar 179% dengan nilai sebesar Rp.12.893.530.193,-. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper*. Serta mempertimbangkan program prioritas Bupati terpilih.
6. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 174,82 %. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper* dan usulan DAK fisik di aplikasi krisna.

Perhitungan belanja terkait dengan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :

1. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil.
2. Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Perhitungan kerangka pendanaan dengan memperhatikan belanja wajib mengikat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Total Belanja Wajib Mengikat Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2023
A	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	463.554.059.073
2	Belanja Bunga	3.191.298.036
3	Belanja Bantuan Sosial	0
4	Belanja Transfer	95.954.076.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000
2	Pembayaran Pokok Utang	3.053.031.264
Total Belanja Wajib Mengikat		568.752.464.373

Pada tabel dapat dilihat bahwa komponen total belanja wajib mengikat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Transfer serta pengeluaran transfer yang besarannya sekitar 60 persen dari perkiraan penerimaan Kabupaten Barru Tahun 2023.

Untuk melihat Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1	Pendapatan	1.080.492.867.171
2	Pencairan dana cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	32.287.829.160
Total Penerimaan		1.106.727.644.967
Dikurangi		
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Mengikat		552.471.174.965
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal		516.773.809.006

Sumber : Data Olahan 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan diperoleh dari penjumlahan dari pendapatan, pencairan dana cadangan dikurangi total belanja wajib yaitu sebesar Rp. 552.471.174.965,-

Pada tabel selanjutnya memperlihatkan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah secara keseluruhan yang dibagi atas belanja pegawai, prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2023	Proporsi (%)
Total Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah		1.106.727.644.967	
1	Belanja Wajib Mengikat	552.471.174.965	49,91
2	Prioritas I	179.447.397.746	16,21
3	Prioritas II	274.580.502.749	24,81
4	Prioritas III	100.228.569.507	9,05

Sumber : Data Olahan 2022

Kapasitas rill ini kemudian diuraikan menjadi belanja untuk SPM sebagai prioritas I, Prioritas II Program prioritas kabupaten dan prioritas III belanja penunjang yang diuraikan pada tabel -tabel berikut :

Tabel 3.6

Prioritas 1

Belanja Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Barru Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	BIDANG	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	1.Pendidikan Anak usia dini	PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	64.569.285.405	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.Pendidikan Dasar				
	3.Pendidikan Kesetaraan				
	4.Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	108.788.964.333	DINAS KESEHATAN
	5.Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin				
	6.Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir				
	7.Pelayanan Kesehatan Bagi Balita				
	8.Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar				

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	BIDANG	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	9.Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif				
	10.Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut				
	11.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	12.Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus				
	13.Pelayanan Kesehatan Bagi gangguan jiwa berat				
	14.Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis				
	15.Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV				
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	298.931.630	DINAS SOSIAL
	2.Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar Panti				

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	BIDANG	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti				
	4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
	5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah Tanggap		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	335.634.088	
Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah	1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.010.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
	2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah				

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	BIDANG	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	3.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari- Hari	PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
	4.Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LIMBAH	500.000.000	
Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan	1.Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	KETENTRAMAN KETERTIBAN	PPROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.097.437.758	SATPOL PP
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.727.999.111	SATPOL PP
	1.Pelayanan Informasi Rawan Bencana			619.145.421	BPBD

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	BIDANG	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
	3.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana				
	4.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
TOTAL ANGGARAN SPM				179.447.397.746	

Tabel 3.7

Prioritas 2

Belanja Prioritas Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel;	Pelebagaan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berakuntabilitas	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	461.811.900	SEKRETARIAT DAERAH	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematang Ukpbj	Level 2	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Rkpd) Yang Sesuai Peraturan Per Uu Dan Ditetapkan Tepat Waktu	100%	404.000.000	BAPPEDA	
				Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Rpjmd	100%	120.000.000		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Perda Apbd Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Per Undang-Undangan	100%	105.414.362.414	BPKAD	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
				Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%		BPKAD	
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke Bpk Ri Tepat Waktu	100%		BPKAD	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan	100%	1.126.055.430	BPKAD	
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk)	B (61-80)	2.324.575.633	BKPSDM	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20 Jp Pertama	80%	1.344.851.500	BKPSDM	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan Bpk) Dan Internal (Apip) Yang Telah Ditindaklanjuti	90	2.507.762.000	INSPEKTORAT DAERAH	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Ktp-El	99%	293.246.000	DINAS DUKCAPIL	
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	172.773.000	DINAS DUKCAPIL	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	97,99	532.892.672	DINAS PMPTSPNAKER	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud (Spm)	100	64.569.285.405	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TELAH DIANGGARKAN DI SPM

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
				Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sd/Mi, Smp/Mts) (Spm)	100			
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Spm)	100			
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100	108.788.964.333	DINAS KESEHATAN	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
				Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100			
				Angka Status Gizi Masyarakat	91,57%			

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	84%			
				Indeks Keluarga Sehat	0,05			
				Persentase Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sdm Kesehatan Yang Kompeten Sesuai Standar Dan Peraturan Perundang-Undangan	83%	49.402.000	DINAS KESEHATAN	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Penduduk Yang Menerapkan Phbs	80	187.136.000	DINAS KESEHATAN	
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,73%	302.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA	
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	700	113.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
	Peningkatan Pengawasan Terhadap Harga Bahan Pangan	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	68	140.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	10	54.353.617	DINAS KOP, UKM & DAG	
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	547.567.202	DINAS TENAGA KERJA	
	Optimalisasi Perlindungan, Dan Jaminan Masyarakat Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	12,1	195.708.271	DINAS TENAGA KERJA	
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)	100	298.931.630	DINAS SOSIAL

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
				Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100			
				Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100			
				Persentase Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tna Sosial Di Luar Panti (Spm)	100			
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100			
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	538.683.987	DINAS SOSIAL	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
			Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	10,55%	2.800.000.000	DINAS KOP, UKM & DAG	
			Program Pengembangan UKM	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	0,90%	321.838.897	DINAS KOP, UKM & DAG	
Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Pma Dan Pmdn	350 M	335.604.949	DINAS PMPTSP	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6491 Ton	1.549.800.000	DINAS PERIKANAN	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahah Perikanan	1393 Ton	250.340.000	DINAS PERIKANAN	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	5.478.986.370	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR	
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	7,45	417.883.501	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	7,48%	2.047.450.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	2,95%	350.000.000		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,47%	3.733.150.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Sda Dan Lh	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28	96.670.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	81,63	3.873.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Akses Rumah Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	54,49	1.943.700.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan			Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	6,54	1.215.596.720		
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (Spm)	98,31 Layak Dan 66,31 Aman	500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Spm)	100	500.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	74,64	131.043.543.200	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Spm)	100	1.010.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (Spm)	100			
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan Memiliki Kelengkapan Psu (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	55	348.025.450	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Melalui Dermaga/Kapal Laut	2%	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana Dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Spm)	100	619.145.421	BPBD	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Spm)	100			
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Spm)	100			

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD	KETERANGAN
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Spm)	100	1.727.999.111	SATPOL PP DAN DAMKAR	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
				Waktu Tanggap (Response Time)	15	55.681.636		
			Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana Alam Dan Social Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Spm)	100	335.634.088	DINAS SOSIAL	TELAH DIANGGARKAN DI SPM
	Pelaksanaan Pencatatan Dan Registrasi Budaya Lokal	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cagar Dan Karya Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Wbth	0,22	798.383.300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Budaya Lokal Dan Situs Bersejarah Yang Dilestarikan Dan Ditetapkan Sebagai Wbth	0,75	140.066.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			TOTAL ANGGARAN PRIORITAS SETELAH DIKURANGI SPM			259.580.502.749		

Berdasarkan tabel prioritas diatas kemudian ditentukan pagu belanja perangkat daerah yang akan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Pagu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru

NO	SKPD	PAGU RKPD TAHUN 2023
1	Sekretariat DPRD	22.624.236.792
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.286.416.947
3	Badan Pendapatan Daerah	9.152.668.879
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	117.208.364.403
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.473.768.181
6	Inspektorat	9.015.300.248
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.111.118.082
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.418.233.769
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	301.149.211.319
10	Dinas Kesehatan/UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai	231.900.847.962
11	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	174.756.927.150
12	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.004.725.011
13	Dinas Sosial	4.456.598.624
14	Dinas Tenaga Kerja	3.196.730.988
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.380.686.735
16	Dinas PMDPPKBP3A	9.245.375.653
17	Dinas Lingkungan Hidup	7.264.165.907

NO	SKPD	PAGU RKPD TAHUN 2023
18	Dinas Kependudukan dan Capil	5.407.891.586
19	Dinas Perhubungan	10.967.903.688
20	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	9.497.044.184
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	10.036.822.370
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.557.198.509
23	Dinas Perikanan	5.252.007.500
24	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	14.081.713.214
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.408.244.024
33	Sekretariat Daerah	57.058.847.401
40	Kecamatan	34.814.595.842

Pagu yang tercantum pada tabel berupa pagu seluruh jenis belanja pada SKPD bersangkutan

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah berupa :

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent antara lain :

- 1. Mendorong pembiayaan inovatif diantaranya pengutan peran BUMD dan BLUD
- 2. Menjaga efektivitas pembiayaan investasi
- 3. Mengelola Sisa Anggaran Lebih pada level yang aman sebagai fiscal buffer melalui perbaikan manajemen kas.

Postur Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perkembangan dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru
Tahun 2019 - 2024

Uraian	2020	2021 (un audit)	2022 (APBD)	Proyeksi APBD 2023	Proyeksi APBD 2023
PEMBIAYAAN NETTO	79.681.326.283	66.312.768.955	10.324.336.339	26.234.797.796	23.639.498.238
Penerimaan Pembiayaan	83.734.357.547	71.365.800.219	13.377.367.703	32.287.829.160	29.692.529.602
Pengeluaran Pembiayaan	4.053.031.264	5.053.031.264	3.053.031.364	6.053.031.364	6.053.031.364

Sumber : LRA 2018 – 2021, APBD 2022, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan

3.2.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Hibah 5) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam periodisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barru pada tahun 2023 merupakan periode tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Dalam rangka menjamin azas keberlanjutan dan sinergitas pembangunan maka dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah didasarkan dari analisis terhadap **hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu** dan **capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD**, serta identifikasi **permasalahan** ditingkat **daerah** dan **nasional** yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial.

Dalam bab ini akan dimuat dua hal, yaitu; 1) menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2023; dan 2) penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2023.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi Pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kabupaten Barru Yang

Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Rumusan visi ini mengandung empat kata kunci visi yakni sejahtera, mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu “mewujudkan clean and good governance, masyarakat yang berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai agama”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Kabupaten Barru 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1

Tabel IV.1.

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
	Bernafaskan Keagamaan	Kondisi Ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya local
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel IV.2

Tabel IV.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2021 – 2026

No .	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang dimaksud pada misi ini adalah pelayanan dasar terhadap konsumen yakni pengendalian harga dan ketersediaan pangan
2		Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan lingkungan kondusif yang tangguh terhadap bencana serta menerapkan kearifan lokal,

		penguatan seni budaya lokal	memperkuat dan mengembangkan budaya-budaya lokal
3		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal	Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal dalam menunjang perekonomian daerah
4		Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah serta memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu
5		Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
6		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi	Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi

7		Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2023 menjadi landasan RKPD Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV. 3.

Tabel IV. 3
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru dan
Target Kinerja Tahun 2023

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
	Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan						
1	Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya						
	1	Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,13	71,79	72,26
	1	Sasaran : Meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	65,22	69,94	70,28
	2	Sasaran : Meningkatkan Usia harapan hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,49	76,69	76,93
	3	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	11,02	11,12	11,35
2	Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local						
	2	Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Poin	-	0,69	0,72
	4	Sasaran : Meningkatkan ketangguhan bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,004	0,011	0,009
	3	Tujuan : Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	0	5,45	7,25
	5	Sasaran : Terwujudnya Penguatan Seni Budaya	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	6,35	9,52	11,11
3	Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal						

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
	4	Tujuan : Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,28
	6	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,583	3,82	3,874
4	Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan						
	5	Tujuan : Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	5,47	5,91
	7	Sasaran : Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,27	51,94	52,52
	8	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,19	73,73	74
5	Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan						
	6	Tujuan : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Indeks Gini	Poin	0,36	0,35	0,34
	9	Sasaran : Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan Penurunan Angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,74	5,88	5,31
			Angka Kemiskinan	%	8,68	7,45	6,67
6	Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi						
	7	Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	46,34	65	70
	10	Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Nilai SAKIP	Poin	55,52	60	65
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,27	3,51	3,7
7	Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama						

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
	8	Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	7,6	6,5	6,1
	11	Sasaran : Meningkatnya penerapan Niai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,002	0,001	0,001

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun berdasrakan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2023 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2023 untuk menjaga keselarasan rencana pembangunan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua

Visi RPJMN 2020-2024

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden yang dituangkan kedalam sembilan poin Nawacita yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional 2023

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan tahun 2023 sebagai berikut : **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional

yang terdampak pandemi Covid-19, adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2023 ditunjukkan oleh gambar berikut :

Gambar 4.1



Sumber : Materi Kepala Bappenas di Kick Off RKP Tahun 2023

4.2.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis dibawah ini.

Gambar 4.2
Strategi pembangunan Tahun 2023

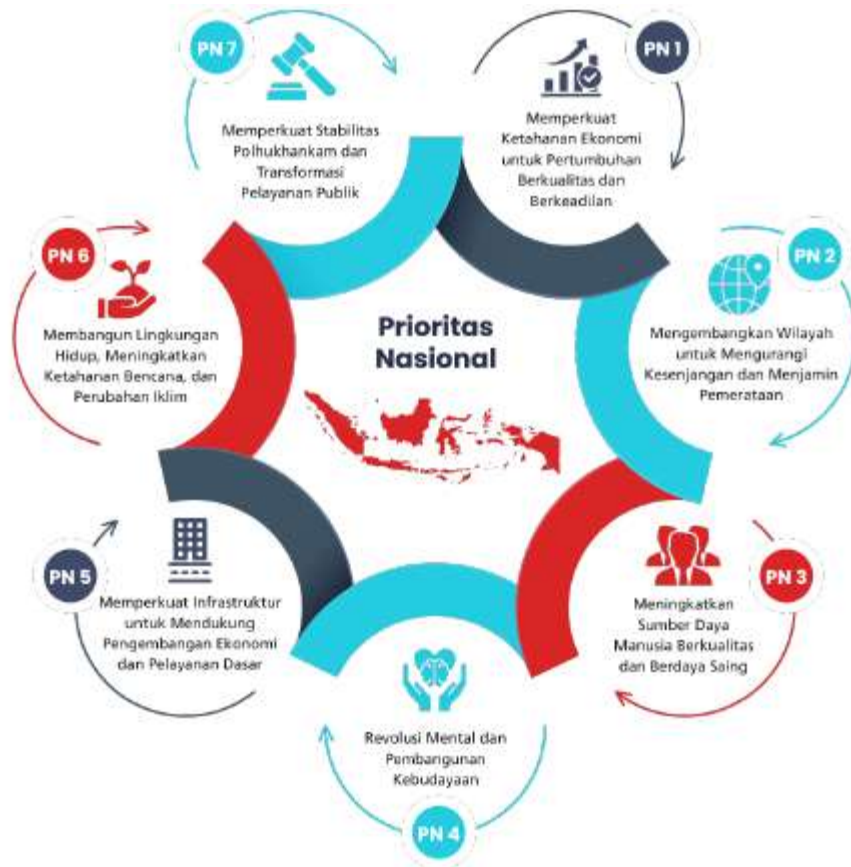


Sumber : Narasi Ranwal RKP 2023

4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan kedalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis dibawah ini.

Gambar 4.3
Prioritas Pembangunan Nasional 2023



Sumber : Narasi Ranwal RKP 2023

Sasaran rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan

ekspor rill barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) KTI, (b) indeks pembangunan manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
 - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI
3. Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (a) menurunkan angka kematian ibu (AKI), (b) menurunkan angka kematian bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberkulosis (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk > 18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks perlindungan anak (IPA), (b) indeks

- pembangunan gender (IPG), serta (c) indeks pembangunan pemuda (IPP)
- e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan
 - (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas,
 - (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam word class university,
 - (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta
 - (d) peningkatan peringkat global innovation index
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut :
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan indeks capaian revolusi mental, dan (b) peningkatan indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan.
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indeks pembangunan masyarakat.
 - d. Memperkuat moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalities kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang di modernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api (KA) sesuai standar track quality index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase caption on time performance (OTP) transportasi udara;
- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- d. Meningkatnya layanan energi dari ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar 4G
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
 - b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

- c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebahasaan, menguatnya kapasitas lembaga lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintahan;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
 - c. Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
 - e. Terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada

sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penguatan infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pembangunan manusia;
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas;
dan
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table berikut:

Tabel IV.4

Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2023	P- RPJMD
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/Angka	A (81 – 90)	A (81 – 90)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/Angka	A (>80–90)	A (>80–90)
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/Angka	A (4,51 – 5,0)	A (4,51 – 5,0)
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,567-0,607 (2021: 0,568)	0,607
		Meningkatnya aksesibilitas	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4	83,4

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2023	P- RPJMD
		infrastruktur wilayah					
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	6	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	65,98
			7	Tingkat Kemiskinan	%	7,45 (2021: 8,53)	7,45
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	8	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69 (2021: 5,72)	5,69
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	9	Rasio	Angka	0,376-0,381 (2021:0,377)	0,381
5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	10	IPM	Angka	73,05	73,05
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	11	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	67,05

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2023	P- RPJMD
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Indeks Kesehatan	Angka	77,86	77,86
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	13	Indeks Pembayaran Gender (IDG)	Angka	77.23	77.23
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	14	Angka Kriminalitas	Kasus	24,438	24,438
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04–6,52 (2021:4,675)	5,04–6,52
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	16	Produktifitas total daerah	Rp/- Angkatan Kerja	77.349.122	77.349.122
8	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	17	IKLH	Poin	73,24 (2021:73,22)	72,84

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2023	P- RPJMD
		secara berkelanjutan					
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	18	Potensi penurunan emisi GRK (Juta ton CO ₂ Eq)	Juta Ton CO ₂ Eq	1.347	1.347

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu **“Mewujudkan Clean and Good Governance, Masyarakat yang Berkarakter dan Berlandaskan Nilai-nilai Agama”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja;
4. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah; dan
6. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2023 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table berikut :

Tabel IV.5
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel;	Pelebagaan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berakuntabilitas	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	461.811.900	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematang Ukpbj	Level 2	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Rkpd) Yang Sesuai Peraturan Per Uu Dan Ditetapkan Tepat Waktu	100%	404.000.000	BAPPEDA
				Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Rpjmd	100%	120.000.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Perda Apbd Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Per Undang-Undangan	100%	104.218.767.249	BPKAD
				Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%	670.000.000	BPKAD
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke Bpk Ri Tepat Waktu	100%	710.000.000	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan	100%	1.097.333.830	BPKAD
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk)	B (61-80)	2.588.427.258	BKPSDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20 Jp Tahun	80%	1.145.006.500	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan Bpk) Dan Internal (Apip) Yang Telah Ditindaklanjuti	90	2.507.762.000	INSPEKTORAT DAERAH
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Ktp-El	99%	246.649.500	DINAS DUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	179.773.000	DINAS DUKCAPIL
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	97,99	532.892.672	DINAS PMPTSPNAKER

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud (Spm)	100	12.223.862.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sd/Mi, Smp/Mts) (Spm)	100	44.108.950.779	
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Spm)	100	5.833.526.700	
		Meningkatnya Usia Harapan	Program Pemenuhan	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan	100	980.571.125	DINAS KESEHATAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Hidup Masyarakat	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan (Spm)			
				Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100	193.395.810	
				Angka Status Gizi Masyarakat	91,57%	1.835.162.021	
				Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	84%	660.559.630	
				Indeks Keluarga Sehat	0,05	85.892.764.154	
				Persentase Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%	8.080.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sdm Kesehatan Yang Kompeten Sesuai Standar Dan Peraturan	83%	49.402.000	DINAS KESEHATAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
				Perundang-Undangan			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Penduduk Yang Menerapkan Phbs	80	187.136.000	DINAS KESEHATAN
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,73%	302.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	700	113.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
	Peningkatan Pengawasan Terhadap Harga Bahan Pangan	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	68	140.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	10	54.353.617	DINAS KOP, UKM & DAG

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
			Pokok Dan Barang Penting				
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	547.567.202	DINAS TENAGA KERJA
	Optimalisasi Perlindungan, Dan Jaminan Masyarakat Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks)		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	12,1	195.708.271	DINAS TENAGA KERJA
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)	100	75.931.630	DINAS SOSIAL
				Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh	100	42.000.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
				Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)			
				Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	42.000.000	
				Persentase Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tna Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	78.100.000	
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100	60.900.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	538.683.987	DINAS SOSIAL
			Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	10,55%	2.806.600.000	DINAS KOP, UKM & DAG
			Program Pengembangan Umkm	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	0,90%	321.838.897	DINAS KOP, UKM & DAG
Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Pma Dan Pmdn	350 M	335.604.949	DINAS PMPTSP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6491 Ton	1.550.400.000	DINAS PERIKANAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahah Perikanan	1393 Ton	250.920.000	DINAS PERIKANAN
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	5.478.986.370	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	7,45	417.883.501	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	7,48%	2.047.450.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	2,95%	350.000.000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,47%	9.507.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
	Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Sda Dan Lh	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28	260.458.733	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	81,63	1.598.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Akses Rumah Layak Huni	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	54,49	8.000.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan			Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	6,54	13.425.590.971	

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (Spm)	98,31 Layak Dan 66,31 Aman	1.651.045.360	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Spm)	100	3.764.022.649	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	74,64	38.863.998.923	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Spm)	100	1.607.775.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (Spm)	100	300.000.000	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan Memiliki Kelengkapan Psu (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	55,00	348.025.450	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Melalui Dermaga/Kapal Laut	2%	2.105.160.966	DINAS PERHUBUNGAN
Peningkatan Ketahanan Terhadap	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Peran	Meningkatnya Ketahanan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh	100	45.000.000	BPBD

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
Bencana Dan Pemajuan Kebudayaan	Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana	Terhadap Bencana		Layanan Informasi Rawan Bencana (Spm)			
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Spm)	100	424.145.421	
				Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Spm)	100	150.000.000	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Spm)	100	1.672.317.476	SATPOL PP DAN DAMKAR

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
				Waktu Tanggap (Response Time)	15	55.681.636	
			Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana Alam Dan Social Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Spm)	100	335.634.088	DINAS SOSIAL
	Pelaksanaan Pencatatan Dan Registrasi Budaya Lokal	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cagar Dan Karya Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Wbtb	0,22	657.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Budaya Lokal Dan Situs Bersejarah Yang Dilestarikan Dan Ditetapkan Sebagai Wbtb	0,75	181.450.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fokus prioritas perencanaan Tahun 2023 yang hendak diwujudkan telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah, dimana isu strategis daerah ini telah dirumuskan berdasarkan berbagai kebijakan dan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Barru. Adapun keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan daerah tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.5

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, issue strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab.Barru Tahun 2023

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2023
Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien	Penguatan reformasi birokrasi dan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;
Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pemenuhan pelayanan dasar	Perluasan dan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja;
Masih rendahnya daya saing daerah	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan;	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan;

Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur yang merata	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal	Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah;
Belum optimalnya penciptaan lingkungan yang kondusif	Peningkatan keamanan, penciptaan stabilitas daerah dan pengembangan seni budaya lokal;	Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan

4.2.3.1 Sinkronisasi Prioritas Kab/Kota terhadap Prioritas Provinsi dan Nasional

Dalam rangka konsistensi antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga Kabupaten kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi Prioritas pembangunan. Adapun sinergitas dan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BARRU
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter	Mewujudkan Clean and Good Governance, Masyarakat yang Berkarakter dan Berlandaskan Nilai-nilai Agama
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023		
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;	1. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan

Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	2. Penguatan infrastruktur wilayah; 3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan; 4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi; 5. Pembangunan manusia; 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas; dan 7. Pelestarian lingkungan hidup.	yang profesional, transparan, dan akuntabel; 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja; 4. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah; dan 6. Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan.

Tabel IV.7

Dukungan Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Daerah terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	PK 4	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan	T.5	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,91
						S.7	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	52,52
						S.8	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		74
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	PK 3	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja	T.6	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan	Indeks Gini		0,34

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023
		PP 4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi			S.9	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,31
								Angka Kemiskinan	%	6,67
PN 3	Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PP 5	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	PK 2	Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	T.1	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia		72,16
						S.1	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		70,28
						S.2	Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	Indeks Kesehatan		76,93
						S.3	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Paritas Daya Beli		11,35
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			PK 6	Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan	T.3	Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	7,25

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023
						S.5	Terwujudnya Penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	11,11
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP 2	Penguatan infrastruktur wilayah	PK 5	Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah	T.4	Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Indeks Williamson		0,28
						S.6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur		3,874
PN 6	Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	PN 7	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	PK 6	Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan	T.2	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		0,72
						S.4	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,009

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2023
PN 7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PP 1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	PK 1	Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel;	T.7	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70
						S.8	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Nilai SAKIP	Poin	65
								Indeks Pelayanan Publik		3,7
						T.8	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka Kriminalitas		6,1
						S.9	Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan Ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir		0,001

Sumber data : Data olah Bappelitbangda Tahun 2022

Tabel IV.8

Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (Ebt)	1 Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	-	
			2 Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Bnabati	-	
			3 Peningkatan Pelaksanaan Konservasi Dan Efisiensi Energi	-	
			4 Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	-	
			5 Pengembangan Industri Pendukung Ebt	-	
		2 Peningkatan Kualitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi	1 Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindungi (Kumulatif)	-	
			2 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	
			3 Penyediaan Air Untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP
			4 Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP
			5 Pemeliharaan, Pemulihan Dan Konserfasi Sumber Daya Air Dan Ekosistemnya Termasuk Revitalisasi Danau Dan Infrastruktur Hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				6	Pengembangan Waduk Multi Guna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP
		3	Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Komsumsi Pangan	1	Peningkatan Kualitas Komsumsi, Keamanan, Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan Untuk Menjaga Stabilitas Pasokan Dan Harga Kebutuhan Pokok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
				3	Peningkatan Produktifitas Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (Sdm) Pertanian, Perikanan Dan Kepastian Pasar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Penyuluhan Pertanian ; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ; Dinas Perikanan ; Dinas Koperindag
				4	Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, Dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian ; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			5 Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan	1 Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp) Dan Tata Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			2 Peningkatan Ekosistem Kelautan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			3 Peningkatan Produksi, Produktifitas, Standarisasi Mutu Dan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Dinas Perikanan
			4 Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, Dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Dinas Perikanan
			5 Peningkatan Sdm Dan Riset Kemaritiman Dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ;	Dinas Perikanan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
					Serta Databaase Kelautan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	
		5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menegah (Umkm) Dan Koperasi	1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah Besar	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperindag
				2	Peningkatan Kapasitas Usaha Dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperindag
				3	Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, Dan Inovasi Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperindag
				4	Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	
				5	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperindag
		6	Peningkatatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Insdustrialisasi	1	Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, Dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
				2	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter Dan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
					Kawasan Industri Terutama Di Luar Jawa		
				3	Peningkatan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Pariwisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
				4	Peningkatran Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Dan Usaha Kreatif Dan Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparpora
				5	Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
				6	Pengembangan Industri Halal	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperindag
		7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1	Peningkatan Diversifikasi Nilai Tambah, Dan Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
				2	Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				3	Pengelolaan Impor	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
				4	Peningkatan Kandungan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah Yang Efektif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
				5	Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produk Global	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
				6	Peningkatan Citra Dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Dan Destinasi Brending, Dan Produk Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparpora
				7	Peningkatan Efektifitas Prefential Trader Agreement (Pta)/ Free Trade Agreement (Fta)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) Dan Diplomasi Ekonomi		
		8		1	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
			Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi	2	Otimisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperindag
				3	Peningkatan Sistem Logistik Dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperindag
				4	Peningkatan Penerapan Praaktik Berkelanjutan Di Industri Pengolahan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Disparpora
				5	Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				6	Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperindag
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan Wilayah Sulawesi	1	Pengembangan Kawasan Strategis	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR dan PKP
				2	Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ; Dinas Perikanan ;

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				3	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUTR dan PKP
				4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, Dan Transmigrasi		
				5	Kelembagaan Dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1	Percepatan Cakupan Administarsi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas DUKCAPIL
				2	Integritas Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas DUKCAPIL
				3	Pendampingan Dan Layanan Terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas DUKCAPIL
				4	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk		Dinas DUKCAPIL
		2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				2	Bantuan Sosial Dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				3	Perlindungan Sosial Adatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				4	Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		3	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (Kb) Dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana KB	Dinas Kesehatan : DPMDPPKBPPP A
				2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				3	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				5	Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Afirmasi Askes Dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				3	Peningkatan Pengelolaan Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				4	Penjamin Mutu Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	1	Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMDPPKBPPP A
				2	Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMDPPKBPPP A
				3	Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disparpora
		6	Pengentasan Kemiskinan	1	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Sosial
				2	Keperantaraan Usaha Dan Dampak Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				3	Reforma Agraria		
				4	Perhutanan Sosial		

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
		7	Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing	1	Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3	Peningkatan Kapabilitas Iptek Dan Penciptaan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
				4	Prestasi Olah Raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disparpora
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalias Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	1	Revolusi Mental Dalam Sistem Pendidikan Untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja Gotong Royong, Dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
				2	Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, Dan Responsif	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
				3	Revolusi Mental Dalam Sistem Sosial Untuk Memperkuat Ketahana, Kualitas Dan Peran Keluarga Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Karekter	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				4	Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
				5	Pembangunan Dan Pemberdayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
				6	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Dan Patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
	2	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah	1	Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			2	Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Untuk Memperkuat Karakter Bangsa Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			3	Perlindungan Hak Kebudayaan Dan Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Budaya Yang Inklusif	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
			Perkembangan Peradaban Dunia	4	Pengembangan Diplomasi Budaya Untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia Dalam Perkembangan Peradaban Dunia	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					5	Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		3	Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, Dan Harmoni Sosial	1	Penguatan Cara Pandang, Sikap, Dan Praktik Beragama Dalam Prespektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dikalangan Umat Beragama		
				2	Penguatan Harmini Dan Kerukunan Umat Beragama		
				3	Penyelarasan Relasi Agama Dan Budaya		
				4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan		
				5	Pengembagngan Ekonomi Dan Sumber Daya Keagammaan		
		4	Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreatifitas Bagi	1	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan Berkarakter	2 Pengembangan, Pembinaan, Dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Dan Aksara Daerah, Serta Sastra 3 Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas Dan Daya Cipta 4 Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi Dan Inovasi	Program Pengelolaan Pendidikan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bappelitbangda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; Bappelitbangda
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau 2 Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman 3 Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku Berkelanjutan 4 Keselamatan Dan Keamanan Transportasi 5 Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ Program Penanggulangan Bencana	Dinas PUTR dan PKP Dinas PUTR dan PKP Dinas PUTR dan PKP Dinas Perhubungan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				6	Waduk Multipurpose Dan Modernisasi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA	Dinas PUTR dan PKP
		2	Infrastruktur Ekonomi	1	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
				2	Konektivitas Kereta api		
				3	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				4	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ	Dinas Perhubungan
		3	Infrastruktur Perkotaan	1	Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ	Dinas Perhubungan
				2	Infrastruktur Dan Ekosistem Tik Perkotaan	Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.	Dinas PUTR dan PKP ; Dinas Perhubungan; Dinas Kominfo-SP
				3	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau Di Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas PUTR dan PKP
		4	Energi Ketenaga Listrik	1	Keberlanjutan Penyediaan Energi Dan Ketenagalistrikan		

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				2	Akses Dan Keterjangkauan Energi Dan Ketenagalistrikan		
				3	Kecukupan Penyediaan Energi Dan Tenaga Listrik		
				1	Penuntasan Infrastruktur Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo-SP
		5	Transformasi Digital	2	Pemanfaatan Infrastruktur Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo-SP
				3	Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo-SP
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
				2	Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
				3	Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
				4	Penguatan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		2		1	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Dinas LH

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
			Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		3	Pembangunan Rendah Karbon	1	Pembangunan Energi Berkelanjutan		
				2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan		
				3	Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Dinas LH
				4	Pengembangan Industri Hijau		
				5	Rendah Karbon Pesisir Dan Laut		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
				2	Penguatan Kesetaraan Dan Kebebasan		
				3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo-SP
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1	Penguatan Integritas NKRI Dan Perlindungan WNI Di Luar Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Badan Kesbangpol

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
				Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		3	Penegakan Hukum Nasional	1 Penataan Regulasi	
				2 Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata	
				3 Penguatan Sistem Anti Korupsi	
				4 Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	
		4	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1 Penguatan Implementasi Manajemen Asn Berbasis Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah
				2 Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
				3 Penataan Kelembagaan Dan Proses Bisnis	
				4 Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	
		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1 Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				2 Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6
				3	Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Badan Kesbangpol

Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2022

Tabel IV.8

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
1	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintaha n dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola penyekenggara an pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	A (81 – 90)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	461.811.9 00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	A (>80– 90)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematang Ukpbj	Level 2	350.000.0 00	SEKRETARIAT DAERAH
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Perda Apbd Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Per	100%	104.218.7 67.249	BPKAD

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Undang-Undangan			
							Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%	670.000.000	BPKAD
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke Bpk Ri Tepat Waktu	100%	710.000.000	BPKAD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap	100%	1.097.333.830	BPKAD

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Tanah Dan Bangunan			
						Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk)	B (61-80)	2.588.427. 258	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20 Jp Pertahun	80%	1.145.006. 500	BKPSDM
						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Rkpd) Yang Sesuai Peraturan Per	100%	404.000.0 00	BAPPEDA

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Uu Dan Ditetapkan Tepat Waktu			
							Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Rpjmd	100%	120.000.0 00	
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan Bpk) Dan Internal (Apip) Yang Telah Ditindaklanjuti	90	2.507.762. 000	INSPEKTORAT DAERAH
		Berkembangny a inovasi dalam penyelenggaraa n pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	A (4,51 – 5,0)	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Ktp-El	99%	246.649.5 00	DINAS DUKCAPIL

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
		dan pelayanan public								
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	179.773.000	DINAS DUKCAPIL
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	97,99	532.892.672	DINAS PMPTSPNAKER
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Angka	0,567-0,607	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan	54,49	8.000.000.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Kabupaten/Kot a Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi			
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	83,4		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	6,54	13.425.59 0.971	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air	98,31 Layak Dan 66,31 Aman	1.651.045. 360	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Minum Sehari- Hari (Spm)			
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Spm)	100	3.764.022. 649	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
						Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kot a	74,64	38.863.99 8.923	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh	100	1.607.775. 000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Rumah Layak Huni (Spm)			
							Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (Spm)	100	300.000.000	
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan	55	348.025.450	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
						Utilitas Umum (Psu)	Memiliki Kelengkapan Psu (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)			
						Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Dermaga/Kapal Laut	2%	2.105.160.966	DINAS PERHUBUNGAN
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	65,98	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	10	54.353.617	DINAS KOP, UKM & DAG

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	547.567.202	DINAS TENAGA KERJA
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kot a	12,1	195.708.271	DINAS TENAGA KERJA
						Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	10,55%	2.806.600.000	DINAS KOP, UKM & DAG

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
						Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Baru Yang Berskala Mikro			
						Program Pengembangan Umkm	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	0,90%	321.838.8 97	DINAS KOP, UKM & DAG
			Tingkat Kemiskinan	%	7,45	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)	100	75.931.63 0	DINAS SOSIAL

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	42.000.000	
							Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	42.000.000	
							Persentase Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi	100	78.100.000	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Sosial Dasar Tna Sosial Di Luar Panti (Spm)			
							Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100	60.900.000	
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	538.683.987	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,69	Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	547.567.202	DINAS TENAGA KERJA

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
		unggulan daerah				Produktivitas Tenaga Kerja				
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kot a	12,1	195.708.271	DINAS TENAGA KERJA
						Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	10,55%	2.806.600.000	DINAS KOP, UKM & DAG

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
						Usaha Kecil Dan Usaha Mikro				
						Program Pengembangan Umkm	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	0,90%	321.838.8 97	DINAS KOP, UKM & DAG
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunkan kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Gini Rasio	Angka	0,376- 0,381	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60	547.567.2 02	DINAS TENAGA KERJA
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang	12,1	195.708.2 71	DINAS TENAGA KERJA

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kot a			
						Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	10,55%	2.806.600.000	DINAS KOP, UKM & DAG
						Program Pengembangan Umkm	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitas Standarisasi Dan Sertifikasi	0,90%	321.838.897	DINAS KOP, UKM & DAG

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Produk Usaha Mikro			
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)	100	75.931.630	DINAS SOSIAL
							Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	42.000.000	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	42.000.00 0	
							Persentase Warga Negara/Geland angan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tna Sosial Di Luar Panti (Spm)	100	78.100.00 0	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100	60.900.00 0	
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	538.683.9 87	DINAS SOSIAL
5	Akselerasi pembanguna n Sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	IPM	Angka	73,05	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,73%	302.000.0 00	DINAS PMDPPKBPPPA

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	700	113.000.000	DINAS PMDPPKBPPPA
						Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Spm)	100	45.000.000	BPBD
							Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Spm)	100	424.145.421	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Spm)	100	150.000.000	
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Spm)	100	1.672.317.476	SATPOL PP DAN DAMKAR

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
							Waktu Tanggap (Rensponse Time)	15	55.681.636	
						Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana Alam Dan Social Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Spm)	100	335.634.088	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Pendidikan	Angka	67,05	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6	100	12.223.862.400	DINAS PENDIDIKAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
		Pemerataan Pendidikan					Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud (Spm)			DAN KEBUDAYAAN
							Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sd/Mi, Smp/Mts) (Spm)	100	44.108.950.779	
							Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan	100	5.833.526.700	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Spm)			
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	77,86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100	980.571.1 25	DINAS KESEHATAN
							Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100	193.395.8 10	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Angka Status Gizi Masyarakat	91,57%	1.835.162. 021	
							Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	84%	660.559.6 30	
							Indeks Keluarga Sehat	0,05	85.892.76 4.154	
							Persentase Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%	8.080.000	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sdm Kesehatan Yang Kompeten Sesuai Standar Dan Peraturan	83%	49.402.00 0	DINAS KESEHATAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
							Perundang- Undangan			
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Penduduk Yang Menerapkan Phbs	80	187.136.0 00	DINAS KESEHATAN
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	68	140.000.0 00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Kasus	24,438	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cagar Dan Karya Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Wbtb	0,22	657.000.0 00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Budaya Lokal Dan Situs Bersejarah Yang Dilestarikan Dan Ditetapkan Sebagai Wbtb	0,75	181.450.0 00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	Pemberdayaa n ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04– 6,52	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6491 Ton	1.550.400. 000	DINAS PERIKANAN
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas total daerah	Rp/- Angkat an Kerja	77.349.1 22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahah Perikanan	1393 Ton	250.920.0 00	DINAS PERIKANAN

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangun an Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembanguna n Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATI F	OPD
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	5.478.986. 370	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
						Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	7,45	417.883.5 01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	7,48%	2.047.450. 000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	2,95%	350.000.0 00	

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
N o	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,47%	9.507.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Pma Dan Pmdn	350 M	335.604.949	DINAS PMPTSP
8	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH	Poin	73,24	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28	260.458.733	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta	Potensi penurunan emisi GRK	Juta Ton CO ₂ Eq	1.347	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Tertangani	81,63	1.598.950.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Provinsi Sulawesi Selatan						Program Prioritas Kabupaten Barru				
No	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF	OPD
		kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	(Juta ton CO ₂ Eq)							

Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2022

Tabel IV.9

Perbandingan Capaian 2021, Perkiraan Tahun 2022 dan Target 2023
terkait Indikator Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No	Indikator Pembangunan Nasional	Capaian 2021	Perkiraan Tahun 2022	Target 2023	Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Capaian 2021	Perkiraan Tahun 2022	Target 2023	Indikator Pembangunan Kabupaten Barru	Capaian 2021	Perkiraan Tahun 2022	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,69	5,90	5,3 - 5,9	Pertumbuhan Ekonomi	4,65	4,62-5,98	5,04-6,52	Pertumbuhan Ekonomi	4,77%	5,47	5,91
2	Tingkat Kemiskinan	9,81	9,00	7,5 - 8,5	Tingkat Kemiskinan	8,53	8,1	7,45	Tingkat Kemiskinan	8,68%	7,45	6,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20	3,80	5,3 - 6,0	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72	5,9	5,69	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,74	5,88	5,31
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,51	74,01	73,11 - 73,49	Indeks Pembangunan Manusia	72,24	72,57	73,05	Indeks Pembangunan Manusia	71,13	71,79	72,16
5	Rasio Gini	0,39	0,37	0,375 - 0,378	Rasio Gini	0,377	0,381	0,381	Rasio Gini	0,36	0,35	0,34
6	Penurunan Emisi GRK	26,00	26,70	27,02	Penurunan Emisi GRK	1,13	1,198	1,347	Penurunan Emisi GRK	0,96	1,198	1,347

Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2022

4.2.3.2 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Barru

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2023 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menjabarkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD tahun 2023 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokokpokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 1.217 usulan. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan

RKPD tahun 2023. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana .
2. Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan
3. Peningkatan sarana prasarana infrastruktur jalan
4. Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
6. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
7. Pengembangan destinasi wisata dalam menunjang ekonomi masyarakat

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2023 Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III disajikan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.106.727.644.966,83. Belanja daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah tahun 2023 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2023.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2023

NO	URAIAN	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
2	BELANJA DAERAH	1.106.727.644.966,83	1.037.367.078.115
2.1	Belanja Operasi	745.551.447.338	776.792.008.313
2.1.1	Belanja Pegawai	463.544.059.073	456.659.295.496
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.922.560.036	301.711.235.758
2.1.3	Belanja Bunga	3.191.298.036	3.058.303.789
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	12.893.530.193	15.363.173.270
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.2	Belanja Modal	255.328.591.436	133.012.270.979
2.2.1	Belanja Modal	255.328.591.436	133.012.270.979
2.3	Belanja Tidak Terduga	9.893.530.193	12.449.951.692
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.893.530.193	12.449.951.692
2.4	Belanja Transfer	95.954.076.000	115.112.847.131
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95,954,076,000	115.112.847.131

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 6 (Enam) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan 1 sasaran dan dijabarkan kedalam 11 program prioritas, Prioritas kedua Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan 3 sasaran dan dijabarkan kedalam 8 program prioritas, Prioritas ketiga Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Perluasan kesempatan kerja dengan 1 sasaran dan dijabarkan kedalam 6 program prioritas, Prioritas keempat Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan

lingkungan dengan 2 sasaran dan dijabarkan kedalam 9 program prioritas, Prioritas kelima Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah dengan 1 sasaran dan dijabarkan kedalam 7 program prioritas, dan Prioritas keenam Peningkatan Ketahanan terhadap Bencana dan Pemajuan Kebudayaan dengan 2 sasaran dan dijabarkan kedalam 5 program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan dengan 10 (sepuluh) sasaran dan 46 (Empat Puluh Enam) program prioritas sebagaimana dijabarkan pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2

Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Peningkatan Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel;	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Pelayanan Publik Yang Baik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	461,811,900	Level 2	507,993,090	SEKRETARIAT DAERAH
			2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematang Ukpbj	Level 2	350,000,000	Level 3	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
			3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rpjpd, Rpjmd, Rkpd) Yang Sesuai Peraturan Per UU Dan Ditetapkan Tepat Waktu	100%	404,000,000	100%	1,174,000,000	BAPPEDA
					Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Rpjmd	100%	120,000,000	100%	150,000,000	
			4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Perda Apbd Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Per Undang-Undangan	100%	105,414,362,414	100%	119,336,478,367	BPKAD
					Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%		100%		BPKAD

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
					Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke Bpk Ri Tepat Waktu	100%		100%		BPKAD
			5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan	100%	1,126,055,430	100%	1,202,067,213	BPKAD
			6	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk)	B (61-80)	2,324,575,633	B (61-80)	3,001,401,676	BKPSDM
			7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 20 Jp Tahun	80%	1,344,851,500	80%	976,854,500	BKPSDM
			8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan Bpk) Dan Internal (Apip) Yang Telah Ditindaklanjuti	90%	2,507,762,000	90%	2,552,839,000	INSPEKTORAT DAERAH
			9	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Ktp-El	99%	293,246,000	99%	256,463,500	DINAS DUKCAPIL
			10	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	172,773,000	99%	181,525,750	DINAS DUKCAPIL
			11	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-	97.99%	532,892,672	98.98%	543,550,525	DINAS PMPTSPNAKER

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
					Undangan					
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	12	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud (Spm)	100%	64,569,285,405	100%	60,772,727,979	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Sd/Mi, Smp/Mts) (Spm)	100%		100%		
					Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Spm)	100%		100%		
		Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%	108,788,964,333	100%	90,466,238,067	DINAS KESEHATAN

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
				Masyarakat	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%		100%		
					Angka Status Gizi Masyarakat	91.57%		92.03%		
					Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	84%		85%		
					Indeks Keluarga Sehat	0.05		0.06		
					Persentase Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Spm)	100%		100%		
			14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sdm Kesehatan Yang Kompeten Sesuai Standar Dan Peraturan Perundang-Undangan	83%	49,402,000	92%	49,896,000	DINAS KESEHATAN
			15	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Persentase Penduduk Yang Menerapkan Phbs	80%	187,136,000	82%	128,007,360	DINAS KESEHATAN
			16	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0.73%	302,000,000	0.63%	305,000,000	DINAS PMDPPKBPPPA
			17	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	700	113,000,000	750	115,000,000	DINAS PMDPPKBPPPA

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
		Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	18	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	68%	140,000,000	72%	140,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			19	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	≥10	54,353,617	≥10	55,440,690	DINAS KOP, UKM & DAG
3	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	20	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60%	547,567,202	63.08%	558,518,546	DINAS TENAGA KERJA
			21	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	12.1%	195,708,271	14.4%	199,622,437	DINAS TENAGA KERJA
			22	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (Spm)	100%	298,931,630	100%	305,946,579	DINAS SOSIAL
					Persentase Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100%		100%		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
				Persentase Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti (Spm)	100%		100%			
				Persentase Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tna Sosial Di Luar Panti (Spm)	100%		100%			
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100%		100%			
			23	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100%	538,683,987	100%	564,368,187	DINAS SOSIAL
			24	Pprogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	10.55%	2,800,000,000	10.97%	2,806,600,000	DINAS KOP, UKM & DAG
			25	Program Pengembangan UKM	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Usaha	0.90%	321,838,897	1.12%	328,275,675	DINAS KOP, UKM & DAG

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
					Mikro					
4	Pengembangan Potensi Sumberdaya Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Perekonomian Daerah	26	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Pma Dan Pmdn	350 M	335,604,949	465 M	342,317,048	DINAS PMPTSP
			27	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6491 Ton	1,549,800,000	6625 Ton	1,580,802,000	DINAS PERIKANAN
			28	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahah Perikanan	1393 Ton	250,340,000	1407 Ton	255,938,400	DINAS PERIKANAN
			29	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	5,478,986,370	2%	5,602,835,007	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
			30	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	7.45%	417,883,501	6.94%	419,972,919	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
			31	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	7.48%	2,047,450,000	7.98%	2,172,899,500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	2.95%	350,000,000	3.45%	350,000,000	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
			32	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1.47%	3,733,150,000	1.50%	9,420,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Terpadu	33	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28%	96,670,400	26%	289,882,582	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			34	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sampah Yang Tertangani	81.63%	3,873,600,000	82%	1,658,845,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	35	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	54.49%	1,943,700,000	55.32%	9,000,000,000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
					Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota	6.54%	1,215,596,720	7.37%	13,369,558,644	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD	
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN		
			36	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari (Spm)	98,31 Layak Dan 66,31 Aman	500,000,000	98,87 Layak dan 68,21 aman	1,880,066,267	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			37	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Spm)	100%	500,000,000	100%	3,799,303,102	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			38	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	74.64	131.043.543.200	78,80	39,835,208,717	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
			39	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Spm)	100%	1,010,000,000	100%	1,907,775,000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
					Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (Spm)	100%		100%		
			40	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan Memiliki Kelengkapan Psu (Prasarana, Sarana	55%	348,025,450	57%	348,025,450	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
					Dan Utilitas Umum)					
			41	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Melalui Dermaga/Kapal Laut	2%	600,000,000	2%	2,147,264,185	DINAS PERHUBUNGAN
6	Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana Dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	42	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Spm)	100%	619,145,421	100%	631,528,330	BPBD
					Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Spm)	100%		100%		
					Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Spm)	100%		100%		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET TAHUN 2023		TARGET TAHUN 2024		OPD
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
			43	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Spm)	100%	1,727,999,111	100%	1,705,763,825	SATPOL PP DAN DAMKAR
					Waktu Tanggap (Response Time)	15	55,681,636	15	56,795,268	
			44	Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana Alam Dan Social Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Spm)	100%	335,634,088	100%	343,915,792	DINAS SOSIAL
		Terwujudnya Penguatan Seni Budaya Dan Kearifan Lokal	45	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Cagar Dan Karya Budaya Yang Ditetapkan Sebagai Wbtb	0.22%	798,383,300	0.44%	657,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			46	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Budaya Lokal Dan Situs Bersejarah Yang Dilestarikan Dan Ditetapkan Sebagai Wbtb	0.75%	140,066,700	1%	24,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 5.3

Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan /Sub Kegiatan)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		OPD PENANGGU NGJAWAB
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	1					BIDANG PENDIDIKAN									
1	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA			100%	235,781,542,614	DAU			235,791,542,614	Sekretariat
1	1	01	2	02		Administraasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan			233,986,446,640				233,986,446,640	Sekretariat
1	1	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Barru		233,986,446,640				233,986,446,640	Sekretariat
1	1	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional/Struktrual			150,000,000				160,000,000	Sekretariat
1	1	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Barru	14 orang	150,000,000	DAU		14 orang	160,000,000	Sekretariat
1	1	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			320,082,904				320,082,904	Sekretariat
1	1	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	2 Paket	137,135,204	DAU		2 Paket	137,135,204	Sekretariat

1	1	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barru	1 Laporan	182,947,700	DAU		1 Laporan	182,947,700	Sekretariat
1	1	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			60,000,000				60,000,000	Sekretariat
1	1	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Barru	3 Unit	60,000,000	DAU		3 Unit	60,000,000	Sekretariat
1	1	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor			632,513,070				632,513,070	Sekretariat
1	1	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Barru	4 Laporan	328,389,996	DAU		4 Laporan	328,389,996	Sekretariat
1	1	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Barru	3 Laporan	170,923,074	DAU		3 Laporan	170,923,074	Sekretariat
1	1	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	1 Laporan	133,200,000	DAU		1 Laporan	133,200,000	Sekretariat
1	1	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			632,500,000				632,500,000	Sekretariat
1	1	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Barru	52 Unit	65,000,000	DAU		52 Unit	65,000,000	Sekretariat
1	1	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Barru	4 Unit	27,500,000	DAU		4 Unit	27,500,000	Sekretariat
1	1	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Barru	4 Unit	540,000,000	DAU		4 Unit	540,000,000	Sekretariat

1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/SDLB		100.00%	64,569,285,405			100.00%	63,175,673,505	Diknasbud
							APK SMP/Paket B		100.00%				100.00%		
							Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs		100.00%				100.00%		
							Angka Lulusan SD/MI		100.00%				100.00%		
							Angka Lulusan SMP/MTs		96.70%				96.70%		
1	0	0	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung Pengelolaan Pendidikan SD		70%	38,836,986,955			17 Jenis	27,581,268,055	Diknasbud
1	0	0	2	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Barru	4 Ruang	896,150,000	DAU/DAK		3 Ruang	510,000,000	Diknasbud
							Pembangunan Ruang Kelas UPTD SD NEGERI 174 BARRU	Pujananting	1 Ruang	216,150,000	DAK				
1	0	0	2	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Barru	3 Ruang	1,680,625,700	DAU/DAK		2 Ruang	570,683,800	Diknasbud
							Pembangunan Ruang Guru UPTD SD NEGERI 26 BARRU	Barru	1 Ruang	206,150,000	DAK				
							Pembangunan Ruang Guru UPTD SD NEGERI 60 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	206,150,000	DAK				
							Pembangunan Ruang Guru UPTD SD NEGERI 49 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	206,150,000	DAK				
							Pembangunan Ruang Guru UPTD SD NEGERI 170 BARRU	Pujananting	1 Ruang	206,150,000	DAK				
1	0	0	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Barru	1 Ruang	75,000,000	DAU/DAK		2 Ruang	150,000,000	Diknasbud
1	0	0	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Barru	26 Unit	7,108,772,000	DAU/DAK		6 Unit	841,945,000	Diknasbud

							Pembangunan Pagar UPTD SDN 99 BARRU	Menrong, Tanete Riaja	100 meter	100,000,000	DAU	Musrembang		100,000,000	Diknasbud
							Pembangunan Pagar UPTD SDN 132 BARRU	Nepo, Mallusetasi	300 meter	100,000,000	DAU	Musrembang		100,000,000	Diknasbud
							Pemasangan Paving Block UPTD SDN 117 BARRU	Lawallu, Soppeng Riaja	15x50 meter	50,000,000	DAU	Musrembang		50,000,000	Diknasbud
							Pemasangan Paving Block UPTD SDN 35 BARRU	Pao Lipukasi Tanete Rilau	400 meter	50,000,000	DAU	Musrembang		50,000,000	Diknasbud
							Pemasangan Paving Block UPTD SDN 43 BARRU	Lajari Tanete Rilau	15 x 20 meter	50,000,000	DAU	Musrembang		50,000,000	Diknasbud
							Rehab Pagar UPTD SDN 17 Barru	Kamara Barru	100 meter	50,000,000	DAU	Musrembang		50,000,000	Diknasbud
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SDN 118 Barru	Soppeng Riaja	2 Ruang	213,264,000	DAK				
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SDN 115 Barru	Soppeng Riaja	4 Ruang	426,528,000	DAK				
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SDN 170 Barru	Pujananting	4 Ruang	426,528,000	DAK				
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SDN 154 Barru	Pujananting	4 Ruang	426,528,000	DAK				
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SDN 49 Barru	Tanete Rilau	2 Ruang	213,264,000	DAK				
							Rehab Perpustakaan RUPTD SDN 170 Barru	Pujananting	1 Ruang	118,106,000	DAK				
							Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 174 BARRU	Pujananting	1 Ruang	124,244,000	DAK				
							Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 60 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	124,244,000	DAK				
							Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 69 BARRU	Tanete Rilau	2 Ruang	124,244,000	DAK				
							Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 41 BARRU	Tanete Rilau	3 Ruang	124,244,000	DAK				
							Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 89 BARRU	Tanete Riaja	2 Ruang	124,244,000	DAK				

						Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 18 BARRU	Barru	2 Ruang	124,244,000	DAK				
						Pembangunan Toilet (Jamban) UPTD SD NEGERI 1 BARRU	Barru	4 Ruang	124,244,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 26 BARRU	Barru	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 18 BARRU	Barru	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 46 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 49 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 60 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 77 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 96 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 126 BARRU	Mallusetasi	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 129 BARRU	Mallusetasi	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 118 BARRU	Soppeng Riaja	1 Ruang	75,306,000	DAK				

						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 116 BARRU	Soppeng Riaja	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 170 BARRU	Pujananting	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 154 BARRU	Pujananting	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 174 BARRU	Pujananting	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 190 BARRU	Balusu	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SD NEGERI 183 BARRU	Balusu	1 Ruang	75,306,000	DAK				
						Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 34 BARRU	Barru	1 Ruang	216,150,000	DAK				
						Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 18 BARRU	Barru	1 Ruang	216,150,000	DAK				
						Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 115 BARRU	Soppeng Riaja	1 Ruang	216,150,000	DAK				
						Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 116 BARRU	Soppeng Riaja	1 Ruang	216,150,000	DAK				
						Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 118 BARRU	Soppeng Riaja	1 Ruang	216,150,000	DAK				
						Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 121 BARRU	Soppeng Riaja	1 Ruang	216,150,000	DAK				

							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 41 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	216,150,000	DAK					
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 49 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	216,150,000	DAK					
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 60 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	216,150,000	DAK					
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 96 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	216,150,000	DAK					
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 170 BARRU	Pujananting	1 Ruang	216,150,000	DAK					
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 154 BARRU	Pujananting	1 Ruang	216,150,000	DAK					
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SD NEGERI 190 BARRU	Balusu	1 Ruang	216,150,000	DAK					
1	01	02	2	01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Barru	2 Unit	403,525,000	DAU/DAK		2 Unit	403,525,000	Diknasbud	
							Pembangunan Perumahan Guru UPTD SDN 164 BARRU	Jembulu, Pujananting	1 Unit	180,000,000	DAU	POKIR		180,000,000	Diknasbud	
							Pembangunan Perumahan Guru UPTD SDN 156 BARRU	Barang pujananting	1 Unit	180,000,000	DAU	Usulan Sekolah		180,000,000	Diknasbud	
1	01	02	2	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Barru	15 Ruang	3,237,800,000	DAU/DAK		12 Ruang	1,170,000,000	Diknasbud	
							Rehab Plafond UPTD SDN 76 BARRU	Rumpiae, T. Riaja	1 Ruang	35,000,000	DAU	POKIR/		35,000,000	Diknasbud	
							Rehab Gedung UPTD SDN 174 BARRU	Patallassang, Pujananting	3 Ruang	150,000,000	DAU	POKIR		150,000,000	Diknasbud	
							Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 172	Lappatemma, Pujananting	20 Meter	150,000,000	DAU	POKIR		150,000,000	Diknasbud	

								BARRU/ Kelas Jauh Labaka									
								Rehab Lantai Kelas UPTD SDN 119 BARRU	Oring, Kec. Sop. Riaja	2 Ruang	70,000,000	DAU	Musremban g		70,000,000	Diknasbud	
								Rehab Plafond UPTD SDN 93 BARRU	Ralla, Tanete Riaja	2 Ruang	70,000,000	DAU	Musremban g		70,000,000	Diknasbud	
								Rehab Atap Plafond UPTD SDN 90 BARRU	Jalanru, Tanete Riaja	1 Ruang	35,000,000	DAU	Musremban g		35,000,000	Diknasbud	
								Rehab Atap Plafond UPTD SDN 82 BARRU	Pasar Baru, Tanete Riaja	1 Ruang	35,000,000	DAU	Musremban g		35,000,000	Diknasbud	
								Rehab Atap Plafond UPTD SDN 91 BARRU	Limpo, Tanete Riaja	1 Ruang	35,000,000	DAU	Musremban g		35,000,000	Diknasbud	
								Rehab Atap Plafond UPTD SDN 66 BARRU	Pucue Tanete Rilau	2 Ruang	70,000,000	DAU	Usulan Sekolah		70,000,000	Diknasbud	
								Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 118 Barru	Soppeng Riaja	6 Ruang	778,140,000	DAK					
								Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 174 Barru	Pujananting	2 Ruang	259,380,000	DAK					
								Rehab Ruang Kelas Ruang Kelas UPTD SDN 115 Barru	Soppeng Riaja	3 Ruang	389,070,000	DAK					
								Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 121 Barru	Soppeng Riaja	3 Ruang	389,070,000	DAK					
								Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 60 Barru	Tanete Rilau	3 Ruang	389,070,000	DAK					
								Rehab Ruang Kelas UPTD SDN 96 Barru	Tanete Riaja	2 Ruang	259,380,000	DAK					
								Rehab Ruang Guru UPTD SDN 174 Barru	Pujananting	1 Ruang	123,690,000	DAK					
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Barru	1 Paket	160,000,000	DAU		1 Paket	160,000,000	Diknasbud	
								UPTD SDN 128 BARRU	Dusung, Mallusetasi	1 Paket	32,000,000	DAU	Usulan Sekolah	1 Paket	32,000,000	Diknasbud	
								UPTD SDN 85 BARRU	Cinekko Tanete Riaja	1 Paket	32,000,000	DAU	Usulan Sekolah	1 Paket	32,000,000	Diknasbud	
								UPTD SDN 158 BARRU	Ammerung Pujananting	1 Paket	32,000,000	DAU	Usulan Sekolah	1 Paket	32,000,000	Diknasbud	
								UPTD SDN 62 BARRU	Bacu2 Tanete Rilau	1 Paket	32,000,000	DAU	Usulan Sekolah	1 Paket	32,000,000	Diknasbud	
								UPTD SDN 13 BARRU	Coppo Barru	1 Paket	32,000,000	DAU	Usulan Sekolah	1 Paket	32,000,000	Diknasbud	

							UPTD SDN 70 BARRU	Pancana	1 Paket	32,000,000	DAU	Usulan Sekolah	1 Paket	32,000,000	Diknasbud
1	01	02	2	01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Barru	10 Paket	283,490,000	DAU		10 Paket	283,490,000	Diknasbud
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Barru	21431 Peserta Didik	4,752,500,000	DAU		21431 Peserta Didik	4,752,500,000	Diknasbud
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Barru	25 Paket	2,582,798,000	DAU		25 Paket	1,082,798,000	Diknasbud
							UPTD SD NEGERI 34 BARRU	Barru	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 121 BARRU	Soppeng Riaja	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 1 BARRU	Barru	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 118 BARRU	Soppeng Riaja	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 115 BARRU	Soppeng Riaja	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 41 BARRU	Tanete Rilau	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 60 BARRU	Tanete Rilau	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 56 BARRU	Tanete Rilau	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 49 BARRU	Tanete Rilau	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 183 BARRU	Balusu	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 77 BARRU	Tanete Riaja	1 Paket	125,000,000	DAK				
							UPTD SD NEGERI 126 BARRU	Mallusetasi	1 Paket	125,000,000	DAK				
1	01	02	2	01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagiPeserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Barru	199 SP	573,733,400	DAU		199 SP	573,733,400	Diknasbud
1	01	02	2	01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Barru	218 SP	71,412,700	DAU		218 SP	71,412,700	Diknasbud
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Barru	2828 Peserta Didik	390,000,000	DAU		600 Siswa	390,000,000	Diknasbud

1	01	02	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Barru	79 Orang	1,144,000,000	DAU		79 Orang	1,144,000,000	Diknasbud
1	01	02	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Barru	419 Orang	794,607,198	DAU		419 Orang	794,607,198	Diknasbud
1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Barru	199 SP	207,672,957	DAU		199 SP	207,672,957	Diknasbud
1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Barru	199 SP	14,474,900,000	APBN		199 SP	14,474,900,000	Diknasbud
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SMP)	Kab. Barru	75%	19,961,123,450			76%	19,961,123,450	Diknasbud
1	01	02	2	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Barru	2 Ruang	407,756,900	DAU/DAK		2 Ruang	407,756,900	Diknasbud
							Pembangunan Ruang Kelas UPTD SMP NEGERI SATAP 8 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	329,292,000					
1	01	02	2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Barru	1 Ruang	567,022,900	DAU/DAK		1 Ruang	567,022,900	Diknasbud
							Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI SATAP 30 BARRU	Pujananting	1 Ruang	565,675,000	DAK				
							Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 8 BARRU	Tanete Rilau	1 Ruang	565,675,000	DAK				

1	01	02	2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Barru	1 Ruang	75,000,000	DAU/DAK		1 Ruang	75,000,000	Diknasbud
							Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 33 BARRU	Balusu		263,357,000	DAK				
							Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 17 BARRU	Tanete Riaja		263,357,000	DAK				
1	01	02	2	02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Barru	1 Unit	200,625,000	DAU/DAK		1 Unit	200,625,000	Diknasbud
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Barru	3 Unit	1,286,125,550	DAU/DAK		3 Unit	1,286,125,550	Diknasbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 19 BARRU	Siddo, Soppeng Riaja	120 M	100,000,000	DAU	Musrembang		100,000,000	Diknasbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 15 BARRU	Cinekko, Tanete Riaja	250 M	100,000,000	DAU	Musrembang		100,000,000	Diknasbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 24 BARRU	Mallusetasi	500 Meter	100,000,000	DAU	Musrembang		100,000,000	Diknasbud
							Pemb. Pagar UPTD SMPN 35 BARRU	Rumpiah Balusu	250 meter	100,000,000	DAU	Musrembang		100,000,000	Diknasbud
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SMP NEGERI 11 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	106,632,000	DAK				
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SMP NEGERI SATAP 4 BARRU	Barru	2 Ruang	106,632,000	DAK				
							Rehab Toilet (Jamban) UPTD SMP NEGERI 12 BARRU	Tanete Riaja	2 Ruang	106,632,000	DAK				
							Pembangunan Perpustakaan UPTD SMP NEGERI 17 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	548,797,000	DAK				
							Pembangunan Laboratorium IPA	Tanete Riaja	1 Ruang	617,397,000	DAK				

								UPTD SMP NEGERI 12 BARRU											
								Pembangunan Laboratorium IPA UPTD SMP NEGERI 17 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	617,397,000	DAK							
								Pembangunan toilet (jamban) UPTD SMP NEGERI 11 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	193,719,000	DAK							
								Pembangunan toilet (jamban) UPTD SMP NEGERI 6 BARRU	Tanete Rilau	2 Ruang	193,719,000	DAK							
								Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 29 BARRU	Pujananting	1 Ruang	617,397,000	DAK							
								Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya PTD SMP NEGERI SATAP 30 BARRU	Pujananting	1 Ruang	617,397,000	DAK							
								Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 33 BARRU	Balusu	1 Ruang	617,397,000	DAK							
								Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya UPTD SMP NEGERI 17 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	617,397,000	DAK							
1	01	02	2	02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Barru	6 Ruang	585,000,000	DAU/DAK			6 Ruang		585,000,000		Diknasbud
								Rehabilitasi/ Berat Ruang Kelas/ Perpustakaan UPTD SMPN 20 BARRU	Pacekke, Soppeng Riaja	1 unit	100,000,000	DAU	Musrembang				100,000,000		Diknasbud
								Rehab Ruang UPTD SMP NEGERI 11 BARRU	Tanete Riaja	2 Ruang	197,567,000	DAK							
								Rehab Ruang UPTD SMP NEGERI 30 BARRU	Pujananting	1 Ruang	197,567,000	DAK							
								Rehab Ruang UPTD SMP NEGERI 12 BARRU	Tanete Riaja	3 Ruang	197,567,000	DAK							

							Rehab Ruang UPTD SMP NEGERI SATAP 4 BARRU	Barru	3 Ruang	197,567,000	DAK				
							Rehab Ruang UPTD SMP NEGERI 6 BARRU	Tanete Rilau	2 Ruang	197,567,000	DAK				
							Rehab Ruang Guru UPTD SMP NEGERI 12 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	329,277,000	DAK				
							Rehab Ruang Tata Usaha UPTD SMP NEGERI 33 BARRU	Balusu	1 Ruang	339,404,000	DAK				
1	0 1	0 2	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	UPTD SMPN 16 Barru	10 Paket	250,000,000	DAU		10 Paket	250,000,000	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Barru	10 Paket	275,000,000	DAU		10 Paket	275,000,000	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Barru	8630 Peserta Didik	4,752,500,000	DAU		8630 Peserta Didik	4,752,500,000	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Barru	4 Paket	375,000,000	DAU		4 Paket	375,000,000	Diknasbud
							Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi UPTD SMP NEGERI 12 BARRU	Tanete Riaja	1 Ruang	125,000,000	DAK				
1	0 1	0 2	2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Barru	3407 Peserta Didik	409,866,400	DAU		3407 Peserta Didik	409,866,400	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kab. Barru	39 SP	24,836,200	DAU		39 SP	24,836,200	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Barru	600 Peserta Didik	430,341,700	DAU		600 Peserta Didik	430,341,700	Diknasbud

1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Barru	23 Orang	278,612,000	DAU		23 Orang	278,612,000	Diknasbud
1	01	02	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Barru	244 Orang	310,664,000	DAU		244 Orang	310,664,000	Diknasbud
1	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Barru	39 SP	207,672,800	DAU		39 SP	207,672,800	Diknasbud
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Barru	39 SP	9,525,100,000	APBN		39 SP	9,525,100,000	Diknasbud
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Kab. Barru		14,684,069,000				11,037,712,000	Diknasbud
1	01	02	2	03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Barru	3 Unit	2,410,695,000	DAU/DAK		3 Unit	400,000,000	Diknasbud
						Pembangunan PAUD Nurul Asma Kiru-Kiru Sebrang		Kiru-Kiru sebrang	1 Unit	200,000,000	DAU	POKIR		200,000,000	Diknasbud
						Pembangunan PAUD Mattapawalie pujananting		pange pujananting	1 Unit	200,000,000	DAU	Musrembang		20,000,000	Diknasbud
						Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK DW PAREN RING		Tanete Riaja	1 Ruang	113,757,000	DAK				
						Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK WE TENRIOLO		Tanete Rilau	1 Ruang	113,757,000	DAK				
						Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK ANNUR LABUANGE		Mallusetasi	1 Ruang	113,757,000	DAK				

							Pembangunan RKB beserta perabotnya TK PGRI PACCIRO	Tanete Riaja	1 Ruang	174,625,000	DAK				
							Pembangunan RKB beserta perabotnya TK MATTIROWALIE	Mallusetasi	1 Ruang	174,625,000	DAK				
							Pembangunan RKB beserta perabotnya TK ANNUR LABUANGE	Mallusetasi	1 Ruang	174,625,000	DAK				
							Pembangunan RKB beserta perabotnya TK PGRI NEPO	Mallusetasi	1 Ruang	174,625,000	DAK				
							Pembangunan RKB beserta perabotnya TK AL AMANAH	Soppeng Riaja	1 Ruang	174,625,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK PGRI PACCIRO	Tanete Riaja	1 Ruang	113,757,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK KARTINI MADELLO	Balusu	1 Ruang	113,757,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK Macora Bojo	Mallusetasi	1 Ruang	113,757,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK DW PARENRING	Tanete Riaja	1 Ruang	113,757,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK WE TENRIOLO	Tanete Rilau	1 Ruang	113,757,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK PGRI NEPO	Mallusetasi	1 Ruang	113,757,000	DAK				
							Pembangunan Ruang UKS TK ANNUR LABUANGE	Mallusetasi	1 Ruang	113,757,000	DAK				
1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Barru	10 Unit	1,875,662,000	DAU/DAK		10 Unit	240,000,000	Diknasbud
							Pengadaan APE Luar	Padanglamp e pujananting	6 Unit	25,000,000	DAU	Musremban g		25,000,000	Diknasbud
							Pembangunan APE Luar TK PGRI PACCIRO	Tanete Riaja	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK KARTINI MADELLO	Balusu	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK MATTIROWALIE	Mallusetasi	1 Ruang	165,000,000	DAK				

							Pembangunan APE Luar TK DW PARENRING	Tanete Riaja	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK ANNUR LABUANGE	Mallusetasi	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK ARRAHMAN	Mallusetasi	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK WE TENRIOLO	Tanete Rilau	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK PGRI NEPO	Mallusetasi	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan APE Luar TK AL AMANAH	Soppeng Riaja	1 Ruang	165,000,000	DAK				
							Pembangunan toilet (jamban) TK Ar Rahman	Mallusetasi	1 Ruang	150,662,000	DAK				
1	0 1	0 2	2	03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Barru	6809 Peserta Didik	4,104,990,400	DAU		6809 Peserta Didik	4,104,990,400	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Barru	645 Peserta Didik	5,975,372,000	DAU		645 Peserta Didik	5,975,372,000	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Barru	200 Orang	132,349,600	DAU		200 Orang	132,349,600	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Barru	251 SP	185,000,000	DAU		251 SP	185,000,000	Diknasbud
1	0 1	0 2	2	04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Kab. Barru		5,133,078,000				4,595,570,000	Diknasbud

1	01	02	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Barru	3095 Peserta Didik	5,133,078,000	DAU		3095 Peserta Didik	4,595,570,000	Diknasbud
							Pembangunan Ruang Praktek beserta Perabotnya SKB Barru	Barru	1 Ruang	446,028,000	DAK				
							Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitainya SKB Barru	Barru	1 Ruang	91,480,000	DAK				
1	2					BIDANG KESEHATAN									
02	01	2				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan Tingkat Kesehatan BLUD	Dinkes+UPT D RSUD	3 62.15	122,712,782,412	DAU BLUD		3 62.15	123,911,870,661	DINAS KESEHATAN
02	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Dinkes+UPT D	100%	1,000,000			100%		DINAS KESEHATAN
02	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes+UPT D	2 Dok	1,000,000		Dinkes+UPTD	2 Dok	1,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes+UPT D	100%	67,440,000,000		Dinkes+UPTD	100%		DINAS KESEHATAN
02	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes+UPT D+RSUD	726	67,440,000,000		Dinkes+UPTD	726	68,884,400,000	DINAS KESEHATAN

02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	Dinkes+UPTD	100%	-		Dinkes+UP TD	100%	-	DINAS KESEHATAN
02	01	2	03	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkes+UPTD	1 Dok			Dinkes+UP TD+RSUD	1 Dok		DINAS KESEHATAN
02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Dinkes+UPTD	100%	627,458,000		Dinkes+UP TD	100%		DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinkes+UPTD	7 Paket	3,500,000		Dinkes+UP TD	7 Paket	3,500,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinkes+UPTD	20 Paket	-		Dinkes+UP TD	20 Paket	252,410,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinkes+UPTD	23 Paket	9,694,000		Dinkes+UP TD	23 Paket	9,694,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinkes+UPTD	1 paket	125,264,000		Dinkes+UP TD	1 paket	125,264,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinkes+UPTD	67.429 Lembar	13,000,000		Dinkes+UP TD	67.429 Lembar	23,600,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes+UPTD	12 Lap	12,000,000		Dinkes+UP TD	12 Lap	12,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes+UPTD	12 Lap	464,000,000		Dinkes+UP TD	12 Lap	464,000,000	DINAS KESEHATAN

02	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dinkes+UPTD	100%	-		Dinkes+UP TD	100%	629,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinkes+UPTD	1 Unit	-		Dinkes+UP TD	1 Unit	190,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinkes+UPTD	5 Paket	-		Dinkes+UP TD	5 Paket	54,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	07	09		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinkes+UPTD	22 unit	-		Dinkes+UP TD			DINAS KESEHATAN
02	01	2	07	10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinkes+UPTD	4 Unit	-		Dinkes+UP TD	1 Unit	385,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Dinkes+UPTD	100%	1,927,840,000		Dinkes+UP TD	100%	1,946,840,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes+UPTD	12 Lap	25,000,000		Dinkes+UP TD	12 Lap	44,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinkes+UPTD	12 Lap	748,440,000		Dinkes+UP TD	12 Lap	748,440,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	08	03		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinkes+UPTD	12 Lap	1,154,400,000		Dinkes+UP TD	12 Lap	1,154,400,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Dinkes+UPTD	100%	2,300,748,000		Dinkes+UP TD	100%	1,084,238,000	DINAS KESEHATAN

02	01	2	09	05		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinkes+UPTD	43 Unit	431,000,000		Dinkes+UP TD	43 Unit	431,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinkes+UPTD	41 unit	147,950,000		Dinkes+UP TD	41 unit	147,950,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dinkes+UPTD	5 aplikasi	5,000,000		Dinkes+UP TD	5 aplikasi	5,000,000	DINAS KESEHATAN
02	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinkes+UPTD	11 Paket	1,716,798,000		Dinkes+UP TD	11 Paket	500,288,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	11	00		Peningkatan pelayanan BLUD		RSUD Lapatarai		50,415,736,412		Dinkes+UP TD		50,475,924,661	DINAS KESEHATAN
1	02	01	11	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Lapatarai		50,415,736,412		Dinkes+UP TD	1 Unit Kerja	50,475,924,661	DINAS KESEHATAN
02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Dinkes+UPTD	100	980,571,125	DAU/DAK	RSUD Lapatarai	100	990,376,836	DINAS KESEHATAN
							Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Dinkes+UPTD	100	193,395,810		RSUD Lapatarai	100	195,329,767	
							Angka Status Gizi Masyarakat	Dinkes+UPTD	0.9157	1,835,162,021		Dinkes+UP TD	92%	1,853,513,642	
							Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	Dinkes+UPTD	0.84	660,559,630		Dinkes+UP TD	84%	667,165,227	
							Indeks Keluarga Sehat	Dinkes+UPTD	0.5	105,111,195,747		Dinkes+UP TD	50%	106,354,492,020	
							Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan	Dinkes+UPTD	100%	8,080,000		Dinkes+UP TD	100%	8,160,800	

							layanan Kesehatan (SPM)								
							Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan								
02	2	01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhihan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan	Dinkes+UPTD	83,33%	54,281,522,977		Dinkes+UP TD	83,33%	32,869,371,609	DINAS KESEHATAN
02	02	2	01	01		Pembangunan rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Dinkes+UPTD	minimal 1:1000	20,464,520,000		Dinkes+UP TD	minimal 1:1000		DINAS KESEHATAN
02	02	2	01	02		Pembangunan Puskesmas		Dinkes+UPTD				Dinkes+UP TD			DINAS KESEHATAN
02	02	# # #	01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Dinkes+UPTD	1 Faskes	5,781,700,000	DAU/DAK	Dinkes+UP TD	1 Faskes		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	03		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD		13,563,789,346	DAU/DAK	Dinkes+UP TD	2 Unit	5,200,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	# # #	01	06		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Dinkes+UPTD	2 Puskesmas			Dinkes+UP TD	2 Puskesmas		DINAS KESEHATAN

1	02	02	201	08		Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dsn Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	RSUD Lapatarai		1,500,000,000		RSUD	2 Unit	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	02	01	09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinkes+UPTD	1 pkm	3,000,000,000		Dinkes+UPTD	1 pkm	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
						Rehab lahan parkir Puskesmas Doi doi		PKM Doi-Doi				RSUD Lapatarai			DINAS KESEHATAN
02	02	02	01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes+UPTD	2 faskes	500,000,000		Dinkes+UPTD	2 faskes	500,000,000	DINAS KESEHATAN
						Rehab gedung Pustu Tompo Lemo-Lemo		Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan				PKM Doi-Doi			DINAS KESEHATAN
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya (Pustu Pao-Pao)		Desa Pao-Pao				Dinkes+UPTD			DINAS KESEHATAN
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya (Pukesmas Pembantu)		Buttue (Garessi)				Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan			DINAS KESEHATAN
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (Pembangunan Pagar Pustu)		RT. 02 Dusun Lalabata				Desa Pao-Pao			DINAS KESEHATAN
						Pemasangan Paving Block Halaman Pustu Anabanua Desa Anabanua		Desa Anabanua				Buttue (Garessi)			DINAS KESEHATAN

						Rehab Pustu Siawung Desa Siawung		Desa Siawung				RT. 02 Dusun Lababata			DINAS KESEHATAN
02	02	2	01	11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinkes+UPTD	2 rumdis	600,000,000		Desa Anabanua	2 rumdis	600,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD Lapatarai/Dinas Kesehatan	3 Unit	3,450,000,000	DAU/DAK	Desa Siawung	1 prasarana		DINAS KESEHATAN
								Dinas Kesehatan		1,201,974,920	DAU/DAK				
02	02	2	01	14		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD Lapatarai	170	31,389,281,589	DAU/DAK	Puskesmas Palanro Kel. Mallawa	150	12,419,371,609	DINAS KESEHATAN
								Dinkes+UPTD		4,453,348,672					
02	02	2	01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinkes+UPTD	494 item	5,000,000,000		RSUD Lapatarai	494 item	4,000,000,000	DINKES
02	02	2	01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinkes+UPTD	641 item	4,968,431,593		Dinkes+UPTD+RSUD Lapatarai	641 item	4,000,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinkes+UPTD	30 unit	300,000,000		Dinkes+UPTD	30 unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Keterpenuhan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Dinkes+UPTD	100%	53,690,761,006		Dinkes+UPTD	100%	76,980,718,530	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM)	Dinkes+UPTD	3213	230,032,550		Dinkes+UPTD	3180	232,332,876	DINAS KESEHATAN

02	02	2	02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	3060	750,538,575		Dinkes+UPTD	3028	758,043,961	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	3016	127,149,910		Dinkes+UPTD	2985	128,421,409	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	13968	66,245,900		Dinkes+UPTD	14387	66,908,359	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	2743	36,082,250		Dinkes+UPTD	2880	36,443,073	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	33056	8,080,000		Dinkes+UPTD	34676	8,160,800	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	15555	242,677,750		Dinkes+UPTD	16022	245,104,528	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	48358	10,100,000		Dinkes+UPTD	48358	10,201,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	2969	6,060,000		Dinkes+UPTD	3069	6,120,600	DINAS KESEHATAN

02	02	2	02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	460	10,100,000		Dinkes+UP TD	475	10,201,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	3650 jiwa	30,300,000		Dinkes+UP TD	3650 jiwa	30,603,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	Dinkes+UPTD	3748	25,250,000		Dinkes+UP TD	3748	25,502,500	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinkes+UPTD	12 Dok	23,502,700		Dinkes+UP TD	12 Dok	23,737,727	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinkes+UPTD	12 Dok	7,070,000		Dinkes+UP TD	12 Dok	7,140,700	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes+UPTD	12 Dok	1,556,402,021		Dinkes+UP TD	12 Dok	1,571,966,041	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes+UPTD	12 Dok	34,211,225		Dinkes+UP TD	12 Dok	34,553,337	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dinkes+UPTD	12 Dok	353,500,000		Dinkes+UP TD	12 Dok	357,035,000	DINAS KESEHATAN

							Kesehatan Lingkungan								
02	02	2	02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes+UPTD	12 Dok	371,639,600		Dinkes+UPTD	12 Dok	375,355,996	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinkes+UPTD	12 Dok	42,462,420		Dinkes+UPTD	12 Dok	42,887,044	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes+UPTD	12 Dok	13,938,000		Dinkes+UPTD	12 Dok	14,077,380	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinkes+UPTD	2284 Jiwa	10,100,000		Dinkes+UPTD	2384 Jiwa	10,100,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dinkes+UPTD	12 Dok	533,714,300		Dinkes+UPTD	12 Dok	539,051,443	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinkes+UPTD	12 Dok	7,070,000		Dinkes+UPTD	12 Dok	7,140,700	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes+UPTD	12 Dok	141,400,000		Dinkes+UPTD	12 Dok	142,814,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes+UPTD	12 Dok	31,727,953,137		Dinkes+UPTD	12 Dok	54,490,063,582	DINAS KESEHATAN

						Penambahan Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Desa Palakka		Desa Palakka				Dinkes+UP TD			DINAS KESEHATAN
						Penambahan kartu BPJS Kesehatan untuk warga		Desa Gattareng				Dinkes+UP TD			DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Dinkes+UPT D	1 Dok	127,332,350		Desa Palakka	1 Dok	128,605,674	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	32		Operasional pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Lapatarai		1,868,000,000		Desa Gattareng	6 Dok	2,700,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinkes+UPT D	12 PKM	12,120,000,000		Dinkes+UP TD	12 PKM	12,241,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	RSUD Lapatarai		500,000,000		RSUD Lapatarai	1 Tahun		DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinkes+UPT D	6 PKM	777,780,800		Dinkes+UP TD	12 PKM	785,558,608	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinkes+UPT D	4 Laporan	17,069,000		RSUD Lapatarai	4 Laporan	17,239,690	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes+UPT D	12 Dok	368,699,930		Dinkes+UP TD	12 Dok	372,386,930	DINAS KESEHATAN
02	02	2	02	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	Dinkes+UPT D	13 PSC	1,546,298,587		Dinkes+UP TD	13 PSC	1,561,761,573	DINAS KESEHATAN

							Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
02	03	2	03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Dinkes+UPT D	12 PKM	786,850,000		Dinkes+UP TD	12 PKM	188,718,500		DINAS KESEHATAN
02	03	2	03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes+UPT D	13 Dok	40,400,000		Dinkes+UP TD	13 Dok	40,804,000		DINAS KESEHATAN
02	03	2	03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes+UPT D	12 Dok	146,450,000		Dinkes+UP TD	12 Dok	147,914,500		DINAS KESEHATAN
02	03	2	03	03		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Dinkes+UPT D	12 Pkm/1 RS	600,000,000		Dinkes+UP TD	12 Pkm/1 RS	-		DINAS KESEHATAN
02	03	2	04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang mempunyai izin operasional	Dinkes+UPT D	100%			Dinkes+UP TD	100%			DINAS KESEHATAN
02	03	2	04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinkes+UPT D	12 PKM	25,381,300		Dinkes+UP TD	12 PKM	25,635,113		DINAS KESEHATAN
02	03	2	04	04		Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinkes+UPT D	12 Dok	14,549,050		Dinkes+UP TD	12 Dok	14,694,541		DINAS KESEHATAN

02	03					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	Dinkes+UPTD	0.83	49,402,000	DAU	Dinkes+UPTD	0.92	49,896,000	DINAS KESEHATAN
02	03	2	01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik	Dinkes+UPTD	100%	16,502,158		Dinkes+UPTD	100%	16,667,179	DINAS KESEHATAN
02	03	2	01	01		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes+UPTD	1 Dok	7,562,001		Dinkes+UPTD	1 Dok	7,637,621	DINAS KESEHATAN
02	03	2	01	02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes+UPTD	1 Dok	8,940,156		Dinkes+UPTD	1 Dok	9,029,558	DINAS KESEHATAN
02	03	2	02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	Persentase peyusunan SDM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dinkes+UPTD	100%	12,356,471		Dinkes+UPTD	100%	12,480,036	DINAS KESEHATAN
02	03	2	02	01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes+UPTD	1 dok	6,120,600		Dinkes+UPTD	1 dok	6,181,806	DINAS KESEHATAN
02	03	2	02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dinkes+UPTD	618	3,175,571		Dinkes+UPTD	618	3,207,327	DINAS KESEHATAN
02	03	2	02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	Dinkes+UPTD	1 Dok	3,060,300		Dinkes+UPTD	1 Dok	3,090,903	DINAS KESEHATAN

							Manusia Kesehatan									
02	03	2	03				Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi tekhnis	Dinkes+UPTD	55 org	20,543,371		Dinkes+UP TD	55 org	20,748,785	DINAS KESEHATAN
02	03	2	03	01			Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinkes+UPTD	55 org	20,543,371		Dinkes+UP TD	55 org	20,748,785	DINAS KESEHATAN
02	04	2					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUM	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat.	Dinkes+UPTD	100	169,140,000	DAU/DAK	Dinkes+UP TD	100	170,831,400	DINAS KESEHATAN
02	04	2	01				pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin usaha	Dinkes+UPTD	100%	69,850,000		Dinkes+UP TD	100%	74,850,000	DINAS KESEHATAN
02	04	2	01	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes+UPTD	4 Dok	25,000,000		Dinkes+UP TD	4 Dok	30,000,000	DINAS KESEHATAN

02	04	2	01	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes+UPTD	31 sarana	44,850,000		Dinkes+UPTD	35 sarana	44,850,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dinkes+UPTD	100%	30,000,000		Dinkes+UPTD	100%	35,000,000	DINAS KESEHATAN
02	02	2	03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinkes+UPTD	4 Dok	30,000,000		Dinkes+UPTD	4 Dok	35,000,000	DINAS KESEHATAN

02	02	2	06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah mendapatkan pemeriksaan post market sesuai aturan perundang-undangan	Dinkes+UPTD	100%	3,831,940		Dinkes+UPTD	100%	3,870,259	DINAS KESEHATAN
02	02	2	06	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes+UPTD	105 sarana			Dinkes+UPTD	110 sarana		DINAS KESEHATAN
02	02	2	06	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinkes+UPTD	99 sarana IRT	3,831,940		Dinkes+UPTD	104 sarana IRT	3,870,259	DINAS KESEHATAN
02	04	2	04			Kegiatan Penerbitan Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diterbitkan laik hygiene sanitasi sesuai standar peraturan perundang-undangan	Dinkes+UPTD	35 TPM	52,397,285		Dinkes+UPTD	35 TPM	52,921,258	DINAS KESEHATAN
02	04	2	04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dinkes+UPTD	12 Dok	52,397,285		Dinkes+UPTD	12 Dok	52,921,258	DINAS KESEHATAN

							antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
02	04	2	05				Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	Jumlah stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	Dinkes+UPTD	446 Lembar	13,060,775		Dinkes+UP TD	446 Lembar	4,189,883	DINAS KESEHATAN
02	04	2	05	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinkes+UPTD	4 Dok	13,060,775		Dinkes+UP TD	4 Dok	4,189,883	DINAS KESEHATAN
02	05						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	Dinkes+UPTD	80	187,136,000	DAU/DAK	Dinkes+UP TD	82	128,007,360	DINAS KESEHATAN
02	05	2	01				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kel Siaga Aktif strata mandiri dan purnama	Dinkes+UPTD	23% dan 9%	127,136,000		Dinkes+UP TD	25% dan 11%	68,007,360	DINAS KESEHATAN
02	05	2	01	01			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes+UPTD	12 Dok	127,136,000		Dinkes+UP TD	12 Dok	68,007,360	DINAS KESEHATAN
02	05	2	02				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Masyarakat yang telah menerapkan germas Hidup Bersih dan Sehat.	Dinkes+UPTD		30,000,000		Dinkes+UP TD		30,000,000	DINAS KESEHATAN
02	05	2	02	01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	Dinkes+UPTD	12 Dok	30,000,000		Dinkes+UP TD	12 Dok	30,000,000	DINAS KESEHATAN

							Hidup Bersih dan Sehat									
02	05	2	03				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes+UPTD		30,000,000		Dinkes+UPTD		30,000,000		DINAS KESEHATAN
02	05	2	03	01			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	Dinkes+UPTD	12 Dok	30,000,000		Dinkes+UPTD	12 Dok	30,000,000		DINAS KESEHATAN
1	3						BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
01	03	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		3 Poin	7,295,295,691	DAU		3	936,884,468,743	Dinas PUTR dan PERKIM
								Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		20 JPL				20		
1	03	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Barru	100%	5,500,553,660			100	3,773,266,173	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	60 OB	5,500,553,660	DAU		60	3,773,266,173	Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Barru	100%	104,000,000			100	117,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	8 Orang	81,209,700	DAU		10	98,800,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru	14 Orang	22,790,300	DAU		16	18,200,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	407,203,750			100	430,635,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	6,250,000	DAU		1	6,250,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	15 Paket	118,750,000	DAU		15	121,875,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	6 Paket	10,256,250	DAU		8	13,675,000	Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	36 Paket	63,125,000	DAU		36	63,125,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	30 Paket	12,687,500	DAU		30	12,687,500	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	400 Laporan	196,135,000	DAU		500	213,022,500	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	452,806,451			100	619,516,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	6 Unit	200,306,451	DAU		8	307,016,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	12 Unit	27,500,000	DAU		14	31,250,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	13 Unit	162,500,000	DAU		14	187,500,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	5 Unit	62,500,000	DAU		7	93,750,000	Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		100%	438,409,500			100	931,372,377,900	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	24 Laporan	43,750,000	DAU		24	43,750,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	24 Laporan	89,948,250	DAU		24	91,782,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	14 Laporan	13,461,250	DAU		15	11,845,900	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	372 Laporan	291,250,000	DAU		372	931,225,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	392,322,330			100	571,673,670	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barru	2 Unit	23,906,250	DAU		2	23,906,250	Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	13 Unit	144,150,000	DAU		21	91,437,500	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Barru	5 Unit	174,766,080	DAU		6	401,829,920	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Barru	25 Unit	20,000,000	DAU		30	25,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	2 Unit	20,000,000	DAU		4	20,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	4 Unit	9,500,000	DAU		4	9,500,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		54.49%	7,135,000,000			55,32		Dinas PUTR dan PERKIM
							persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS		6.54%	1,943,700,000	DAU		7,37		

							kewenangan Kab/Kota									
1	03	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun		5,355 KM	1,943,700,000				11.15	9,162,681,600.00	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	02	2.01	10		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		1,4 KM	424,000,000	DAU			1.75	424,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Bronjong Sungai Ceppaga	Kec.Soppen g Riaja	0,1 KM	200,000,000	DAU	DPUPR, Musrembang, Pokir				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Buronjong Sungai tetturange	Dusun Alekale Desa Pujananting	P.150 M,T.1,5 M	200,000,000						Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	02	2.01	12		Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun		0,1 KM	127,200,000				0,675	1,120,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Saluran Pembuangan	Abbatungng e Kel. Mangempan g	2 m x 100 m	120,000,000		Pokir				Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	02	2.01	18		Pembangunan Seawall dan Bangunan PengamanPantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0,1 KM	397,500,000				2.1	4,575,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Tanggul Pantai Mate'ne	Kec.Tanete Rilau	0,1 KM	375,000,000	DAU	Dinas PUPR	#REF!			Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	02	2.01	37		Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan		0,275 KM	795,000,000	DAU			1	3,043,681,600	Dinas PUTR dan PERKIM
							Peningkatan Saluran Pembuang Lawae	Kec.Barru	0,275 KM	750,000,000	DAU	DPUPR				Dinas PUTR dan PERKIM

1	03	02	2.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan sekunder Yang Terbangun dalam kondisi baik			7.135.000.000					Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	02	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Barru	9 Bendung + 14,319 KM	7.135.000.000				0	Dinas PUTR dan PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jalanru	Kel. Lompo Riaja, Kec. Tanete Riaja	1 Bendung + 2.244 km	918,843,000	DAU	Dinas PUPR			Dinas PUTR & PERKIM
							Rehab Irigasi Labuleng-Barang	Kec. Barru	0,5 KM	250,000,000		Pokir			Dinas PUTR & PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aroppoe	Desa Tellumpanua, Kec. Tanete Rilau	0.468	532,684,000	DID				
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bujung Mattimbawawoe	Desa Nepo, Kec. Mallusetasi	1 Bendung + 1.050 km	541,532,000	DID				
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ammerung I	Desa Bacu-Bacu, Kec. Pujananting	2 Bendung + 0.917 km	503,254,000	DID				
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jarume	Desa Anabanua, Kec. Barru	1 Bendung + 1.323 km	651,750,000	DID				
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kalukue	Desa Galung, Kec. Tanete Barru	3 Bendung + 1.467 km	1,086,096,000	DID				
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Taboe	Desa Palakka, Kec. Barru	0.8	400,841,000	DID				
							Rehab Bendungan dan Saluran Irigasi Manyengo	Dusun Manyengo Desa Gattareng Kec Pujananting	1 Bendung + 1 km	1,000,000,000	DID				
							Rehab Jaringan Irigasi Labaka 1	Ds. Labaka, Desa Bulobulo, Kec. Pujananting	1 km	1,250,000,000	DID				

1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota		74.64%	134,243,543,200			78.80	85,723,170,000.00	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Kabupaten		14	134,243,543,200			31	85,723,170,000.00	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	10	2.01	05		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		2,5 KM	2,148,832,000	DAU		6	3,230,400,000	Dinas PUTR & PERKIM
							Rabat Beton jalan Kabupaten Poros Minangatoa - Wiringtasi	RT 1 Dusun Minangatoa	500 M	469,200,000	DAU	Musrembang			Dinas PUTR & PERKIM
							Pembangunan Jalan Ruas Pekka Pao Salomoni	Pao-Salomoni (Lipukasi)	800 Meter	430,720,000	DAU	Musrembang			Dinas PUTR & PERKIM
							Pembangunan Jalan Ruas Passede	Pessedde (Lipukasi)	700 Meter	676,880,000	DAU	Musrembang			Dinas PUTR & PERKIM
							Pembangunan Jalan	Soreang (Tanete)	500 Meter	450,400,000	DAU	Musrembang			Dinas PUTR & PERKIM
1	03	10	2.01	06		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar		2 KM	2,440,925,600	DAU		4	4,605,520,000	Dinas PUTR & PERKIM
							Pelebaran jalan Ruas Mangkoso-Paccekke	Desa Paccekke	2 KM	2,440,925,600		DPUPR			Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	10	2.01	08		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		5 KM	114,330,660,150			17	50,085,030,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Doi-Doi - Gattareng (R.21)	Kec. Pujananting	2.500 m X 4,5 m	24,880,500,000	DAK				Dinas PUTR & PERKIM
							Palanro-LanraE (R.15)	Kec. Mallusetasi	1.800 m X 6 m	6,285,600,000	DAK				Dinas PUTR & PERKIM
							LakonraE-KaerengngE (R.17)	Kec. Barru	1.200 m X 6 m	7,682,400,000	DAK				Dinas PUTR & PERKIM
							Kaerengnge - Watu (R.19)	Kec. Barru	550 m X 6 m	1,920,600,000	DAK				Dinas PUTR & PERKIM
							Ralla - Bette (R.02)	Kec. Tanete Riaja	2.000 m X 6 m	10,126,800,000	DAK				Dinas PUTR & PERKIM

							Cilellang - Barantang (R.41)	Kec. Mallusetasi	400 m X 6 m	1,396,800,000	DAK					Dinas PUTR & PERKIM
							Doi-Doi Ammerung (R.24)	Kec.Pujana nting	1.540mX4,5m	4,033,260,000	DAK					Dinas PUTR & PERKIM
							Takkalasi - Tompo (R.09)	Kec.Balusu	2.380mX6m	8,310,960,000	DAK					Dinas PUTR & PERKIM
							Balusu - Padumpu (R.601)	Kec. Balusu	4.000mX4m	9,312,000,000	DAK					Dinas PUTR & PERKIM
							Bulu dua - ampiri (R.32)	Kec. Tanete Riaja	8.900m X 4,5m	23,309,100,000	DAK					Dinas PUTR & PERKIM
							Balusu - Paddumpu	Kec. Balusu	2.500 M x 4,5 M	3,885,907,500	DAK/DAU					Dinas PUTR & PERKIM
							Barru - Lakonrae	Kec. Barru	2.125 M x 6 M	690,828,000	DAK/DAU					Dinas PUTR & PERKIM
							Kota Kec. Balusu (Jl. Masuk Lapangan)	Kec. Balusu	180 m X 8 m	828,993,600	DAU					Dinas PUTR & PERKIM
							Pattanrongnge - Topporeng	Kec. Mallusetasi	2000 m X 5 m	4,756,900,000	DAU					Dinas PUTR & PERKIM
							Jempulu - Dengeng-Dengeng	Kec. Pujananting	1500 x 4,5 m	3,885,907,500	DAU					Dinas PUTR & PERKIM
							Reknstruksi Jalan Ruas Kamara - Batubessi	Kec. Barru	200 x 6	690,828,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Reknstruksi Jalan Ruas Siawung - Batubessi	Kec. Barru	1990 x 5	5,725,399,910	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Reknstruksi Jalan Ruas Jampue - Soreang	Kec. Tanete Riaja	500 x 4	1,151,380,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Reknstruksi Jalan Ruas Kota Kec. Barru (Samping RSU Barru)	Kec. Barru	670 x 5	1,928,561,500	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	1	2.	0		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		5,94 Km	3,033,125,450	DAU		8		11,856,640,000	Dinas PUTR & PERKIM
							Peningkatan Jalan Lingkungan Punranga-Mattirodeceng(Poros Jalan SMP Pujananting)	Kec. Pujananting	300 x 4 M	732,277,680	DAU	pokir				Dinas PUTR & PERKIM
							Peningkatan jalan lingkungan mangempang	Kec. Barru	200 x 3,5	448,247,770	DAU	pokir				Dinas PUTR & PERKIM

							Rehab jalan Birue-Ballewe(R119)	Kec. Balusu	1000 M	1,852,600,000	DAU				Dinas PUTR & PERKIM
1	03	10	2.01	11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		30 KM	1,060,000,000	DAU		40	400,000,000	Dinas PUTR & PERKIM
							Pemeliharaan jalan 7 Kecamatan		30 KM	1,060,000,000		DPUPR			Dinas PUTR & PERKIM
1	03	10	2.01	12		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		90 M	7,182,000,000			166	13,525,580,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Jembatan Tangngasoe	Desa jangan-jangan	4x13 M	726,000,000	DAK	Musrembang			Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Jemb. S. Pude'e	Takkalasi	6 M	303,000,000	DAK	Musrembang			Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Jembata Doejenge	Takkalasi _ Tompo	8 X 6	500,000,000	DAK	Musrembang			Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan sungai BareBere Penggalungan		10 X 4 m	450,000,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan S.Mareppang		60 X 6M	3,630,000,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Sungai Jembatan Cenne 1		9 X 6 M	544,500,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Sungai Jembatan Cenne 2		3 X 6 M	181,500,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Jembatan Sungai JeppeE		4 X 6M	242,000,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Sungai GalungKalung		5 X 6M	302,500,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Jembatan Sungai Garongkong		5 X 6 m	302,500,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	10	2.01	19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		183 M	848,000,000	DAU/DAK			2,020,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Pemeliharaan berkala Jembatan Sungai Lajari		55 X 6 m	550,000,000	DAK				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pemeliharaan Jembatan 7 Kecamatan		183 M	298,000,000	DAU	DPUPR			Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten		35	507,265,489			37	8,273,553,285	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.01			Pengelolaan dan pengebangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota		0.85	507,265,489			10.75	8,273,553,285	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		0,45 KM	232,978,269			5.500	6,292,015,785	Dinas PUTR & PERKIM
							Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Dollajange, Desa Lawallu	200 M	105,682,000	DAU	Pokir			Dinas PUTR & PERKIM
							Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Mallawa, Kec. Mallusetasi	250 M	114,108,820	DAU	Pokir			Dinas PUTR & PERKIM
1	0	0	2.01	07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi		0,4 M	274,287,219			3.750	1,981,537,500	Dinas PUTR & PERKIM
							Rehab. Saluran drainase dan gorong-gorong Lingkungan Ralla RT.02 Tabbabatue	Kel. Lompo Riaja	300 M	105,920,528	DAU	Musrembang			Dinas PUTR dan PERKIM
							Rehabiltasi drainase Mattirowalie (RT. 3) Kel.Tuwung	Kec. Barru	100 M	152,841,000	DAU	Musrembang			Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh akses kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota (SPM)		98,31 layak dan 66,31 aman	500,000,000			98,87 layak dan 68,21 aman	1,877,566,267	Dinas PUTR dan PERKIM

1	03	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	Jumlah SR jaringan perpipaan SPAM di daerah Kabupaten		80 SR	500,000,000			250	1,877,566,267	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	03	2.01	04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Kab. Barru	80 SR	500,000,000	DAU		250	1,877,566,267	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)		100%	500,000,000			100	3,453,103,102	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	05	2.01			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah RT yang mendapatkan akses pengolahan air limbah		100 RT	500,000,000			1000	3,453,103,102	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	05	2.01	06		Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		30 RT	200,000,000	DAU		500	3,367,267,102	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	05	2.01	10		Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara		1593 Unit	200,000,000	DAU		1680	10,836,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	05	2.01	16		Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi		2 M ³ /Hari	100,000,000	DAU		2	75,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB		100%	37,435,000,000			100		Dinas PUTR dan PERKIM
1	03	08	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintah yang di tata		2 Unit	22,435,000,000			5		Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.	0		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		100 Dokumen	175,000,000	DAU		100	175,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	1	2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan startegis daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung untuk kepentingan startegis daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui		Unit	22,260,000,000	DAU	Pokir			Dinas PUTR & PERKIM
							Pembangunan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda & OR	Barru	1 Unit	8,000,000,000	DAU	DPUPR			
							Pembangunan Rujab Ketua DPR	Barru	1 Unit	3,360,000,000	DAU	DPUPR			Dinas PUTR & PERKIM
							Pembangunan Kantor Kejaksaan		1 Unit	1,700,000,000					Dinas PUTR & PERKIM
							Pembangunan Gabungan Dinas	Barru	1 Unit	9,200,000,000	DAU	DPUPR			
1	0	1				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW		100%	990,000,000			100		Dinas PUTR dan PERKIM

1	03	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun / ditetapkan sesuai standart peraturan		3 Dokumen	990,000,000			100	500,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
							Perundang-undangan								
1	03	12	2.01	03		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 Dokumen	990,000,000	DAU		1	500,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	4					BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		100%	1,010,000,000		-	100		DINAS PUTR DAN PERKIM
							Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM)		100%				100		
1	04	02	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang telah didata		100%	5,000,000	DAU		100	20,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	04	02	2.01	03		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Dokumen	5,000,000	DAU		1	20,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		100%	5,000,000	DAU		100	25,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		100 Orang	3,000,000	DAU		100	15,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		30 Orang	2,000,000	DAU		30	10,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Pemerintah	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pembangunan dan rehabilitasi rumah		500 orang	1,000,000,000	DAU		550	#REF!	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		500 Unit Rumah	980,000,000	DAU		500	1,520,275,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena		1 Dokumen	20,000,000	DAU		1	60,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM

							Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1	0 4	0 4				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni		3.29%	644,800,000				3.01	3,875,000,00 0	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0 4	0 4	2. 0 1			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		100%	644,800,000				100	3,875,000,00 0	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0 4	0 4	2. 0 1	0 1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		31 Unit	644,800,000				250	3,875,000,00 0	Dinas PUTR dan PERKIM
							Rumah Tidak Layak Huni	Desa Lawallu dan Siddo	2 buah	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bantuan Bedah Rumah	Bojo Baru/Ds.Bo jo/Kupa	3 Unit	60,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Bedah Rumah	dusun maroangin	4 unit	80,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM

							Pembangunan bedah rumah Tidak Layak Huni	dusun lempang	3 unit	60,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan Bedah Desa Bulo- Bulo	Kec. Pujananting	4 Unit	80,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	Polejiwa	1 Buah	20,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	desa harapan	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	desa Ajjakkang	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	desa Bacu- bacu	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	Desa Jangan- jangan	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	Mattirowalie	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	Desa Lalabata	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
							Bedah Rumah	Mallawa	2 unit	40,000,000	DAU					Dinas PUTR dan PERKIM
1	0 4	0 5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		55	348,025,450			57	348,025,450		Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang terbangun		100	348,025,450			100		Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1	5,000,000	DAU		-	5,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		96	337,550,000	DAU		96	343,025,450	Dinas PUTR dan PERKIM
							Jalan Beton Kompleks Perumahan	coppo	50 m	50,000,000	DAU				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan jalan perkuburan pattunuang	lingkungan Pacciro	100m	50,000,000	DAU				Dinas PUTR dan PERKIM
							pembangunan bak penampungan air	lapakakaka		45,000,000	DAU				Dinas PUTR dan PERKIM
							Pembangunan jalan rabat beton	Dusun Polejiwa Desa Tellumpanua	1,4 m p = 70 m	92,550,000	DAU				Dinas PUTR dan PERKIM
							Perintisan jalan pekuburan	limpomajan s.bunangae		94,524,550	DAU				Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		3	5,475,450	DAU			5,475,450	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah		75.37%	1,104,450,000			76.84	1,657,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM

							10 ha di kab/kota yang ditangani								
1	04	03	2.01			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		100%	150,000,000	DAU		100	300,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	04	03	2.01	02		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi		1 Dok	150,000,000	DAU		-	300,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	04	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		12,6 Ha	228,000,000	DAU		-	228,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	04	03	2.02	02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 Dok	228,000,000	DAU		-	228,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	04	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		4 Ha	726,450,000	DAU		4	1,129,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM

1	0	0	2.	0		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		1 Dok	21,000,000	DAU		1	57,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	0	0	2.	0		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		4,20 Ha	705,450,000	DAU		4.20	1,072,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		100%	3,750,000			100	3,750,000	Dinas PUTR dan PERKIM
2	1	0	2.	0		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan		2 rek	3,750,000	DAU		2	3,750,000	Dinas PUTR dan PERKIM
2	1	0	2.	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan pemberian izin dan lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha		2 Lap	3,750,000	DAU		2	3,750,000	Dinas PUTR dan PERKIM
1	5					BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN									
1	0	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP (BPBD)		3	2,331,972,661			3	2,337,760,345	BPBD
	5						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	160,000,000			20 JPL	170,000,000	

1	05	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			1,841,372,661				1,842,760,345	BPBD
1	05	1	2	02	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	25	1,841,372,661	DAU		25	1,842,760,345	BPBD
1	05	1	2	05		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			160,000,000				170,000,000	BPBD
1	05	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	15	28,000,000	DAU		15	38,000,000	BPBD
1	05	1	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru	4	7,000,000	DAU		4	7,000,000	BPBD
1	05	1	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10	125,000,000			10	125,000,000	BPBD
1	05	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Barru		220,700,000	DAU			234,100,000	BPBD

1	05	1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	5	3,000,000	DAU	7	5,000,000	BPBD
1	05	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	4	17,000,000	DAU	4	25,000,000	BPBD
1	05	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	16	2,500,000	DAU	16	3,000,000	BPBD
1	05	1	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	2	51,000,000	DAU	2	58,000,000	BPBD
1	05	1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	11,000,000	DAU	2	11,000,000	BPBD
1	05	1	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Barru	3	700,000	DAU	3	700,000	BPBD
1	05	1	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	12	3,000,000	DAU	12	3,900,000	BPBD
1	05	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	2	132,500,000	DAU	2	127,500,000	BPBD
1	05	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barru		60,000,000	DAU		35,000,000	BPBD

1	05	1	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	0	-	DAU	1	35,000,000	BPBD
1	05	1	2	07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	4	25,000,000	DAU			BPBD
1	05	1	2	07	05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	1	35,000,000	DAU	0	-	BPBD
1	05	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barru		88,400,000	DAU		91,400,000	BPBD
1	05	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	310	1,000,000	DAU	350	1,000,000	BPBD
1	05	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	12	37,000,000	DAU	12	40,000,000	BPBD
1	05	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7	50,400,000		7	50,400,000	BPBD
1	05	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barru		121,500,000	DAU		134,500,000	BPBD
1	05	1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	18	107,000,000	DAU	20	125,000,000	BPBD

1	05	1	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10	3,000,000			0	-	BPBD
1	05	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	8	5,500,000	DAU		8	6,000,000	BPBD
1	05	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	1	3,000,000	DAU		1	3,500,000	BPBD
1	05	1	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	1	3,000,000	DAU		0	-	BPBD
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Barru	100	619,145,421	DAU	Barru	100	631,528,330	BPBD
							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Barru	100		DAU	Barru	100		
							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Barru	100		DAU	Barru	100		
1	05	3	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Barru		45,000,000	DAU	indikator LPPD dan SPM		35,000,000	BPBD

1	05	3	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Barru	100	45,000,000	DAU		100	35,000,000	BPBD
1	05	3	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				367,000,000		indikator LPPD dan SPM		388,500,000	BPBD
1	05	3	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Barru	100	27,400,000	DAU		100	31,400,000	BPBD
1	05	3	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Barru	1	23,000,000	DAU		1	23,000,000	BPBD
1	05	3	2	02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Barru	10	24,500,000	DAU		5	31,000,000	BPBD

1	05	3	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Barru	2	104,100,000	DAU		2	105,100,000	BPBD
1	05	3	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Barru	14	123,000,000	DAU		14	123,000,000	BPBD
1	05	3	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Barru	1	45,000,000	DAU		1	45,000,000	BPBD
1	05	3	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Barru	20	20,000,000	DAU		30	30,000,000	BPBD
1	05	3	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				150,000,000	DAU	indikator LPPD dan SPM		150,000,000	BPBD
1	05	3	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Barru	1	25,000,000	DAU		1	25,000,000	BPBD
1	05	3	2	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Barru	150	50,000,000	DAU		150	50,000,000	BPBD

1	05	3	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		150	50,000,000			150	50,000,000	BPBD
1	05	3	2	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Barru	1	25,000,000	DAU		1	25,000,000	BPBD
1	05	3	2	04		Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana				57,145,421	DAU	indikator IKD		58,028,330	BPBD
1	05	3	2	04	03	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Barru	1	10,000,000	DAU		0	-	BPBD
1	05	3	2	04	04	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Barru	0	-	DAU		1	10,000,000	BPBD
1	05	3	2	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1	3,000,000			1	3,500,000	BPBD
1	05	3	2	02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Barru	1	44,145,421	DAU		1	44,528,330	BPBD

1	5	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	Barru	3.00	5,107,394,263	DAU		3	5,121,931,333	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	160,000,000	DAU		20 JPL	170,000,000	
X	X	X	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Barru	100%	4,380,540,758	DAU		100%	4,380,540,758	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	X	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	58	4,380,540,758	DAU		58	4,380,540,758	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	X	01		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	100%	111,008,318	DAU		100%	116,937,820	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	X	01		2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	650 Laporan	15,000,000	DAU		650 Laporan	16,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	X	01		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	3 Laporan	67,082,818	DAU		3 Laporan	71,082,820	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	X	01		2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	6 Laporan	19,325,500	DAU		6 Laporan	20,255,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

X	X	0		2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	2 Laporan	9,600,000	DAU		2 Laporan	9,600,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Barru	100%	198,574,000			100%	197,724,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	6 Paket	5,909,500			6 Paket	5,509,500	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	4 Paket	19,920,000			4 Paket	15,920,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	10 Paket	4,177,000	DAU		10 Paket	4,177,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	5 Paket	24,500,000	DAU		5 Paket	24,500,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	2 Paket	7,000,000	DAU		2 Paket	7,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	12 Laporan	12,000,000	DAU		12 Laporan	12,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

X	X	0		2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam & Luar Provinsi	37 Laporan	115,067,500	DAU		37 Laporan	118,067,500	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	100 Laporan	10,000,000	DAU		100 Laporan	10,550,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barru	100%	39,740,000	DAU		100%	33,978,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	2 Unit	21,000,000	DAU		2 Unit	16,238,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	7 Unit	18,740,000	DAU		7 Unit	17,740,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Barru	100%	186,595,687	DAU		100%	212,815,255	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	20 Unit	30,000,000	DAU		20 Unit	30,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Barru	22 Unit	133,839,687	DAU		22 Unit	160,059,255	SATPOL PP DAN DAMKAR

							Pajak dan Perizinannya								
X	X	0		2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barru	3 Unit	10,656,000	DAU		3 Unit	10,656,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	6 Unit	9,600,000	DAU		6 Unit	9,600,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	2 Unit	2,500,000	DAU		2 Unit	2,500,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Barru	100%	190,935,500	DAU		1	179,935,500	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Barru	5 Paket	86,756,500	DAU		5 Paket	75,756,500	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	7 Orang	81,679,000	DAU		8 Orang	81,679,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
X	X	0		2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru	2 Orang	22,500,000	DAU		2 Orang	22,500,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	Barru	100%	1,097,437,758	DAU		1	1,109,586,513	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barru	100%	999,966,058			1	1,010,796,513	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Barru	365 Kasus	43,350,000	DAU		365 Kasus	44,350,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Barru	100 Kasus	792,015,000	DAU		100 Kasus	792,015,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0		2.	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Barru	6 Kasus	17,050,000	DAU		6 Kasus	17,050,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Barru	12 Kasus	18,003,158	DAU		12 Kasus	19,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barru	380 Dokumen	60,435,900	DAU		380 Dokumen	72,213,026	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Barru	380 Dokumen	5,000,000	DAU		380 Dokumen	3,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0		2.	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Barru	52 Dokumen	39,112,000	DAU		52 Dokumen	37,168,487	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Barru	10 Unit	25,000,000	DAU		10 Unit	26,000,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	Barru	100%	97,471,700	DAU		1	98,790,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Barru	15 Laporan	49,819,100	DAU		15 laporan	44,540,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Barru	7 Laporan	24,217,600	DAU		7 Laporan	28,500,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

1	052		2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Barru	6 Laporan	23,435,000	DAU		6 Laporan	25,750,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	054				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	Barru	100%	1,727,999,111			100%	1,762,559,094	SATPOL PP DAN DAMKAR
						Waktu tanggap (response time)	Barru	15 Menit	55,681,636	DAU		15 Menit	56,795,268	
1	054		2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Barru	100%	1,700,763,272	DAU		100%	1,736,174,094	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	054		2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Barru	150 Laporan	111,363,272	DAU		150 Laporan	113,590,537	SATPOL PP DAN DAMKAR
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		150 Laporan	1,462,200,000	DAU		150 Laporan	1,462,200,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0		2.	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Barru	5 Unit	82,150,000	DAU		5 Unit	114,133,557	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Barru	70 Orang	42,500,000	DAU		70 Orang	42,500,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Barru	1 Dokumen	2,550,000	DAU		1 Dokumen	3,750,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	0	0		2.		Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	Barru	100%	27,235,839	DAU		1	26,385,000	SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0		2.	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Barru	60 Orang	27,235,839	DAU		60 Orang	26,385,000	SATPOL PP DAN DAMKAR
1	6					SOSIAL									
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial		3				3		
	6	1					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	2,987,286,548			20 JPL	3,097,573,548	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	Kab. Barru	100	2,415,335,982	DAU		100	2,415,335,982	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Barru	25	2,415,335,982	DAU		25	2,415,335,982	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Kab. Barru	100	90,000,000	DAU		100	90,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Barru	5	90,000,000	DAU		5	90,000,000	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Barru	100	237,814,566	DAU		100	348,101,566	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	6	9,000,000	DAU		6	9,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	2	41,814,566	DAU		2	52,101,566	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Barru	13	5,000,000	DAU		13	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	2	15,000,000	DAU		2	15,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Barru	1500	13,000,000	DAU		1500	13,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Barru	1	4,000,000	DAU		1	4,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barru	1	150,000,000	DAU		1	250,000,000	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Barru	100	107,000,000	DAU		100	107,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Barru	1	32,000,000	DAU		1	32,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Barru	33	25,000,000	DAU		33	25,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Barru	7	50,000,000	DAU		7	50,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Kab. Barru	100	87,600,000	DAU		100	87,600,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Barru	1	15,000,000	DAU		1	15,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Barru	3	30,600,000	DAU		3	30,600,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	1	42,000,000	DAU		1	42,000,000	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Barru	100	49,536,000	DAU		100	49,536,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Barru	6	39,536,000	DAU		6	39,536,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Barru	12	5,000,000	DAU		12	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Barru	5	5,000,000	DAU		5	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan		100	170,762,912			100	175,031,984	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	Kab. Barru	100	170,762,912	DAU		100	175,031,984	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	5	31,262,500	DAU		5	32,044,063	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	7	35,977,077			7	36,876,504	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	10	77,257,709			10	79,189,152	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1	26,265,625			1	26,922,266	DINAS SOSIAL
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		100	12,235,000			100	12,235,000	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Kasus pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	Kab. Barru	5	12,235,000	DAU		5	12,235,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	10	12,235,000	DAU		10	12,235,000	DINAS SOSIAL
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)		100	75,931,630			100	78,046,579	DINAS SOSIAL
							Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		100	42,000,000			100	43,000,000	
							Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		100	42,000,000			100	43,000,000	
							Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial		100	78,100,000			100	81,000,000	

							dasar tna sosial di luar panti (SPM)							
							Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial							
1	0	0		2.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Kab. Barru	15	75,931,630	DAU	15	78,046,579	DINAS SOSIAL
							Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		5	42,000,000		5	43,000,000	DINAS SOSIAL
							Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)		5	42,000,000		5	43,000,000	DINAS SOSIAL
							Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)		15	78,100,000		15	81,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Kab. Barru	40	108,150,000	DAU	40	111,394,500	DINAS SOSIAL

							Kewenangan Kabupaten/Kota								
1	0	0		2.	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	40	108,150,000	DAU		40	111,394,500	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	2	3,811,000	DAU		2	3,925,330	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	3	9,270,000	DAU		3	9,548,100	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	20	46,350,000	DAU		20	47,740,500	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	21	4,200,000	DAU		21	4,200,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	15	54,920,630	DAU		15	56,568,249	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Kab. Barru	13	60,900,000	DAU		13	60,900,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	100	50,000,000	DAU		100	50,000,000	DINAS SOSIAL

1	0	0		2.	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	7	1,400,000	DAU	7	1,400,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	3	9,500,000	DAU	3	9,500,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1	53,321,000	DAU	1	53,321,000	DINAS SOSIAL
1	0	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial		100	538,683,987		100	564,368,187	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitasi Bantuan	Kab. Barru	72000	538,683,987	DAU	72000	564,368,187	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	Kab. Barru	72000	382,433,987	DAU	72000	401,555,687	DINAS SOSIAL

							Kabupaten/Kota yang Didata								
1	0	0		2.	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1	25,000,000	DAU		1	25,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1100	78,750,000	DAU		1100	82,687,500	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	100	52,500,000	DAU		100	55,125,000	DINAS SOSIAL
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)		100	335,634,088			100	343,915,792	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Kab. Barru	300	275,634,088	DAU		300	283,915,792	DINAS SOSIAL

1	0	0		2. 0 1	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1500	50,000,000	DAU		1500	50,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2. 0 1	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1	25,000,000	DAU		1	25,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2. 0 1	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	100	165,634,088	DAU		100	173,915,792	DINAS SOSIAL
1	0	0		2. 0 1	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	20	35,000,000	DAU		20	35,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2. 0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana	Kab. Barru	100	60,000,000	DAU		100	60,000,000	DINAS SOSIAL
1	0	0		2. 0 2	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	10	60,000,000	DAU		10	60,000,000	DINAS SOSIAL

1	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan		100	63,017,460			100	64,907,984	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	Kab. Barru	7	63,017,460	DAU		7	64,907,984	DINAS SOSIAL
1	0	0		2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	7	63,017,460	DAU		7	64,907,984	DINAS SOSIAL
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	7					BIDANG TENAGA KERJA									
2	7	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Disnaker		3.00	2,312,221,373			3	2,374,665,648	DINAS TENAGA KERJA
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		5,248 JPL				2368		
2	7	0		2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	1,575,000			100%	1,653,750	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BARRU	3 Dokumen	1,575,000	DAU		3	1,653,750	DINAS TENAGA KERJA

2	7	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	1,320,430,898			1	1,386,452,443	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BARRU	20	1,320,430,898	DAU		20	1,386,452,443	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan barang Milik daerah Perangkat daerah		100%	1,353,975			100%	1,421,674	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	3	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BARRU	2 Dokumen	1,575,000	DAU		2	1,421,674	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	BARRU	100%	84,525,000	DAU		100%	88,751,250	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	5	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BARRU	0 Paket	-	DAU		0	-	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	5	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		8 Orang	62,475,000	DAU		8	65,598,750	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0	5	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BARRU	8 Orang	22,050,000	DAU		8	23,152,500	DINAS TENAGA KERJA

							Perundang-Undangan								
2	7	01		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	BARRU	100%	257,686,500			100%	431,972,200	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BARRU	1 Paket	1,837,500	DAU		1	1,929,375	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BARRU	3 Paket	15,000,000	DAU		4	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BARRU	1 Paket	2,184,000	DAU		1	7,860,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BARRU	1 Paket	16,506,000	DAU		1	17,331,300	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BARRU	1 Paket	3,360,000	DAU		1	5,800,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BARRU	2 Laporan	5,050,500	DAU		2	5,303,025	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	213,748,500	DAU		1	213,748,500	DINAS TENAGA KERJA

2	7	01		2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BARRU	0 Dokumen		DAU	1	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD		100%	393,800,000		100%	195,414,331	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BARRU	3 Unit	130,000,000	DAU	3	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BARRU	6 Unit	107,500,000	DAU	6	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BARRU	0 Unit	152,000,000	DAU	1	35,660,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BARRU	4 Unit	4,300,000	DAU	5	79,754,331	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi		100%	148,000,000		1	153,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BARRU	1 Laporan	100,000,000	DAU	1	105,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	01		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	BARRU	1 Laporan	30,000,000	DAU	1	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA

							dan Listrik yang Disediakan								
2	7	0		2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BARRU	1 Laporan	18,000,000	DAU		1	18,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai		100%	104,850,000			1	116,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BARRU	7 Unit	39,200,000	DAU		8	45,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BARRU	1 Unit	650,000	DAU		1	1,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BARRU	1 Unit	5,000,000	DAU		1	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	BARRU	0 Unit	-	DAU		0	-	DINAS TENAGA KERJA
2	7	0		2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BARRU	1 Unit	60,000,000	DAU		1	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	BARRU	100	109,948,467				112,147,436	DINAS TENAGA KERJA

							rencana tenaga kerja								
2	0	0		2.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusnya Rencana Kerja Makro dan Mikro		1	109,948,467				112,147,436	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	BARRU	100 Orang	65,228,746			100	68,490,183	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	BARRU	100 Orang	44,719,721			100	43,657,253	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		20 %	547,567,202			20	558,518,546	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi		60.00 %	531,079,590			63.08	540,255,696	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		80 Orang	191,079,590			100	195,255,696	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	BARRU	4 Lembaga	55,000,000			4	55,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan		151 Unit	285,000,000			151	290,000,000	DINAS TENAGA KERJA

							Sarana Pelatihan Kerja								
2	0	0		2.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi		57.14%	5,128,612			0.7143	5,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	BARRU	1 Lembaga	5,128,612			1	5,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Presentase LPK yang memiliki perizinan		100%	1,642,000			1	2,560,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	BARRU	5 Perizinan	1,642,000			5	2,560,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitasi Konsultasi Produktivitas		48.65%	9,717,000			64.86%	10,202,850	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	BARRU	6 Perusahaan	9,717,000			6	10,202,850	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		60.00%	195,708,271			60.50%	199,622,437	DINAS TENAGA KERJA

2	0	0		2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar		52.22%	74,823,854			0.5	78,738,020	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	BARRU	10 Orang	37,282,854			10	39,282,544	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	BARRU	15 Orang	15,121,000			15	17,035,476	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	BARRU	5 Orang	5,670,000			5	5,670,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	BARRU	500 Orang	16,750,000			500	16,750,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki Izin Usaha sesuai Peraturan per Undang undangan		100%	46,900,000			1	46,900,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	BARRU	1 Lembaga	23,450,000			1	23,450,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan	BARRU	2 Lembaga	23,450,000			2	23,450,000	DINAS TENAGA KERJA

							Aturan yang Berlaku								
2	0	0		2.		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase layanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan sesuai standard peraturan Per Undang undangan		100%	24,210,000			1	24,210,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	BARRU	10 Orang	8,560,000			10	8,560,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	BARRU	7 Orang	15,650,000			7	15,650,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Sesuai Standard Per Undang Undangan	BARRU	100%	49,774,417			1	49,774,417	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	BARRU	6 Orang	11,437,000			6	11,437,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	BARRU	8 Orang	8,337,417			10	8,337,417	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	BARRU	10 Orang	30,000,000			10	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA

2	0	0				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		40.54%	31,212,000			0.5405	31,836,240	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dan pendafaran PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJamsostek bagi perusahaan		45.57%	16,096,000			0.5568	16,096,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	BARRU	12 Perusahaan	4,792,000			12	4,792,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	BARRU	12 Perusahaan	4,804,000			12	4,804,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	BARRU	4 Laporan	6,500,000			4	6,500,000	DINAS TENAGA KERJA

2	0	0		2.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan		100%	15,116,000			100%	15,740,240	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	BARRU	12 Perkara	9,271,000	9,271,000		12 Perkara	9,271,000	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	BARRU	12 Perkara	3,500,000	3,500,000		12 Perkara	3,824,240	DINAS TENAGA KERJA
2	0	0		2.	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	BARRU	12 Perusahaan	2,345,000	2,345,000		12 Perusahaan	2,645,000	DINAS TENAGA KERJA
2	8					BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	0	2				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		18,85%	159,000,000	Dana Alokasi Umum		0.189	162,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	2	2	0	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelembagaan Pengarusutamaan Gender		36 PD	77,000,000	Dana Alokasi Umum		36 PD	78,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA

2	0	2	2	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	36 Dok	77,000,000	Dana Alokasi Umum	36 Dok	78,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	2	2	0	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	Barru	0,35		Dana Alokasi Umum	0,36		Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	2	2	0	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	7 Organisasi	82,000,000	Dana Alokasi Umum	7 Organisasi	84,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Efektifitas pemanfaatan data gender dan anak		85%	57,000,000	Dana Alokasi Umum	0.88	57,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	5	2	0	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan		100%		Dana Alokasi Umum	1		Dinas PMD PPKB PPPA

2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Barru	3 Dok	57,000,000	Dana Alokasi Umum		3 Dok	57,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya		100	113,000,000	Dana Alokasi Umum		750	115,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	6	2	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Predikat Kabupaten Layak Anak		Madya		Dana Alokasi Umum		Nindya		Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	6	2	01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	4 dok	113,000,000	Dana Alokasi Umum		4 dok	115,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		0,73%	302,000,000	Dana Alokasi Umum		0,63%	355,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan		16 Kasus		Dana Alokasi Umum		15 Kasus		Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	03	2	01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Barru	2 Dok	80,000,000	Dana Alokasi Umum		2 Dok	80,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA

							Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	3	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan	Barru	100%		Dana Alokasi Umum	100%			Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	3	2	02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Barru	6 org	20,000,000	Dana Alokasi Umum	5 org	20,000,000		Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	3	2	02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	6 layanan	202,000,000	Dana Alokasi Umum	5 layanan	255,000,000		Dinas PMD PPKB PPPA
2	08	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak		0,15%	63,000,000	Dana Alokasi Umum	0.13%	63,000,000		Dinas PMD PPKB PPPA

2	0	7	2	0	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan		100%		Dana Alokasi Umum	100%		Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	7	2	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	36 PD	16,000,000	Dana Alokasi Umum	36 PD	16,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	7	2	0	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani		100%		Dana Alokasi Umum	100%		Dinas PMD PPKB PPPA
2	0	7	2	0	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	4 orang	47,000,000	Dana Alokasi Umum	4 orang	47,000,000	Dinas PMD PPKB PPPA
2	9					BIDANG PANGAN								
2	0	9	2			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Barru	46.00%	200,000,000		47%	220,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2	0	0		2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Barru	9 Unit	200,000,000			9 Unit	220,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Barru	1 Unit	20,000,000			1 Unit	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	Jumlah Lantaijemur yang Tersedia	Barru	1 Unit	100,000,000			1 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Barru	7 Unit	80,000,000			7 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	Barru	95	449,768,155			96	457,272,855	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Barru	100	100,000,000			100	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2	0	0		2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Barru	10 Laporan	25,000,000			10 Laporan	25,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Barru	12 Dokumen	25,000,000			12 Dokumen	25,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Barru	10 Unit	25,000,000			10 Unit	25,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Barru	10 Unit	25,000,000			10 Unit	25,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Barru	3 Unit	100,000,000			3 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Barru	7 Laporan	30,000,000			7 Laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Barru	11 Ton	50,000,000			11 Ton	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2	0	0		2.	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Barru	4 Ton	20,000,000			4 Ton	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	Barru	7 Laporan	30,000,000			7 Laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.	01	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Barru	7 Laporan	30,000,000			7 Laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	Barru	75	219,768,155			78	227,272,855	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Barru	8 Dokumen	30,000,000			8 Dokumen	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Barru	1 Laporan	72,000,000			1 Laporan	72,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Barru	1 Laporan	67,768,155			1 Laporan	75,272,855	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							Pengadaan Green House	Barru	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pengadaan bibit pemanfaatan pekarangan	Barru	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Barru	7 Laporan	30,000,000			7 Laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Barru	68	140,000,000			72	140,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Barru	68	140,000,000			72	140,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Barru	1 Dok	20,000,000			1 Dok	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	1 Dok	70,000,000			1 Dok	70,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2	0	0		2.	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	1 Dok	50,000,000			1 Dok	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	Barru	0.60%	273,000,000			0.005	290,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Barru	1 Dok	93,000,000			1 Dok	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Barru	1 Dok	93,000,000			1 Dok	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Barru	4 Desa	180,000,000			4 Desa	190,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Barru	14 Laporan	30,000,000	14 Laporan		14 Laporan	40,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	0	0		2.	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	Barru	4 Dok	150,000,000	7 Dok		7 Dok	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							(Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	1 0					BIDANG PERTANAHAN										
2	1 0	0 4				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1.00	12,750,300			100	12,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM	
2	1 0	0 4	2. 0 1			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1 Kasus	12,750,300	DAU		2	12,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM	
2	1 0	0 4	2. 0 1	0 2		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	12,750,300	DAU		2	12,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM	
							Pengukuran Batas Lahan HKM & LPHD (Hutan Kemasyarakatan) Untuk Masyarakat Dusun PaccekkeKecamata n Soppeng Riaja		1 Berita Acara	12,750,300	DAU		2	12,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM	
2	1 0	0 6				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian		100%	2,750,300		-	100	2,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM	

2	1	0	2.			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria		1 Dokumen	2,750,300	DAU		1	2,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM
2	1	0	2.	0		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		1 Dokumen	2,750,300	DAU		1	2,750,300	Dinas PUTR dan PERKIM
2	1	1				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	1	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP DLH		3.00	2,458,912,10 2			3.00	2,458,912,10 2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		20	90,000,000			20	95,000,000	
2	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	2,083,701,66 7			100%	2,139,832,97 5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	17 orang/bulan	2,083,701,66 7	DAU		17 orang/bulan	2,139,832,97 5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/ fungsional		100	90,000,000			100	95,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1 1	0 1	2	0 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	2 Orang	90,000,000	DAU		2 Orang	95,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	197,651,593			100%	145,794,172	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	3 Paket	58,800,000	DAU		3 Paket	61,740,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	4 Paket	5,396,068	DAU		4 Paket	5,665,871	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 8		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	12 Lap	3,780,000	DAU		12 Lap	3,969,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	144 Lap	129,675,525	DAU		233 Lap	136,159,301	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		100%	106,775,092			100%	105,196,337	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	142,5 Lap	31,575,092	DAU		135 Lap	29,996,337	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Barru	332,5 Surat				316 Surat		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1 1	0 1	2	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	12 Lap	20,000,000	DAU		12 Lap	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	6 Lap	55,200,000	DAU		6 Lap	55,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah		100	70,783,750			100	79,533,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barru	23 Unit	35,937,500	DAU		23 Unit	38,125,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	2 Unit	20,000,000	DAU		2 Unit	22,187,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3 Unit	7,008,750	DAU		3 Unit	9,196,250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 1	2	1 0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	1 Unit	7,837,500	DAU		1 Unit	10,025,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1	0				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Barru	100%	350,000,000			100%	365,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian dok RPPLH	Barru	100%	-			100%	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Barru	- Dok	-			- Dok	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.01	02		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Barru	1 Dok	-	DAU		1 Dok	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun		1 Dok	350,000,000			1 Dok	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.02	01		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Barru	1 Dok	200,000,000	DAU		1 Dok	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.02	02		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Barru	1 Dok	150,000,000	DAU		1 Dok	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1 1	0 3				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		28%	96,670,400			26%	289,882,582	DINAS LINGKUNG AN HIDUP
2	1 1	0 3	2. 0 1			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya		3 Keg	88,817,900			3 Keg	270,237,002	DINAS LINGKUNG AN HIDUP
2	1 1	0 3	2. 0 1	0 1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Barru	2 Dok	43,630,400	DAU		3 Dok	106,740,612	DINAS LINGKUNG AN HIDUP
2	1 1	0 3	2. 0 1	0 2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Barru	1 Dok	15,187,500	DAU		1 Dok	17,618,150	DINAS LINGKUNG AN HIDUP
2	1 1	0 3	2. 0 1	0 3		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Barru	2 Dok	30,000,000	DAU		2 Dok	145,878,240	DINAS LINGKUNG AN HIDUP
2	1 1	0 3	2. 0 2			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerus akan LH yang disusun		1 Keg	7,852,500			1 Keg	19,645,580	DINAS LINGKUNG AN HIDUP

2	1 1	0 3	2. 0 2	0 1		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Barru	1 Lap	7,852,500	DAU		1 Lap	19,645,580	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 4				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati		100%	177,651,150			100%	326,395,125	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 4	2. 0 1			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara		1 Lokasi	177,651,150			1 Lokasi	326,395,125	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	4	2	0 4		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru, desa bojo, cenrapole desa pancana	18,52 Ha	177,651,150	DAU		18,52 Ha	326,395,125	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 5				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola		85,43 %	101,416,200			85,85 %	111,557,820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 5	2			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3		2 Usaha	33,926,200			2 Usaha	37,318,820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 5	2. 0 1	0 2		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Barru	4 Lap	33,926,200	DAU		4 Lap	37,318,820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1	0	2.			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpul LB3		1 Pengumpul	67,490,000			1 Pengumpul	74,239,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	2.	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Barru	5 Dok	67,490,000	DAU		7 Dok	74,239,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	23,520,000			100%	24,403,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1 1	0 6	2. 0 1			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20 Usaha	23,520,000			20 Usaha	24,403,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 6	2. 0 1	0 1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Barru	10 Dok	8,870,000	DAU		10 Dok	9,313,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 6	2. 0 1	0 3		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Barru	10 Lap	14,650,000	DAU		10 Lap	15,089,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 7				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Barru	100%	10,977,000			100%	11,306,310	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 7	2. 0 1			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terdata	Barru	1 DOK	10,977,000	DAU		1 DOK	11,306,310	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1 1	0 7	2. 0 1	0 1		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Barru	1 DOK	10,977,000	DAU		1 DOK	11,306,310	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 8				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup		82%	69,894,255			84%	71,991,083	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	0 8	2. 0 1			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH		2 lembaga	69,894,255			2 lembaga	71,991,083	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	8	2	0 2		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Barru, desa harapan , kel. Lompotiraja	2 Dok	69,894,255	DAU		2 Dok	71,991,083	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 0				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan		100%	11,524,800			100%	12,101,040	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

							sesuai peraturan per Uuan								
2	1 1	1 0	2. 0 1			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH		3 Pengaduan	11,524,800			4 Pengaduan	12,101,040	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 0	2. 0 1	0 1		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Barru	3 Dok	11,524,800	DAU		4 Dok	12,101,040	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1				Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani		81.63%	3,873,600,000			82.00%	4,055,495,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	2			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola		24550,6 Ton	3,873,600,000			24551 Ton	4,055,495,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	2. 0 1	0 1		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Barru	1 Dok	46,420,000	DAU		1 Dok	51,062,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	2. 0 1	3		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Barru	190 Org	2,914,650,000	DAU		190 Org	2,956,450,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	1 1	1 1	2. 0 1	0 4		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Barru	2 Kelompok	85,030,000	DAU		2 Kelompok	93,533,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	2. 0 1	0 6		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Barru	1 Dok	49,500,000	DAU		1 Dok	54,450,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1 1	2. 0 1	0 7		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	kec. Barru, kel. Sumpang binangae, kel. Mangempan g	150 Unit	778,000,000	DAU + DAK		170 Unit	900,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 2					BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	1 2	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kab. Barru	3.00	4,602,493,086	DAU		3	4,184,648,086	Dinas Kependudukan dan Capil
							Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	130,000,000	DAU		20 JPL	140,000,000	

X	X	0		2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	-	DAK		1	220,516,500	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	-	DAK		2 Dokumen	4,266,500	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	-	DAK		1 Laporan	13,500,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	-	DAK		1 Dokumen	202,750,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	1		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima gaji dan tunjangan		100%	2,993,706,086	DAU		100%	3,032,794,586	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	1		2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/Bulan	2,993,706,086	DAU		30 Orang/Bulan	3,032,794,586	Dinas Kependudukan dan Capil

X	X	0		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		85%	130,000,000	DAU		85%	140,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	30,301,500	DAU		15 Orang	33,301,500	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		120 Orang	28,838,000	DAU		120 Orang	35,838,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	70,860,500	DAU		17 Orang	70,860,500	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	383,785,000	DAU		100%	552,135,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	1,000,000	DAU		3 Paket	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	330,720,000	DAU		2 Paket	402,820,000	Dinas Kependudukan dan Capil

X	X	0	2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	1,000,000	DAU		5 Paket	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	1,815,000	DAU		1 Laporan	1,815,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64 Laporan	49,250,000	DAU		103 Laporan	145,500,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	900,000,000	DAU		100%	113,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	900,000,000	DAU		0 Unit	-	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	DAU		3 Unit	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	-	DAU		5 Unit	88,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0	2.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	DAU		-	-	Dinas Kependudukan dan Capil

X	X	0		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		100%	260,452,000	DAU		100%	190,652,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	15,652,000	DAU		12 Laporan	16,652,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	244,800,000	DAU		12 Laporan	174,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	64,550,000	DAU		100%	75,550,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		21 Unit	53,550,000	DAU		21 Unit	64,550,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	-	DAU		-	-	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16 Unit	8,000,000	DAU		16 Unit	8,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
X	X	0		2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		2 Unit	2,000,000	DAU		2 Unit	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil

X	X	0		2.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,000,000	DAU		2 Unit	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	Kab. Barru	99%	293,446,000	DAU	99%	256,463,500	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk		4 Jenis	167,283,000	DAU	4 Jenis	150,500,500	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		4 Dokumen	46,596,500	DAU	4 Dokumen	29,814,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	120,686,500	DAU	1 Laporan	120,686,500	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan		3 Jenis	94,950,000	DAU	3 Jenis	74,750,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		4 Laporan	14,000,000	DAU	4 Laporan	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil

2	1	0		2.	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		2 Dokumen	64,200,000	DAU		2 Dokumen	35,250,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	16,750,000	DAU		1 Laporan	24,500,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		1 Jenis	31,213,000	DAU		1 Jenis	31,213,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		4 Laporan	31,213,000	DAU		4 Laporan	31,213,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		0	00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	Kab. Barru	98%	172,773,000	DAU		99%	181,525,750	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil		3 Jenis	120,273,000	DAU		3 Jenis	127,748,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		4 Dokumen	17,075,000	DAU		4 Dokumen	13,550,000	Dinas Kependudukan dan Capil

2	1	0		2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		1 Layanan	103,198,000	DAU		1 Layanan	114,198,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Sipil yang Diselenggarakan		3 Jenis	47,500,000	DAU		3 Jenis	48,777,750	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		4 Laporan	20,500,000	DAU		4 Laporan	21,777,500	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	27,000,000	DAU		1 Laporan	27,000,250	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1 Jenis	5,000,000	DAU		1 Jenis	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan		2 Laporan	5,000,000	DAU		2 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENINGKATAN OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN	Kab. Barru	22%	178,629,000	DAU		31%	184,961,500	Dinas Kependudukan dan Capil

							DATA KEPENDUDUKAN								
2	1 2	0 4		2. 0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dikumpulkan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		100%	99,431,000	DAU		100%	99,711,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1 2	0 4		2. 0 1	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		2 Dokumen	49,000,000	DAU		2 Dokumen	49,280,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1 2	0 4		2. 0 1	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		8 Dokumen	50,431,000	DAU		11 Dokumen	50,431,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1 2	0 4		2. 0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola		100%	79,198,000	DAU		100%	85,250,500	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1 2	0 4		2. 0 3	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4 Laporan	25,500,000	DAU		4 Laporan	23,250,000	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1 2	0 4		2. 0 3	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		7 Laporan	53,698,000	DAU		7 Laporan	62,000,500	Dinas Kependudukan dan Capil

2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMANFAATAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Barru	100%	30,550,500	DAU		1	72,500,250	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang Disusun		100%	30,550,500	DAU		1	72,500,250	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	0		2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		1 Dokumen	30,550,500	DAU		1 Dokumen	72,500,250	Dinas Kependudukan dan Capil
2	1	3				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		3	3,722,255,653	Dana Alokasi Umum		3	3,735,255,653	Dinas PMDPPKBP PPA
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL		Dana Alokasi Umum		20 JPL		
						Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	3,248,255,653	Dana Alokasi Umum		100%	3,248,255,653	Dinas PMDPPKBP PPA

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 org/ bulan	3,248,255,653	Dana Alokasi Umum		36 org/ bulan	3,248,255,653	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		22.22%	77,500,000	Dana Alokasi Umum		22%	79,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 org	32,500,000	Dana Alokasi Umum		5 org	32,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	1	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru	3 Orang	45,000,000	Dana Alokasi Umum		3 Orang	47,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Barru	100%	129,000,000	Dana Alokasi Umum		100%	132,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	10 Paket	2,500,000	Dana Alokasi Umum		10 Paket	2,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	1	2	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	12 Paket	1,500,000	Dana Alokasi Umum		12 Paket	1,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA

2	1 3	1	2	0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	20 Laporan	125,000,000	Dana Alokasi Umum	20 Laporan	128,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barru	100%	106,000,000	Dana Alokasi Umum	100%	109,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	5 unit	26,000,000	Dana Alokasi Umum	5 unit	27,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	25,000,000	Dana Alokasi Umum	5 unit	25,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	3 unit	35,000,000	Dana Alokasi Umum	3 unit	36,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	5 unit	20,000,000	Dana Alokasi Umum	5 unit	21,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Barru	100%	97,500,000	Dana Alokasi Umum	100%	99,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	2 Laporan	69,000,000	Dana Alokasi	2 Laporan	70,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA

											i Umum				
2	1 3	1	2	0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	12 Laporan	18,500,000	Dana Alokas i Umum		12 Laporan	19,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	12 Laporan	10,000,000	Dana Alokas i Umum		12 Laporan	10,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	64,000,000	Dana Alokas i Umum		100%	67,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	29 unit	45,000,000	Dana Alokas i Umum		29 unit	47,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	2 unit	7,000,000	Dana Alokas i Umum		2 unit	7,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barru	43 unit	3,000,000	Dana Alokas i Umum		43 unit	3,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	1	2	0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Barru	2 unit	9,000,000	Dana Alokas i Umum		2 unit	9,500,000	Dinas PMDPPKBP PPA

2	1 3	3				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%		37.50%	47,000,000	Dana Alokasi Umum		50%	54,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	3	2	0 1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan		37.50%		Dana Alokasi Umum		50%		Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	3	2	0 1	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Barru	40 dok	27,000,000	Dana Alokasi Umum		40 dok	29,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	0 3	2	0 1	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Barru	40 dok	20,000,000	Dana Alokasi Umum		40 dok	25,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib administrasi sesuai peraturan Per UU an		100%	1,931,000,000	Dana Alokasi Umum		100%	1,419,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an		100%		Dana Alokasi Umum		100%		Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Barru	40 Dok	900,000,000	Dana Alokasi Umum		40 Dok	900,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	Barru	40 Dok	30,000,000	Dana Alokasi		40 Dok	30,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA

							Produk Hukum Desa				i Umum				
2	1 3	4	2	0 1	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Barru	40 Dok	55,000,000	Dana Alokas i Umum		40 Dok	70,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	1	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Barru	40 orang	46,000,000	Dana Alokas i Umum		40 orang	56,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Barru	40 Laporan	42,000,000	Dana Alokas i Umum		40 Laporan	45,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Barru	40 Dok	43,000,000	Dana Alokas i Umum		40 Dok	45,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		12 Laporan	550,000,000	Dana Alokas i Umum		0	-	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	0 1	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Barru	55 dok	80,000,000	Dana Alokas i Umum		55 dok	85,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	4	2	1	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Barru	80 orang	80,000,000	Dana Alokas i Umum		80 orang	80,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA

2	1 3	4	2	0 1	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Barru	55 dok	105,000,000	Dana Alokasi Umum	55 dok	108,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi		100%	540,000,000	Dana Alokasi Umum	100%	571,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	5	2	0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina		6 lembaga		Dana Alokasi Umum	6 lembaga		Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 3	5	2	0 1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Barru	3 lembaga	36,000,000	Dana Alokasi Umum	4 lembaga	38,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA

2	13	5	2	01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Barru	5 dok	120,000,000	Dana Alokasi Umum	5 dok	123,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	5	2	01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Barru	40 Laporan	59,000,000	Dana Alokasi Umum	40 Laporan	60,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	13	5	2	01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Barru	55 dok	325,000,000	Dana Alokasi Umum	55 dok	350,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	14					BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		14.65	3,331,120,000	Dana Alokasi Umum	14.75	3,345,120,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	14	3	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan		80%		Dana Alokasi Umum	85%		Dinas PMDPPKBP PPA

2	1 4	3	2	0 1	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Barru	15 Organisasi	56,000,000	Dana Alokasi Umum	15 Organisasi	58,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 4	3	2	0 1	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Barru	3 Dok	56,000,000	Dana Alokasi Umum	3 Dok	56,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 4	3	2	0 2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB		100%		Dana Alokasi Umum	100%		Dinas PMDPPKBP PPA

2	1 4	3	2	0 2	3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Barru	12 laporan	657,120,000	Dana Alokasi Umum	12 laporan	657,120,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 4	3	2	0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi		100%		DAK	100%		Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 4	3	2	0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Barru	5 unit	2,500,000,000	DAK	5 unit	2,510,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 4	3	2	0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Keterpenuhan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100%		Dana Alokasi Umum	100%		Dinas PMDPPKBP PPA
2	1 4	3	2	0 4	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan	Barru	15 Organisasi	62,000,000	Dana Alokasi Umum	15 Organisasi	64,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA

							Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2	14	4					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	66,67%	25,000,000	Dana Alokasi Umum	83,33%	25,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA	
2	14	4	2	01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Kegiatan Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Keg		Dana Alokasi Umum	5 Keg		Dinas PMDPPKBP PPA	
2	14	4	2	01	3		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Barru	6 Laporan	25,000,000	Dana Alokasi Umum	6 Laporan	25,000,000	Dinas PMDPPKBP PPA
2	15					BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan		3	4,352,079,887	DAU	3		Dinas Perhubungan	
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 jpl			20 jpl			
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan		100 %	3,354,754,887	DAU	100%		Dinas Perhubungan	

							perundang-undangan								
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dishub	39 orang	3,344,254,887			39 orang	3,376,552,436	Dinas Perhubungan
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		24 Dokumen	2,000,000				2,200,000	Dinas Perhubungan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	500,000				550,000	Dinas Perhubungan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	8,000,000				9,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		100 %	100,000,000	DAU		100%		Dinas Perhubungan
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 paket	-			1	60,000,000	Dinas Perhubungan

2	1 5	0 1	2 0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 orang	25,000,000			3	Rp 40,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15 orang	75,000,000			17	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	478,325,000.00	DAU		100%	-	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 paket	825,000			10	550,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	30,000,000			3	17,500,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 paket	5,000,000			2	2,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	80,000,000			2	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak		100 Dokumen	3,500,000			100	4,000,000	Dinas Perhubungan

						dan Penggandaan yang Disediakan								
2	1 5	0 1	2 0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	9,000,000			12	9,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		750 laporan	350,000,000			800	350,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	147,500,000.00	DAU		100%	-	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	100,000,000			1	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 unit	7,500,000			3	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 unit	30,000,000			2	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 7	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1 unit Tug Boat	8,000,000,000	APBN				Dinas Perhubungan
2	1 5	0 1	2 0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	10,000,000			1	10,000,000	Dinas Perhubungan

2	15	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	62,500,000.00	DAU		100%	-	Dinas Perhubungan
2	15	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dishub	1600 laporan	2,500,000			1600	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Dishub, UPTD PKB, UPTD Pelabuhan , Traffic Light	12 laporan	60,000,000			12	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kantor Dishub	100 %	209,000,000.00	DAU		100%	-	Dinas Perhubungan
2	15	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 unit	Rp 29,000,000			2	Rp 29,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 unit	70,000,000			17	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 unit	5,000,000			5	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		36 unit	20,000,000			40	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	209	07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		1 unit	60,000,000			2	60,000,000	Dinas Perhubungan

2	15	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	15,000,000			1	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	10,000,000			2	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		100	6,015,823,801	DAU		100	4,236,262,000	Dinas Perhubungan
						persentase layanan angkutan darat		100				100		
2	15	02	202		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		7	Rp 4,365,823,801	DAU		8		Dinas Perhubungan
2	15	02	202	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0	0			3	240,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	202	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Kecamatan	840	3,545,858,801			120	1,976,048,750	Dinas Perhubungan

								Pengadaan Rambu-rambu jalan di dusun Bunne & Pasar Baru	Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	15							Dinas Perhubungan
								Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kawasan Masjid (Lampu Lalin)	Rt 1 Dusun Pallambarae , Kec. Soppeng Riaja	2	30,000,000		Diteruskan ke BPTD Kemenhub		30,000,000		Dinas Perhubungan
								Pengadaan Trafic Light (Lampu Merah)	Desa Bojo, Kec. Mallusetasi	2			Diteruskan ke BPTD Kemenhub				Dinas Perhubungan
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan (Kaca Cembung)	Tellumpanua, Tanete Rilau	4	6,000,000				6,000,000		Dinas Perhubungan
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan (Kaca Cembun Lalulintas Septi Jalan)	Kel. Lalolang, Tanete Rilau	8	50,000,000				50,000,000		Dinas Perhubungan
								Pengadaan Cermin Tikungan (Cembung)	Rt 1 Dusun Kampung Baru dan Rt 2 Dusun Ajakkang, Kec. Soppeng Riaja	5	50,000,000				50,000,000		Dinas Perhubungan
								Pemasangan Lensa Cembung dan Marka Di jalan poros Kabupaten	Jalan Poros Tompo, Kec. Barru								Dinas Perhubungan
								Pengadan Cermin Tikungan (Cembung)	Semua Dusun Desa Pujananting Kec. Pujananting	20	100,000,000				100,000,000		Dinas Perhubungan

								Permintaan Cermin Cembung lalu lintas	Jalan Poros Kamiri, Kec. Balusu	2							Dinas Perhubungan
								Penyediaan Perlengkapan Marka Jalan (Tanda Jalan)	Lalabata, Matajang, Bacu-Bacu, Kec. Tanete Rilau	4	160000000					160000000	Dinas Perhubungan
								Pengadaan Pagar pengaman Jalan poros Paccekke - mangkoso	Paccekke - mangkoso Kec. Soppeng Riaja	500	150,000,000					150,000,000	Dinas Perhubungan
								Guardrail/Pagar Pengaman Jalan	Jln Poros Kiru-Kiru Manuba, Kec. Soppeng Riaja	1000	1,000,000,000					1,000,000,000	Dinas Perhubungan
								Pemasangan pagar pembatas Tepi jalan (Guardial)	Desa Janganjang an Kec. Pujananting	1	50,000,000					50,000,000	Dinas Perhubungan
								Pengadaan Pagar pengaman Jalan	Desa Bacubacu, Kec. Pujananting	100	200,000,000					200,000,000	Dinas Perhubungan
								Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Poros Punranga-Gattareng, Kec. Pujananting	100	200,000,000					200,000,000	Dinas Perhubungan
								Pembangunan Pengaman Jalan	Dusun Palampang-Lappatemu Desa Bulobulo Kec. Pujananting	500	500,000,000					500,000,000	Dinas Perhubungan

								Pagar Pengaman Jalan Pattinggalo	Punranga, Kec.Pujana nting								Dinas Perhubunga n
								Pembangunan pagar pengaman jalan	allu, dusun bonto payung Kec. Pujananting	500							Dinas Perhubunga n
								Pengadaan Lampu Jalan Negara dan Kabupaten	Rt 2 Dusun Kampung Baru dan Rt 2 Dusun Minangatoa ,Kec. Soppeng Riaja	15	150,000,000				150,000,000		Dinas Perhubunga n
								Pemasangan Lampu Jalan	Kec. Soppeng Riaja	40							Dinas Perhubunga n
								Pengadaan Lampu jalan	Desa Bacubacu, Kec. Pujananting	15	75,000,000				75,000,000		Dinas Perhubunga n
								Pengadaan lampu jalan Negara dan jalan Kabupaten	Semua Dusun Desa Pujananting , Kec. Pujananting	10	100,000,000				100,000,000		Dinas Perhubunga n
								Pengadaan lampu jalan Desa Lempang KECAMATAN : TANETE RIAJA		40		DAU					Dinas Perhubunga n
								Pengadaan lampu jalan Menrong, Desa Harapan KECAMATAN : TANETE RIAJA		15	300,000,000	DAU					Dinas Perhubunga n
								Pengadaan lampu jalan Tompo Lemo- Lemo, Desa Harapan		15	50,000,000	DAU					Dinas Perhubunga n

							KECAMATAN : TANETE RIAJA								
							Pengadaaan Lampu Jalan Sepanjang Jalan Padang Loang - Balusu Dusun Padang Loang KECAMATAN : BALUSU		30		DAU				Dinas Perhubunga n
							Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian(Pengadaan Lampu Jalan) Garessi, Lajari KECAMATAN : TANETE RILAU		2		DAU				Dinas Perhubunga n
							Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian(Lampu Jalan dan Aki) Lasitae KECAMATAN : TANETE RILAU		20	100,000,000	DAU				Dinas Perhubunga n
							Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian(Penambah an dan Perbaikan Lampu jalan) Desa Pancana KECAMATAN : TANETE RILAU		20		DAU				Dinas Perhubunga n

								Pemasangan tiang dan lampu jalan 10 buah RT III jampue - Soreang Kel.Mangempang KECAMATAN : BARRU		10			DAU					Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan Desa Anabanua KECAMATAN : BARRU					DAU					Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan Desa Galung KECAMATAN : BARRU					DAU					Dinas Perhubungan
								Penambahan Lampu jalan Semua Dusun Desa Gattareng KECAMATAN : PUJANANTING		50			DAU					Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Padongko	15 Titik								Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan	Lamarua/Coppo	5 Buah								Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Pantai/S.Binangae	5 Buah								Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu jalan	Jl. Lasawesdi Kel.Coppo	5 Buah								Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Lorong Lawae, Kel. Sumpang Binangae									Dinas Perhubungan

								Pengadaan Lampu Jalan	Link. Mangempan g Kel. Mangempan g	3							Dinas Perhubungan
								Lampu jalan	Ana Banua	30 titik							Dinas Perhubungan
								Lampu jalan	DS. Tompo	3 Unit							Dinas Perhubungan
								lampu jalan	ling. Kiru-kiru	10 unit							Dinas Perhubungan
								lampu jalan sidda ceppaga	siddo-ceppaga	15 unit							Dinas Perhubungan
								Pengadaan lampu jalan	paccekke	20 unit							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan	Jalan Poros Kamiri	5 Unut							Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Se- Kec. Soppeng Riaja	10 Titik							Dinas Perhubungan
								Pengadaaan Lampu Jalan	Mallawa, Kec. Mallusetasi	10 titik							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan	Kel. Palanro	5 Unit							Dinas Perhubungan
								Pengadaan tiang lampu jalan(mario-rio desa Nepo)		5 titik							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Penerangan Jalan	Kelurahan Bojo Baru	75 Titik							Dinas Perhubungan

						Lingkungan Kel Bojo Baru								
						Pengandaan Penerangan Jalan Lingkungan Kel. Bojo Baru	Kel Bojo Baru	20 Titik						Dinas Perhubunga n
						Perbaikan Lampu Jalan	Padang Lampe, Kel. Mattapawali e, Kec. Pujananting							Dinas Perhubunga n
						Lampu Jalan	Dusun Barang, Kec. Pujananting							Dinas Perhubunga n
						Lampu Jalan	Tinco							Dinas Perhubunga n
						Lampu Jalan	Jalan Pertanian							Dinas Perhubunga n
						Pengadaan Lampu Jalan	Kec. Pujananting & Kec. Tanete Riaja	100 titik						Dinas Perhubunga n
						Lampu Jalan	Jembatan (Leppe)	3 Titik						Dinas Perhubunga n
						Penambahan Lampu Jalan/Perbaikan	PucuE/DataE							Dinas Perhubunga n
						Pengadaan penerangan lampu jalan dan tiang	Kec. Tanete Rilau	30 titik						Dinas Perhubunga n
						Pengadaan Lampu Jalan	Pekkapao, Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau	5 Titik						Dinas Perhubunga n

								Pengadaan Lampu Jalan	Bonto Penno Desa Pao-Pao	5 Titik							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan	Dusun Lempang Desa Lalabata	5 Titik							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan	Jln Gusungne	4 Titik (4 Tiang, 4 Buah lampu)							Dinas Perhubungan
								Penerangan Lampu Jalan	RT I s/d IV Maddo	10 Unit							Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Mate'ne	20 Unit							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan dari Butung ke Bujung Lompo	Dusun Butung	10 Titik							Dinas Perhubungan
								Pemasangan Lampu Jalan di Pacore	Dusun Matajang	10 Titik							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Rumah Tangga/mesin Genset	Dusun Puteanging	104 KK							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan Pandangnge ke Ance	Dusun Alluppangnge	10 Unit							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan Dusun Allupangnge	Dusun Alluppangnge	10 Ttitik							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan Bersama Tiang	Dusun Karowo	5 (lima) Titik Lengkap							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Jalan	Dusu Maralleng	5 (lima) Titik Lengkap							Dinas Perhubungan

								Pengadaan Lampu Jalan	Dusun Maralleng sampai ke Ance	1.000 Meter							Dinas Perhubungan
								Pengadaan Lampu Listrik Lengkap	Dusun Bujung Lompo	4 (empat) Titik							Dinas Perhubungan
								Penerangan Lampu Jalan	Burancie	10 Unit							Dinas Perhubungan
								Penerangan Lampu jalan		10 Unit							Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Mate'ne	20 Unit							Dinas Perhubungan
								Lampu Jalan	Ance ,	10 Titik							Dinas Perhubungan
								Tambahan lampu jalan 7 titik jalan poros pancaitana	coppeng-coppeng	7 Titik							Dinas Perhubungan
								lampu jalan lorong masuk rumah rasyid	coppeng-coppeng	1 titik							Dinas Perhubungan
								lampu jalan	coppeng-coppeng	10 titik							Dinas Perhubungan
								lampu jalan	balu-balau	10 buah							Dinas Perhubungan
								penerangan lampu jalan	nane'e	5 titik							Dinas Perhubungan
								lampu jalan	Bujung Palla	3 titik							Dinas Perhubungan

2	1 5	0 2	2	0 2	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Kecamatan	10 unit	20,000,000			5	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 2	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		435 unit	799,965,000			435	835,213,250	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 3		Terminal Type C	Jumlah terminal tipe C yang dikelola sesuai standart peraturan perundang-undangan	7 Kecamatan	4 lokasi	352,500,000	DAU		4 lokasi		Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 3	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	7 Kecamatan	2 unit	300,000,000			1	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 3	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		2 unit	30,000,000			0	-	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 3	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 orang	22,500,000			0	-	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan	Kec. Barru	5 sarana dan 1 Prasarana	272,500,000	DAU		5 sarana dan 1 Prasarana		Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 5	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Kec. Barru	1 unit	45,000,000			1	50,000,000	Dinas Perhubungan

							Bermotor yang Tersedia								
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Barru	1 orang	22,500,000			0	-	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kec. Barru	7000 Dokumen	175,000,000			3000	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kec. Barru	6 unit	15,000,000			6	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		4 laporan	15,000,000			4	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	85 ruas	880,000,000	DAU		95 ruas		Dinas Perhubungan
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kantor Dishub	5 laporan	750,000,000			5	750,000,000	Dinas Perhubungan

2	1 5	0 2	2	0 6	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kec. Barru	0 unit	-			40	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 6	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		5 laporan	130,000,000			5	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		1 dokumen	40,000,000	DAU		1 dokumen		Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 7	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		1 orang	25,000,000			0	0	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 7	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		36 laporan	15,000,000			36	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 8		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7 kecamatan	100 %	80,000,000	DAU		100%		Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2	2	0 8	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	7 kecamatan	2 laporan	35,000,000			3	60,000,000	Dinas Perhubungan

2	152	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor		1 laporan	45,000,000			1	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	152	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	25,000,000	DAU		100%		Dinas Perhubungan
2	152	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	2 laporan	25,000,000			2	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	153				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga		2 %	600,000,000	DAU		2%		Dinas Perhubungan
2	153	2	13		Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	persentase keterpenuhan pelabuhan penyeberangan yang fungsional dan sesuai standart peraturan perundang-undangan	Pelabuhan Penyeberangan Garongkong	100 %	Rp 600,000,000	DAU		100		Dinas Perhubungan

2	1 5	0 3	2	1 3	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Pelabuhan Penyeberangan Garongkong	2 unit	250,000,000			2	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 3	2	1 3	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Pelabuhan Penyeberangan Garongkong	2 unit	350,000,000			3	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	1 6					BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	1 6	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP dinas kominfo		3,00	3,837,615,684				3,901,508,168	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 1	2. 0 1			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14 Dokumen dan 8 laporan	2,834,000	DAU			2,834,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 1	2. 0 1	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Diskominsta	6 Dokumen	452,000	DAU			452,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 1	2. 0 1	0 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Diskominsta	2 Dokumen	397,000	DAU			397,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 1	2. 0 1	0 3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kantor Diskominsta	2 Dokumen	397,000	DAU			397,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN

							Perubahan RKA-SKPD							
2	16	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Diskominsta	2 Dokumen	397,000	DAU		397,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor Diskominsta	2 Dokumen	397,000	DAU		397,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Diskominsta	4 Laporan	397,000	DAU		397,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Diskominsta	4 Laporan	397,000	DAU		397,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,001,057,684	DAU		3,150,671,668	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Kantor Diskominsta	31 orang	3,000,639,684	DAU	31 orang	3,150,671,668	DINAS KOMINFOS TAT DAN

							Gaji dan Tunjangan ASN								PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 2	'0 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Diskominst a	Dokumen	209,000	DAU		Dokumen	105,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 2	'0 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Kantor Diskominst a	Dokumen	209,000	DAU		Dokumen	105,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				164,747,000				167,947,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 5	0 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Diskominst a	7 org	103,000,000			7 org	105,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 5	1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kantor Diskominst a	5 org	61,747,000			5 org	62,947,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah				240,045,500				254,046,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN

																PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 6	0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Diskominsta	2 Paket	2,573,500			2 Paket	2,702,500		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 6	0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor Diskominsta	3 Paket	7,100,000			3 Paket	1,500,000		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 6	0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Diskominsta	24 Paket	26,622,000			24 Paket	35,887,500		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 6	0 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Diskominsta	15 laporan	3,000,000			25 laporan	5,000,000		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Prov. SulSel dan Luar SulSel	278 laporan	200,750,000			291 laporan	208,956,000		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				262,548,000				177,937,500		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N
2	1 6	0 1	2. 0 7	0 5		Pengadaan meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor Diskominsta	2 Unit	30,000,000			2 Unit	50,000,000		DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIA N

2	1	0	2.	1		Pengadaan Sarana dan Perasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kantor Diskominsta	3 jenis	232,548,000			4 jenis	127,937,500	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	1		Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kantor Diskominsta	0	-			0	-	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140,958,000				119,072,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Diskominsta		140,958,000				119,072,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,425,500				29,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Diskominsta		19,425,500				22,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Diskominsta	12	6,000,000			12	7,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN

2	1					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat efektifitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik		100%	2,190,173,500				2,269,673,500	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,190,173,500				2,269,673,500	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kantor Diskominsta	12 Dok.	24,000,000			12 Dok.	24,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kantor Diskominsta	3 Dokumen	12,000,000			3 Dokumen	16,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kantor Diskominsta	7 Dokumen	1,173,631,500			7 Dokumen	1,215,631,500	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1		2.	0		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kantor Diskominsta	3 Layanan	500,042,000			3 Layanan	515,042,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kantor Diskominsta	1 Dokumen	67,000,000			1 Dokumen	67,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kantor Diskominsta	45 Orang	268,500,000			45 Orang	275,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN

2	1	2.	1		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kantor Diskominsta	1 Dokumen	45,000,000			1 Dokumen	45,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2			1		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kantor Diskominsta	8 Dokumen	100,000,000			8 Dokumen	112,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo		100%	2,674,876,000					DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,092,240,700				1,394,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kantor Diskominsta	1 Unit	15,000,000			1 Unit	15,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kantor Diskominsta	1 unit	1,077,240,700			1 unit	1,379,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	0	2.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kantor Diskominsta		1,582,635,300				2,347,635,300	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN

2	1 6	0 3	2. 0 2	0 2		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Diskominsta	1 Dokumen	350,000,000					DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 3	2. 0 2	0 3		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kantor Diskominsta	1 Unit	180,000,000			0	-	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 3	2. 0 2	0 7		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kantor Diskominsta	4 unit	20,000,000			5 unit	90,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 3	2. 0 2	0 8		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kantor Diskominsta	1 layanan	375,000,000			7 Layanan	1,600,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 3	2. 0 2	0 9		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kantor Diskominsta	1 Dokumen	300,000,000			1 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1 6	0 3	2. 0 2	1 0		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kantor Diskominsta	7 dokumen	294,900,000			7 dokumen	294,900,000	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN

2	1	0	2	1		Pengelolaan Government Chief Information Officer(GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kantor Diskominsta	1 Dokumen	62,735,300			1 Dokumen	62,735,300	DINAS KOMINFOS TAT DAN PERSANDIAN
2	1	7				BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	1	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Barru	3	3,273,698,014		Barru	3	3,273,293,222	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Barru	20 JPL	110,000,000		Barru	20 JPL	110,000,000	
2	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Barru	100	2,884,845,722		Barru	100	2,884,845,722	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	0	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	30 Org	2,884,845,722		Barru	27 Org	2,884,845,722	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Barru	80	110,000,000		Barru	80	110,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	0	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	4 Orang	65,000,000		Barru	1 Orang	65,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

2	1	0	2	1	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru	4 Orang	45,000,000		Barru	4 Orang	45,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2			Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Barru	100	140,000,000		Barru	100	125,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	0	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	2 Paket	5,000,000		Barru	2 Paket	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar daerah	220 OK	135,000,000		Dalam dan Luar daerah	220 OK	120,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Barru	100%	34,904,792		Barru	100%	45,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	0	1	Pengadaan meubeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	2 Paket	14,952,396		Barru	2 Paket	20,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	1	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	7 Unit	14,952,396		Barru	7 Unit	20,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1	0	2	1	3	Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Barru	3 Unit	5,000,000		Barru	3 Unit	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

							atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2	17	01	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Barru	100	157,572,000		Barru	100	157,572,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
2	17	01	2	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	12	106,062,500		Barru	12	106,062,500	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
2	17	01	2	02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	2	51,509,500		Barru	2	51,509,500	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
2	17	01	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Barru	100	56,375,500		Barru	100	60,875,500	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
2	17	01	2	01	1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barru	13 Unit	28,975,500		Barru	13	28,975,500	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
2	17	01	2	06	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	14 Unit	4,900,000		Barru	14 Unit	4,900,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
2	17	01	2	09	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	2 Unit	20,000,000		Barru	2 Unit	25,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN

2	1 7	0 1	2	1 1	4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	5 Unit	2,500,000		Barru	5 Unit	2,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
									38.46%				38.46%		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	7 Kecamatan	100%	10,000,000		7 Kecamatan	75%	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 2	2. 0 1			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	7 Kecamatan	100%	5,000,000		7 Kecamatan	75%	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 2	2. 0 1	0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	48 Unit Usaha	5,000,000		7 Kecamatan	48	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

2	1 7	0 2	2. 0 2			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang	7 Kecamatan		5,000,000		7 Kecamatan		5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 2	2. 0 2	0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	7 Kecamatan	8 Unit Usaha	5,000,000		7 Kecamatan	48	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	7 Kecamatan	100%	60,000,000		7 Kecamatan	100%	60,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 3	2. 0 1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7 Kecamatan	100%	60,000,000		7 Kecamatan	100%	60,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 3	2. 0 1	0 1	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	65 Unit	30,000,000		7 Kecamatan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

2	1 7	0 3	2. 0 1	0 2	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	7 Kecamatan	65 Unit	30,000,000		7 Kecamatan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP, KOPERASI	Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam	7 Kecamatan	93%	60,000,000		7 Kecamatan	93%	60,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 4	2. 0 1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7 Kecamatan	93%	60,000,000		7 Kecamatan	93%	60,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 4	2. 0 1	0 1	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	7 Kecamatan	58 Unit Usaha	30,000,000		7 Kecamatan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 4	2. 0 1	0 2	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	7 Kecamatan	40 Unit Usaha	30,000,000		7 Kecamatan	37	30,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 5				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kualitas SDM Perkoperasian	7 Kecamatan	69%	70,000,000		7 Kecamatan	61%	70,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 5	2. 0 1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	7 Kecamatan	69%	70,000,000		7 Kecamatan	61%	70,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

							untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan								
2	1 7	0 5	2. 0 1	0 1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	7 Kecamatan	90 Orang	70,000,000		7 Kecamatan	90	70,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 7				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro	7 Kecamatan	10.55%	2,800,000,000		7 Kecamatan	10.18%	2,800,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 7	2. 0 1			Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha	7 Kecamatan	40%	2,800,000,000		7 Kecamatan	40%	2,800,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 7	2. 0 1	0 1	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	30 Unit Usaha	2,700,000,000		7 Kecamatan	30%	2,700,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 7	2. 0 1	0 2	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	7 Kecamatan	939 Unit Usaha	20,000,000		7 Kecamatan	939	20,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

							Kemitraan Usaha Mikro								
2	1 7	0 7	2. 0 1	0 3	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	7 Kecamatan	939 Unit Usaha	20,000,000		7 Kecamatan	939	20,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 7	2. 0 1	0 5	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	7 Kecamatan	10 Orang	60,000,000		7 Kecamatan	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 8				PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	7 Kecamatan	0,90%	321,838,897		7 Kecamatan	49.05%	328,275,675	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 8	2. 0 1			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	7 Kecamatan	20	321,838,897		7 Kecamatan	20	328,275,675	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
2	1 7	0 8	2. 0 1	0 1	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	7 Kecamatan	20 UMK	321,838,897		7 Kecamatan	20 UMK	328,275,675	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

2	1					BIDANG PENANAMAN MODAL									
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Barru dan Luar Daerah	3 Point	3,157,455,951	DAU		4	3,171,827,646	DINAS PMTPSP
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Barru dan Luar Daerah	20 JPL	130,000,000	DAU		20	130,000,000	
2	1	0	2.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Barru	100 Persen	-	DAU		100	-	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Barru	3 Dokumen	-	DAU		3	-	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Barru	100 Persen	2,074,539,157	DAU		100	2,145,710,002	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	26 Orang / Bulan	2,074,539,157	DAU		26	2,145,710,002	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhi barang Milik daerah Perangkat daerah	Barru	100 Persen	446,620	DAU		100	461,942	DINAS PMTPSP

2	1	0	2.	0		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barru	2 Dokumen	446,620	DAU		2	461,942	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	Barru dan Luar Daerah	95 Persen	130,000,000	DAU		95	130,000,000	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru dan Luar Daerah	10 Orang	63,867,529	DAU		10	63,867,529	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Barru dan Luar Daerah	16 Orang	66,132,471	DAU		16	66,132,471	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	Barru dan Luar Daerah	100 Persen	446,738,158	DAU		100	424,434,074	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	3 Paket	3,289,792	DAU		3	4,787,031	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	31,263,373	DAU		1	30,327,899	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Barru	4 Paket	24,254,408	DAU		4	23,528,658	DINAS PMTPSP

							Tangga yang Disediakan								
2	1 8	0 1	2. 0 6	0 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	2 Laporan	35,101,085	DAU		2	34,050,777	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	250 Laporan	263,505,576	DAU		250	331,739,711	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 6	1 1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Barru	1 Dokumen	89,323,924	DAU		0	-	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	Barru	95 Persen	276,904,164	DAU		95	199,588,944	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 7	0 2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	1 Unit	133,985,886	DAU		1	17,091,844	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	13 Unit	44,661,962	DAU		10	48,563,398	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	12 Unit	66,992,943	DAU		8	64,642,444	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 7	1 0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	1 Unit	31,263,373	DAU		1	69,291,258	DINAS PMTPSP

2	1 8	0 1	2. 0 8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	Barru	100 Persen	271,067,700	DAU		100	300,648,301	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	4 Laporan	35,101,583	DAU		4	34,867,361	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 8	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	1 Laporan	23,227,926	DAU		1	28,527,673	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 8	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	1 Laporan	212,738,191	DAU		1	237,253,267	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2. 0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	Barru	100 Persen	87,760,153	DAU		100	100,984,383	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	11 Unit	33,184,532	DAU		12	35,118,078	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barru	4 Unit	332,302	DAU		10	805,897	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	15 Unit	6,261,820	DAU		20	8,099,269	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 1	2	0 8		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Barru	1 Unit	16,718,125	DAU		1	16,217,879	DINAS PMTPSP

2	1 8	0 1	2	1 1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	6 Unit	31,263,373	DAU		6	40,743,260	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peratruan per UU an		100 Persen	58,557,353	DAU		100	59,728,500	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 2	2. 0 1			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/ insentif		100 Persen	17,973,049	DAU		100	18,312,984	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 2	2. 0 1	0 1		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Barru dan Luar Kab.	1 Dokumen	17,393,273	DAU		1	17,749,507	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 2	2. 0 1	0 2		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Barru	1 Kegiatan Usaha	579,776	DAU		1	563,476	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 2	2. 0 2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup keseluruhan potensi investasi		20 Persen	40,584,304	DAU		20	41,415,517	DINAS PMTPSP

2	1	0	2.	0		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Barru, Luar Kab.	4 Dokumen	40,584,304	DAU		4	41,415,517	DINAS PMTPSP
2	1	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi		80,17 Persen	114,155,809	DAU		80.16	116,438,925	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal		33,33 Persen	114,155,809	DAU		40	116,438,925	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Barru	1 Dokumen	1,575,000	DAU		1	1,653,750	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.	0		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Barru, Luar Kab.	2 Dokumen	112,580,809	DAU		2	114,785,175	DINAS PMTPSP
2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan		97,99 Persen	532,892,672	DAU		98.98	543,550,525	DINAS PMTPSP
2	1	0	2.			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		91,5 Persen	532,892,672	DAU		92	543,550,525	DINAS PMTPSP

2	1 8	0 4	2. 0 1	0 1		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Barru	2500 Pelaku Usaha	337,234,474	DAU		2700	307,226,006	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 4	2. 0 1	0 2		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Barru	550 Kegiatan Usaha	163,700,043	DAU		550	209,366,750	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 4	2. 0 1	0 3		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Barru	10 Orang	25,213,465	DAU		10	21,268,399	DINAS PMTPSP
2	1 8	0 4	2. 0 1	0 4		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Barru, Luar Kab.	2 Kegiatan Usaha	6,744,689	DAU		2	5,689,370	DINAS PMTPSP

2	1 8	0 5				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN		350 Milyar	335,604,949	DAK non Fisik		465	342,317,048	DINAS PMTSP
2	1 8	0 5	2. 0 1			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal		26,99 Persen	335,604,949	DAK non Fisik		28.23	342,317,048	DINAS PMTSP
2	1 8	0 5	2. 0 1	0 1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Barru, Luar Kab.	50 Kegiatan Usaha	118,452,078	DAK non Fisik		53	121,861,027	DINAS PMTSP
2	1 8	0 5	2. 0 1	0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Barru	200 Pelaku Usaha	128,064,773	DAK non Fisik		200	144,925,764	DINAS PMTSP
2	1 8	0 5	2. 0 1	0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Barru, Luar Kab.	15 Kegiatan Usaha	89,088,098	DAK non Fisik		15	75,530,257	DINAS PMTSP
2	1 8	0 6				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Barru	100 Persen	52,020,000	DAU		100	53,060,400	DINAS PMTSP
2	1 8	0 6	2. 0 1			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan data dan informasi sesuai standart peraturan per UU an	Barru	100 Persen	52,020,000	DAU		100	53,060,400	DINAS PMTSP

2	1 8	0 6	2. 0 1	0 1		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Barru	21 Dokumen	52,020,000	DAU		24	53,060,400	DINAS PMTPSP
2	1 9	0 2				BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	1 9	0 2				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta peran pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Kab. Barru	100%	1,390,287,768			100	1,418,093,524	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Kab. Barru	100%	972,796,522			100%	992,252,452	
2	1 9	0 2		2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota	Kab. Barru	100%	1,340,957,768			100%	1,365,229,924	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	1	0		2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Barru	100 Orang	21,797,500	DAU		120 Orang	21,570,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Barru	140 orang	60,000,000	DAU		150 Orang	60,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Kab. Barru	50 Orang	62,406,201	DAU		70 Orang	40,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Barru	120 Orang	28,420,000	DAU		140 Orang	20,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	1	0		2.	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1 Dokumen	100,000,000	DAU		1 Dokumen	100,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Kab. Barru	2 unit	223,334,067	DAU		2 unit	278,659,924	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Kab. Barru	10 Orang	20,000,000	DAU		10 Orang	20,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kab. Barru	50 Orang	25,000,000	DAU		50 Orang	25,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Kab. Barru	93 orang	800,000,000	DAU		93 orang	800,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	1	0		2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota	Kab. Barru	100%	49,330,000	DAU		100%	52,863,600	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Barru	50 Orang	31,500,000	DAU		50 Orang	31,500,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Barru	1 Dokumen	17,830,000	DAU		1 Dokumen	21,363,600	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kenaikan raihan prestasi pada event olahraga Provinsi dan Nasional	Kab. Barru	100%	473,070,591			100%	478,532,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kab. Barru	100%	125,000,000			100%	165,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Barru	1 Dokumen	15,000,000	DAU		1 Dokumen	15,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	1	0		2.	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Barru	1 Unit	110,000,000	DAU		1 Unit	150,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota	Kab. Barru	100%	100,000,000			100%	110,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1 Dokumen	60,000,000	DAU		1 Dokumen	70,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1 Dokumen	40,000,000	DAU		1 Dokumen	40,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi	Kab. Barru	100%	73,070,591			100%	60,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Barru	100 Orang	40,000,000	DAU		100 Orang	30,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Barru	10 Orang	20,000,000	DAU		10 Orang	15,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

							yang Menerima Penghargaan								AN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Barru	1 Dokumen	13,070,591	DAU		1 Dokumen	15,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Barru	100%	45,000,000			100%	48,532,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Kab. Barru	1 Dokumen	15,000,000	DAU		1 Dokumen	15,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Barru	6 Organisasi	10,000,000	DAU		6 Organisasi	10,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	13,532,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.	04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Kab. Barru	3 organisasi olahraga	10,000,000	DAU		3 organisasi olahraga	10,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan dan	Kab. Barru	100%	130,000,000			100%	95,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

							pengembangan Olahraga rekreasi								AN DAN OLAHRAGA
2	1 9	0 3		2. 0 5	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Barru	2 Dokumen	10,000,000	DAU		2 Dokumen	15,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
2	1 9	0 3		2. 0 5	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Barru	2 Laporan	30,000,000	DAU		2 Laporan	30,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
2	1 9	0 3		2. 0 5	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Kab. Barru	1 Unit	50,000,000	DAU		1 Unit	10,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
2	1 9	0 3		2. 0 5	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Barru	1 Dokumen	30,000,000	DAU		1 Dokumen	30,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
2	1 9	0 3		2. 0 5	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kab. Barru	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	10,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
2	1 9	0 4				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Aktif	Kab. Barru	100%	126,438,597			100%	80,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA

2	1	0		2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	Kab. Barru	100%	126,438,597			100%	80,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0		2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Barru	120 Orang	126,438,597	DAU		120 Orang	80,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2	0				BIDANG STATISTIK									
2	2	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase ketersediaan data statistik sektoral		100%	681,379,000					DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0		2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				681,379,000				444,118,500	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0		2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Diskominsta	9 Dokumen	176,567,500			9 Dokumen	176,567,500	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0		2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kantor Diskominsta	82 org	86,706,000			82 org	91,041,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0		2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kantor Diskominsta	43 Dokumen	28,210,000			43 Dokumen	29,620,500	DINAS KOMINFOS TAT

2	2	0	2	2.	0	1	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan StatistikSektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kantor Diskominsta	43 Orang	34,530,000			43 Orang	36,256,500	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0	2	2.	0	1	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kantor Diskominsta	1 unit	320,295,500			1 unit	73,810,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0	2	2.	0	1	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral diDaerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kantor Diskominsta	32 dokumen	35,070,000			32 dokumen	36,823,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	1						BIDANG PERSANDIAN									
2	2	1	2					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan informasi pemerintah daerah		100%	113,000,000					DINAS KOMINFOS TAT
2	2	1	2	2.	0	1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				113,000,000				63,000,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	1	2	2.	0	1	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kantor Diskominsta	1 dokumen	500,000			1 dokumen	500,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	1	2	2.	0	1	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Diskominsta	2 Laporan	32,000,000			2 Laporan	7,000,000	DINAS KOMINFOS TAT

2	2	0		2.	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kantor Diskominsta	800 laporan	80,000,000			800 laporan	55,000,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	0		2.	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kantor Diskominsta	30 PD	500,000			30 PD	500,000	DINAS KOMINFOS TAT
2	2	2				BIDANG KEBUDAYAAN									
2	2	0				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				798,383,300				1,612,165,300	
2	2	0	2	0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB								
2	2	0	2	0	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Barru	3 Objek	40,000,000	DAU		3 Objek	40,000,000	Kebudayaan
2	2	0	2	0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional								

2	2	0	2	0	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		6 Laporan	510,310,900	DAU		6 Laporan	685,310,900	Kebudayaan
2	2	0	2	0	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Kab. Barru	90 Sertifikat	104,059,000	DAU		90 Sertifikat	124,059,000	GTK
2	2	0	2	0		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat								
2	2	0	2	0	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Barru	1 Objek	144,013,400	DAU		1 Objek	168,773,400	Kebudayaan
2	2	0				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan dan ditetapkan menjadi WBTB			249,022,000					
2	2	0	2	0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan dan dilestarikan sebagai WBTB			249,022,000					

2	2	0	2	0	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Barru	300 Orang	249,022,000	DAU		300 Orang	349,022,000	Kebudayaan
2	2	0				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB			140,066,700					
2	2	0	2	0		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya			140,066,700					
2	2	0	2	0	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Barru	27 Objek	140,066,700	DAU		27 Objek	245,000,000	Kebudayaan
2	2	3				BIDANG PERPUSTAKAAN									
2	2	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	3,440,369,042			3	3,515,369,042	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya		100%	2,276,280,902			100%	2,276,280,902	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	33 Orang	2,276,280,902	APBD		33 Orang	2,276,280,902	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis		100%	85,000,000			100%	85,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN

							terhadap Keseluruhan ASN								KAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	8 Orang	42,000,000	APBD		10 Orang	42,000,000	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Barru	12 Orang	43,000,000	APBD		14 Orang	43,000,000	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	261,996,440			100%	332,657,140	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	4 Paket	386,500	APBD		6 Paket	500,000	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	1 Laporan	261,609,940	APBD		1 Laporan	332,157,140	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	67,000,000			100%	69,000,000	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPAN

2	2	0	2	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	1 Unit	20,000,000	APBD		1 Unit	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	10 Unit	25,000,000	APBD		10 Unit	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	6 Unit	22,000,000	APBD		4 Unit	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0		2	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	1 Unit	-	APBN/DAK		0	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor		100%	703,721,000			100%	703,721,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	1 Laporan	29,121,000	APBD		1 Laporan	29,121,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	2 Laporan	35,000,000	APBD		2 Laporan	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	1 Laporan	639,600,000	APBD		1 Laporan	639,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	46,370,700			100%	48,710,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Daerah yang dipelihara								KAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2	01		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barru	1 Unit	17,202,700	APBD		1 Unit	18,400,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2	02		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	12 Unit	2,950,000	APBD		13 Unit	3,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barru	80 Unit	2,510,000	APBD		80 Unit	2,510,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	32 Unit	13,900,000	APBD		32 Unit	14,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Barru	1 Unit	9,808,000	APBD		1 Unit	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca	Barru	77%	11,812,762,800			77%	1,102,185,880	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2			Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota		100%	1,553,270,000			100%	756,937,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							yang dikelola dengan Baik								
2	2 3	0 2	2	0 1		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 { ITSM : Information Technology Service Management }	Barru	1 Layanan	320,000,000	APBD /APBN		1 Layanan	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	0 2	2	0 2		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Kewenangannya	Barru	1 Perpustakaan	508,000,000	APBD /APBN		1 Perpustakaan	8,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	0 2	2	0 3		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Barru	6 Eks	4,320,000	APBD		6 Eks	4,752,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 3	0 2	2	0 4		Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Barru	238 Perpustakaan	107,100,000	APBD		238 Perpustakaan	107,100,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	2	0	2	0		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Barru	7 Perpustakaan	4,350,000	APBD		7 Perpustakaan	4,785,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Barru	165 Orang	65,000,000	APBD		165 Orang	65,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten / Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Barru	3 Layanan	20,000,000	APBD		3 Layanan	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Barru	5000 Eks	500,000,000	APBD		5000 Eks	500,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Terdiri atas : 1.		Perpustakaan Daerah	4900 Eks	490,000,000	APBD				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						2.		Perpustakaan Desa Corawali	100 Eks	10,000,000	APBD	Usulan Keg. Prioritas Kecamatan			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	2	0	2	0		Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Barru	2 Eks	14,500,000	APBD		2 Eks	14,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	1	0	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Barru	60 Dokumen	10,000,000	APBD		60 Dokumen	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi		100%	10,259,492,800			100%	345,248,880	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0	1	Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Barru	260 Lokus	194,664,800	APBD		260 Lokus	279,804,880	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0	2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	21 Perpustakaan	10,052,500,000	APBD /APBN		21 Perpustakaan	52,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0	3	Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Barru	15 Orang	6,164,000	APBD		15 Orang	6,164,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	2 3	0 2	2	0 5		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Barru	15 Orang	6,164,000	APBD		15 Orang	6,780,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4					BIDANG KEARSIPAN									
2	2 4	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang telah mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-undangan	Barru	100%	30,300,000			1,5%	33,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 2	2			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik		100%	9,500,000			100%	10,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 2	2	0 1		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Barru	1 Berkas	3,100,000	APBD		1 Berkas	3,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 2	2	0 2		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Barru	15755 Berkas	6,400,000	APBD		15805 Berkas	7,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 2	2			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik		100%	11,000,000			100%	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 2	2	0 2		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Barru	50 Arsip	11,000,000	APBD		50 Arsip	11,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	2 4	0 2	2			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik		100%	9,800,000			100%	11,900,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 2	2	0 2		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	Barru	1 Laporan	9,800,000	APBD		1 Laporan	11,900,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 3				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	BaRRU	57,5%	15,500,000			60,5%	17,900,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 3	2			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		100%	2,400,000			100%	2,700,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2 4	0 3	2	0 1		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Barru	1 Arsip	600,000	APBD		1 Arsip	700,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								
2	2	0	2	0		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Barru	2100 Berkas	1,800,000	APBD		2200 Berkas	2,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan		100%	12,000,000			100%	14,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Barru	1 Arsip	6,000,000	APBD		1 Arsip	7,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2	0		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Desa /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Barru	1 Arsip	6,000,000	APBD		1 Arsip	7,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	0	2			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari		100%	1,100,000			100%	1,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	2	0	2	0		Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Barru	1 Arsip	1,100,000	APBD		1 Arsip	1,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	2	5				BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	2	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan		3	2,691,011,184			3.00	3,003,121,203	DINAS PERIKANAN
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan		80 JPI				100 JPL		
3	2	0	2			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	500,000			100%	500,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan		3	500,000			3	500,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai		5	500,000			5	500,000	DINAS PERIKANAN

							peraturan perundang- undangan								
3	2 5	0 1	2. 0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	2,210,641,336			100%	2,510,641,336	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 1	2. 0 2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun		25	2,210,641,336			25	2,510,641,336	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 1	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu		100%	500,000			100%	500,000	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 1	2	0 1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		1	500,000			1	500,000	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 1	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang telah mengikuti diklat Kompetensi teknis terjadap keseluruhan ASN Dinas Perikanan		16%	40,800,000			19%	40,800,000	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 1	2	0 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional								DINAS PERIKANAN

							Jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural		1 Orang	-			1 Orang	-	DINAS PERIKANAN
							Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis		4 Orang	40,800,000			4 org	40,800,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	278,310,000			100%	286,478,822	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan kantor yang diadakan		2 jenis	4,080,000			2 jenis	4,161,600	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah alat dan perlengkapan kantor berdasarkan jenisnya		3 jenis	4,590,000			3 jenis	4,681,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana		280 Kali	269,640,000			280 Kali	277,635,422	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Makan Minum Rapat yang dilaksanakan		125 orang/ Kali	6,600,000			125 orang/ Kali	6,900,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	26,787,048			100%	28,126,400	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia		2 jenis	26,787,048			2 jenis	28,126,400	DINAS PERIKANAN

3	2	0	2.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor		100%	78,784,800			100%	80,360,496	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat		440	29,019,000			460	29,599,380	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Surat Keluar		340				360		DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periodesasi jasa komunikasi air dan listrik		12 bulan	12,240,000			12 bulan	12,484,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		3 jenis	9,985,800			3 jenis	10,185,516	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang menerima gaji untuk tiap bulannya		7 orang	27,540,000			7 orang	28,090,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	54,688,000			100%	55,714,149	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil/kendaraan operasion atau lapangan yang dipelihara		17 Unit	40,698,000			17 Unit	41,511,960	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Mobil/kendaraan operasion atau lapangan yang dibayarkan pajaknya		17 Unit	6,400,000			17 Unit	6,400,000	DINAS PERIKANAN

3	2	0	2.	0		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara		10 unit	2,040,000			10 unit	2,080,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2.	0		pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 unit	5,550,000			1 unit	5,721,389	DINAS PERIKANAN
3	2	0				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20463.92	458,489,649			6 % (20770,85)	1,439,913,600	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan		6.19	165,300,000			6.04	1,439,913,600	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Barru	1 Dokumen	15,300,000	APBD		1 Dokumen	15,606,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Tanete Rilau, Balusu, S. Riaja,	8 unit	-	APBD		8 unit	208,080,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Balusu, Barru, Tanete Rilau, Mallusetasi	50 unit	150,000,000	APBD		100 unit	624,240,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha			76,949,649				519,159,600	DINAS PERIKANAN

3	2	0	2	0	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Barru	20 orang	71,849,649	APBD		20 orang	72,828,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Barru	6 kelompok	5,100,000	APBD		6 kelompok	5,202,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Barru	3 unit				3 unit		DINAS PERIKANAN
3	2	0	2			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang dikelola		3 unit	216,240,000			3 unit	220564800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	2		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 layanan	216,240,000	APBD		1 layanan	220,564,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2			Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang beroperasi disungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar								DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	2	Pelayanan penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dukumen TPUPU dan TPKPIH								DINAS PERIKANAN
3	2	0				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	produksi Perikanan Budidaya	Ton	6583.63	1,549,800,000			8 % (6715,3)	1,368,043,243	DINAS PERIKANAN

3	2 5	0 4	2			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan		5 IUP	15,300,000			5 IUP	15,606,000	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 4	2	0 1		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 4	2	0 2		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi	Barru	5 Rekomendasi	15,300,000	APBD		5 Rekomendasi	15,606,000	DINAS PERIKANAN

							Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan								
3	25	04	2			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha		15 kelompok	81,600,000			15	2,062,656,843	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	01		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Barru	6 kelompok	5,100,000	APBD		6 kelompok	5,202,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	02		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Barru	6 kelompok	5,100,000	APBD		6 kelompok	5,202,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2	03		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,		3 kelompok				3 kelompok		DINAS PERIKANAN

							Kemitraan Usahanya								
3	2 5	0 4	2	0 4		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Palakka, Palanro	3 kelompok	71,400,000	APBD		3 kelompok	72,828,000	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 4	2			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)		10	15,300,000			10	1,964,424,84 3	DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 4	2	0 1		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan								DINAS PERIKANAN
3	2 5	0 4	2	0 2		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Rekomendasi	15,300,000	APBD		10 Rekomendasi	15,000,000	DINAS PERIKANAN

3	2	0	2			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha		15 kelompok	1,437,600,000			15 klp	1,964,424,843	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1 Dokumen	20,400,000	APBD		1 Dokumen	20,808,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mangkoso, Ajakkang, Lipukasi	2 unit	175,000,000	APBD		2 unit	208,080,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Manuba, Harapan, Siawung, Juppai (Pokir), Desa Pao-pao, Garessi, Madello (DAK Tanete Riaja, Pujananting, Tanete Rilau, Balusu, Soppeng Riaja)	150 unit	950,000,000	APBD	Musrenbang & Pokir	150 unit	1,037,226,443	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Barru	5 Dokumen	5,100,000	APBD		5 Dokumen	5,202,000	DINAS PERIKANAN

3	2	0	2	0		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Barru	40 Orang	5,100,000	APBD		40 Orang	5,202,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Kel.tanete (Pokir) Madello	10 Ha	102,000,000	APBD		10 Ha	104,040,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jangan-jangan, Gattareng, Desa Ulo T.Riaja (Pokir)	30 Orang	180,000,000	APBD		30 Orang	208,080,000	DINAS PERIKANAN
3	2	0	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan	Ton	1406,99	550,340,000			1435.13	310,008,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	1		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan		1 Dokumen (5 unit usaha)	7,140,000			1 Dokumen (5 unit usaha)	7,282,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Barru	1 Dokumen	7,140,000	APBD		1 Dokumen	7,282,800	DINAS PERIKANAN
3	2	0	2	0		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari		4.83%	25,000,000			4.83	25,606,000	DINAS PERIKANAN

							keseluruhan umkm perikanan								
3	25	06	2	1		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Barru	3 Unit	25,000,000	APBD		3 Unit	25,606,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2	3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)		3171,66 Ton	518,200,000			3227.16	-	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2	01		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000					DINAS PERIKANAN
3	25	06	2	02		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Balusu, Barru (Pokir), Corawali, Pancana (Pokir), Mallusetasi	40 Pelaku	478,200,000	APBD	Pokir	40 Pelaku	277,120,000	DINAS PERIKANAN

3	2					BIDANG PARIWISATA										
3	2	6	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pariwisata	Barru	3	4,990,032,880			3	5,250,139,205	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Barru	17		DAU		17	90,000,000		
3	2	6	0	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	3,955,532,880	DAU		100	4,350,175,205	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
3	2	6	0	1	2.03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Barru	26	3,955,532,880	DAU		26	4,350,175,205	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
3	2	6	0	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17	80,000,000			17.2413793	90,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
3	2	6	0	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Barru	29	80,000,000	DAU		29	90,000,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
3	2	6	0	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	317,700,000			100	429,470,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAHAN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Barru	9	11,000,000	DAU	9	17,100,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Barru	27	16,500,000	DAU	27	20,650,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barru	286	290,200,000	DAU	314.785	559,220,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	166,000,000		100	160,600,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Barru	22	42,500,000	DAU	22	44,750,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Barru	2	123,500,000	DAU	2	115,850,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	165,000,000		100	243,650,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

																AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 1		2. 0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Barru	300	82,500,000	DAU		300	143,825,000		DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 1		2. 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Barru	10	82,500,000	DAU		10	99,825,000		DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 1		2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	305,800,000			100	88,394,000		DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 1		2. 0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Barru	7	30,800,000	DAU		7	33,880,000		DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 1		2. 0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Barru	5	11,000,000	DAU		5	12,100,000		DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 1		2. 0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kab. Barru	2	220,000,000	DAU		1	-		DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Barru	1	33,000,000	DAU		1	36,300,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Barru	20	11,000,000	DAU		20	6,114,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah PAD Pariwisata	Kab. Barru	12.35	5,478,986,370			14.35	5,602,835,007	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola dan dikembangkan	Tanete Rilau dan Balusu	2	3,392,713,630			2	3,731,984,993	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Barru	1	165,000,000	DAU		1	181,500,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Tanete Rilau dan Balusu	2	3,221,113,630	DAU, DAK	Clear and Clean Lahan	2	3,543,224,993	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	4	6,600,000	DAU	4	7,260,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan berkembang	Kab. Barru	4	2,026,272,740		3	1,804,850,014	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Barru	2	313,500,000	DAU	1	150,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Barru	2	176,000,000	DAU	1	66,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Barru	2	127,372,740	DAU	1	140,110,014	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Barru	8	2,402,800,000	DAU	8	1,441,480,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	4	6,600,000	DAU		4	7,260,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang direkomendasikan	Kab. Barru	5	60,000,000			5	66,000,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Barru	12	15,000,000	DAU		12	16,500,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Barru	1	45,000,000	DAU		1	49,500,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisataawan	Kab. Barru	16	417,883,501			24	419,972,919	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan	Kab. Barru	1	417,883,501			1	419,972,919	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Barru	2	81,400,000	DAU	2	81,400,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Barru	7	329,883,501	DAU	8	331,312,919	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Barru	1	-	DAU	1	-	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	4	6,600,000	DAU	4	7,260,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2	0				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Peningkatan pelaku Ekraf yang memiliki HAKI	Kab. Barru	100	81,400,000		100	89,540,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang berkembang	Kab. Barru	5	81,400,000		5	89,540,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Barru	1	74,800,000	DAU	1	82,280,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Barru			DAU			DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	4	6,600,000	DAU	4	7,260,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf	Kab. Barru	12	799,348,000		13	879,282,800	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Kab. Barru	140	650,848,000		140	715,932,800	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	0		2.	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang	Kab. Barru	40	308,000,000	DAU, DAK	40	338,800,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

							Dikembangkan Kompetensinya								
3	2 6	0 5		2. 0 1	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Barru	40	154,000,000	DAU, DAK		40	169,400,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 5		2. 0 1	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Barru	20	33,748,000			20	37,122,800	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 5		2. 0 1	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Barru	1	148,500,000	DAU, DAK		1	163,350,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 5		2. 0 1	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	4	6,600,000	DAU		4	7,260,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA
3	2 6	0 5		2. 0 2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	Kab. Barru	80	148,500,000			80	163,350,000	DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDA AN DAN OLAHRAGA

3	2	0		2.	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Barru	80	148,500,000	DAU, DAK		80	163,350,000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	7				BIDANG PERTANIAN									
3	2	7	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian		Level 3	13,284,625,869			Level 3	13,626,993,009	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Rata - rata Lama Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		20 JPL	50,000,000			20 JPL	60,000,000	
X	X	X	0	1	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	117,500,000			100%	117,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	X	0	1	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Barru	2 Dokumen	3,500,000	DAU		2 Dokumen	3,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	X	0	1	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Barru	5 Laporan	114,000,000	DAU		5 Laporan	114,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	X	0	1	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai		100%	12,316,963,706			100%	12,946,270,846	DINAS PERTANIAN DAN

							peraturan perundang- undangan								KETAHANAN PANGAN
X	X X	0 1		2. 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	115 Orang/ Bulan	12,286,963,7 06	DAU		120 Orang/ Bulan	12,916,270,8 46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X X	0 1		2. 0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Barru	1 Laporan	15,000,000	DAU		1 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X X	0 1		2. 0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Barru	12 Laporan	15,000,000	DAU		12 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X X	0 1		2. 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu		100%	35,000,000			100%	35,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X X	0 1		2. 0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barru	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

X	X	0		2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	1 Laporan	15,000,000	DAU		1 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barru	1 Laporan	15,000,000	DAU		1 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompotensi Teknis terhadap keseluruhan ASN		16.98%	50,000,000			0.1886	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	20 Orang	50,000,000	DAU		30 Orang	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	229,363,235			100%	239,363,235	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	7,000,000	DAU		1 Paket	7,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	35,000,000	DAU		1 Paket	35,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

X	X	0		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	1 Paket	2,363,235	DAU		1 Paket	2,363,235	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru dan Luar Daerah	4 Laporan	185,000,000	DAU		4 Laporan	195,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	325,750,000			100%	25,750,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	1 Unit	300,000,000	DAU		0	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	4 Unit	25,750,000	DAU		4 Unit	25,750,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		100%	111,048,928			100%	114,108,928	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	1 Laporan	22,000,000	DAU		1 Laporan	22,660,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Barru	12 Laporan	25,198,928	DAU		12 Laporan	25,198,928	DINAS PERTANIAN DAN

							dan Listrik yang Disediakan								KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Laporan	6,250,000	DAU		1 Laporan	6,250,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	12 Laporan	57,600,000	DAU		12 Laporan	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	149,000,000			100%	149,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	29 Unit	41,000,000	DAU		29 Unit	41,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	2 Unit	100,000,000	DAU		2 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
X	X	0		2.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	5 Unit	3,000,000	DAU		5 Unit	3,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

X	X	0		2.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	8 Unit	5,000,000	DAU		8 Unit	5,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0	2			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	Barru	7.48%	2,047,450,000			7.98%	2,172,899,500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	Barru	2.95%	350,000,000			3.45%	350,000,000	
3	2	0	2		2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian		100%	1,300,000,000			100%	1,339,250,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0	2		2.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Barru	4 Laporan	950,000,000	DAU		4 Laporan	489,250,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0	2		2.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Barru	4 Laporan	350,000,000	DAU		4 Laporan	850,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Bantuan Bibit Sayuran Pupuk dan Pestisida bagi KWT	Banronge, Puccanra Kel. Bojo Baru Mallusetasi		2 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

								Bantuan Pupuk, Obat-Obatan Bibit Padi dan Hortikultura	Kel. Palanro Kec. Mallusetasi	2 Kelompok				Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bantuan Bibit	Cenrapole, Kaworo, Pancana Kec. Tanete Rilau	6 Kelompok				Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Pengadaan Pestisida	Matajang, Lalabata, Bacu Bacu Tanete Rilau	1 Kelompok				Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
\								Bibit Hortikultura Jahe	Desa Siawung Kec. Barru					Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Hortikultura Durian, Rambutan dan Lengkeng	Kel. Coppo Kec. Barru					Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Hortikultura Cabe Rawit	Kel. Coppo Kec. Barru					Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Hortikultura Mangga, Durian	Desa Jangan Jangan Kec. Pujananti ng	1 Paket				Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Perkebunan Pala	Desa Jangan Jangan Kec. Pujananti ng	1 Paket				Musrenban g				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

								Bibit Hortikultura Durian	Desa Pattappa Kec. Pujananting	500 Pohon			Musrenbang				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Hortikultura Alpukat	Desa Bacu Bacu Kec. Pujananting	500 Pohon			Musrenbang				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Perkebunan Cengkeh	Desa Bacu Bacu Kec. Pujananting	500 Pohon			Musrenbang				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bibit Perkebunan Kopi Robusta	Desa Binuang Kec. Balusu	1 Ha			Musrenbang				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Pengadaan Bibit Sayur untuk KWT	Desa Madello Kec. Balusu	1 Paket			Musrenbang				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Pengadaan Bibit Pertanian	Desa Anabanua Kec. Barru	50 Bungkus			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Bantuan Bibit Unggul Pertanian (Bibit Hortikultura)	Desa Palakka Kec. Barru				Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							Bantuan Bibit Hortikultura Rambutan dan Mangga	Desa Gattareng, Desa Bulu Bulu dan Desa Pujananting Kec. Pujananting	500 Pohon			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Bibit Perkebunan Cengkeh dan Kopi Robusta	Desa Gattareng, Desa Bulu Bulu dan Desa Pujananting Kec. Pujananting	500 Pohon			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pengadaan Bibit Sayurran	Dusun Alappang, Dusun Aluppangng e dan Dusun Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau	4 Kelompok Wanita Tani			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pengdaan Bibit Hortikultura Sukun dan Rambutan	Dusun Bujung Lompo Kec. Tanete Rilau	3 Kelompok			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Tangki Semprot	Kec. Mallusetasi	1 Unit			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0			2.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	100%	631,650,000			100%	648,799,500		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3	2	0		2.	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Barru	5 VUB	571,650,000	DAU		5 VUB	588,799,500	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Barru	1 Dokumen	60,000,000	DAU		1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman		100%	175,800,000			100%	244,850,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Barru	4 Laporan	175,800,000	DAU		4 Laporan	244,850,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak		100%	5,000,000			100%	5,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Barru	250 Ton	5,000,000	DAU		250 Ton	5,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Hijauan Pakan Ternak	Kel. Tuwung Kec. Barru	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan		100%	285,000,000			100%	285,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							Hijauan Pakan Ternak								
3	2	0		2.	01	Pengadaan Benih.Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Barru	2.512 Ekor	275,000,000	DAU		2.512 Ekor	275,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Unggas (Itik)	Jorongan, Kel. Mallawa	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Itik	Desa Binuang Kec. Balusu	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Ayam, Itik	(Jupai, Matene, Bottoe, Soreang) Kec. Tanete Rilau	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Itik	Desa Tuwung Kec. Barru	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pengadaan Sapi Ternak Limosin (melalui IB)	Matajang, Lalabata, Bacu-Bacu Tanete Rilau	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Sapi	Desa Binuang Kec. Balusu	1 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN

											KETAHANAN PANGAN
						Sapi Unggul (melalui IB)	Kel. Sepee Kec. Barru	1 Kelompok		Musrenbang	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Bantuan Ternak Sapi	Kec. Barru	12 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Bantuan Ternak	Batu Lappa, Tompo Kec. Barru	12 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Bantuan Ternak Sapi	Lingkungan Sepee, Kel. Sepee Kec. Barru	12 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Bantuan Ternak Itik	Bottolai, Kel.Coppo Kec. Barru	300 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Bantuan Ternak Sapi	Desa Tompo Kec. Barru	12 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Pengadaan Bibit Sapi	Polewali, Kel. Kiru Kiru Kec. Soppeng Riaja	12 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Pengadaan Bibit Itik	Desa Lampoko Kec. Balusu	250 Ekor		Pokir DPRD	DINAS PERTANIAN DAN

																KETAHANAN PANGAN
							Pengadaan Ternak Sapi	Bette	12 Ekor			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pengadaan Sapi Betina	Dusun Allu, Desa Bonto Payung Kec. Pujananting	12 Ekor			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Bebek		300 Ekor			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Bantuan Ternak Sapi	Kec. Tanete Rilau	24 Ekor			Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Barru	200 Ton	10,000,000			200 Ton	10,000,000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		1.47%	3,733,150,000			1.50%	9,420,000,000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian		100%	681,900,000			100%	825,000,000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3	2	0		2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Barru	1 Dokumen	135,000,000	DAU		1 Dokumen	135,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Barru	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Barru	4 Laporan	96,900,000	DAU		4 Laporan	90,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Barru	1 Dokumen	450,000,000	DAU		1 Dokumen	450,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan		100%	3,051,250,000			100%		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Barru	12 Unit		DAK		12 Unit	2,450,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Rehab Berat Saluran Irigasi	Rehab Berat Saluran Irigasi	Dusun Labattoa Desa Bojo	765 M x 1 M	191,250,000	DAU	Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN

								Kec. Mallusetasi						KETAHANAN PANGAN
							Pengdaan Sumur Bor 7 titik untuk Pertanian	Desa Madello Kec. Balusu	7 Titik	70,000,000	DAU	Musrenbang		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Irigasi Kalompie	Kalompie	500 Meter	125,000,000	DAU	Pokir DPRD		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Rehab Jaringan Perpipaan	Bottopalakka, Pange, Desa Palakka				Pokir DPRD		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	Dusun Tompo Desa Tompo (Kelompok Tani Labojo 1)	300 Meter	75,000,000	DAU	Pokir DPRD		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Peningkatan jalan tani lingkungan jampue ammesangeng	Ammasang	500 Meter			Pokir DPRD		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pembuatan Sumur Bor	Pacciro, Kel. Takkalasi	2 Unit	20,000,000	DAU	Pokir DPRD		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Peningkatan Saluran Perpipaan Air Galungkun	Jembulu				Pokir DPRD		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

								Perpipaan untuk di aliri ke sawah	Dusun dare, Kel. Lompo Riaja , Kec Tanete Riaja	350 Meter			Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Pengadaan Sumur Bor	Dusun Aroppoe Desa Tellumpanua	1 Unit	10,000,000	DAU	Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Pengadaan Sumur Bor (Rencana masuk dalam Usulan DAK 2023)	Lingkungan Padaelo Kelurahan Lalolang	1 Unit			Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Barru	10 Unit	0	DAK			13 Unit	1,560,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						120,000,000	Embung dan Saluran Irigasi	Mattiro Deceng, Dusun Alekale, Kec. Pujananting	1 Unit	120,000,000	DAU	Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Barru	6 Unit		DAK			6 Unit	2,650,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pembangunan Jalan Tani	Labuleng, Barang	500 Meter	300,000,000	DAU	Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							pengadaan jalan tani leppe, e (gonrae)	Desa Libureng				Pokir DPRD				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							Jalan Tani	Dusun Labakka	500 Meter	300,000,000	DAU	Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	abbolongen g (maruala), Kab. Barru, Tanete Riaja, Lompo Riaja	300 Meter	180,000,000	DAU	Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Jalan Tani	Pakkungnge , Cenrapole, Pancana	500 Meter	300,000,000	DAU	Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Peningkatan Jalan Tani	Soreang - Maddo	300 Meter	180,000,000	DAU	Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0 Unit				0 Unit		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Puskesmas	1 Unit	50,000,000	DAU/ DAK Non Fisik		1 Unit	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Kec	4 Unit	700,000,000	DAU/ DAK Non Fisik		7 Unit	1,500,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3	2	0		2.	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Barru	3 Unit	430,000,000	DAU/DAK Non Fisik		3 Unit	385,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		0.33%	575,600,000			0.30%	575,600,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Penyakit Hewan dan Zoonosis		100%	300,000,000			100%	300,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Barru	5 Laporan	300,000,000	DAU		5 Laporan	300,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan		100%	60,000,000			100%	60,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Barru	4 Laporan	15,000,000	DAU		4 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran	Barru	7 Laporan	45,000,000	DAU		7 Laporan	45,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							Hewan dan Produk Hewan								
3	2	0		2.		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah		100%	130,000,000			100%	130,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Barru	2 Laporan	100,000,000	DAU		2 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Barru	2 Laporan	30,000,000	DAU		2 Laporan	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi		100%	15,000,000			100%	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Barru	1 Laporan	15,000,000	DAU		1 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan		100%	70,600,000			100%	70,600,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit	Barru	7 Laporan	70,600,000	DAU		7 Laporan	70,600,000	DINAS PERTANIAN DAN

							Kesejahteraan Hewan									KETAHANAN PANGAN
3	27	05					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian		9%	330,000,000			0.12	330,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05		2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100%	330,000,000			100%	330,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05		2.01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Barru	10 Ha	180,000,000	DAU		10 Ha	180,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05		2.01	02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Barru	2 Ha	50,000,000	DAU		2 Ha	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05		2.01	05		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Barru	4 Laporan	100,000,000	DAU		4 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	06					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin		100%	115,000,000			100%	118,000,000	DINAS PERTANIAN DAN

							Usaha Sesuai Standart								KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pertanian dalam daerah kab/kota		100%	100,000,000			100%	103,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Barru	1 Dokumen	25,000,000	DAU		1 Dokumen	25,750,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Barru	1 Dokumen	50,000,000	DAU		1 Dokumen	51,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Barru	1 Laporan	25,000,000	DAU		1 Laporan	25,750,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		100%	15,000,000			100%	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Barru	2 Laporan	15,000,000	DAU		2 Laporan	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani		20%	859,650,000			20%	859,650,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3	2	0		2.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	859,650,000			100%	859,650,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Barru	7 Unit	200,000,000	DAU		7 Unit	200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Barru	7 Unit	300,000,000	DAU		7 Unit	300,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani	Dusun Gusungnge Kec. Tanete Rilau	1 Kelompok			Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Barru	7 Unit	259,650,000	DAU		7 Unit	259,650,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2	0		2.	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Barru	7 Unit	100,000,000	DAU		7 Unit	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Mareto-Lipukasi Kec. Tanete Rilau	2 Kelompok			Musrenbang			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

							Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos	Desa Palakka Kec. Barru	1 Kelompok			Pokir DPRD			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	30					BIDANG PERDAGANGAN									
3	302					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	7 Kecamatan	31,65%	30,000,000		7 Kecamatan	1.5%	30,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	302	2.01				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	7 Kecamatan	#VALUE!	10,000,000		7 Kecamatan	1.5%	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	302	2.01	01	1		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Kecamatan	1,5	10,000,000		7 Kecamatan	12	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	302	2.02				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG tepat waktu	7 Kecamatan	100	10,000,000		7 Kecamatan	100	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

3	3	0	2	2	0	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	7 Kecamatan	4	10,000,000	7 Kecamatan	4	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	2	2	0	7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	7 Kecamatan	100	10,000,000	7 Kecamatan	100	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	2	2	0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	7 Kecamatan	1	10,000,000	7 Kecamatan	1	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja kab./kota	7 Kecamatan	95%	1,256,267,599	7 Kecamatan	90%	1,281,392,951	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	3	2	0	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja kab./kota	7 Kecamatan	95%	1,256,267,599	7 Kecamatan	90%	1,281,392,951	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
															DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	3	2	0	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Kecamatan	20	286,338,699	7 Kecamatan	19	311,464,051	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	3	2	0	2	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Kecamatan	8	969,928,900	7 Kecamatan	8	969,928,900	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
													91%		DINAS KOP, UKM DAN

																PERDAGAN GAN
3	3 0	0 4				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	7 Kecamatan	≥10	54,000,000		7 Kecamatan	≥10	55,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN	
3	3 0	0 4	2. 0 2			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	7 Kecamatan	83%	47,000,000		7 Kecamatan	83%	45,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang penting dan kebutuhan pokok	7 Kecamatan	4 Laporan			7 Kecamatan	83%		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN	
3	3 0	0 4	2. 0 2	0 1	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	4 Laporan	10,000,000		7 Kecamatan	4 Laporan	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN	
3	3 0	0 4	2. 0 2	0 2	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7 Kecamatan	12 Laporan	30,000,000		7 Kecamatan	12 Laporan	28,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN	
3	3 0	0 4	2. 0 2	0 3	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam	7 Kecamatan	1 Laporan	7,000,000		7 Kecamatan	1 Laporan	7,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN	

							1 (Satu) Kabupaten/ Kota								
3	3	0	2.			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	7 Kecamatan	90%	7,000,000		7 Kecamatan	90%	10,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
							Jumlah dokumen pengawasan dan penyaluran pupuk		4 Laporan						DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3	0	2.	0	1	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7 Kecamatan	4 Laporan	3,500,000		7 Kecamatan	4 Laporan	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3	0	2.	0	2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	7 Kecamatan	1 Laporan	3,500,000		7 Kecamatan	1 Laporan	5,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
								7 Kecamatan	77.21%			7 Kecamatan	65.42%		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3	0				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	7 Kecamatan	100.00%	200,976,300		7 Kecamatan	100.00%	205,032,300	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3	0	2			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	7 Kecamatan	68.06%	200,976,300		7 Kecamatan	57.14%	205,032,300	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN

							berlaku tahun berjalan								
3	3 0	0 6	2	0 1	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7 Kecamatan	169217540	169,217,300		7 Kecamatan	169217420	174,217,300	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 0	0 6	2	0 2	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	7 Kecamatan	31759240	31,759,000		7 Kecamatan	31759120	30,815,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 0	0 7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan	7 Kecamatan	100	10,577,747		7 Kecamatan	-	10,789,302	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 0	0 7				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan kerjasama perdagangan	7 Kecamatan	100	10,577,747		7 Kecamatan	-	10,789,302	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 0	0 7	2	0 1	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	5 UMKM	10,577,747		7 Kecamatan	-	10,789,302	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 0	0 7	2	0 2	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	7 Kecamatan				7 Kecamatan			DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 0	0 7	2	0 3	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan	7 Kecamatan	1 Dokumen			7 Kecamatan	-		DINAS KOP, UKM DAN

							Informasi Perdagangan									PERDAGAN GAN
3	3 1					BIDANG PERINDUSTRIAN										
3	3 1	0 2				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	7 Kecamatan	20%		475,000,000		7 Kecamatan	10%	480,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 1	0 2	2			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang meningkat kualitasnya	7 Kecamatan	3 Klp		475,000,000		7 Kecamatan	3 Klp	480,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 1	0 2	2	0 2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	7 Kecamatan	1		80,000,000		7 Kecamatan	1	100,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
3	3 1	0 2	2	0 3	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	7 Kecamatan	1		110,000,000		7 Kecamatan	1	110,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN
							Pelatihan Pembuatan Kerupuk	Lingkungan Kiru-Kiru	1				Lingkunga n Kiru-Kiru	Lingkungan Kiru-Kiru		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGAN GAN

3	3	0	2	0	4	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7 Kecamatan	1	120,000,000	7 Kecamatan	1	110,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Pengadaan Peralatan Pembuatan Kue	Desa Batupute	1			Desa Batupute			DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Bantuan Peralatan Pandai Besi	Dusun Pallambarae	1			Dusun Pallambarae			DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Bantuan Peralatan Pembuatan Kue	Desa Siddo	1			Desa Siddo			DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Bantuan Peralatan Kelompok Pengrajin Batu Tatakan Tampu cinae Dusun Sikapa	Tampung Cinae, Desa Lempang	1			Tampung Cinae, Desa Lempang	Tampung Cinae, Desa Lempang		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Bantuan Peralatan pembuatan Gula Merah Kamara (RT. 3) 1 paket Kel.Tuwung	Kec. Barru				Kec. Barru			DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Pengadaan Mesin pengolah kunyit	Desa Janganjung an				Desa Janganjung an	Desa Janganjung an		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Pengadaan Mesin pengolah Jagung	Desa Janganjung an				Desa Janganjung an	Desa Janganjung an		DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

3	3	0	2	0	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Kecamatan	1	115,000,000	7 Kecamatan	1	110,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Bantuan untuk pelaku Usaha Desa Mattirowalie	Desa Mattirowalie						DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Pembinaan Kelompok Usaha Mikro	Desa Bojo						DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Pengmbangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil Lingkungan Ta'Kajuara, Jeppee dan Sepee	Kec. Barru						DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
							Pembinaan/Pengembangan Usaha Kunyit Bubuk	Lingkungan Pettung Kel.Mattappawalie						DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	2	0	5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	7 Kecamatan	1	50,000,000	7 Kecamatan	1	50,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3	0	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	7 Kecamatan	100%	220,000,000	7 Kecamatan	100%	220,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

								dikeluarkan oleh instansi terkait								
3	3 1	0 3	2				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase peningkatan usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah ang memiliki izin sesuai dengan perundang-undangan	7 Kecamatan	100%	220,000,000		7 Kecamatan	100%	220,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 3	2	0 1	1		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	7 Kecamatan	1	200,000,000		7 Kecamatan	1	200,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

3	3 1	0 3	2	0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kecamatan	1	20,000,000		7 Kecamatan	1	20,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 4				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	7 Kecamatan	100%	51,000,000		7 Kecamatan	100%	52,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 4	2			Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	7 Kecamatan	100%	51,000,000		7 Kecamatan	100%	52,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 4	2	0 1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7 Kecamatan	1 dok	25,000,000		7 Kecamatan	1 dok	25,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
3	3 1	0 4	2	0 2	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri	7 Kecamatan	1 dok	11,000,000		7 Kecamatan	1 dok	12,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

							Kabupaten/Kota Melalui SIINas								
3	3	0	2	0	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	7 Kecamatan	1 dok	15,000,000		7 Kecamatan	1 dok	15,000,000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1					SEKRETARIAT DAERAH									
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan		100%	205,284,500			100%	205,284,500	
						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4 Rekomendasi	192,909,500			4 Rekomendasi	192,909,500	Bag. Perekonomian dan SDA
						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		2	22,000,000			2	22,000,000	Bag. Perekonomian dan SDA

						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		3	29,785,000			3	29,785,000	Bag. Perekonomian dan SDA
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1	79,785,000			1	79,785,000	Bag. Perekonomian dan SDA
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		1	61,339,500			1	61,339,500	Bag. Perekonomian dan SDA
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah		100%	330,332,200			100%	363,365,420	
						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian, dan monev yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		100%	330,332,200			100%	363,365,420	Bag. Adm. Pemb
						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		1	23,671,450			1	26,038,595	Bag. Adm. Pemb
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1	289,036,000			1	317,939,600	Bag. Adm. Pemb

							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1	17,624,750			1	19,387,225	Bag. Adm. Pemb
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		60 s/d 80	350,000,000			60 s/d 80	350,000,000	
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		3 Jenis	350,000,000			3 Jenis	350,000,000	
								Persentase pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem pengadaan pemerintah		100%				100%		
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		50	200,000,000			50	200,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		2	100,000,000			2	100,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		2	50,000,000			2	50,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya		100%	12,375,000			100%	12,375,000	

							Alam yang ditetapkan							
							Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	12,375,000		100%	12,375,000	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	12,375,000		1	12,375,000	Bag. Perekonomian
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3,00	31,314,997,261		3,00	36,993,664,375	Sekretariat Daerah
								Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	553,639,500		20 JPL	593,707,150	
								Tingkat Kematangan Organisasi	Level 1	461,811,900		Level 2	507,993,090	

						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan		1	9,899,505,843			100%	12,668,821,128	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		92	9,899,505,843			92	12,668,821,128	Bag. Umum
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		100%	553,639,500			100%	593,707,150	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	57,500,000			5	57,500,000	Bag. Umum
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-			-	-	Bag. Perekonomian
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5	9,625,000			5	9,625,000	Bag. Adm. Pemb
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		6	11,125,500			6	11,125,500	Bag. Kesejahteraan Rakyat

							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3	10,000,000			3	11,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		6	11,125,500			6	11,125,500	Bagian Hukum
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3	39,791,000			3	43,770,100	Bag. Adm. Pemb
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6	90,000,000			6	99,000,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20	100,000,000			20	110,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		7	42,000,000			7	46,200,000	Bag. Pemerintahan

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10	31,422,000			10	46,898,000	Bag. Perekonomian
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6	36,125,500			6	39,738,050	Bagian Protokol
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8	54,558,000			8	54,558,000	Bagian Hukum
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6	12,000,000			3	4,800,000	Bagian Umum
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3	48,367,000			3	48,367,000	Bagian Organisasi
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	4,144,630,676			100%	4,623,351,630	

							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	89,030,700			12	95,000,000	Bag. Umum
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-				-	Bag. Umum
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	4	900,000			4	990,000	Bag. Pemerintahan
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	4	51,750,000			4	59,512,500	Bagian Umum
									Barru							
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	6	208,899,455			6	215,000,000	Bagian Umum
									Barru							
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	5000	3,460,000			5000	4,186,600	Bag. Adm. Pemb
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	7000	-			7000	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	6000	3,000,000			6000	3,000,000	Bagian Hukum

							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	9884	4,942,000			9884	5,189,100	Bagian Organisasi
									Barru							
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	1	1,695,506,188	1			1,865,056,807	Bagian Umum
									Barru							
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	62	54,000,000			62	56,700,000	Bag. Adm. Pemb.
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	150	100,000,000			150	105,000,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	70	70,000,000			70	73,500,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	138	85,000,000			138	89,250,000	Bag. Pemerintahan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	101	146,825,600			101	146,825,600	Bag. Perekonomian

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	17	17,696,900		17	30,466,590	Bagian Protokol
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	54	42,477,500		54	42,477,500	Bagian Hukum
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	409	1,512,474,833		409	1,769,346,058	Bagian Umum
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	30	53,667,500		30	56,350,875	Bagian Organisasi
								Barru						
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Barru	1	5,000,000	1		5,500,000	Bagian Umum
								Barru						
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barru	100%	1,098,145,000		100%	1,238,102,207	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Barru	-	-		-	-	Bagian Umum
								Barru						

							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	-	-			-	-	Bagian Umum
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	1	27,500,000			1	27,750,000	Bagian Hukum
									Barru							
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	2	15,000,000			3	4,500,000	Bag. Adm. Pemb
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	2	11,000,000			2	12,100,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	1	6,000,000			1	6,600,000	Bagian Protokol
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	1	1,500,000			1	1,500,000	Bagian Hukum
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	3	75,000,000			3	91,057,707	Bagian Umum
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	4	15,000,000			2	16,500,000	Bagian Organisasi
									Barru							
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	2	30,000,000			2	30,000,000	Bag. Adm. Pemb
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	3	30,000,000			3	30,000,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat

							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	5	70,900,000			5	40,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	1	15,000,000			2	25,000,000	Bag. Perekonomian
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	2	21,900,000			2	24,090,000	Bagian Protokol
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	3	20,000,000			3	20,000,000	Bagian Hukum
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	5	250,000,000			5	362,875,000	Bagian Umum
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	3	23,595,000			3	25,954,500	Bagian Organisasi
									Barru							
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	8	200,000,000			8	230,000,000	Bagian Umum
									Barru							
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	11	285,750,000			11	257,175,000	Bagian Umum

							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	0	-			2	33,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
									Barru							
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Barru	100%	9,130,058,295			100%	9,155,058,295	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	14,169,450			10	14,169,450	Bag. Adm. Pemb
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	16,500,000			10	16,500,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	23,000,000			10	23,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	12,000,000			10	12,000,000	Bag. Pemerintahan
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	8,500,000			10	8,500,000	Bag. Perekonomian
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	13,000,000			10	13,000,000	Bagian Protokol
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	4,787,000			10	4,787,000	Bagian Hukum
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	250,000,000			10	275,000,000	Bagian Umum

							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	10	14,057,450			10	14,057,450	Bagian Organisasi
									Barru							
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	12	6,263,352,97 5	12			6,263,352,97 5	Bagian Umum
									Barru							
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	3	674,018,795			3	674,018,795	Bagian Umum
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	2	20,000,000			2	20,000,000	Bag. Pemerintah an
									Barru							
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	-	-			-	-	Bag. Adm. Pemb
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	1	1,816,672,62 5			1	1,816,672,62 5	Bagian Umum
									Barru							
									Barru							

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Barru	100%	2,408,585,75 0			100%	2,654,038,61 5	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barru	5	610,910,360			5	702,546,914	Bagian Umum
									Barru							
									Barru							
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	4	11,550,000			4	12,705,000	Bag. Adm. Pemb
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	4	16,500,000			4	18,150,000	Bag. Kesejahtera an Rakyat
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	2	10,000,000			2	11,000,000	Bag. Pengadaan Barang/Jas a
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Barru	1	7,500,000			1	8,250,000	Bag. Pemerintah an

							Pajak dan Perizinannya							
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	3	8,500,000		3	8,500,000	Bag. Perekonomi an
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	1	12,500,000		1	13,750,000	Bagian Protokol
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	1	7,550,000		1	7,550,000	Bagian Hukum
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	68	530,719,250		68	610,327,138	Bagian Umum
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	1	10,000,000		1	10,000,000	Bagian Organisasi
								Barru						

						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Barru	4	1,000,000	4	1,000,000	Bagian Hukum
								Barru					
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	4,471,500	3	4,918,650	Bag. Adm. Pemb
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	3,300,000	3	3,630,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	2,000,000	3	2,200,000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	5,000,000	3	5,500,000	Bag. Pemerintahan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	3,600,000	3	3,600,000	Bag. Perekonomian
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	4	3,300,000	4	3,630,000	Bagian Protokol
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	3,000,000	3	3,000,000	Bagian Hukum
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	4	17,556,190	4	20,189,619	Bagian Umum
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3	2,420,000	3	2,662,000	Bagian Organisasi
								Barru					
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Barru	2	2,420,000	2	2,662,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
								Barru					

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	6	634,788,450			6	698,267,295	Bagian Umum
								Barru							
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	6	500,000,000			6	500,000,000	Bagian Umum
								Barru							
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Barru	100%	3,390,000,000			100%	5,390,000,000	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Barru	9	350,000,000			9	350,000,000	Bagian Umum
						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Barru	8	290,000,000			8	290,000,000	Bagian Umum
						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	Barru	4	2,750,000,000			4	4,750,000,000	Bagian Umum

[illegible]

						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Barru	1	129,336,900			1	142,270,590	Bagian Organisasi
								Barru							
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Barru	1	63,636,210			1	69,999,831	Bagian Organisasi
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Barru	1	59,596,900			1	65,556,590	Bagian Organisasi
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Barru	1	15,224,880			1	16,747,368	Bagian Organisasi
								Barru							
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprorotokolsn, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Barru	100%	361,230,952			100%	379,292,500	
						Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Barru	6	157,500,000			6	165,375,000	Bagian Protokol
						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Barru	3	77,475,825			3	81,349,616	Bagian Protokol
						Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Barru	1	126,255,127			1	132,567,883	Bagian Protokol

[illegible]

						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda dan Perbub yang ditetapkan	Barru	10 Perda dan 20 Perbub	605,000,000			10 Perda dan 20 Perbub	665,500,000	Bagian Hukum
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Barru	3	330,000,000			3	363,000,000	Bagian Hukum
						Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Barru	3	137,500,000			3	151,250,000	Bagian Hukum
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Barru	1	137,500,000			1	151,250,000	Bagian Hukum
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	Barru	100%	22,537,710,710			100%	22,537,710,710	
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun sesuai aturan Perundang-Undangan	Barru	100%	22,537,710,710			100%	22,537,710,710	
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Barru	1	17,886,210,710			1	17,886,210,710	Bag. Kesejahteraan Rakyat

						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Barru	1	1,048,500,000			1	1,048,500,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Barru	2	3,603,000,000			2	3,603,000,000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
4	2					SEKRETARIAT DPRD									
4	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	BARRU	3.0	16,356,221,532				16,356,221,532	

4	2	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Menerima Gaji dan tunjangan	BARRU	1	2,010,510,003				2,010,510,003	
4	2	1	2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BARRU	22 Orang	2,010,510,003			22 Orang	2,010,510,003	
4	2	1	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai kompetensi	BARRU	1	55,000,000			1	55,000,000	
4	02	01	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BARRU	7 Orang	35,000,000			7 Orang	35,000,000	
4	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BARRU	1	20,000,000			1	20,000,000	
4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan umum perangkat daerah	BARRU	1	410,982,500			1	410,982,500	
4	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BARRU	1 Paket	5,715,000			1 Paket	5,715,000	
4	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berdasarkan Jenisnya	BARRU	2 Jenis	6,930,000			2 Jenis	6,930,000	

4	0	0	2.	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Berdasarkan Jenisnya	BARRU	2 Jenis	60,378,500			2 Jenis	60,378,500	
	2	1	0	4											
4	0	0	2.	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Berdasarkan Jenisnya	BARRU	2 Jenis	23,400,000			2 Jenis	23,400,000	
	2	1	0	5											
4	0	0	2.	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	BARRU	2 Jenis	94,520,000			2 Jenis	94,520,000	
	2	1	0	6											
4	0	0	2.	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BARRU	1 Tahun	8,790,000			1 Tahun	8,790,000	Dirasionalkan
	2	1	0	8											
4	0	0	2.	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	BARRU	328 OK	211,249,000			328 OK	211,249,000	
	2	1	0	9											
4	0	0	2.	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BARRU	1	71,567,699			1	71,567,699	
	2	1	0	7											
4	0	0	2.	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	BARRU	1 Unit				1 Unit		
	2	1	0	2											
4	0	0	2.	0		Pengadaan Mebel	Jumlah unit meubel yang tersedia	BARRU	17 Unit	29,281,550			17 Unit	29,281,550	
	2	1	0	5											
4	0	0	2.	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	BARRU	53 Unit	42,286,149			53 Unit	42,286,149	
	2	1	0	6											

4	0	0	2.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhi Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	BARRU	1	668,358,000			1	668,358,000	
4	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	BARRU	200 Surat	1,807,000			200 Surat	1,807,000	
							Jumlah Surat Keluar	BARRU	200 Surat				200 Surat		
4	0	0	2.	0		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periodesasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BARRU	1 Tahun	200,000,000			1 Tahun	200,000,000	
4	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	BARRU	4 Jenis	466,551,000			4 Jenis	466,551,000	Tidak ada pengurangan
4	0	0	2.	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	BARRU	1	1,769,405,446			1	1,769,405,446	
4	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil / Kendaraan Dinas Jabatan / Perorangan Yang Di Pelihara	BARRU	7 unit	141,580,000			7 unit	141,580,000	
							Jumlah Mobil / Kendaraan Dinas Jabatan / Perorangan Yang Di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	BARRU	7 unit				7 unit		
4	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil / Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Di Pelihara	BARRU	11 unit	27,690,000			11 unit	27,690,000	

							Jumlah Mobil / Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Di Bayarkan Pajak dan Perizinannya	BARRU	12 unit				12 unit		
4	0	0	2.	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	BARRU	5 Jenis	10,210,000			5 Jenis	10,210,000	
4	2	1	0	6											
4	0	0	2.	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara	BARRU	7 Unit	1,589,925,446			7 Unit	1,589,925,446	
4	2	1	0	9											
4	0	0	2.			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	BARRU	1	10,378,397,884			1	10,378,397,884	
4	2	1	1												
4	0	0	2.	0		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 Tahun	BARRU	25 Orang	10,059,397,884			25 Orang	10,059,397,884	
4	2	1	1	1											
4	0	0	2.	0		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Yang Di Sediakan	BARRU	125 Pasang	194,000,000			125 Pasang	194,000,000	
4	2	1	1	2											
4	0	0	2.	0		Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Anggota DPRD Yang Mendapatkan Layanan General Checkup	BARRU	25 Orang	125,000,000			25 Orang	125,000,000	
4	2	1	1	3											
4	0	0	2.			Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	BARRU	1	992,000,000			1	992,000,000	
4	2	1	1	6											

4	0	0	2.	0		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Yang Telaksana	BARRU	92 Kali	80,000,000			92 Kali	80,000,000	
	2	1	1	3											
			6												
4	0	0	2.	0		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Kebutuhan Rumah Tangganya Di Sediakan	BARRU	36 OB	912,000,000			36 OB	912,000,000	
	2	1	1	4											
			6												
4	0	0				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Ranperda Yang Ditetapkan Tepat Waktu Menjadi Perda	BARRU	1	6,268,015,260			1	6,268,015,260	
	2	2													
4	0	0	2.			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Ditetapkan Menjadi Perda sesuai Prolegda	BARRU	1	217,750,000			1	217,750,000	
	2	2	0												
			1												
4	0	0	2.	0		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang di bahas dan di tetapkan menjadi Perda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	BARRU	7 Ranperda	17,500,000			7 Ranperda	17,500,000	
	2	2	0	2											
			1												
4	0	0	2.	0		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Yang Tersusun	BARRU	2 Buah	200,250,000			2 Buah	200,250,000	
	2	2	0	4											
			1												
4	0	0	2			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Di tingkatkan Kapasitas SDM-nya	BARRU	25 Orang	2,039,942,580			25 Orang	2,039,942,580	
	2	2													
4	0	0	2	0		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Workshop dalam peningkatan kapasitas	BARRU	25 Orang	968,942,580			25 Orang	968,942,580	
	2	2		2											

4	0 2	0 2	2	0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	BARRU	100 Dokumen	567,000,000			100 Dokumen	567,000,000	
4	0 2	0 2	2	0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Yang Di Bayarkan Gajinya selama 1 Tahun	BARRU	3 Orang	126,000,000			3 Orang	126,000,000	
4	0 2	0 2	2. 0 4	0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Pendamping Fraksi dan Komisi yang di bayarkan gajinya selama 1 tahun	BARRU	9 Orang	378,000,000			9 Orang	378,000,000	
4	0 2	0 2	2		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	BARRU	1	2,401,100,00 0			1	2,401,100,00 0	
4	0 2	0 2	2. 0 5	0 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	BARRU	30 Kali	57,200,000			30 Kali	57,200,000	
4	0 2	0 2	2. 0 5	0 3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses Anggota DPRD yang di fasilitasi	BARRU	3 Kali	2,343,900,00 0			3 Kali	2,343,900,00 0	
4	0 2	0 2	2		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	BARRU	1	1,609,222,68 0			1	1,609,222,68 0	
4	0 2	0 2	2	0 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	BARRU	473 OK	1,609,222,68 0			473 OK	1,609,222,68 0	

							terkait pemenuhan Tugas DPRD									
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	1					PERENCANAAN										
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		3 Poin	3,082,416,947			3 Poin	3,098,729,032	BAPPELITB ANGDA	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	180,000,000			20 JPL	180,000,000		
5	01	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Kab. Barru	100 Persen	2,305,093,947	DAU		100 Persen	2,436,732,032	BAPPELITB ANGDA	
5	01	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	2,295,093,947			30 Orang/bulan	2,426,732,032	BAPPELITB ANGDA	
5	01	01		2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3 Dokumen	10,000,000			3 Dokumen	10,000,000	BAPPELITB ANGDA	
5	01	01		2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Kab. Barru	100 Persen	5,000,000	DAU		100 Persen	5,000,000	BAPPELITB ANGDA	

5	0	0		2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	5,000,000			2 Dokumen	5,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Kab. Barru	100 Persen	180,000,000	DAU		100 Persen	180,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5 Dokumen	10,000,000			5 Dokumen	10,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 Orang	170,000,000			26 Orang	170,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Barru	100 Persen	412,897,000	DAU		100 Persen	412,897,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		70 Paket	5,850,000			70 Paket	5,850,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		479 Paket	32,005,000			479 Paket	32,005,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah		99 Paket	10,005,000			99 Paket	10,005,000	BAPPELITB ANGDA

							Tangga yang Disediakan								
5	0 1	0 1		2. 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	22,384,000			6 Paket	22,384,000	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	6,732,000			3 Paket	6,732,000	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	10,800,000			12 Laporan	10,800,000	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		126 Laporan	325,121,000			126 Laporan	325,121,000	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Barru	100 Persen	159,326,000	DAU		100 Persen	44,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	48,000,000			-	-	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-			-	-	BAPPELITB ANGDA
5	0 1	0 1		2. 0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	111,326,000			3 Unit	44,000,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Barru	100 Persen	147,000,000	DAU		100 Persen	147,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	64,200,000			24 Laporan	64,200,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		14 Laporan	82,800,000			14 Laporan	82,800,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kab. Barru	100 Persen	53,100,000	DAU		100 Persen	53,100,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	27,350,000			4 Unit	27,350,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	-			2 Unit	1,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	-			-	-	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51 Unit	20,750,000			58 Unit	19,250,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	5,000,000			1 Unit	5,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan PerUUan dan Ditetapkan tepat waktu		100 Persen	404,000,000			100 Persen	1,174,000,000	BAPPELITB ANGDA
							Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD		100 Persen	120,000,000			100 Persen	150,000,000	
5	0	0		2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan	Kab. Barru	100	354,000,000	DAU		100	1,124,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	10,000,000			2 Berita Acara	20,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	25,000,000			1 Berita Acara	25,000,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2. 0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	45,000,000			2 Berita Acara	90,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2. 0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)		9 Dokumen	274,000,000			14 Dokumen	989,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2. 0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Kab. Barru	100 Persen	50,000,000	DAU		100 Persen	50,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2. 0 2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		31 Masukan	20,000,000			31 Masukan	20,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2. 0 2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		44 Orang	20,000,000			44 Orang	20,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2. 0 2	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	10,000,000			1 Buku	10,000,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Kab. Barru	100 Persen	120,000,000	DAU		100 Persen	150,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		5 Laporan	52,500,000			8 Laporan	67,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		3 Kerjasama	15,000,000			3 Kerjasama	15,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		16 Laporan	52,500,000			16 Laporan	67,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektor yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan		100 Persen	765,000,000			100 Persen	765,000,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Kab. Barru	64 Rekomendasi/K ajian/Laporan	255,000,000	DAU		64 Rekomendasi/K ajian/Laporan	255,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		24 Dokumen	42,500,000			24 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan		12 Perangkat Daerah	42,500,000			12 Perangkat Daerah	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		24 Laporan	42,500,000			24 Laporan	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya		8 Dokumen	42,500,000			8 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA

							(RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5	0	0		2.	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		4 Perangkat Daerah	42,500,000			4 Perangkat Daerah	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		8 Dokumen	42,500,000			8 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Kab. Barru	24 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255,000,000	DAU		24 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	48,750,000			8 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPerekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	30,000,000			4 Perangkat Daerah	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	48,750,000			8 Laporan	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	58,750,000			4 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	10,000,000			2 Perangkat Daerah	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	58,750,000			4 Laporan	42,500,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	Kab. Barru	44 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255,000,000	DAU		44 Rekomendasi/Kajian/Laporan	255,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	42,500,000			8 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		4 Perangkat Daerah	42,500,000			4 Perangkat Daerah	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		8 Laporan	42,500,000			8 Laporan	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		14 Dokumen	42,500,000			14 Dokumen	42,500,000	BAPPELITB ANGDA

5	0	0		2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		7 Perangkat Daerah	42,500,000			7 Perangkat Daerah	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		14 Laporan	42,500,000			14 Laporan	42,500,000	BAPPELITB ANGDA
5	2					KEUANGAN									
5	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BPKAD	BPKAD	3	10,218,579,559			3	10,570,886,503	BPKAD
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	BPKAD	20 JPL				20 JPL		
5	0	2	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD								BPKAD
5	0	2	0	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	1 Dok	2,910,000	APBD	1 Dok	2,910,000	BPKAD
5	0	2	0	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	BPKAD	2 Dok	3,240,000	APBD	2 Dok	3,240,000	BPKAD

							Dokumen RKA-SKPD								
5	0	0		2.	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	2 Dok	3,240,000	APBD		2 Dok	3,240,000	BPKAD
5	0	0		2.	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPKAD	2 Dok	1,080,000	APBD		2 Dok	1,080,000	BPKAD
5	0	0		2.	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	2 Dok	1,080,000	APBD		2 Dok	1,080,000	BPKAD
5	0	1		2.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	5 Laporan	30,903,000	APBD		5 Laporan	30,903,000	BPKAD
5	0	0		2.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	10 Dok	1,000,000	APBD		10 Dok	1,000,000	BPKAD

5	0	0		2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2. 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Orang	7,596,128,788	APBD		Orang	7,596,128,788	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD			APBD				
5	0	0		2. 0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Dokumen	331,527,300	APBD		Dokumen	331,527,300	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	Dokumen	74,706,000	APBD		Dokumen	74,706,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Dokumen	37,353,000	APBD		Dokumen	37,353,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	06	Perencanaan, Penganggaran,dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BPKAD	Dokumen	2,580,000	APBD		Dokumen	2,580,000	BPKAD

5	0	0		2.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	18 Laporan	74,706,000	APBD		18 Laporan	74,706,000	BPKAD
5	0	0		2.	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	1 Laporan	2,580,000	APBD		1 Laporan	2,580,000	BPKAD
5	0	0		2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang terpenuhi	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2.	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 Dokumen	2,580,000	APBD		1 Dokumen	2,580,000	BPKAD
5	0	0		2.	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 Dokumen	2,580,000	APBD		1 Dokumen	2,580,000	BPKAD
5	0	0		2.	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 Dokumen	750,000	APBD		1 Dokumen	750,000	BPKAD
5	0	0		2.	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	1 Dokumen	750,000	APBD		1 Dokumen	750,000	BPKAD

5	0	0		2. 0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	1 Dokumen	750,000	APBD		1 Dokumen	750,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	1 Dokumen	2,580,000	APBD		1 Dokumen	2,580,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 3	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 Dokumen	750,000	APBD		1 Dokumen	750,000	BPKAD
5	0	0		2. 1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2. 0 5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD	1 Dokumen	3,250,000	APBD		1 Dokumen	3,250,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD	Paket	55,100,000	APBD		Paket	55,100,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD	Dokumen	1,800,000	APBD		Dokumen	1,800,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKAD	Dokumen	600,000	APBD		Dokumen	600,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKAD	Orang	150,882,000	APBD		Orang	150,882,000	BPKAD

5	0	0		2.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Orang	53,256,000	APBD		Orang	53,256,000	BPKAD
5	0	0		2.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Orang	304,064,000	APBD		Orang	304,064,000	BPKAD
5	0	0		2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD	3 Paket	3,845,000	APBD		3 Paket	3,845,000	BPKAD
5	0	0		2.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	5 Paket	110,000,000	APBD		5 Paket	110,000,000	BPKAD
5	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPKAD	Paket	7,179,375	APBD		Paket	7,179,375	BPKAD
5	0	0		2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD	Paket	1,875,000	APBD		Paket	1,875,000	BPKAD
5	0	0		2.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD	Paket	5,000,000	APBD		Paket	5,000,000	BPKAD

5	0	0		2. 0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BPKAD	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPKAD	9 Paket	8,593,040	APBD		9 Paket	8,593,040	BPKAD
5	0	0		2. 0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	12 Laporan	22,016,316	APBD		12 Laporan	24,217,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	12 Laporan	253,164,870	APBD		12 Laporan	265,823,114	BPKAD
5	0	0		2. 0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	12 Laporan	12,000,000	APBD		12 Laporan	12,000,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	4 Dokumen	365,000,000	APBD		4 Dokumen	365,000,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2. 0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPKAD	2 Unit	40,000,000	APBD		2 Unit	40,000,000	BPKAD

5	0	0	2	0	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		1 Unit	320,000,000	BPKAD
5	0	0	2	0	07	03	Pengadaan Alat Besar		BPKAD			APBD				
5	0	0	2	0	07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		BPKAD			APBD				
5	0	0	2	0	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPKAD	1 Paket	20,000,000	APBD		1 Paket	20,000,000	BPKAD
5	0	0	2	0	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	0	0	2	0	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	0	0	2	0	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	0	0	2	0	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	0	0	2	0	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	0	0	2	0	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	BPKAD	1 Unit	7,000,000	APBD		1 Unit	7,000,000	BPKAD

							Lainnya yang diadakan								
5	0	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	4 Laporan	348,960,323	APBD		4 Laporan	366,408,339	BPKAD
5	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	0	0		2.	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	5 Laporan	31,719,547	APBD		5 Laporan	31,719,547	BPKAD
5	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	35 Laporan	210,000,000	APBD		35 Laporan	210,000,000	BPKAD
5	0	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD	24 Unit	9,500,000	APBD		24 Unit	9,500,000	BPKAD

5	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang dipelihara	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Terpelihara	BPKAD	10 Unit	2,000,000	APBD	10 Unit	2,000,000	BPKAD
5	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya kantor dipelihara	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jenis aset Tetap Lainnya yang dipelihara	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jenis aset Tak Berwujud yang dipelihara	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	1 Unit	15,000,000	APBD	1 Unit	15,000,000	BPKAD

5	02	01		209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor yang dipelihara	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	02	01		209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	BPKAD	100%	105,778,729,414	APBD				BPKAD
							Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	BPKAD	100%		APBD				BPKAD
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	BPKAD	100%		APBD				BPKAD
							Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu	BPKAD	100%		APBD				BPKAD
5	02	02		201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	BPKAD			APBD				BPKAD
5	02	02		201	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD	2 Dokumen	37,542,868	APBD		2 Dokumen	40,921,726	BPKAD
5	02	02		201	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	BPKAD	2 Dokumen	28,780,378	APBD		2 Dokumen	31,370,612	BPKAD

							PPAS yang Disusun								
5	0	0		2.	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	44 Dokumen	7,497,380	APBD		44 Dokumen	8,172,144	BPKAD
5	0	0		2.	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	44 Dokumen	7,497,380	APBD		44 Dokumen	8,172,144	BPKAD
5	0	0		2.	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	44 Dokumen	5,888,300	APBD		44 Dokumen	6,418,247	BPKAD
5	0	0		2.	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	44 Dokumen	16,311,174	APBD		44 Dokumen	17,779,180	BPKAD
5	0	0		2.	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	2 Dokumen	16,311,174	APBD		2 Dokumen	17,779,180	BPKAD
5	0	0		2.	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	2 Dok	691,124,346	APBD		2 Dok	753,325,537	BPKAD
5	0	0		2.	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	10 Dokumen	600,000,000	APBD		10 Dokumen	600,000,000	BPKAD
5	0	0		2.	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	1 Dokumen	121,456,000	APBD		1 Dokumen		

5	0	0		2. 0 1	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	1 Dokumen	121,456,000	APBD		1 Dokumen		
5	0	0		2. 0 1	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	1 Dokumen	121,456,000	APBD		1 Dokumen		
5	0	0		2. 0 1	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Orang	277,862,464	APBD		Orang	302,870,086	BPKAD
5	0	0		2. 0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2. 0 2	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	44 Dokumen	328,227,300	APBD		44 Dokumen	328,227,300	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKAD	2 Laporan	5,888,300	APBD		2 Laporan	6,418,247	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	12 Laporan	11,725,296	APBD		12 Laporan	12,780,573	BPKAD
5	0	0		2. 0 2	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	2 Dokumen	16,311,174	APBD		2 Dokumen	17,779,180	BPKAD

5	0 2	0 2		2. 0 2	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	7 Dokumen	41,637,860	APBD		7 Dokumen	45,385,267	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 2	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	98 Dokumen	42,080,000	APBD		98 Dokumen	42,080,000	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem	BPKAD	3 Laporan	33,900,000	APBD		3 Laporan	33,900,000	BPKAD

							otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
5	0 2	0 2		2. 0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	6 Dokumen	17,788,000	APBD		6 Dokumen	17,788,000	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 2	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data SKPD	BPKAD			APBD				BPKAD

5	0 2	0 2		2. 0 2	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	1 Dokumen	24,558,500	APBD		1 Dokumen	24,558,500	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 2	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Orang	112,000,000	APBD		Orang	112,000,000	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD			APBD				BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	12 Laporan	13,744,500	APBD		12 Laporan	15,118,950	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD	4 Dokumen	35,099,873	APBD		4 Dokumen	38,609,860	BPKAD

5	0	0		2.	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	2 Laporan	40,399,013	APBD		2 Laporan	44,438,914	BPKAD
5	0	0		2.	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD	2 Laporan	2,714,250	APBD		2 Laporan	2,985,675	BPKAD
5	0	0		2.	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	2 Dokumen	557,109,997	APBD		2 Dokumen	612,820,997	BPKAD
5	0	0		2.	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen	6,149,220	APBD		1 Dokumen	6,764,142	BPKAD
5	0	0		2.	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	BPKAD	1 Dokumen	6,111,105	APBD		1 Dokumen	6,722,216	BPKAD

							dan Tuntutan Kerugian Daerah								
5	0 2	0 2		2. 0 3	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen	12,577,950	APBD		1 Dokumen	13,835,745	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Dokumen	12,577,950	APBD		1 Dokumen	13,835,745	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Dokumen	32,137,875	APBD		1 Dokumen	35,351,663	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Orang	17,469,375	APBD		Orang	19,216,313	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BPKAD	1 Dokumen	4,712,400	APBD		1 Dokumen	5,183,640	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 3	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	1 Dokumen	1,565,256	APBD		1 Dokumen	1,721,782	BPKAD
5	0 2	0 2		2. 0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKAD			APBD				BPKAD

5	0	0		2. 0 4	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2. 0 4	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2. 0 4	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2. 0 4	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Kegiatan	2,000,000,00 0	APBD	1 Kegiatan	3,000,000,00 0	BPKAD
5	0	0		2. 0 4	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2. 0 4	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD
5	0	0		2. 0 4	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan	BPKAD	-	-	APBD	-	-	BPKAD

							Kebijakan dan Alokasi Subsidi									
5	02	02		2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	40 Desa	100,000,000,000	APBD		40 Desa	100,000,000,000	BPKAD	
5	02	02		2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD	
5	02	02		2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	-	-	APBD		-	-	BPKAD	
5	02	02		2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD	BPKAD			APBD				BPKAD	
5	02	02		2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	60 Lap	57,560,756	APBD		60 Lap	62,741,224	BPKAD	
5	02	02		2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	1 Kegiatan	116,600,000	APBD		1 Kegiatan	127,094,000	BPKAD	
5	02	02		2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	12 Bulan	174,900,000	APBD		12 Bulan	190,641,000	BPKAD	

							Pemerintah Kabupaten/Kota								
5	0 2	0 3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	BPKAD	1,211,055,43 0	APBD					BPKAD
							Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat	BPKAD		APBD					BPKAD
							Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	BPKAD		APBD					BPKAD
5	0 2	0 3		2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	BPKAD		APBD					BPKAD
5	0 2	0 3		2. 0 1	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD	2 dokumen	35,595,450	APBD		2 dokumen	39,154,995	BPKAD
5	0 2	0 3		2. 0 1	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Regulasi	BPKAD	2 dokumen	50,000,000	APBD		2 dokumen	50,000,000	BPKAD
5	0 2	0 3		2. 0 1	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 dokumen	50,000,000	APBD		2 dokumen	55,000,000	BPKAD
5	0 2	0 3		2. 0 1	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Dokumen	4,642,660	APBD		1 Dokumen	5,106,926	BPKAD
5	0 2	0 3		2. 0 1	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	3 Laporan	345,028,420	APBD		3 Laporan	379,531,262	BPKAD
5	0 2	0 3		2. 0 1	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD	7 Laporan	56,602,150	APBD		7 Laporan	62,262,365	BPKAD

5	0	0		2. 0 1	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	50 Laporan	110,153,000	APBD		50 Laporan	121,168,300	BPKAD
5	0	0		2. 0 1	08	Penilaian Barang Milik Daerah		BPKAD			APBD				
5	0	0		2. 0 1	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	5 Laporan	124,000,000	APBD		5 Laporan	136,400,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 1	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	5 Dokumen	124,023,075	APBD		5 Dokumen	136,425,383	BPKAD
5	0	0		2. 0 1	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 Laporan	85,000,000	APBD		2 Laporan	93,500,000	BPKAD
5	0	0		2. 0 1	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		BPKAD			APBD				BPKAD
5	0	0		2. 0 1	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	200 Orang	226,010,675	APBD		200 Orang	248,611,743	BPKAD

5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Pendapatan Daerah		3.00	4,815,952,879			3	4,815,952,879	Badan Pendapatan Daerah
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	70,000,000			20 JPL	70,000,000	
5	0	0			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100%	3,965,315,129			1	3,965,315,129	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0			2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	27 orang/bulan	3,965,315,129	DAU		27 orang/bulan	3,965,315,129	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN		100%	70,000,000			1	70,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0			2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Barru dan Luar daerah	6 orang	70,000,000	DAU		6 orang	70,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	152,281,500			1	152,281,500	Badan Pendapatan Daerah

5	0	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	950,000	DAU		1 Paket	950,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	1 Paket	862,000	DAU		1 Paket	862,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barru dan Luar daerah	50 laporan	150,469,500	DAU		50 laporan	150,469,500	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	371,255,000			1	371,255,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Barru	2 Unit	44,000,000			2 Unit	44,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	3 Unit	57,255,000	DAU		3 Unit	57,255,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Barru	1 Unit	75,000,000			1 Unit	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Barru	1 Unit	195,000,000			1 Unit	195,000,000	Badan Pendapatan Daerah

							atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
5	0	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor		100%	278,832,500			1	278,832,500	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barru	1 Laporan	70,757,000	DAU		1 Laporan	70,757,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	2 Laporan	74,875,500	DAU		2 Laporan	74,875,500	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	1 Laporan	133,200,000	DAU		1 Laporan	133,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	48,268,750			1	48,268,750	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	15 Unit	32,950,000	DAU		15 Unit	32,950,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	3 Unit	9,300,000	DAU		3 Unit	9,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Barru	1 Unit	6,018,750	DAU		1 Unit	6,018,750	Badan Pendapatan Daerah

							Dipelihara/Direhabilitasi								
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		3.84	4,266,716,000			3.84	4,266,716,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi		100%	4,266,716,000			1	4,266,716,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Barru dan Luar daerah	3 Dokumen	1,096,448,000	DAU		3 Dokumen	1,096,448,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Barru	7 Laporan	155,398,000	DAU		7 Laporan	155,398,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Barru	7 Unit	349,200,000	DAU		7 Unit	349,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Barru	2 Laporan	1,680,452,000	DAU		2 Laporan	1,680,452,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Barru	2 Laporan	205,009,500	DAU		2 Laporan	205,009,500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Barru	1 dokumen	46,800,000	DAU		1 dokumen	46,800,000	Badan Pendapatan Daerah

5	0	0	2.	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Barru	4 Dokumen	59,752,000	DAU		4 Dokumen	59,752,000	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Barru	2 Dokumen	524,156,500	DAU		2 Dokumen	524,156,500	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	2.	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Barru	4 Dokumen	149,500,000	DAU		4 Dokumen	149,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	3				KEPEGAWAIAN									
	5	0	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM		3	3,601,623,848	DAU		3	3,672,029,829	BKPSDM
						Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		20 JP	202,717,200			20 JP	214,301,040	BKPSDM
	5	3	1	2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan		100%	3,098,852,129			100%	3,253,794,735	BKPSDM
	5	3	1	2.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Barru	33 orang/bulan	3,098,852,129			34 orang/bulan	3,253,794,735	BKPSDM
	5	3	1	2.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM		100%	202,717,200			100%	214,301,040	BKPSDM

	5	3	1	2. 0 5	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Barru dan luar Kab	33 orang	202,717,200			34 orang	214,301,040	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 6		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun		100%	264,336,900			100%	265,086,900	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 6	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Barru	3 paket	6,639,400			3 paket	6,639,400	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 6	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Barru	3 paket	18,275,000			3 paket	19,025,000	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 6	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Barru dan luar Kab	6 laporan	239,422,500			6 laporan	239,422,500	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 7		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun		96.59%	102,421,625			97.73%	25,610,000	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 7	05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Barru	0	-			0	-	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 7	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Barru	8 unit	102,421,625			2 unit	25,610,000	BKPSDM
	5	3	1	2. 0 8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa		100%	88,484,500			100%	88,759,500	BKPSDM

							penunjang urusan kantor								
	5	3	1	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Barru	1 laporan	88,484,500			1 laporan	88,759,500	BKPSDM
	5	3	1	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun		28.63%	47,528,694			14.90%	38,778,694	BKPSDM
	5	3	1	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Barru	20 unit	31,878,694			20 unit	31,878,694	BKPSDM
	5	3	1	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Barru	35 unit	8,750,000			0	-	BKPSDM
	5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Barru	18 unit	6,900,000			18 unit	6,900,000	BKPSDM
	5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN		Kategori B (61-80)	2,324,575,633	DAU		Kategori B (61-80)	3,087,298,376	BKPSDM
	5	3	2	2.01		Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik		60.41%	1,116,987,135			58.97%	1,366,768,441	BKPSDM

	5	3	2	2. 0 1	02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab. Barru	2 dokumen	63,579,450			2 dokumen	69,937,395	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 1	03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Barru	1 dokumen	432,510,045			1 dokumen	717,118,842	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 1	06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Barru	1 dokumen	130,055,640			1 dokumen	143,061,204	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 1	08	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Barru	2 lembaga	12,512,000			2 lembaga	13,162,000	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 1	10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Barru	1 dokumen	420,000,000			1 dokumen	365,159,000	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 1	11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Kab. Barru	2 dokumen	58,330,000			2 dokumen	58,330,000	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 2		Mutasi dan promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan		100%	776,124,750			100%	1,265,652,100	BKPSDM
	5	3	2	2. 0 2	01	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana	Kab. Barru	5 dokumen	90,906,250			5 dokumen	89,427,850	BKPSDM

							dan mutasi ASN antar daerah										
	5	3	2	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Barru	2 dokumen	185,218,500			2 dokumen	201,675,500	BKPSDM		
	5	3	2	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Kab. Barru	1 dokumen	500,000,000			1 dokumen	974,548,750	BKPSDM		
	5	3	2	2.03		Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3		79.64%	174,645,000			80.40%	174,645,000	BKPSDM		
	5	3	2	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Kab. Barru	56 orang	174,645,000			56 orang	174,645,000	BKPSDM		
	5	3	2	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik		89.84%	256,818,748			91.12%	280,232,835	BKPSDM		
	5	3	2	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Barru	3 dokumen	45,355,748			3 dokumen	47,623,535	BKPSDM		
	5	3	2	2.04	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Kab. Barru	210 orang	91,044,000			206 orang	100,148,400	BKPSDM		
	5	3	2	2.04	07	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Kab. Barru	7 orang	120,419,000			7 orang	132,460,900	BKPSDM		
5	4					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	5	4	2			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan		80%	1,344,851,500	DAU		80%	976,854,500	BKPSDM		

							kompetensi 20 JP pertahun								
	5	4	2	2. 0 1		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi		100%	25,000,000			0%	-	BKPSDM
	5	4	2	2. 0 1	01	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	Kab. Barru	1 dokumen	25,000,000			-	-	BKPSDM
	5	4	2	2. 0 2		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik		100%	1,319,851,500			100%	976,854,500	BKPSDM
	5	4	2	2. 0 2	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Kab. Barru dan luar Kab	6 laporan	1,319,851,500			6 laporan	976,854,500	BKPSDM

5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah		≥ 764 Poin	735,000,000			≥ 842 Poin	805,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	05	02			2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Kab. Barru	100 Persen	588,000,000	DAU		100 Persen	644,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	05	02			2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	147,000,000		1 Laporan	161,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	05	02			2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		1 Laporan	147,000,000		1 Laporan	161,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	05	02			2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan		1 Rekomendasi	147,000,000		1 Rekomendasi	161,000,000	BAPPELITB ANGDA

							Peraturan yang Diterbitkan								
5	0	0		2.	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	147,000,000			1 Laporan	161,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Kab. Barru	100 Persen	147,000,000	DAU		100 Persen	161,000,000	BAPPELITB ANGDA
5	0	0		2.	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	147,000,000			1 Laporan	161,000,000	BAPPELITB ANGDA
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	1					INSPEKTORAT DAERAH									
6	0	0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat		Level	5,763,753,248	DAU		Level	5,797,894,248	Inspektorat
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		50		DAU		50		
6	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kab. Barru		3,119,663,248	DAU			3,119,663,248	

6	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Barru	504	3,119,663,248	DAU	504	3,119,663,248	Inspektorat
6	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Barru		230,010,000	DAU		253,011,000	
6	01	01	2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Kab. Barru	8	12,210,000	DAU	8	13,431,000	Inspektorat
6	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barru	38	217,800,000	DAU	38	239,580,000	Inspektorat
6	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Kab. Barru		60,700,000	DAU		66,800,000	
6	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Barru	1500	60,000,000	DAU	1500	66,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kab. Barru	2	-	DAU	2	-	Inspektorat
6	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kab. Barru	2	700,000	DAU	2	800,000	Inspektorat
6	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kab. Barru		84,200,000	DAU		89,240,000	

							daerah yang dipelihara									
6	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Barru	7		25,200,000	DAU		7	30,240,000	Inspektorat
6	01	01	2	09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Dipelihara	Kab. Barru	20		6,000,000	DAU		20	6,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Barru	36		18,000,000	DAU		36	18,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Barru	1		35,000,000	DAU		1	35,000,000	Inspektorat
6	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Barru			150,928,000	DAU			150,928,000	
6	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Barru	12		80,048,000	DAU		12	80,048,000	Inspektorat
6	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Barru	12		70,880,000	DAU		12	70,880,000	Inspektorat
6	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat inspektorat yang mengikuti pelatihan	Kab. Barru			2,118,252,000	DAU			2,118,252,000	

6	01	01	2	05		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Barru	43	945,192,000	DAU		43	945,192,000	Inspektorat
6	01	01	2	05		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Barru	50	1,173,060,000	DAU		50	1,173,060,000	Inspektorat
6	01	01	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan BPK) dan Internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	Kab. Barru		2,507,762,000	DAU			2,552,839,888	Inspektorat
6	01	01	2			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan	Kab. Barru		1,559,790,000	DAU			1,604,867,888	
6	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Barru	38	673,200,000	DAU		38	673,200,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Barru	7	191,500,000	DAU		7	210,650,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Barru	38	224,400,000	DAU		38	246,840,000	Inspektorat
6	01	01	2	01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Barru	1	34,848,000	DAU		1	38,335,888	Inspektorat
6	01	01	2	01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Barru	12	187,250,000	DAU		12	187,250,000	Inspektorat

6	0	0	2	0	06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Barru	3	30,910,000	DAU	3	30,910,000	Inspektorat
6	0	0	2	0	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Barru	1	217,682,000	DAU	1	217,682,000	Inspektorat
6	0	0	2	0		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Barru		947,972,000	DAU		947,972,000	
6	0	0	2	0	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Barru	5	39,572,000	DAU	5	39,572,000	Inspektorat
6	0	0	2	0	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Barru	40	908,400,000	DAU	40	908,400,000	Inspektorat
6	0	0				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyimpangan/pe nyalahgunaan yang terjadi	Kab. Barru		743,785,000	DAU		818,013,000	Inspektorat
6	0	0	2	0		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Barru		44,060,000	DAU		48,316,000	
6	0	0	2	0	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Barru	1	1,500,000	DAU	1	1,500,000	Inspektorat

6	0 1	0 3	2	0 1	02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Kab. Barru	1	42,560,000	DAU	1	46,816,000	Inspektorat
6	0 1	0 3	2	0 2		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kab. Barru		699,725,000	DAU		769,697,000	
6	0 1	0 3	2	0 2	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Barru	36	118,800,000	DAU	36	130,680,000	Inspektorat
6	0 1	0 3	2	0 2	02	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Barru	36	118,500,000	DAU	36	130,350,000	Inspektorat
6	0 1	0 3	2	0 2	03	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Barru	4	462,425,000	DAU	4	508,667,000	Inspektorat
6	0 1	0 3	2	0 2	04	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Barru	36	-	DAU	36	-	Inspektorat

7						UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1					KECAMATAN									
7	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	Kecamatan Barru	3	5,836,177,59 0	DAU		3	5,883,135,58 5	Kecamatan Barru
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Barru	20 JPL	76,811,000	DAU		20 JPL	88,797,500	
7	0 1	0 1		2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	Kecamatan Barru	100%	4,437,273,13 5	DAU		100%	4,437,273,13 5	Kecamatan Barru
7	0 1	0 1		2. 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Barru	54 Orang	4,437,273,13 5	DAU		54 Orang	4,437,273,13 5	Kecamatan Barru
7	0 1	0 1		2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat komptensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Kecamatan Barru	100%	76,811,000	DAU		100%	88,797,500	Kecamatan Barru
7	0 1	0 1		2. 0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Barru	20 Orang	76,811,000	DAU		20 Orang	88,797,500	Kecamatan Barru
7	0 1	0 1		2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Barru	100%	444,466,930	DAU		100%	453,226,400	Kecamatan Barru

7	0	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Barru	10 paket	13,217,000	DAU		10 paket	17,754,900	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Barru	8 paket	11,558,430	DAU		8 paket	12,658,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Barru	1 Paket	30,645,000	DAU		1 Paket	30,645,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Barru	2 Paket	13,419,000	DAU		2 Paket	14,156,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Barru	5 dokumen	15,720,000	DAU		5 dokumen	15,720,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Barru	12 laporan	14,850,000	DAU		12 laporan	14,850,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Barru	3 laporan	345,057,500	DAU		3 laporan	347,442,500	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Barru	100%	240,756,000	DAU		100%	266,313,000	Kecamatan Barru

7	0	0		2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Barru	7 unit	55,500,000	DAU		8 unit	75,500,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Barru	21 Unit	185,256,000	DAU		22 Unit	190,813,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	Kecamatan Barru	100%	594,820,379	DAU		100%	599,838,284	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Barru	12 Laporan	525,196,100	DAU		12 Laporan	528,173,100	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Barru	12 Laporan	40,824,279	DAU		12 Laporan	42,865,184	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Barru	12 Laporan	28,800,000	DAU		12 Laporan	28,800,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kecamatan Barru	100%	118,861,146	DAU		100%	126,484,766	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Barru	17 unit	78,023,000	DAU		19 unit	81,668,000	Kecamatan Barru

7	0	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Barru	3 unit	1,624,620	DAU		6 unit	3,249,240	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Barru	29 unit	12,760,000	DAU		29 unit	12,760,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Barru	6 unit	22,453,526	DAU		6 Unit	22,453,526	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Barru	8 unit	4,000,000	DAU		13 unit	6,354,000	Kecamatan Barru
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	Kecamatan Barru	100%	65,054,800	DAU		100%	67,967,300	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Barru	100%	63,662,000	DAU		100%	66,574,500	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Barru	3 Laporan	26,250,000	DAU		3 Laporan	27,562,500	Kecamatan Barru

7	0	0		2.	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Barru	5 Dokumen	37,412,000	DAU		5 Dokumen	39,012,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Kecamatan Barru	100%	1,392,800	DAU		100%	1,392,800	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Barru	20 laporan (SOP)	1,392,800	DAU		25 laporan (SOP)	1,392,800	Kecamatan Barru
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/ lembaga	Kecamatan Barru	100%	2,963,136,270.00	DAU		100%	1,983,675,918.20	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kecamatan Barru	7 Lembaga Kemasyarakatan	2,945,250	DAU		7 Lembaga Kemasyarakatan	3,092,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Barru	7 Lembaga Kemasyarakatan	2,945,250	DAU		7 Lembaga Kemasyarakatan	3,092,000	Kecamatan Barru

7	0	0		2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kecamatan Barru	100%	2,138,595,820	DAU		100%	1,158,988,718	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Barru	7 Lembaga Kemasyarakatan	61,030,450	DAU		7 Lembaga Kemasyarakatan	64,081,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Barru	5 Unit	1,700,000,000	DAU		5 Unit	749,805,718	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Barru	10 Pokmas	373,651,570	DAU		10 Pokmas	339,834,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Barru	5 laporan	3,913,800	DAU		5 laporan	5,268,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Persentase lembaga								
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	Kecamatan Barru	100%	821,595,200.00	DAU		100%	821,595,200.00	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Barru	7 lembaga (142 orang)	821,595,200.00	DAU		7 lembaga (142 orang)	821,595,200.00	Kecamatan Barru
7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Kecamatan Barru	100%	40,294,000			100%	40,294,000	Kecamatan Barru

7	0	0		2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Barru	9 Laporan	40,294,000	DAU		7 Laporan	40,294,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Barru	7 Evaluasi	21,814,000	DAU		5 Evaluasi	21,814,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Barru	2 laporan	18,480,000	DAU		2 laporan	18,480,000	Kecamatan Barru
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Barru	100%	2,578,600	DAU		100%	2,578,600	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Barru	1 Dokumen	2,578,600	DAU		1 Dokumen	2,578,600	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Barru	1 Dokumen	2,578,600	DAU		1 Dokumen	2,578,600	Kecamatan Barru
7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	Kecamatan Barru	100%	9,119,000	DAU		100%	11,739,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Barru	5 Laporan	9,119,000	DAU		5 Laporan	11,739,000	Kecamatan Barru
7	0	0		2.	17					9,119,000				11,739,000	Kecamatan Barru

	0 1 6			2. 0 1		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Pemerintahan Desa							Kecamatan Barru	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Barru	5 Laporan		DAU		5 Laporan		
X	X X	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Soppeng Riaja	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	3,770,922,428	APBD		100%	3,772,522,428	Kec. Soppeng Riaja
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	20 JPL		APBD		20 JPL		
X	X X	0 1		2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	2,708,841,908	APBD		100%	2,708,841,908	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X X	0 1		2. 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kec. Soppeng Riaja	32 Orang	2,708,841,908	APBD		32 Orang	2,708,841,908	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X X	0 1		2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	53,155,800	APBD		100%	53,155,800	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X X	0 1		2. 0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Kantor Kec. Soppeng Riaja	8 Orang	53,155,800	APBD		8 Orang	53,155,800	Kantor Kec. Soppeng Riaja

							Pendidikan dan Pelatihan								
X	X	0		2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	453,104,400	APBD		100%	454,704,400	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	3 Paket	5,500,000	APBD		3 Paket	6,000,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	3 Paket	11,000,000	APBD		3 Paket	12,100,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	3 Paket	213,672,200	APBD		3 Paket	213,672,200	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	6 Paket	13,400,000	APBD		6 Paket	13,400,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Dokumen	8,400,000	APBD		5 Dokumen	8,400,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	2,340,000	APBD		12 Laporan	2,340,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

X	X	0	2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	198,792,200	APBD		12 Laporan	198,792,200	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Soppeng Riaja	14 Unit	138,306,000	APBD		14 Unit	138,306,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Soppeng Riaja	5 unit	11,307,000	APBD		5 unit	11,307,000	Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Soppeng Riaja	5 unit	61,999,000	APBD		5 unit	61,999,000	Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Soppeng Riaja	4 Unit	65,000,000	APBD		4 Unit	65,000,000	Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Soppeng Riaja	36 Laporan	183,714,320	APBD		36 Laporan	183,714,320	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	26,954,400	APBD		12 Laporan	26,954,400	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	40,959,920	APBD		12 Laporan	40,959,920	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0	2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kantor Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	115,800,000	APBD		12 Laporan	115,800,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

							Kantor yang Disediakan								
X	X	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kec. Soppeng Riaja	52 Unit	233,800,000	APBD		52 Unit	233,800,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Kec. Soppeng Riaja	22 Unit	93,100,000	APBD		22 Unit	93,100,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor Kec. Soppeng Riaja	11 unit	37,250,000	APBD		11 unit	37,250,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kantor Kec. Soppeng Riaja	4 Unit	2,350,000	APBD		4 Unit	2,350,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 unit	17,500,000	APBD		5 unit	17,500,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Kantor Kec. Soppeng Riaja	4 unit	25,750,000	APBD		4 unit	25,750,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
X	X	0		2.	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kantor Kec. Soppeng Riaja	4 unit	57,850,000	APBD		4 unit	57,850,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

							Dipelihara /Direha bilitasi								
7	0 1	0 2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	67,600,000	APBD		100%	67,600,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 2		2. 0 1		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan/Dokumen dalam penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	11 Laporan	24,850,000	APBD		11 Laporan	24,850,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 2		2. 0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kec. Soppeng Riaja	8 Laporan	7,500,000	APBD		8 Laporan	7,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 2		2. 0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	3 Dokumen	17,350,000	APBD		3 Dokumen	17,350,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 2		2. 0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kantor Kec. Soppeng Riaja	4 Dokumen	42,750,000	APBD		4 Dokumen	42,750,000	Kec. Soppeng Riaja

							yang Ada di Kecamatan								
7	0 1	0 2		2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kantor Kec. Soppeng Riaja	4 Dokumen	42,750,000	APBD		4 Dokumen	42,750,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/ lembaga	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	768,429,000	APBD		100%	438,429,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 3		2. 0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang diKoordinasikan dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga	7,500,000	APBD		5 Lembaga	7,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 3		2. 0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga	7,500,000	APBD		5 Lembaga	7,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0 1	0 3		2. 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga, Unit, Pokmas dan Laporan dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga, 2 Unit, 2 Pokmas & 7Laporan	701,579,000	APBD		5 Lembaga, 2 Unit, 2 Pokmas & 7Laporan	371,579,000	Kec. Soppeng Riaja

7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga	143,879,000	APBD		5 Lembaga	143,879,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 unit	345,000,000	APBD		2 Unit	15,000,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	2 Pokmas/Ormas	200,000,000	APBD		2 Pokmas/Ormas	200,000,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	7 Laporan	12,700,000	APBD		7 Laporan	12,700,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga Kemasyarakatan	59,350,000	APBD		5 Lembaga Kemasyarakatan	59,350,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga Kemasyarakatan	59,350,000	APBD		5 Lembaga Kemasyarakatan	59,350,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	23,500,000	APBD		100%	23,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kec. Soppeng Riaja	1 Kegiatan	23,500,000	APBD		1 Kegiatan	23,500,000	Kec. Soppeng Riaja

7	0	0		2.	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Kec. Soppeng Riaja	25 Orang	23,500,000	APBD		25 Orang	23,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi			7,500,000	APBD			7,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Laporan	7,500,000	APBD		5 Laporan	7,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	01	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Kec. Soppeng Riaja	5 Laporan	7,500,000	APBD		5 Laporan	7,500,000	Kec. Soppeng Riaja
7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Kantor Kec. Soppeng Riaja	100%	33,400,000	APBD		100%	33,400,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

7	0	0		2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Monev dan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kec. Soppeng Riaja	3 Laporan	33,400,000	APBD		3 Laporan	33,400,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kec. Soppeng Riaja	1 Evaluasi	25,000,000	APBD		1 Evaluasi	25,000,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	0	0		2.	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Kec. Soppeng Riaja	2 Laporan	8,400,000	APBD		2 Laporan	8,400,000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	1	0	2	0	00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Prosentase kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kecamatan Mallusetasi	100%	3,550,960,207	APBD		100%	4,575,598,707	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan		1 keg.	2,507,716,207			1 keg.	3,507,716,207	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 ob	2,507,716,207			43	3,507,716,207	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan		1 keg.	29,500,000			1 keg.	30,500,000	Kec Mallusetasi

7	1	0	2	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8 orang	29,500,000			9 orang	30,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah Yang Terlaksana		6 keg.	358,963,500			6 keg.	374,572,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	6,000,000			4 paket	7,950,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 paket	14,050,000			4 paket	16,008,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	36,840,000			4 paket	36,840,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		8 paket	16,623,500			8 paket	16,623,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 dok.	11,250,000			5 dok.	11,250,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	9,000,000			12 laporan	9,250,000	Kec Mallusetasi

7	1	0	2	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	265,200,000			12 laporan	276,650,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	168,510,500			100%	173,260,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 unit	35,760,500			6 unit	35,760,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 unit	132,750,000			8 unit	137,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 keg.	394,785,000			4 keg.	396,050,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	35,200,000			12 laporan	36,450,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	24,000,000			12 laporan	24,000,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	13,985,000			12 laporan	14,000,000	Kec Mallusetasi

RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2023

7	1	0	2	0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	321,600,000			12 laporan	321,600,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		3 keg.	91,485,000			3 keg.	93,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		34 unit	57,000,000			34 unit	59,000,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		31 unit	13,985,000			31 unit	14,000,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	20,500,000			4 unit	20,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	44,000,000			100%	44,000,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan Kecamatan		2 keg.	36,500,000			2 keg.	36,500,000	Kec Mallusetasi

7	1	0 2	2	0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 laporan	32,000,000			2 laporan	32,000,000	Kec Mallusetasi
7	1	0 2	2	0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 dok.	4,500,000			4 dok.	4,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0 2	2	0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	7,500,000			Baik	7,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0 2	2	0 2	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10 laporan	7,500,000			10 laporan	7,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0 3	2			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase program pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga		100%	1,453,694,230			100%	1,458,177,230	Kec Mallusetasi
7	1	0 3	2	0 1		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		1 keg.	112,500,000			1 keg.	113,250,500	Kec Mallusetasi

7	1	0	2	0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 lembaga	112,500,000			5 lembaga	113,250,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan		4 keg.	1,145,444,230			4 keg.	1,148,176,730	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5 lembaga	112,500,000			5 lembaga	113,250,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 unit	816,293,730			6 unit	816,293,730	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		30 klp.	212,150,500			30 klp.	214,132,500	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		3 laporan	4,500,000			3 laporan	4,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan			195,750,000				196,750,000	Kec Mallusetasi

7	1	0	2	0	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 lembaga	195,750,000			5 lembaga	196,750,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	0	0	00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100%	32,250,000			100%	32,250,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		2 keg.	32,250,000			2 keg.	32,250,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Evaluasi	19,750,000			12 Evaluasi	19,750,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		3 laporan	12,500,000			3 laporan	12,500,000	Kec Mallusetasi
7	1	0				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi			3,000,000				3,000,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa								Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pendampingan Desa Diwilayahnya		5 desa	3,000,000			5 desa	3,000,000	Kec Mallusetasi

7	1	0	0	0	00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan di kecamatan		100%	56,250,000			100%	56,250,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	0	0	00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan		100	56,250,000			100	56,250,000	Kec Mallusetasi
7	1	0	2	0	01	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		25 orang	56,250,000			25 orang	56,250,000	Kec Mallusetasi
7	0	0		0	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP		3.00	3,546,725,456			3.00	3,551,196,536	Kecamatan Tanete Riaja
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL		DAU		20 JPL		
7	0	0		2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan	Kec. Tanete Riaja	100%	3,111,174,086	DAU		100%	3,111,174,086	Kecamatan Tanete Riaja

							Perundang-undangan								
7	0	0		2.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riaja	38 orang	3,111,174,086	DAU		38 orang	3,111,174,086	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		0	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap Keseluruhan ASN	Kec. Tanete Riaja	100%	54,000,000	DAU		100%	54,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Riaja	11 Org	54,000,000	DAU		11 Org	54,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riaja	100%	146,184,920	DAU		100%	147,850,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	5 paket	2,324,920	DAU		5 paket	2,500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	2 Paket	3,000,000	DAU		2 Paket	3,500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Kec. Tanete Riaja	1 Paket	20,000,000	DAU		1 Paket	20,000,000	Kecamatan Tanete Riaja

							Kantor yang Disediakan								
7	0	0		2.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	2 Paket	6,000,000	DAU		2 Paket	6,090,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	4 Dokumen	5,160,000	DAU		4 Dokumen	5,160,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tanete Riaja	12 Laporan	2,100,000	DAU		12 Laporan	2,100,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riaja	3 Laporan	107,600,000	DAU		3 Laporan	108,500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riaja	100%	53,000,000	DAU		100%	54,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	6 unit	14,000,000	DAU		6 unit	14,500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	7 Unit	39,000,000	DAU		7 Unit	39,500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa Penunjang Urusan Kantor	Kec. Tanete Riaja	100%	144,306,450	DAU		100%	145,862,450	Kecamatan Tanete Riaja

7	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanete Riaja	12 Laporan	121,306,450	DAU		12 Laporan	121,306,450	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	6 Laporan	20,000,000	DAU		6 Laporan	21,556,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Riaja	1 Laporan	3,000,000	DAU		1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kec. Tanete Riaja	100%	38,060,000	DAU		100%	38,310,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tanete Riaja	7 unit	26,560,000	DAU		7 unit	26,560,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Tanete Riaja	2 unit	5,000,000	DAU		2 unit	5,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanete Riaja	5 unit	2,500,000	DAU		5 unit	2,500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanete Riaja	2 Unit	4,000,000	DAU		3 Unit	4,250,000	Kecamatan Tanete Riaja

7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	Kec. Tanete Riaja	100%	27,903,900	DAU		100%	27,903,900	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanete Riaja	100%	27,403,900	DAU		100%	27,403,900	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanete Riaja	3 Laporan	24,203,900	DAU		3 Laporan	24,203,900	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanete Riaja	6 Dok	3,200,000	DAU		6 Dok	3,200,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Kec. Tanete Riaja	100%	500,000	DAU		100%	500,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanete Riaja	4 Laporan	500,000	DAU		4 Laporan	500,000	Kecamatan Tanete Riaja

7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	Kec. Tanete Riaja	100%	462,595,000	DAU		100%	423,624,320	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kec. Tanete Riaja	100%	3,000,000	DAU		100%	3,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tanete Riaja	6 lembaga	3,000,000	DAU		6 lembaga	3,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kec. Tanete Riaja	100%	350,000,000	DAU		100%	283,424,320	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tanete Riaja	3 Lembaga	18,760,000	DAU		3 Lembaga	19,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Tanete Riaja	1 Unit	277,686,000	DAU		1 Unit	260,424,320	Kecamatan Tanete Riaja

7	0	0		2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tanete Riaja	2 Pokmas	52,000,000	DAU		2 Pokmas	2,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Tanete Riaja	4 lap	1,554,000	DAU		4 lap	2,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	Kec. Tanete Riaja	100%	109,595,000	DAU		100%	137,200,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Tanete Riaja	5 lbg	109,595,000	DAU		5 lbg	137,200,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Tanete Riaja	100%	30,621,000	DAU		100%	30,621,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanete Riaja	25 Orang	30,621,000	DAU		25 Orang	30,621,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Kec. Tanete Riaja	25 Orang	30,621,000	DAU		25 Orang	30,621,000	Kecamatan Tanete Riaja

						Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	016	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi	Kec. Tanete Riaja	100%	4,100,000	DAU		100%	4,100,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	016	06		2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanete Riaja	6 Laporan	4,100,000	DAU		6 Laporan	4,100,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	016	06		2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tanete Riaja	6 Laporan	4,100,000	DAU		6 Laporan	4,100,000	Kecamatan Tanete Riaja
77	014	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan	Kec. Tanete Riaja	100%	49,290,000	DAU		100%	49,290,000	Kecamatan Tanete Riaja

	0	0		2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	masyarakat yang tertangani								
	1	4		0			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kec. Tanete Riaja	5 Laporan	49,290,000	DAU		5 Laporan	49,290,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riaja	4 Evaluasi	21,000,000	DAU		4 Evaluasi	21,000,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0		2.	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanete Riaja	1 Laporan	28,290,000	DAU		1 Laporan	28,290,000	Kecamatan Tanete Riaja
7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Kecamatan/ Kelurahan	Dok,Laporan,or g/bln	2,531,306,282	DAU		Dok,Laporan,or g/bln	2,532,306,282	Kecamatan Pujananting
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan				DAU				
7	1	0		2.		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya efektifitas dan efesiensi kegiatan perencanaan,peng anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		14 dok,8 lap	3,104,000			14 dok,8 lap	3,104,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dok	482,000	DAU		2 dok	482,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1 Dok	437,000			1 Dok	437,000	Kecamatan Pujananting

							Dokumen RKA-SKPD								
7	1	0		2.	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	437,000			1 Dok	437,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	437,000	DAU		1 Dok	437,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	437,000	DAU		1 Dok	437,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	437,000			4 laporan	437,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	437,000			4 laporan	437,000	Kecamatan Pujananting

7	1	0		2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan/ Kelurahan	23 Org/bln,7 Lap	1,998,677,822	DAU		23 Org/bln,7 Lap	1,999,677,822	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 org/bln	1,998,237,822			23 org/bln	1,999,237,822	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 orang	220,000	DAU		5 orang	220,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0		2.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 orang	220,000			5 orang	220,000	Kecamatan Pujananting
X	X	0		2.		Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah	Kecamatan/ Kelurahan	1 dok,1 Lap	600,000	DAU		1 dok,1 Lap	600,000	Kecamatan Pujananting
X	X	0		2.	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dok	300,000			1 dok	300,000	Kecamatan Pujananting

X	X	0	2.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 lap	300,000	DAU		1 lap	300,000	Kecamatan Pujananting
X	X	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan administrasi Kepegawaian	Kecamatan/ Kelurahan	9 orang	77,556,000			9 orang	77,556,000	Kecamatan Pujananting
X	X	0	2.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		13 orang	77,556,000	DAU		13 orang	77,556,000	Kecamatan Pujananting
X	X	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan/ Kelurahan	50 paket,2 dok,15 Lap	204,529,500			50 paket,2 dok,15 Lap	204,529,500	Kecamatan Pujananting
7	1	0	2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Paket	3,000,000	DAU		7 Paket	3,000,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0	2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 Paket	15,000,000			20 Paket	15,000,000	Kecamatan Pujananting
7	1	0	2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	17,252,000	DAU		1 paket	17,252,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0	2.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	5,005,000	DAU		2 paket	5,005,000	Kecamatan Pujananting

7	1	0	2.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		20 Dok	5,060,000	DAU		20 Dok	5,060,000	Kecamatan Pujananting
		1	0	6										
7	1	0	2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 lap	1,650,000			12 lap	1,650,000	Kecamatan Pujananting
		1	0	6										
7	1	0	2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		453 Kali	157,562,500	DAU		453 Kali	157,562,500	Kecamatan Pujananting
		1	0	6										
X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kecamatan/ Kelurahan	21 unit	79,021,000	DAU		21 unit	79,021,000	Kecamatan Pujananting
	X	1	0	7										
X	X	0	2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 Unit	25,000,000	DAU		15 Unit	25,000,000	Kecamatan Pujananting
	X	1	0	7										
X	X	0	2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	6,000,000			1 unit	6,000,000	Kecamatan Pujananting
	X	1	0	7										
	X	0	2.	07	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan		5 unit	48,021,000			5 unit	48,021,000	Kecamatan Pujananting
	X	1	0	7										
X	X	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhi layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	Kecamatan/ Kelurahan	5 Laporan	121,915,000	DAU		5 Laporan	121,915,000	Kecamatan Pujananting
	X	1	0	8										
7	1	0	2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	57,455,000			1 Laporan	57,455,000	Kecamatan Pujananting
		1	0	8										
7	1	0	2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		3 Laporan	59,660,000	DAU		3 Laporan	59,660,000	Kecamatan Pujananting
		1	0	8										

7	0	0		2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrtenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan/ Kelurahan	3 Laporan, 6 dokumen	53,035,000			3 Laporan, 6 dokumen	13,035,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3 Lap	13,035,000	DAU		3 Lap	13,035,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	40,000,000			-	-	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Kecamatan	7 dokumen	800,000	DAU		7 dokumen	800,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7 dokumen	800,000	DAU		7 dokumen	800,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat	Kelurahan	16 lbg,1 unit,2 klp/ormas,5 lap	522,886,961			16 lbg,1 unit,2 klp/ormas,5 lap	372,886,961	Kecamatan Pujananting

							/kelompok/lembaga								
7	0	0		2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kelurahan	6 lbg	2,000,000	DAU		6 lbg	2,000,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6 lbg	2,000,000			6 lbg	2,000,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	Kelurahan	5 lbg,1 unit,2 klp/ormas,4 lap	364,090,361			5 lbg,1 unit,2 klp/ormas,4 lap	214,090,361	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5 lbg	8,130,000	DAU		5 lbg	8,130,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 unit	324,960,361			2 unit	194,960,361	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas/ormas	30,000,000	DAU		2 Pokmas/ormas	10,000,000	Kecamatan Pujananting

7	0	0		2.	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		2 lap	1,000,000			2 lap	1,000,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	Kecamatan/ Kelurahan	3 lgb, 1 lap	156,796,600	DAU		3 lgb, 1 lap	156,796,600	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3 lgb	102,000,000			3 lgb	102,000,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Difasilitasi		4 lembaga	54,796,600	DAU		4 lembaga	54,796,600	Kecamatan Pujananting
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan	25 orang	55,355,400	DAU		25 orang	55,355,400	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	25 orang, 2 laporan	55,355,400	DAU		25 orang, 2 laporan	55,355,400	Kecamatan Pujananting

7	0	0		2.	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		27 orang	34,504,400			27 orang	34,504,400	Kecamatan Pujananting
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan	1 laporan	20,851,000	DAU		1 laporan	20,851,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan	5 Laporan	1,800,000	DAU DAU		5 Laporan	1,800,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0		2.	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan	6 laporan	1,800,000			6 laporan	1,800,000	Kecamatan Pujananting

7	0	0	2.	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan	6 desa	1,800,000	DAU		6 desa	1,800,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0	0	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani		4 evaluasi, 1 lap	24,716,800			4 evaluasi, 1 lap	24,716,800	Kecamatan Pujananting
7	0	0	2.	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	4 evaluasi, 1 lap	24,716,800			4 evaluasi, 1 lap	24,716,800	Kecamatan Pujananting
7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Evaluasi	16,200,000	DAU		4 Evaluasi	16,200,000	Kecamatan Pujananting
7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 lap	8,516,800			1 lap	8,516,800	Kecamatan Pujananting
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Kecamatan Balusu	3.00 Point	2,628,024,986	DAU		3.00 Point	2,742,729,986	Kecamatan Balusu
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL				20 JPL		
7	0	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Balusu	100%	2,194,120,986			100%	2,294,120,986	Kecamatan Balusu

7	0	0		2.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balusu	23 org/bln	2,194,120,986			23 org/bln	2,294,120,986	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	Kecamatan Balusu	100%	54,714,000			100%	54,714,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Balusu	9 orang	54,714,000			9 orang	54,714,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Balusu	100%	171,265,000			100%	178,490,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balusu	12 Paket	3,000,000			12 Paket	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Balusu	7 Paket	3,600,000			7 Paket	3,600,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balusu	1 paket	25,000,000			1 paket	25,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balusu	2 paket	7,500,000			2 paket	8,000,000	Kecamatan Balusu

X	X	0	2.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kecamatan Balusu	2 Dok	3,960,000			2 Dok	3,960,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balusu	12 lap	1,650,000			12 lap	1,650,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balusu	554 kali	126,555,000			581 kali	133,280,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kecamatan Balusu	38 Unit	46,960,000			33 Unnit	48,960,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Balusu	35 unit	24,560,000			30unit	24,560,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Balusu	3 unit	22,400,000			3 unit	24,400,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor		100%	112,120,000			100%	117,600,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balusu	12 Laporan	76,000,000			12 Laporan	78,000,000	Kecamatan Balusu
X	X	0	2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Balusu	2 Laporan	26,520,000			2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Balusu

X	X	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balusu	2 Laporan	9,600,000			2 Laporan	9,600,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Kecamatan Balusu	100%	48,845,000			100%	48,845,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Balusu	8 unit	32,345,000			8 unit	32,345,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kecamatan Balusu	22 unit	3,000,000			22 unit	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balusu	5 unit	6,000,000			3 unit	6,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Balusu	1 paket	7,500,000			1 paket	7,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	Kecamatan Balusu	100%	40,423,000	DAU		100%	43,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketepatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balusu	100%	40,423,000			100%	43,000,000	Kecamatan Balusu

7	0	0		2.	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balusu	3 Lap	37,423,000			3 Lap	39,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balusu	6 dokumen	3,000,000			6 dokumen	3,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	Kecamatan Balusu	-	-			-	-	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balusu	-	-			-	-	Kecamatan Balusu
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	Kecamatan Balusu	100%	650,442,500	DAU		100%	329,942,500	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	Kecamatan Balusu	100%	2,500,000			100%	3,000,000	Kecamatan Balusu

7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Balusu	6 lbg	2,500,000			6 lbg	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	Kelurahan Takkalasi	100%	471,500,000			100%	150,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Takkalasi	5 lbg	7,500,000		215500000	5 lbg	7,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Takkalasi	1 unit	215,500,000		-	1 unit	110,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Takkalasi	2 Pokmas/ormas	245,500,000			2 Pokmas/ormas	30,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Takkalasi	4 lap	3,000,000			4 lap	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	Kecamatan Balusu	100%	176,442,500			100%	176,442,500	Kecamatan Balusu

7	0	0		2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balusu	5 lbg	173,942,500			5 lbg	173,942,500	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balusu	1 Lap	2,500,000			1 Lap	2,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Balusu	100%	45,279,500	DAU		100%	46,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Balusu	25 orang	45,279,500			25 orang	46,500,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Balusu	25 orang	45,279,500			25 orang	46,500,000	Kecamatan Balusu

7	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	Kecamatan Balusu	100%	3,000,000	DAU		100%	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Balusu	5 laporan	3,000,000			5 laporan	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Balusu	5 Laporan	3,000,000			5 Laporan	3,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Kecamatan Balusu	100%	31,000,000	DAU		100%	31,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balusu	5 laporan	31,000,000			5 laporan	31,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balusu	4 Evaluasi	15,000,000			4 Evaluasi	15,000,000	Kecamatan Balusu
7	0	0		2.	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Balusu	1 lap	16,000,000			1 lap	16,000,000	Kecamatan Balusu

7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	Kec. Tanete Rilau	3.00 Point	3,655,950,634	DAU		3.00 Point	3,661,659,134	Kec.Tanete Rilau
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL	51,861,000			20 JPL	51,961,000	
7	0	0		2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Rilau	39 org, 7 Lap.	3,161,810,434	DAU		39 org, 7 Lap.	3,166,905,434	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Rilau	39 orang	3,161,810,434	DAU		39 orang	3,166,905,434	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi terhadap keseluruhan ASN	Kec. Tanete Rilau	12 Orang	51,861,000	DAU		13 Orang	51,961,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Rilau	12 Orang	51,861,000	DAU		13 Orang	51,961,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanete Rilau	18 paket,5 dok,5 Lap	169,437,200	DAU		18 paket,5 dok,5 Lap	162,019,200	Kec.Tanete Rilau

7	0	0		2.	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	7 Paket	169,437,200	DAU		7 Paket	2,205,000	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	8 Paket	21,000,000	DAU		8 Paket	12,658,000	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	1 Paket	16,798,000	DAU		1 Paket	16,798,000	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	2 paket	16,798,000	DAU		2 paket	5,566,000	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	5 Dokumen	7,876,000	DAU		5 Dokumen	8,270,000	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tanete Rilau	1 Laporan	6,300,000	DAU		1 Laporan	6,615,000	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Rilau	4 Laporan	109,907,200	DAU		4 Laporan	109,907,200	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				6											
7	0	0		2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Rilau	15 unit	84,525,000	DAU		15 unit	88,743,500	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				7											
7	0	0		2.	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	4 unit	13,650,000	DAU		4 unit	14,332,500	Kec.Tanete Rilau
	1	1		0											
				7											

7	0	0		2.	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	5 Unit	57,750,000	DAU		5 Unit	60,630,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	11	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	6 unit	13,125,000	DAU		6 unit	13,781,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	9 Laporan	162,805,000	DAU		9 Laporan	164,434,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanete Rilau	4 Laporan	119,885,000	DAU		4 Laporan	120,814,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	3 laporan	33,220,000	DAU		3 laporan	33,620,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tanete Rilau	2 laporan	9,700,000	DAU		2 laporan	10,000,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	Kec. Tanete Rilau	33 unit	77,373,000			33 unit	79,557,000	Kec.Tanete Rilau

7	0	0		2.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tanete Rilau	6 unit	33,705,000	DAU		6 unit	35,310,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Tanete Rilau	7 unit	2,613,000	DAU		7unit	2,737,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanete Rilau	9 unit	6,405,000	DAU		9 unit	6,710,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanete Rilau	4 unit	31,500,000	DAU		4 unit	31,500,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanete Rilau	7 unit	3,150,000	DAU		7 unit	3,300,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diimplementasikan	Kec. Tanete Rilau		31,995,000	DAU			33,920,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketepenuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Tanete Rilau	3 laporan, 10 dokumen	31,470,000	DAU		3 laporan, 10 dokumen	33,370,000	Kec.Tanete Rilau

7	0	0		2.	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanete Rilau	3 laporan	19,950,000	DAU		3 laporan	21,450,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanete Rilau	10 Dokumen	11,520,000.00	DAU		10 Dokumen	11,920,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan SOP	Kec. Tanete Rilau	15 Laporan	525,000	DAU		20 laporan	550,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanete Rilau	15 Laporan	525,000	DAU		20 laporan	550,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	Kec. Tanete Rilau		1,492,623,565	DAU			831,442,317	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Kec. Tanete Rilau	6 Lembaga	2,945,250.00	DAU		DAU	3,092,000	Kec.Tanete Rilau

						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tanete Rilau	6 Lembaga	2,945,250	DAU		DAU	3,092,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	Kec. Tanete Rilau	5 lbg,3 unit,4 ormas,2 Lap.	1,210,167,265	DAU		5 lbg,3 unit,4 ormas,2 Lap.	534,374,765	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tanete Rilau	5 Lembaga	32,151,000	DAU		5 Lembaga	33,758,500	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Tanete Rilau	3 Unit	1,133,916,265	DAU		3 unit	453,916,265	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tanete Rilau	4 Pokmas/ormas	42,000,000	DAU		4 Pokmas/ormas	44,500,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Tanete Rilau	2 laporan	2,100,000	DAU		2 laporan	2,200,000	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan	Kec. Tanete Rilau	5 lembaga,1 Lap.	279,511,050	DAU		5 lembaga,1 Lap.	293,975,552	Kec.Tanete Rilau

							pemberdayaan masyarakat								
7	0 1	0 3		2. 0 3	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Tanete Rilau	5 lembaga	277,011,050	DAU		5 lembaga	291,475,552	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 3		2. 0 3	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tanete Rilau	1 Lap	2,500,000	DAU		1 Lap	2,500,000	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Tanete Rilau		11,760,000	DAU			11,839,000	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 6		2. 0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanete Rilau	8 laporan	11,760,000			8 laporan	11,839,000	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 6		2. 0 1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tanete Rilau	8 laporan	11,760,000	DAU		8 laporan	11,839,000	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tanete Rilau		43,218,000	DAU			45,378,900	Kec.Tanete Rilau

7	0	0		2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persenrase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Rilau	5 orang	43,218,000	DAU		7 orang	45,378,900	Kec.Tanete Rilau
7	0	0		2.	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanete Rilau	5 orang	43,218,000	DAU		7 orang	45,378,900	Kec.Tanete Rilau
7	0	0				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Kec. Tanete Rilau	2 eva, 2 Lap.	76,145,000	DAU		2 eva, 2 Lap.	81662750	Kec.Tanete Rilau

							Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	0 1	0 4		2. 0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	Kec. Tanete Rilau	2 eva, 2 Lap.	76,145,000			2 eva, 2 Lap.	81,662,750	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 4		2. 0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Rilau	2 evaluasi	50,450,000	DAU		2 evaluasi	41,195,000	Kec.Tanete Rilau
7	0 1	0 4		2. 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanete Rilau	2 Laporan	25,695,000	DAU		2 laporan	40,467,750	Kec.Tanete Rilau
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	1					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	0 1	0 2				Program : Penguatan Ideologi Panca Sila dan Karakter Kebangsaan.	Prosentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	Barru	100%	50,202,213	D A U		100%	51,206,257	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 2		2. 0 1		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Barru	3 Dokumen	50,202,213	D A U		3 Dokumen	51,206,257	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							Pancasila dan Karater Kebangsaan.								
8	0 1	0 2		2. 0 1	03	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Barru	200 Orang	40,202,213	D A U		200 Orang	40,206,257	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 2		2. 0 1	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Barru	20 Orang	10,000,000	D A U		20 Orang	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 3				Program: Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Prosentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	Barru	0.00	624,240,000	D A U		80	636,724,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0	0		2.		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada Serta Pantauan Situasi Politik.	Barru	4 Dokumen	624,240,000	D A U		5 Dokumen	636,724,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.	03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Barru	522 Orang	573,020,650	D A U		522 Orang	572,020,650	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	013			2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Barru	12 Laporan	51,219,350	D A U		12 Laporan	64,704,150	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	014					Program: Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Prosentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	Barru	100%	130,612,440	D A U		100%	133,234,689	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	014			2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Barru	1 Dokumen	130,612,440	D A U		1 Dokumen	133,234,689	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	014			2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas		166 Orang	90,612,440	D A U		166 Orang	90,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							dan ormas asing di daerah.								
8	0	0		2.	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.		3 Laporan	40,000,000	D A U		3 Laporan	43,234,689	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0				Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	Barru	100%	121,136,061	D A U		100%	123,558,782	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.	01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Barru	2 Dokumen	121,136,061	D A U		2 Dokumen	123,558,782	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.	03	Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	Barru	200 Orang	40,000,000	D A U		200 Orang	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

							kepercayaan didaerah.							
8	0 1	0 5		2. 0 1	04	Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	70 Orang	81,136,061	D A U		70 Orang	83,558,782	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 6				Program : Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Prosentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	50%	335,477,121	D A U		50%	341,556,063	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0 1	0 6		2. 0 1		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	4 Dokumen	335,477,121	D A U		4 Dokumen	341,556,063	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0	0		2.			Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.		100 Orang	31,055,821	D A U		100 Orang	31,055,821	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.			Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.		198 Orang	122,872,500	D A U		198 Orang	121,344,179	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0	0		2.	05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.		12 Laporan	20,000,000	D A U		12 Laporan	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.	06	Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	Barru	12 Dokumen	161,548,800	D A U		12 Dokumen	169,156,063	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Nilai Reformasi, Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Barru	60		D A U		70		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru.	Barru	70		D A U		70		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Nilai maturitas SPIP Kesbangpol	Barru	3,00	2,156,565,934	D A U		3,00	2,165,905,952	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.		20 JPL				20 JPL		

8	0	0		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Prosentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.	Barru	14 Bulan	1,785,313,450	D A U		14 Bulan	1,689,583,018	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.02	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN.	Barru	16 Orang	1,785,313,450	D A U		16 Orang	1,689,583,018	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi tekhnis terhadap keseluruhan ASN.	Barru	100%	85,000,000	D A U		100%	85,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.		13 Orang	85,000,000	D A U		13 Orang	85,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Prosentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.		100%	135,437,784	D A U		100%	203,600,429	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	Barru	1 Paket	1,600,000	D A U		1 Paket	1,600,429	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	Barru	1 Paket	1,703,000	D A U		1 Paket	2,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0	0		2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.		400 Laporan	132,134,784	D A U		450 Laporan	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	Barru	100%	40,000,000	D A U		1	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan.	Barru	8 Unit	40,000,000	D A U		8 Unit	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Prosentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor.	Barru	100%	68,314,700	D A U		100%	74,722,505	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Barru	4 Laporan	50,000,000	D A U		4 Laporan	52,722,505	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan.	Barru	12 Laporan	18,314,700	D A U		12 Laporan	22,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.	Barru	100%	42,500,000	D A U		100%	73,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0	0		2.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Barru	5 Unit	30,000,000	D A U		5 Unit	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	Barru	10 Unit	2,500,000	D A U		12 Unit	3,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	0		2.	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan laiinya yang dipelihara/rehabili tasi.	Barru	1 Unit	10,000,000	D A U		1 Unit	30,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH										1,069,244,983,971					

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barru, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dicapai.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indicator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan sebagaimana dituangkan pada table berikut.

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022	Target RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,13	71,79	72,16
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,68	7,45	6,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,74	5,88	5,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,47	5,91
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	43,43	43,9	47,08
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,35	0,34

Sumber data : BPS Kab.Barru dan RPJMD Kab Barru 2021-2026

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2

Capaian Indikator Kinerja Utama 2021, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Asumsi Capaian 2022	Target Tahun 2023
			Target	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,3	71,13	71,79	72,27
2	Indeks Pendidikan	Poin	-	65,22	69,94	70,28
3	Indeks Kesehatan	Poin	-	75,49	76,69	76,93
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah		11,02	11,12	11,35
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0	0	0,011	0,009
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	-	0	5,45	7,25
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	-		0,69	0,72
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	-		9,52	11,11
9	Indeks Williamson	Poin	-		0,29	0,28
10	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	-		3,82	3,874
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,98	4,77	4,47	5,91
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	-		51,94	52,52
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66	75,67	73,73	74
14	Indeks Gini	Poin	0,34	0,36	0,35	0,34
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	6,74	5,88	5,31
16	Angka Kemiskinan	%	8,11	8,68	7,45	6,67
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	-		65	70
18	Nilai SAKIP	Poin	CC		60	65
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	-		3,51	3,7
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	6,5	5,42	6,5	6,1
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	-		0,001	0,001

Sumber data : RPJMD Kab Barru 2021-2026

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Asumsi Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021 dan Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023

No				Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
1				ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	1			KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1	1	1		Tingkat kemiskinan	%	7,45	6,67
1	1	2		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,91
1	1	3		PDRB per kapita	Juta Rp	43,9	47,08
1	1	4		Indeks Gini	Poin	0,35	0,34
1	1	5		Laju inflasi	%	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0
1	1	6		Indeks Williamson	Poin	0,29	0,28
1	2			KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1	2	1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,79	72,16
1	2	2		Tingkat pengangguran terbuka	%	5,88	5,31
1	2	3		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,62
1	2	4		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53	8,77
1	2	5		Angka usia harapan hidup	Tahun	69,05	69,06
1	2	6		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,58	95,62
1	2	7		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,1	64,15
2				ASPEK PELAYANAN UMUM			
2	2			Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
2	2	1		Pendidikan			
2	2	1	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,55	93,05
2	2	1	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,49	95,37
2	2	1	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,57	94,5
2	2	1	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	80,71	87,14
2	2	1	5	1 Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	105,8	106,6
2	2	1	5	2 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	107,81	108,63
2	2	1	6	1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	94,49	95,37
2	2	1	6	2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	91,57	94,5
2	2	1	7	1 Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	100	100
2	2	1	7	2 Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	100	100
2	2	1	8	1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0
2	2	1	8	2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0
2	2	1	9	1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
2	2	1	9	2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
2	2	1	10	1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
2	2	1	10	2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
2	2	1	11	1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95,67	96,39
2	2	1	11	2 Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	55,84	56,26
2	2	1	12	1 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	104,2	104,99
2	2	1	12	2 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	56,75	57,18
2	2	1	13	1 Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)		1048,87	1040,9
2	2	1	13	2 Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)		718,95	713,48
2	2	1	14	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,25	99,31
2	2	1	15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,34	90,02
2	2	2		Kesehatan			
2	2	2	1	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	1,84	1,75

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	100	100
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	0,2	0,19
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	1,45	1,24
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	56	47
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	0,27	0,28
2	2	2	7		Rasio tenaga medis persatuan penduduk	angka per 1000	0,44	0,45
2	2	2	8		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,1	0,5
2	2	2	9		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100
2	2	2	10		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100
2	2	2	11		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100
2	2	2	12		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100
2	2	2	13		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	62,4	63,1
2	2	2	14		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	65,4	66,1
2	2	2	15		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	58,4	59,1
2	2	2	16		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	80,4	81,1
2	2	2	17		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2	2	2	18		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100
2	2	2	19		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100
2	2	2	20		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100
2	2	2	21		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	73,8	74,7
2	2	2	22		Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100
2	2	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	2	3	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	5,71	6,54
2	2	3	2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	30,21	31,04
2	2	3	3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	52,66	54,49
2	2	3	4		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	54	56
2	2	3	5		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	97,75	98,31
2	2	3	6		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	93,24	95,49
2	2	3	7		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100
2	2	3	8		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	83,18	84,01
2	2	3	9		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,36	72,19
2	2	3	10		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100
2	2	3	11		Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	100	100
2	2	3	12		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,06	0,06
2	2	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman			
2	2	4	1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100
2	2	4	2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100
2	2	4	3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	73,9	75,37
2	2	4	4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,63	3,29
2	2	4	5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	36,85	38,32
2	2	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
2	2	5	1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	2	5	2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	100	100
2	2	5	3		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Per 10.000 pddk	0,44	0,56
2	2	5	4		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100
2	2	5	5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	24443	25319
2	2	5	6		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	26843	27819
2	2	5	7		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100
2	2	5	8		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100
2	2	5	9		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100
2	2	5	10		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15
2	2	6			Sosial			
2	2	6	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100
2	2	6	1		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100
2	2	6	1		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	70	80
2	2	6	2		Presentase PMKS yang tertangani	%	70	80
2	3				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
2	3	1			Tenaga Kerja			
2	3	1	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	58	66
2	3	1	2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	56,86	58,46
2	3	1	3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	53	61
2	3	1	4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	42,88	52,16
2	3	1	5		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	9,8	12,1
2	3	1	6		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		70,53	71,07
2	3	1	7		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0
2	3	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	3	2	1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	13,65	13,85
2	3	2	2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,19	0,28
2	3	2	3		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,75	19,01
2	3	2	4		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	21,12	21,7
2	3	2	5		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,38	0,33
2	3	2	6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
2	3	2	7		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100
2	3	2	8		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100
2	3	3			Pangan			
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama	%	46,78	46,92
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	65	68
2	3	4			Pangan			
2	3	4	1		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100
2	3	4	2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	64	71
2	3	4	3		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100	100
2	3	4	4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	1,1	1,4
2	3	5			Lingkungan Hidup			

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	3	5	1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	73	74,26
2	3	5	2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	81,26	81,63
2	3	5	3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA	Persen	100	100
2	3	5	4		Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/Tidak ada	Ada	Ada
2	3	5	5		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada
2	3	5	6		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tidak ada	ADA	ADA
2	3	5	7		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	59	62
2	3	5	8		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	91	91,84
2	3	5	9		Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan	poin	70	71
2	3	5	10		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	6,24%	7,17%
2	3	5	11		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	%	100	100
2	3	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	3	6	1		Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100
2	3	6	2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran	Persen	45	45
2	3	6	3		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	14	22
2	3	6	4		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		100	100
2	3	6	5		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100
2	3	6	6		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		ADA	ADA
2	3	6	7		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah
2	3	6	8		Cakupan Penerbitan KTP	%	100	100
2	3	6	9		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	98	98,5
2	3	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2	3	7	1		Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	37,22	45,22
2	3	7	2		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	1	1
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1 Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok Binaan LPM
2	3	7	4		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		41,65	42,8
2	3	7	5		Presentase LPM Berprestasi	%	32,36	36,49
2	3	7	6		Presentase PKK aktif	%	100%	100%
2	3	7	7		Presentase Posyandu aktif	%	100%	100%
2	3	7	8		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30%	30%
2	3	7	9		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50%	50%
2	3	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	3	8	1		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	70,36	72,3
2	3	8	2		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,15	1
2	3	8	3		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,65	18,13
2	3	8	4		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14,68	15,08
2	3	8	5		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	52,89	54,35
2	3	8	6		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	47,66	48,97
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	31,78	32,66
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	35,02	35,98
2	3	8	9		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100%	100%
2	3	8	10		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		950,37	976,6
2	3	8	11		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100%	100%
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	55,9	58,34

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100%	100%
2	3	8	15		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100%	100%
2	3	8	16		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100%	100%
2	3	8	17		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100%	100%
2	3	8	18		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%	100%
2	3	9			Perhubungan			
2	3	9	1		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Nilai	72,55	72,89
2	3	9	2		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Nilai		
2	3	9	3		Jumlah arus penumpang angkutan umum	jiwa	1.909.104	2.096.196
2	3	9	4		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		11	11
2	3	9	5		Presentase layanan Angkutan darat	%	99	100
2	3	9	6		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		927.605 Orang, 12.709 Ton	931.890 Orang, 13.093 Ton
2	3	9	7		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		1.881.879 Orang, 9.785.137 Ton	1.893.899 Orang, 9.792.798 Ton
2	3	10			Komunikasi dan Informatika			
2	3	10	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100
2	3	10	2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100
2	3	10	3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	97	98
2	3	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
2	3	11	1		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	36,81	37,91
2	3	11	2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	44,78	46,88
2	3	11	3		Persentase koperasi aktif	%	76,31	79,89
2	3	11	4		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	95,2	95,87
2	3	11	5		Presentase BPR/LKM Aktif	%	73,88	75,14
2	3	11	6		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,84	99,87
2	3	12			Penanaman Modal			
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		122,0461	124,1209
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rp	867.333.213.707	873.404.546.203
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		17,29968	17,42077
2	3	13			Kepemudaan dan Olahraga			
2	3	13	1		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,7	0,91
2	3	13	2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	13,30%	15,30%
2	3	13	3		Peningkatan prestasi olahraga	Persen	24,8	26,1
2	3	13	4		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100
2	3	13	5		Presentase wirausaha muda	%	13,79	14,02
2	3	13	6		Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100
2	3	13	7		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	6,8	7,59
2	3	13	8		Jumlah atlet berprestasi		1	2
2	3	13	9		Cakupan pembinaan atlet muda	%	73,33	74,58
2	3	13	10		Jumlah Prestasi olahraga		1	2
2	3	14			Statistik			
2	3	14	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	82	84
2	3	14	2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	82	84
2	3	14	3		Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	3	14	4		Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada
2	3	15			Persandian			
2	3	15	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100	100
2	3	15	2		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,7	2,7
2	3	16			Kebudayaan			
2	3	16	1		Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100
2	3	16	2		Penyelenggaraan festival seni dan budaya		9	10
2	3	16	3		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		82,74	84,15
2	3	16	4		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		6	10
2	3	16	5		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		30	32
2	3	17			Perpustakaan			
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	125445	127577
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	60697	61729
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,3	0,3
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	2
2	3	18			Kearsipan			
2	3	18	1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Nilai	54,5	57,5
2	3	18	2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	56	59
2	3	18	3		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100
2	3	18	4		Peningkatan SDM pengelola kearsipan		2	3
2	4				Pelayanan Urusan Pilihan			
2	4	1			Kelautan dan Perikanan			
2	4	1	1		Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	26814,23	27350,51
2	4	1	2		Produksi perikanan		26222,53	26563,42
2	4	1	3		Konsumsi ikan		46,37	46,52
2	4	1	4		Cakupan bina kelompok nelayan	%	79	85
2	4	1	5		Produksi perikanan kelompok nelayan		12943	13058
2	4	2			Pariwisata			
2	4	2	1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	3	3
2	4	2	2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	5	5
2	4	2	3		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,03	1,04
2	4	2	4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,97	1,01
2	4	3			Pertanian			
2	4	3	1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	6,98	7,48
2	4	3	2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,33	0,3
2	4	3	3		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	54,24	54,65
2	4	3	4		Cakupan bina kelompok petani	%	12,11	12,2
2	4	4			Perdagangan			
2	4	4	1		Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	25,32	31,65
2	4	4	2		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	59,01	59,81
2	4	4	3		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	89,79	90,59
2	4	4	4		Ekspor Bersih Perdagangan	RP	103.166.478	107.293.137
2	4	4	5		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	28,82	31,87
2	4	5			Perindustrian			
2	4	5	1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota	Persen	6,41	7,41

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	4	5	1		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	54	56
2	4	5	1	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100
2	4	5	1		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	15	15,34
2	5				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
2	5	1			Sekretariat Daerah			
2	5	1	1		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	27,19	28,49
2	5	1	2		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Poin	21,6	21,8
2	5	2			Sekretariat Dewan			
2	5	2	1		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota		Ada	Ada
2	5	2	2		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada
2	5	2	3		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada
2	6				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
2	6	1			Perencanaan Pembangunan			
2	6	1	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		ADA	ADA
2	6	1	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		ADA	ADA
2	6	1	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA		ADA	ADA
2	6	1	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		ADA	ADA
2	6	1	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
2	6	1	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
2	6	2			Keuangan			
2	6	2	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP
2	6	2	2		Persentase SILPA	%	5	5
2	6	2	3		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20
2	6	2	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10
2	6	2	5		Penetapan APBD		30-Nov-21	30-Nov-22
2	6	2	6		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	6,43	5,83
2	6	2	7		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	4,44	3,84
2	6	2	8		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		7,23	6,63
2	6	3			Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
2	6	3	1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	4,81	6,01
2	6	3	2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,07	26,07
2	6	3	3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40	41
2	6	3	4		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	20	20
2	6	3	5		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	15	20
2	6	3	6		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	68	72
2	6	3	7		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	29
2	6	3	8		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	200	200
2	6	3	9		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3.345	3.345
2	6	4			Penelitian dan Pengembangan			
2	6	4	1		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100
2	6	4	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100
2	6	4	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	100	100
2	6	4	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Asumsi capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
2	6	5			Pengawasan			
2	6	5	1		Persentase tindak lanjut temuan	%	100	100
2	6	5	2		Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0
2	6	5	3		Jumlah temuan BPK		10	9
2	6	5	4		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3
2	6	5	6		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	3	3

Sumber Data : RPJMD Kab.Barru 2021-2026

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Capaian Indikator SPM Tahun 2021 dan Target Indikator SPM
Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak usia dini	100%	91,38	88,05	91,55
2	Pendidikan Dasar (SD)	100%	96,83	93,99	94,49
	Pendidikan Dasar (SMP)	100%	95,31	90,5	91,57
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	84,19	71,21	80,71
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	100%	N/A	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100%	N/A	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100%	N/A	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100%	N/A	62,4	63,1
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	100%	N/A	65,4	66,1
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100%	N/A	58,4	59,1
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100%	N/A	80,4	81,1
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	N/A	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	100%	N/A	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	N/A	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	100%	N/A	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	100%	N/A	73,8	74,7
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95,61	96,7 %	97,75	98,31
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	88,74	100%	93,24	95,49
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	N/A	100%	100%
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	N/A	100%	100%
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN					
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%
2	pelayanan informasi rawan bencana	100%	80%	100%	100%
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	40%	100%	100%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2021	Rencana Capaian 2022	Target 2023
SPM SOSIAL					
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : OPD Pengelola SPM Tahun 2022

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 6.5
Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG) Kab. Barru Tahun 2023

Kode Indikator	Indikator SDGs Kabupaten Barru	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Instansi Pelaksana
TUJUAN 1. Tanpa Kemiskinan					
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BAPPELITBANGDA	%	8,57	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUTR dan PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMDPPKBPPPA, Bag. Kesra, BAPPELITBANGDA, Dinas Koperindag
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.					
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Kesehatan	Orang	37242	Dinas Sosial
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	100	Dinas PUTR dan PERKIM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	100	Dinas PUTR dan PERKIM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	99,01	Dinas Pendidikan
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa/100.0000 org	0	BPBD & Satpol PP DAMKAR
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Desa	7	BPBD & Satpol PP DAMKAR
1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	BPBD	Jiwa	293	DINAS SOSIAL
1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	DINAS SOSIAL	Jiwa	0,00	BPBD & DINAS SOSIAL
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rp	210.983.290,00	BPBD & Satpol PP DAMKAR
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Dok	ADA	BPBD & Satpol PP DAMKAR
1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.					

Kode Indikator	Indikator SDGs Kabupaten Barru	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Instansi Pelaksana
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BAPPELITBANGDA	%	1,55	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUTR dan PERKIM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMDPPKBPPPA, Bag.Kesra, BAPPELITBANGDA, Dinas Koperindag
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan					
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.					
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	8,29	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Kesehatan	%	37,28	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Kesehatan	%	93,41	Dinas Ketahanan Pangan
TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera					
3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Poin	0,67	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Poin	4,08	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	0,0041	Dinas Kesehatan
3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Poin	0,07	Dinas Kesehatan
3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional					
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas PMDPPKBPPPA	%	18,33	Dinas PMDPPKBPPPA
3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	82,55	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas					
4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					

Kode Indikator	Indikator SDGs Kabupaten Barru	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Instansi Pelaksana
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	%	100	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	103	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	Dinas Pendidikan	Persen	79,69	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	Dinas Pendidikan	Persen	95,22	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	Dinas Pendidikan	Persen	97,09	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5. Kesenjangan Gender					
5.1.Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.					
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PMDPPKBPPPA	keg	7	Dinas PMDPPKBPPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas PMDPPKBPPPA	Persen	9,09	Dinas PMDPPKBPPPA
5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas PMDPPKBPPPA	%	13,96	Dinas PMDPPKBPPPA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Dinas PMDPPKBPPPA	%	87,29	Dinas PMDPPKBPPPA
TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Yang Layak					
6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.					
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Kesehatan	%	100	Dinas PUTR dan PERKIM
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	100	Dinas PUTR dan PERKIM
6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.					
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUTR dan PERKIM	kk	2450	Dinas PUTR dan PERKIM
6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.					
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas PUPR	%	80,56	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 8. Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					

Kode Indikator	Indikator SDGs Kabupaten Barru	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Instansi Pelaksana
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	Persentase	6,19	Dinas PMPTSPNaker, DISPARPORA, Dinas Koperasi, UKM & Dag, Dinas Pemuda dan OR, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	50.079.000	Dinas PMPTSPNaker, DISPARPORA, Dinas Koperasi, UKM & Dag, Dinas Pemuda dan OR, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	51,09	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	48,32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	47,98	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja
8.5.Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.					
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	5,31	Dinas PMPTSPNaker
8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPARPORA	org	544	DISPARPORA
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISPARPORA	Persen	29,5	DISPARPORA
TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan					
10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.					
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dinas Tenaga Kerja	Dok	Belum ada	Dinas Tenaga Kerja
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja	Jiwa	37242	Dinas Tenaga Kerja
TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan					

Kode Indikator	Indikator SDGs Kabupaten Barru	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Instansi Pelaksana
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Lembaga	Belum ada	Dinas PUTR dan PEKIM
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dok	Ada	BPBD
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	jiwa	0,01	BPBD & Satpol PP DAMKAR
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rp	210.983.290,00	BPBD & Satpol PP DAMKAR
11.6 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.					
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	97,83	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13. Penanganan Perubahan Iklim					
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	JIWA	0,01	BPBD & Satpol PP DAMKAR
TUJUAN 15. Ekosistem Daratan					
15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.					
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas LH	Dok	1	Dinas LH
TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh					
16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.					
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kepolisian	Persen	0	Badan Kesbangpol & Satpol PP DAMKAR
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi	Poin	B	Bag. Organisasi
16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					

Kode Indikator	Indikator SDGs Kabupaten Barru	Sumber Data	Satuan	Target 2023	Instansi Pelaksana
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Dukcapil	Persen	95,27	Dinas Dukcapil
6.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.					
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Dukcapil	Sertifikat	2	Dinas Dukcapil
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.					
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dinas Dukcapil	Dok	Belum ada	Dinas Dukcapil
TUJUAN 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan					
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	Rp	Rp 1.065.343.412.067	

Sumber Data : RPJMD Kab Barru 2021-2026

BAB VII

P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barru pada Tahun 2023. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, diarahkan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dengan tetap bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat;
- b. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
- c. Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berbasis pada *e-planning*;
- d. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dengan berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023;
- e. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
- g. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 bila diperlukan;
- h. RKPD Kabupaten barru Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023;
- i. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7.2. Kesimpulan

- 1. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023 dalam penyusunannya telah menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, Pendekatan Top-Down, dan Pendekatan Politis sehingga diharapkan akan dihasilkan dokumen perencanaan yang memenuhi asas akuntabilitas dan kemanfaatan;
- 2. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya;
- 3. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023;
- 4. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan melalui APBD Prov.Sulsel maupun sumber dana lainnya;

5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing

Barru, 1 Juli 2022

